



**NASIONAL RE**

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA

***Menuju yang Terbaik dan  
Terbesar ditengah Persaingan***

Becoming The Best and The Biggest Amidst Competition

***services***

***speed***

***commitment***

Laporan Tahunan - Annual Report 2014



# PENJELASAN TEMA

## THEME EXPLANATION

Laporan Tahunan – Annual Report  
**2014**



### *Menuju yang Terbaik dan Terbesar ditengah Persaingan*

**Becoming The Best and The Biggest Amidst Competition**

#### Konsep Visual/Visual Concept

Semangat Profesional para insan NASIONAL RE di semua lini berpacu dalam percepatan pencapaian dan harapan bersama dengan lebih melayani sesuai komitmen.

With the spirit of Professionalism, NASIONAL RE personnel in every line of business move fast ahead, in accelerating the achievement and expectation, while keeping up with the commitment to serving better.

#### Cover Story

Dengan niat, tekad dan semangat, NASIONAL RE berpacu, melaju untuk menunjukkan komitmen dan mewujudkan pencapaian pertumbuhan yang signifikan di tengah persaingan.

With full intention, determination and spirit, NASIONAL RE races and moves fast ahead to show its commitment and to achieve significant growth in the midst of competition.

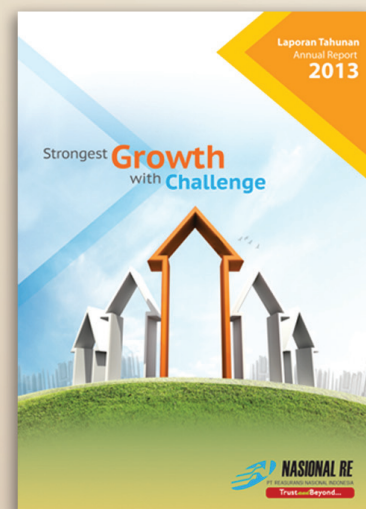
Laporan Tahunan – Annual Report  
**2011**



Laporan Tahunan – Annual Report  
**2012**



Laporan Tahunan – Annual Report  
**2013**





## Pencapaian Tahun 2014

Achievement in 2014

Di tengah situasi perekonomian yang kurang menggembirakan, PT Reasuransi Nasional Indonesia mampu melalui tahun 2014 dengan catatan kinerja yang memuaskan. Perusahaan mampu memenuhi sejumlah target yang ditetapkan, antara lain perolehan laba setelah pajak dan zakat, total aset perusahaan, penilaian kinerja manajemen, serta penerapan GCG. Rangkaian pencapaian NASIONAL RE selama beberapa tahun terakhir membuktikan komitmennya yang kuat untuk mewujudkan visi sebagai perusahaan reasuransi terdepan di Indonesia.

In the midst of unfavourable economic situation, PT Reasuransi Nasional Indonesia managed to navigate through the year 2014 with a record of a satisfactory performance. The Company is able to meet a number of targets, among others, profit after tax and zakat, total assets, management performance evaluation and implementation of GCG. With a series of achievement over the past few years, NASIONAL RE has proven its strong commitment to realizing the vision of becoming a leading reinsurance company in Indonesia.

Direksi Perusahaan telah mengambil langkah-langkah strategis yang tepat di tengah dinamika perekonomian dan industri asuransi di Indonesia. Karyawan Perusahaan juga telah menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya untuk meraih yang terbaik.

The Board of Directors has taken the right strategic measures in the middle of the dynamics of Indonesian economy and insurance industry. The employees have shown their unwavering dedication and hard work to achieve the best.

### Penilaian Kinerja *Key Performance Indicators* (KPI) dari Pemegang Saham memperoleh nilai tertimbang sebesar 101,8 dari target 100

The assessment on Key Performance Indicators (KPI) provided by Shareholders resulted in a weighted score of 101.8 out of target 100

### Tingkat kesehatan Perusahaan memperoleh skor 75,0 dengan predikat "Sehat A"

The Soundness of the Company scored 75.0 with predicate of "Healthy A"

### Hasil *self assessment* implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan kriteria penilaian OJK, memperoleh skor total 90,64

The self assessment on the implementation of Good Corporate Governance (GCG) based on FSA criteria scored 90.64

### Hasil *assessment* implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Versi Kementerian BUMN memperoleh skor total 83,08

The Assessment on Good Corporate Governance (GCG) based on SOE Ministry scored 83.08

### Laba Bersih tahun 2014 sebesar Rp131.08 miliar, meningkat 80,61% dibanding tahun 2013 sebesar Rp72.577 miliar

Net profit for 2014 amounting to Rp131,08 billion, increased by 80.61% as compared to Rp72,577 billion of 2013

### Hasil *Assessment* Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) tahun 2014 dengan skor total 420,25

Assessment based on Criteria for Business Performance Excellence 2014 scored 420.25

### Audit IT Cobit 4.1 tahun 2014 dengan skor total 2,38 (skala 1-5)

IT Audit Cobit 4.1 in 2014 scored 2.38 (scales: 1-5)

### Pemeringkatan perusahaan tahun 2014 oleh PEFINDO dengan predikat <sub>id</sub>A

Company rating 2014 by PEFINDO, with predicate <sub>id</sub>A



# DAFTAR ISI

## Contents

## Contents

- ii Penjelasan Tema  
Theme Explanation
- 1 Pencapaian Tahun 2014  
Achievement In 2014
- 2 Daftar Isi  
Contents
- 5 Pernyataan Kesesuaian Penyusunan Laporan Tahunan PT Reasuransi Nasional Indonesia tahun 2014  
Statement of Compliance of the Preparation of the Annual Report 2014 of PT Reasuransi Nasional Indonesia
- 6 Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
OJK References

## 25 IKHTISAR KEUANGAN DAN SAHAM

### FINANCIAL HIGHLIGHTS & SHARE

- 26 Ikhtisar Keuangan dan Saham  
Financial Highlight & Share
- 26 Ikhtisar Keuangan Penting - 5 Tahun/  
Financial Highlights - 5 Years
- 26 Rasio Keuangan Penting - 5 Tahun Yang Umum Dan Relevan Dengan Industri Perusahaan Terkait  
Financial Ratios - 5 Years Are Common and Relevant to Related Industry

## 31 LAPORAN MANAJEMEN

### MANAGEMENT REPORT

- 33 Laporan Dewan Komisaris  
Report From The Board of Commissioners
- 39 Laporan Direksi  
Report From The Board of Directors
- 44 Teknologi Informasi  
Teknologi Informasi
- 47 Komposisi Direksi  
Composition Of The Board Of Directors
- 50 Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dan Direksi Atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2014  
Statement of The Board Of Commissioners and Board of Directors About Responsibility For The Annual Report PT Reasuransi Nasional Indonesia 2014.

## 53 PROFIL PERUSAHAAN

### COMPANY PROFILE

- 54 Nama, Alamat dan Informasi Umum Perusahaan  
Company, Name, Address and General Information
- 55 Maksud Dan Tujuan Usaha  
Goals and Objectives
- 56 Struktur Organisasi  
Organization Structure
- 58 Riwayat Singkat Perusahaan  
A Brief History of The Company
- 60 Jejak Langkah  
Milestones
- 63 Kegiatan Usaha dan Aktifitas Usaha  
Business Activities
- 65 Visi dan Misi  
Vision And Mission
- 66 Nilai-Nilai Perusahaan  
Corporate Values
- 67 Penghargaan dan Sertifikasi  
Award And Certification
- 68 Profil Dewan Komisaris  
Profile Board Of Commissioners
- 70 Profil Direksi  
Profile Board Of Director
- 72 Kepala Divisi  
Senior Manager
- 74 Pengurus Perusahaan  
The Management
- 78 Komposisi Pemegang Saham  
Composition of Shareholders
- 79 Wilayah Operasi  
Regional Operations
- 80 Peristiwa Penting  
Event Highlights

## 83 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

### MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

- 84 Tinjauan Bisnis  
Business Review
- 84 Perekonomian Global 2014  
Global Economy In 2014
- 84 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2014  
Indonesian Economic Growth In 2014



- 85** Tinjauan Industri  
*Industry Review*
- 86** Tinjauan Kinerja Per Segmen Bisnis  
*Business Segment Performance Review*
- 88** Aspek Pemasaran  
*Aspects of Marketing*
- 89** Tinjauan Pendukung Bisnis  
*Business Support*
- 89** Pengelolaan Sumber Daya Manusia  
*Human Resource Management*
- 100** Pengelolaan Teknologi Informasi  
*Management of Information Technology*
- 108** Tinjauan Keuangan  
*Financial Review*
- 123** Analisis Posisi Keuangan  
*Analysis on Financial Position*
- 130** Laporan Arus Kas  
*Statements of Cash Flows*
- 130** Analisis Kemampuan Membayar Hutang  
*Analysis of Debt Paying Ability*
- 131** Struktur Modal  
*Capital Structure*
- 131** Kebijakan Struktur Permodalan  
*Capitalization Structure Policy*
- 131** Investasi Barang Modal  
*Capital Goods Investment*
- 131** Ikatan Material Untuk Investasi Belanja Modal  
*Material Commitment for Capital Expenditure*
- 131** Kenaikan Pendapatan Atau Beban Yang Material  
*Material Increased in Income of Expenses*
- 132** Dampak Perubahan Harga  
*Effect of Price Changes*
- 132** Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan  
*Material Facts and Information After The Date of Accountant's Report*
- 132** Kebijakan Dividen  
*Dividend Policy*
- 132** Kontribusi Kepada Negara  
*Contributions to The Nation*
- 132** Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai  
*Derivatives and Hedging Activities*
- 132** Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum  
*Realization of The Use of Proceeds From The Public Offering*
- 132** Informasi Keuangan Luar Biasa dan Jarang Terjadi  
*Extraordinary and Rare Financial Information*
- 133** Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi  
*Material Transaction Information that Contain Conflict of Interest or Affiliated Transactions with Related Parties*

- 133** Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi Atau Restrukturisasi Hutang/Modal  
*Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisitions and Debt/Capital Restructuring*
- 133** Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Dan Dampaknya Terhadap Perusahaan  
*Legislation Amendment And Its Impact for The Company*
- 133** Perubahan Kebijakan Akuntansi  
*Changes In Accounting Policies*
- 137** Key Performance Indicators (KPI) dan Tingkat Kesehatan Perusahaan  
*Key Performance Indicators (KPI) And The Soundness of The Company*
- 138** Prospek Usaha  
*Business Prospects*

## 141 TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE REPORT

- 149** Rapat Umum Pemegang Saham  
*General Meetings of Shareholders*
- 153** Dewan Komisaris  
*Board Of Commissioners*
- 163** Direksi  
*The Board of Directors*
- 177** Komite-Komite di Bawah Komisaris  
*Committees Under The Board of Commissioners*
- 182** Komite-Komite di Bawah Direksi  
*Committees Under The Board of Directors*
- 190** Sekretaris Perusahaan  
*Corporate Secretary*
- 194** Auditor Eksternal  
*External Auditor*
- 195** Sistem Pengendalian Internal  
*Internal Control System*
- 200** Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan  
*Legal Cases*
- 200** Akses Informasi  
*Information Access*
- 200** Kode Etik  
*Code of Conduct*
- 202** Whistle Blowing System  
*Whistle Blowing System*
- 204** Manajemen Risiko Perusahaan  
*Enterprise Risks Management*

## 217 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

## 223 LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL REPORT





# Pernyataan Kesesuaian Penyusunan Laporan Tahunan PT Reasuransi Nasional Indonesia tahun 2014

Statement of Compliance of the Preparation of  
the Annual Report 2014 of PT Reasuransi Nasional Indonesia

Dengan ini kami menyatakan bahwa Laporan Tahunan PT Reasuransi Nasional Indonesia tahun 2014 ini telah disusun sesuai dengan kriteria penyusunan Laporan Tahunan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Bank Indonesia (BI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta kriteria penyusunan Laporan Tahunan untuk penilaian *Annual Report Award* (ARA).

Untuk memudahkan, referensi kesesuaian Kriteria Laporan Tahunan ini beserta dengan petunjuk halamannya dapat dilihat pada halaman 6 sd 23 pada Laporan Tahunan ini.

Hereby we declare that the Annual Report 2014 of PT Reasuransi Nasional Indonesia has been prepared with due observance to the criteria of the preparation of Annual Report issued by the Ministry of State Owned Enterprises, Financial Service Authority, Directorate General of Tax, Bank Indonesia (BI), National Committee on Corporate Governance (KNKG), Indonesia Rating Agency (Pefindo) and Indonesia Accounting Association (IAI), as well as the criteria applied for Annual Report Award (ARA) assessment.

Cross Reference of Annual Report Criteria and page navigation can be found on page 6 to 23 in this Annual Report.

Hormat kami/Best Regards



Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®  
Sekretaris Perusahaan  
Corporate Secretary



# Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

## OJK References

No.	Kriteria/Criteria	Penjelasan/Explanation	Halaman/Page
<b>I. Umum</b>			
1.	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris/ <i>The annual report is presented in proper Bahasa Indonesia with recommendation to also be presented in English.</i>		
2.	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca/ <i>The annual report is printed on brightly colored paper for readability and clarity.</i>		
3.	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas/ <i>The annual report clearly publishes the company's identity.</i>	Nama perusahaan dan tahun <i>annual report</i> ditampilkan di/ <i>The Name of Company and Year of Annual Report are displayed on the:</i> 1. Sampul muka/ <i>Cover</i> ; 2. Samping/ <i>Side</i> ; 3. Sampul belakang; dan/ <i>Back Cover</i> ; and 4. Setiap halaman/ <i>Every page</i> .	
4.	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan/ <i>Annual report is displayed on the Company's website</i>	Mencakup laporan tahunan terkini dan tahun-tahun sebelumnya. <i>Includes the latest annual report and previous years</i>	
<b>II. Ikhtisar Data Keuangan Penting/Financial Highlights</b>			
1.	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun/ <i>Information on Company's results of operations in the form of 3 (three) years comparison or from the start of business, if the Company has conducted business activities for less than 3 (three) years.</i>	Informasi memuat antara lain/ <i>Information includes, among others:</i> 1. Penjualan/pendapatan usaha/ <i>Sales/Revenue</i> ; 2. Laba (rugi)/ <i>Income (loss)</i> ; 3. Total laba (rugi) komprehensif; dan/ <i>Total comprehensive income (loss)</i> 4. Laba (rugi) per saham/ <i>Earnings (loss) per share.</i>	
2.	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun/ <i>Information about the financial position of the company in the form of comparisons for 3 (three) financial years, or since starting his business if the company has been in business for less than 3 (three) years.</i>	Informasi memuat antara lain/ <i>Information includes, among others:</i> 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi/ <i>Total investments in associates</i> ; 2. Jumlah aset/ <i>Total Assets</i> ; 3. Jumlah liabilitas; dan/ <i>Total Liabilities</i> ; and 4. Jumlah ekuitas/ <i>Total Equity.</i>	
3.	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun/ <i>Financial ratio in the form of 3 (three) years comparison or from the start of business, if the Company has conducted business activities for less than 3 (three) years.</i>	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan/ <i>Information includes 5 (five) financial ratios that are general and relevant to the company.</i>	
4.	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik/ <i>Stock price information in tables and charts.</i>	1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat/ <i>Information with tables and charts which expose:</i> a. Jumlah saham yang beredar/ <i>Total shares outstanding</i> ; b. Kapitalisasi pasar/ <i>Market Capitalization</i> ; c. Harga saham tertinggi, terendah dan penutupan; dan/ <i>Highest, lowest and closing price of stock</i> ; and d. Volume perdagangan/ <i>Trading Volume.</i> 2. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan dan volume perdagangan saham untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir/ <i>Information in the form of graphs that contains at least the closing price and trading volume of the stock.</i>	



No.	Kriteria/Criteria	Penjelasan/Explanation	Halaman/Page
5.	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir/ <a href="#">Information on outstanding bonds, sukuk or convertible bonds in the last 2 (two) financial years.</a>	Informasi memuat/ <a href="#">The information includes:</a> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding)/<a href="#">Total of bonds/sukuk/convertible bonds outstanding;</a></li> <li>2. Tingkat bunga/imbalan/<a href="#">Interest Rate/Return;</a></li> <li>3. Tanggal jatuh tempo; dan/<a href="#">Expiry date; and</a></li> <li>4. Peringkat obligasi/sukuk/<a href="#">Bonds/sukuk rating.</a></li> </ol>	
<b>III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi/Report of the Board of Commissioners and Report of the Board of Director</b>			
1.	Laporan Dewan Komisaris/ <a href="#">Report of the Board of Commissioners</a>	Memuat hal-hal sebagai berikut/ <a href="#">Includes the following:</a> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya;/<a href="#">Assessment on the Board of Directors' Performance in Managing the Company</a></li> <li>2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya;/<a href="#">View on the Company's business prospect prepared by the Board of Directors</a></li> <li>3. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada dibawah Dewan Komisaris; dan/<a href="#">Assesment on the performance of committees under the Board of Commissioners; and</a></li> <li>4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada)/<a href="#">Changes in the Board of Commissioners' composition and its reasons (when available)</a></li> </ol>	
2.	Laporan Direksi/ <a href="#">Report of the Board of Directors</a>	Memuat hal-hal sebagai berikut/ <a href="#">Includes the following:</a> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan/<a href="#">Analysis on the Company's performance that include strategic policy, achieved results to target ratio, obstacles that the Company faced.</a></li> <li>2. Analisis tentang prospek usaha/<a href="#">Analysis on business prospects</a></li> <li>3. Penerapan tata kelola perusahaan; dan/<a href="#">Implementation of good corporate governance, and</a></li> <li>4. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada)/<a href="#">Changes in the Board of Directors' composition and its reasons (when available)</a></li> </ol>	

No.	Kriteria/Criteria	Penjelasan/Explanation	Halaman/Page
3.	Tanda tangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/ Signatures of the Board of Directors and Board of Commissioners	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut/Includes the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri/ Signatures are placed in a separate page</li> <li>2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;/A statement that the Board of Directors and Board of Commissioners are fully responsible for the accuracy of the Annual Report's content.</li> <li>3. Ditandatangani seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan/Signed by all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, with name and title</li> <li>4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau: penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan./Written explanation in a separate letter in by any member of the Board of Commissioners or Directors who did not sign the annual report, or, written explanation in a separate letter by the other members should the written explanation is not available.</li> </ol>	
<b>IV. Profil Perusahaan/Company Profile</b>			
1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan/The Company's name and full address.	Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, No. Telp, No. Fax, email dan website./Information which contain name and address, zip code, telephone & fax number, email and website	
2.	Riwayat singkat perusahaan/A brief history of the Company.	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama dan perubahan nama perusahaan (jika ada)./Including: date/year of establishment, name and change(s) to the Company's name (if any).	
3.	Bidang usaha/Business	<p>Uraian mengenai antara lain:/Descriptions on, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;/The Company's business activities according to the latest Articles of Association;</li> <li>2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan/Business activities; and</li> <li>3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan/Description of products and/or services;</li> </ol>	
4.	Struktur Organisasi/Organizational Structure	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi./In the form of chart, including the name and position of at least up to one level below the Board of Directors .	
5.	Visi dan Misi Perusahaan/Company's vision and mission	<p>Mencakup:/Includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi perusahaan;/The Company's vision;</li> <li>2. Misi perusahaan; dan/The Company's mission; and</li> <li>3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris./A statement declaring that the vision and mission have been approved by the Board of Directors/Board of Commissioners</li> </ol>	

No.	Kriteria/Criteria	Penjelasan/Explanation	Halaman/Page
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris/ Brief background information of the Board of Commissioners	Informasi memuat antara lain:/Information includes, among others: 1. Nama;/Name 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);/Positions (including position(s) in other companies or institutions) 3. Umur;/Age 4. Pendidikan;/Education 5. Pengalaman kerja; dan;/Working experience 6. Tanggal penunjukkan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris;/Date of first appointment as a member of the Board of Commissioners	
7.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi/Brief background information of the Board of Directors.	Informasi memuat antara lain:/Information includes, among others: 1. Nama;/Name 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);/Positions (including position(s) in other companies or institutions) 3. Umur;/Age 4. Pendidikan;/Education 5. Pengalaman kerja; dan;/Working experience 6. Tanggal penunjukkan pertama kali sebagai anggota Direksi;/Date of first appointment as a member of the Board of Directors	
8.	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)/ Number of Employees (2 years comparison) and a description of competence development (eg. Employees' education and training)	Informasi memuat antara lain:/Information includes, among others: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;/ The number of employees for each level of the organization 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;/The number of employees for each level of education 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian;/ The number of employees based on employment status; 4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan; dan;/Employee trainings that have been conducted to reflect equal opportunities to all employees; and 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan. /Incurred costs	
9.	Komposisi Pemegang Saham;/Composition of Shareholders	Mencakup antara lain:/Includes, among others: 1. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham;/Names of shareholders possessing owning 5% or more shares 2. Nama Direktur dan Komisaris yang memiliki saham;/ Directors and Commissioners who own shares 3. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%; dan persentase kepemilikannya;/Groups of community stakeholders share ownership of less than 5% each, along with the ownership percentages	



No.	Kriteria/Criteria	Penjelasan/Explanation	Halaman/Page
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi./List of Subsidiaries and/or Associates	Informasi memuat antara lain:/Information includes, among others: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi;/Name of Subsidiaries and/or Associates 2. Persentase kepemilikan saham ;/Percentage of share ownership 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan/Description of the Subsidiaries and/or Associates' business 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi)/Information on Subsidiaries and/or Associates operational status (has yet operated or not)	
11.	Struktur grup perusahaan./Company's group structure	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture dan special purpose vehicle (SPV)./Company's group structure which describes the structure of subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose vehicle (SPV), or a statement of no ownership of group	
12.	Kronologis pencatatan saham./Share Listing Chronology	Mencakup antara lain:/Includes, among others: 1. Kronologis pencatatan saham;/Share listing chronology 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah saham;/Types of corporate actions that prompt changes in the number of shares 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; dan/Changes to number of shares from the start of bookkeeping to the end of fiscal year 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatitkan./Names of stock markets where the shares are listed	
13.	Kronologis pencatatan efek lainnya./Listing chronology of other securities	Mencakup antara lain:/Includes the following: 1. Kronologis pencatatan efek lainnya;/Listing chronology of other securities 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya;/Types of corporate actions that prompt changes in the number of other securities 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku;/Changes in the number of other effects from the initial recording until the end of the fiscal year; 4. Nama Bursa dimana efek lainnya dicatitkan; dan/Names of stock markets where the the securities are listed 5. Peringkat efek./Securities rating	
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal./Name and address of capital market institutions and/or professionals	Informasi memuat antara lain:/Information includes, among others: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan;/Name and address of the Securities Administration Agency 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan/Name and address of the Public Accounting Firm 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek/Name and address of rating .	

No.	Kriteria/Criteria	Penjelasan/Explanation	Halaman/Page
15.	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional./Awards received in the last financial year and/or certification still valid in the last financial year both national and international scale	Informasi memuat antara lain:/Information includes, among others: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat;/Name of awards and/or certificates 2. Tahun perolehan;/Year received 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan/Award and/or certification issuer 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi)/Validity period (for certification)	
16.	Nama dan alamat entitas anak dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)/The name and address of its subsidiaries or branches or representative offices (if any).	Memuat informasi antara lain:/Information includes, among others: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan/Name and address of subsidiary; and 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan./Name and address of branch offices/representatives Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan./Note: if the company does not have subsidiaries/branches/representative, so disclosed	
<b>V. Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan/Management's Discussion and Analysis on the Company's Performance</b>			
1.	Tinjauan operasi per segmen usaha./Review of operations per operational segment	Memuat uraian mengenai:/Contains a description of: 1. Produksi/kegiatan usaha;/Production/operations; 2. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi;/The increase/decrease in production capacity; 3. Penjualan/pendapatan usaha; dan/Sales/revenue; 4. Profitabilitas./Profitability	
2.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan./Description of the Company's financial performance	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:/Financial performance analysis that includes a comparison between the financial performance of the relevant year and with previous years (both in narrative and tables), which covers the following: 1. Aset lancar, aset tidak lancar dan total aset;/Current assets, non-current assets and total assets; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas;/Short-term liabilities, long term liabilities and total liabilities 3. Ekuitas;/Equity 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), pendapatan komprehensif lain dan total laba (rugi) komprehensif; dan/Sales/revenues, expenses and net income (loss), other comprehensive income and total Comprehensive Income (loss) 5. Arus kas./Cash Flow	
3.	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan./Discussion and analysis of the Company's solvability and receivable collectability level, by presenting the calculation of relevant ratios.	Penjelasan tentang :/With details on: 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan/Short and long term solvability/Short and long term solvability 2. Tingkat kolektibilitas piutang./Receivable Collectability Level	
4.	Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)/Discussion on capital structure and capital structure policy	Penjelasan atas:/With details on: 1. Struktur modal (capital structure); dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies) dan dasar pemilihan kebijakan tersebut./Management Policy on capital structure and the basis for selecting the policy.	

No.	Kriteria/Criteria	Penjelasan/Explanation	Halaman/Page
5.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal./Discussion on capital goods investment material commitment	<p>Penjelasan tentang/Explanation on:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan dari ikatan tersebut;/The purpose of the commitment</li> <li>2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;/Expected source of fund to fulfil the respective commitments</li> <li>3. Mata uang yang menjadi denominasi; dan/Currency of denomination</li> <li>4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;/Steps taken by the company to protect the risk against related foreign currency position. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan./Note: Should be disclosed if the company has no material ties in investments in capital goods</li> </ol>	
6.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir./Discussion of capital investments that were realized in the last financial year	<p>Penjelasan tentang/Explanation on:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis investasi barang modal;/Types of capital investments;</li> <li>2. Tujuan investasi barang modal; dan/The objectives of capital investments; and</li> <li>3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir./The value of capital investments incurred in the last financial year. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan./Note: if there is no realization of capital investments, should be disclosed.</li> </ol>	
7.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan./Comparative information between target at the beginning of fiscal year with realization and target or projection for next one year regarding revenue, income, capital structure, or other aspects considered significant for the Company	<p>Informasi memuat antara lain:/Information discloses, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan/Comparison between target at the beginning of fiscal year and the realization</li> <li>2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam satu tahun mendatang/Implemented target or projection in the next one year</li> </ol>	
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan./Material Information and facts subsequent to the accountant's reporting date	<p>Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan./Description regarding significant events subsequent the accountant's reporting date, including their impact on future business performance and risks. Note: Should be disclosed if there is no significant subsequent event after accountant's reporting date.</p>	
9.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan./Description on Company's business prospect	<p>Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya./Description on Company's business prospect related with industry and economy in general, supported with supporting quantitative data from accountable data sources.</p>	
10.	Uraian tentang aspek pemasaran./Description on marketing aspects	<p>Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar./Description regarding the marketing aspect of the company's products and services, namely marketing and market share strategy</p>	



No.	Kriteria/Criteria	Penjelasan/Explanation	Halaman/Page
11.	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir./Description regarding the dividend policy as well as date and amount of cash dividend per share and amount of dividend per year as announced or paid during the past 2 (two) years	<p>Memuat uraian mengenai/Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan pembagian dividen;/Policy of dividend payout</li> <li>2. Total dividen yang dibagikan;/Amount of dividend</li> <li>3. Jumlah dividen kas per saham;/Amount of cash dividend per share</li> <li>4. Payout ratio; dan/Payout ratio</li> <li>5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya./Date of announcement and cash dividend payout Note: if there is no dividend payment, the reasons should be disclosed</li> </ol>	
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP)/Share Ownership by Employees Program and/or management conducted by the company (ESOP/MSOP)	<p>Memuat uraian mengenai/Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya;/Amount of ESOP/MSOP shares and its realization;</li> <li>2. Jangka waktu;/Time frame</li> <li>3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan/Requirement for the rights of employee and/or management; and</li> <li>4. Harga exercise;/Exercise value. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan./Note: if it does not have such programs, in order to be disclosed.</li> </ol>	
13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)./IPO Proceeds realization (regarding the Company's obligation to disclose IPO proceeds realization report)	<p>Memuat uraian mengenai/Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total perolehan dana;/Total funds acquired.</li> <li>2. Rencana penggunaan dana;/IPO Proceeds plan.</li> <li>3. Rincian penggunaan dana;/Details of IPO Proceeds</li> <li>4. Saldo dana; dan/Outstanding Proceeds</li> <li>5. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada)./Date of GMS Approval on IPO Proceeds amendment (if any)</li> </ol>	
14.	Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal./Material information, regarding investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring.	<p>Memuat uraian mengenai/Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan dilakukannya transaksi;/The purpose of respective transaction;</li> <li>2. Nilai transaksi atau jumlah yang direstrukturisasi; dan/The transactions value or amount of fund restructured;</li> <li>3. Sumber dana. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan./Source of funds Note: if there are no such transactions, should be disclosed</li> </ol>	
15.	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi./Information on material transactions with conflict of interest and/or transactions with related parties.	<p>Memuat uraian mengenai/Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi;/Name of person performing the transaction and nature of affiliated transaction;</li> <li>2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;/Transaction fairness statement</li> <li>3. Alasan dilakukannya transaksi;/Reason of the transaction</li> <li>4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir;/Transaction realization in current period</li> <li>5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan/Company's policy related to transaction review mechanism;</li> <li>6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan./Compliance with regulation and related provision. Note: if there is no respective transaction, should be disclosed</li> </ol>	

No.	Kriteria/Criteria	Penjelasan/Explanation	Halaman/Page
16.	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan./Explanation regarding changes in regulation that holds significant impact to the company	Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan./Description should contain, among others: any changes in regulation and its impact on the Company Note: If there is no change in regulation which have a significant effect, should be disclosed	
17.	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir./Explanation regarding changes in accounting policy applied by the Company on the last fiscal year	Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan./Description should contain among others: changes in accounting policy as well as its reason and impact to the financial statement Note: if there is no change in accounting policy, should be disclosed	
<b>VI. Good Corporate Governance/Good Corporate Governance</b>			
1.	Uraian Dewan Komisaris./Board of Commissioners description.	Uraian memuat antara lain:/Description includes, as follows: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris;/Description of the Board of Commissioners' duties 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi;/ Remuneration policy disclosure 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris;/Remuneration structure indicating remuneration component for every Board of Commissioners member and per component nominal value for each Board of Commissioners member 4. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan;/Board of Commissioners meeting frequency and attendance level in the meeting 5. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan/Training program to enhance Board of Commissioners' competency 6. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris)./Disclosure of the Board Charter (guidelines and work rules of BOC).	
2.	Informasi mengenai Komisaris Independen./Information on Independent Commissioner	Meliputi antara lain:/Includes the following: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan/Criteria for the assignment of an independent commissioner; and 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen./Criteria for the assignment of an independent commissioner; and	

No.	Kriteria/Criteria	Penjelasan/Explanation	Halaman/Page
3.	Uraian Direksi/Board of Directors description	<p>Uraian memuat antara lain:/Description includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;/Scope of works and responsibilities of each member of the Board of Directors</li> <li>2. Frekuensi pertemuan dan Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan Direksi;/Meeting frequency and Board of Directors attendance level in the Board of Directors meeting;</li> <li>3. Frekuensi pertemuan dan Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan gabungan Direksi dan Dewan Komisaris;/Meeting frequency and Board of Directors attendance level in the joint meeting of Board of Directors and Commissioners;</li> <li>4. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru;/Training program to enhance Board of Commissioners' competency</li> <li>5. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi); dan/Disclosure of the Board Charter (guidelines and work rules the Board of Directors); and</li> <li>6. Kebijakan mengenai suksesi Direksi./Policies regarding the succession of Directors</li> </ol>	
4.	Assessment terhadap Dewan Komisaris dan Direksi./Board of Commissioners and/or Board of Directors members assessment	<p>Mencakup antara lain:/The information should include:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;/Board of Commissioners and Board of Directors performance assessment procedures.</li> <li>2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan/Criteria used in carrying the assessment of Board of Commissioners and Board of Directors' performance.</li> <li>3. Pihak yang melakukan assessment./Related party who performed the assessment</li> </ol>	
5.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi./Board of Directors remuneration policy	<p>Mencakup antara lain:/Description includes, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi;/Remuneration policy disclosure</li> <li>2. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi; dan/Remuneration structure indicating shortterm remuneration, post employment and/other long term Remuneration type and amount for every member of Board of Directors</li> <li>3. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi./Key performance indicators disclosure to assess Board of Directors' performance</li> </ol>	
6.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu./Information regarding majority and controlling Shareholders both directly or indirectly, to individual ownership	<p>Dalam bentuk skema atau diagram, kecuali untuk BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah./In the form of scheme or diagram, unless for SOE wholly owned by the government of Indonesia</p>	



No.	Kriteria/Criteria	Penjelasan/Explanation	Halaman/Page
7.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali./ Disclosure of affiliated relationship among members Board of Directors, members of Board of Commissions and/or Majority/Controlling Shareholders	Mencakup antara lain:/Description includes, as follows: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;/Affiliated relationship among Board of Directors members 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;/Affiliated relationship between Board of Directors and Board of Commissioners members 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;/ Affiliated relationship between Board of Directors members and Majority Controlling Shareholders 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan/Affiliated relationship among Board of Commissioners members 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan./Affiliated relationship between Board of Commissioners members and Majority/Controlling Shareholders Note: should be disclosed if there is no respective affiliated relationship	
8.	Komite Audit./Audit Committee	Mencakup antara lain:/Description includes, as follows: 1. Nama dan jabatan anggota komite audit;/Name and position of Audit Committee members 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit;/Educational qualification and employment history of Audit Committee members 3. Independensi anggota komite audit;/Audit committee members independency 4. Uraian tugas dan tanggung jawab;/Duties and responsibilities description 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan/Audit committee meeting frequency and attendance level 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit./Audit committee's meeting frequency and attendance level	
9.	Komite Nominasi dan Remunerasi./Remuneration and Nomination Committee	Mencakup antara lain:/Includes the following: 1. Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi;/Name, position and brief profile of Nomination and/or Remuneration Committee members 2. Independensi anggota komite nominasi dan/atau remunerasi;/Nomination and/or remuneration committee members' independency 3. Uraian tugas dan tanggung jawab;/Description of duties and responsibilities 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/ atau remunerasi; dan/Nomination and/or remuneration committee duties implementation report 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi./Nomination and/or remuneration committee meeting frequency and attendance level	

No.	Kriteria/Criteria	Penjelasan/Explanation	Halaman/Page
10.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan./Other committees under the Board of Commissioners	Mencakup antara lain:/Includes the following: 1. Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota komite lain;/Name, title and brief profile of the members of the committees 2. Independensi anggota komite lain;/Independency of other committees' members 3. Uraian tugas dan tanggung jawab;/Duties and responsibilities description 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan/Other committees' duties implementation report 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain./Other committees' meeting frequency and attendance level.	
11.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan./Corporate Secretary duties and function description	Mencakup antara lain:/Includes the following: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan;/Name and brief profile of Corporate Secretary officer 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan; dan/Corporate Secretary duties implementation report 3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan./Training program for competence development of corporate secretary	
12.	Uraian mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya./Description of the previous year's General Meeting of Shareholders (GMS)	Mencakup antara lain:/Includes the following: 1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya;/The previous year's GMS resolution; 2. Realisasi hasil RUPS pada tahun buku; dan/Realization of the GMS in fiscal year; and 3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan./Reasons for any decision of GMS that has not yet been realized	
13.	Uraian mengenai unit <i>audit internal</i> /Description regarding internal audit unit in the Company	Mencakup antara lain:/Includes among others: 1. Nama ketua unit audit internal;/Name of the Head of internal audit 2. Jumlah pegawai ( <i>auditor internal</i> ) pada unit audit internal;/Number of internal audit employees 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal;/Qualification/certification as an internal audit professional 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan;/Organizational structure or position of the internal audit 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal; dan/Duties implementation report 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal./Respective party that appoints or dismisses the Head of Internal Audit	
14.	Akuntan Publik./Corporate Accountant	Informasi memuat antara lain:/Information discloses, as follows: 1. Jumlah periode akuntan publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan;/Number of audit periods that the accountant has audited the Company's financial statements. 2. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan;/Number of financial statements audits performed by the external auditor. 3. Besarnya <i>fee</i> untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik; dan/The amount of audit or other attestation fee 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan./Other service provided by the accountant apart from financial audit service Notes: if there is no other service, should be disclosed	

No.	Kriteria/Criteria	Penjelasan/Explanation	Halaman/Page
15.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan/ <i>Description regarding the Company's Risk Management</i>	Mencakup antara lain/ <i>Includes the following:</i> 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan;/ <i>Explanation on Risk Management System</i> 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko;/ <i>Explanation on Evaluation of Risk Management Processes</i> 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan/ <i>Explanation of the risks faced by the company</i> 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut./ <i>Efforts to manage those risks</i>	
16.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern./ <i>Explanation on Internal Controlling System</i>	Mencakup antara lain/ <i>Includes the following:</i> 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional;/ <i>Brief explanation regarding internal audit system, including operational and financial audit</i> 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional ( <i>COSO – internal control framework</i> ); dan/ <i>Explanation of internal audit system conformity with international REcognized framework/COSO (control environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring activities)</i> 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern./ <i>Explanation regarding evaluation on internal audit system effectiveness</i>	
17.	Uraian mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup/ <i>Description regarding Corporate Social Responsibility on environment.</i>	Mencakup antara lain informasi tentang/ <i>Information should include:</i> 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen;/ <i>Policy determined by the management</i> 2. Kegiatan yang dilakukan; terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan dan lain-lain./ <i>Activities performed related to the environmental program that related with Company's operational, such as environmentally friendly and recyclable materials, energy utilization, Company's waste management system and so forth.</i> 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki./ <i>Certification on environmental sector (if any)</i>	
18.	Uraian mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja./ <i>Description regarding Corporate Social Responsibility in relations to workforce and occupational health and safety.</i>	Mencakup antara lain informasi tentang/ <i>Information should include:</i> 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan/ <i>Policy determined by the management;</i> 2. Kegiatan yang dilakukan terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat <i>turnover</i> karyawan, tingkat kecelakaan kerja dan lain-lain./ <i>Activities performed related to employment practice, occupational health and safety such as gender equality and job opportunity, occupational infrastructure and safety, employee turnover rate, occupational accident rate and so forth.</i>	

No.	Kriteria/Criteria	Penjelasan/Explanation	Halaman/Page
19.	Uraian mengenai corporate <i>Corporate Social Responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan masyarakat./ <i>Description regarding Corporate Social Responsibility in relations to social and community empowerment.</i>	Mencakup antara lain informasi tentang: <i>Information should include:</i> 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; <i>Policy determined by the management</i> 2. Kegiatan yang dilakukan; dan <i>Activities performed</i> 3. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan masyarakat, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya dan lain-lain. <i>Costs incurred related to social and community empowerment activities such as employment of locals, surrounding community empowerment, social infrastructure improvement, donations and so forth</i>	
20.	Uraian mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen./ <i>Description regarding Corporate Social Responsibility in relations to customer.</i>	Mencakup antara lain: <i>Information should include:</i> 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan <i>Policy determined by the management</i> 2. Kegiatan yang dilakukan terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen dan lain-lain. <i>Activities performed related to product responsibility, customer's health and safety, product information, facility, numbers of and response to customer's complaints and so forth</i>	
21.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan./ <i>Litigation or legal cases faced by the Company, subsidiaries, members of Board of Directors and/or Board of Commissioners serving on the Annual Report period</i>	Mencakup antara lain: <i>Information should include:</i> 1. Pokok perkara/gugatan; <i>Description of case/litigation</i> 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; <i>Case/litigation settlement status</i> 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan <i>Impacts on the Company's financial condition</i> 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada Entitas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan. <i>Administration sanctions that have been applied to the entity, Board of Commissioners, Board of Directors, by relevant authorities (capital market, banking, or others) on the last fiscal year (or a statement of no administration sanction applied) Notes: Should be disclosed if there's no litigations occurred</i>	
22.	Akses informasi dan data perusahaan./ <i>Information access and corporate data</i>	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis dan sebagainya./ <i>Description on access to corporate information and data to the public, for example through website, mass media, mailing list, bulletin etc</i>	
23.	Bahasan mengenai kode etik./ <i>Discussion on the Company's Code of Conduct</i>	Memuat uraian antara lain: <i>Containing descriptions, as follows:</i> 1. Isi kode etik; <i>Code of Conduct content</i> 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; <i>Disclosure that the Code of Conduct's is applicable for all organizational level</i> 3. Penyebarluasan kode etik; <i>Dissemination of Code of Conduct</i> 4. Upaya penegakan dan sanksi pelanggaran kode etik; dan <i>Code of Conduct enforcement effort and sanction on the violations of the code of ethics</i> 5. Pernyataan mengenai budaya perusahaan ( <i>corporate culture</i> ) yang dimiliki perusahaan./ <i>Corporate Culture statement</i>	

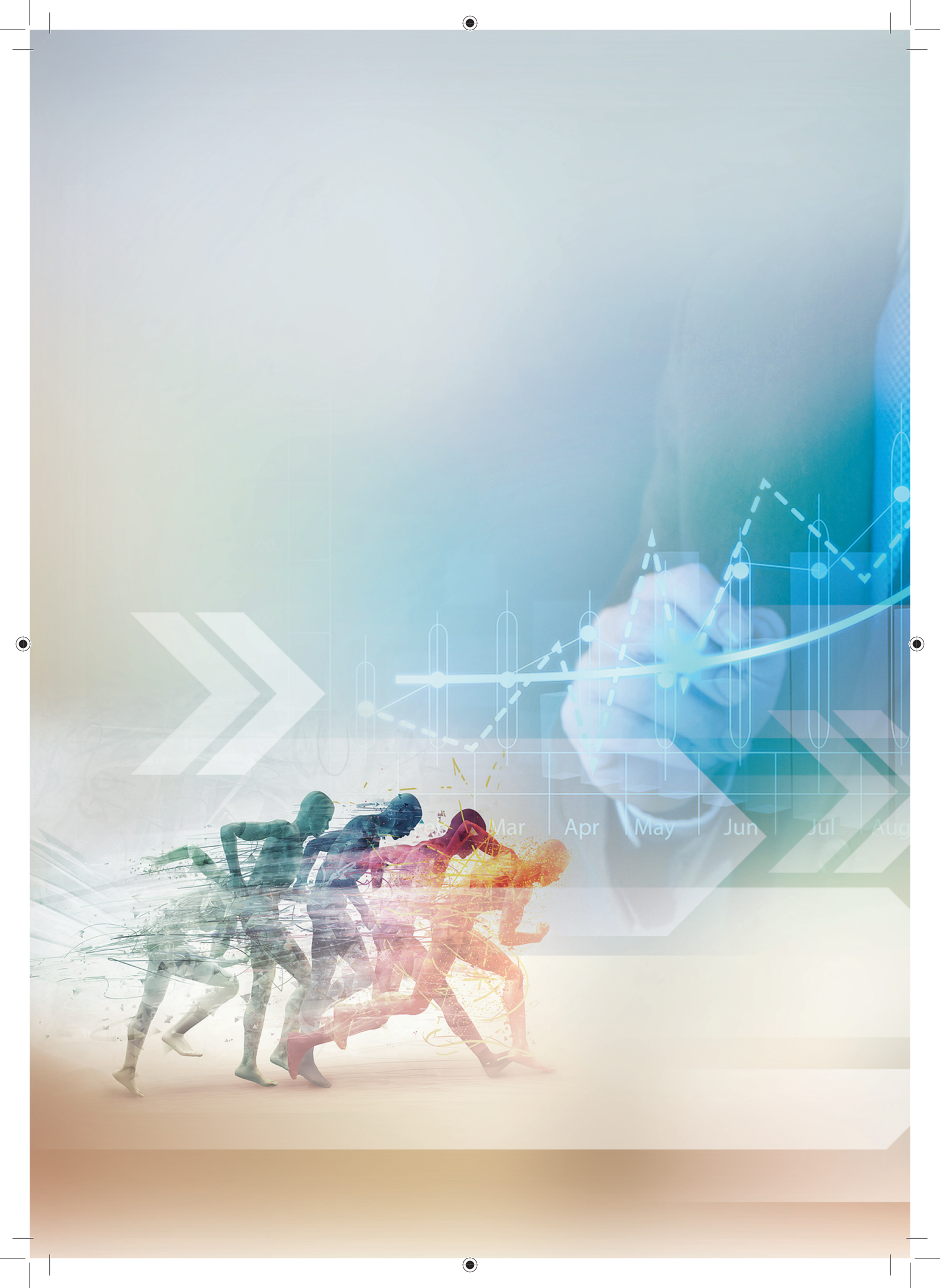
No.	Kriteria/Criteria	Penjelasan/Explanation	Halaman/Page
24.	Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i> . /Disclosures on the <i>whistleblowing system</i>	Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain./Includes the <i>whistleblowing system</i> mechanism of: 1. Penyampaian laporan pelanggaran./Violation reporting 2. Perlindungan bagi <i>whistleblower</i> ./Protection for the <i>whistleblower</i> 3. Penanganan pengaduan./Report handling 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan./Report management 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya./Result of report handling and report being processed at the last fiscal year and its follow-up	
<b>VII. Informasi Keuangan/Financial Information</b>			
1.	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan./Board of Directors' statement regarding responsibility on the financial statements	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan./Financial Statements compliance with related regulation	
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan./Independent auditor's opinion on the financial statements.		
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini./Independent auditor's opinion on the financial statements	Deskripsi memuat tentang:/The description should contain: 1. Nama & tanda tangan./Name and signature 2. Tanggal Laporan Audit; dan./Audit Report Date 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik./Public Accountant Office and Individual Public Accountant license number	
4.	Laporan keuangan yang lengkap./Comprehensive financial statements	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan./The descriptions should contain: 1. Laporan posisi keuangan (neraca)/Financial position (balance sheet) report 2. Laporan laba rugi komprehensif./Comprehensive income statement 3. Laporan perubahan ekuitas./Changes in Equity Report 4. Laporan arus kas./Cash Flow Report 5. Catatan atas laporan keuangan; dan./Notes on Financial Statements 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan)/Comparative Financial Position report at the beginning of period, presented when the respective entity implements particular accounting policy retrospectively or restates the financial report posts, or when the entity reclassifies the posts in their financial statement (if considered relevant)	
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas./Profitability ratio comparison	Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. /Comparison of current year's profit/loss with previous year	

No.	Kriteria/Criteria	Penjelasan/Explanation	Halaman/Page
6.	Laporan Arus Kas./Cash Flow Report	<p>Memenuhi ketentuan sebagai berikut:/Should comply with the following provisions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi dan pendanaan;/Categorization of three activities: operating, investing and financing activities</li> <li>2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;/Using direct method to present cash flow from operating activity</li> <li>3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan/Separating the presentation between cash acquisition and/or cash expenses on operating, investing and financing activities in current year</li> <li>4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan./Non-cash activity disclosure has to be presented in financial statements notes</li> </ol>	
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi./Accounting policy highlights	<p>Meliputi sekurang-kurangnya:/Compliance with FAS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;/Compliance with FAS</li> <li>2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;/Financial statement measurement and preparation foundation</li> <li>3. Pengakuan pendapatan dan beban;/Income and expense recognition</li> <li>4. Imbalan kerja; dan/Fixed Asset</li> <li>5. Instrumen Keuangan./Financial Instrument</li> </ol>	
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi./Affiliated Party transaction disclosure	<p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain:/Several aspects disclosed, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;/Name of the affiliated parties, as well as the nature and relationship with the affiliated parties</li> <li>2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan/Value of the transaction and the percentage on total related income or expenses</li> <li>3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas./Total balance and the percentage towards total asset or liabilities</li> </ol>	



No.	Kriteria/Criteria	Penjelasan/Explanation	Halaman/Page
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan./Disclosure on any aspects related with Taxes	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan./Several aspects that shall be disclosed, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini./Fiscal reconciliation and calculation of current tax</li> <li>2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi./Statement on the relation between Tax expense (income) and accounting income</li> <li>3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan./Taxable Profit as calculated through reconciliation is in accordance with the Tax Return statement</li> <li>4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan/Details of deferred tax assets and liabilities presented in the balance sheet in each period of presentation and amount of deferred tax expense (income) recognized in the profit loss statement if the said amount is not evident in the asset or liability of deferred tax recognized in the financial position report</li> <li>5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak/Tax dispute disclosure or lack thereof.</li> </ol>	
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap./Disclosure related to fixed assets.	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan./Must include disclosures on:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penyusutan yang digunakan./Depreciation method used</li> <li>2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya./Description of the accounting policies selected between the model and the cost model revaluation</li> <li>3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan/Methods and significant assumptions used in estimating the fair value of fixed assets (revaluation model) or disclosure of the fair value of fixed assets (for the cost model)</li> <li>4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi./A reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and end of the period that featuring: addition, subtraction and reclassification</li> </ol>	

No.	Kriteria/Criteria	Penjelasan/Explanation	Halaman/Page
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi/ Disclosure related to segments of operations.	Hal-hal yang harus diungkapkan/Must include disclosures on: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan;/General information which includes the factors used to identify the reported segments 2. Informasi tentang laba rugi, aset dan liabilitas segmen yang dilaporkan;/Information on profit and loss, assets and the liabilities of the reported segments 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan/Reconciliation of the segments' total revenues, reported segments' profit and loss, assets, liabilities and other materials towards relevant amount within the entity 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama./Disclosure in entity level, which covers information on product and/or services, geographical location and major customers	
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan./ Disclosure regarding the Financial Instruments	Hal-hal yang harus diungkapkan/Should disclose the following: 1. Persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi untuk setiap kelompok instrumen keuangan;/Accounting policy, requirement and condition for every financial instrument group 2. Klasifikasi instrumen keuangan;/Financial instrument classification. 3. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan;/Fair value for every financial instrument group 4. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko;/Risk Management policy and objectives; 5. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan/Explanation of financial instrument inherent risk: market risk, credit risk and liquidity risk 6. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif./Quantitative analysis on every risk related to financial instrument	
13.	Penerbitan laporan keuangan./Issuance of Financial Statements	Hal-hal yang diungkapkan antara lain/Several aspects shall be disclosed, as follows: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan/Date of financial statements issuance 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan./Responsible parties in authorizing financial statements	





bagian-01/chapter-01

# **Ikhtisar Keuangan dan Saham**

## **Financial Highlights and Shares**



## IKHTISAR KEUANGAN DAN SAHAM

### Financial Highlight and Shares

#### Ikhtisar Keuangan Penting - 5 tahun/Financial Highlights - 5 years

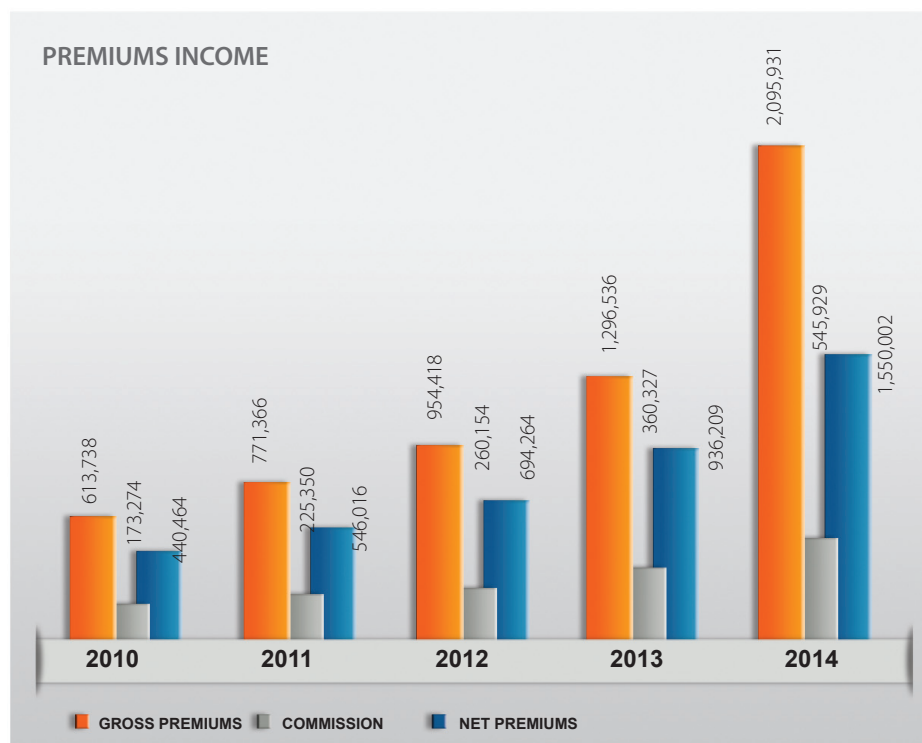
Dalam juta rupiah/In million rupiahs

KETERANGAN	2014	2013	2012	2011	2010	DESCRIPTION
Premi Bruto	2.095.931	1.296.536	954.418	771.366	613.738	Gross Premiums
Premi Retensi Sendiri	1.853.444	1.213.451	887.613	713.122	527.352	Own Retention Premiums
Klaim Bruto	867.381	521.713	467.280	357.391	416.771	Gross Claims
Klaim Retensi Sendiri	800.143	626.178	516.846	333.247	336.095	Own Retention Claims
Hasil Underwriting	105.341	59.031	54.073	46.029	31.492	Underwriting Results
Hasil Investasi	88.022	54.475	37.261	35.265	16.758	Investment Income
Beban Usaha	89.760	71.307	52.723	44.717	40.809	Operating Expenses
Laba Sebelum Pajak dan Zakat	149.775	81.266	50.078	21.569	10.347	Profit Before Tax and Zakat
Laba Setelah Pajak dan Zakat	131.086	72.577	46.066	20.368	9.669	Profit After Tax and Zakat
Investasi	1.650.248	1.136.420	859.411	623.778	509.925	Investments
Aset	2.930.469	1.722.564	1.122.541	800.847	659.449	Assets
Cadangan Teknis	1.359.376	948.283	613.567	457.341	331.652	Technical Reserves
Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	834.088	481.217	308.247	217.275	150.728	Reserve for Unearned Premiums
Estimasi Klaim Retensi Sendiri	525.288	467.066	305.320	240.066	180.924	Estimated Own Retention Claims
Ekuitas	767.526	386.440	247.105	212.222	191.395	Shareholder's Equity
Modal Setor	463.000..	213.000	138.000	138.000	103.000	Paid-up Capital

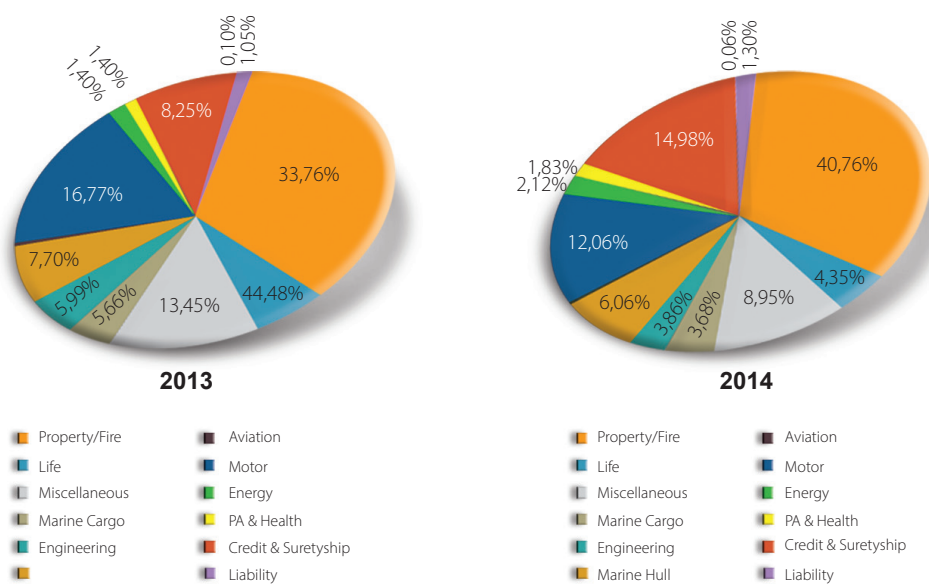
#### Rasio Keuangan Penting - 5 tahun yang umum dan relevan dengan industri perusahaan terkait

#### Financial Ratios - 5 years that are common and relevant to related industry

RASIO KEUANGAN	2014	2013	2012	2011	2010	FINANCIAL RATIOS
Return on Assets (ROA)	6.44	5.71	5.01	2.69	1.57	Return on Assets (ROA)
Return on Equity (ROE)	22.72	22.90	18.64	10.16	5.05	Return on Equity (ROE)
Yield on Investment (YOI)	6.60	5.83	5.41	6.64	3.29	Yield on Investment (YOI)
Klaim Bruto /Premi Bruto	41.38	40.24	48.95	46.33	67.91	Gross Claims /Gross Premiums
Hasil Underwriting /Premi Bruto	5.94	4.55	5.67	5.97	5.13	Underwriting Result /Gross Premiums
Likuiditas	134.01	126.55	136.37	128.58	129.85	Liquidity
Solvabilitas	136,84	130.62	142.17	137.74	141.38	Solvability
Beban Usaha /Premi Bruto	4.28	5.50	5.32	5.80	6.65	Operating Expenses /Gross Premiums

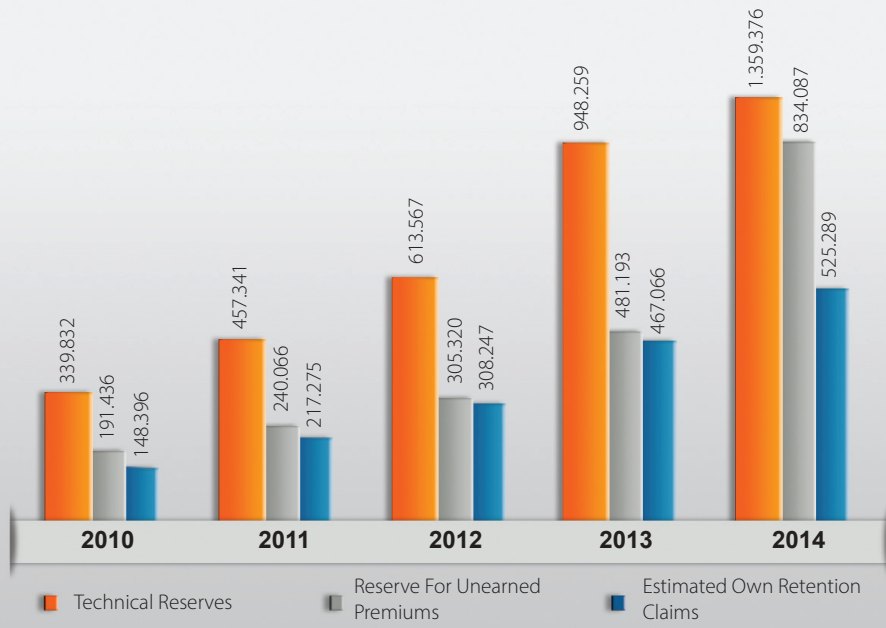


Gross Premiums by Class of Business (COB) for the years 2014 and 2013 :

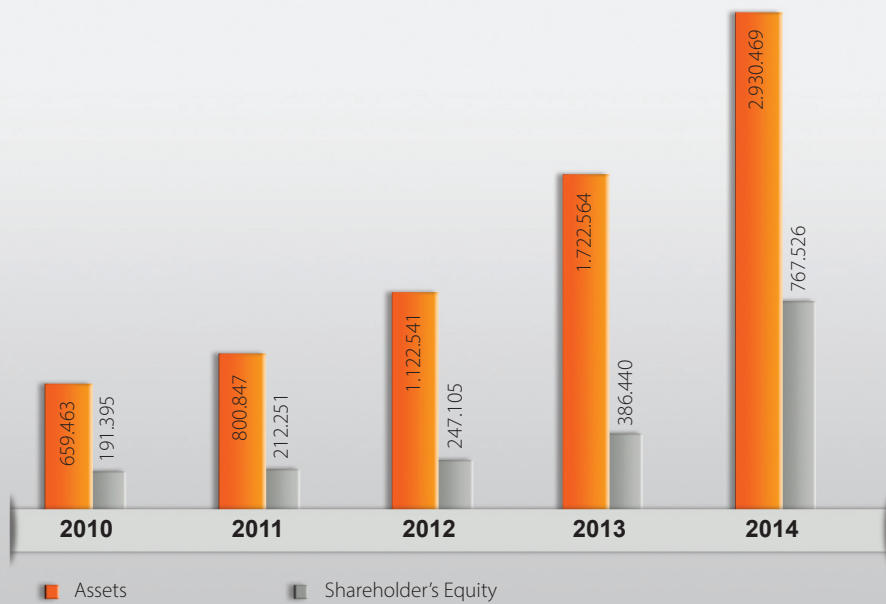


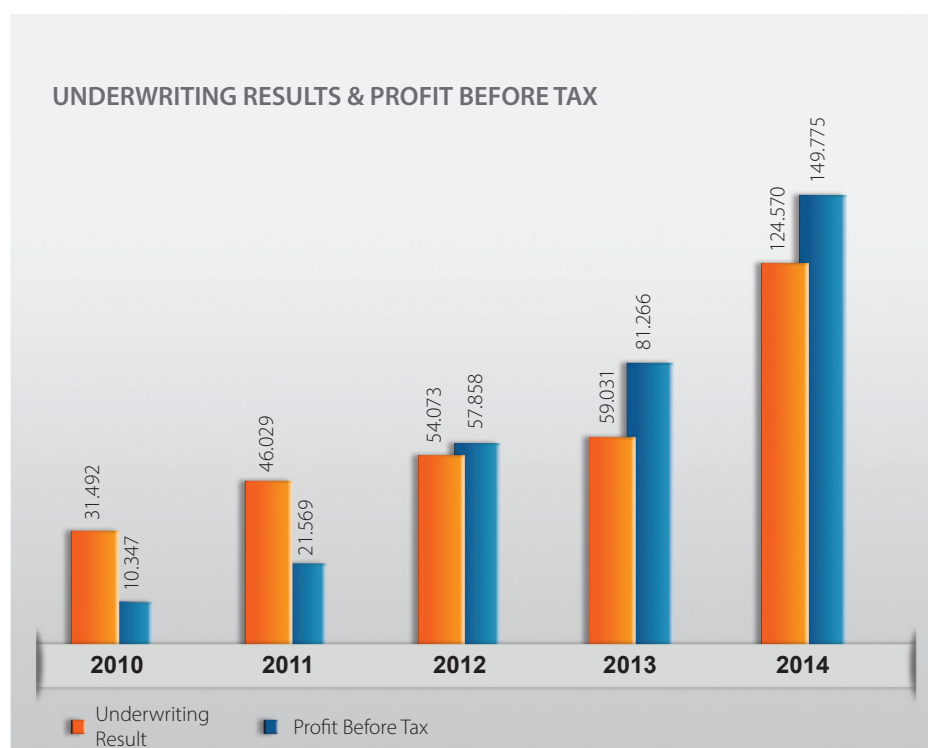
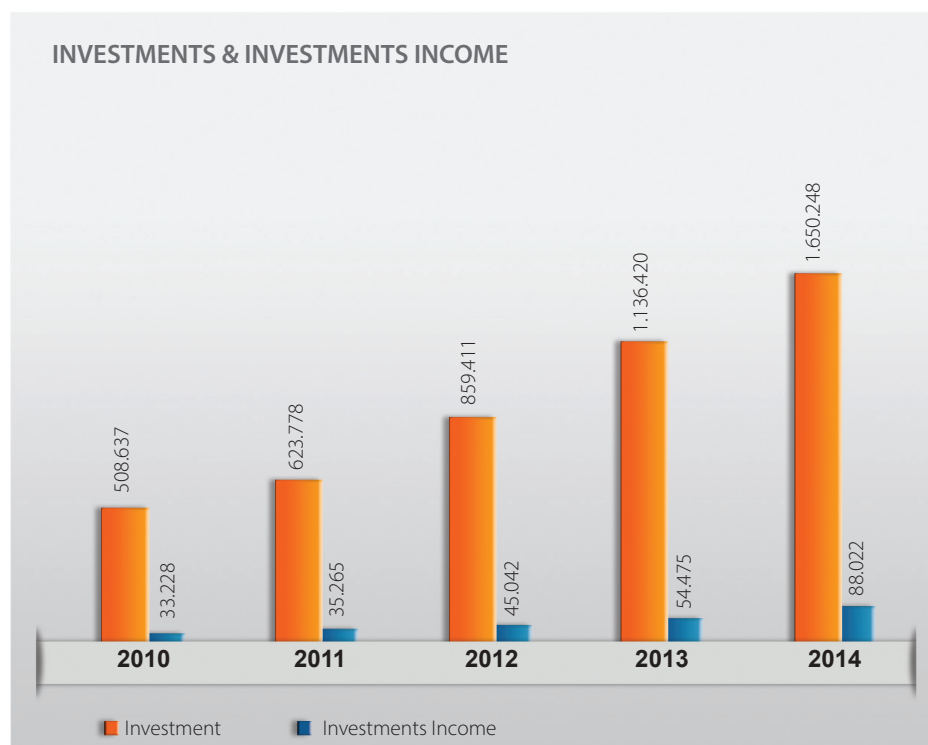


### TECHNICAL RESERVES, RESERVE FOR UNEARNED PREMIUMS AND ESTIMATED OWN RETENTION CLAIMS




### ASSETS & SHAREHOLDER'S EQUITY











bagian-02/chapter-02  
**Laporan Manajemen**  
Management Report





Rinarno Pramudyanto, SE, MM, CRGP  
Komisaris Utama/[President Commissioner](#)

## Laporan Dewan Komisaris Report From The Board of Commissioners

Pemegang Saham selaku pemangku kepentingan yang terhormat,

Mengawali Laporan ini perkenankan kami atas nama manajemen PT Reasuransi Nasional Indonesia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dari seluruh *stakeholders*.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga PT Reasuransi Nasional Indonesia berhasil melalui tahun 2014 dengan hasil yang cukup menggembirakan. Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia untuk tahun buku 2014.

### Kinerja Perusahaan

Jika dilihat dari perkembangan PT Reasuransi Nasional Indonesia dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terlihat bahwa posisi Perusahaan sampai dengan tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang terus meningkat. Kondisi pertumbuhan yang telah dicapai dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini tentunya akan terus kami upayakan peningkatannya sehingga tercapai suatu **"pertumbuhan yang berkesinambungan"**.

Seiring dengan transformasi budaya yang dilakukan Perusahaan serta komitmen dari segenap jajaran Perusahaan, kinerja Perusahaan dalam tahun 2014 dapat tercapai dengan sangat baik dan menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, Perusahaan berhasil mencapai Premi Bruto sebesar Rp2.095.931 juta atau meningkat 61,66% dibandingkan tahun 2013; dan Laba Setelah Pajak & Zakat sebesar Rp131.086 juta atau meningkat 80,62% dari tahun 2013. Dalam konteks ini, hal yang perlu dicermati adalah bahwa pertumbuhan Pendapatan Premi meningkat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Klaim dan telah terjadi perbaikan serta peningkatan kualitas penanganan akseptasi dengan mengedepankan prinsip *prudent underwriting* sehingga Perusahaan dapat menorehkan target bisnis di atas yang telah dianggarkan.

Dewan Komisaris percaya langkah-langkah tersebut akan memberi pijakan bagi Perusahaan untuk meraih pencapaian yang lebih baik di tahun mendatang.

Dear Shareholders and Stakeholders,

On behalf of the management of PT Reasuransi Nasional Indonesia, please allow us to begin this report by expressing our profound gratitude and appreciation to all stakeholders.

We praise the Lord Almighty for His wonderful blessing that allows the Company to close the year 2014 with favorable results. On this occasion, please allow us to submit report of supervision of the Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia for the fiscal year 2014.

### Company Performance

Given the development of PT Reasuransi Nasional Indonesia in the last 3 (three) years, it is evident that until 2014 the Company has showed a continuous trend of growth. We certainly will continue to strive to improve the growth that has been achieved in the last 3 (three) years in order to realize **"sustainable growth"**.

Along with the cultural transformation that was promoted by the Company and the commitment from all employees, in 2014, the Company managed to achieve a commendable performance, an increase compared to previous years. In 2014, the Company recorded gross premiums amounting to Rp2,095,931 million, an increase of 61.66% compared to 2013; and Profit After Tax & Zakat of Rp131,086 million, an increase of 80.62% from 2013. In this context, it is worth noted that the growth in premium incomes rose higher than the growth in claims and that there have been improvements on the quality of acceptance by promoting prudent underwriting principles so that the Company is able to record business achievement above the targets.

The Board of Commissioners believes that those measures will strategically provide the Company with a firm foundation to achieve better outcomes in the coming years.



### Penilaian atas Kinerja Direksi

Dalam kesempatan ini Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direksi yang telah melakukan langkah-langkah strategis dalam memajukan kinerja operasional dan non operasional Perusahaan, meliputi memperkuat fundamental bisnis, penguatan struktur keuangan, peningkatan *prudent underwriting*, serta peningkatan kualitas aset. Upaya tersebut tentunya telah berdampak pada meningkatnya kecukupan rasio tingkat solvabilitas dan menurunnya rasio premi neto dibanding ekuitas, sehingga tidak melebihi batas yang diperkenankan.

Pada tahun 2014 ini, Perusahaan telah memasuki tahun kedua dari RJPP tahun 2013-2017. Pada tahap ini sasaran Perusahaan adalah melakukan "**Akselerasi Pertumbuhan Bisnis**". Dewan Komisaris melihat bahwa Perusahaan telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang sejalan dengan hal tersebut sehingga Perusahaan dalam tahun 2014 dapat mencapai kinerja dengan hasil yang menggembirakan.

### Komitmen GCG dan Tata Kelola

Dalam upaya peningkatan mutu pengelolaan perusahaan, Dewan Komisaris terus mendorong segenap jajaran Perusahaan untuk selalu berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, Internalisasi nilai-nilai/budaya Perusahaan, penerapan remunerasi pegawai yang berbasis kinerja, serta penilaian kinerja Perusahaan berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).

Untuk menilai kinerja Perusahaan, pada tahun 2014 telah menerapkan penilaian yang menggunakan alat ukur berbasis KPKU (Kriteria Penilaian Kerja Unggul). Melalui penerapan KPKU ini diharapkan Perusahaan memiliki kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan pesaing lainnya. Terkait hal ini Dewan Komisaris percaya bahwa penerapan KPKU dapat berjalan secara optimal apabila seluruh jajaran Perusahaan dapat memastikan tatakelola untuk pengelolaan bisnis Perusahaan telah berjalan baik. Oleh sebab itu Dewan Komisaris mendukung langkah yang menekankan agar setiap unsur dalam organisasi Perusahaan mempunyai sasaran, cara dan ukuran yang jelas dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Dewan Komisaris juga mendukung penerapan Manajemen

### Assessment on BOD Performance

On this occasion, the Board of Commissioners would like to express our highest appreciation to the Board of Directors and staff for taking strategic steps in advancing the operational and non-operational performance of the Company, which include strengthening business fundamentals, strengthening financial structure, improving prudent underwriting, as well as improving the quality of assets. We believe that such efforts would have an impact on increasing the level of solvency adequacy ratio and a decrease in ratio of net premiums to equity, so it would not exceed the permitted limits.

In 2014, the Company entered its second year of RJPP 2013 - 2017. At this stage, the Company's objectives is to "**Accelerate Business Growth**". The BOC sees that the Company has issued a number of policies that are in line with that and hence the Company manage to achieve encouraging results in 2014.

### Commitment in Good Corporate Governance

To facilitate the improvement of the Company's governance, the Board of Commissioners urges the Board of Directors and staffs to continuously improves the effectiveness of Good Corporate Governance implementation, Internal Control System, Risk Management; internalization of the Company's values and cultures; implementation of performance appraisal based remuneration; and implementation of Superior Performance Evaluation Criteria (KPKU).

In 2014, to assess its performance, the Company has implemented an assessment tool based on KPKU (Superior Work Assessment Criteria). With the application of KPKU, the Company is expected to have superior performance than its competitors. Regarding this matter, BOC believes that the application of KPKU can be brought about optimally if all employees ensure that the governance of the Company's business has been running well. Therefore, the Board of Commissioners supports the measures that emphasize on urging every element in the Company's organization to have goals, means and measures for each activities.

The Board of Commissioners also supports the Board of

Risiko berbasis *Enterprise Risk Management* dan *Four Eyes Principles* yang saat ini dinilai berjalan baik. Sebagai komitmen untuk menerapkan manajemen risiko yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan oleh regulator, manajemen juga telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagai organ pendukung Dewan Komisaris dan Komite Manajemen Risiko sebagai organ pendukung Direksi.

Selain itu, fungsi dan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) juga terus ditingkatkan sebagai upaya manajemen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal Perusahaan.

Dewan Komisaris percaya bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), manajemen risiko dan peningkatan peran & fungsi SPI bukan sekedar melaksanakan kepatuhan pada peraturan, namun juga sebagai solusi untuk membangun bisnis yang berkesinambungan di masa depan.

#### **Pandangan atas Prospek Perusahaan**

Dewan Komisaris menilai bahwa industri reasuransi nasional memiliki tantangan kapasitas nasional yang semakin meningkat. Dengan merujuk pada pasar reasuransi nasional, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata pertumbuhan premi bruto asuransi nasional sebesar 12,96% dan premi reasuransi dibayar sebesar 11,51%, sedangkan rata-rata pertumbuhan premi reasuransi profesional nasional (lokal) sebesar 22,42%. Meskipun serapan premi reasuransi nasional mengalami peningkatan, namun dinilai masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa potensi premi reasuransi nasional belum tergarap sepenuhnya oleh perusahaan reasuransi profesional nasional. Dengan demikian, peluang PT Reasuransi Nasional Indonesia untuk menggarap pasar reasuransi nasional masih terbuka untuk dapat lebih meningkat. Kondisi ini juga didukung dengan kebijakan regulator untuk meningkatkan penjuduhan kapasitas reasuransi dalam negeri.

Sejalan dengan prospek industri reasuransi dalam negeri, maka untuk meningkatkan kapasitas akseptasi PT Reasuransi Nasional Indonesia, pemegang saham dalam tahun 2014 telah memberikan tambahan modal senilai Rp250.000 juta; dan pada tahun 2015 berkomitmen untuk memberikan tambahan modal senilai Rp75.000 juta. Tambahan modal ini tentunya sebagai bentuk kepercayaan yang tinggi dari pemegang saham dan sekaligus menjadi momentum bagi PT Reasuransi Nasional Indonesia untuk semakin tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar lagi.

Directors in implementing the *Enterprise Risk Management* and *Four Eyes Principles* which is currently considered good. As its commitment to implement better risk management, as expected by regulators, the Management has established Risk Monitoring Committee, as the supporting organ of the Board of Commissioners and Risk Management Committee as the supporting organ of the Board of Directors.

In addition, the Company also continuously improves the function and role of the Internal Audit Unit (IAU), to enhance the effectiveness of the Company's internal control.

The Board of Commissioners believes that the implementation of *Good Corporate Governance* shall not be considered merely as law abiding action, moreover as the solution to construct a sustainable business in the long future.

#### **The prospect of the Company**

The Board of Commissioners considers that the national reinsurance industry has an increasing challenge in its nation-wide capacity. With reference to the national reinsurance market, within a period of 5 (five) years, the average growth in gross premiums amounted to 12.96% and reinsurance premiums paid amounted to 11.51%, while the average growth of the national professional reinsurance premiums (local) was 22.42%. Although the uptake of national reinsurance premiums have increased, but it still not considered optimal. This is an evidence that that untapped potential of national reinsurance premiums has not been addressed entirely by national professional reinsurance company. Thus, this provides a window of opportunity for PT Reasuransi Nasional Indonesia to address the wide opened market of national reinsurance. This condition is also supported by the regulatory policies to increase domestic reinsurance capacity.

In line with the domestice prospect of reinsurance industry, to increase the acceptance capacity of PT Reasuransi Nasional Indonesia, the shareholders provided additional capital of Rp250,000 million in 2014; and is committed to providing another additional capital worth Rp75,000 million in 2015. The additional capital is an evidence of trust from the shareholders giving PT Reasuransi Nasional Indonesia a momentum to further grow and development.

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015 PT Reasuransi Nasional Indonesia menargetkan pendapatan premi bruto minimal Rp3.415.750 juta dengan Laba setelah pajak & zakat senilai Rp200.237 juta. Dengan penuh optimisme dan dukungan dari pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan, manajemen PT Reasuransi Nasional Indonesia membulatkan tekad dan semangat untuk dapat menggapai potensi pasar yang masih terbuka luas, serta dapat berperan serta untuk mengurangi *premium flight* ke luar negeri.

### Penutup

Dalam kesempatan ini, Dewan Komisaris ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direksi beserta segenap karyawan Perusahaan, atas kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan sepanjang tahun 2014. Dewan Komisaris yakin dengan semangat yang sama di tahun-tahun mendatang maka Perusahaan dapat mencatat prestasi yang lebih baik lagi.

Kepada Induk Perusahaan selaku pemegang saham mayoritas, Dewan Komisaris menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan sepanjang tahun 2014.

Kepada seluruh mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya, kami juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan kerjasamanya selama ini. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan tentu saja sangat kami hargai dan sekaligus kami jaga dengan penuh komitmen.

Therefore, no exaggeration is made by the BOC that the Company's Work Plan and Budget (RKAP) in 2015 targets a gross premium income of at least Rp3,415,750 million and profit after tax and zakat of Rp200,237 million. We are fully optimistic and with support from our shareholders and all stakeholders, the management of PT Reasuransi Nasional Indonesia is determined and vigor to be able to reach the huge potential market and to participate in reducing the premium flight overseas.

### Closing

The Board of Commissioners highly appreciates the Board of Directors and entire employees of the Company for the utmost endeavour and dedication throughout the year 2014. Such distinguish spirit of working shall no question leads the Company to higher achievement in the future ahead.

The Board of Commissioners addresses its gratefulness to the Parent Company as the Major Shareholders of the Company for the continuous support and trust rendered to the Boards and management of the Company throughout 2014.

To all partners and other stakeholders, we would also like to express our utmost appreciation for the trust and cooperation all this time. The support from all other stakeholders of course greatly appreciated and safeguarded with full commitment of ours.

Atas Nama Dewan Komisaris/  
On behalf of the Board of Commissioners



Rinarno Pramudyanto, SE, MM, CRGP  
Komisaris Utama/President Commissioner





• Sulaeman, SE, MM, AAAIK, AIIS  
Komisaris/Commissioner

• Rinarno Pramudiyanto, SE, MM, CRGP  
Komisaris Utama/President Commissioner

• Raymond Buisson, SE, CRGP  
Komisaris Independen/  
Independent Commissioner





M. Shaife Zein, SE, Dipl, Ins, ACII, FIIS, CFP®, CRGP  
Direktur Utama/President Director

# Laporan Direksi

## Report From The Board of Directors

Pemegang Saham yang terhormat,

Dengan terlebih dahulu mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah, ijinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia tahun 2014.

### Kondisi Ekonomi

Berdasarkan laporan riset Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2014 tercatat sebesar 2,6%, hanya terpaat tipis dari pertumbuhan yang rendah di tahun 2013, yakni sebesar 2,5%. Hal ini tidak sesuai dengan ekspektasi pasar yang sebelumnya meyakini akan adanya pemulihan ekonomi global yang signifikan.

Pemulihan ekonomi yang signifikan hanya terjadi di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara kawasan Uni Eropa. Di kawasan Asia, China mencatat pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, yang walaupun sebenarnya relatif cukup tinggi namun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 7,3% dan berada di bawah target Pemerintah sebesar 7,5%.

Secara keseluruhan ekonomi Indonesia tahun 2014 tumbuh sebesar 5,0% dengan tingkat inflasi sebesar 8,4%, tingkat suku bunga SBI sebesar 7,75%, kurs tengah BI 1 USD : Rp12.440 dan kondisi kinerja pasar modal membaik tercermin pada IHSG sebesar 5.225. Kebijakan pengetatan moneter oleh Bank Indonesia (BI) yang dimulai pada paruh kedua tahun 2013 diperkirakan juga turut mempunyai andil terhadap perlambatan ekonomi yang terjadi, menimbang telah terjadinya perlambatan pertumbuhan kredit perbankan secara tahunan yang pada bulan November hanya tercatat sebesar 11,9%, dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 22,2% pada tahun sebelumnya.

Dear Shareholders

By giving praise to Allah, please allow us to report the implementation of our tasks and responsibilities as the Board of Directors of the NASIONAL REinsurance Indonesia in 2014.

### Economic Conditions

Based on the World Bank's reports, the world economic growth in 2014 was recorded at 2.6%, only slightly higher than the low growth in 2013, which amounted to 2.5%. It is fallen below previous market expectations, which initially believed that there would be a significant global economic recovery.

That significant economic recovery did occur but only in a number of developed countries, like the United States and several countries in the European Union. In Asia, China recorded economic growth of around 7%, despite the fact that it was relatively high, but in fact it was lower than the previous year, which stood at 7.3% and was under the government target of 7.5%.

In overall, the Indonesian economy in 2014 grew by 5.0% with an inflation rate of 8.4%, SBI interest rate of 7.75%, the BI rate 1 USD: Rp12,440 and improved capital market performance conditions are reflected in the IHSG of 5.225. Tightening monetary policy by Bank Indonesia (BI), which began in the second half of 2013 is estimated to also have contributed to the economic downturn, considering that there has been a slowdown in credit growth on an annual basis that in November only amounted to 11.9%, compared with growth rate of 22.2% on the previous year.



### Langkah Strategis di 2014

Pada tahun 2014, NASIONAL RE memasuki tahun kedua dari RJPP tahun 2013 - 2017 dan telah memasuki tahapan "Akselerasi Pertumbuhan Bisnis" dimana Perusahaan diarahkan untuk terus mengejar pertumbuhan usaha secara agresif, sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Berbagai upaya strategis yang diambil oleh Perusahaan ini dilakukan dalam satu kerangka kerja bertema "Menjaga Kestinambungan Pertumbuhan Usaha Melalui Penguatan Struktur Keuangan dan Peningkatan *Prudent Underwriting*".

Sebagai salah satu upaya penguatan struktur keuangan NASIONAL RE, Induk perusahaan kami, yakni PT Asuransi Kredit Indonesia, meningkatkan jumlah modal disetor sebesar Rp250 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp100 miliar dialokasikan untuk reasuransi konvensional dan sisanya sebesar Rp150 miliar dialokasikan untuk reasuransi syariah, mempertimbangkan adanya rencana mengenai pengembangan unit Reasuransi Syariah menjadi entitas tersendiri (*spin off*) sehingga perlu persiapan dengan membesarkan modalnya. Selanjutnya, tambahan modal disetor tersebut rencananya akan digunakan oleh Perusahaan untuk meningkatkan kapasitas akseptasi, di antaranya dalam rangka menekan defisit neraca pembayaran dari sektor asuransi.

Selain itu, Perusahaan juga melakukan berbagai upaya lain yang mendukung penguatan struktur keuangan dan peningkatan *prudent underwriting*, antara lain:

- Memantapkan perolehan bisnis baru reasuransi jiwa dalam rangka mencapai hasil *underwriting* positif,
- Mengurangi ketergantungan bisnis reasuransi jiwa syariah pada cedant tertentu,
- Memperbesar proporsi bisnis fakultatif dibandingkan *treaty*,
- Optimalisasi pengelolaan *underwriting* dan investasi agar memperoleh hasil yang maksimal,
- Penerapan fungsi manajemen SDM yang konsisten dan komprehensif,
- Optimalisasi pemanfaatan ICT,
- Memantapkan sistem penilaian secara individual maupun unit kerja berbasis pada KPI dan
- Peningkatan fungsi pengawasan, pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan.

NASIONAL RE juga melakukan beberapa langkah perbaikan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja operasional dan non operasional, serta untuk peningkatan kualitas aset.

### Strategic Measures in 2014

In 2014, NASIONAL RE entered the second year of RJPP 2013 to 2017 and has entered the stage of "Business Growth acceleration" in which the Company is directed to continue to aggressively pursue business growth, as part of efforts to support the achievement of the vision and mission of the Company. Various strategic measures taken by the Company within the framework theme of "Maintaining the Continuity of Business Growth Through Strengthening Financial Structure and Improved Prudent Underwriting".

As one of the efforts to strengthen the financial structure of NASIONAL RE, our parent company, PT Asuransi Kredit Indonesia, increased the number of paid-up capital of Rp250 billion. Of this amount, Rp100 billion is allocated for conventional reinsurance and the remaining Rp150 billion is allocated for sharia reinsurance. Considering the plan of spinning of the sharia reinsurance unit into a separate entity, it is necessary to raise capital for its preparation. Furthermore, additional paid-in capital is planned to be used by the Company to increase the capacity of acceptance, of which in order to reduce the balance of payments deficit of the insurance sector.

In addition, the Company also conducted other efforts to strengthen the financial structure and improvement of prudent underwriting, among others:

- Strengthening new business acquisition in reinsurance underwriting in order to achieve positive results,
- Reducing the dependence of sharia life reinsurance business on particular cedant,
- Enlarging the proportion of facultative business compared treaty,
- Optimizing the management of underwriting and investment in order to obtain maximum results,
- Implementating HR management functions consistently and comprehensively,
- Optimizing the use of ICT,
- Establishing assessment system individually or collectively based on KPI unit and
- Improving monitoring functions, internal control and risk management company.

NASIONAL RE also conducts improvement measures aimed at improving the operational and non-operational performance, as well as for improving the quality of assets.

Upaya yang dilakukan Perusahaan berdampak pada meningkatnya kecukupan rasio tingkat solvabilitas dan menurunnya rasio premi netto dibanding ekuitas, sehingga tidak melebihi batas yang diperkenankan.

#### Pencapaian Tahun 2014

Secara umum, pada tahun 2014 NASIONAL RE mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan, dimana Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2014 telah dilaksanakan dengan baik bahkan melampaui dari target yang ditetapkan, sebagaimana yang tercermin dari angka-angka berikut ini.

Perolehan laba setelah pajak dan zakat Perusahaan mencapai Rp131.086 juta atau 124,6% dari anggaran. Angka ini meningkat cukup signifikan 80,6%, atau Rp58.509 juta, bila dibandingkan laba tahun 2013 yang sebesar Rp72.577 juta. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan premi bruto reasuransi tahun 2014 mencapai Rp2.095.931 juta, atau 110,2% dari anggaran sebesar Rp1.902.000 juta. Angka ini meningkat sebesar Rp799.395 juta (61,7%) jika dibandingkan dengan perolehan premi tahun 2013, yang tercatat sebesar Rp1.296.536 juta.
2. Klaim bruto tahun 2014 tercatat sebesar Rp867.381 juta, atau 105,4 % dari anggaran sebesar Rp823.218 juta.
3. Secara keseluruhan hasil *underwriting* mencapai surplus Rp124.569 juta atau tercapai 118,3 % dari anggaran sebesar Rp105.341 juta atau meningkat sebesar Rp65.538 juta (111,0%) jika dibandingkan dengan hasil *underwriting* tahun 2013 yang sebesar Rp59.031 juta, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bidang treaty *surplus* Rp13.951 juta,
  - b. Bidang facultative *surplus* Rp109.615 juta,
  - c. Bidang reasuransi jiwa *surplus* Rp1.004 juta dan
  - d. Reasuransi syariah, sesuai PSAK 108 yang menjadi pendapatan perusahaan adalah pendapatan ujah dan alokasi surplus, masing-masing sebesar Rp21.644 juta dan Rp1.170 juta.
4. Hasil investasi dalam tahun 2014 sebesar Rp88.022 juta atau 111,6 % dari anggaran sebesar Rp78.902 juta dan jika dibandingkan dengan hasil investasi tahun 2013 sebesar Rp54.475 juta, maka hasil investasi tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp33.547 juta atau 61,6%.
5. Realisasi Beban Usaha tahun 2014 tercatat sebesar Rp89.760 juta atau 102,3% dari anggarannya sebesar Rp87.880 juta dan jika dibandingkan dengan beban usaha tahun 2013 sebesar Rp71.307 juta, maka mengalami peningkatan sebesar Rp18.453 juta atau 25,9%.

Those efforts made an impact on the Company's increasing the level of solvency adequacy ratio and decreasing the ratio of net premiums compared to equity, so it does not exceed the permitted limits.

#### Achievement in 2014

In general, in 2014 NASIONAL RE was able to demonstrate a satisfactory performance, where the Corporate Budget Plan 2014 has been executed properly even surpassed the target, as reflected in the following figures.

The Company's profit after tax and zakat reached Rp131,086 million or 124.6% of the budget. This figure is significantly increased by 80.6%, or Rp58,509 million, compared to earnings in 2013 which amounted to Rp72,577 million. Following is the detail:

1. Reinsurance gross premiums in 2014 reached Rp2,095,931 million, or 110.2% of the budget of Rp1,902 million. It increased by Rp799,395 million (61.7%) when compared to premium income in 2013, which was Rp1,296,536 million.
2. Gross claims in 2014 amounted to Rp867,381 million, or 105.4% of the budget of Rp823,218 million.
3. The overall results of underwriting reached a surplus of Rp124,569 million or 118.3% of the budget of Rp105,341 million, an increase of Rp65,538 million (111.0%) when compared with the results of underwriting in 2013 which amounted to Rp59,031 million, with details are as follows:
  - a. Treaty recorded a surplus of Rp13,951 million,
  - b. Facultative recorded a surplus of Rp109,615 million,
  - c. Life reinsurance recorded a surplus of Rp1,004 million and
  - d. Sharia Reinsurance, in accordance with SFAS 108, which became the Company's revenue is ujah and allocation surplus, amounting to Rp21.644 million and Rp1.170 million.
4. Investments incomes in 2014 amounted to Rp88,022 million, or 111.6% of the budget of Rp78,902 million and when compared with that of 2013 amounted to Rp54,475 million, the result of investment in 2014 increased by Rp33,547 million, or 61.6%.
5. Actual operating expenses in 2014 amounted to Rp89,760 million or 102.3% of the budget amounted to Rp87,880 million and when compared with operating expenses in 2013 amounted to Rp71,307 million, increased by Rp18,453 million or 25.9%.

6. Realisasi belanja modal tahun 2014 tercatat sebesar Rp5.305 juta atau 96,5% dari anggaran sebesar Rp5.495 juta.

Sementara itu, Total Aset perusahaan tercatat sebesar Rp2.930.469 juta, atau meningkat 70,1% dibandingkan posisi 31 Desember 2013, yakni Rp1.722.563 juta. Angka ini meningkat sebesar Rp1.207.906 juta. Total Aset terdiri dari investasi sebesar Rp1.650.248 juta (56,3%) dan non investasi sebesar Rp1.280.221 juta (43,7%). Realisasi investasi 2014 mencapai 99,6% dari anggaran.

Perusahaan mencatat jumlah Liabilitas sebesar Rp2.141.458 juta (73,1%) dana Tabarru sebesar Rp21.485 juta (0,7%) dan Ekuitas sebesar Rp767.526 juta (26,2%). Ekuitas tahun 2014 meningkat 98,6% dibandingkan Ekuitas tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp386.440 juta, atau mengalami peningkatan sebesar Rp381.086 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh karena adanya tambahan modal disetor dari Askrindo sebesar Rp250 miliar.

Arus Kas perusahaan selama tahun 2014, menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp1.289 juta. Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha, tercatat sebesar Rp208.302 juta, arus kas dari aktifitas pendanaan sebesar Rp250.000 juta dan kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp459.591 juta. Dari defisit tersebut ditambah dengan saldo awal kas bank sebesar Rp3.749 juta, maka saldo akhir kas/bank menjadi sebesar Rp2.460 juta.

Bila dibandingkan dengan tahun 2013, secara umum terlihat adanya peningkatan, antara lain *Return on Assets* dari 5,7% pada tahun 2013 naik menjadi 6,4% pada tahun 2014, *Return on Equity* dari 22,9% pada tahun 2013 turun menjadi 22,7% pada tahun 2014. Likuiditas perusahaan dari 126,3% pada tahun 2013 naik menjadi 134,0% pada tahun 2014.

Laporan Keuangan tahun buku 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan dengan pendapat "**Wajar Dalam Semua Hal yang Material sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia**".

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014, kinerja perusahaan tahun 2014 memperoleh skor sebesar **75,0** dengan predikat "**Sehat A**" dan pencapaian rasio tingkat

6. Actual capital expenditure in 2014 amounted to Rp5,305 million or 96.5% of the budget of Rp5,495 million.

Meanwhile, the Company recorded total assets of to Rp2.930.469 million, an increase of 70.1% compared to the December 31, 2013, Rp1,722,563 million. This figure increased by Rp1,207,906 million. Total assets consist of investments of Rp1,650,248 million (56.3%) and non-investment of Rp1,280,221 million (43.7%). Realization of investment in 2014 reached 99.6% of the budget.

The Company recorded liabilities of Rp2,141,458 million (73.1%), Tabarru of Rp21,485 million (0.7%) and equity of Rp767,526 million (26.2%). Equity increased by 98.6% in 2014 compared to 2013. Equity stood at Rp386,440 million, or an increase of Rp381,086 million. This is mainly due to the additional paid-in capital of Rp250 billion Askrindo.

Cash Flow in 2014, showed a decrease of Rp1,289 million. Net cash provided by operating activities, amounted to Rp208,302 million, cash flow from financing activities amounted to Rp250,000 million and net cash used in investing activities amounted to Rp459,591 million. Of the deficit, coupled with an initial balance of cash bank of Rp3,749 million, then the ending balance of cash / bank amounting to Rp2,460 million.

When compared to 2013, in general there is an increase, among others, Return on Assets from 5.7% in 2013 rose to 6.4% in 2014, Return on Equity from 22.9% in 2013 down to 22.7% in 2014. Liquidity from 126.3% in 2013 rose to 134.0% in 2014.

Financial Statements of fiscal year 2014 were audited by Public Accounting Firm Soejatna, Mulyana & Partners with the opinion of "**Fair In All Things Material appropriate Indonesian Financial Accounting Standards**".

Based on the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises State No. PER-10/MBU/2014 dated July 25, 2014, the Company's performance scored **75.0** with predicate of "**Healthy A**" and the achievement level of solvency ratios

solvabilitas dengan menggunakan metode *Risk Based Capital* sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 dan PMK No. 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 untuk usaha Reasuransi Konvensional sebesar 136,2% dan untuk usaha Reasuransi Syariah sebesar 40,9% atau telah memenuhi ketentuan BTSM minimal yang dipersyaratkan yaitu untuk usaha reasuransi konvensional 120% dan usaha reasuransi syariah 30%.

Penilaian kinerja Manajemen berdasarkan *Key Performace Indicators (KPI)* dari Pemegang Saham memperoleh nilai tertimbang sebesar 101,8 dari target 100.

### **Komitmen Tata Kelola Perusahaan**

Bagi NASIONAL RE penerapan tata kelola yang baik adalah *beyond compliance*, atau lebih dari sekedar bentuk kepatuhan. Hal ini adalah komitmen Perusahaan yang diwujudkan melalui aksi nyata seluruh karyawan di setiap level.

Dari tahun ke tahun, Direksi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG di NASIONAL RE. Dalam tahun 2014, manajemen dan seluruh jajaran perusahaan secara bertahap terus mengusahakan peningkatan penerapan "*best practices*" *Good Corporate Governance (GCG)*, dimana hasil *self assessment* GCG versi OJK diperoleh skor 90,64 dan *assesment* versi KPKU diperoleh skor 420,25 dengan kategori "*early result*".

### **Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

Terkait dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pada tahun 2014 kami terus melakukan pembenahan organisasi dan seluruh infrastrukturnya, baik dari kelengkapannya maupun kualitasnya.

Pada tahun 2014, kami mengembangkan Pedoman Rekrutmen berbasis *values* perusahaan, dimana pada saat melakukan rekrutmen pegawai, Perusahaan mendasarkan wawancara calon pegawai pada nilai-nilai budaya (*values*). Tujuan dari Pedoman Rekrutmen berdasarkan *values* adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pencapaian target kinerja Perusahaan.

Keunggulan Pedoman Rekrutmen berdasarkan *values* dibandingkan dengan pola rekrutmen sebelumnya adalah diperolehnya calon pegawai yang optimal dan berkualitas

using the *Risk Based Capital* according to the Minister of Finance No. 53/PMK.010/2012 dated April 3, 2012 and PMK No. 11/PMK.010/2011 dated January 12, 2011 for conventional reinsurance business amounted to 136.2% and for Sharia Reinsurance business amounted to 40.9%, or has complied with the required minimum BTSM of 120% for conventional reinsurance and 30% for sharia reinsurance.

Management performance assessment based *Key Performace Indicators (KPIs)* of the Shareholders obtain the weighted value of 101.8 out of 100 targets.

### **Commitment on Corporate Governance**

For NASIONAL RE, implementation of good governance is *beyond compliance*, or more than merely a form of compliance. This is our commitment that is manifested through concrete actions of all employees at every level.

From year to year, the Board of Directors is always trying to improve the quality of GCG implementation in NASIONAL RE. In 2014, the management and the whole Company continue to seek to gradually improve the implementation of best practices of *Good Corporate Governance (GCG)*, in which the self-assessment on GCG, FSA version, scored 90.64 and assessment KPKU version, scored 420.25 with category "*early result*".

### **Human Resource Management**

Concerning the development of Human Resources (HR), in 2014 we continue to revamp the organization and the entire infrastructure, both of completeness and quality.

In 2014, we developed a recruitment guideline based on the Company's *values*, that during recruitment process, interview was conducted based on corporate values. The purpose of this value-based recruitment guidelines is to get excellent human resources with necessary competence in the achievement of the Company's performance targets.

The advantage of value-based Recruitment Guideline on comparison with previous recruitment pattern is on the ability to obtain optimal candidate and qualified personnel

sesuai nilai-nilai budaya (*values*), sehingga diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien untuk tercapainya target kinerja yang diharapkan.

Pada tahun 2014, Manajemen Perusahaan telah mulai menerapkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). KPKU merupakan landasan dan referensi pengelolaan BUMN untuk mewujudkan kinerja unggul. KPKU juga menjadi sarana alat untuk melaksanakan *self-assessment* bagi BUMN. Penerapan KPKU ini memiliki tiga peran penting dalam memperkuat daya saing BUMN:

- Meningkatkan kapabilitas dan kinerja BUMN, baik secara finansial maupun non finansial.
- Memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi mengenai praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan BUMN.
- Sebagai alat bantu untuk memahami dan mengelola kinerja dan panduan perencanaan serta pembelajaran organisasi.

### Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan kapasitas IT dalam mendukung pelaksanaan strategi perusahaan, Divisi SIMR (Sistim Informasi & Manajemen Risiko) telah melaksanakan hal-hal berikut ini:

1. Help Desk :
  - *System Ticketing Help Desk* berbasis web
  - Service Level Agreement
  - Peningkatan system jaringan VLAN dan teknologi jaringan multi layer switch (Layer 3)
2. System Architect :
  - Assessment Teknologi Informasi dengan Score 2.38 menggunakan COBIT 4.1 sebagai Framework
  - Peningkatan system security dengan menggunakan teknologi Demilitarize Zone (DMZ) dan Antivirus Endpoint.
  - Wifi dengan teknologi Cloud
3. Data Base :
  - Backup system online
  - Database Management System dengan NAS
4. Development :
  - Pengembangan *Decision Support System* untuk *Treaty* berbasis Web
  - Pengembangan *Market Share System* berbasis Web
  - Pengembangan Risk Management System berbasis Web
  - Pengembangan *GCG System* berbasis Web

Diharapkan dengan terlaksananya berbagai program di atas

in accordance cultural values, which is expected to carry out their duties effectively and efficiently to achieve the expected performance.

In 2014, the Management Company has begun implementing Superior Performance Assessment Criteria (KPKU). KPKU is the foundation and reference for the management of SOEs to achieve superior performance. KPKU also a means to carry out self-assessment for SOEs. Application of KPKU has three important role in strengthening the competitiveness of SOEs:

- Improving the capabilities and performance of SOEs, both financially and non-financially.
- Facilitating the communication and exchange of information on best practices in the management of SOEs.
- As a means for understanding and managing performance and guide planning and organizational learning.

### Information Technology

To increase the capacity of IT in supporting the implementation of corporate strategy, IT Division has implemented the following:

1. Help Desk:
  - Web-based System Ticketing Help Desk
  - Service Level Agreement
  - Improvement of VLAN network system and multi-layer network technology switches (Layer 3)
2. System Architect:
  - Assessment on Information Technology scored 2:38 using COBIT 4.1 as Framework
  - Improving security system using Demilitarize Zone (DMZ) and Endpoint Antivirus technologies.
  - Wifi Cloud technology
3. Data Base:
  - Backup system online
  - Database Management System with NAS
4. Development:
  - Development of Decision Support System for Web-based Treaty.
  - Development of a Web-based System Market Share.
  - Development of a Web-based Risk Management System.
  - Development of a Web-based corporate governance system.



maka Perusahaan dapat memperkuat daya saing dan meningkatkan laju pertumbuhannya di masa-masa mendatang.

### Tantangan dan Rencana Tahun 2015

Ada beberapa permasalahan yang terjadi di tahun 2014 yang menjadi tantangan bagi Direksi untuk menyelesaikannya pada tahun 2015. Permasalahan tersebut antara lain adalah:

1. Hasil *underwriting* reasuransi jiwa syariah yang masih minus.
2. Menjaga dan meningkatkan pencapaian rasio tingkat solvabilitas (RBC) Reasuransi Konvensional dan Syariah.
3. Menyiapkan SDM yang dapat menghitung cadangan teknis sesuai ketentuan PER 09/BL/2013.
4. Melakukan asesmen untuk rating internasional

Selain itu, Direksi juga telah menyusun langkah perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2015 yaitu :

1. Meningkatkan hasil *underwriting* reasuransi jiwa syariah dengan jalan:
  - a. *Reassessment* terhadap *line of bussiness* yang tidak menguntungkan.
  - b. Memperbaiki kualitas *underwriting*.
  - c. Mencari peluang bisnis baru yang lebih menguntungkan.
  - d. Mencari alternatif bisnis baru (diversifikasi) dan optimalisasi kapasitas yang ada
  - e. Mendapatkan *backup* retro yang fleksibel dan memadai.
2. Menjaga dan meningkatkan pencapaian rasio tingkat solvabilitas (RBC), melalui:
  - a. Perbaikan kualitas aset (*admitted asset*).
  - b. Peningkatan kualitas *underwriting*.
  - c. Peningkatan Pendapatan Perusahaan dalam rangka peningkatan Laba.
3. Menyiapkan SDM yang dapat menghitung cadangan teknis dengan jalan:
  - a. Bekerjasama dengan aktuaris independen untuk melakukan training dan perhitungan bersama dari kuartal I s.d IV tahun 2015.
  - b. Mendorong dan memfasilitasi pegawai untuk percepatan perolehan gelar aktuaris dan percepatan pemahaman didalam penghitungan.
  - c. Penambahan pegawai/staf di Aktuaris Perusahaan.
4. Terkait *assesment* KPKU dan GCG, upaya yang akan dilakukan yaitu melakukan pelatihan lanjutan dan menyiapkan Tim Assesor KPKU dan GCG bekerjasama dengan konsultan.

It is expected with the implementation of various programs above, the Company will strengthen its competitiveness and accelerate the growth in the future.

### Challenges and Plan in 2015

Several problems occurred in 2014 and have become challenges for the Board of Directors to resolve in 2015. Those problems include:

1. Income from Sharia life reinsurance underwriting is still minus.
2. Maintaining and improving achievement levels of solvency ratio (RBC) of Conventional and Sharia Reinsurance.
3. Preparing HR that able to calculate technical reserves in accordance with PER 09/BL/2013.
4. Assessments conducted to international rating

In addition, the Board of Directors has also established corrective measures to be undertaken in 2015, namely:

1. Increasing income from Sharia life reinsurance underwriting through:
  - a. Reassessing unfavorable line of bussiness.
  - b. Improving the quality of underwriting.
  - c. Looking for new more profitable business opportunities.
  - d. Looking for new business alternatives (diversification) and the optimization of existing capacity
  - e. Getting flexible and adequate backup retro.
2. Maintain and improve the achievement levels of solvency ratio (RBC), through:
  - a. Improvement in asset quality (admitted assets).
  - b. Improving the quality of underwriting.
  - c. Increased Revenue Company in order to increase profit.
3. Prepare HR to calculate technical reserves through:
  - a. Collaboration with independent actuary to conduct training and joint calculation from the first to fourth quarter of 2015.
  - b. Encourage and facilitate employees to accelerate their actuary degree and understanding on calculation.
  - c. Addition of employees/staff in the Company's Actuary.
4. Related to the assessment of KPKU and GCG, efforts will be made is to further train and prepare KPKU and corporate governance Assessor Team in collaboration with consultants .



Kami juga melihat bahwa, tantangan yang dihadapi industri asuransi, khususnya industri reasuransi cukup besar. Hal ini disebabkan karena neraca pembayaran premi asuransi yang masih berada dalam posisi negatif. Bila dibandingkan dengan premi reasuransi ke luar negeri, premi reasuransi yang masuk dari luar negeri masih sangat kecil. Dengan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa peluang pasar (*market space*) reasuransi nasional sesungguhnya masih sangat besar. Untuk itu dibutuhkan penambahan kapasitas nasional yang lebih besar agar dapat menampung pertanggung-pertanggung asuransi yang selama ini disesikan ke luar negeri.

Tema RKAP tahun 2015 adalah "**Menjadi Perusahaan Reasuransi domestik unggul dan berperan aktif dalam menekan laju defisit neraca pembayaran serta tumbuh secara berkesinambungan**", yang secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

**a. Menjadi Perusahaan Reasuransi domestik unggul**

Dengan adanya tambahan modal disetor dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) selaku Pemegang Saham mayoritas pada tahun 2014, yakni sebesar Rp250 Miliar dan rencana tambahan modal disetor tahun 2015 sebesar Rp75 Miliar, maka diharapkan NASIONAL RE sudah menjadi Perusahaan Reasuransi domestik unggul dengan memiliki modal sendiri/ekuitas pada akhir tahun 2015 di atas perusahaan reasuransi domestik lainnya, sehingga akan menjadikan NASIONAL RE sebagai perusahaan unggul dalam kapasitas, *market share* dan dengan rating tertinggi dibanding kompetitor.

**b. Berperan aktif didalam menekan laju defisit neraca pembayaran**

Adanya tambahan modal disetor pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 sesuai RJPP tahun 2013-2017, akan memperbesar kapasitas yang dimiliki perusahaan. Meningkatnya kapasitas perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi pertumbuhan perusahaan tetapi juga dapat menahan laju *premium flight* ke luar negeri sehingga dapat menekan laju defisit neraca pembayaran dari premi reasuransi yang selama ini banyak ke luar negeri.

**c. Tumbuh secara berkesinambungan**

Pada tahun 2015, Perusahaan berusaha untuk memperkuat

We also understand the challenges that must be faced by insurance industry, in particular reinsurance industry, is quite large. This is because the balance of payments of insurance premiums are still in a negative position. When compared with the overseas reinsurance premiums, reinsurance premiums coming from abroad is still very small. With these figures it can be seen that the market opportunities (*market space*) of national reinsurance is still very large. That requires the addition of a greater national capacity in order to accommodate the insurance-insurance coverage during this disesikan abroad.

2015 RKAP theme is "**Becoming a superior domestic reinsurance company and play an active role in supressing the deficit in balance of payments and achieve sustainable growth**", which can be broadly described as follows:

**a. Being superior domestic Reinsurance Company.**

With the additional paid-in capital from PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) as shareholders in 2014, which amounted to Rp250 billion and a plan for additional paid-in capital in 2015 amounted to Rp75 billion, it is expected that the NASIONAL RE has become excellent Reinsurance Company to domestic with own capital / equity by the end of 2015 above other domestic reinsurance companies, which will make NASIONAL RE superior in capacity, market share and with the highest rating among competitors.

**b. Play an active role in reducing the deficit of balance of payments.**

The additional paid-in capital in 2014, 2015, 2016 and 2017 according to RJPP 2013 to 2017, will increase the capacity of the company. Increasing the capacity of the company is not only beneficial to the growth of the company but also can withstand a premium rate flight abroad so as to reduce the rate of balance of payments deficit of reinsurance premiums, which many abroad.

**c. Sustainable growth.**

In 2015, the Company seeks to strengthen the foundations

pondasi-pondasi struktur usaha perusahaan sehingga sesuai RJPP tahun 2013-2017 diharapkan Perusahaan dapat tumbuh secara berkesinambungan. Hal ini tergambarkan dari anggaran *Earning After Tax* (EAT) perusahaan yang terus mengalami pertumbuhan secara konsisten. Diharapkan di tahun 2015 Perusahaan juga dapat berjalan efektif guna memberikan kontribusi dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan kinerja tahun 2015.

Menunjuk rencana strategis Perusahaan di tahun 2015 tersebut dan sesuai dengan target-target Perusahaan yang tertuang dalam RJPP tahun 2013-2017, dalam rangka mencapai target menjadi perusahaan reasuransi lokal yang terbesar di Indonesia, maka Pemegang Saham akan menambah modal disetor sebesar Rp75 Miliar, selain yang telah diterima pada tahun 2014 sebesar Rp250 Miliar. Adapun tambahan modal tersebut dimaksudkan untuk :

- Penguatan struktur keuangan
- Meningkatkan kapasitas
- Memperkuat daya saing perusahaan

### Komposisi Direksi

Sepanjang Tahun 2014, susunan Direksi tidak mengalami perubahan, yaitu:

1. M. Shaifie Zein – Direktur Utama
2. Edhie Mulyono – Direktur Operasi
3. Rusdianto – Direktur Keuangan & SDM

### Penutup

Akhir kata, ijin kan saya mewakili seluruh anggota Direksi untuk menyampaikan penghargaan kami yang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan atas kerja keras dan dedikasinya kepada Perusahaan. Tentunya kami berharap di tahun mendatang, dengan dukungan seluruh karyawan Perusahaan dapat mencapai hasil yang lebih baik.

Kepada Dewan Komisaris, kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Karena berkat masukan dan dukungan Dewan Komisaris, kami dapat menjalankan pengelolaan perusahaan sebaik mungkin dan mencapai hasil yang optimal di tengah tantangan yang kami hadapi di tahun 2014.

of the company's business structure in accordance with RJPP 2013-2017 the Company is expected to grow continuously. This is illustrated by the Company's EAT budget that continues to grow consistently. In 2015, the company is expected to run effectively to contribute in maintaining the continuity of the growth performance of 2015.

Referring to the strategic plan of the Company in 2015 and in accordance with the targets set out in the RJPP from 2013 to 2017, in order to achieve the target of becoming the largest local reinsurance company in Indonesia, the Shareholders will increase the paid up capital of Rp75 billion, in addition to which was received in 2014 amounting to Rp250 billion. The additional capital is intended to:

- Strengthening the financial structure
- Increase the capacity
- Strengthen the competitiveness of companies

### Composition of the Board of Directors

Throughout 2014, the Composition of the Board of Directors remains the same, namely:

1. M. Shaifie Zein – President Director
2. Edhie Mulyono - Director of Operation
3. Rusdianto - Director of Finance & HR

### Closing

Finally, on behalf of all members of the Board of Directors, allow me to express our high appreciation to all employees for their hard work and dedication to the Company. We certainly hope that in the coming years, with the support of all employees. The Company can achieve better results.

We also would like to thank the Board of Commissioners for the input and support of the Board of Commissioners, we can manage of the company as good as possible and achieve optimal results in the midst of the challenges we faced in 2014.

Sedangkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Kami berharap di tahun-tahun mendatang kami dapat menjawab kepercayaan ini dengan hasil yang lebih memuaskan.

On the other hand, to shareholders and stakeholders, we would like to thank for the trust given. We hope that in the coming years we can answer these trust with more satisfactory results.

Atas Nama Direksi/  
On behalf of the Board of Directors ,



M. Shaifie Zein, SE, Dipl, Ins, ACII, FIIS, CFP®, CRGP  
Direktur Utama/President Director





• M. Shaifie Zein, SE, Dipl, Ins, ACII, FIIS, CFP®, CRGP  
Direktur Utama/President Director

• Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®  
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/  
Director of Finance & Human Resources

• Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AIIS, CRGP  
Direktur Operasi/Director of Operation



# Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2014

## Statement of the Board of Commissioners and Board of Directors About Responsibility for the Annual Report PT Reasuransi Nasional Indonesia 2014.

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Reasuransi Nasional Indonesia tahun 2014 telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We the undersigned declare that all information in the Annual Report PT Reasuransi Nasional Indonesia 2014 is completely disclosed and we are responsible for the accuracy of its content.

This statement is made to whom it may concern.

Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia  
Board of Commissioners PT Reasuransi Nasional Indonesia



Rinarno Pramudyanto, SE, MM, CRGP  
Komisaris Utama/President Commissioner



Sulaeman, SE, MM, AAAIK, AIIS  
Komisaris/Commissioner



Raymond Buisson, SE, CRGP  
Komisaris Independen/Independent  
Commissioner

Dewan Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia  
Board of Directors PT Reasuransi Nasional Indonesia



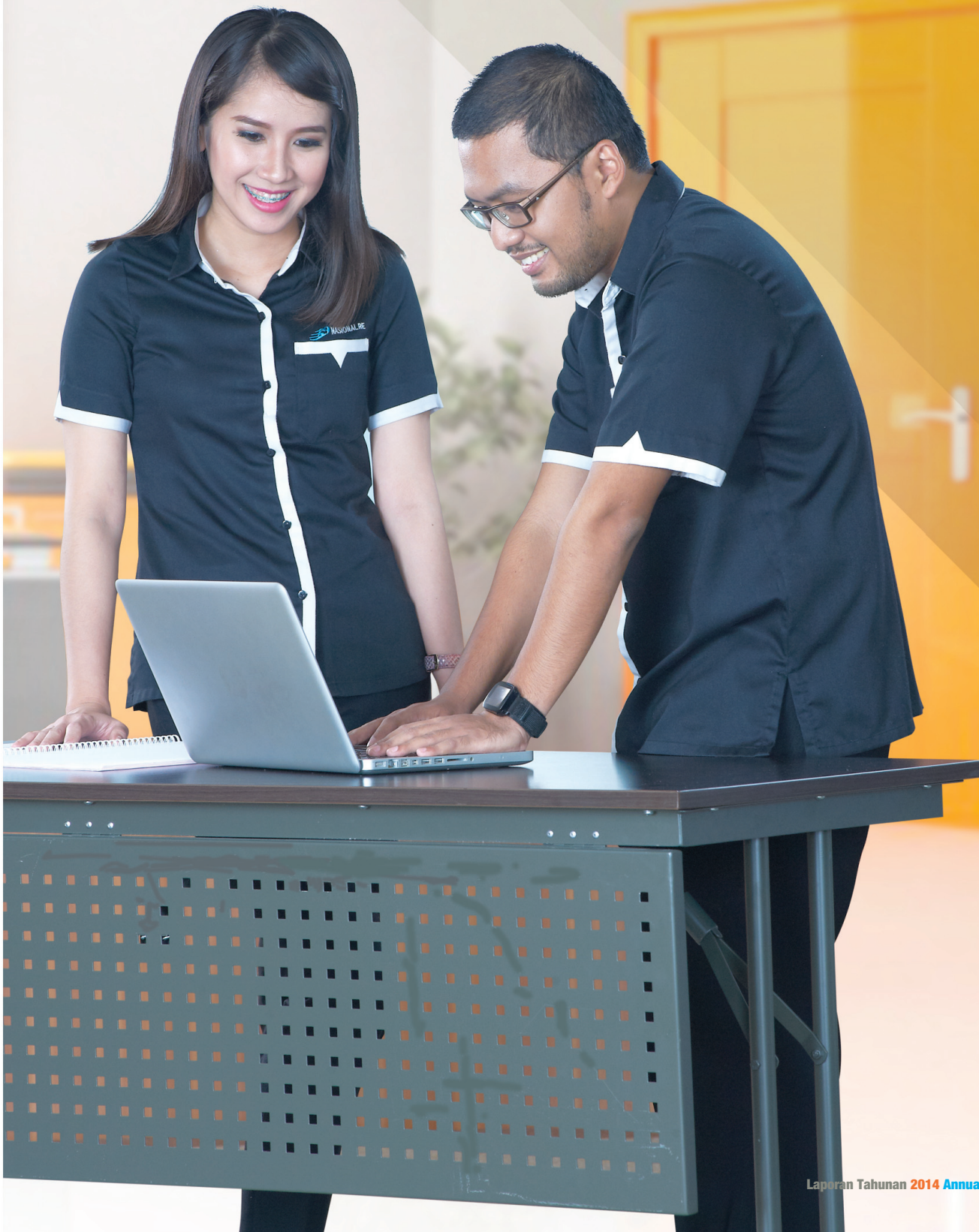
M. Shaifie Zein, SE, Dipl. Ins, ACII, FIIS, CFP®, CRGP  
Direktur Utama/President Director



Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®  
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/  
Director of Finance & Human Resources



Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AIIS, CRGP  
Direktur Operasi/Director of Operation











bagian-03/chapter-03  
**Profil Perusahaan**  
Company Profile





## Nama, Alamat dan Informasi Umum Perusahaan

Company, Name, Address and General Information

### Nama Perusahaan

PT Reasuransi Nasional Indonesia (NASIONAL RE)

### Name

PT Reasuransi Nasional Indonesia (NASIONAL RE)

### Bidang Usaha

Reasuransi

### Line of Business

Reinsurance

### Pendirian Perusahaan

22 Agustus 1994

### Establishment Deed

August 22, 1994

### Kepemilikan

PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia 99,9998%  
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo 0,0002%

### Ownership

PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia 99,9998%  
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo 0.0002%

### Modal Dasar per 31 Desember 2014

Rp1.800.000.000.000

### Authorized Capital as of December 31, 2014

Rp1,800,000,000,000

### Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh per 31 Desember 2014

Rp463.000.000.000

### Issued and Fully Paid Capital of December 31, 2014

Rp463,000,000,000

**Ekuitas** per 31 Desember 2014 Rp767.526.000.000

**Equity** per December 31, 2014 Rp767,526,000,000

### Alamat Kantor

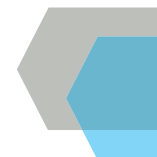
Jl. Cikini Raya No. 99, PO BOX 1618 JKP 10016, Jakarta, Indonesia, 10330.  
Phone (62-21) 3140009, 3149373 (hunting).  
Fax (62-21) 3143716, 3909373, 31900430.  
E-mail [nasionalre@nasionalre.co.id](mailto:nasionalre@nasionalre.co.id)  
Website <http://www.nasionalre.co.id>

### Office Address

Jl. Cikini Raya No. 99, PO BOX 1618 JKP 10016, Jakarta, Indonesia, 10330.  
Phone (62-21) 3140009, 3149373 (hunting).  
Fax (62-21) 3143716, 3909373, 31900430.  
E-mail [nasionalre@nasionalre.co.id](mailto:nasionalre@nasionalre.co.id)  
Website <http://www.nasionalre.co.id>

## Maksud dan Tujuan Usaha

### Goals and Objectives



Maksud dan tujuan dari Perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya penyelenggaraan usaha reasuransi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas, dengan memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi baik berdasarkan prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

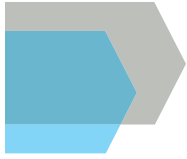
The goals and objectives of the Company are to participate in implementing the government policies and in supporting the government's programs in economy and national development in general and running high quality and competitive reinsurance business in particular, to generate profit and to increase the Company's value by applying limited liability company principles and by providing services in reinsurance to cover risks faced by insurance companies, either on the basis of conventional principles or sharia principles.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

To achieve the above goals and objectives, the Company conducts the following businesses:

1. Menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang untuk risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian/ umum dan/atau Perusahaan asuransi jiwa.
2. Menerima reasuransi dalam bidang asuransi kerugian/ umum dan atau asuransi jiwa baik secara langsung maupun melalui perantara (*broker*) reasuransi.
3. Melakukan retrosesi atau reasuransi sub 1 di atas kepada perusahaan asuransi dan atau reasuransi secara langsung ataupun menyelenggarakan sebagian usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk unit syariah.

1. Reinsurance business against risks faced by general insurance companies and/or life insurance companies;
2. Reinsurance of loss/general insurance and/or life insurance, either directly or through reinsurance brokers;
3. Retrocession or reinsurance of point 1 above to insurance and / or reinsurance companies, directly or through reinsurance brokers to conduct part of the reinsurance business under sharia principles a sharia unit is established.

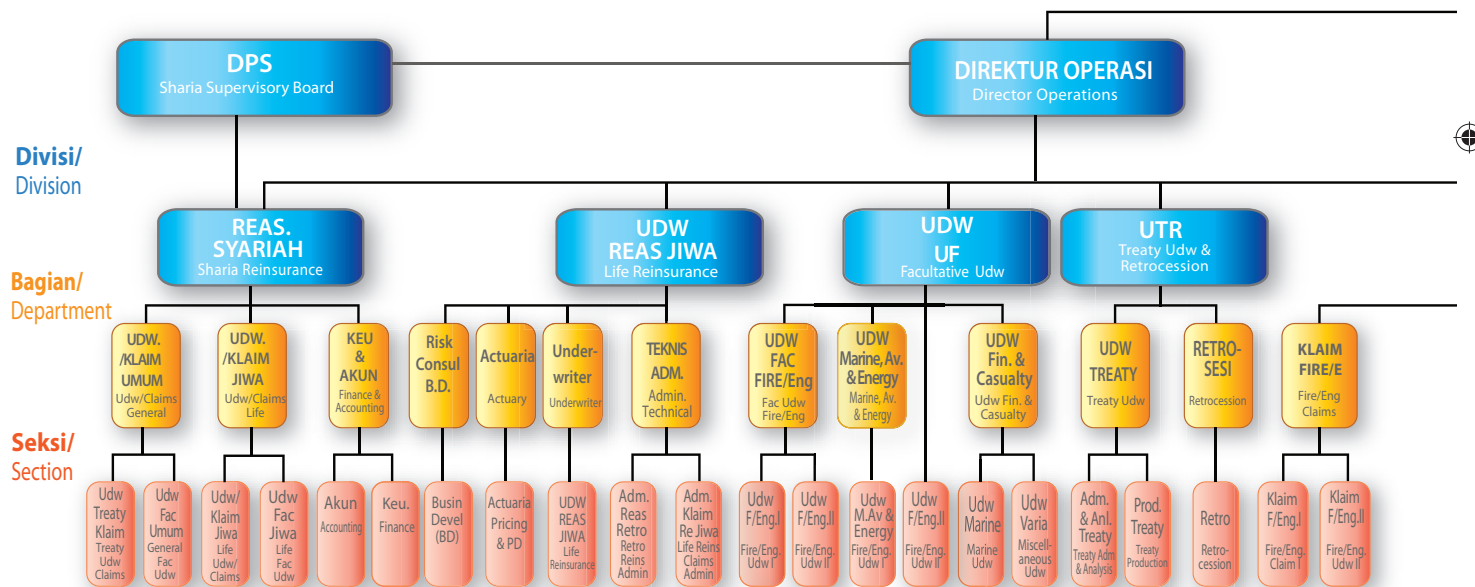


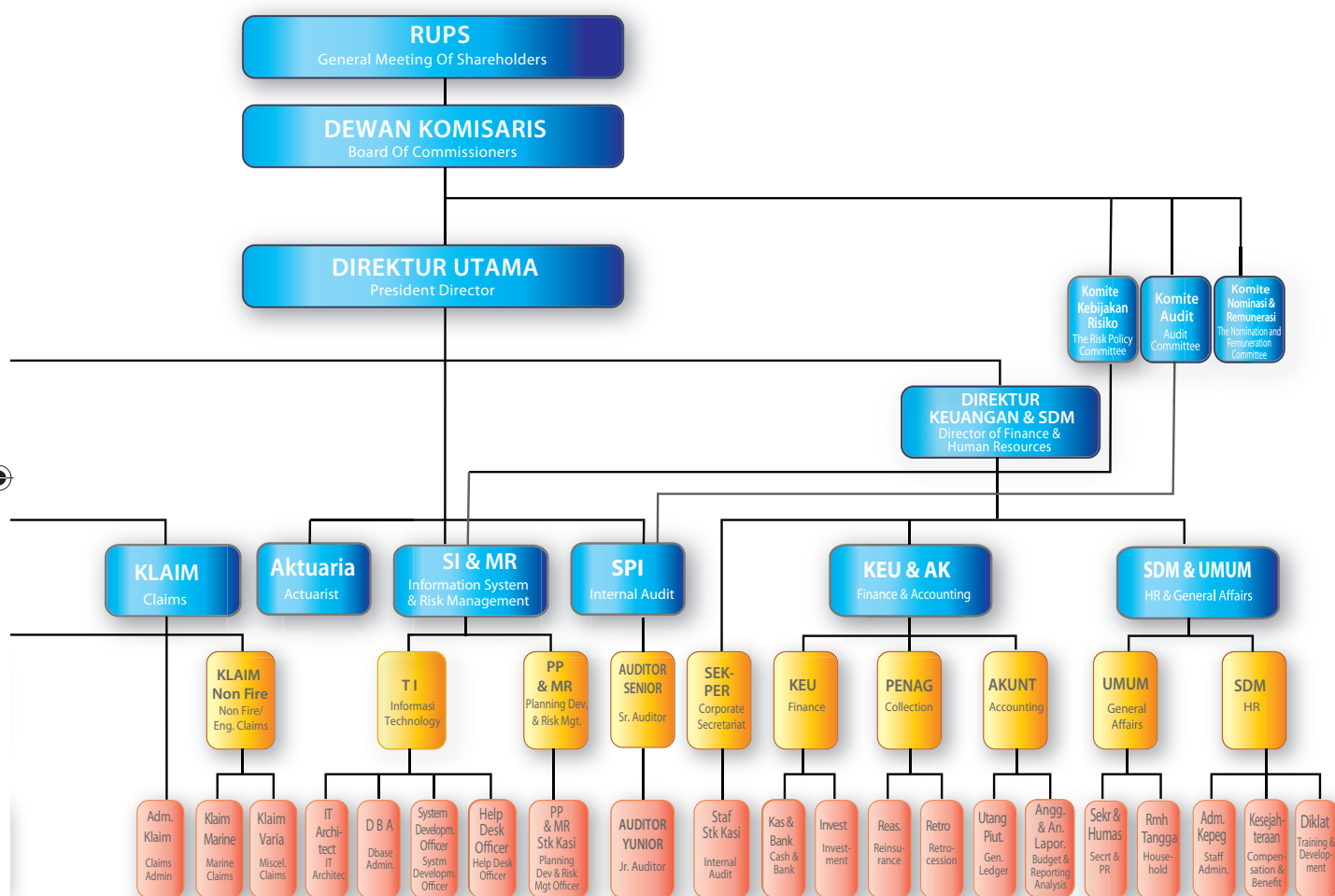
# Struktur Organisasi

## Organization Structure

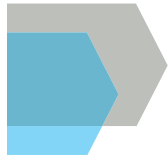
### STRUKTUR ORGANISASI PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA (NASIONAL RE) s/d 31 Desember 2014

### Organization Structure of PT Reasuransi Nasional Indonesia (NASIONAL RE) as at December 31, 2014









## Riwayat Singkat Perusahaan

### A Brief History of the Company

PT Reasuransi Nasional Indonesia, atau disingkat NASIONAL RE, didirikan berdasarkan akta Nomor 129 tanggal 22 Agustus 1994 di hadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Akta Nomor 53 tanggal 15 September 1994 di hadapan Achmad Abid, SH, Notaris Pengganti di Jakarta dan Akta Nomor 15 tanggal 7 Oktober 1994 dihadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut kemudian disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-15.266.HT.01.01 Th.94 tanggal 11 Oktober 1994 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1994 Nomor 103 Tambahan Nomor 10862.

Pada awalnya, Perusahaan merupakan suatu unit setingkat Bagian yang dikemudian hari berkembang menjadi Divisi dari PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), yang diberi nama Divisi Reasuransi Kerugian. Divisi ini berfungsi sebagai unit usaha *Professional Reinsurer*. Dengan demikian, walaupun secara *de jure* Perusahaan didirikan pada tahun 1994, namun secara *de facto* Perusahaan telah memulai usahanya sejak tahun 1971, yaitu sejak ASKRINDO mendapat ijin untuk menjalankan usaha Reasuransi Kerugian sebagai bisnis penunjang disamping usaha Asuransi Kredit yang menjadi bisnis utamanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka ASKRINDO tidak diperkenankan beroperasi sebagai asuransi maupun reasuransi sekaligus, sehingga dilakukan pemisahan menjadi satu entitas tersendiri dimana perusahaan (NASIONAL RE yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1994) memperoleh ijin operasi sebagai perusahaan reasuransi pada tahun 1995 berdasarkan dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/KMK.17/1995 tanggal 9 Januari 1995.

Pada tanggal 28 Oktober 2005, NASIONAL RE melebarkan sayap usahanya dengan memulai usaha Reasuransi Syariah. Langkah ini sejalan dengan pesatnya perkembangan perekonomian yang berazaskan Syariah di Indonesia, termasuk asuransi syariah. Semakin berkembangnya asuransi syariah di Indonesia, tentunya memerlukan adanya reasuransi yang beroperasi pula berdasarkan syariah Islam, sehingga dapat diadakan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

PT Reasuransi Nasional Indonesia, or abbreviated NASIONAL RE, was established based on the Notarial Deed of Sutjipto SH No. 129 dated August 22, 1994 from, which was amended with the Notarial Deed of Achmad Abid, SH, substituted notary in Jakarta, No. 53 dated September 15, 1994 and the Notarial Deed of Sutjipto SH, No, 15 dated October 7, 1994. The Notarial Deeds were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-15.266.HT.01.01 Th.94 dated October 11, 1994 and announced in the State Gazette date December 27, 1994 No. 103 Addendum No. 10862.

The history of the Company originated from one of departments, which later became the Division of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), namely General Reinsurance Division. This division served as a Professional reinsurer business unit. Hence, according to the law, the Company was established in 1994, but as a matter of fact, the Company has started its business since 1971, since ASKRINDO was granted the permit to operate general reinsurance business as a supporting business, in addition to their core business of Credit Insurance. With the enactment of the Law No. 2 of 1992 on Insurance Business that forbid ASKRINDO to operate as insurance and reinsurance company concurrently, a spin-off must be undertaken and the Company was officially established on August 22, 1994 and received operation permit from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No.27/KMK.17/1995 dated January 9, 1995.

On October 28, 2005, NASIONAL RE started Sharia Reinsurance business. This was done to accommodate fast growing of Sharia-based business, including Sharia-based insurance. The growing of sharia-based insurance demands the reinsurance companies that also based on the principles of Sharia and then a mutual collaboration between both parties can be brought about.

Penambahan bidang usaha Reasuransi Syariah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia disahkan dalam Akta Nomor 42 tanggal 10 Agustus 2005 di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris Pengganti Sutjipto SH, di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-24079 HT.01.04.TH.2005 tanggal 31 Agustus 2005.

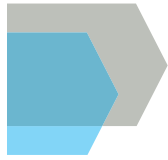
Sejak resmi berdiri, Perusahaan mencatat perkembangan yang cukup pesat dan berhasil membangun kepercayaan publik, sebagaimana yang terlihat dari berbagai penghargaan yang diterimanya. Pada tahun 2006, Perusahaan menerima penghargaan sebagai Perusahaan Reasuransi Terbaik dan pada tahun 2008 mendapatkan penghargaan sebagai Unit Reasuransi Syariah Terbaik, kedua-duanya berdasarkan versi Majalah Investor.

Perusahaan memasarkan berbagai produk reasuransi, antara lain Reasuransi Harta Benda, Kendaraan Bermotor, Rekayasa, Pengangkutan, Rangka Kapal, Rangka Pesawat, Kredit, Surety Bond, Kredit, Satelit, Energi, Tanggung Gugat, Kecelakaan Diri, Aneka dan Reasuransi Jiwa, baik untuk Reasuransi Konvensional maupun Reasuransi Syariah.

The adding of Syariah reinsurance business unit is based on Extra Ordinary General Meeting of Shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia and is ratified with decision of meeting No. 42 dated August 10, 2005, made before the notary Aulia Taufani, SH, acting in substitute to notary Sutjipto SH, in Jakarta, approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with his letter No. C-24079 HT.01.04.TH.2005 dated August 31, 2005.

Since officially established, the Company recorded a rapid growth and managed to build public confidence, as can be seen from the numerous awards received. In 2006, the Company was awarded as the Best Reinsurance Company and in 2008 was awarded as the Best Sharia Reinsurance Unit, both by Investor Magazine.

The Company provides a wide range of reinsurance products, among others Property, Vehicle, Engineering, Transportation, Marine Hull, Aircraft Frame, Credit, Surety Bond, Credit, Satellite, Energy, Liability, Personal Accident, Arts and Life Reinsurance, both for conventional and Sharia Reinsurance.



## Jejak Langkah

### Milestones

#### 1994

NASIONAL RE didirikan di Jakarta sebagai anak perusahaan dari PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) yang menjalankan usahanya dalam bidang Reasuransi, dengan Modal Dasar awal sebesar Rp100.000.000.000 (seratus Miliar Rupiah) dan Modal Disetor penuh sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima Miliar Rupiah).

NASIONAL RE is established in Jakarta as a subsidiary of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) engaging in the business of reinsurance, with the initial authorized capital of Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) and fully Paid up Capital of Rp25,000,000,000 (twenty five billion rupiah).

#### 1995

Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor 27/KMK.17/1995 tanggal 9 Januari 1995 tentang Pemberian Ijin Usaha di Bidang Reasuransi kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia (NASIONAL RE)

The Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued a Decree No. 27/KMK.17/1995 dated January 9, 1995 on the Permit to PT Reasuransi Nasional Indonesia (NASIONAL RE) to run reinsurance business.

#### 1999

Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO selaku Pemegang Saham Mayoritas sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima Miliar Rupiah) sehingga Modal Disetor Perusahaan menjadi Rp50.000.000.000 (lima puluh Miliar Rupiah) sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 47 tanggal 10 November 1999, dengan pengesahan Departemen Kehakiman RI Nomor: C-3388 HT.01.04 tanggal 21 Februari 2000.

Additional Paid-up Capital Rp25,000,000,000 (Twenty Five Billion Rupiah) from PT Askrindo as Majority Shareholders, adding to the paid up capital to Rp50,000,000,000 (Fifty Billion Rupiah) in accordance with Notarial Deed of Sutjipto, SH No. 47 dated November 10, 1999, with the approval of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-3388 HT.01.04 dated February 21, 2000.

#### 2000

Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar dari Rp15.000.000.000 (lima belas Miliar Rupiah) sehingga Modal Disetor Perusahaan menjadi Rp65.000.000.000 (enam puluh lima Miliar Rupiah) sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 37 tanggal 16 Juni 2000, dengan pengesahan Departemen Kehakiman RI Nomor: C-00902 HT.01.04 tanggal 18 Januari 2003.

Additional Paid-up Capital from PT Askrindo, as a Shareholder, amounting to Rp15,000,000,000 (Fifteen Billion Rupiah) so that the paid-up capital became Rp65,000,000,000 (Sixty Five Billion Rupiah) in accordance with Notarial Deed of Sutjipto, SH No. 37 dated June 16, 2000, with the approval of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-00902 HT.01.04 dated January 18, 2003.

#### 2005

1. Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh Miliar Rupiah) sehingga Modal Disetor dari sebelumnya Rp65.000.000.000 (enam puluh lima Miliar Rupiah) menjadi Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima Miliar Rupiah) sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 42 tanggal 10 Agustus 2005, dengan pengesahan Departemen Kehakiman RI Nomor: C-24079 HT.01.04 Th 2005 tanggal 15 Agustus 2005.
2. Pada tanggal 28 Oktober 2005 NASIONAL RE memulai usaha Reasuransi Syariah, hal ini dilakukan untuk menampung bisnis reasuransi dengan prinsip syariah,

- 1) Additional Paid-up Capital from PT Askrindo, as a Shareholder, amounting to Rp10,000,000,000 (Ten Billion Rupiah) so that the paid-up capital became Rp75,000,000,000 (Seventy Five Billion Rupiah) in accordance with Notarial Deed of Sutjipto, SH No. 42 dated August 10, 2005, with the approval of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. C-24079 HT.01.04 Th 2005 dated August 15, 2007.
- 2) On October 28, 2005, NASIONAL RE entered into Sharia Reinsurance business. This was done to accommodate the reinsurance business with Islamic principles, whereas

dimana sesuai ketentuan bahwa setiap perusahaan asuransi syariah harus menempatkan reasuransinya pada perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. Modal Disetor unit Reasuransi Syariah perusahaan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh Miliar Rupiah) sebagaimana disebutkan pada butir 1.

in accordance with the provision that every sharia insurance companies must put their reinsurance in the reinsurance company with sharia principles. Paid-up Capital of Sharia reinsurance company units for Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah) as mentioned in point 1.

## 2007

Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh Miliar Rupiah) sehingga Modal Disetor NASIONAL RE dari sebelumnya Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima Miliar Rupiah) menjadi Rp85.000.000.000 (delapan puluh lima Miliar Rupiah), sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 108 tanggal 22 Februari 2007, dengan pengesahan Departemen Kehakiman RI Nomor: W7-HT.01.04-4562 tanggal 15 Agustus 2007.

Additional Paid-up Capital from PT Askrindo as Shareholders, amounted to Rp10,000,000,000 (Ten Billion Rupiah) so that the paid-up capital become Rp85,000,000,000 (Eighty Five Billion Rupiah) in accordance with Notarial Deed of Sutjipto, SH No. 108 dated February 22, 2007, with the approval of the Department of Justice of the Republic of Indonesia No. W 7-HT.01.04-4562 dated August 15, 2007.

## 2011

1. Peningkatan Modal Dasar Perusahaan dari Rp100.000.000.000 (seratus Miliar Rupiah) menjadi Rp400.000.000.000 (empat ratus Miliar Rupiah), sesuai Akta Notaris Umaran Mansjur, SH Nomor 9 tanggal 29 Juli 2011, dengan pengesahan Departemen Departemen Hukum & HAM RI Nomor AHU-53290.AH.01.02 tanggal 01 November 2011.
2. Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp53.000.000.000 (lima puluh tiga Miliar Rupiah), yang terdiri dari tanah dan gedung kantor Jl. Cikini Raya No. 99 Jakarta Pusat sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima Miliar Rupiah) dan pengalihan dana cadangan umum sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas Miliar Rupiah), sehingga Modal Disetor menjadi sebesar Rp138.000.000.000 (seratus tiga puluh delapan Miliar Rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp85.000.000.000 (delapan puluh lima Miliar Rupiah), sebagaimana dicatat dalam Akta Notaris Umaran Mansjur, SH Nomor 9 tanggal 29 Juli 2011, dengan pengesahan Departemen Hukum & HAM Nomor: AHU-53290.AH.01.02 tanggal 01 November 2011.
3. Tanggal 01 November 2011 PT Reasuransi Nasional Indonesia memperoleh rating **A- (A minus)** dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

- 1) Change in the Company's Authorized Capital from Rp100,000,000,000 (One Hundred Billion Rupiah) to Rp400,000,000,000 (Four Hundred Billion Rupiah), in accordance with the Notarial Deed of Umaran Mansjur, SH No. 9 dated July 29, 2011, with the approval of the Department of Justice of the Republic of Indonesia & human rights RI Nomor AHU-53290.AH.01.02 dated November 01, 2011.
- 2) Additional Paid-up Capital from PT Askrindo, as a Shareholder, amounting to Rp53,000,000,000 (Fifty Three Billion Rupiah) in the form of land and office buildings on Jl. Cikini Raya No. 99 Central Jakarta, worth Rp35,000,000,000 (thirty five billion rupiah) and transfer of general reserve fund of Rp15,000,000,000 (fifteen billion rupiah) and hence the paid-up capital became Rp138,000,000,000 (One Hundred Thirty Eight Billion Rupiah) from previously Rp85,000,000,000 (eighty-five billion rupiah), in accordance with Notarial Deed of Sutjipto, SH No. 9 dated July 29, 2011, with the approval of the Department of Law & Human Rights No. AHU-53290.AH.01.02 dated November 01, 2011
3. On November 01, 2011, PT Reasuransi Nasional Indonesia obtained **A- (A minus)** rating from PEFINDO, a national rating agency.



## 2013

1. PT Reasuransi Nasional Indonesia meluncurkan layanan terbarunya berupa layanan reasuransi jiwa berbasis web, yaitu *www.e-lifere.com* pada tanggal 08 Februari 2013.
  2. e-lifeRe mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai layanan asuransi jiwa pertama di Indonesia, bahkan di dunia, yang menggunakan layanan web pada tanggal 08 Februari 2013.
  3. Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima Miliar Rupiah) sehingga Modal Disetor menjadi Rp213.000.000.000 (dua ratus tiga belas Miliar Rupiah) sesuai Akta Notaris Hadijah, SH Nomor 9 tanggal 03 Mei 2013, dengan pengesahan Kementerian Hukum & HAM RI Nomor: AHU-AH.01.10-24996 tanggal 20 Juni 2013.
  4. PT Reasuransi Nasional Indonesia memperoleh rating **"A"** dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
1. PT Reasuransi Nasional Indonesia launched its newest web-based life reinsurance services, namely *www.e-lifere.com* on February 08, 2013.
  2. e-lifeRe was awarded an award from the Indonesian Record Museum (MURI) as the first life insurance services in Indonesia, even in the world, to use web services, on February 08, 2013.
  3. Additional Paid-up Capital from PT Askrindo, as a Shareholder, amounting to Rp75,000,000,000 (Seventy Five Billion Rupiah) so that the paid-up capital became Rp213,000,000,000 (Two Hundred and Thirteen Billion Rupiah) in accordance with Notarial Deed of Hadijah, SH No.9 dated May 03, 2013, with the approval of the Department of Law & Human Rights No. AHU-AH.01.10-24996 dated June 20, 2013.
  4. PT Reasuransi Nasional Indonesia obtained an **"A"** rating from PEFINDO.

## 2014

- a) Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh Miliar Rupiah) berupa *fresh money* sehingga Modal Disetor Perusahaan menjadi Rp363.000.000.000 (tiga ratus enam puluh tiga Miliar Rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp213.000.000.000 (dua ratus tiga belas Miliar Rupiah) sesuai Akta Notaris Hadijah, SH Nomor 20 tanggal 13 Oktober 2014.
  - b) Tanggal 03 November 2014 PT Reasuransi Nasional Indonesia memperoleh rating **"A"** dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
  - c) Peningkatan Modal Dasar perusahaan dari Rp400.000.000.000 (empat ratus Miliar Rupiah) menjadi Rp1.800.000.000.000 (satu triliun delapan ratus Miliar Rupiah) sesuai Akta Notaris Bambang Suprianto, SH Nomor 72 tanggal 17 Desember 2014, dengan pengesahan Kementerian Hukum & HAM RI Nomor: AHU-13005.40.20.2014 tanggal 17 Desember 2014.
  - d) Penambahan Modal Disetor dari ASKRINDO sebesar Rp100.000.000.000 (seratus Miliar Rupiah) berupa *fresh money* sehingga Modal Disetor menjadi Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga Miliar Rupiah) dari sebelumnya Rp363.000.000.000 (tiga ratus enam puluh tiga Miliar Rupiah) sesuai Akta Notaris Bambang Suprianto, SH Nomor 72 tanggal 17 Desember 2014, dengan pengesahan Kementerian Hukum & HAM RI Nomor: AHU-13005.40.20.2014 tanggal 17 Desember 2014.
- a) Additional Paid-up Capital from PT Askrindo, amounting to Rp150,000,000,000 (one hundred fifty billion rupiah) in the form of fresh money and hence total Paid-up Capital become Rp363,000,000,000 (three hundred and sixty three billion Rupiah) from previously Rp213,000,000,000 (two hundred and thirteen billion rupiah) in accordance with Notarial Deed of Hadijah, SH No. 20 dated 13 October 2014.
  - b) On 03 November 2014 PT Reasuransi Nasional Indonesia obtained an **"A"** rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
  - c) Additional Authorized Capital from Rp400,000,000,000 (four hundred billion Rupiah) to Rp1,800,000,000,000 (one trillion eight hundred billion Rupiah) in accordance with Notarial Deed of Bambang Suprianto, SH No. 72 dated December 17, 2014, with the approval of the Department of Law & Human Rights No.: AHU-13005.40.20.2014 dated December 17, 2014.
  - d) Additional Paid-up Capital from PT Askrindo, amounting to Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) in the form of fresh money and hence total Paid-up Capital become Rp463,000,000,000 (four hundred and sixty-three billion rupiah) from the previous Rp363,000,000,000 (three hundred and sixty three billion rupiah) in accordance with Notarial Deed of Bambang Suprianto, SH No. 72 dated December 17, 2014, with the approval of the Department of Law & Human Rights No.: AHU-13005.40.20.2014 dated December 17, 2014

## Kegiatan Usaha dan Aktifitas Usaha

### Business Activities



#### a. Reasuransi Umum Konvensional

Jenis-Jenis produk reasuransi umum konvensional adalah *facultative reinsurance* dan *treaty reinsurance*. Adapun cabang-cabang asuransinya adalah sebagai berikut:

1. Harta Benda
2. Kendaraan Bermotor
3. Pengangkutan
4. Rangka Kapal
5. Rangka Pesawat
6. Satelit
7. Energi
8. Rekayasa
9. Tanggung Gugat
10. Kecelakaan Diri
11. Kredit & Jaminan
12. Aneka

#### a. Conventional General Reinsurance

The types of product of conventional general reinsurance are *facultative reinsurance* and *treaty reinsurance*. The insurance branches are as follows:

1. Properties
2. Motor
3. Marine Cargo
4. Marine Hull
5. Aviation
6. Satellites
7. Energy
8. Engineering
9. Liability
10. Personal Accident
11. Credit & Suretyship
12. Miscellaneous

### **b. Reasuransi Jiwa Konvensional**

NASIONAL RE juga menyediakan kapasitas reasuransi jiwa konvensional kepada perusahaan asuransi jiwa lokal untuk asuransi jiwa, kecelakaan diri dan kesehatan, baik perorangan (*individu*) maupun kelompok (*group*). Pertanggungjawaban reasuransi tersebut dapat dilakukan secara berdiri sendiri (*stand alone*) maupun sebagai tambahan (*rider*).

- Reasuransi Jiwa
  - Dengan pemeriksaan kesehatan
  - Tanpa pemeriksaan kesehatan
  - Reasuransi jiwa kredit
- Reasuransi Kecelakaan Diri
  - Meninggal dunia karena kecelakaan
  - Cacat tetap karena kecelakaan
  - Biaya perawatan di rumah sakit karena kecelakaan
- Reasuransi Kesehatan
  - Rawat Inap
  - Rawat Jalan

### **c. Reasuransi Syariah (Umum dan Jiwa)**

Dalam Reasuransi Syariah produk jasa yang ditawarkan sama dengan produk jasa Reasuransi Konvensional, baik untuk Reasuransi Umum maupun Reasuransi Jiwa. Namun, yang membedakannya dengan Reasuransi Konvensional adalah adanya *risk sharing* diantara peserta dan tidak ada pelimpahan risiko dari peserta kepada perusahaan asuransi, atau dari perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi. NASIONALRE sebagai perusahaan Reasuransi dalam hal ini hanya sebagai operator atau pengelola dana peserta (*tabarru*) dan tidak ikut menanggung risiko.

### **b. Conventional Life Reinsurance**

NASIONAL RE also provides conventional life reinsurance capacity for local life insurance companies, including life insurance, personal accident and health, both individual and group. The reinsurance coverage is either independently (*stand alone*) or as additional (*rider*).

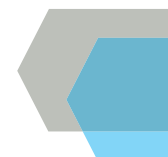
- Life Reinsurance
  - With health check up
  - Without health check up
  - Credit life Reinsurance
- Personal Accident Reinsurance
  - Accidental Death
  - Accidental permanent disablement
  - Accidental Hospital Expenses
- Health Reinsurance
  - Inpatient
  - Outpatient

### **c . Sharia Reinsurance (General and Life)**

In Sharia Reinsurance, the products are the same with Conventional Reinsurance products, both for General Reinsurance and for Life Reinsurance. The difference is in the risk sharing among the participants and there is no transfer of risk from the participants to the insurance company, or from insurance company to reinsurers. NASIONAL RE as the Reinsurance company in this case acts as the operator or manager of participants' fund (*tabarru*) and does not bear the risk.

## Visi dan Misi

### Vision and Mission



#### VISI

"Menjadi perusahaan reasuransi yang terpercaya, tangguh dan terus tumbuh".

#### Penjelasan Visi

Sebagai perusahaan yang mengelola risiko finansial dari mitra usaha, maka NASIONAL RE harus berusaha untuk menjadi perusahaan yang dapat dipercaya dan bahkan terpercaya bagi para mitra usaha, terlebih dalam situasi dan kondisi global dimana kepercayaan sangat sulit ditemukan. Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari para mitra usaha, maka perusahaan harus tangguh dalam banyak bidang, khususnya bidang finansial, teknologi informasi maupun sumber daya manusia. Dengan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari mitra usaha serta didukung oleh ketangguhan yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan memiliki peluang yang besar untuk terus tumbuh dari tahun ke tahun.

#### Misi

- A. Memberikan pelayanan dan solusi reasuransi umum dan reasuransi jiwa, baik untuk produk konvensional maupun syariah.
- B. Memberikan pelayanan pada pasar Nasional, Regional, maupun Internasional.
- C. Memberikan manfaat kepada mitra kerja dalam meningkatkan kinerja perusahaan asuransi dan kapasitas asuransi nasional serta manfaat kepada *stakeholders* lainnya.

#### Penjelasan Misi

Dengan menjadi perusahaan yang terpercaya, tangguh dan terus tumbuh, maka perusahaan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi defisit keuangan negara sebagai akibat dari terserapnya premi domestik kepada reasuradur dan retrosesioner di luar negeri.

Dengan menjadi perusahaan yang semakin dipercaya, semakin tangguh dan semakin bertumbuh pesat, maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk menyerap kapasitas pertanggungan asuransi dalam negeri, sehingga semakin besar pula premi yang dapat diretensi sendiri oleh reasuradur lokal.

#### VISION

"To be the most trusted, strong and growing reinsurance Company".

#### Explanation

As a company that manages the financial risks of the business partners, NASIONAL RE should strive to be a company that is trustworthy and reliable even for business partners, especially in the global circumstances in which trust is very hard to find. To obtain a high level of trust of the business partners, the company should be strong in many areas, particularly the areas of finance, information technology and human resources. With the high level of trust from business partners and supported by the resilience of the company, the company has a great opportunity to continue to grow from year to year.

#### Mission

- A. To provide services and solutions of general and life reinsurance, both for conventional and sharia products.
- B. To provide services for the National, Regional and International markets.
- C. To provide benefits to partners in improving the performance of insurance companies and capacity of national insurance as well as benefits to other stakeholders.

#### Explanation Mission

By becoming the most trusted, strong and growing Company, NASIONAL RE can help the government reduce the national financial deficits as a result of the absorption of the domestic premium to foreign reinsurer and retrocessionaire.

By becoming more credible, more resilient and more rapidly growing Company, the Company's ability to absorb the capacity of domestic insurance coverage gets greater, as well as greater premium can be retained by local reinsurers.





## Nilai-Nilai Perusahaan

Corporate Values

Nilai-Nilai ditetapkan sebagai pedoman yang memandu sikap dan perilaku seluruh pegawai Perusahaan dalam aktifitas kesehariannya. Nilai-nilai Perusahaan dilengkapi definisi yang jelas serta panduan perilaku yang menjadi pedoman atas tindakan yang boleh (*Dos*) dan tidak boleh dilakukan (*Don'ts*) sehingga seluruh insan dalam Perusahaan memiliki pemahaman yang sama dalam menyikapi sesuatu hal.

### Integritas

Menjunjung tinggi kebenaran, mematuhi ketentuan yang berlaku dan terbuka terhadap kritik yang bersifat membangun.

### Profesionalisme

Senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam menjalankan tugas, mempunyai pandangan yang luas serta mengedepankan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi.

### Teamwork

Bekerja dengan mengutamakan kerjasama tim, mengembangkan sikap saling membantu dan saling menghargai untuk mencapai kinerja yang efektif.

### Service Excellence

Kemampuan untuk memahami kebutuhan pelanggan dengan layanan dan solusi terbaik demi terciptanya hubungan jangka panjang.

### Fairness

Menghormati hak-hak orang lain serta bertindak adil memberi peluang dan kesempatan yang sama.

Values set as guidelines drive the attitudes and behavior of all employees of the Company in their day-to-day activities. The Company's values include clear definitions and behavior guidelines that become directive of the Do's and Dont's so that all employees in the Company have the same understanding in dealing with something.

### Integrity

Upholding truth, in compliance with the applicable requirements and being open to constructive criticism.

### Professionalism

Always improving skills and knowledge in performing duties, having a broad view and promoting the Company's interests above personal interests

### Teamwork

Working under teamwork, developing mutual aid and mutual respect in order to achieve effective performance.

### Service Excellence

The ability to understand the needs of customers with the best services and solutions for the creation of a long-term relationship.

### Fairness

Respecting others' rights and being fair to give equal opportunities.

## Penghargaan dan Sertifikasi Award and Certification



1<sup>st</sup> Rank—The Best Islamic Reinsurance 2014 dari Karim Consulting Indonesia

1<sup>st</sup> Rank—The Best Islamic Reinsurance 2014 from Karim Consulting Indonesia



Best Reinsurance 2014 dari Media Asuransi

Best Reinsurance 2014 from Media Asuransi

- Peringkat 1 dengan 2 (dua) kategori *Insurance & Reinsurance Award 2014* dari APPARINDO (Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi Indonesia), diantaranya:
- 1<sup>st</sup> Rank 1 in 2 (two) categories in the 2014 Insurance & Reinsurance Award from APPARINDO (The Association of Indonesian Insurance and Reinsurance Brokers), namely:



Memiliki Jajaran Pejabat Manajerial Bahkan Setingkat Direksi yang Bersedia Turun Tangan Menangani Proyek yang Ditawarkan.

Has possessed managerial personnel, even of BOD level, who are are willing to handle projects offered



Memiliki Media Komunikasi Cukup Baik Sehingga Mudah Menghubungi Pihak-Pihak yang Terkait termasuk Pengambilan Keputusan.

Has built good communication with other related parties, including decision maker.



## Profil Dewan Komisaris

### Profile Board of Commissioners



#### **Rinarno Pramudyanto, SE, MM, CRGP** **Komisaris Utama/President Commissioner**

Pria, kelahiran Jakarta tanggal 26 Februari 1960. Meraih gelar Sarjana (S1) dari Fakultas Ekonomi dari Universitas Jayabaya, Jakarta tahun 1985, serta Pasca Sarjana (S2) dari Sekolah Tinggi Management PPM, Jakarta tahun 2004. Berkarir di PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sejak tahun 1987. Sepanjang karirnya, beliau dipercaya menduduki berbagai jabatan hingga menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Bisnis saat ini. Dipercaya menduduki sebagai Komisaris Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia sejak Juni 2010.

Male, born in Jakarta on February 26, 1960. He earned a Bachelor degree from Faculty of Economics of Jayabaya University, Jakarta in 1985, as well as a Post Graduate degree from PPM School of Management, Jakarta in 2004. His career started at PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) in 1987. He was once appointed to many strategic positions, including as Suretyship Division Head, a position which he still holds until today. He has been serving as President Commissioner of PT Reasuransi Nasional Indonesia since June 2010.





**Sulaeman, SE , MM, AAAIK, AIIS**  
**Komisaris/Commissioner**

Pria, kelahiran Jakarta tanggal 17 Agustus 1962. Meraih gelar Sarjana (S1) dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta tahun 1986 serta Pasca Sarjana (S2) dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta tahun 2003. Sebagian besar karirnya dibangun di PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Berbagai jabatan pernah dipercayakan kepada beliau, hingga menjadi Kepala Divisi Akuntansi yang saat ini masih di jabatannya. Beliau juga tercatat aktif sebagai staf pengajar di kelas Internal Audit di PPAK-STAN. Menjabat sebagai Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia tahun 2010.

Male, born in Jakarta, on August 17, 1962. He earned Bachelor degree from Krisnadwipayana University, Jakarta in 1986 as well as a Post Graduate degree from School of Management Jakarta in 2003. He mostly spent his career life at PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). He once held a number of positions, until he is serving as Head of Finance and Investment Division. He was also active as a lecturer at Education and Training on Internal Audit at PPAK-STAN. He has been serving as Commissioner at PT Reasuransi Nasional Indonesia since 2010.



**Raymond Buisson, SE, CRGP**  
**Komisaris Independen/Independent Commissioner**

Pria, kelahiran Semarang tanggal 1 April 1960. Menempuh pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan, Jurusan Administrasi Keuangan dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah tahun 1982, serta memperoleh gelar Strata 1 (S1) Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Mpu Tantular, Jakarta tahun 2000. Pernah bertugas pada bagian akunting dan keuangan di beberapa Perusahaan. Menjabat sebagai Direktur Jakarta Insurance Institute (2002-Juli 2010), Anggota Komite Audit PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. (Januari 2004-31 Desember 2006), Anggota Komite Audit PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. (Januari 2007-31 Desember 2010). Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Reasuransi Nasional Indonesia (Juni 2012-sekarang)

Male, born in Semarang on April 1, 1960. He earned his education in the Corporate Administration Expert, majoring Financial Administration from Diponegoro University, Semarang, Central Java, in 1982, as well as earned a Bachelor degree in Financial Management from Faculty of Economy of Mpu Tantular, Jakarta in 2000. He joined in many companies in the accounting and financial division. He was Director at Jakarta Insurance institute (2002-July 2010), Member of the Audit Committee at PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. (January 2004- December 31, 2006), Member of Audit Committee at PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. (January 2007- December 31, 2010). He has been serving as an Independent Commissioner at PT Reasuransi Nasional Indonesia (June 2012-now).





## Profil Direksi

### Profile Board of Director



**M. Shaifie Zein, SE, Dipl, Ins, ACII, FIIS, CFP®, CRGP**  
**Direktur Utama/President Director**

Pria, kelahiran Kalianget, Madura tanggal 22 April 1969. Beliau meraih gelar Sarjana (S1) dari Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1994 dan meraih gelar Post Graduate Diploma in Insurance dari Glasgow Caledonian University, Scotlandia tahun 1998. Merintis karir di PT Asuransi Binagriya Upakara sebagai pegawai tahun 1995, dipercaya sebagai Kepala Cabang Makassar tahun 1999, Manager R & D tahun 2003, Kacab Syariah tahun 2005 dan sebagai *Caretaker* Kepala Divisi Teknik tahun 2006. Bergabung dengan PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai Kepala Divisi Reasuransi Syariah (April 2006-Desember 2009). Menjabat sebagai Direktur Operasional PT Reasuransi Nasional Indonesia (Desember 2009-Juli 2010). Dipercaya sebagai Direktur Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia sejak Agustus 2010.

Male, born in Kalianget, Madura, on April 22, 1969. He earned a Bachelor degree from Hasanuddin University in Makassar in 1994 and earned Post Graduate Diploma in Insurance from Glasgow Caledonian University, Scotland in 1998. He built his career at PT Asuransi Binagriya Upakara as employee in 1995, trusted as Head of Makassar Branch Office in 1999, R & D Manager in 2003, Head of Sharia Branch in 2005 and a *Caretaker* for Engineering Division Head in 2006. He was once Head of Sharia Reinsurance Division at PT Reasuransi Nasional Indonesia (April 2006-December 2009). He was appointed as Director of Operation at PT Reasuransi Nasional Indonesia (December 2009 – July 2010). He has been serving as President Director of PT Reasuransi Nasional Indonesia since August 2010.



**Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AIIS, CRGP**  
**Direktur Operasi/Director of Operation**

Pria, kelahiran Cirebon, tanggal 20 Agustus 1970. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) dari Agribisnis-Institut Pertanian Bogor pada tahun 1994 dan meraih gelar Magister Management (Marketing) dari Universitas Mercubuana Jakarta tahun 2012. Mengawali karir di Industri Asuransi sebagai Management Trainee di PT Asuransi Ramayana, Tbk tahun 1995, dipercaya sebagai Kepala Divisi *Underwriting/Reasuransi* tahun 2002-Agustus 2010. Bergabung dan menjabat sebagai Direktur Operasi PT Reasuransi Nasional Indonesia sejak Agustus 2010.

Male, born in Cirebon, on August 20, 1970. Earning a Bachelor degree in Agribusiness from Bogor Institute of Agriculture in 1994 and a Master in Management (Marketing) from Mercubuana University, Jakarta, in 2012. He started his career in Insurance Industry as a Management Trainee at PT Asuransi Ramayana Tbk. In 1995, He was promoted to be Head of Underwriting/Reinsurance Division in 2002-August 2010. He has been serving as Director of Operations at PT Reasuransi Nasional Indonesia since August 2010.



**Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®**  
**Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/  
 Director of Finance & Human Resources**

Pria, kelahiran Jakarta tanggal 26 Mei 1958. Beliau meraih gelar sarjana (S1) dari Universitas Islam Jakarta tahun 1996 dan gelar (S2) dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA, Jakarta tahun 2001. Karir pertamanya dirintis sebagai Pegawai Pelaksana Bagian Reasuransi Kerugian PT Asuransi Kredit Indonesia tahun (1978-1979), Pelaksana Penagihan (1979-1982) dan sebagai Kepala Seksi Penagihan Reasuransi Kerugian (1982-1994). Bertugas di PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai Kepala Bagian *Underwriting Treaty* (Januari 1995- April 2000), Diangkat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi (Mei 2000-Juli 2004) dan sebagai Kepala Divisi Klaim (Agustus 2004-Agustus 2008). Menjabat sebagai Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia sejak September 2008 sampai sekarang.

Male, born in Jakarta on May 26, 1958. He earned a Bachelor degree from University of Islam Jakarta in 1996 and Master's degree from School of Economic Studies IPWIJA, Jakarta, in 2001. He built his career at ASKRINDO as General Reinsurance Division officer in (1978-1979), the Collection Officer (1979-1982) and Head of Collection Division of General Reinsurance Division (1982-1994). He was appointed as Treaty Underwriting Department Head at PT Reasuransi Nasional Indonesia (January 1995-April 2000), Finance and Accounting Division Head (May 2000-July 2004) and Claim Division Head (August 2004-August 2008). He has been serving as Director of Finance and Human Resources since September 2008, until now.





## Kepala Divisi Senior Manager



① Sukmo Prayogo, B.Bus, ANZIIF (Fel), AIIS

③ Erlan Risdiyanto, SE, ACII, AMII

⑤ Fariad Susanto, SE, AAAIJ, FSAI, AIIS

② Ari Priasto, SE IPGDI

④ Sunarso, SE, MM, Ak, AAAIK, CFP®





⑥ Agus Supriadi, SH, MM, AAAIK, AIIIS

⑧ Aviantono Yudihariadi, S.Kom, AAAIK, CHRP

⑩ Subagio Istiarno, SE, MM, Ak

⑦ Cendekiawan, SH

⑨ Bagdja Hermawan, SH, MM





## Pengurus Perusahaan The Management

### SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN PER 31 DESEMBER 2014 THE MANAGEMENT OF THE COMPANY AS OF DECEMBER 31, 2014

No.	Nama/Name	Jabatan/Position
1.	FARIED SUSANTO, SE, AAAIJ, FSAI, AIIS	Aktuaris Perusahaan/ <i>Corporate Actuary</i>
2.	SUNARSO, SE, MM, AK, AAAIK, CFP®, CSA®	Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi/ <i>Division Head of Finance and Accounting</i>
3.	CENDEKIAWAN, SH	Kepala Divisi Klaim/ <i>Division Head of Claims</i>
4.	ARI PRIASTO, SE, IPGDI	Kepala Divisi Reasuransi Jiwa/ <i>Division Head of Life Reinsurance</i>
5.	AGUS SUPRIADI, SH, MM, AAAIK, QIP, AIIS	Kepala Divisi Reasuransi Syariah/ <i>Division Head of Sharia Reinsurance</i>
6.	AVIANTONO YUDIHARIADI P, S.KOM, AAAIK, CHRP	Kepala Divisi SDM & Umum/ <i>Division Head of HR &amp; General Affairs</i>
7.	SUBAGIO ISTIARNO, SE, MM, AK	Kepala Divisi Satuan Pengawas Intern/ <i>Division Head of Internal Audit</i>
8.	SUKMO PRAYOGO, B.Bus, ANZIIF (Fellow) CIP, AIIS	Kepala Divisi Sistem Informasi dan Manajemen Risiko/ <i>Division Head of Information System and Risk Management</i>
9.	BAGDJA HERMAWAN, SH, MM	Kepala Divisi <i>Underwriting</i> Facultative/ <i>Division Head of Facultative Underwriting</i>
10.	ERLAN RISDIYANTO, SE, ACII, AMII	Kepala Divisi <i>Underwriting</i> Treaty & Retroseri/ <i>Division Head of Treaty Underwriting &amp; Retrocession</i>
11.	IGN. NUGROHO HARDO, S.Pd, M.SI	Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan/ <i>Department Head of Corporate Secretary</i>
12.	R. ARYA SIDHARTA. ST, ACII, AAIK, FIIS	Kepala Bagian Perencanaan Pengembangan & Manajemen Risiko/ <i>Department Head of Planning, Development &amp; Risk Management</i>
13.	ADAM KURNIAWAN. S. KOM, ACII, AMII, FIIS	Kepala Bagian Teknologi Informasi/ <i>Department Head of IT</i>
14.	SETYO AJI NUGROHO, SE, Ak, AAAIJ	Kepala Bagian Akuntansi/ <i>Department Head of Accounting</i>
15.	SULIS PAHALAWIAN. SE, CSA®	Kepala Bagian Keuangan/ <i>Department Head of Finance</i>
16.	EDDY SARWONO. SE	Kepala Bagian Penagihan/ <i>Department Head of Collection</i>
17.	MULKAN LUBIS. SE, AAIK	Kepala Bagian Klaim Fire/ <i>Engineering/Department Head of Claims - Fire/Engineering</i>
18.	ATJEP SETIAWAN. SE, IPGDI	Kepala Bagian Klaim Non Fire/ <i>Department Head of Claims - Non Fire</i>
19.	SHANTI NAROLITA SARI. SE, AAIJ, AIIS	Kepala Bagian Teknik & Adm. Reasuransi Jiwa/ <i>Department Head of Technical and Administration of Life Reinsurance</i>
20.	TEGUH TJAHHONO. SE, AAAIK	Kepala Bagian SDM/ <i>Department Head of HR</i>
21.	WILFRID GM. TAMPUBOLON. SE	Kepala Bagian UMUM/ <i>Department Head of General Affairs</i>
22.	RUBIYANTO. SE	Kepala Bagian Pemeriksa/Auditor/ <i>Senior Auditor</i>
23.	M. SAFRI DK. SIMAMORA. SE	Kepala Bagian Pemeriksa/Auditor/ <i>Senior Auditor</i>

**SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN PER 31 DESEMBER 2014**  
**THE MANAGEMENT OF THE COMPANY AS OF DECEMBER 31, 2014**

No.	Nama/Name	Jabatan/Position
24.	SRI UTOMO. SE. MM	Kepala Bagian Pemeriksa/Auditor/Senior Auditor
25.	MOCHAMMAD KAMIL. SE	Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi Syariah/Department Head of Sharia Finance and Accounting
26.	NYOMAN DEDDY ABDISURYONO. SE, AAIIJ, AIIS	Kepala Bagian Underwriting/Klaim Jiwa Syariah/Department Head of Sharia Underwriting/Claims - life
27.	R. DJOKO SLAMET PRASETIYO. SE, AMII, AIIS	Kepala Bagian Underwriting/Klaim Umum Syariah/Department Head of Sharia Underwriting/Claims - General
28.	ANDRIE PRASETYO. SE, CRMP	Kepala Bagian Underwriting Facultative - Fire/Engineering/Department Head of Underwriting Facultative - Fire/Engineering
29.	NYOMAN ANGGARA S. SE	Kepala Bagian Underwriting Facultative - Financial & Casualty/Department Head of Underwriting Facultative - Financial & Casualty
30.	OKY NIRWANA M. SE, AAAIK	Kepala Bagian Underwriting Facultative - Marine/Aviation/Energy/Department Head of Underwriting Facultative - Marine/Aviation/Energy
31.	IR. NOE'MAN TOHEPALY. MM, AAAIK	Kepala Bagian Underwriting Treaty/Department Head of Treaty Underwriting
32.	YUSE NURYULIASARI. SE, MM, AAIIK, AIIS, CFP®	Kepala Bagian Retrosesi/Department Head of Retrocession
33.	LISDAWATI BERLIANA. SE	Kepala Seksi Adm. & Pengolahan Data Facultative/Section Head of Administration & Facultative Data Processing
34.	I WAYAN ARTAGIRI. SE	Kepala Seksi Administrasi Klaim/Section Head of Claims Administration
35.	M. YUSUF HS. SE. MM	Kepala Seksi Administrasi Kepegawaian/Section Head of Staff Administration
36.	KURNIAWAN YULI ASMORO. SE, Ak, MSi	Kepala Seksi Akuntansi Syariah/Section Head of Sharia Accounting
37.	HERU SUKOCO. SE, AAAIK	Kepala Seksi Anggaran dan Analisis Laporan/Section Head of Budget & Reporting Analysis
38.	ALI IMRAN. S. KOM	Kepala Seksi Data Base Administration (DBA)/Section Head of DBA
39.	NUR EPRIL LISTIATUN	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan/Section Head of Training and Education
40.	ANDRY SULISTIO NUGROHO. SE, MSi	Kepala Seksi Investasi/Section Head of Investment
41.	DRI HASKORO. S. KOM	Kepala Seksi IT Architect/IT Architect
42.	SRININGSIH. SE	Kepala Seksi Kas & Bank/Section Head of Cash & Banks
43.	ANGGA PERMADI. ST	Kepala Seksi Kesejahteraan/Section Head of Compensation & Benefit
44.	ENDANG SULIASWATI, A.MD.AS.K	Kepala Seksi Klaim Fire/Engineering I/Section Head of Fire/Engineering I Claims

**SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN PER 31 DESEMBER 2014**  
**THE MANAGEMENT OF THE COMPANY AS OF DECEMBER 31, 2014**

No.	Nama/Name	Jabatan/Position
45.	ELY AGUSTINUS MAWUNTU. SE	Kepala Seksi Klaim Fire/Engineering II/Section Head of Fire/Engineering II Claims
46.	DIDIK KOSMARIYONO. SE.AS	Kepala Seksi Klaim Non Fire - Marine/Section Head of Non Fire Claims/Marine
47.	EKO BUDI HARTANTO. SE, AAAIK	Kepala Seksi Klaim Non Fire - Varia/Section Head of Non Fire Claims/Micellaneous
48.	INDRA PERMANA. SE, AMII	Kepala Seksi Klaim Reasuransi Jiwa/Section Head of Life Claims
49.	RAHMA DHANI R. M. SE	Kepala Seksi Penagihan Reasuransi/Section Head of Reinsurance Collection
50.	WINDI WIJAYA. S. IP, AAAIJ	Kepala Seksi Penagihan Retrosasi/Section Head of Retrocession Collection
51.	Y. HERMAWAN WIDIYANTO. SE	Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan & Manajemen Risiko /Section Head of Planning, Development & Risk Management
52.	L. ROBBY WAROUW. SE. MM	Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan & Manajemen Risiko/Section Head of Planning, Development & Risk Management
53.	DEA RAMDHANI. S.Si	Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan & Manajemen Risiko/Section Head of Planning, Development & Risk Management
54.	ARIE WIBOWO. S. KOM	Kepala Seksi Help Desk Officer (HDO)/Help Desk Officer
55.	KRISPATI ALAMSYAH. SE	Kepala Seksi Rumah Tangga/Section Head of Households
56.	ADI SETIAWAN. SE	Kepala Seksi Sekretariat & Humas/Section Head of Sekretariat & Public Relations
57.	TITIEK JUNIASIH RAHAYU, SH	Kepala Seksi Sekretariat Perusahaan/Section Head of Corporate Secretary
58.	INDRAWATI. SE	Kepala Seksi Sekretariat Perusahaan/Section Head of Corporate Secretary
59.	DANAN SATRIA JANTI. SE	Kepala Seksi Sekretariat Perusahaan/Section Head of Corporate Secretary
60.	LINA MARLINA	Kepala Seksi Sekretariat Perusahaan/Section Head of Corporate Secretary
61.	WISHNU INDRA PRADJA. S. KOM	Kepala Seksi System Development Officer/System Development Officer
62.	WAHYU KURNIAWAN. SE	Kepala Seksi <i>Underwriting</i> Facultative - Casualty & Miscellaneous/Section Head of <i>Fakultative Underwriting - Casualty &amp; Miscellaneous</i>
63.	RATNA WIJAYANTI. SE, AMII	Kepala Seksi <i>Underwriting</i> Facultative - Fire/Engineering I/Section Head of <i>Facultative Underwriting - Fire/Engineering I</i>
64.	M. ZULFIKRI DAULAY. SE	Kepala Seksi <i>Underwriting</i> Facultative - Fire/Engineering II/Section Head of <i>Facultative Underwriting - Fire/Engineering II</i>
65.	HUSNUL KHULUQ. S.PD. M. SI, AMII, ACII	Kepala Seksi <i>Underwriting</i> Facultative - Financial Risk & Suretyship/Section Head of <i>Facultative Underwriting - Financial Risk &amp; Suretyship</i>
66.	I MADE DARMAWAN. S. KOM	Kepala Seksi <i>Underwriting</i> Facultative - Marine/Aviation/Energy/Section Head of <i>Facultative Underwriting - Marine/Aviation/Energy</i>

**SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN PER 31 DESEMBER 2014**  
**THE MANAGEMENT OF THE COMPANY AS OF DECEMBER 31, 2014**

No.	Nama/Name	Jabatan/Position
67.	LUCKY ARYANTO. SE	Kepala Seksi <i>Underwriting</i> Jiwa - Facultative/Section Head of Life Underwriting - Facultative
68.	dr. DIAN INDIASARI	Kepala Seksi <i>Underwriting</i> Jiwa - Treaty/Section Head of Life Underwriting - Treaty
69.	DANIA VIRJIANTI. SE, AAAIJ	Kepala Seksi <i>Underwriting</i> Jiwa - Treaty/Section Head of Life Underwriting - Treaty
70.	CHRISTOP MARHASAK. ST, AMII, AAIK, ICPU	Kepala Seksi Administrasi & Analisis Treaty/Section Head of Administration & Treaty Analysis
71.	ELISMAN HALOMOAN T. SE	Kepala Seksi Produksi Treaty/Section Head of Treaty Production
72.	HERAWATI S. MANALU, SE	Kepala Seksi <i>Underwriting</i> Treaty - Produksi Retrosesi/Section Head of Retrocession Production
73.	HIDAYAT, SE, AAAIJ, AIIS	Kepala Seksi <i>Underwriting</i> /Klaim Jiwa Syariah - Facultative/Section Head of Sharia Life Underwriting/Claims - Facultative
74.	TUTY HIKMAWATY CHOLID. SE, AAAIJ	Kepala Seksi <i>Underwriting</i> /Klaim Jiwa Syariah - Treaty/Section Head of Sharia Life Underwriting/Claims - Treaty
75.	DAVID NURVANIDA. S. SI, AMII, AAIK, ACII	Kepala Seksi <i>Underwriting</i> /Klaim Umum Syariah - Facultative/Section Head of Sharia General Underwriting/Claims - Facultative
76.	MISBAHUDDIN, SE	Kepala Seksi <i>Underwriting</i> /Klaim Umum Syariah - Treaty/Section Head of Sharia General Underwriting/Claims - Treaty
77.	SRI UTAMI. SE, AAAIK	Kepala Seksi Utang Piutang/Section Head of General Ledger
78.	YUSUF MAULANA. SH	Kepala Seksi Auditor/Junior Auditor
79.	DEWI ROSEMASARI. SE. MM. AK,QIA	Kepala Seksi Auditor/Junior Auditor
80.	SWANGSA KADARSANA. S. KOM, PIA	Kepala Seksi Auditor/Junior Auditor
81.	SUBARCAH RUSLAN. SE, AAAIJ	Kepala Seksi Auditor/Junior Auditor
82.	KANISCORO MARTIN S, SE	Kepala Seksi Auditor/Junior Auditor





## Komposisi Pemegang Saham

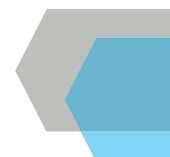
### Composition of Shareholders

Hingga 31 Desember 2014, komposisi pemegang saham PT Reasuransi Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2014, the Composition of Shareholders are as follow:

No.	Pemegang Saham/Shareholders	Share Percentage
1.	PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia	99,9998%
2.	Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA)	0,0002%

## Wilayah Operasi Regional Operations



Wilayah kerja NASIONAL RE mencakup seluruh Indonesia, Seluruh kegiatan perusahaan di Jakarta, beralamat di Jl. Cikini Raya No. 99. PO BOX 1618 JKP 10016 Jakarta, Indonesia, 10330,

Phone : (62-21) 3140009, 3149373 (Hunting)

Fax : (62-21) 3143716, 3904944, 31900430

E-mail : [nasionalre@nasionalre.co.id](mailto:nasionalre@nasionalre.co.id).

Website : <http://www.nasionalre.co.id>.

NASIONAL RE working area covers throughout Indonesia, the entire corporate activities are based in Jakarta, located at: Jl . Cikini Raya No. 99. PO BOX 1618 JKP 10016 Jakarta, Indonesia, 10330,

Phone: (62-21) 3140009, 3149373 (hunting),

Fax: (62-21) 3143716, 3904944, 31900430

E-mail: [nasionalre@nasionalre.co.id](mailto:nasionalre@nasionalre.co.id) .

Website : <http://www.nasionalre.co.id>

## Peristiwa Penting Event Highlights



**MEI 2014**  
In-House Training "Interpretasi & Penyusunan Laporan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)"

**May 2014**  
In-House Training on "Interpretation & Preparation Reports on Superior Performance Assessment Criteria (KPKU)"



**JUNI 2014**  
Turnamen Catur NASIONAL RE VII

**JUNE 2014**  
NASIONAL RE VII Chess Tournament



**JULI 2014**  
Buka Puasa Bersama Mitra Usaha NASIONAL RE

**JULY 2014**  
Open fasting together with Business Partners of NASIONAL RE



**AGUSTUS 2014**  
Dwi Dasawarsa NASIONAL RE

**AUGUST 2014**  
Two Decades of NASIONAL RE



**AGUSTUS 2014**  
Turnamen NASIONAL RE GOLF Plus+

**AUGUST 2014**  
NASIONAL RE GOLF Plus+ Tournament



**AGUSTUS 2014**  
NASIONAL RE Fishing Tournament mengundang Mitra Usaha

**AUGUST 2014**  
NASIONAL RE Fishing Tournament, Inviting Business Partners



**SEPTEMBER 2014**  
Rapat Koordinasi Penyusunan RKAP Tahun 2015

**SEPTEMBER 2014**  
Coordination Meeting for the Preparation of Corporate Budget Plan 2015



**OKTOBER 2014**  
Milad NASIONAL RE Syariah IX

**OCTOBER 2014**  
9th Anniversary of NASIONAL RE Sharia



**OKTOBER 2014**  
Training Motivasi kepada seluruh Pegawai oleh motivator Andrie Wongso

**OCTOBER 2014**  
Training on Motivation for all employees by motivator Andrie Wongso





**OKTOBER 2014**  
Workshop "Penyusunan Joint Key Performance Indicators (KPI)"

**OKTOBER 2014**  
Workshop on "Preparation for Joint Key Performance Indicators (KPI)"



**NOVEMBER 2014**  
Outing Pegawai "NASIONAL RE Goes to Lombok"

**NOVEMBER 2014**  
Outing for Employees, "NASIONAL RE Goes to Lombok"



**NOVEMBER 2014**  
Sosialisasi Visi, Misi & Budaya Perusahaan

**NOVEMBER 2014**  
Dissemination of Vision, Mission & Corporate Culture



**NOVEMBER 2014**  
Turnamen Mancing Syariah

**NOVEMBER 2014**  
Sharia Fishing Tournament



**NOVEMBER 2014**  
Outing bersama Mitra Usaha NASIONAL RE "AMAZING BROMO"

**NOVEMBER 2014**  
Outing with Business Partners of NASIONAL RE, "AMAZING BROMO"



**DESEMBER 2014**  
Leadership Development Workshop for Managers & Senior Managers

**DESEMBER 2014**  
Leadership Development Workshop for Managers & Senior Managers



**DESEMBER 2014**  
Sosialisasi Kesehatan & Keselamatan Kerja (K-3) "Pencegahan Kebakaran"

**DESEMBER 2014**  
Dissemination of Occupational Health and Safety (K-3), "Fire Prevention"



**DESEMBER 2014**  
Sosialisasi HR Blueprint NASIONAL RE

**DESEMBER 2014**  
Dissemination of HR Blueprint of NASIONAL RE



**DESEMBER 2014**  
Sosialisasi RKAP PT Reasuransi Nasional Indonesia Tahun 2015

**DESEMBER 2014**  
Dissemination of 2015 Corporate Budget Plan 2015 of PT Reasuransi Nasional Indonesia









bagian-04/chapter-04

## **Analisis dan Pembahasan Manajemen** Management Discussion and Analysis

## TINJAUAN BISNIS

### Perekonomian Global 2014

Berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi dunia tercatat sebesar 3,4%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 3,0%. Konflik politik yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah telah menimbulkan gejolak pada harga minyak bumi yang kemudian berimbas pada perekonomian dunia secara umum. Situasi politik yang cenderung *volatile* menyebabkan pelaku ekonomi umumnya menahan diri sehingga terlihat adanya perlambatan ekonomi di China dan Amerika Serikat. Di lain pihak, World Bank melaporkan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik.

Sementara itu, volume perdagangan dunia juga menunjukkan trend yang meningkat. Hal ini juga tercermin dari meningkatnya harga beberapa komoditas global yang sempat turun pada tahun 2013 dan mengalami *rebound* pada tahun 2014. Mulai berjalannya proses *recovery* pada perekonomian negara-negara maju di akhir tahun 2014 telah menumbuhkan harapan bahwa pada tahun 2015, dunia akan mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi.

### Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2014

Pada tahun 2014, Indonesia masih harus menghadapi tantangan yang cukup besar, antara lain disebabkan oleh kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga ini berpotensi menimbulkan gejolak di pasar keuangan global dan hal ini sedikit menekan arus investasi masuk ke Indonesia.

Pada tingkat mikro ekonomi, Indonesia mengalami kerentanan yang disebabkan antara lain oleh tingkat utang luar negeri yang semakin membesar dan akumulasi modal dari investor luar negeri pada obligasi negara yang sangat besar sehingga dapat mendorong arus keluar valuta asing serta dapat memicu gejolak kurs.

Bank Indonesia juga mencatat bahwa di sektor keuangan masih mengalami kekurangan alternatif pembiayaan sebagai akibat dari struktur pasar keuangan yang belum terdiversifikasi dengan baik. Sejauh ini sumber pembiayaan di Indonesia masih terkonsentrasi pada sektor perbankan, sedangkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan investasi belum memainkan peran yang signifikan. Hal ini menyebabkan

## BUSINESS REVIEW

### Global Economy in 2014

The International Monetary Fund (IMF) reported that in 2014 the world economic growth stood at 3.4%, slightly higher than that of the previous year, which was around 3.0%. Political conflicts in the Middle East countries has led to a turmoil in the oil prices which then impacted on the world economy in general. Against the backdrop of political situation that tend to be volatile, economic players tend to refrain from investing and caused the economic growth to slow down in China and USA. The World Bank also reported a slower economic growth in developing countries in East Asia and the Pacific.

Meanwhile, the world's trade volume also showed an increasing trend as reflected in the increase in global commodities prices, which dropped in 2013 and rebound in 2014. As the recovery process began to take place in developed economies, by the end of 2014, it gave hopes that in 2015 the world will record a higher growth.

### Indonesian Economic Growth in 2014

In 2014, Indonesia must still face considerable challenges, partly due to the rise in interest rates in the USA. The increase in interest rates is the potential to cause volatility in global financial markets and it is slightly suppress investment flows into Indonesia.

At the macroeconomic level, Indonesia experienced a vulnerability caused by the level of foreign debt grew and a very large capital accumulation of foreign investors in state bonds, which can encourage the outflow of foreign exchange and trigger exchange rate volatility.

Bank Indonesia also noted that the financial sector is still experiencing a shortage of alternative financing, resulted from a less diversified financial market structure. To date, financing sources is still concentrated in the banking sector, while the capital market as a source of investment financing has not yet played a significant role. This leads to uncertainty in rupiah and foreign currency liquidity, which make the

ketidakpastian pada likuiditas rupiah dan valuta asing sehingga kurs rupiah dan harga aset keuangan mudah berfluktuasi.

Pada akhir tahun 2014, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengurangi subsidi BBM dan kebijakan ini diharapkan akan memberikan Pemerintah kemampuan fiskal yang cukup untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan sosial. Walaupun dalam jangka pendek, kebijakan pengurangan subsidi BBM ini akan meningkatkan tekanan inflasi, namun Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan BI rate ke 7,75% sebagai langkah *pre-emptive* sehingga dapat memastikan bahwa tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM ini hanya bersifat sementara. Ke depannya, laju inflasi diharapkan dapat terjaga pada kisaran  $4 \pm 1\%$ .

Sementara itu, Pemerintah juga berhasil memastikan bahwa defisit neraca transaksi berjalan tetap terkendali antara 2,5% hingga 3% dari PDB, sehingga kestabilan ekonomi dapat tercapai dan kepercayaan investor tetap terjaga kuat.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di negara lainnya di kawasan Asia Timur dan Pasifik, yakni sekitar 5,01% *year on year* (yoy).

### Tinjauan Industri

Industri asuransi adalah industri yang berkaitan erat dengan aktivitas perekonomian. Fluktuasi pada pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan industri asuransi. Hal ini juga terlihat di tahun 2014. Adanya kebijakan pengetatan fiskal dari Pemerintah telah berimbas pada semakin lambatnya laju pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat pada kuartal II/2014 pun menurun setelah sebelumnya sempat mengalami peningkatan.

Namun demikian, secara keseluruhan kondisi perekonomian nasional tetap menunjukkan sinyal-sinyal positif bagi pertumbuhan industri asuransi. Hal ini terlihat dari peningkatan signifikan jumlah premi asuransi umum sebesar 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Lini usaha asuransi kendaraan bermotor masih tercatat sebagai yang terbesar dalam hal pertumbuhan secara nominal. Sedangkan lini usaha asuransi kredit merupakan yang tertinggi dalam hal persentase peningkatan premi, yaitu sebesar 151,9% dengan nilai nominal Rp881,3 miliar.

exchange rate and financial assets prices easily fluctuate.

In late 2014, the Indonesian Government has decided to reduce fuel subsidies and this policy is expected to provide the Government with sufficient fiscal ability to encourage infrastructure and social development. Although in the short term, the policy of reducing fuel subsidies will increase inflation rate, but Bank Indonesia has raised its benchmark rate to 7.75% as a pre-emptive measures so as to ensure that the inflationary pressure caused by the rising fuel prices is only temporary. Looking ahead, inflation rate is expected to be maintained in the range of  $4 \pm 1\%$ .

Meanwhile, the Government also succeeded in ensuring that the current account deficit to be under control between 2.5% to 3% of GDP, so that economic stability can be achieved and investor confidence can be maintained.

Overall, Indonesian economic growth is relatively high compared with other countries in East Asia and the Pacific, which is about 5.01% (yoy).

### Industry Review

Insurance industry highly depends on economic activities. Fluctuations in economic growth and people's purchasing power greatly affect the growth of the insurance industry as evidenced in 2014. The government's policy of fiscal tightening led to the increasingly slow pace of economic growth and people purchasing power in the second quarter of 2014 was decreased before eventually rebound.

Despite the facts, the overall condition of national economy continued to show positive signals for the growth of the insurance industry. This is evident from the significant increase in the number of general insurance premiums by 21% over the previous year. Motor vehicle insurance is still recorded as the largest in terms of growth in nominal terms, while credit insurance is the highest in terms of percentage increase in premiums, which amounted to 151.9% with a nominal value of Rp881,3 billion.



## TINJAUAN KINERJA PER SEGMENT BISNIS

Pada mulanya, Perusahaan didirikan untuk membantu kelancaran dan pengamanan perkreditan bank-bank, terutama di bidang-bidang usaha menengah dan kecil dan menutup perjanjian pertanggungan (asuransi) terhadap risiko atas kredit lainnya di luar perbankan. Sejalan dengan perkembangan usaha dan dinamika pasar, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan juga mengalami penyesuaian dan memasuki bidang usaha asuransi dengan menjalankan usaha asuransi kerugian, termasuk dengan prinsip syariah, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya Perusahaan untuk menghasilkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menerima pertanggungan atas risiko tidak diterimanya pelunasan kredit dan/atau pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dari debitur terutama Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK).
2. Menerima pertanggungan langsung dari segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya, baik dari dalam maupun luar negeri, secara sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi lainnya.
3. Menerima pertanggungan tidak langsung dari perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi di dalam maupun luar negeri atas segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya.
4. Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar, bisnis NASIONAL RE di luar segmen syariah terbagi menjadi dua segmen bisnis berikut:

1. Reasuransi Umum.
2. Reasuransi Jiwa.

Hingga saat ini segmen bisnis Reasuransi Umum memberikan kontribusi yang terbesar bagi pendapatan premi Perusahaan secara keseluruhan.

Pada tahun 2014, jumlah pendapatan premi bruto segmen Reasuransi Umum tercatat sejumlah Rp1,84 triliun atau meningkat signifikan 70,82% dibandingkan tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp1,08 triliun. Pendapatan premi bruto segmen Reasuransi Umum menyumbang 87,4% dari total

## BUSINESS SEGMENT PERFORMANCE REVIEW

Initially, the Company is established to assist direction and safe flows of loan fund from banks to medium and small scale industries and to insure risk of loans of other non-bank financial institution. In line with the development of business and market dynamic, the Company's goal and objective are changed accordingly and now is also engaging in the business of general insurance, including sharia based insurance and optimization of the Company's resources to generate profit in order to increase the value of the Company.

To achieve the said objectives, the Company carries out the following activities:

1. Provides insurance against risks of default on loans or financing, included those under Sharia principles, of debtors, mainly of small scale industries and cooperatives, to banks or other financing institutions.
2. Provides direct insurance on various risks, to domestic as well as overseas parties, either Individually or in cooperation with other insurance companies.
3. Provides indirect insurance on various risks reinsured by other domestic as well as overseas insurance companies.
4. Engages in other business activities normally earned out by insurance companies, in conformity with the prevailing legal and regulatory requirements.

In broad outline, in addition to sharia segment, NASIONAL RE business is divided into two business segments as follows:

1. General Reinsurance.
2. Life Reinsurance.

Until now General Reinsurance business segment contributed most to the Company's overall premium income.

In 2014, the gross premium income of General Reinsurance segment recorded at Rp1,84 trillion, significantly increased 70.82% compared to last year, which was recorded at Rp1,08 trillion. Gross premium income Reinsurance segment accounted for 87.4% of the total gross premium income for

pendapatan premi bruto untuk bisnis konvensional. Sementara pada tahun lalu, kontribusi pendapatan premi bruto segmen Reasuransi Umum adalah sebesar 83,22%.

the conventional business. While in the past year, the gross premium revenue General Reinsurance segment amounted to 83.22%.

Jumlah pendapatan premi segmen bruto Reasuransi Jiwa tercatat sejumlah Rp252,74 miliar atau meningkat 16,21% dibandingkan tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp217,49 miliar. Pendapatan premi bruto segmen Reasuransi Jiwa menyumbang 12,6% dari total pendapatan premi bruto untuk bisnis konvensional. Sementara pada tahun lalu, kontribusi pendapatan premi bruto segmen Reasuransi Umum adalah sebesar 16,78%.

Gross premium income for Life Reinsurance segment recorded at Rp252,74 billion, an increase of 16.21% compared to last year, which was recorded at Rp217,49 billion. Gross premium income Life Reinsurance segment accounted for 12.6% of total gross premium income for the conventional business. While in the past year, the gross premium revenue General Reinsurance segment amounted to 16.78%.

Bila diurai lebih lanjut pendapatan premi bruto untuk segmen Reasuransi Umum dan Reasuransi Jiwa dapat dilihat pada table berikut:

Broken down further, the gross premium income for the segment of General Reinsurance and Life Reinsurance is presented in the following table:

(dalam rupiah/In Rupiahs)

Reasuransi Umum/ General Reinsurance	Realisasi 2014 (1)/ Realization in 2014 (1)	Target 2014 (2)/ Target 2014 (2)	Realisasi 2013 (3)/ Realization in 2013 (3)	% Pertumbuhan(1:3)/ % Growth (1:3)	% Pencapaian(1:2)/ % Achievement (1:2)
Harta Benda/ <i>Property</i>	854,206,164,382	581,650,000,000	437,706,578,120	95,15	146,86
Kendaraan Bermotor/ <i>Motor</i>	91,177,887,639	91,611,000,000	58,102,238,069	56,93	99,53
Pengangkutan/ <i>Marine Cargo</i>	77,216,331,198	108,088,000,000	73,362,677,530	5,25	71,44
Rangka Kapal/ <i>Marine Hull</i>	126,919,067,003	117,024,000,000	99,832,929,273	27,13	108,46
Rangka Pesawat/ <i>Aviation</i>	1,176,157,739	3,136,000,000	1,283,497,406	-8,36	37,51
Satelit/ <i>Satellite</i>	-	-	-	-	-
Energi/ <i>Energy</i>	44,346,919,292	26,631,000,000	18,192,298,577	143,77	166,52
Rekayasa/ <i>Engineering</i>	80,926,119,262	92,543,000,000	77,602,782,700	4,28	87,45
Tanggung Gugat/ <i>Liability</i>	27,328,201,833	40,979,000,000	13,557,372,807	101,57	66,69
Kecelakaan Diri dan Kesehatan/ <i>Personal Accident and Health</i>	38,348,752,435	38,384,000,000	18,104,206,730	111,82	99,91
Kredit dan <i>Suretyship</i> / <i>Credit and Suretyship</i>	314,037,562,321	121,686,000,000	106,972,541,689	193,56	258,07
Aneka/ <i>Miscellaneous</i>	187,511,010,952	204,767,000,000	174,330,421,675	7,56	91,57
Reasuransi Jiwa/ <i>Life Reinsurance</i>	252,737,240,255	475,500,000,000	217,488,568,587	16,20	53,15
<b>Total</b>	<b>2,095,931,414,310</b>	<b>1,902,000,000,000</b>	<b>1,296,536,113,161</b>	<b>61,65</b>	<b>110,20</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa pendapatan premi bruto dari Kredit dan *Suretyship* meningkat paling pesat, yakni 193,56%, sementara premi bruto dari Rangka Pesawat adalah satu-satunya yang mengalami penurunan yakni sebesar 8,36%. Pesatnya pendapatan premi bruto dari bisnis Kredit & *Suretyship* disebabkan adanya kontribusi bisnis dari induk perusahaan, di samping portofolio baru dari perusahaan asuransi lainnya, yang sebelumnya tidak memberikan sesi reasuransinya kepada Perusahaan.

Berbanding terbalik dengan Kredit & *Suretyship*, bisnis Rangka Pesawat tidak dapat mencapai target yang ditetapkan karena adanya kendala-kendala yang timbul sebagai dampak dari minimnya portofolio bisnis ini sementara persaingan cukup tinggi.

Berdasarkan komposisinya, segmen harta benda memberi kontribusi tertinggi, yakni sebesar 40,75% dari total pendapatan premi. Pada tahun 2014, pendapatan segmen harta benda tercatat sebesar Rp854.206 juta, meningkat 95,15% sebesar jika dibandingkan dengan pendapatan segmen harta benda tahun sebelumnya, yakni Rp437.707 juta. Selanjutnya diikuti oleh pendapatan segmen Kredit dan Surety Bond, yang tahun ini melonjak, dengan prosentase sebesar 14,98%. Pada tahun lalu, yang menduduki posisi ke dua adalah segmen aneka, yang kini berada pada posisi ketiga, sebesar 8,85%.

## ASPEK PEMASARAN

Sebagai perusahaan reasuransi, NASIONAL RE tidak membuat produk-produk baru yang bisa langsung diterima oleh konsumen atau dalam hal ini adalah Tertanggung. Namun demikian, NASIONAL RE dapat berkontribusi kepada perusahaan-perusahaan asuransi mitranya dengan cara menawarkan skema produk yang sudah ada untuk dikombinasikan dengan produk lainnya sehingga menjadi suatu produk gabungan atau suatu paket. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip reasuransi, yaitu "*follow the fortune*", dimana perusahaan reasuransi hanya mengikuti produk-produk yang dijual oleh perusahaan asuransi. Pada prinsipnya perusahaan reasuransi memberi dukungan kapasitas untuk akseptasi produk-produk yang dipasarkan perusahaan asuransi. Sementara itu, sasaran pemasaran NASIONAL RE adalah perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, baik perusahaan lokal dengan struktur permodalan berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), gabungan antara perusahaan lokal dengan perusahaan asing (*joint venture*) dan saat ini sedang dijajaki untuk melakukan pemasaran kepada perusahaan asuransi mancanegara.

From the table above, it appears that the gross premium income of the Credit and Surety Bond increasing most rapidly at 193.56%, while the gross premium of Aviation is the only one that experienced a decline at 8.36%. The rapid growth in gross premium income of Credit and Suretyship business was due to the contribution of the business of the parent company, in addition to the new portfolio of other insurance companies, which previously did not provide reinsurance session to the Company.

Inversely proportional to the Credit and Suretyship, Aviation business can not achieve the target because of the constraints arising from the impact of the lack of this business portfolio while the competition is pretty tight.

Based on the composition, Properties segment contributed the highest, amounting to 40.75% of the total premium income. In 2014, the Properties segment recorded revenues of Rp854,206 million, an increase of 95.15% compared with the previous year, ie Rp437,707 million. Next is the income of the Credit and Surety Bond segment, which surged this year, with a percentage of 14.98%. In the last year, miscellaneous segments was at the second position, but is down to third position, amounting to 8.85%.

## ASPECTS OF MARKETING

As a reinsurance company, NASIONAL RE does not create new products to be used directly by consumer, or in this case is the insured. However, NASIONAL RE can contribute to its partner, insurance companies, by offering schemes existing products to be combined with other products so that it becomes a composite product or a package. This is in line with one of the principles of reinsurance, which is "*follow the fortune*". Reinsurance company just follows the products sold by insurance companies. In principle, the reinsurance company provide capacity support for the acceptances of products marketed by the insurance company. NASIONAL RE's target market is the insurance companies in Indonesia, Domestic Direct Investment Companies (PMDN), or joint venture with foreign companies and currently being explored is targeting our marketing efforts to foreign insurance companies.

Karena NASIONAL RE tidak bisa menjual produknya secara langsung kepada Tertanggung maka NASIONAL RE melakukan strategi pemasarannya dengan cara:

1. Memberikan konsultasi teknis asuransi/reasuransi,
2. Menyelenggarakan gathering dengan para mitra usaha,
3. Memberikan *tutorial*, kepada mitra usaha
4. Menyelenggarakan seminar atau *workshop* dan
5. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan formal dan non-formal lainnya yang bersifat menjalin hubungan yang sudah berjalan, baik hubungan bisnis maupun hubungan non-bisnis.

## TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

### Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Bagi NASIONAL RE, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan perusahaan dalam mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Itu sebabnya dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimilikinya, NASIONAL RE senantiasa berupaya agar seluruh karyawannya mampu mengembangkan diri secara individual maupun secara kolegal, sehingga pada akhirnya akan mendukung terciptanya peningkatan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan juga memahami pentingnya membangun kompetensi karyawan sebagai modal utama untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang optimal.

Hal ini dicapai dengan melaksanakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan melalui suatu program pelatihan yang dijalankan secara berjenjang dan terstruktur. Konsistensi Perusahaan dalam pelaksanaan program pengembangan SDM ini merupakan suatu keharusan bagi segenap jajaran manajemen Perusahaan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perusahaan, karena Perusahaan meyakini bahwa Sumber Daya Manusia merupakan asetnya yang utama.

### Perencanaan dan Pengembangan SDM

Kebijakan pengelolaan dan pengembangan SDM Perusahaan yang didasarkan pada konsep *human capital excellence* dimulai sejak proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian hingga program kesejahteraan karyawan dan pengelolaan hubungan industrial. Dengan menerapkan konsep *human capital excellence*, Perusahaan mampu membangun SDM yang kompeten di industrinya sehingga akan meningkatkan daya saing Perusahaan.

Since NASIONAL RE can not sell its products directly to the insured, then the Company executes its marketing strategy by:

1. Provide technical consultancy on insurance/reinsurance,
2. Conduct gathering event with business partners,
3. Provide tutorials,
4. Organize seminars or workshops and
5. Carry out other formal and informal activities to maintain relationships, both business and non-business.

## BUSINESS SUPPORT

### Human Resource Management

For NASIONAL RE, quality human resources is the key to the Company's success in achieving sustainable business growth. Therefore, in managing and developing the potential of its human resources, NASIONAL RE always seeks to ensure that all employees has the opportunity for their personal development, either individually or collegially, which in turn will support the creation of an increase in value for all stakeholders. The Company also understands the importance of building the competence of employees as the primary capital to achieve optimal business growth.

This is realized by implementing competency development program for all employees, through a training program that is designed to be implemented in stages and in a structured fashion. Company's consistency in the implementation of human resources development is imperative for all levels of management in order to realize the goals and objectives of the Company, as the Company believes that Human Resources is its main assets.

### Human Resources Planning and Development

The Company's management and development policy on human resource are based on the concept of human capital excellence, began at the process of recruitment, selection, training, assessment, up to employee welfare programs and industrial relations. By applying the concept of human capital excellence, the Company is able to build a competent human resources in the industry, which will improve the competitiveness of the Company.



Realisasi rencana kerja SDM tahun 2014 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan *Monitoring* terhadap kedisiplinan pegawai
2. Menyusun SK Direksi sebanyak ± 40 (Empat Puluh) Surat Keputusan Direksi yang dibuat tahun 2014.
3. Melakukan penyusunan Pedoman Rekrutmen berbasiskan values perusahaan
4. Rekrutmen untuk mengisi unit-unit kerja yang masih kekurangan pegawai termasuk kerjasama dengan *Jobstreet*.
5. Melakukan kerjasama dengan *broker/Global Risk Management (GRM)* untuk asuransi kesehatan pegawai 2015 dengan menggunakan Asuransi MNC Life.

Selain itu untuk meningkatkan kompetensi SDM, perusahaan telah mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti seminar/*workshop* di dalam dan luar negeri diantaranya ;

- a. Seminar *Business Continuity Management based on ISO 22301* yang diselenggarakan oleh IT Governance Indonesia
- b. Seminar *"The 7 habits of highly effective for professional secretary"* yang diselenggarakan oleh Sekretaris Pro, Seminar *"Cardiovascular Disorders"* yang diselenggarakan oleh Munich Re
- c. *"Training for trainer service excellent"* yang diselenggarakan oleh PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, *workshop "Asuransi machinery breakdown* untuk usaha menengah dan kecil", yang diselenggarakan oleh STIMRA
- d. Seminar "Update PSAK yang berlaku 2014 serta perubahannya dan PSAK yang akan berlaku 2015"
- e. "Menyusun kerja audit tahunan (PKAT) berbasis risiko", yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Quality Management Undangan *Roundtable*, yang diselenggarakan oleh PT Askrindo-STMA Trisakti & LSPMR, W/S
- f. "Penerapan prinsip *utmost good faith* dalam penanganan sengketa klaim asuransi marine cargo" yang diselenggarakan oleh LPMA STMA Trisakti, Lokakarya
- g. "Bedah sengketa klaim analisa dan penyelesaian kasus klaim asuransi kendaraan dari perspektif polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia (PSAKBI) dan UU No.22/2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan" yang diselenggarakan oleh Widya Dharma Artha (WDA)
- h. Workshop "Memasuki masa pensiun & pelatihan kewirausahaan – Quantum life transformation" yang diselenggarakan oleh Adi W. Gunawan Institute of Mind Technology
- i. Workshop "Bedah kasus & penanganan klaim risiko banjir pada asuransi kendaraan bermotor" yang diselenggarakan

The realization of 2014 HR work plan can be described as follows:

1. Monitoring employee discipline
2. Develop Board of Directors Decree, as much as 40 BOD Decrees were made in 2014.
3. Prepare values-based recruitment guidelines for the Company.
4. Conduct recruitment to fill short-staffed units, among others by collaborating with the Jobstreet.
5. Collaborate with the broker / Global Risk Management (GRM) for employee health insurance plan in 2015 using MNC Life Insurance.

Moreover, to improve the competence of human resources, the company sent several employees to attend seminars / workshops at home and abroad, including:

- a. "Seminar on Business Continuity Management based on ISO 22301" organized by IT Governance Indonesia.
- b. Seminar on "The 7 habits of highly effective for professional secretary" organized by Sekretaris Pro, Seminar on "Cardiovascular Disorders" organized by Munich Re.
- c. "Training for trainer service excellent" organized by PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, workshop "Insurance on machinery breakdown for Small/Medium companies", organized by STIMRA.
- d. Seminar on "SFAS Updates, in effect in 2014 and the changes and SFAS to be in effect in 2015
- e. "Prepare risk-based Annual Audit Program (PKAT)", organized by Risk Management Professional Certification Agency (LSPMR), Quality Management Roundtable Initiation, organized by PT Askrindo-STMA Trisakti & LSPMR, W/S.
- f. "Application of the principle of utmost good faith in handling marine cargo insurance claim disputes" organized by LPMA STMA Trisakti.
- g. "Study on dispute of claims analysis and settlement of cases of claims for vehicle insurance policy from the perspective of standard policy of insurance for motor vehicle Indonesia (PSAKBI) and Law No.22/2009 on traffic and road transportation" organized by Widya Dharma Artha (WDA)
- h. Workshop "Retirement and entrepreneurship training – Quantum life transformation" organized by Adi W. Gunawan Institute of Mind Technology.
- i. Workshop "Case study & claims handling for flood risk on motor vehicle insurance" organized by LPMA STMA

oleh LPMA STMA Trisakti.

- j. Workshop “Memahami peraturan dan SOP pengadaan barang & jasa BUMN” yang diselenggarakan oleh *Risk Management International (RMI)*.

Selama tahun 2014, hampir seluruh pogram kerja SDM dapat terlaksana dengan baik dan bahkan terdapat beberapa program strategis yang timbul dalam pelaksanaannya. Hal ini memberikan kontribusi yang besar sehingga target perusahaan pada tahun 2014 dapat terlampaui.

### Kebijakan Rekrutmen

Menyesuaikan dengan perkembangan usaha dan kebutuhan operasional perusahaan, NASIONAL RE menerapkan beberapa strategi rekrutmen yang tepat, akurat dan cepat, dengan tetap memperhatikan kualitas serta kompetensi dasar para calon karyawan. Pelaksanakan proses rekrutmen senantiasa dimulai dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kebutuhan penambahan pegawai, baik kebutuhan saat ini maupun prediksi kebutuhan masa depan. Dengan demikian diharapkan Perusahaan mampu memiliki pool calon-calon karyawan dengan potensi dan kompetensi dasar yang sesuai dengan perencanaan perusahaan.

Strategi rekrutmen yang diterapkan Perusahaan mencakup:

- Iklan di media massa, namun sudah dikurangi porsinya
- Iklan di internet melalui jobstreet dan jobsdb
- Kunjungan ke kampus-kampus

Selain itu Perusahaan juga membuka iklan lowongan kerja di media cetak, seperti kompas dan melalui internet, yakni *Jobstreet*.

Pada tahun 2014 dilakukan rekrutmen pegawai sebanyak 10 orang pegawai.

### Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme

Seluruh karyawan NASIONAL RE diarahkan dan diberi kesempatan penuh untuk menjadi insan perusahaan yang memiliki kemampuan untuk belajar, bertumbuh dan bersaing secara sehat sehingga secara bersama-sama mampu menjadi daya dorong bagi kemajuan Perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, Perusahaan secara berkesinambungan melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi pekerja agar memiliki keahlian dan kompetensi yang dapat menjawab tantangan bisnis perusahaan di masa kini dan masa yang akan datang. Selama ini program pendidikan, pelatihan dan

Trisakti.

- j. Workshop “Understanding the regulation and SOP for the procurement of goods and services for SOEs” organized by Risk Management International (RMI).

During 2014, almost all of HR work pogram is carried out excellently and in fact there are several strategic programs arised during its implementation. This is a major contribution that exceeded the Company's target in 2014.

### Recruitment Policy

To adapt to the development of business and operational needs of the company, NASIONAL RE implement recruitment strategies are appropriate, accurate and fast, by taking into account the quality and basic competence of the prospective employee. Recruitment process always begins with analysis of the needs of additional staff, both current and future needs, so that the Company is able to have a talent pool with potential and basic competence suitable for the corporate plan.

The Company's recruitment strategies include:

- Advertising in media, which portion has been reduced.
- Advertising on the internet via JobStreet and JobsDB
- Visits to campuses

In addition, the Company also places job advertisements in print media, such as Compass and via the internet, namely *Jobstreet*.

In 2014, the Company recruited 10 new employees.

### Competence Development and Professionalism

All employees at NASIONAL RE are encouraged and given a full opportunity to develop themselves by learning, growing and competing fairly, so that all together can be the driving force for the progress of the Company. In order to achieve this end, the Company continuously provide trainings and competence development proram for workers to have the skills and competencies needed to address business challenges ,in the present and the future. So far, all educational, training and development programs are conducted by the Company continuously

pengembangan pekerja dilakukan oleh Perusahaan secara *in a carefully planned manner*.  
berkelanjutan dan terencana dengan baik.

Tabel Daftar kegiatan peningkatan kompetensi pegawai  
2014/*List of activities of employee competence enhancement*

No.	Nama Program/Program Name	Penyelenggara/Organizer
1.	Seminar "Sosialisasi Laporan Bulanan Usaha Asuransi Kerugian dan Usaha Reasuransi Berdasarkan Syariah"/ <i>Seminar on "Socialization of Sharia Based Insurance and Reinsurance Business Monthly Report"</i>	OJK
2.	Workshop "Mencari Juara Sejati GCG Indonesia: Pengalaman Berharga Para Pemenang ARA 2012"/ <i>Workshop on "Searching for True Winner of GCG in Indonesia: Precious Experience of ARA 2012 Winners"</i>	KNKG
3.	Workshop "Underwriter Dan Claim Asuransi Jiwa"/ <i>Workshop on "Underwriter and Claim for Life Insurance"</i>	LPMA STMA Trisakti
4.	Undangan "Sosialisasi Aplikasi E-SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26"/ <i>Invitation of "Socialization of the Application of E-SPT Term Income Tax Article 21 and/or 26"</i>	Dir. Jend. Pajak
5.	Workshop "Metode Perhitungan Premi Excess of Loss & Reinstatement Premium"/ <i>Workshop on "Premium Calculation Method: Excess of Loss &amp; Reinstatement Premium"</i>	LPMA Trisakti
6.	Workshop "Financial Modeling Fundamentals And Sensitivity & Scenario Analysis Tools"/ <i>Workshop on "Financial Modeling Fundamentals And Sensitivity &amp; Scenario Analysis Tools"</i>	PT Askrido dan Deloitte
7.	Workshop "Psychology At Work"/ <i>Workshop on "Psychology At Work"</i>	PT Intipesan Pariwara
8.	Seminar "Preview Register Securities Analyst (RSA & CSA)"/ <i>Seminar on "Preview Register Securities Analyst (RSA &amp; CSA)"</i>	CSA
9.	Seminar "Jaminan Kesehatan Nasional"/ <i>Seminar on "National Health Insurance"</i>	AAMAI
10.	Gathering Dalam Bentuk Outing/ <i>Gathering in the form of Outing,</i>	FKSPI Asgara Jaskeu
11.	Workshop "Aspek Hukum dan Sengketa Klaim Asuransi"/ <i>Workshop on "Legal Aspect and Insurance Claims Disputes"</i>	LPMA STMA Trisakti
12.	Perkuliahan Singkat "PPS Aktuaris Mata Ujian A40"/ <i>Short lectures on "PPS Actuarial Subject A40"</i>	PPSS Aktuaris
13.	Workshop "Akuntansi Asuransi Update sesuai PSAK 28, PSAK 36, PSAK 62"/ <i>Workshop "Updated insurance accounting in accordance with SFAS 28, SFAS 36, SFAS 62"</i>	IAI
14.	Seminar "Product Development 2014"/ <i>Seminar on "Product Development 2014"</i>	Munich Re
15.	Training "CSA/ <i>Training on "CSA"</i>	CSA
16.	Workshop "Pengadaan Teknologi Informasi 2014: Pengadaan Lisensi Aplikasi"/ <i>Workshop on "Procurement of Information Technology 2014: Procurement of Licensed Application"</i>	PT Sharing Vision
17.	Seminar "IT Governance Update 2014 Cobit 5 & Permen BUMN tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN"/ <i>Seminar on "IT Governance Update 2014 Cobit 5 &amp; Minister SOE's Decree on Guidelines for Developing Management of</i>	Sharing Vision
18.	"Life, Critical Illness & Disability Insurance Underwriting"/ <i>"Life, Critical Illness &amp; Disability Insurance Underwriting"</i>	SCI Singapore
19.	"Nasional Internal Audit 2014"/ <i>National Internal Audit 2014"</i>	YPIA
20.	"Penugasan Auditor Internal dan Pelaporannya"/ <i>"Assignment for Internal Auditor and Reporting"</i>	Risk Management International
21.	Training "Bedah Klausula Insurance Cargo Clauses 1/1 82 ABC"/ <i>Training "Clause Analysis on Insurance Cargo Clauses 1/1 82 ABC"</i>	WDA
22.	"Technical Course in Marine Insurance"/ <i>Technical Course in Marine Insurance"</i>	SCI Singapore
23.	"Basic Course in Insurance"/ <i>Basic Course in Insurance"</i>	MII Malaysia
24.	Training "Analisis Aktuaris Asuransi Umum"/ <i>Training "General Insurance Actuarial Analyst"</i>	OJK & PAI
25.	Training "Success Factor dalam Bisnis Surety Bond Proyek Pemerintah & Swasta"/ <i>Training "Success Factor in Surety Bond Business for Government &amp; Private Project"</i>	WDA
26.	"A Comprehensive Course in General Insurance-Claims"/ <i>A Comprehensive Course in General Insurance-Claims"</i>	PSM Consulting
27.	"Best Practice – Receivable & Corporate Collection Management"/ <i>"Best Practice – Receivable &amp; Corporate Collection Management"</i>	Formasi

No.	Nama Program/Program Name	Penyelenggara/Organizer
28.	Workshop "Program Reasuransi yang Efektif dan Efisien" STIMRA/Workshop on "Effective and Efficient Reinsurance Program"	
29.	Workshop "Sosialisasi Draft Polis Standar Asuransi Kebongkaran & Asuransi Uang"/Workshop on "Socialization of Draft of Standard Policy of Burglary Insurance & Money Insurance"	AAUI
30.	Seminar "Pengelolaan Risiko pada Bisnis Hulu Minyak & Gas Bumi Di Indonesia"/Seminar on "Risk Management in the Upstream Oil & Gas Business in Indonesia"	AMRI
31.	Seminar Nasional "Efektifitas Fungsi BPJS Kesehatan"/National Seminar on "Effectiveness of BPJS Health"	STMA Trisakti
32.	Training "Advanced Reinsurance: Applications & Concepts for Various Legal Liability & Associated General Accident Insurance Classes"/Training on "Advanced Reinsurance: Applications & Concepts for Various Legal Liability & Associated General Accident"	SCI Singapore
33.	Seminar "UIB Asia's Market"/Seminar on "UIB Asia's Market"	UIB Asia
34.	Training "Reinsurance – Advanced Reinsurance: Applications & Concepts For Property & Engineering Insurance"/Training on "Reinsurance – Advanced Reinsurance: Applications & Concepts For Property & Engineering Insurance"	SCI Singapore
35.	Training "Associateship Of The Malaysian Insurance Institute (AMII)"/Training on "Associateship Of The Malaysian Insurance Institute (AMII)"	Jasindo dan MII Malaysia
36.	Training "Catastrophe Modeling"/Training on "Catastrophe Modeling"	SCI Singapore
37.	Training "Becoming The Superb Secretary"/Training on "Becoming The Superb Secretary"	Tiara Consultant
38.	Training "Technical Course In Reinsurance & Accounting"/Training on "Technical Course In Reinsurance & Accounting"	MII Malaysia
39.	Workshop Reasuransi Syariah/Workshop on Sharia Reinsurance	PT. Pan Pacific Insurance Syariah
40.	Training "Finance for No Finance Managers & Executives"/Training on "Finance for No Finance Managers & Executives"	ODC Singapore
41.	Training "Risk Contact Person (RCP)"/Training on "Risk Contact Person (RCP)"	PT Askrindo dan PT. Reasuransi Nasional Indonesia
42.	Training "Practical Aspects of Commercial Property Insurance"/Training on "Practical Aspects of Commercial Property Insurance"	SCI Singapore
43.	Workshop "Bedah Polis Dan Klausula-Klausula Asuransi Marine Cargo Khusus Coal (Batubara) & Bulk Oil(Minyak Curah) dan Analisa Klaim"/Workshop on "Analysis of Policies and Clauses of Marine Cargo Insurance for Coal & Bulk Oil and Claim Analysis"	WDA
44.	Workshop "Sharing Experience"/Workshop on "Sharing Experience"	WDA
45.	Training "Sertifikasi Keahlian Asuransi Syariah Tingkat Dasar"/Training on "Certification for Expertise in Sharia Insurance, Basic Level"	IIS dan AASI
46.	Training "Applications & Concepts for Various Legal Liability & Associated General Accident Insurance Classes"/Training on "Applications & Concepts for Various Legal Liability & Associated General Accident Insurance Classes"	SCI Singapore
47.	Training "The Nuts & Bolts of Treaty Reinsurance – Proportional Treaty Reinsurance"/Training on "The Nuts & Bolts of Treaty Reinsurance – Proportional Treaty Reinsurance"	SCI Singapore
48.	Training "On The Job Training"/Training on "On The Job Training"	ARB Singapore
49.	Training "2nd Asia Agriculture Insurance Conference"/Training on "2nd Asia Agriculture Insurance Conference"	Asia Insurance Review Singapore
50.	Seminar "IFRS" / Seminar on "IFRS"	IAI
51.	Training "The Nuts & Bolts Of Treaty Reinsurance: Non-Proportional Treaty Reinsurance"/Training on "The Nuts & Bolts Of Treaty Reinsurance: Non-Proportional Treaty Reinsurance"	SCI Singapore
52.	Seminar "AAJI"/Seminar on "AAJI"	AAJI
53.	Seminar "Trade Credit Insurance (Advanced)"/Seminar on "Trade Credit Insurance (Advanced)"	STECIS Belanda
54.	Training "Sertifikasi Keahlian Asuransi Syariah Tingkat Dasar Gelombang II"/Training on "Certification of Expertise Sharia Insurance Basic Level, Batch II"	IIS dan AASI Jakarta
55.	Training "A Comprehensive Course In Autation Insurance"/Training on "A Comprehensive Course In Autation Insurance"	MII Malaysia
56.	Training "Produk-Produk PT Askrindo"/Training on "PT Askrindo Products"	PT. Askrindo
57.	Training "Underwriting And Analysing Financial Statement"/Training on "Underwriting And Analyzing Financial Statement"	MDIS Singapore



No.	Nama Program/Program Name	Penyelenggara/Organizer
58.	Lokakarya "Bedah Polis Dan Klausula-Klausula Asuransi Marine Cargo serta Sharing Experience dalam Adjustment dan Penyelesaian Klaim" /Workshop on "Analysis on Polices And Clauses of Marine Cargo Insurance and Sharing Experience in the Adjustment and	WDA
59.	Seminar "27th Top Agent Awards AAJI" /Seminar on "27th Top Agent Awards AAJI"	AAJI
60.	Workshop "Pengelolaan Dana Pensiun Di BUMN Berdasarkan UU No.13 dan PSAK 24" /Workshop on "Pension Fund Management for SOEs Based On the Law No. 13 and SFAS 24."	BUMN News
61.	Training "Performance Management Skills For Leaders" /Training on "Performance Management Skills For Leaders"	ODC Singapore
62.	Training "Asia Cyberliability Insurance Conference" /Training on "Asia Cyberliability Insurance Conference"	Asia Insurance Review Singapore
63.	Workshop "Mengenal Profil Risiko pada Teknologi Industri Berat dan Teknik Risk Assessment" /Workshop on "Knowing Risk Profile of Heavy Industry Technology and Engineering Risk Assessment"	STIMRA
64.	Training "Downstream Oil & Gas Insurance And Risk Management" /Training on "Downstream Oil & Gas Insurance And Risk Management"	JLT
65.	Training "Comprehensive Course In Reinsurance" /Training on "Comprehensive Course In Reinsurance"	MII Malaysia
66.	Training "Fundamentals of Financial Lines Insurance" /Training on "Fundamentals of Financial Lines Insurance"	SCI Singapore
67.	Training "Marine & Energy Insurance Seminar 2014" /Training on "Application of INA CBG"	Guy Carpenter Singapore
68.	Training "Aplikasi INA CBG" /Training on "Application of INA CBG"	AAJI
69.	Training "Risk Management 2014" /Training on "Risk Management 2014"	
70.	Training "Fundamental of Reinsurance Principles & Practice" / Training on "Fundamental of Reinsurance Principles & Practice"	SCI Singapore
71.	Training "Audit Intern Tingkat Dasar I" /Training on "Internal Audit Basic Level I"	YPIA
72.	Seminar "The Nuts & Bolts of Insurance Module 3: Comprehensive General Liability Insurance Underwriting, Interpretation of Policy & Claims" /Seminar on "The Nuts & Bolts of Insurance Module 3: Comprehensive General Liability Insurance Underwriting,	SCI Singapore
73.	Seminar "Product & Product Development In Asia" /Seminar on "Product & Product Development In Asia"	SCOR Global Life
74.	Training "Property Reinsurance Claims" /Training on "Property Reinsurance Claims"	SCI Singapore
75.	Workshop "Enterprise Data Warehouse" / Workshop on "Enterprise Data Warehouse"	Sharing Vision
76.	Seminar dan Kuliah Lapangan Geo Ekskusi Maipark 2014 /Seminar and Field Lecture of Geo Execution of Maipark 2014	PT. Reasuransi Maipark Indonesia
77.	Seminar "Miller Asia Market Seminar 2014" /Seminar on "Miller Asia Market Seminar 2014"	Miller Insurance Sevices
78.	Training "Kegiatan Pembinaan Management Ketenagakerjaan (SDM)" /Training on "Development of Employment Management (HR)"	Suku Dinas Tenaga Kerja
79.	Training "Trading in A Soft Reinsurance Market" /Training on "Trading in A Soft Reinsurance Market"	UIB Asia Reinsurance Brokers Pte Ltd
80.	Pelatihan "Koreksi Fiskal dan Penyusunan SPT PPH Badan 2014" /Training on "Fiscal correction and preparation of SPT PPH 2014 Agency 2014"	Lembaga Manajemen Formasi Jakarta
81.	Training "Komunikasi dan Psikologi Audit" / Training on "Communication and Psychology Audit"	PPA & K
82.	Training "Certified Risk Management Profesional" /Training on "Certified Risk Management Professional"	PT RAP Indonesia
83.	Training "Penyusunan dan Review Master Plan Teknologi Informasi" /Training on "Preparation and Review Master Plan of Information Technology"	Sharing Vision
84.	Seminar "Job Fair & Rapat Anggota PAI 2014" /Seminar on "Job Fair & Meeting of Members of PAI 2014"	PAI (The Society of Actuaries of Indonesia)
85.	Seminar dan Mukernas FKSPI 2014 /Seminar and National Meeting of FKSPI 2014	FKSPI (Internal Audit Communication Forum)
86.	Sosialisasi "Peraturan Dan Prosedur Arbitrase BMAI" /Socialization of "Rules and Procedures of Arbitrage of BMAI"	BMAI
87.	Seminar "Indonesia Healthcare Cost Management" /Seminar on "Indonesia Healthcare Cost Management"	MKI
88.	Seminar "Visiting World Class Data Center Equinix" /Seminar on "Visiting World Class Data Center Equinix"	Sharing Vision

No.	Nama Program/Program Name	Penyelenggara/Organizer
89.	Workshop "Bedah Polis Dan Klausula Asuransi Konstruksi"/Workshop "Analysis of Policies and Clauses of Construction Insurance."	WDA
90.	Pelatihan "Service Excellent"/Training on "Service Excellent"	PT Askrindo
91.	Seminar "Business Continuity Management Based on ISO 22301"/91. Seminar on "Business Continuity Management Based on ISO 22301"	IT Governance Indonesia
92.	Seminar "The 7 Habits Of Highly Effective For Professional Secretary" /Seminar on "The 7 Habits Of Highly Effective For Professional Secretary".	Sekretaris Pro
93.	Seminar "Cardiovascular Disorders" / Seminar on "Cardiovascular Disorders"	Munich Re
94.	"20th Indonesian Rendezvous – Robust Indonesia Reinsurance Company Forthcoming The Asean Economic Community"/"20th Indonesian Rendezvous – Robust Indonesia Reinsurance Company Forthcoming The Asean Economic Community"	AAUI
95.	"Training For Trainer Service Excellent"/"Training For Trainer Service Excellent"	PT Askrindo
96.	Workshop "Asuransi Machinery Breakdown untuk Usaha Menengah dan Kecil" / Workshop on "Insurance of Machinery Breakdown for SMEs"	STIMRA
97.	Seminar "Update PSAK yang Berlaku 2014 serta Perubahannya dan PSAK yang Akan Berlaku 2015 Beserta Persiapan Implementasinya"/Seminar on "Updated SFAS enacted in 2014 and the Changes and SFAS to be enacted in 2015 with the Preparation for its Implementation"	Formasi
98.	Seminar "Pasar Asuransi Mikro Indonesia" /Seminar "Indonesia Micro Insurance Market"	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
99.	Seminar Dan Pertemuan Anggota FKSPI Komissariat Asgara Jaskeu Plus/Seminar and Meeting of FKSPI Commissariat Asgara Jaskeu Plus	FKSPI (Internal Audit Communication Forum)
100.	Workshop "Petty Cash & Bank Reconciliation"/Workshop on "Petty Cash & Bank Reconciliation"	DHN Consulting
101.	Pelatihan Audit Intern Tingkat Dasar I/Training on Internal Audit Basic Level I	YPIA
102.	Seminar "Half Day Seminar Insurance Outlook 2015"/Seminar on "Half Day Seminar Insurance Outlook 2015"	Media Asuransi
103.	Perkuliahan Singkat Sertifikasi Aktuaris Mata Ujian A70 (Loss Distribution) STMA Trisakti /Short Class on Certification of Actuarial Subject A70 (Loss Distribution)	
104.	Workshop "Menyusun Kerja Audit Tahunan (PKAT) Berbasis Risiko"/Workshop on "Developing Risk-Based Annual Audit (PKAT)"	LSPMR Quality Management
105.	Undangan Roundtable /Invitation to Roundtable of PT Askrindo-STMA Trisakti & LSPMR	PT Askrindo-STMA Trisakti & LSPMR
106.	Workshop "Penerapan Prinsip Utmost Good Faith dalam Penanganan Sengketa Klaim Asuransi Marine Cargo" / Workshop on "Application of Utmost Good Faith Principles in Handling Disputes in Marine Cargo Insurance Claim"	LPMA STMA Trisakti
107.	Lokakarya "Bedah Sengketa Klaim Analisa dan Penyelesaian Kasus Klaim Asuransi Kendaraan dari Perspektif Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) dan UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan"/Workshop on "Analysis of Dispute Claims: Analysis and Settlement of Vehicle Insurance Cases from the Perspective of Standard Policy of Vehicle Insurance Indonesia (PSAKBI) and Law No.22 / 2009 on Traffic and Road Transport"	Widya Dharma Artha (WDA),
108.	Workshop "Memasuki Masa Pensiun & Pelatihan Kewirausahaan – Quantum Life Transformation"/ Workshop on "Entering Retirement Age & Entrepreneurship Training - Quantum Life Transformation"	Adi W. Gunawan, Institute Of Mind Technology
109.	Workshop "Bedah Kasus & Penanganan Klaim Risiko Banjir pada Asuransi Kendaraan Bermotor"/ Workshop "Case Analysis & Settlement of Flood Risk Claims for Vehicle Insurance."	LPMA STMA Trisakti
110.	Workshop "Memahami Peraturan dan SOP Pengadaan Barang & Jasa BUMN"/ Workshop "Understanding Rules and SOP Procurement & Services in SOEs".	Risk Management International (RMI)

### Pengembangan Karir dan Kesetaraan Kesempatan

NASIONAL RE mendukung pengembangan karir bagi seluruh karyawannya melalui pelaksanaan pelatihan khusus yang terencana. Selain itu, Perusahaan juga memberikan kesempatan dan kesamaan hak kepada seluruh pekerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik, sejak proses rekrutmen, maupun dalam program pengembangan kompetensi dan keahlian, serta penetapan jenjang karir dan remunerasi.

### Career Development and Equal Opportunity

NASIONAL RE supports career development for all employees through the implementation of well planned trainings. In addition, the Company also provides opportunities and equal rights for all workers, regardless of ethnic, religion, race, class, gender and physical condition, from the beginning of the recruitment process, as well as in the competence and skills development programs and well established career path and competitive remuneration.

### **Strategi Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan**

Remunerasi merupakan imbalan kerja dari perusahaan bagi karyawan yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, pension dan lain sebagainya. Dalam menyusun strategi remunerasinya, NASIONAL RE mempertimbangkan berbagai hal selain kemampuan perusahaan. Salah satu yang utama adalah kinerja karyawan. Dengan menerapkan strategi remunerasi berbasis kinerja, Perusahaan mampu meningkatkan produktivitas, menjaga pertumbuhan dan memperkuat posisinya di tengah persaingan usaha. Strategi ini juga diterapkan untuk mempertahankan karyawan-karyawan terbaik yang dimiliki Perusahaan.

Remunerasi juga terkait dengan kesejahteraan karyawan dan bagi Perusahaan hal ini merupakan hal yang paling esensial dalam pengembangan SDM. Perusahaan memberikan perhatian khusus dalam masalah kesejahteraan karyawan serta terus melakukan peningkatan dari tahun ke tahun.

Kebijakan Remunerasi yang diterapkan perusahaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014. Dengan demikian, seluruh pegawai mendapatkan tingkat kesejahteraan yang memadai sehingga dapat menciptakan kenyamanan dalam bekerja.

### **Pengelolaan Hubungan Industrial**

NASIONAL RE menerapkan sistem manajemen *human assets* yang berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, adil, motivatif dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja. Selain dari itu NASIONAL RE juga mengakui hak pekerja untuk berserikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Remuneration Strategy and Employee Benefits**

Remuneration is the benefit of employees of the company for employees to wages and salaries and allowances fixed, fees, incentives, bonuses for achievement, severance, pension and so forth. In preparing the remuneration strategy, NASIONAL RE consider various things other than the ability of the company. One of the main ones is the performance of the employee. By implementing performance-based remuneration strategy, the Company is able to improve productivity, maintain growth and strengthen its position in the middle of the competition. This strategy is also applied to retain the best employees of the Company.

Remuneration is also related to the welfare of employees and the Company recognizes this is the most essential aspect in the development of human resources. The Company pays attention to employee welfare issues and continuously improve it.

Remuneration policy applied by the Company refers to the Law No. 13 of 2013 on Labour and the Regulation of Minister of SOEs No. PER-04 / MBU / 2014. Thus, all employees can enjoy a proper standard of living and help promoting comfort working environment.

### **Industrial Relations Management**

NASIONAL RE implements the human assets management system based on the principles of openness, fairness, motivational and free from bias due to differences in ethnicity, origin, gender, religion and origin of birth, as well as the things that are not related to performance. Aside from that, NASIONAL RE also recognizes the right of employees to be involved in organization/union in accordance with the provisions of the applicable legislation.

Perusahaan selalu melakukan pembinaan dan pengembangan pekerja yang berpedoman pada Budaya Perusahaan, Kebijakan Perusahaan di bidang kepegawaian, Peraturan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pokok-pokok Organisasi. Perusahaan juga menjamin bahwa peraturan-peraturan tersebut di atas sesuai dengan standar *Good Corporate Governance (GCG)*. Selain daripada itu, Perusahaan menyadari sepenuhnya adanya perubahan lingkungan bisnis yang dinamis.

Untuk itu segenap jajaran perusahaan baik Direksi, manajemen dan pekerja akan selalu berusaha untuk menjalin kemitraan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kemajuan bersama. Perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan mutu manajemen dan kualitas pekerja sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif. Perusahaan melaksanakan beberapa hal mengenai pekerja dan hubungan industrial antara lain:

1. Melakukan penataan pekerjaan dengan baik sehingga memotivasi dan memberdayakan pekerja;
2. Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima pekerja, secara umum mengikuti peraturan serta sebanding dan kompetitif dengan industri sejenis;
3. Memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan;
4. Meningkatkan disiplin pekerja agar mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. Menerapkan *reward* dan *punishment* secara adil sesuai prestasi atau tingkat kesalahan pekerja;
6. Memberikan hak kepada pekerja untuk berserikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, serta melindungi hak pekerja untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Pekerja;
7. Menempatkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai komitmen Perusahaan;
8. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pekerja;
9. Memberikan hak-hak purna bakti sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal kesejahteraan pekerja, kompetisi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja;
11. Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten;
12. Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan.

The Company continuously coaches and develops its employees based on the Corporate Culture, Corporate Policies on employment, Principal Regulations of Personnel and Organization. The Company also guarantees that the aforementioned regulations are in accordance with the standards of Good Corporate Governance. In addition, the Company is fully aware of the dynamic changes in the business environment.

To that end, all levels of the Company, either Board of Directors, management and employees will always strive to establish partnerships in order to support each other in achieving mutual goals and progress. The Company will constantly strive to improve the quality of management and their employees in order to perform efficiently and effectively. The Company carries out some issues on employees and industrial relations, among others:

1. Managing the works excellently to motivate and empower workers;
2. Ensuring that the remuneration scheme received by the employees, in general is in accordance with the rules and comparable and competitive with similar industries;
3. Providing opportunities for employees to participate in education and training in line with the competencies and needs of the Company;
4. Increasing the employees discipline to comply with the rules and policies established;
5. Implementing a fair reward and punishment in accordance to the employees' achievement or error;
6. Providing employees the rights to have freedom of association, according to the prevailing laws and regulations and protect the right of employees to join or not join the Labor Unions.
7. Making the Collective Labour Agreement (CLA) as the Company's commitment;
8. Providing employees with conducive and safe working conditions;
9. Providing post-employment rights in accordance with the applicable regulations;
10. Referring to the Collective Labour Agreement (CLA) in terms of the welfare of the employees, fair competition, provision of working facilities and infrastructure;
11. Implementing Collective Labour Agreement (CLA) consistently;
12. Placing Trade Union as a partner of the Company.



Pekerja juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap perusahaan. Kewajiban pekerja terhadap Perusahaan antara lain:

1. Setiap pekerja wajib menaati PKB, Nilai-nilai Perusahaan dan semua peraturan yang dikeluarkan perusahaan;
2. Setiap pekerja wajib mendahulukan kepentingan perusahaan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggung jawabnya.
3. Setiap pekerja wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya;
4. Setiap pekerja wajib menjaga harta milik dan nama baik perusahaan;
5. Setiap pekerja yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan.

#### Komposisi Karyawan

Per 31 Desember 2014, Perusahaan memiliki 142 karyawan dengan jenjang pendidikan mulai dari SD, SLTP, SLTA, D3, S1 dan S2. Berdasarkan jabatan komposisi berjenjang mulai dari Pegawai Dasar, Pelaksana, Kepala Seksi, Kepala Bagian dan Kepala Divisi.

Employees also have a range of obligations that must be fulfilled, among others are:

1. All employees are required to comply with CLA, Corporate Values and all Company regulations.
2. All employees are required to prioritize the interests of the Company that relate directly or indirectly with their responsibilities.
3. All employees are required to exert their best efforts in carrying out their assigned duties.
4. All employees are required to maintain the property and reputation of the Company.
5. All employees who became supervisor are required to develop and provide exemplary.

#### Employee Composition

As of December 31, 2014, the Company had 142 employees with education levels ranging from elementary school, junior high, high school, Under Graduate, Bachelor and Masters' degree. Based on the position, the composition ranging from Clerk, Officer, Section Head, Department Head and Division Head.

#### Prosentase dari Komposisi Pegawai berdasarkan Usia (per 31 Desember 2014)

NO.	USIA/Age	JUMLAH/Total	PROSENTASE/percentage
1	20 s.d. 24 tahun	7 org	4,93 %
2	25 s.d. 29 tahun	14 org	9,86 %
3	30 s.d. 34 tahun	18 org	12,67 %
4	35 s.d. 39 tahun	28 org	18,84 %
5	40 s.d. 44 tahun	33 org	20,29 %
6	45 s.d. 49 tahun	24 org	16,67 %
7	50 s.d. 54 tahun	16 org	13,77 %
8	55 tahun ke atas	2 org	2,17 %
		142 org	100,00 %

#### Percentage of Employees Composition based on age (as of December 31, 2014)

#### Komposisi Usia berdasarkan Jabatan (per 31 Desember 2014)

NO.	JABATAN/Position	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	>55
1.	Kepala Divisi/Division Head	-	-	-	-	2	7	1	-
2.	Kepala Bagian/Department Head	-	-	-	3	9	5	4	1
3.	Kepala seksi/Assistant Manager	-	1	12	12	11	8	6	-
4.	Pegawai Pelaksana/Officer	7	13	6	8	6	2	1	1
5.	Pegawai Dasar/Clerk	-	-	-	5	5	2	4	-
	<b>Jumlah/Total</b>	7	14	18	28	33	24	16	2

#### Age Composition by Position (as of December 31, 2014)

### Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan dan Pendidikan (per 31 Desember 2014)

### Composition of Employees by Occupation and Education (as of December 31, 2014)

NO.	JABATAN/Position	S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD	JML
1.	Kepala Divisi/ Division Head	4	6	-	-	-	-	10
2.	Kepala Bagian/ Department Head	4	18	-	-	-	-	22
3.	Kepala seksi/ Assistant Manager	6	41	3	-	-	-	50
4.	Pegawai Pelaksana/ Officer	1	37	4	2	-	-	44
5.	Pegawai Dasar/Clerk	-	1	-	11	3	1	16
<b>Jumlah/Total</b>		18	103	7	13	3	1	142

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan dan pendidikan dengan status pegawai tetap selengkapnya dapat dilihat di bawah ini :

The composition of employees by position and education can be seen in the table below:

### Komposisi Latar Belakang Pendidikan Pegawai

### Composition of Employees by Educational Background

No.	Jabatan/Position	Pendidikan/Education						Jumlah/Total
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1.	Kepala Divisi/Division Head	4	6	-	-	-	-	10
2.	Kepala Bagian/Department Head	4	18	-	-	-	-	22
3.	Kepala seksi/Assistant Manager	6	41	3	-	-	-	50
4.	Pegawai Pelaksana/Officer	1	37	4	2	-	-	44
5.	Pegawai Dasar/Clerk	-	1	-	11	3	1	16
<b>Jumlah / Total</b>		15	103	7	13	3	1	142

### Komposisi Tenaga Ahli

### The Composition of Experts

Sampai dengan bulan Desember 2014, perusahaan memiliki 53 orang pegawai (tidak termasuk Direksi) yang menyandang 11 gelar baik ajun ahli maupun ahli asuransi yaitu :

As of Desember 2014, the Company had 53 employees (excluding Directors) of which have 11 professional titles, both adjunct experts and insurance experts, namely:

ANZIF (Fellow)	Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance	1
ACII	Associate of the Chartered Insurance Institute	4
AAIK	Ahli Asuransi Indonesia - Kerugian	4
AAIJ	Ahli Asuransi Indonesia - Jiwa	1
AAAIAK	Ajun Ahli Asuransi Indonesia - Kerugian	11
AAAIAJ	Ajun Ahli Asuransi Indonesia - Jiwa	11
FSAI	Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia	1
AMII	Associate of the Malaysian Insurance Institute	8
FIIS	Fellow of Islamic Insurance Society	2
AIIS	Associate of Islamic Insurance Society	8
IPGDI	International Post Graduate Diploma in Insurance	2
<b>Total</b>		53

## Dampak Keuangan Pengelolaan SDM

Jumlah dana yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk kegiatan pengembangan kompetensi karyawan di tahun 2014 sebesar Rp4,4 Miliar, sementara itu jumlah total dana yang digunakan untuk pengelolaan SDM, termasuk gaji, bonus dan lain sebagainya mencapai sebesar ± Rp67,6 Miliar.

Untuk produktifitas perusahaan, khususnya dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat dijabarkan sebagai berikut:

	Tahun 2013	Tahun 2014
Laba Bersih Perusahaan (Rp)/Net Profit Company	72.576.761.160,00	131.085.912.282,00
Jumlah Karyawan (orang)/Total of Employees	134	142
Rasio Produktivitas (Rp/Productivity ratio)	541.617.620,60	923.140.227,34

## Pengelolaan Teknologi Informasi (IT)

### Kebijakan Pengembangan IT

Sebagai infrastruktur strategis, Perusahaan menempatkan fokus tersendiri terhadap pengembangan aspek Teknologi Informasi. Upaya pengembangan yang dilakukan berfokus pada dukungan sistem Teknologi Informasi yang dapat menghadirkan proses bisnis serta layanan yang cepat, akurat dan efisien serta mendorong inovasi-inovasi secara berkelanjutan.

Dukungan Teknologi Informasi tersebut diterapkan baik untuk menghasilkan produk baru maupun mengoptimalkan proyek yang telah berjalan sehingga dapat memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi para pelanggan dan *stakeholders*. Karena itu, Perusahaan menyusun desain serta pengelolaan teknologi informasi secara terintegrasi meliputi:

1. **Availability** yaitu ketersediaan layanan infrastruktur TI yang terbebas dari gangguan;
2. **Scalability** yaitu kemampuan untuk menampung peningkatan beban kerja layanan TI;
3. **Security** yaitu pengamanan integritas data dari ancaman pencurian, pengubahan dan penghapusan, baik yang dilakukan melalui jaringan, maupun akses langsung ke fasilitas fisik TI;
4. **Serviceability** yaitu kemudahan untuk melakukan pemeliharaan termasuk perbaikan dari kerusakan; dan
5. **Manageability** yaitu kemudahan dalam pengelolaan, termasuk administrasi dan pengoperasiannya.

## Financial Impact or Costs Incurred From HR Management

Total funds spent by the Company for employee competency development activities amounted to Rp4,4 billion, while the total amount of funds used for the management of human resources, including salary, bonuses, etc. totaled ± Rp67,6 Billion.

The Company's productivity, particularly in the 2 (two) last year, are as follows:

## Management Of Information Technology (IT)

### IT Development Policy

As a strategic infrastructure, the Company need to pay special attention on the development of Information Technology. The development efforts are focused on the support of Information Technology system that provides a fast, accurate and efficient business processes and services and to encourage innovation in a sustainable manner.

IT support is used during the creation of new products or when optimizing the existing project so as to provide satisfaction and added value for customers and stakeholders. Therefore, the Company has prepared the design and management of information technology in an integrated manner that includes:

1. **Availability**, which is the availability of IT infrastructure services free from interference;
2. **Scalability**, or the ability to accommodate the increased workload of IT services;
3. **Security**, safeguarding the integrity of the data from the threat of theft, alteration and deletion, whether done through the network, as well as direct access to physical IT facilities;
4. **Serviceability**, the ease to perform maintenance including repair of the damage; and
5. **Manageability**, or the ease in managing, including the administration and operation.

### Pengembangan SDM Bidang IT

Selain mengembangkan program dan aplikasi, serta melakukan *upgrading* peralatan infrastruktur TI secara berkala sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi, Perusahaan juga melaksanakan program pengembangan SDM bidang IT, yakni melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme karyawan Divisi IT. Peningkatan kompetensi SDM ini dilakukan melalui pemberian berbagai training yang relevan termasuk pendidikan aplikasi, program sertifikasi keahlian, manajemen risiko di bidang IT, hingga tahap programmer bagi pengembangan fitur-fitur aplikasi.

### Satuan Kerja Teknologi Informasi

Satuan kerja teknologi informasi berada pada Divisi Sistem Informasi & Manajemen Risiko (SIMR) yang terdiri dari 15 (Lima Belas) orang dengan komposisi pendidikan S1 sebanyak 14 (Empat Belas) orang serta D3 sebanyak 1 (satu) orang.

### Road Map Pengembangan Teknologi Informasi

#### a. Roadmap Sistem Informasi

Secara ringkas, *roadmap* implementasi arsitektur sistem informasi yang dipetakan berdasarkan tema pada masing-masing fase dijelaskan pada gambar berikut:



Keberhasilan suatu kegiatan sangat ditentukan oleh strategi yang dipakai untuk merealisasi atau mengimplementasikannya. Strategi ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain tingkat urgensi kegiatan, kesiapan organisasi, ketersediaan sumber daya dan ketersediaan sumber dana serta pertimbangan lainnya yang relevan. Atas dasar tersebut disusun strategi implementasi program kerja untuk NASIONAL RE.

### Strategi Implementasi TI berdasarkan Fase

Strategi implementasi dikelompokkan menjadi beberapa tahap yang akan dikerjakan dalam kurun waktu lima tahun yang terdiri dari Tahap *Comparative*, Tahap *Competitive* dan Tahap *Expansive*. Penjelasan strategi pengembangan teknologi informasi di NASIONAL RE adalah sebagai berikut:

### HR Development for IT Sector

In addition to developing programs and applications, as well as upgrading its IT infrastructure equipment on a regular basis, according to the needs and technological developments, the Company also implement development programs for human resources in IT sector, namely by improving the competence and professionalism of the employees of the IT Division. The development of HR competencies is conducted through the provision of various relevant training programs, including applications training, skills certification program, IT risk management and programmer for the development of application features.

### Information Technology Unit

Information Technology unit is part of the Division of Information Systems and Risk Management (SIMR) consisting of 15 persons, with the composition of 14 graduates and 1 Undergraduate.

### Road Map for Development of Information Technology

#### a. Information Systems Roadmap

In summary, the roadmap of architecture implementation information systems that is mapped based on the theme of each phase are described in the following image:

The success of an activity is determined by the strategies employed to realize them. This strategy is influenced by several factors such as the level of urgency of activities, organizational readiness, availability of resources and the availability of funding sources and other relevant considerations. On this basis, the Company prepared a strategy for the implementation of the work program of the NASIONAL RE.

### Phase-based IT Implementation Strategy

Implementation strategies are grouped into several stages that will be done within a period of five years which consists of Comparative Phase, Phase Competitive and Phase Expansive. Explanation of information technology development strategy in the NASIONAL RE is as follows



	Fase I Comparative	Fase II Competitive	Fase III Expansive
Tujuan/ Purpose	Mempertahankan operasional yang telah berjalan dengan baik, mempersiapkan segala kebutuhan IT yang dibutuhkan oleh NASIONAL RE untuk menjalankan dan meningkatkan operasinya secara baik. Periode ini diisi dengan program identifikasi kebutuhan ICT yang telah dipenuhi dan yang belum dipenuhi, perencanaan IT untuk meningkatkan kemampuan operasional NASIONAL RE dan pengembangan aplikasi IT untuk memenuhi kebutuhan <i>Core Business</i> NASIONAL RE / <i>Maintain a well-running operation, prepare all IT needs required by NASIONAL RE to better run and improve its operations. Activity in this period is to identify the needs of ICT, which have been met and which have not, IT planning to improve NASIONAL RE operational capability and the development of IT applications to meet the needs of the NASIONAL RE Core Business.</i>	Mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan ICT untuk memenangkan kompetisi pada bisnis Re-asuransi di Indonesia. Pada periode ini aplikasi ICT yang dimiliki harus telah sama atau lebih baik dari yang dimiliki oleh kompetitor. Aplikasi ICT yang dimiliki harus dikembangkan untuk mendukung tercapainya <i>competitive advantage</i> oleh NASIONAL RE melalui kegiatan Inovasi, pertumbuhan, <i>Cost leadership, Differentiation dan Alliance</i> yang mungkin dilakukan / <i>Prepare everything ICT needs to win the competition on Reinsurance businesses in Indonesia. During this period, the application of ICT must be equal or even better than those of competitors. The Company's ICT applications must be developed to support the competitive advantages by NASIONAL RE through innovation, growth, Cost Leadership, Differentiation and Alliances.</i>	Periode persiapan ke tingkat Expansive, yang bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan ICT untuk mendukung ekspansi organisasi, melaksanakan pengembangan aplikasi IT untuk mendukung ekspansi NASIONAL RE ke wilayah regional. Program kerja yang dilaksanakan harus berisi kebijakan dan aplikasi yang mendukung tujuan diatas, diantaranya menerapkan prinsip dan fungsionalitas yang sesuai dengan <i>industry best practices</i> di bidang Reasuransi dan menerapkan <i>good IT governance</i> / <i>Preparation period towards expansive level, aiming to prepare the ICT needs to support the expansion of the organization, carrying out development of IT applications to support the NASIONAL RE expansion into regional areas. The work program carried out must contain applications that support the policies and objectives, including applying the principles and functionality in accordance with industry's best practices in the field of reinsurance and implementing good IT governance</i>
Sasaran/ Target	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan saat ini yang bersifat mendesak untuk mempertahankan kinerja organisasi.</li> <li>2. Terlaksananya inventarisasi dan pemetaan kondisi operasional sistem saat ini</li> <li>3. Meningkatkan level tata kelola teknologi informasi /</li> </ol> <p>1. Meeting current and urgent needs to maintain organizational performance. 2. Implementation of inventory and mapping current system operating conditions. 3. Increase the level of information technology governance.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertahankan kinerja organisasi dan menjadi perusahaan reasuransi terdepan di Indonesia.</li> <li>2. Memiliki <i>core system</i> yang sudah standar dan dijadikan referensi bagi perusahaan reasuransi lainnya</li> <li>3. Terlaksananya penyiapan kebutuhan SDM dan infrastruktur untuk operasional unit bisnis</li> <li>4. Menciptakan inovasi – inovasi disisi teknologi informasi untuk meng-otomatisasi proses bisnis /</li> </ol> <p>1. Maintain the performance of the organization and become the leading reinsurance company in Indonesia. 2. Installing core system that has been the standard and used as a reference for other reinsurance companies. 3. Prepare human resources and infrastructure needs for business units operational. 4. Create innovation in terms of information technology to automate business processes</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NASIONAL RE dapat bersaing di wilayah regional dengan dukungan teknologi informasi</li> <li>2. Memenuhi dan melengkapi kebijakan tata kelola TI sesuai dengan <i>standard best practice</i></li> <li>3. Menyiapkan layanan yang <i>excellence</i> untuk meningkatkan kepuasan klien</li> <li>4. Integrasi sistem dalam level yang lebih luas dengan induk perusahaan (ASKRINDO) untuk memenuhi kebutuhan bisnis/</li> </ol> <p>1. NASIONAL RE to compete regionally with the support of information technology 2. Meet and complete IT governance policies in accordance with the standards of best practices. 3. Set up service excellence to enhance client satisfaction 4. Integrate system into a broader level with those of the parent company (ASKRINDO) to meet business needs</p>

Program Sistem Informasi/ Information System Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Penyempurnaan dan pengembangan proses bisnis dan Sistem Aplikasi Seluruh unit bisnis</li> <li>– Pemuktahiran <i>Business Continuity Management</i></li> <li>– Integrasi Database/</li> <li>– Improvement and development of business processes and System Applications of all business units</li> <li>– Updating of Business Continuity Management</li> <li>– Integration of Database</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pembangunan Aplikasi R/I Slip <i>Facultative dan Treaty</i></li> <li>– Peningkatan kemampuan Entry Data</li> <li>– Standarisasi prosedur dan format penawaran Cedant</li> <li>– Pengembangan <i>Document Management System</i></li> <li>– Percepatan penyelesaian klaim melalui pemanfaatan ICT/- Development of Application R/I Slip for facultative and Treaty</li> <li>– Increased the capability of Data Entry</li> <li>– Standardization of procedures and offering formats for cedant</li> <li>– Development of Management System Document</li> <li>– Acceleration of the settlement of claims through the use of ICT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengembangan <i>DECISION SUPPORT SYSTEM</i> untuk unit Bisnis</li> <li>– Pembangunan Portal Nasional Re Berbasis Web</li> <li>– Implementasi DWS (<i>Data Ware House</i>) Nasionalre dengan Askrindo</li> <li>– Studi banding/<i>Benchmarking/- Development DECISION SUPPORT SYSTEM</i> for Business unit</li> <li>– Development of Web-Based Portal for NASIONAL RE</li> <li>– Implementation of DWS (<i>Data Ware House</i>) for NASIONAL RE and Askrindo</li> <li>– Comparative studies / Benchmarking</li> </ul>
Program Teknologi Informasi/ Information Technology Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengembangan Corporate Email untuk seluruh unit Bisnis</li> <li>– Pengembangan keamanan infrastruktur (<i>ICT Security</i>)</li> <li>– Kajian ICT terkait spin-off Divisi Reasuransi Syariah/</li> <li>– Development of Corporate Email for all business units</li> <li>– Development of infrastructure security (<i>ICT Security</i>)</li> <li>– Study of ICT in relation to the spin-off of Sharia Reinsurance Division</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Standarisasi Kodefikasi.</li> <li>– Singkronisasi Sistem IT Perusahaan dengan Mitra kerja</li> <li>– Program Digitalisasi Dokumen</li> <li>– Kebijakan Arsitektur Informasi</li> <li>– Standardization of encoding.</li> <li>– Synchronize the IT Systems of the Company with Partners</li> <li>– Document Digitisation Programme</li> <li>– Information Architecture Policy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Penggabungan Data Center dibawah ASKRINDO/</li> <li>– Merging of Data Center under ASKRINDO</li> </ul>

Masing-masing program pada setiap fase mencerminkan sasaran Divisi SIMR dalam rangka meningkatkan optimalisasi dukungan TI terhadap sasaran bisnis. Fase pertama, yaitu program peningkatan nilai tambah data dan informasi memiliki beberapa tujuan teknis, diantaranya memanfaatkan data yang belum termanfaatkan secara optimal, meningkatkan utilisasi data dan mengolah data mentah yang tersedia untuk dapat dijadikan informasi atau *knowledge* yang lebih bernilai untuk kebutuhan bisnis.

### b. Roadmap Teknologi Informasi

Roadmap teknologi informasi sebagian besar mencakup kegiatan pengadaan. Kegiatan pengadaan ini disesuaikan dengan *roadmap* sistem informasi yang telah diuraikan di atas. Kegiatan pengadaan dan *upgrade* ini dapat dilihat pada Gambar *Roadmap* Teknologi Informasi diatas sebelumnya.

Kegiatan pemeliharaan kabel merupakan kegiatan yang tidak terkait langsung dengan *roadmap* sistem informasi sehingga tidak terlihat pada gambar. Kegiatan pemeliharaan kabel seyogyanya merupakan kegiatan rutin yang berkelanjutan.

Dari gambar di atas terlihat bahwa kegiatan pengadaan telah dapat diselesaikan pada fase kedua. Kegiatan yang terkait pemeliharaan tentunya dilakukan pada semua fase.

Each program in each phase reflects SIMR Division goals in order to improve the optimization of IT support towards business objectives. The first phase is the program to increase value-added data and information, with some technical purposes, including using data that has not been utilized optimally, improve the utilization of data and process the available raw data to become more valuable information or knowledge for the business needs.

### b. Information Technology Roadmap

Information technology roadmap is mostly about procurement activities. This procurement activity is tailored to the roadmap information system described above. This procurement activities and upgrades can be seen in the previous Image of Information Technology Roadmap.

Cable maintenance activities are activities that are not directly related to information systems roadmap so it is not presented in the image. Cable maintenance activities should be an ongoing routine activity.

As seen in the image above, procurement has been completed in the second phase. Maintenance related activities must be done on all phases.

## Manajemen IT

Dalam rangka mendukung program-program kerja yang terkait dengan pengembangan arsitektur sistem maupun teknologi informasi, dibutuhkan organisasi IT yang ideal sesuai dengan acuan *best practice* pengelolaan IT.

Tahap awal dari membenahan manajemen dan tata kelola IT adalah dengan merancang kebijakan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pengembangan maupun pengelolaan terhadap seluruh proses dalam daur hidup IT. Kebijakan ini selayaknya juga menaungi seluruh aspek IT, mulai dari manajemen informasi, aplikasi, infrastruktur pendukung, hingga manajemen organisasi IT itu sendiri. Sehingga diharapkan segala kegiatan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan IT yang tentunya melibatkan unit kerja lain memiliki suatu acuan induk atau pedoman yang disepakati dan dipatuhi bersama.

Beberapa standar atau *best practice* dapat diadopsi untuk perancangan *IT Policy* ini, diantaranya COBIT 4.1 dan *IT Infrastructure Library* untuk Manajemen proses khusus pada infrastruktur. Tahap berikutnya setelah disahkannya *IT Policy* NASIONAL RE-*Wide* ini adalah perancangan kebijakan keamanan informasi yang konsepnya disarikan dari *IT Policy* dan merujuk kepada standar keamanan informasi sesuai *best practice*, semisal ISO/IEC 27001 tentang sistem Manajemen keamanan informasi.

Pembenahan proses dalam pengelolaan IT dapat pula diturunkan dari *IT Policy* yang telah didefinisikan. Beberapa proses yang perlu ditingkatkan maturitasnya melalui pembakuan prosedur antara lain adalah identifikasi solusi bagi otomasi proses bisnis dan prosedur sosialisasi beserta mekanisme relasional antara IT dan Bisnis.

Kegiatan penyesuaian fungsi organisasi terhadap kebutuhan arsitektur sistem /teknologi informasi dapat dilaksanakan secara fleksibel. Fungsi-fungsi yang ada dapat menempel ke masing-masing personil yang telah ada di dalam struktur organisasi melalui pemberian kegiatan pelatihan atau penambahan kompetensi apabila penambahan jumlah personil tidak memungkinkan untuk dilakukan.

## IT Management

In support of the work programs related to the development of the system architecture and information technology, an ideal IT organizations is needed, with refers to the best practices of IT management.

The early stages of revamping Management and IT governance are to prepare policy as its legal umbrella for the development and management of the entire process in the life cycle of IT. This policy should also overshadow all aspects of IT, ranging from information Management, applications, infrastructure support, to IT Management organization itself. It is expected all the activities for IT development and management that would involve other unit has a parent reference or guidelines agreed upon and adhered together.

Some standards or best practices can be adopted to design the IT Policy, including COBIT 4.1 and the IT Infrastructure Library for special process Management on the infrastructure. The next stage, following the ratification of NASIONAL RE – Wide IT Policy is designing the concept of information security policy, based on the IT Policy and refer to the best practices of security standards of information, such as ISO/IEC 27001 on Information Security Management systems.

Revamping the processes in IT management can also be based on the defined IT Policy. Some processes, which maturities need to be improved through standardization of procedures, includes identifying solutions for business process automation and socialization procedures, as well as relational mechanism between IT and the business.

The alignment of functions of organization and the system architecture/technology information is brought about in a flexible manner. Existing functions can be attached to each of existing personnel in the organizational structure through provision of additional training or competence, in the event that additional personnel is not possible.

### Program Pengembangan Aplikasi Utama

Sebagai salah satu perusahaan reasuransi, yang mempunyai misi memberikan kapasitas reasuransi maka NASIONAL RE berperan serta dalam menyediakan kapasitas reasuransi Umum dan Jiwa baik jenis Konvensional maupun Syariah.

Untuk keperluan itulah perusahaan memiliki modul-modul penting (*Core Business*) sebagai berikut:

1. Modul Aplikasi Reasuransi Umum Syariah;
2. Modul Aplikasi Reasuransi Jiwa Syariah;
3. Modul Aplikasi Reasuransi Umum Konvensional;
4. Modul Aplikasi Reasuransi Jiwa Konvensional;
5. Modul Sumber Daya Manusia (SDM);
6. Modul Akuntansi & Keuangan Akuntansi.

Disamping program *core business*, NASIONAL RE memiliki modul-modul aplikasi pendukung seperti;

1. *Front Office*
2. *Help Desk*
3. *Treaty Decision Support System*
4. *Facultative Accumulation Control*
5. Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Risiko
6. *Ceding Performance*
7. *KPI Management*
8. *Knowledge Management System*

### Infrastruktur Teknologi Informasi

Untuk mendukung berjalan baiknya operasional perusahaan, berbagai upaya telah diusahakan, termasuk melengkapi peralatan dan infrastruktur terkait Teknologi Informasi secara memadai. Infrastruktur ini meliputi:

1. Perangkat Keras;
2. Perangkat Lunak;
3. Jaringan Komunikasi Data;
4. serta Keamanan Data.

Berikut ini adalah bagan infrastruktur teknologi informasi NASIONAL RE.

### Main Application Development Program

As one of the reinsurance companies which has the mission of providing reinsurance capacity, thus NASIONAL RE takes part in providing reinsurance capacity of both types of General and Life of both Conventional and Sharia.

For that purpose, the Company has following important modules for core business:

1. Sharia General Reinsurance Application Module
2. Sharia Life Reinsurance Application Module
3. Conventional General Reinsurance Application Module
4. Conventional Life Reinsurance Application Module
5. Human Resource (HR) Module
6. Accounting & Finance Module.

In addition to its core business program, NASIONAL RE also has supporting applications modules such as;

1. Front Office
2. Help Desk
3. Treaty Decision Support System
4. facultative Accumulation Control
5. Development Planning and Risk Management
6. Ceding Performance
7. KPI Management
8. Knowledge Management System.

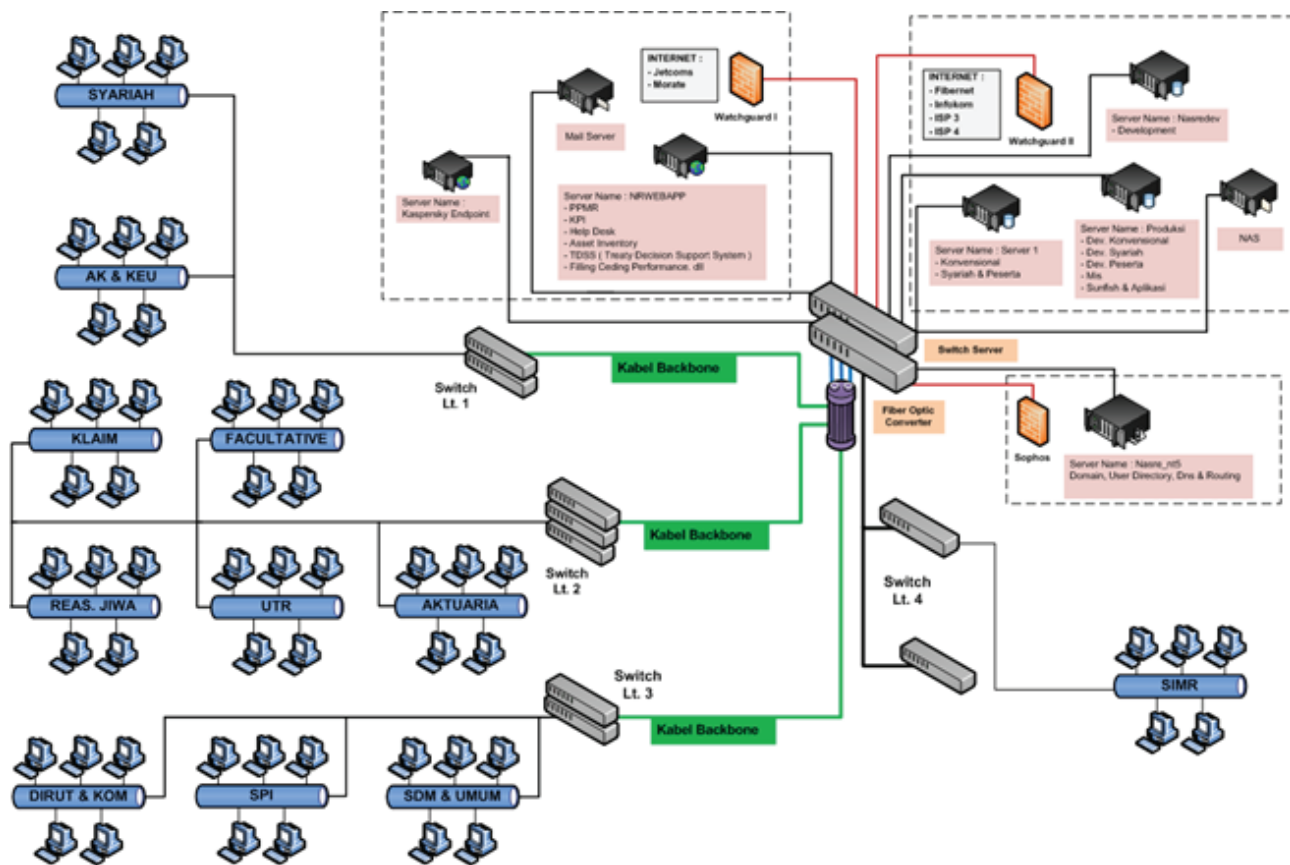
### Information Technology Infrastructure

To support the Company's operations, various efforts have been made, including adequately completing the equipment and infrastructure of information technology. This infrastructure includes:

1. Hardware;
2. Software;
3. Data Communication Networks; and
4. Data Security.

Following is the chart of the Company's information technology infrastructure.





Gambar Topologi Teknologi Informasi NASIONAL RE 2015

### Tata Kelola IT

Tata Kelola IT berorientasi pada pelaksanaan proses kerja dan bukan pada hasil proses kerja, sehingga menuntut adanya pengelolaan dan pelaksanaan proses kerja yang lengkap dan terintegrasi. Tingkat kematangan dalam Tata Kelola IT yang semakin tinggi akan tercermin pada pengelolaan IT yang berorientasi pada upaya Preventif dan Proaktif, Risiko IT yang terkendali dan menghindari terjadinya masalah yang sama berulang kali serta dapat memberikan jaminan mutu yang lebih konsisten dalam jangka panjang.

Terdapat empat proses dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola IT sebagai berikut:

- A. Proses Kerja Pengelolaan Tingkat Layanan  
PT Reasuransi Nasional Indonesia dalam menjalankan proses kerja pengelolaan tingkat layanan yang sistematis dan terintegrasi masih melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan agar dapat mendorong terjadinya tingkat layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna

### IT Governance

The IT Governance is a process-oriented rather than result oriented, thus demands a complete and integrated management and execution. A higher level of maturity of IT Governance will be reflected in an IT management that is oriented towards Preventive and Proactive efforts, under controlled IT Risk and preventing same problems from recurring and is able to deliver a more consistent quality assurance in the long run.

There are four processes in the implementation of IT Governance as follows:

- A. Level of Service Management Working Process  
In carrying out a systematic and integrated Level of Service Management Working Process. PT Reasuransi Nasional Indonesia is still conducting ongoing improvement in order to promote the level of service that can suit the users demand at all levels. It is intended to make the

pada semua tingkat layanan. Hal ini dimaksudkan supaya pengukuran tingkat layanan yang diberikan kepada pengguna dapat dilakukan lebih lengkap dan akurat.

- B. Proses Kerja Pengembangan Solusi Berbasis IT  
 Dalam pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Solusi Berbasis IT dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengujian *System Test*, *User Acceptance Test* dan pendekatan *IT Project Management* secara formal, lengkap dan sistematis.
  
- C. Proses Kerja Pengelolaan *Help Desk*  
 User selaku pengguna layanan IT membuat *request* berkaitan dengan layanan IT yang diinginkan untuk membantu memperlancar proses kerjanya dan mengirimnya ke *Help Desk*. Atas dasar *request* tersebut *Help Desk* mendistribusikan kepada *System Architect IT*, *DBA*, atau *System Development* maupun *Help Desk* memonitor penyelesaian pekerjaan tersebut sampai diterima dan sesuai dengan keinginan *user*. Dengan diterapkannya sistem pelayanan melalui satu pintu secara sistematis dan terintegrasi oleh *Help Desk* tersebut, diharapkan pelayanan kepada *user* akan membuat semua permintaan pelayanan akan tercatat dengan baik dan penyelesaian pekerjaan akan termonitor dengan baik. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan semua permintaan layanan akan diselesaikan secara lengkap dan terukur serta sudah diselesaikan dengan tepat waktu.
  
- D. Proses Kerja Pengelolaan Konfigurasi IT  
 PT Reasuransi Nasional Indonesia dalam melakukan pengelolaan konfigurasi Teknologi Informasi dengan membuat dokumentasi terhadap Aplikasi Bisnis, *Data Base*, Sistem Operasi, Versi *software*, Versi *hardware* dan Infrastruktur

measurement on the level of service provided to the user can be conducted more completely and accurate.

- B. IT-Based Solutions Development Working Process  
 In the development and refinement of IT Based Solutions application is done by using the testing mechanism of *System Test*, *User Acceptance Test* and *IT Project Management* approach in a formal, complete and systematic way.
  
- C. Help Desk Management Working Process  
 User of IT service makes a request related to the desired IT services to help expedite the work process and send it to the *Help Desk*. Based on the request, the *Help Desk* staff distributes the task to the *IT System Architect*, *DBA*, or the *System Development* and *Help Desk* staff to supervise the completion of the work until accepted and in accordance with users request. With the implementation of one-stop-service system in a systematic and integrated management by the *Help Desk*, all users requests for will be recorded and the completion of the work will be monitored. This policy is implemented to ensure that all requests will be completed in full, scalable and timely mannered.
  
- D. IT Configuration Management Working Process  
 To manage the configuration of IT, PT Indonesian NASIONAL REinsurance creates documentation of *Business Applications*, *Database*, *Operating System*, software version, hardware version and Infrastructure

## TINJAUAN KEUANGAN

PT Reasuransi Nasional Indonesia menyajikan uraian analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan di Indonesia, kecuali dinyatakan lain. Seluruh materi uraian ini berdasarkan pada Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan (SMR) sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 001/I/SMR/LAI-NASRE/2015 dengan pendapat bahwa laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

### KINERJA 2014

Tahun 2014, PT Reasuransi Nasional Indonesia telah berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang mengesankan. Sebagaimana yang terlihat pada pertumbuhan total aset perusahaan yang meningkat signifikan sebesar 70,12% dari Rp1.722.563 juta pada tahun 2013 menjadi Rp2.930.469 juta pada tahun 2014. Laba sebelum pajak juga meningkat sebesar 84,3% dari Rp81.265 juta pada tahun 2013 menjadi Rp149.775 juta pada tahun 2014.

### PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha perusahaan sampai dengan akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp1.583.711 juta atau mengalami peningkatan sebesar 40,52% jika dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan usaha tersebut adalah sebesar 98,66% dari yang ditargetkan.

## FINANCIAL REVIEW

PT Reasuransi Nasional Indonesia presents an analysis and discussion of the financial performance, in accordance with the rules set out in the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) Indonesia and Accounting and Reporting Guidelines in Indonesia, unless otherwise stated. This review is based on the Consolidated Audited Financial Statements of the Company which have been audited by Public Accounting Firm Soejatna, Mulyana & Partners (SMR), in accordance with the Independent Auditor's Report No. 001/I/SMR/LAINASRE/2015, with the opinion that the Company's consolidated financial statements are presented fairly, in all material respects.

### PERFORMANCE 2014

In 2014, PT Reasuransi Nasional Indonesia has recorded an impressive growth performance. As can be seen in the growth of total assets of the company, a significant increase of 70.12% from Rp1,722,563 million in 2013 to Rp2,930,469 million in 2014. Profit before tax increased by 84.3% from Rp81,265 million in 2013 to Rp149,775 million in 2014.

### OPERATING REVENUES

The Company's revenue, as of the end of 2014 amounted to Rp1,583,711 million or an increase of 40.52% when compared to the previous year's revenue. Realized revenues amounted to 98.66% of the target.

**Tabel Pendapatan Usaha/Operating Revenues Table**

No	Keterangan/Description	Realisasi Realization 2012 (1)	Realisasi Realization 2013 (2)	Realisasi Realization 2014 (3)	Target 2014 Target (4)	% Pertumbuhan Growth (2:1)	% Pertumbuhan Growth (3:2)	% Pencapaian Target Achievement of target (3:4)
1	Premi Bruto/Gross Premium	954,418	1,296,536	2,095,931	1.902.000	35.85%	38,14	161,66%
2	Premi Retrosesi /Retrocession Premium	(66,805)	(83,085)	(242,487)	(133.491)	24.37%	65,73	291,85
3	Penurunan (kenaikan) Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan/ Increase (Decrease) in Unearned Premiums	(55,980)	(167,189)	(380,567)	(273.457)	198.66%	104,25	227,63
4	Jumlah Pendapatan Premi/Total Premium Income	831,632	1,046,262	1,472,876	1.495.052	25.81%	28,96	198,77%
5	Pendapatan Ujrah/Ujrah Income	18,669	23,929	21,644	23.570	28.18%	-10,56	90,45%
6	Alokasi Surplus Dana Tabarru/Tabarru Fund Surplus Allocation	684	2,355	1,170	7.616	244.09%	-101,28	49,7%
7	Hasil Investasi/Investment Return	45,042	54,475	88.022	78.902	20.94%	38,11	161,58%
8	Jumlah Pendapatan Usaha/Total Operation Revenue	896,027	1,127,021	1.583.712	1.605.140	25.78%	40,52%	98,66%

## NERACA

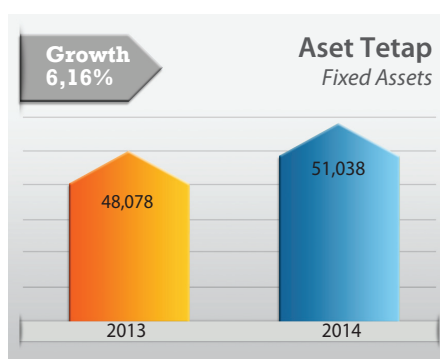
### Aset Tetap

Aset tetap perusahaan selama tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 6,16% dari semula sebesar Rp48.078 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp51.038 juta pada akhir tahun 2014. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan adanya penambahan aset tetap berupa bangunan sebesar Rp3.402 juta, penambahan kendaraan sebesar Rp32 juta, penambahan komputer sebesar Rp1.532 juta, penambahan software sebesar Rp128 juta, serta penambahan perabot kantor sebesar Rp212 juta. Seluruh aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp45.580 juta untuk tahun 2014 dan 2013. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

## BALANCE SHEET

### Fixed Assets

The Company's fixed assets in 2014 grew 6.16% from Rp48,078 million in 2013 to Rp51,038 million by the end of 2014. This increased was primarily due to the addition of fixed assets such as buildings of Rp3,402 million, vehicles of Rp32 million, computer of Rp1,532 million, software of Rp128 million and office furniture of Rp212 million. All of the fixed assets are insured against fire, theft and other risks with a total coverage of Rp45,580 million in 2014 and 2013. The management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

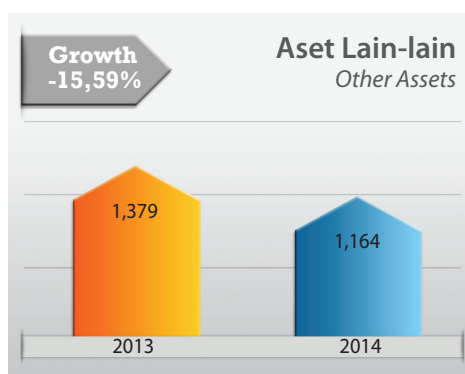


### Aset Lain-Lain

Aset lain-lain perusahaan yang terbagi pada Kontrak Pengelolaan Dana [KPD], Corporate Member Rancamaya, Corporate Member Bogor Raya, Corporate Member Gunung Geulis, Corporate member Emerald, serta lainnya. Untuk aset lain-lain atas KPD telah dilakukan pembentukan cadangan penyisihan seluruhnya sebesar Rp27.000 juta. Jumlah net aset lain-lain perusahaan sampai dengan akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp1.164 juta atau mengalami penurunan sebesar 15,59% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp1.379 juta.

### Other Assets

The Company's other assets are divided on Contract of Management Fund [KPD], Corporate Members Rancamaya, Corporate Members Bogor Raya, Corporate Member Gunung Geulis, Corporate Member Emerald, as well as others. For other assets over the KPD has made establishment of full allowance reserve totaling of Rp27,000 million. The total net of other assets of the Company until the end of 2014 stood at Rp1,164 million or down by 15,59% compared to 2013 of Rp1,379 million.





## LIABILITAS

Sampai dengan akhir tahun 2014, jumlah liabilitas tercatat sebesar Rp2.141.458 juta atau mengalami peningkatan sebesar 62,38% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp1.318.798 juta. Peningkatan liabilitas perusahaan selama tahun 2014 terutama ditopang oleh peningkatan estimasi klaim retensi sendiri yang secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp368.064 juta serta premi yang belum merupakan pendapatan sebesar Rp407.705 juta terhadap tahun 2013. Secara rinci komponen liabilitas sebagaimana tabel di bawah ini.

Keterangan/Description	2013	2014	% Growth
Utang Klaim Reasuransi/Reinsurance Claims Payable	25,943	49.092	89,23
Utang Premi Retrosesi/Retrocession Premiums Payable	7,301	28.659	292,54
Estimasi Klaim Retensi Sendiri/Estimated Own Retention Claims	746,753	1.114.817	49,29
Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan/Unearned Premium	507,710	915.415	80,30
Kontribusi Diterima Dimuka/Contribution Received in Advance	991	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar/Accrued Expenses	13,164	18.372	39,56
Utang Pajak dan Zakat/Tax and Zakat Payable	11,467	8.617	-20,96
Liabilitas Imbalan Packa Kerja/Post-Employment Benefit Liability	2.663	4.140	55,46
Kewajiban Pajak Tangguhan/Deferred Tax	--	21	-
Utang Lain-lain/Others Payable	2,805	2.324	17,15
Jumlah Liabilias/Total Liabilities	1,318,798	2.141.458	62,38

## Utang Klaim Reasuransi

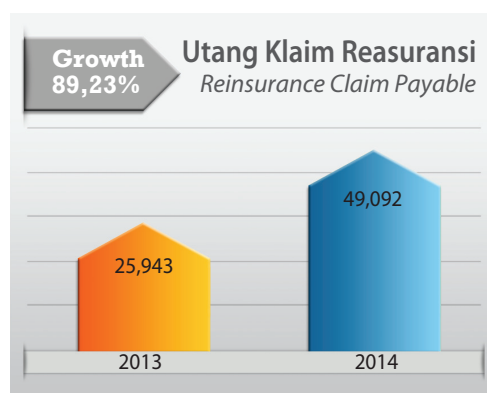
Utang klaim asuransi terbagi atas utang klaim asuransi umum konvensional dan syariah dan utang klaim asuransi jiwa konvensional dan syariah. Secara total, utang klaim asuransi perusahaan pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp49.092 juta atau mengalami peningkatan sebesar 89,23% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp25.943 juta. Peningkatan utang klaim reasuransi terutama disebabkan oleh peningkatan klaim reasuransi umum dan jiwa konvensional dengan peningkatan sebesar 116,23 % dari semula sebesar Rp21.212 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp45.866 juta pada akhir tahun 2014.

## LIABILITIES

As of the end of 2014, the total liabilities stood at Rp2,141,458 million or an increase of 62,38% compared to 2013 amounted to Rp1,318,798 million. This increased liability was mainly supported by the increase in estimated own retention claims which nominally increased by Rp368,064 million and unearned premiums for the year 2013 of Rp407,705 million. The liability component in detailed as described in the table below.

## Reinsurance Claims Payable

The reinsurance claims Payable consists of conventional and sharia general insurance claims payable and conventional and sharia life insurance claims payable. In total, the Company's reinsurance claims payable at the end of 2014 stood at Rp49,092 million or an increase of 89,23% compared to 2013, amounted to Rp25,943 juta million. This increased was primarily due to an increase in conventional general and life reinsurance claims, which grew 116.23% from Rp21,212 million in 2013 to Rp45,866 by the end of 2014.

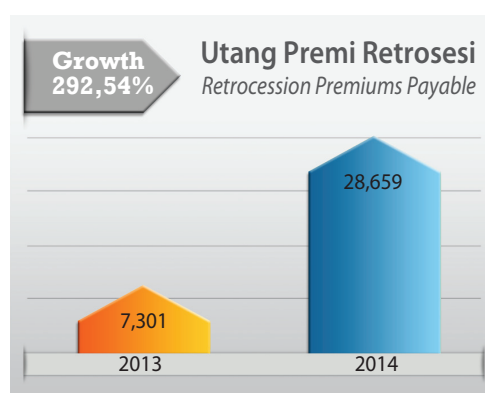


### Utang Premi Retrosesi

Sebagaimana jenis utang klaim asuransi, utang premi retrosesi juga terbagi atas utang premi retrosesi umum konvensional dan syariah dan utang premi retrosesi jiwa konvensional dan syariah. Secara total, utang premi retrosesi perusahaan pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp28.659 juta atau mengalami peningkatan sebesar 292,54% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp7.301 juta. Peningkatan utang premi retrosesi terutama disebabkan oleh peningkatan premi retrosesi umum dan jiwa konvensional dengan peningkatan sebesar 191,85% dari semula sebesar Rp83.085 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp242.487 juta pada akhir tahun 2014.

### Retrocession Premiums Payable

As in the type of insurance claims payable, retrocession premiums payable is also divided into conventional and sharia general retrocession premiums payable and conventional and sharia life retrocession premiums payable. In total, the Company's retrocession premiums payable at the end of 2014 stood at Rp28,659 million or an increase of 292,54% compared to 2013, amounting to Rp7,301 million. The increased in retrocession premiums payable was primarily due to an increase in conventional general and life retrocession premiums, grew by 191,85% from Rp83,085 million in 2013 to Rp242,487 million at the end of 2014.

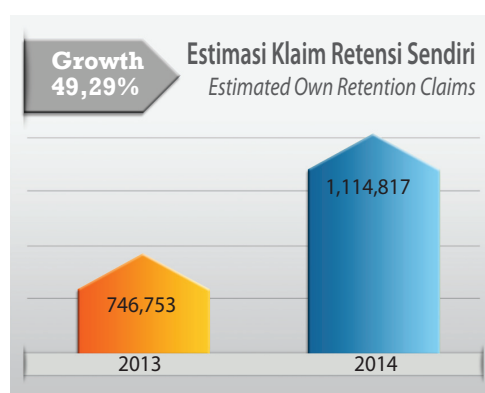


### Estimasi Klaim Retensi Sendiri

Estimasi klaim retensi sendiri perusahaan pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp1.114.817 juta atau mengalami peningkatan sebesar 49,29% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp746.753 juta. Peningkatan estimasi klaim retensi sendiri terutama disebabkan oleh peningkatan untuk harta benda yang secara nominal mengalami peningkatan sebesar Rp292.353 juta atau 71,67% dari semula sebesar Rp407.923 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp700.276 juta pada akhir tahun 2014.

### Estimated Own Retention Claims

The Company's estimated own retention claims at the end of 2014 stood at Rp1,114,817 million or an increase of 49.29% compared to 2013 amounted to Rp746,753 million. This increased was primarily due to an increase in the property which in nominal increased by Rp292,353 billion or 71.67% from Rp407,923 million in 2013 to Rp700,276 million by the end of 2013.

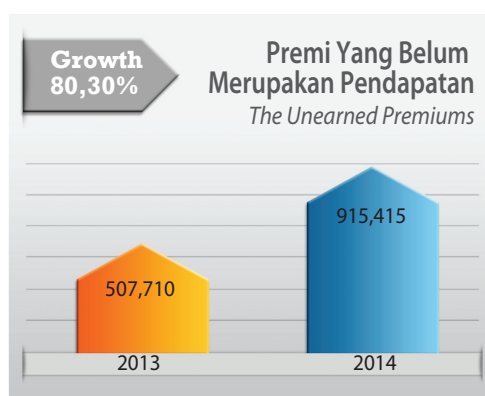


### Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan

Saldo premi yang belum merupakan pendapatan merupakan bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi. Premi yang belum merupakan pendapatan perusahaan pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp915.415 juta atau mengalami peningkatan sebesar 80,30% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp507.710 juta. Peningkatan premi yang belum merupakan pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh segmen reasuransi jiwa yang secara nominal meningkat sebesar Rp16.026 juta selama tahun 2013.

### The Unearned Premiums

The balance of unearned premium is part of the premiums that have not been recognized as revenue because the coverage is still running at the end of the accounting period. The Company's unearned premium by the end of 2014 stood at Rp915,415 million or an increase of 80.30% compared to 2013, amounted to Rp507,710 million. This increased was primarily due to the life reinsurance segment which in nominal increased by Rp16,026 million in 2013.

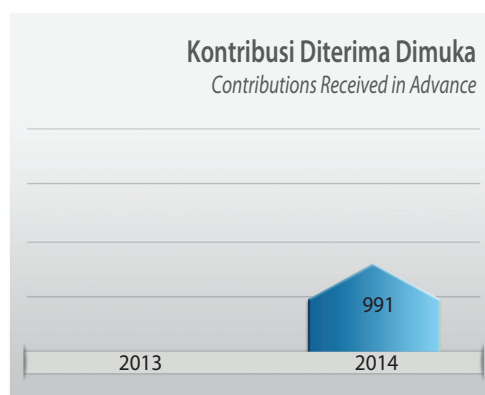


### Kontribusi Diterima Dimuka

Kontribusi diterima dimuka merupakan pembayaran kontribusi yang telah diterima namun belum ada produksinya. Saldo kontribusi diterima dimuka perusahaan pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp991 juta.

### Contributions Received in Advance

Contributions received in advance is the payment of contributions that have been received but no production is made. The balance of contributions received in advance as of the end of 2014 amounted to Rp991 million.

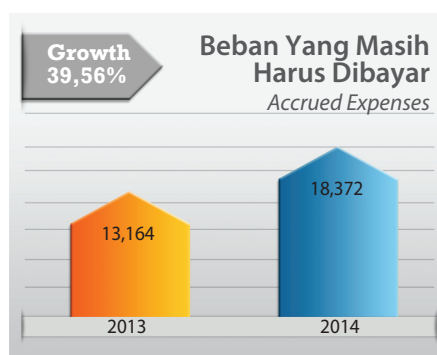


### Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban yang masih harus dibayar merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan karyawan, SDM dan umum, seperti: merit prestasi, jasa produksi karyawan, tantiem Direksi dan beban SDM dan umum lainnya. Beban yang masih harus dibayar perusahaan pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp18.372 juta atau mengalami peningkatan sebesar 39,56% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp13.164 juta.

### Accrued Expenses

Accrued Expenses are the costs associated with employees, HR and general, such as: merit achievement, production bonus, BOD tantiem and HR and other general expenses. Accrued expenses as of the end of 2014 amounted to Rp18,372 million or an increase of 39.56% compared to the year 2013 by Rp13,164 million.

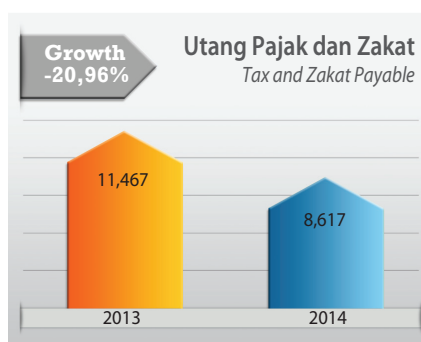


### Utang Pajak dan Zakat

Utang pajak dan zakat perusahaan sampai dengan akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp8.617 juta atau mengalami penurunan sebesar 20,96% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp11.467 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pajak kini perusahaan yang meningkat sebesar 26,17% dari semula sebesar Rp15.393 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp19.421 juta pada akhir tahun 2014, selisih pajak kini dengan utang pajak dan zakat adalah pajak dibayar dimuka.

### Tax and Zakat Payable

The Company's tax and zakat payable as of the end of 2014 stood at Rp8,617 million or a decrease of 20.96% compared to that of 2013 amounting to Rp11,467 million. This increase primarily due to increase in the Company's current tax by 26,17% from Rp15,393 million in 2013 to Rp19,421 million by the end of 2013, the difference between the current tax with the tax and zakat payable is taxes paid in advance.

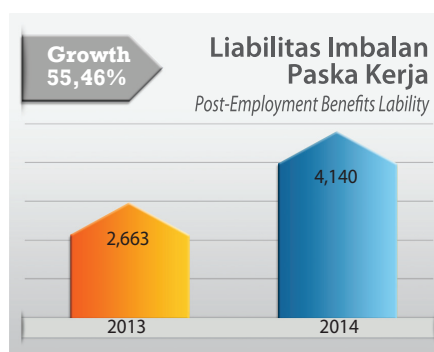


### Liabilitas Imbalan Paska Kerja

Berdasarkan laporan aktuaria PT RAS Actuaris tahun 2014 dan tahun 2013, beban, Aset dan liabilitas imbalan pasca kerja pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp4.140 juta atau mengalami kenaikan sebesar 55,46% jika dibandingkan dengan tahun 2013, yaitu sebesar Rp2.663 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh beban imbalan kerja tahun berjalan yang meningkat sebesar Rp2.554 juta dibandingkan tahun lalu.

### Post-Employment Benefits Liability

Based on the actuarial report from PT RAS Actuaris in 2014 and 2013, the expenses, assets and liabilities for post-employment benefits at the end of 2014 stood at Rp4,140 million, an increase of 55.46% compared to that of 2013, amounting to Rp2,663 million. This increase was primarily due to increase in employee benefits expenses for the current year, which increased by Rp2,554 million compared to last year.



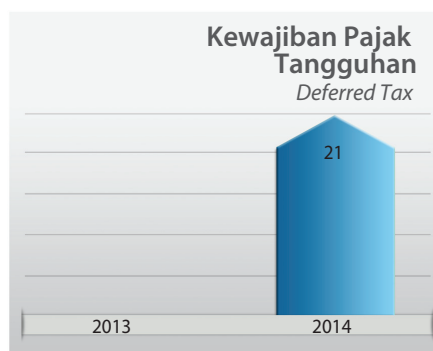


### Kewajiban Pajak Tangguhan

Pada akhir tahun 2013, perusahaan tidak memiliki kewajiban pajak tangguhan sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp21 juta.

### Deferred Tax

By the end of 2013, the Company has no deferred tax liability, while in 2014 amounted to Rp21 million.



### Utang Lain-Lain

Jumlah utang lain-lain perusahaan pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp2.324 juta. Hal tersebut mengalami penurunan sebesar minus 17,15% jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp2.805 juta.

### Others Payable

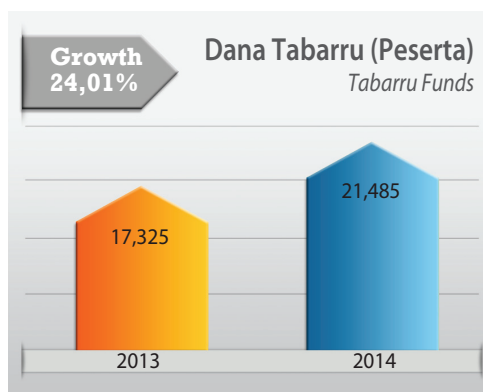
The Company's total other payables as of the end of 2014 stood at Rp2,324 million. This is a decrease of 17.15% when compared to 2013 which was recorded at Rp2,805 million.

### DANA TABARRU (Peserta)

Pada akhir tahun 2014 dana tabarru tercatat sebesar Rp21.485 juta, meningkat sebesar 24,01% jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp17.325 juta

### TABARRU FUNDS (Participant)

By the end of 2014, tabarru funds amounted to Rp21,485 million, grew by 24.01% compared to 2013 which was recorded at Rp17,325 million



### PINJAMAN SUBORDINASI

Pada akhir tahun 2014, perusahaan sudah tidak mempunyai pinjaman subordinasi.

### SUBORDINATED LOANS

In late 2014, the Company had not had a subordinated loan.

### EKUITAS

Pada akhir tahun 2014, ekuitas perusahaan mengalami peningkatan sebesar 98,61% dari semula sebesar Rp386.440 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp767.526 juta pada akhir tahun 2014. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan modal perusahaan yang mencapai 117,37% dari semula sebesar Rp213.000 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp463.000 juta pada akhir tahun 2014. Secara rinci komponen ekuitas sebagaimana tabel di bawah ini.

### EQUITY

In late 2014, the Company's equity increased by 98.61% from Rp386,440 million in 2013 amounted to Rp767,526 million by the end of 2014. The increase was primarily derived from the Company's capital increase of 117.37%, from Rp213,000 million in 2013 to Rp463,000 million by the end of 2014. In detail, the equity component are as follow:

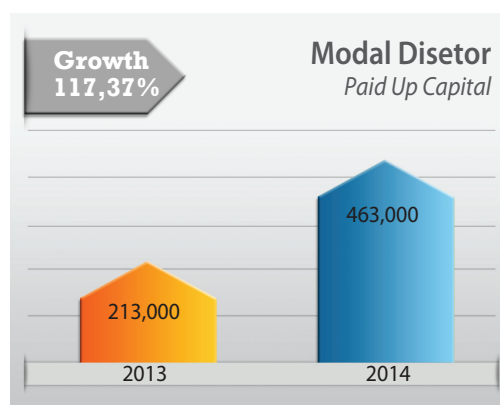
No Keterangan/Description	2013	2014	% Growth
1. Modal Disetor/Paid-in Capital	213,000	463.000	117,37
2. Cadangan Umum/General Reserves	95,065	167.641	76,34
3. Cadangan Tujuan/Appropriated Reserves	5,799	5.799	-
4. Laba Tahun berjalan/Profit of the Year	72,577	131.086	80,62
5. Jumlah Ekuitas/Total Equity	386,440	767.526	98,61

### Modal Disetor

Pada akhir tahun 2014, modal disetor perusahaan tercatat sebesar Rp463.000 juta atau mengalami peningkatan sebesar 117,37% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp213.000juta. Penambahan tersebut berasal dari setoran modal PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sebesar Rp250 miliar yang dilaksanakan dua tahap, yaitu pada tanggal 24September2014 sebesar Rp150 miliar dan pada tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp100 miliar.

### Paid-Up Capital

At the end of 2014, the Company's paid-up capital stood at Rp463,000 million or an increase of 117.37% compared to that of 2013 amounted Rp213,000 million. The increase was due to the additional paid-up capital from PT Askrindo (Persero), amounted to Rp250 billion, paid in two stages, on September 24, 2014 amounted to Rp150 billion and on December 17, 2014 amounted to Rp100 billion.

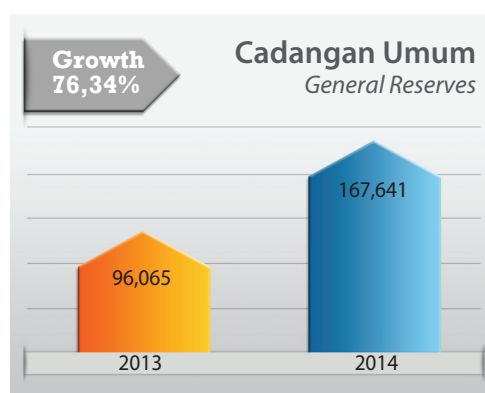


### Cadangan Umum

Pada akhir tahun 2014, terdapat peningkatan cadangan umum perusahaan sebesar 76,34% dari semula sebesar Rp95.065 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp167.641 juta pada akhir tahun 2014. Peningkatan cadangan umum ini yang berasal dari pembagian laba untuk tahun buku 2013 yang dibagikan pada tahun 2014.

### General Reserves

In late 2014, the company's general reserves increased by 76.34% from Rp95,065 million in 2013 to Rp167,641 million by the end of 2014. This increase comes from the profits for the fiscal year 2013, which was distributed in 2014.

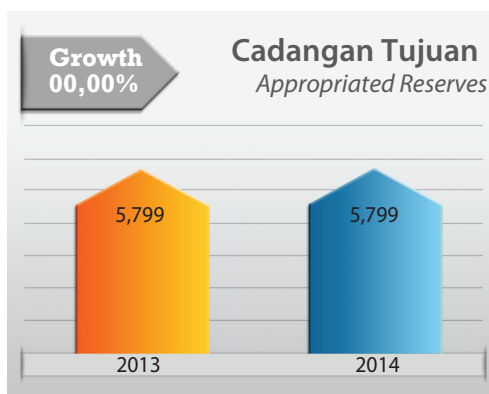


### Cadangan Tujuan

Berbeda dengan cadangan umum, pada tahun 2014 perusahaan tidak melakukan penambahan terhadap cadangan tujuan perusahaan sehingga tidak mengalami perubahan dari tahun 2013 sebesar Rp5.799 juta.

### Appropriated Reserves

In contrast to general reserves, in 2014 the Company did not add the appropriated reserves, hence it did not change from 2013, amounted to Rp5,799 million.



### ANALISIS LABA RUGI

Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, Perusahaan mencatat perolehan laba setelah pajak dan zakat sebesar Rp131.085 juta atau mengalami peningkatan sebesar 80,62% jika dibandingkan perolehan tahun sebelumnya, yakni Rp72.576 juta. Peningkatan laba tersebut terutama berasal dari pertumbuhan rata-rata pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan beban.

### ANALYSIS OF INCOME

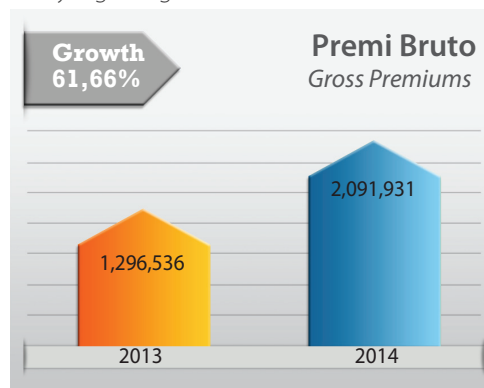
For the fiscal year ended December 31, 2014, the Company recorded a profit after tax and zakat amounting to Rp131,085 million or an increase of 80.62% when compared to the previous year, Rp72,576 million. This increase is mainly derived from income growth, which is higher when compared to the growth of expenses.

### Premi Bruto

Perolehan premi bruto tahun 2014 sebesar Rp2.095.931 juta, naik sebesar 61,66% dari perolehan tahun sebelumnya sebesar Rp1.296.536 juta. Peningkatan perolehan premi bruto tersebut merupakan hasil dari penerapan strategi perusahaan dan pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan dalam RKAP 2014 sehingga dapat meningkatkan volume akseptasi bisnis dan disertai juga dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Realisasi pendapatan premi bruto tersebut adalah sebesar 110,20% dari yang ditargetkan.

### Gross Premiums

Gross premium income in 2014 amounted to Rp2,095,931 million, an increase of 61.66% from the previous year income amounted to Rp1,296,536 million. The increase in gross premium income is the result of the implementation of corporate strategy and the implementation of the work program set out in 2014RKAP, thus increasing the volume of business acceptance and accompanied by a fairly stable economic growth. Realized gross premium income amounted to 110.20% of the target.



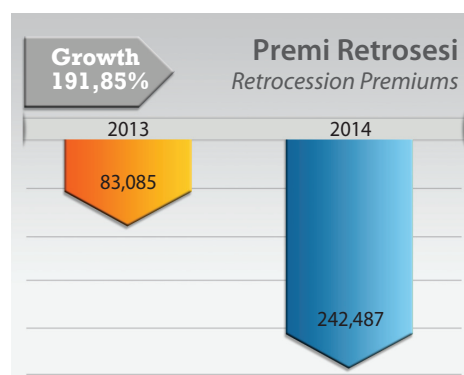
No	Premi Bruto per Class of Business	2013	2014	% Growth	
1.	Harta Benda/ <i>Properties</i>	437,707	854,206	95.15	40.76
2.	Kendaraan Bermotor/ <i>Motor</i>	58,102	91,178	56.93	4.35
3.	Pengangkutan/ <i>Marine Cargo</i>	73,363	77,216	5.25	3.68
4.	Rangka Kapal/ <i>Marine Hull</i>	99,833	126,919	27.13	6.06
5.	Rangka Pesawat/ <i>Aviation</i>	1,283	1,176	(8.36)	0.06
6.	Satelit/ <i>Satellite</i>	-	-	-	0.00
7.	Energi/ <i>Energy</i>	18,192	44,347	143.77	2.12
8.	Rekayasa/ <i>Engineering</i>	77,603	80,926	4.28	3.86
9.	Tanggung Gugat/ <i>Liability</i>	13,557	27,328	101.57	1.30
10.	Kecelakaan Diri dan Kesehatan/ <i>Personal Accident and Health</i>	18,104	38,349	111.82	1.83
11.	Kredit dan Surety Bond/ <i>Credit and Surety Bond</i>	106,973	314,038	193.57	14.98
12.	Aneka/ <i>Miscellaneous</i>	174,330	187,511	7.56	8.95
13.	Jiwa/ <i>Life</i>	217,488	252,737	16.21	12.06
<b>14.</b>	<b>Jumlah Premi Bruto/<i>Total Gross Premiums</i></b>	<b>1,296,536</b>	<b>2,095,931</b>	<b>61.66</b>	<b>100.00</b>

### Premi Retrosesi

Premi retrosesi atau premi yang kembali direasuransikan perusahaan reasuransi mengalami peningkatan signifikan sebesar 191,85% dari semula sebesar Rp83.085 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp242.487 juta pada tahun 2014. Hal tersebut disebabkan oleh adanya adjustment reinstatement premium dan adanya kenaikan rate premi retrosesi tahun 2014. Realisasi premi retrosesi tersebut adalah sebesar 181,65% dari yang ditargetkan.

### Retrocession Premiums

Retrocession premiums, or premiums re-insured by reinsurance companies, increased by 191.85%, from Rp83,085 million in 2013 to Rp242,487 million in 2014. This was caused by adjustments of the reinstatement premium and the increase in retrocession premium rate in 2014. The realization of the retrocession premiums amounted to 181.65% of the target.



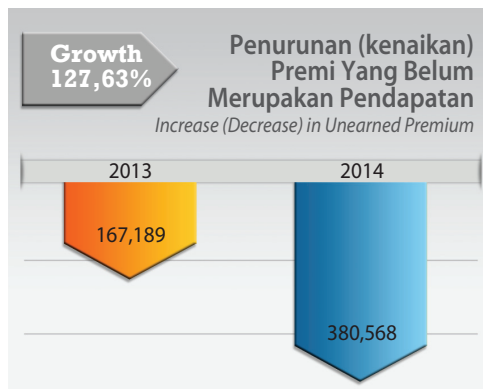
### Penurunan (kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan

Penurunan (kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan merupakan bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi. Penurunan (kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan mengalami peningkatan signifikan sebesar 127,63% dari semula sebesar Rp167.189 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp380.568 juta pada akhir tahun 2014. Peningkatan tersebut merupakan konsekuensi dari peningkatan pendapatan premi yang cukup signifikan yang diperoleh perusahaan. Realisasi penurunan (kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan tersebut adalah sebesar 139,17% dari yang ditargetkan.

### Increase In Unearned Premiums

Increase in unearned premiums is part of the premium that is not recognized as income, since the coverage is unexpired as of the end of the accounting period. Unearned premiums increased significantly by 127.63% from Rp167,189 million in 2013 amounted to Rp380,568 million by the end of 2014. The increase is a consequence of a significant increase in premium income, earned the company. The realization of the increase in unearned premiums amounted to 139.17% of the target.



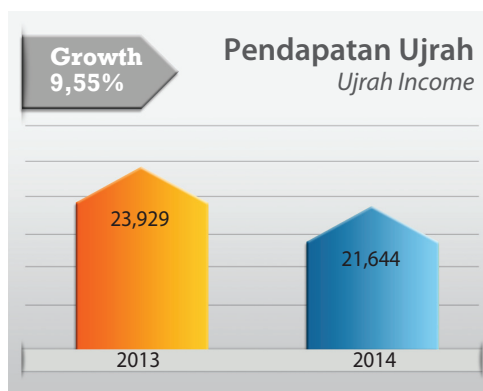


### Pendapatan Ujrah

Pendapatan Ujrah dari Reasuransi Syariah yang diperoleh selama tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 9,55%, dari Rp23.929 juta pada tahun 2013 menjadi Rp21.644 juta pada tahun 2014. Penurunan ini terjadi karena target kontribusi pada bisnis reasuransi jiwa tidak tercapai. Realisasi pendapatan Ujrah tersebut adalah sebesar 91,83% dari yang ditargetkan.

### Ujrah Revenue

Ujrah Revenue of Sharia Reinsurance acquired in 2014 decreased by 9,55%, from Rp23,929 million in 2013 to Rp21,644 million in 2014. The decrease was due to the contribution of life reinsurance is short of target. The realization of Ujrah Revenue is 91.83% of target.

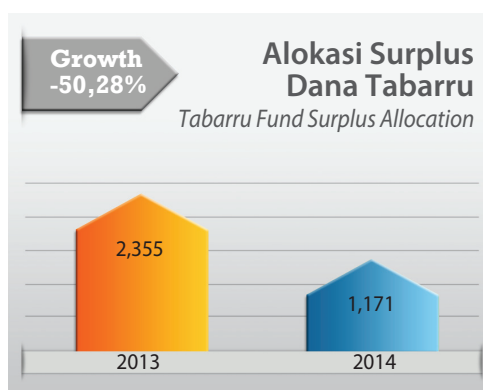


### Alokasi Surplus Dana Tabarru

Alokasi surplus dana Tabarru tahun 2014 tercatat sebesar Rp1.171 juta, turun 50,28% dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar Rp2.355 juta. Penurunan ini terjadi karena turunnya Hasil *Underwriting* dibandingkan tahun lalu yang disebabkan adanya kenaikan klaim yang cukup signifikan. Realisasi tersebut adalah sebesar 15,37% dari yang ditargetkan.

### Allocation of Surplus Tabarru Funds

Allocation of surplus Tabarru funds in 2014 amounted Rp1,171 million, or a decrease of 50.28% when compared to 2013 which was Rp2,355 million. This decrease was due to decrease of underwriting results compared to that of the last year, since the claim increased significantly. The realization was 15,37% of target.

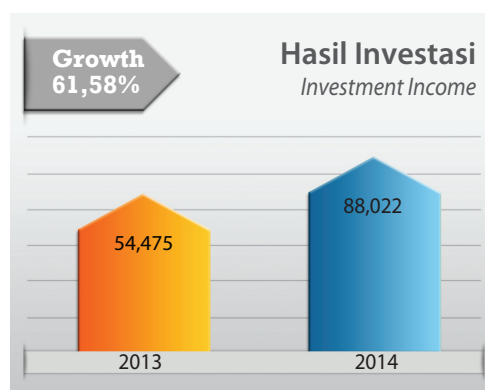


### Hasil Investasi

Hasil investasi pada tahun 2014 meningkat 61,58%, dari Rp54.475 juta menjadi Rp88.022 juta. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah investasi yang dimiliki oleh perusahaan selama tahun 2014. Realisasi tersebut adalah sebesar 111,56% dari yang ditargetkan.

### Investment Income

Return of investments in 2014 increased by 61.58%, from Rp54,475 million to Rp88,022 million. This increase occurred due to an increase in the number of investments owned by the Company in 2014. The realization is 111.56% of the target.



### Beban Usaha

Sampai dengan akhir tahun 2014, beban usaha perusahaan yang berasal dari beban *underwriting* dan beban usaha lainnya tercatat sebesar Rp89.760 juta atau mengalami peningkatan sebesar 25,88% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp71.307 juta. Peningkatan beban usaha tersebut terutama dipicu oleh peningkatan beban klaim selama tahun 2014 sebesar 27,78% serta peningkatan beban komisi sebesar 51,51%. Secara rinci beban usaha perusahaan sebagaimana tabel dibawah ini.

### Operating Expenses

As of the end of 2014, operating expenses derived from underwriting expenses and other operating expenses amounted to Rp89,760 million or an increase of 25.88% compared to the year 2013 amounted to Rp71,307 million. The increase in operating expenses was primarily driven by an increase in claims expenses in 2014 amounted to 27.78% and an increase in commission expense amounted to 51.51%. Operating expenses, in detail, can be seen in the table below.

Keterangan/Description	2013	2014	%Growth
Klaim Bruto/Gross Claims	521.713	867.381	66,26%
Klaim Retrosesi/Retrocession Claims	38.042	104.614	175%
Kenaikan (Penurunan) Estimasi Klaim Retensi Sendiri/Increase (Decrease) in Estimated Own Retention Claims	142.507	37.376	-73,77
Jumlah Beban Klaim/Total Claim Expenses	626.178	800.143	27,78%
Beban Komisi Netto/Net Commission Expenses	359.335	544.443	51,51%
Beban <i>Underwriting</i> Lain Netto/Net Other Underwriting Expenses	1.718	3.721	116,59%
Jumlah Beban <i>Underwriting</i> /Total Underwriting Expenses	987.232	1.348.307	36,57%
Beban Usaha Lainnya/Other Operating Expenses	71.307	89.760	25,88%
Jumlah Beban Usaha/Total Operating Expenses	1.058.539	2.786.373	163,23%

### Beban Klaim

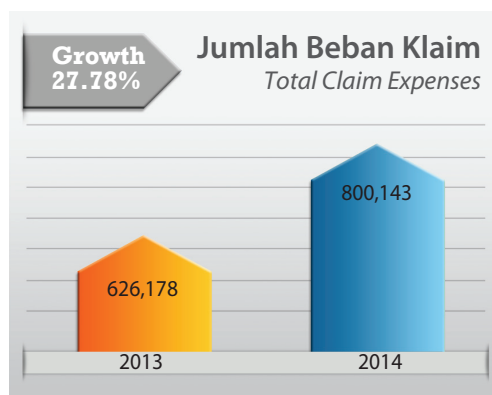
Beban klaim pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp800.143 juta, mengalami peningkatan sebesar 27,78%, jika dibandingkan dengan tahun 2013, yakni Rp626.178 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan klaim bruto sebesar 66,26% dari semula Rp521.713 juta pada tahun 2013 menjadi Rp867.381 juta pada akhir tahun 2014. Klaim retrosesi yang merupakan recovery klaim kepada pihak retrosesioner mengalami peningkatan sebesar 175,00% dari semula sebesar

### Claim Expenses

Claim expenses in 2014 amounted to Rp800,143 million, an increase of 27.78%, when compared to that of 2013, amounted to Rp626,178 million. The increase was primarily due to the increase in gross claims by 66.26% from Rp521,713 million in 2013 to Rp867,381 million, by the end of 2014. Retrocession claims or recovery claim of retrosesioner, increased by 175.00% from Rp38,042 million in 2013 to Rp104,614 million by the end of 2014. Estimated Own Retention Claims (EKRS)

Rp38.042 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp104.614 juta pada akhir tahun 2014. Kenaikan Estimasi Klaim Retensi Sendiri (EKRS) mengalami penurunan signifikan sebesar 73,77% dari semula sebesar Rp142.507 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp37.376 juta pada tahun 2014.

decreased significantly by 73.77% from Rp142,507 million in 2013 to Rp37,376 million in 2014.

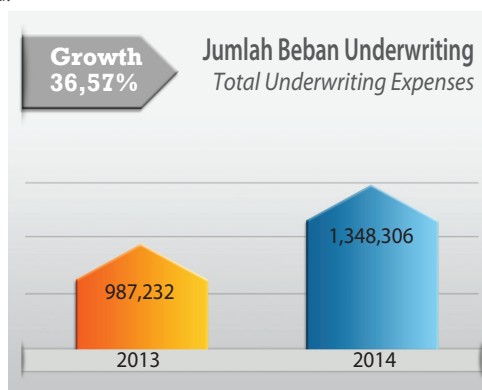


### Beban Underwriting

Beban *underwriting* pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 36,57% dari Rp987.232 juta pada tahun 2013 menjadi Rp1.348.306 juta pada tahun 2014. Peningkatan beban hasil *underwriting* tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban komisi netto sebesar 51,51%, dari Rp359.335 juta menjadi Rp544.443 juta. Beban klaim meningkat sebesar 27.78% dari Rp626.178 juta menjadi Rp800.143 juta. Beban *Underwriting* lain juga meningkat, yakni sebesar 116,59% dari Rp1.718 juta menjadi Rp3.721 juta.

### Underwriting Expenses

Underwriting expenses in 2014 increased by 36.57% from Rp987,232 million in 2013 to Rp1,348,306 million in 2014. The increase was due to the increase in net commission expense amounted to 51.51%, from Rp359,335 million to Rp544,443 million. Claims expenses increased by 27.78% from Rp626,178 million to Rp800,143 million. Other Underwriting Expenses also increased by 116.59% from Rp1,718 million to Rp3,721 million.

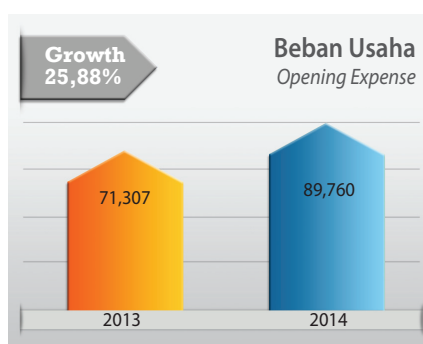


### Beban Usaha

Beban usaha antara lain terdiri dari beban umum, beban administrasi dan beban pemasaran. Pada tahun 2014, beban usaha lainnya tercatat sebesar Rp89.760 juta, meningkat 25,88% dibandingkan tahun 2013, yakni Rp71.307. Peningkatan beban usaha tersebut terutama dikarenakan peningkatan beban umum, dari Rp57.781 juta menjadi Rp76.166 juta, atau meningkat 31,82%. Beban Administrasi mengalami penurunan sebesar 11,43%, dari Rp7.653 juta menjadi Rp8.641 juta. Beban Pemasaran meningkat 21,61% dari Rp4.886 juta menjadi Rp5.942 juta.

### Operating Expenses

Operating expenses include general expenses, administration expenses and marketing expenses. In 2014, other operating expenses amounted to Rp89,760 million, an increase of 25.88% compared to t 2013 of Rp71,307 million. The increase in operating expenses was primarily due to an increase in general expenses, from Rp57,781 million to Rp76,166 million, an increase of 31.82%. Administration Expenses decreased by 11.43%, from Rp7,653 million to Rp8,641 million. Marketing Expenses increased by 21.61% from Rp4,886 million to Rp5,942 million.

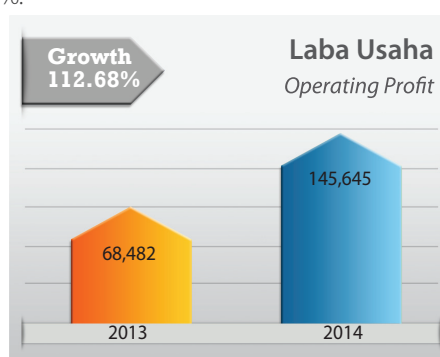


### Laba Usaha

Laba usaha pada tahun 2014 mengalami lonjakan signifikan sebesar 112,68% dari Rp68.482 juta pada tahun 2013 menjadi Rp145.645 juta pada tahun 2014. Peningkatan laba usaha tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan hasil *underwriting* sebesar 111,02% dari Rp59.031 juta menjadi Rp124.570 juta di tahun 2014, sementara beban usaha pada tahun yang sama hanya meningkat 25,88%.

### Operating Profit

Operating profit in 2014 grew significantly by 112,68% from Rp68,482 million in 2013 to Rp145,645 million in 2014. The increase in operating profit was primarily due to an increase of 111.02% in underwriting results from Rp59,031 million to Rp124,570 million in 2014, while operating expenses in the same year only increased by 25.88%.

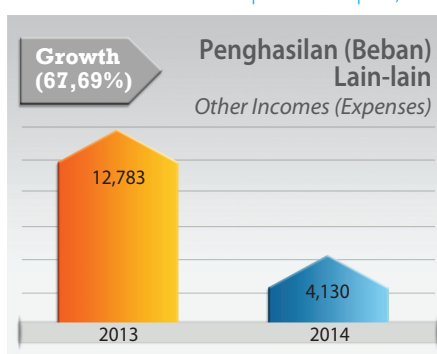


### Penghasilan (Beban) Lain-Lain

Penghasilan (beban) lain-lain antara lain berasal dari Laba (beban) beda kurs non investasi, jasa giro, bunga piutang pegawai, laba pelepasan aset tetap, biaya bank, beban bunga subordinasi, beban penyisihan penurunan nilai piutang serta penghasilan (beban) lainnya. Pada tahun 2014, penghasilan (beban) lain-lain tercatat positif Rp4.130 juta menurun 67.69% dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp12.783 juta. Hal ini dikarenakan oleh penurunan laba beda kurs non investasi yang mengalami penurunan sebesar 76,59% dari semula Rp16.355 juta pada tahun 2013 menjadi Rp3.829 juta pada tahun 2014.

### Other Incomes (Expenses)

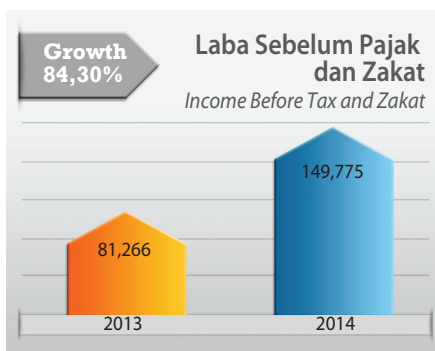
Other Incomes (expenses), among others derived from incomes (expenses) resulted from the gain on non-investment exchange rate, current accounts, employees' receivables interest, income from fixed assets disposal, bank charges, subordination interest expense, provision for impairment of receivables and other income (expense). In 2014, other incomes (expenses) recorded a positive Rp4,130 million, decreased by 67.69% over the previous year, ie Rp12,783 million. This is due to the 76.59% decrease in gain on non-investment exchange rate, from the previous Rp16,355 million in 2013 to Rp3,829 million in 2014.





### Laba Sebelum Pajak dan Zakat

Perusahaan pada tahun 2014 telah membukukan laba sebelum pajak penghasilan dan zakat sebesar Rp149.775 juta dengan peningkatan sebesar 84,30% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp81.266 juta. Laba sebelum pajak penghasilan tersebut mengalami peningkatan karena peningkatan hasil investasi yang cukup signifikan pada tahun 2014.

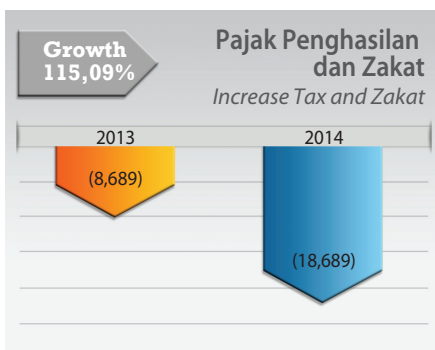


### Profit Before Tax And Zakat

In 2014, the Company posted a profit before income tax and zakat of Rp149,775 million, an increase of 84.30% compared to 2013 of Rp81,266 million. Profit before income tax has increased due to a significant increase in returns on investment in 2014.

### Pajak Penghasilan dan Zakat

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Sesuai dengan PSAK No. 46 (Revisi 2011) tentang "Pajak Penghasilan". Beban pajak penghasilan, termasuk pajak tangguhan dan zakat perusahaan pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp18.689 juta atau mengalami peningkatan sebesar 115,09% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp8.689 juta.

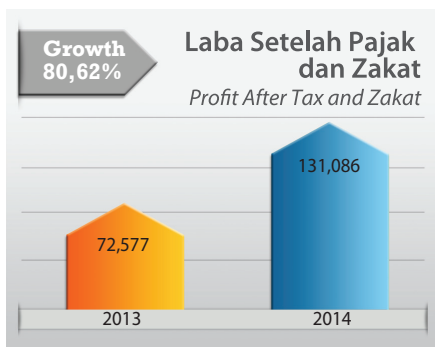


### Income Tax and Zakat

Current tax expense is determined based on the taxable income for the period reported and is calculated based on the applicable tax rates. In accordance with SFAS No. 46 (Revised 2011) on "Income Tax". Income tax expense, including deferred tax and zakat as of the end of 2014 amounted to Rp18,689 million or an increase of 115.09% compared to 2013 of Rp8,689 million.

### Laba Setelah Pajak dan Zakat

Setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan zakat, maka didapat laba setelah pajak perusahaan dan zakat pada akhir tahun 2014 sebesar Rp131.086 juta atau mengalami peningkatan sebesar 80,62% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp72.577 juta.



### Profit After Tax and Zakat

Net of income tax and zakat, the profit after tax and zakat at the end of 2014 amounted to Rp131,086 million or an increase of 80.62% compared to 2013 of Rp72,577 million.

## ANALISIS POSISI KEUANGAN

Pada tahun 2014, Perusahaan mencatat pertumbuhan aset yang mengesankan, dari Rp1.722.564 juta di tahun sebelumnya menjadi Rp2.930.469 juta atau meningkat 70,12%.

Sedangkan liabilitas dan ekuitas perusahaan sampai dengan akhir tahun 2014 masing-masing mengalami peningkatan sebesar 62,38% dan 98,61% dibandingkan dengan tahun 2013.

### ASET

Peningkatan aset perusahaan terutama ditopang oleh peningkatan piutang usaha sebesar 163,56% dari semula sebesar Rp200.574 juta pada akhir tahun 2013 menjadi sebesar Rp528.624 juta pada tahun 2014. Selain itu, aset retrocesi dan instrument investasi juga mengalami peningkatan yang signifikan selama tahun 2014 ini dengan peningkatan masing-masing sebesar 119,09% serta 45,21% dibandingkan dengan tahun 2013. Rincian komponen aset sebagaimana tabel di bawah ini.

Keterangan/Description	2013	2014	% Growth
Kas dan Setara Kas/Cash and Cash Equivalent	3,749	2.460	-34,38
Piutang Usaha/Accounts Receivable	200,574	528.624	163,56
Piutang Ujrah/Ujrah Receivables	10,331	8.896	-13,89
Aset Retrocesi/Retrocession Assets	306,204	670.856	119,09
Biaya Dibayar Dimuka/Prepaid Expenses	24	83	245,83
Piutang hasil Investasi/Investment Income Receivables	4,516	5.616	24,36
Piutang Lain-lain/Others Receivable	4,180	3.047	-27,11
Instrument Investasi/Investment Instruments	1,136,420	1.650.248	45,21
Aset Tetap/Fixed Assets	48,078	51.038	6,16
Aset Lain-lain/Other Assets	1.379	1.164	15,59
Total Aset/Total Assets	1,722,564	2.930.469	70,12

Penjelasan peningkatan dan penurunan komponen aset perusahaan sebagaimana penjelasan di bawah ini.

### Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas perusahaan pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp2.460 juta, menurun 34,38% dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp3.749 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan kas pada bank yang mengalami penurunan sebesar 36,90% atau menurun sebesar Rp1.347 juta dari semula Rp3.650 juta pada tahun 2013 menjadi Rp2.303 juta pada tahun 2014.

## ANALYSIS ON FINANCIAL POSITION

In 2014, the Company recorded an impressive growth of assets, from Rp1,722,564 million in the previous year to Rp2,930,469 million, an increase of 70.12%.

Meanwhile, liabilities and equity as of the end of 2014, increased by 62.38% and 98.61% respectively compared to that of 2013.

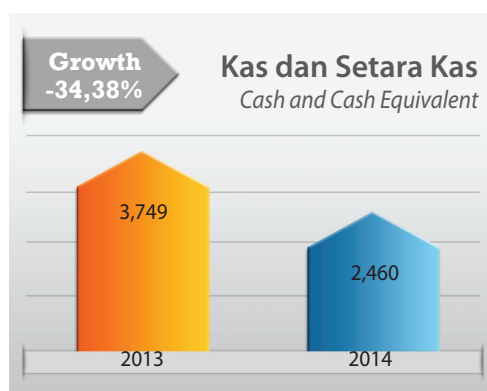
### ASSETS

The increase in assets of the Company mainly supported by an increase in accounts receivable, by 163.56% from Rp200,574 million by the end of 2013 to Rp528,624 million in 2014. In addition, the retrocession of assets and investment instruments also increased significantly during 2014, with an increase of 119.09% and 45.21% respectively compared to 2013. Details of the assets component can be seen in the table below.

Explanation of increase and decrease of the Company's assets component as the description below.

### Cash and Cash Equivalents

The Company's balance of cash and cash equivalents at the end of 2014 recorded at Rp2,460 million, down by 34,38% from the year 2013 amounted to Rp3,749 million. The decrease was primarily due to decrease in cash at bank, by 36,90% or Rp1,347 million, from Rp3,650 million to Rp2,303 million in 2014.

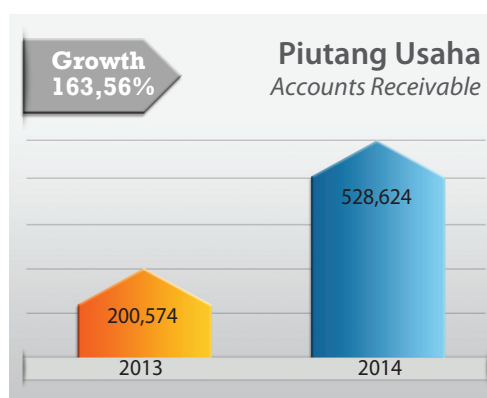


### Piutang Usaha

Piutang usaha terbagi atas piutang reasuransi serta piutang retrosesi. Piutang usaha perusahaan pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp528.624 juta atau mengalami peningkatan sebesar 163,56% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp200.574 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang reasuransi sebesar 155,05% dari semula sebesar Rp193.700 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp494.032 juta pada akhir tahun 2014.

### Accounts Receivable

Accounts receivable consist of reinsurance and retrocession receivables. The Company's accounts receivable at the end of 2014 stood at Rp528,624 million or an increase of 163,56% compared to 2013 amounted to Rp200,574 million. The increase was primarily driven by the increase in reinsurance receivables of 188.06% from Rp193,700 million in 2013 to Rp494,032 million in 2014.

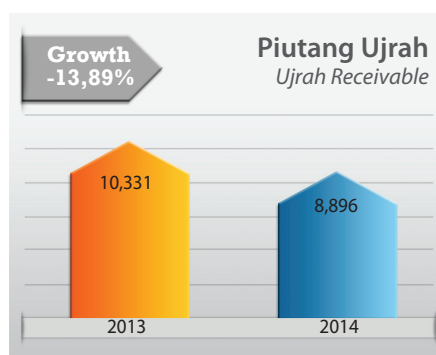


### Piutang Ujrah

Piutang ujrah perusahaan merupakan bagian pendapatan perusahaan atas fee dari pengelolaan dana tabarru. Pada akhir tahun 2014, piutang ujroh perusahaan tercatat sebesar Rp8.896 juta atau mengalami penurunan sebesar 13,89% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp10.331 juta. Penurunan piutang ujroh tersebut antara lain disebabkan pendapatan ujrah mengalami penurunan sebesar 9,55%, dari Rp23.929 juta pada tahun 2013 menjadi Rp21.644 juta pada tahun 2014.

### Ujrah Receivable

The Company's Ujrah Receivables is part of the Company's revenue over the fee of tabarru fund management. At the end of 2014, the Company's ujrah receivable recorded at Rp8,896 million or a decrease of 13,89% from that of the 2013 of Rp10,331 million. Decrease in ujrah receivables is partly due to the decline in ujrah revenue of 9.55%, from Rp23,929 million in 2013 to Rp21,644 million in 2014.

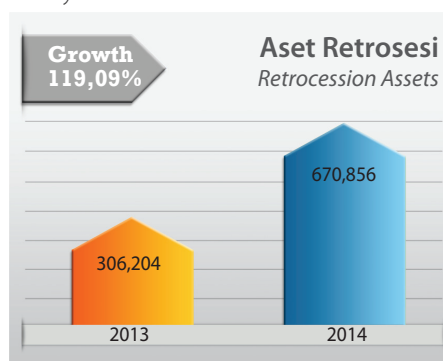


### Aset Retrosesi

Aset retrosesi adalah nilai hak kontraktual neto retrosesional dalam perjanjian retrosesi. Jumlah tersebut menggambarkan bagian dari premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi klaim yang menjadi hak kontraktual neto retrosesional. Aset retrosesi perusahaan sampai dengan akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp670.856 juta atau mengalami peningkatan sebesar 119,09% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp306.204 juta. Peningkatan tersebut antara lain dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada premi yang belum merupakan pendapatan dan pada estimasi klaim retensi sendiri dibandingkan tahun sebelumnya.

### Retrocession Assets

Retrocession asset is the net retrosesional contractual rights value in the retrocession agreement. The amount is describing part of the unearned premiums and claims estimates that become net retrosesional contractual rights. The Company's retrocession assets by the end of 2014 stood at Rp670,856 million or an increase of 119,09% compared to that of 2013 of Rp306,204 million. This increase is, among other things, due to the significant increase in unearned premiums and the estimated own retention claims compared to the previous year.

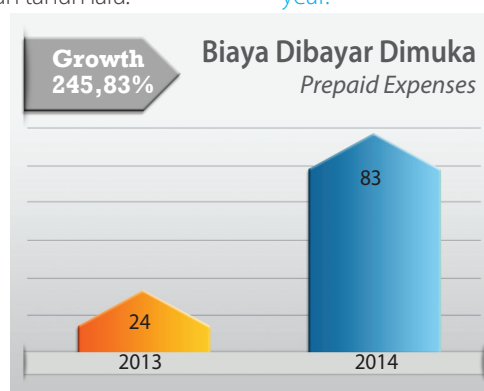


### Biaya Dibayar Dimuka

Saldo biaya dibayar dimuka pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp83 juta atau mengalami peningkatan sebesar 245,83% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp24 juta. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan penggunaan kas kredit dibayar di muka dibandingkan tahun lalu.

### Prepaid Expenses

The balance of prepaid expenses at the end of 2014 amounted to Rp83 million or grew by 245.83% when compared to 2013 of Rp24 million. The increase was due to the increase in the use of prepaid credit of cash compared to the previous year.



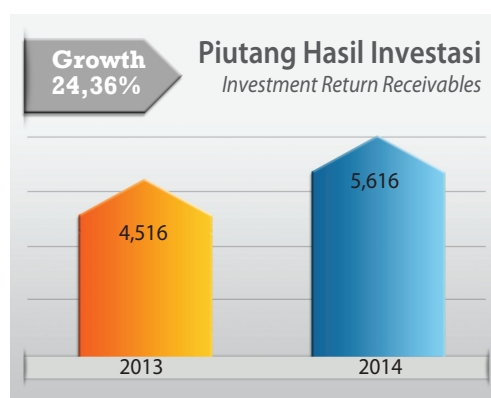


### Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi perusahaan antara lain berasal dari kupon obligasi, bunga deposito serta bunga deposito on call. Saldo piutang hasil investasi perusahaan pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp5.616 juta atau mengalami peningkatan sebesar 24,36% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp4.516 juta. Untuk piutang hasil investasi perusahaan tidak melakukan penyisihan atas kemungkinan tidak tertagihnya dan penurunan nilai piutang tersebut, mengingat piutang ini merupakan tagihan ke penerbit obligasi dan Bank pengelola deposito yang terjamin pembayarannya melalui transfer ke rekening entitas.

### Receivables on Investment Income

The Company's receivables on investment income, among others, derived from coupon bonds, deposits interest and oncall deposits interest. The Company's investment return receivable balance at the end of 2014 recorded at Rp5,616 million or an increase of 24,36% compared to the year 2013 amounting to Rp4,516 million. For receivables on investment return, the Company does not undertake any allowance for the possibilities of uncollectible and impairment of receivables value, considering the receivables is an invoice to the issuer and the Bank manage the deposits which guaranteed its payment by wire transfer to the account of the entity.

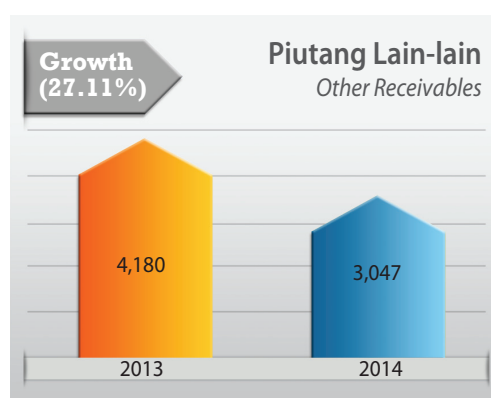


### Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain perusahaan merupakan piutang yang diberikan kepada pegawai untuk keperluan perumahan dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun dan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 19/KEP/DIR/VII/2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Pemberian Pinjaman Perumahan bagi pegawai PT Reasuransi Nasional Indonesia. Piutang lain-lain pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp3.047 juta atau mengalami penurunan sebesar 27,11% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp4.180 juta. Piutang pegawai tidak dilakukan penyisihan atas kemungkinan tidak tertagihnya dan penurunan nilai piutang tersebut, mengingat piutang ini merupakan tagihan yang dijamin pembayarannya melalui pemotongan gaji pegawai.

### Others Receivable

The Company's other receivables are receivables provided to the employee for housing purposes with a minimum of 1 (one) year of service and a period of 10 (ten) years according to Decree of the Board of Directors Number: 19/KEP/DIR/VII/2002 dated July 8, 2002 on Housing Lending for the employees of PT Reasuransi Nasional Indonesia. Other receivables at the end of 2013 stood at Rp3,047 million or down by 27,11% from the year 2013 of Rp4,180 million. The Company does not establish allowance for possible uncollectible and impairment receivables on employees' receivables, considering the receivables are guaranteed invoices through employees' payroll deductions.

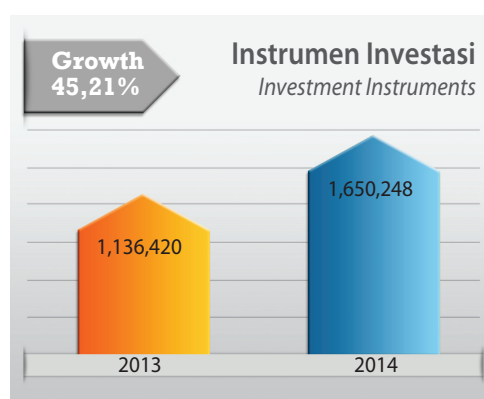


### Instrumen Investasi

Instrumen investasi perusahaan terbagi atas dana jaminan, deposito biasa, surat berharga serta penyertaan saham. Sampai dengan akhir tahun 2014, instrument investasi perusahaan mengalami peningkatan sebesar 45,21% dari semula sebesar Rp1.136.420 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp1.650.248 juta pada akhir tahun 2014 yang secara nominal terhitung meningkat sebesar Rp513.828 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan dana deposito yang meningkat 75,67% atau secara nominal sebesar Rp513.760 juta dan surat berharga yang meningkat tipis sebesar 0,01% atau Rp68 juta.

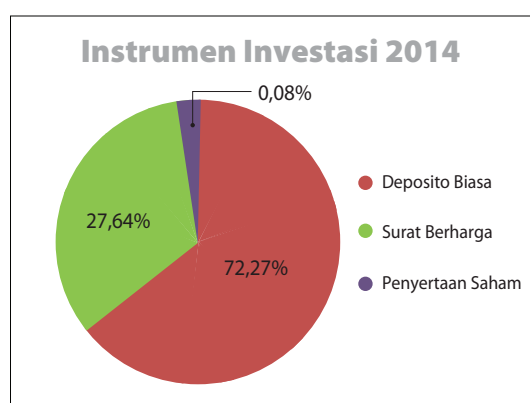
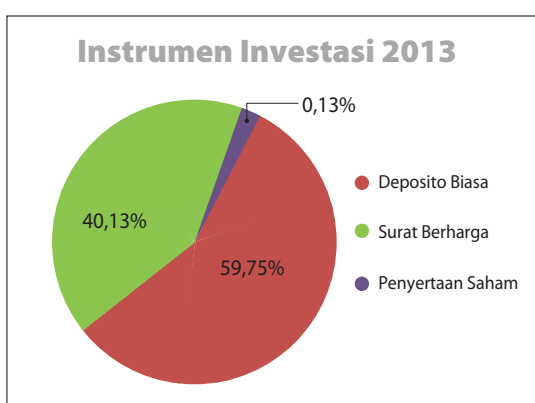
### Investment instruments

Investment instruments are divided into collateral fund, ordinary deposits, securities and share participation. As of the end of 2014, the Company's investment instrument increased by 45.21% from Rp1,136,420 million in 2013 to Rp1,650,248 juta million at the end of 2014, nominally increased by Rp513,828 million. The increase resulted mainly from an increase in deposit funds that grew 75,67% or Rp513,760 million and from a slight increase of 0,01% or Rp68 juta.



Jika ditinjau berdasarkan komposisi dari instrument investasi dana deposito mendominasi komposisi instrument investasi dengan komposisi sebesar 72,27% terhadap total instrument investasi tahun 2014. Komposisi dana deposito tersebut mengalami peningkatan sebesar 20,97% terhadap komposisi dana deposito tahun 2013 sebesar 59,74%. Selanjutnya diikuti dengan komposisi surat berharga dengan komposisi sebesar 27,64% terhadap total instrument investasi tahun 2014. Komposisi surat berharga tersebut mengalami penurunan sebesar 31,12% terhadap komposisi surat berharga tahun 2013 sebesar 40,13%. Sedangkan untuk penyertaan saham pada akhir tahun 2014 ini memiliki komposisi sebesar 0,08% terhadap total instrument investasi.

Based on the composition of investment instruments, the deposit funds dominate the composition of the investment instrument with a composition of 72,27% of the total investment instrument in 2014. The deposit fund composition had increased by 20,97% towards composition of the deposit of funds in 2013 amounted to 59,74%. Followed by securities with a composition of 27,64% of the total investment instrument in 2014. The securities composition grew by 19,61% from that of 2013 amounted to 40,13%. As for the share participation, by the end of 2014, has a composition of 0.08% of the total investment instruments.



Penjelasan mengenai peningkatan masing-masing komponen instrument investasi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

A description of each component of the increase in investment instruments as described below.

### Dana Jaminan

Saldo dana jaminan perusahaan pada tahun 2014 cenderung tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp47,000 juta. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus memiliki dana jaminan sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang lebih besar antara 20% dari modal sendiri yang dipersyaratkan dan hasil penjumlahan 1% dari premi neto dengan 0,25% dari premi reasuransi. Dana jaminan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp47.000 juta, sudah memenuhi ketentuan di atas.

### Collateral Fund

The balance of the Company's collateral fund in 2014 tend to remain the same when compared to 2013 which was recorded at Rp47,000 million. The insurance and reinsurance companies must have a minimum collateral fund in the amount 20% greater of the own capital required and the sum of 1% of the net premium with 0,25% from the reinsurance premiums. Collateral funds as per December 31, 2014 and 2013 respectively amounted to Rp47,000 million and had comply with the provision above.

### Deposito

Saldo deposito perusahaan pada akhir tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 75,67% dari semula sebesar Rp678.911 juta pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp1.192.671 juta pada akhir tahun 2014 dan secara nominal mengalami pertumbuhan sebesar Rp513.759 juta.

### Time Deposit

The Company's time deposit balance at the end of 2014 increased by 75.67% from Rp678,911 million in 2013 to Rp1,192,671 million by the end of 2014, nominally growth by Rp513,759 million.

### Surat Berharga

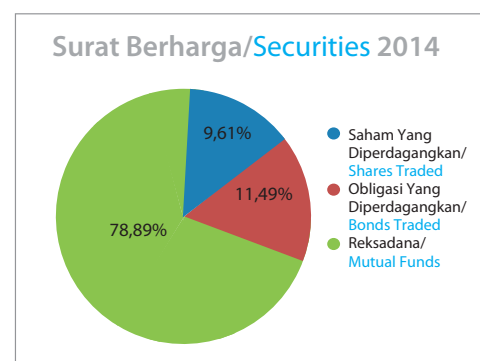
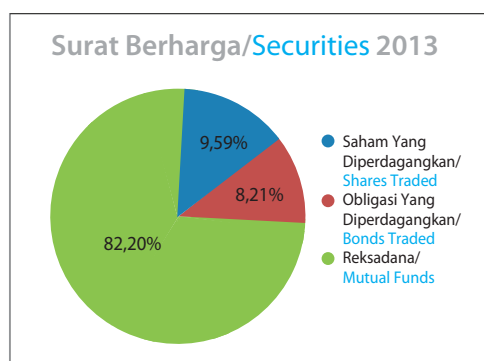
Saldo surat berharga yang dimiliki perusahaan terbagi atas saham yang diperdagangkan, obligasi yang diperdagangkan serta reksadana. Secara total, surat berharga yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp456.153 juta atau mengalami peningkatan sebesar 0,01% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp456.084 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan penempatan pada reksadana sebesar Rp14.975 juta yang semula sebesar Rp37.449 juta pada tahun 2013 menjadi Rp52.424 juta pada tahun 2014 atau naik sebesar 39,99%.

### Securities

The Company's securities consisting of traded shares traded, traded bonds and mutual funds. In total, the Company's securities at the end of 2014 stood at Rp456,153 million or an increase of 0.01% compared to the year 2013 amounted to Rp456,084 million. The increased resulted mainly from an increase in mutual funds of Rp14,975 million, from Rp37,449 million to Rp52,424 million in 2014, or increased by 39.99%.

Komposisi dana surat berharga yang dimiliki perusahaan sebagaimana grafik di bawah ini.

The composition of the securities owned by the Company shown in the chart below.



Komposisi surat berharga yang dimiliki terutama didominasi oleh komposisi obligasi-obligasi yang diperdagangkan sebesar 78,89% terhadap total surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Komposisi tersebut mengalami penurunan sebesar 4,03% jika dibandingkan dengan komposisi tahun 2013 sebesar 82,20%. Selanjutnya diikuti dengan komposisi reksadana dengan komposisi sebesar 11,49% terhadap total surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Komposisi reksadana tersebut mengalami peningkatan sebesar 39,95% jika dibandingkan dengan komposisi tahun 2013 sebesar 8,21%. Sedangkan komposisi saham yang diperdagangkan memiliki komposisi terendah sebesar 9,61% terhadap total surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Komposisi saham yang diperdagangkan tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,21% terhadap komposisi saham yang diperdagangkan tahun 2013 sebesar 9,59%.

#### **Penyertaan Saham**

Jumlah penyertaan saham perusahaan memiliki kecenderungan tetap atau tidak berubah baik tahun 2013 maupun tahun 2014 yaitu sebesar Rp1.424 juta. Investasi dalam bentuk penyertaan saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Penyertaan saham tersebut merupakan penyertaan kepada PT Asuransi Maipark Indonesia sebesar Rp724 juta serta Dana Konsorsium Asuransi Khusus sebesar Rp700 juta.

The composition of securities is mainly dominated by bonds traded of 78.89% of the total securities owned by the Company. The composition increased by 4.03% as compared to the composition in 2013 which was 82.20%. Followed by mutual funds of 11.49% of the total securities. The composition of mutual funds increased by 39.95% compared to the composition in 2013 amounted to 8.21%. The least component of the composition of securities istraded shares, which was 9.61% of total securities. It slightly grew 0.21% from the previous 9.59% in 2013.

#### **Shares Participation**

The number of the Company's shares participation is unlikely to change in 2013 and 2014 in the amount of Rp1,424 million. The investments in form of shares participation with the ownership less than 20% of the fair values are not available and intended for long-term investments are stated at acquisition cost (cost method). The shares participation are investments to PT Asuransi Maipark Indonesia amounting to Rp724 million and Special Insurance Consortium Funds of Rp700 million.



## LAPORAN ARUS KAS

Posisi kas dan setara kas Perusahaan di akhir tahun 2014 sebesar Rp2.460 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp1.289 juta atau sebesar 34,38% dari tahun 2013 sebesar Rp3.749 juta.

## STATEMENTS OF CASH FLOWS

Cash and cash equivalents at the end of 2014 amounted to Rp2,460 million or decreased by Rp1,289 million or 34.38% from 2013, amounted to Rp3,749 million.

Keterangan/Description	2013	2014	%Growth
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi – Net/Cash Flows From Operating Activities-Net	286,733	208.302	-27,35
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi – Net/Cash Flows From Investment Activities-Net	(285,692)	(459.591)	60,87
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Cash Flows From Financing Activities	- - -	250.000	
Kenaikan Bersih Kas Dan Setara kas/Increase in Cash and Cash Equivalent-Net	1,041 -	(1.289)	23,82
Saldo Kas Dan Setara Kas Awal Tahun/Balance of Cash and Cash Equivalent Beginning of the Year	2,708	3.749	38,44
Saldo Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun/Balance of Cash and Cash Equivalent Ending of the Year	3,749	2.460	-34,38

### Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas operasi tahun 2014 tercatat sebesar Rp208.302 juta dan mengalami penurunan sebesar Rp78.431 juta atau secara persentase menurun sebesar 27,35% dari tahun 2013 sebesar Rp286.733 juta. Penurunan ini disebabkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya pada beberapa pengeluaran kas antara lain untuk beban klaim, beban *underwriting* lainnya dan pengeluaran pajak.

### Cash Flows From Operating Activities

Cash flow from operating activities in 2014 was recorded at Rp208,302 million, down by Rp78,431 million or in percentage, 27.35% from the year 2013 amounted to Rp286,733 million. This decrease is attributed to the significant increase of Claim expenses, underwriting expenses and tax expenses.

### Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi tahun 2014 tercatat sebesar Rp459.591 juta dan mengalami kenaikan sebesar Rp173.899 juta atau secara persentase mengalami peningkatan sebesar 60,87% dari tahun 2013 sebesar Rp285.692 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penempatan investasi yang jumlahnya lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

### Cash Flows From Investing Activities

Cash flows from investing activities in 2013 recorded at Rp459,591 million and an increase of Rp173,899 million or in percentage an increase of 60.87% from 2013 amounted Rp285,692 million. This increase was due to the placement of investment, which was increased compared to the previous year.

### Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Pada akhir tahun 2014, terdapat arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp250.000 juta.

### Cash Flows From Financing Activities

By the end of 2014, cash flows from financing activities, amounted Rp250,000 million.

## ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG

Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari 2013 yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio utang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio/DER*). Rasio DER tahun 2014 berada pada level 279% sedangkan rasio DER tahun 2013 sebesar 341,27%. Penurunan tersebut disebabkan pertumbuhan ekuitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan utang selama tahun 2014.

## ANALYSIS OF DEBT PAYING ABILITY

The Company's ability in fulfilling debt liability in 2014 increase from 2013 as indicated by the decline in debt to equity ratio (DER). DER ratio in 2014 stood at 279% while the ratio of DER in 2013 amounted to 341.27%. The decrease was due to higher equity growth compared with the growth of debt during 2014.

## STRUKTUR MODAL

Saham perusahaan dimiliki oleh PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan besaran modal yang ditetapkan sebesar Rp1.800.000.000.000 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah) dengan modal Disetor sebesar Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga miliar rupiah). Selain komponen modal tersebut, Perusahaan membentuk cadangan umum dan cadangan tujuan. Cadangan umum ditujukan untuk mengatasi kekurangan dana akibat dari kegiatan operasional sedangkan cadangan tujuan ditujukan untuk belanja modal. Kedua cadangan tersebut terus ditingkatkan setiap tahunnya guna memperkuat struktur modal perusahaan.

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, batas minimal modal Disetor untuk perusahaan asuransi adalah sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah). Adanya peraturan ini diharapkan dapat menyehatkan industri asuransi dan meningkatkan retensi perusahaan terhadap risiko yang dipertanggungjawabkan. Bila melihat angka-angka di atas, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan telah mematuhi peraturan OJK terkait batas minimal modal setor.

## KEBIJAKAN STRUKTUR PERMODALAN

Pada tahun 2014 PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) memberikan tambahan Modal Disetor sebesar Rp250 miliar. Tambahan modal disetor ini diharapkan akan banyak memberikan manfaat buat para *stakeholders* NASIONAL RE, khususnya bagi Pemegang Saham dan industri asuransi/reasuransi secara umum.

## INVESTASI BARANG MODAL

Belanja modal perusahaan pada tahun 2014 sebesar Rp5.305 juta yang digunakan untuk bangunan kantor sebesar Rp3.402 juta, Komputer sebesar Rp1.532 juta, perabot kantor sebesar Rp212 juta, kendaraan roda dua sebesar Rp32 juta dan *software* sebesar Rp128 juta.

## IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BELANJA MODAL

Perusahaan tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi belanja modal pada tahun 2014.

## KENAIKAN PENDAPATAN ATAU BEBAN YANG MATERIAL

Selama tahun 2014, PT Reasuransi Nasional Indonesia tidak memiliki peningkatan pendapatan atau beban yang material.

## Capital Structure

The Company owned by PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia with capital amount of Rp1,800,000,000,000 (one trillion eight hundred billion rupiahs) with a paid up capital of Rp463,000,000,000 (four hundred and sixty-three billion rupiahs). In addition to the capital, the Company has general reserves and appropriated reserves. General reserves are intended to address the shortage of funds as a result of operational activities while the appropriated reserves are intended for capital expenditure purposes. Both reserves increase each year in order to strengthen the Company's capital structure.

With due observance to FSA regulations, the minimum paid up capital for insurance companies amounted to Rp200,000,000,000 (two hundred billion rupiahs). The regulation is intended to nourish the insurance industry and improve the companies retention to the risk insured. Based on the figures above, it can be concluded that the Company has complied with the FSA regulations concerning minimum paid up capital.

## CAPITALIZATION STRUCTURE POLICY

In 2014, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) provided additional Paid-up Capital of Rp250 billion. These additional paid-in capital is expected to provide many benefits for the stakeholders of NASIONAL RE, particularly for shareholders and give positive impact on the insurance/reinsurance industry in general.

## CAPITAL GOODS INVESTMENT

The Company's capital expenditure in 2014 amounted to Rp5,305 million used for office buildings of Rp3,402 million, computer of Rp1,532 million, Office furniture of Rp212 million, four-wheeled vehicles of Rp32 million and software of Rp128 million.

## MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL EXPENDITURE

In 2014, the Company made no material commitment for capital expenditure.

## MATERIAL INCREASE IN INCOMES OR EXPENSES

During the year 2014, PT Reasuransi Nasional Indonesia does not have an material increase in incomes or expenses.

### **DAMPAK PERUBAHAN HARGA**

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2014 terjadi inflasi sebesar 8,36%, karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Inflasi tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap jalannya bisnis maupun kinerja finansial perusahaan.

### **INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN**

Tidak terdapat fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

### **KEBIJAKAN DIVIDEN**

Dalam 5 (lima) tahun terakhir perusahaan tidak pernah melakukan pembagian deviden kepada Pemegang Saham, hal ini atas persetujuan Pemegang Saham dengan tujuan agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja usahanya serta memperkuat struktur keuangan perusahaan.

### **KONTRIBUSI KEPADA NEGARA**

Bentuk komitmen PT Reasuransi Nasional Indonesia kepada Negara diwujudkan dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan dalam Pajak. Kontribusi Perusahaan kepada Negara terkait dengan pajak pada tahun 2014 sebesar Rp18.689 juta atau mengalami peningkatan sebesar 115% jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp8.689 juta.

### **DERIVATIF DAN AKTIVITAS LINDUNG NILAI**

Pada tahun 2014 PT Reasuransi Nasional Indonesia tidak menghadapi risiko pasar atas perubahan tingkat suku bunga dan tidak menggunakan instrumen derivatif sehubungan dengan aktivitas manajemen risiko. PT Reasuransi Nasional Indonesia juga tidak menggunakan atau menerbitkan instrumen derivatif untuk tujuan diperdagangkan pada tahun 2014.

### **REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM**

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan bukan perusahaan publik sehingga tidak ada informasi yang perlu diungkapkan terkait dana hasil penawaran umum.

### **INFORMASI KEUANGAN LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI**

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.

### **EFFECT OF PRICE CHANGES**

Based on Central Statistics Agency (BPS) report, inflation rate in 2014 was 8.36%, due to rising of fuel prices. Inflation has no effect on the course of business and financial performance of the Company.

### **MATERIAL FACTS AND INFORMATION AFTER THE DATE OF ACCOUNTANT'S REPORT**

There are no material facts to disclose after date of the accountant's report.

### **DIVIDEND POLICY**

In the last 5 (five) years, the Company has never distributed a dividend to shareholders and it has been approved by shareholders, in order to enable the Company to improve its business performance and strengthen its financial structure.

### **CONTRIBUTIONS TO THE NATION**

As a form of commitment of PT Reasuransi Nasional Indonesia to the Nation is realized in the fulfillment of the Company's obligations in Taxes. The Company's contribution to the Nation relating to taxes is 2014 Rp18,689 billion, an increase of 115% compared to the year 2013 amounting to Rp8,689 billion.

### **DERIVATIVES AND HEDGING ACTIVITIES**

In 2014 PT Reasuransi Nasional Indonesia did not exposed to market risk from changes in interest rates and the use of derivative instruments in connection with risk management activities. PT Reasuransi Nasional Indonesia also does not use or issued derivative instruments for trading purposes in 2014.

### **REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING**

As of December 31, 2014, the Company is not a public company and has no information on the use of proceeds from the public offering to disclose.

### **EXTRAORDINARY AND RARE FINANCIAL INFORMATION**

As of December 31, 2014 there have been no financial information that contains events that are exceptional and rare.

## INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Selama tahun 2014 transaksi dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut :

Dengan Pemegang Saham (PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero))

Premi Reasuransi	: Rp175.011,74 juta
Premi Retrosesi	: Rp622,77 juta
Klaim Reasuransi	: Rp11.133,13 juta

## INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG/MODAL

Tidak ada informasi yang material dalam hal Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi Hutang. Namun demikian, dapat disampaikan bahwa untuk permodalan, PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, atau Askrindo, telah memberikan tambahan Modal Setor total sebesar Rp250 Miliar pada tahun 2014, sekaligus dilakukan peningkatan Modal Dasar perusahaan dari Rp400 Miliar menjadi Rp1.8 Triliun.

## PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Selama tahun 2014 tidak ada penerapan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja PT Reasuransi Nasional Indonesia.

## PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

PSAK yang Berlaku Efektif Tanggal 1 Januari 2012 "Dalam tahun 2012 Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI telah menerbitkan PSAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2012 terdiri dari:

- 1) PSAK 10 (Revisi 2010) "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing", PSAK 10 ini menggantikan :
  - a) PSAK 10 (1994): Transaksi dalam mata uang asing
  - b) PSAK 11 (1994): Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing.
  - c) PSAK 52 (1998): Transaksi dalam mata uang asing.
  - d) ISAK 4 : Interpretasi atas paragraf 20 PSAK 10 tentang Alternatif Perlakuan yang diijinkan atas Selisih Kurs.

## MATERIAL TRANSACTION INFORMATION THAT CONTAIN CONFLICT OF INTEREST OR AFFILIATED TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the year 2014, transactions with affiliates are as follows:

With Shareholders (PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero))

Reinsurance Premiums	: Rp175,011.74 million
Retrocession premiums	: Rp622.77 million
Reinsurance Claims	: Rp11,133.13 million

## MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITIONS AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

There is no material information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisitions and Debt Restructuring. However, it is worth noted that PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, or Askrindo has gave additional paid-up capital of Rp250 billion in 2014, hence increased the company's authorized capital from Rp400 billion to Rp1,8 trillion.

## LEGISLATION AMENDMENT AND ITS IMPACT FOR THE COMPANY

During 2014 there was no enactment of laws and regulations that significantly affect the performance of PT Reasuransi Nasional Indonesia.

## CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

SFAS Effectively on January 1, 2012 "In 2012 the IAI Financial Accounting Standards Board issued SFAS that effectively in force as per January 1, 2012 consists of:

- 1) SFAS 10 (Revised 2010) "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", this SFAS 10 replaced:
  - a) SFAS 10 (1994): Transactions in foreign currencies.
  - b) SFAS 11 (1994): Elaboration of Financial Statements in Foreign Currencies.
  - c) SFAS 52 (1998): Transactions in foreign currencies.
  - d) IFAS 4: Interpretation of paragraph 20 of SFAS 10 on Alternative Treatment for permitted Exchange Difference.



- PSAK ini menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi-transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan suatu entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam suatu mata uang pelaporan.
- This SFAS Explains how to enter transactions in foreign currencies and abroad operations in the financial statements of an entity and elaborate financial statements into a currency report.
- 2) PSAK 13 (Revisi 2011) "Properti Investasi"  
PSAK 13 ini menggantikan atau merevisi PSAK 13 (2007) "Properti Investasi"
  - 2) SFAS 13 (Revised 2011) "Investment Property"  
This SFAS 13 replaces or revises SFAS 13 (2007) "Investment Property"
  - 3) PSAK 16 (revisi 2011) "Aset Tetap"  
PSAK 16 ini menggantikan :
    - a) PSAK 16 (2007) : Aset Tetap
    - b) PSAK 47 (1998) : Akuntansi Tanah
 Antara lain menjelaskan mengenai penerapan Cost Model maupun Revaluation Model, harus diterapkan secara konsisten, jika suatu aset tetap direvaluasi maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi.
  - 3) SFAS 16 (revised 2011) "Fixed Assets"  
This SFAS 16 replaces:
    - a) SFAS 16 (2007): Fixed Assets
    - b) SFAS 47 (1998): Accounting of Land
 Among others, explain the implementation of the Cost Model and Revaluation Model, must be implemented consistently, if an asset revalued then all the fixed assets in the same group should be revalued.
  - 4) PSAK 18 (Revisi 2010) "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya" PSAK 18 ini menggantikan PSAK 18 (1994): Akuntansi Dana Pensiun Menjelaskan Laporan Keuangan yang menyajikan :
    - a) Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya;
    - b) Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, yang membedakan antara : vested, non vested dan
    - c) Surplus atau Defisit
    - d) Pengukuran dengan nilai wajar, nilai pasar.
  - 4) SFAS 18 (Revised 2010) "Accounting and Reporting of Post- Employment Benefits" This SFAS 18 replaces SFAS 18 (1994): Accounting of Pension Funds Explaining the Financial Statements that presents:
    - a) The net assets available for post-employment benefits;
    - b) The current actuarial value of promised Post-Employment Benefit, which distinguishes between: vested, non- vested and
    - c) Surplus or Deficit
    - d) Measurement with fair value, market value.
  - 5) PSAK 24 (Revisi 2010): "Imbalan Kerja"  
PSAK 24 ini menggantikan atau merevisi PSAK 24 (2004): Imbalan Kerja  
Mengatur tentang Keuntungan dan Kerugian aktuarial: menggunakan koridor (paragraf 97-98) atau tanpa menggunakan koridor dan diakui dalam pendapatan komprehensif
  - 5) SFAS 24 (Revised 2010) "Employee Benefits"  
This SFAS 24 replaces or revises SFAS 24 (2004): Employee Benefits  
Regulates on Actuarial Gains and Losses: using corridor (paragraphs 97-98) or without the use of corridor and are recognized in comprehensive income.
  - 6) PSAK 26 (Revisi 2011) : "Biaya Pinjaman"  
PSAK 26 ini menggantikan atau merevisi PSAK 26 (2008) : Biaya Pinjaman  
Mengatur tentang beban bunga yang dihitung menggunakan tingkat suku bunga efektif sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2011).
  - 6) SFAS 26 (Revised 2011): "Borrowing Costs"  
This SFAS 26 replaces or revises SFAS 26 (2008): Borrowing Costs  
Regulates the interest expense calculated using the effective interest rate in accordance with SFAS 55 (Revised 2011).
  - 7) PSAK 28 (Revisi 2011): "Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian"
  - 7) SFAS 28 (Revised 2011): "Accounting of Loss Insurance Contracts"

- PSAK 28 ini menggantikan dan atau merevisi PSAK 28 (1996): Akuntansi Asuransi Kerugian  
Menjelaskan apakah suatu kontrak merupakan kontrak asuransi sesuai PSAK 62 atau bukan, apakah merupakan kontrak asuransi kerugian atau jiwa. Menjelaskan tentang risiko asuransi dan risiko lain selain risiko asuransi yang harus dipisahkan.
- 8) PSAK 30 (Revisi 2011): "Sewa"  
PSAK 30 ini menggantikan dan atau merevisi PSAK 30 (2007) : Sewa  
Mengatur dan membedakan tentang sewa antara sewa pembiayaan (*capital lease*) dan sewa operasi (*operating lease*).
- 9) PSAK 33 (Revisi 2011) "Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Umum"  
PSAK 33 ini merevisi dan atau menggantikan PSAK 33 (1994) : Akuntansi Pertambangan Umum "Mengatur akuntansi tentang Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Umum, seperti : Biaya pengupasan lapisan tanah diakui sebagai aset (beban tangguhan). Biaya pengupasan lapisan tanah selanjutnya diakui sebagai beban."
- 10) PSAK 34 (Revisi 2010) "Kontrak Konstruksi"  
PSAK 34 ini menggantikan atau merevisi PSAK 34 (1994): Akuntansi Kontrak Konstruksi  
Biaya kontrak terdiri dari :  
(a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu;  
(b) Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak dan dapat dialokasikan ke kontrak tersebut, biaya pinjaman dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat diatribusikan pada kontrak tertentu. Biaya-biaya yang ditentukan secara spesifik dalam persyaratan kontrak, termasuk biaya administrasi umum dan biaya pengembangan.  
(c) Biaya-biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan ke pemberi kerja sesuai isi kontrak.
- 11) PSAK 36 (Revisi 2011) "Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa"  
PSAK 36 ini menggantikan atau merevisi PSAK 36 (Revisi 1996): Akuntansi Asuransi Jiwa.
- This SFAS 28 replaces and or revises SFAS 28 (1996): Accounting of Loss Insurance  
Explaining whether a contract is an insurance contract in accordance with SFAS 62 or not, whether a loss or life insurance contract. Explaining about the insurance risk and other risks in addition to insurance risk that should be separated.
- 8) SFAS 30 (Revised 2011): "Rent"  
This SFAS 30 replaces and or revised SFAS 30 (2007): Rent Regulate and distinguish about leases between financing leases (capital leases) and operating leases.
- 9) SFAS 33 (Revised 2011): "Activities of Stripping and Environmental Management In General Mining"  
This SFAS 33 revises and or and replaces SFAS 33 (1994): Accounting of General Mining  
"Regulate accounting on Activities of Stripping and Environmental Management In General Mining, such as: The stripping cost recognized as an asset (deferred expenses). The next stripping cost will recognized as an expense.
- 10) SFAS 34 (Revised 2010): "Construction Contracts"  
This SFAS 34 replaces or revises SFAS 34 (1994) : Accounting of Construction Contracts  
The Contract costs consist of:  
(a) Costs that relate directly to the specific contract;  
(b) Costs attributable to contract activity and can be allocated to the contract, borrowing costs attributable to contract activity in general and can be attributed to a particular contract. The costs are defined specifically in terms of the contract, including general administration costs and development costs;  
(c) Other costs that are specifically chargeable to the employer in accordance with the content of the contract.
- 11) SFAS 36 (Revised 2011) "Accounting for Insurance Contracts"  
This SFAS 36 replaces or revises SFAS 36 (Revised 1996) : Accounting for Life Insurance.

- |   |   |
|---|---|
| <p>12) PSAK 45 (Revisi 2011) "Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba"<br/>PSAK 45 ini menggantikan dan atau merevisi PSAK 45 (2007): Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Merupakan penyempurnaan dari PSAK sebelumnya seperti istilah Aktiva Bersih menjadi Aset Neto; Kewajiban menjadi Liabilitas.</p> | <p>12) SFAS 45 (Revised 2011): "Non-Profit Entity Financial Reports"<br/>This SFAS 45 replaces and or revises SFAS 45 (2007) : Nonprofit Organization Financial Reports<br/>A refinement of the previous SFAS such as the term Net Assets become Aset Neto; obligation become Liabilitas.</p>         |
| <p>13) PSAK 46 (Revisi 2010) "Pajak Penghasilan"<br/>PSAK 46 ini menggantikan dan atau merevisi PSAK 46 (2007) : Pajak Penghasilan.</p>   | <p>13) SFAS 46 (Revised 2010): "Income Tax"<br/>This SFAS 46 replaces and or revises SFAS 46 (2007) : Income Tax.</p>   |
| <p>14) PSAK 50 (Revisi 2010): "Instrumen Keuangan Penyajian"<br/>PSAK 50 ini menggantikan dan atau merevisi PSAK 50 (2006) : Instrumen Keuangan Penyajian dan Pengungkapan.</p>   | <p>14) SFAS 50 (Revised 2010): "Financial Instruments Presentation"<br/>This SFAS 50 replaces and or revises SFAS 50 (2006): Presentation and Disclosure of Financial Instruments.</p>  |
| <p>15) PSAK 53 (Revisi 2010) "Pembayaran Berbasis Saham"<br/>PSAK 53 ini menggantikan atau merevisi PSAK 53 (1998): Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham</p>   | <p>15) SFAS 53 (Revised 2010): "Share-Based Payment"<br/>This SFAS 53 replaces or revises SFAS 53 (1998): Accounting for Share-Based Compensation.</p>  |
| <p>16) PSAK (Revisi 2011) 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"<br/>PSAK ini menggantikan dan atau merevisi PSAK 55 (2006): Instrumen keuangan Pengakuan dan Pengukuran.</p>  | <p>16) SFAS 55 (Revised 2011): "Financial Instruments: Recognition and Measurement"<br/>This SFAS 55 replaces and or revises SFAS 55 (2006): Financial Instruments: Recognition and Measurement.</p>  |
| <p>17) PSAK 56 (Revisi 2011) "Laba Per Saham"<br/>PSAK 56 ini menggantikan dan atau merevisi PSAK 56 (1999) : Laba Per Saham</p>  | <p>17) SFAS 56 (Revised 2011): "Earnings Per Share"<br/>This SFAS 56 replaces and or revises SFAS 56 (1999): Earnings Per Share.</p>  |
| <p>18) PSAK 60 (2010) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"<br/>PSAK 60 ini semula merupakan bagian dari PSAK 50 (2006) : Instrumen Keuangan Penyajian dan Pengungkapan.</p>   | <p>18) SFAS 60 (2010): "Financial Instruments: Disclosures"<br/>This SFAS 60 was originally a part of the SFAS 50 (2006): Financial Instruments: Presentation and Disclosure.</p>   |
| <p>19) PSAK 61 (2011) "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Perlengkapan Bantuan Pemerintah"<br/>Hibah dengan pendekatan modal, dianggap sebagai modal donasi<br/>Hibah dengan pendekatan penghasilan, hibah dianggap sebagai income.</p>   | <p>19) SFAS 61 (2011): "Accounting for Government Grants and Government Assistance Equipment"<br/>Grants with capital approach, is considered as capital donations.<br/>Grant with income approach, is considered as income.</p>  |
| <p>20) PSAK 62 (2011) "Kontrak Asuransi"<br/>Menjelaskan apakah suatu kontrak merupakan kontrak asuransi sesuai PSAK 62 atau bukan, apakah merupakan kontrak asuransi kerugian atau jiwa. Menjelaskan tentang risiko asuransi dan risiko lain selain risiko asuransi yang harus dipisahkan.</p>         | <p>20) SFAS 62 (2011): "Insurance Contracts"<br/>Explaining whether a contract is an insurance contract in accordance with SFAS 62 or not, whether a loss or life insurance contract. Explaining about the insurance risk and other risks in addition to insurance risk that should be separated.</p> |
| <p>21) PSAK 63 (2011) "Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hyperinflasi"</p>   | <p>21) SFAS 63 (2011): "Financial Reporting in Economics Hyperinflation"</p>  |

Laporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi disajikan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. Pos-pos terkait di periode sebelumnya disajikan dalam unit pengukuran nilai kini pada akhir periode pelaporan. Laba atau rugi posisi moneter neto diakui di laporan laba rugi dan diungkapkan terpisah.

The financial statements in hyperinflation economy are presented in the current measuring unit at the end of the reporting period. Posts related in the previous period are presented in the current measuring unit at the end of the reporting period. Profit or loss in net monetary position is recognized in the income statement and disclosed separately.

- 22) PSAK 64 "Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi Pada Pertambangan Sumber Daya Mineral" PSAK 64 ini menggantikan :
- PSAK 29 (1994) : Akuntansi Minyak dan Gas Bumi
  - PSAK 33 (1994) : Akuntansi Pertambangan Umum untuk pengaturan yang terkait dengan aktivitas eksplorasi dan aktivitas pengembangan dan konstruksi. Entitas sedang melakukan penelaahan atas PSAK-PSAK tersebut di atas dalam rangka penerapannya sepanjang relevan dengan praktek-praktek yang dilaksanakan di perusahaan asuransi dan reasuransi.

- 22) SFAS 64: "Activities of Exploration and Evaluation on Mineral Resources"
- This SFAS 64 replaces:
- SFAS 29 (1994): Accounting for Oil and Gas
  - SFAS 33 (1994): Accounting for the General Mining settings related to exploration activities and development activities and construction. Entities are conducting a review of the SFAS mentioned above in the context of its implementation as along as it is relevant with the practices implemented in the insurance and reinsurance companies.

## KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) DAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

### Hasil Evaluasi Key Performance Indicator

Hasil evaluasi *Key Performance Indicator* (KPI) dari yang ditargetkan dalam kontrak manajemen terhadap realisasinya dengan laporan keuangan perusahaan per tanggal 31 Desember 2014 total skor sebesar 101,8 dari target 100.

### Tingkat Kesehatan Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang tingkat kesehatan perusahaan Badan Usaha Milik Negara, hasil evaluasi menunjukkan tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2014 mencapai skor 75,0 dengan tingkat kesehatan "**Sehat A**".

## KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) AND THE SOUNDNESS OF THE COMPANY

### Evaluation results of Key Performance Indicators

The Key Performance Indicator (KPI) evaluation result of the targeted in the management contract towards the realization with the Company's financial statements as per December 31, 2014, a total score of 101.8 out of 100.

### Soundness of the Company

Under Decree No. PER-04/MBU/2013 date August 19, 2013 concerning the soundness of State-Owned Enterprises, the evaluation results show the soundness of the Company in 2014 achieved a score of 75,0 with a level of "**Healty A**".



## PROSPEK USAHA

Berdasarkan hasil analisis eksternal dan internal perusahaan, melalui perhitungan aspek peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan pada posisi akhir tahun 2014, dapat ditentukan posisi perusahaan dalam *Grand Strategy Matrix*.

Dari penilaian tersebut diperoleh nilai *resultante* antara kekuatan (S) dan kelemahan (W) adalah positif 0,96 dan nilai *resultante* antara peluang (O) dan ancaman (T) adalah positif 1,25 masing-masing dalam rentang skala antara -4 sampai dengan +4. Kedua angka tersebut di plot ke dalam matrik dengan axis sebagai sumbu intern dan ordinat sebagai sumbu ekstern, sehingga diperoleh koordinat (0,33 : 0,83), posisi perusahaan dimaksud berada pada kuadran I, yaitu *Growth*.

Dari penjabaran di atas menunjukkan bahwa saat ini perusahaan memiliki kemampuan internal yang cukup kuat dan peluang yang ada melebihi ancaman terhadap perusahaan. Dengan memperhatikan hasil pemetaan perusahaan dan arah pengembangan perusahaan yang telah ditetapkan, mengindikasikan perusahaan telah dalam posisi tumbuh (*Growth*). Keadaan ini apabila dikembangkan maka perusahaan akan menuju ke arah pertumbuhan yang lebih baik lagi dengan cara mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada.

Berpijak pada posisi Perusahaan saat ini, sebagaimana terlihat dalam bagan matrik strategi di bawah ini, menunjukkan sebagai Perusahaan yang bertumbuh. Karena itu prospek usaha NASIONAL RE ke depan masih tetap menjanjikan.

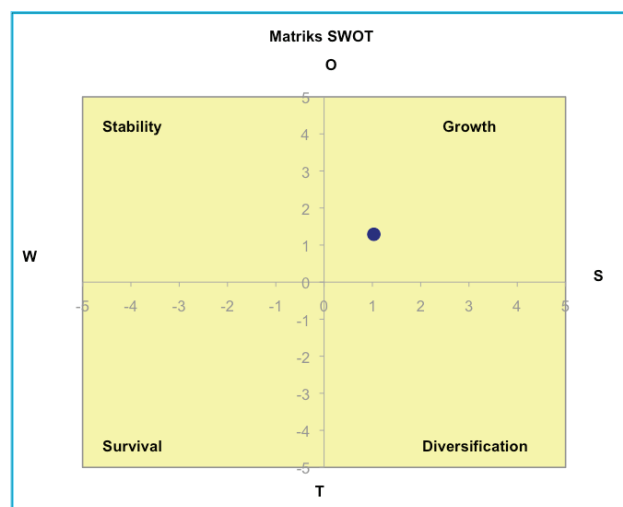
## BUSINESS PROSPECTS

Based on the Company's internal and external analysis, through the calculation aspect of opportunities, threats, strengths and weaknesses in the position of the end of 2014, the Company's position can be determined in the Grand Strategy Matrix.

Of the assessment obtained resultant value between strength (S) and weaknesses (W) is positive 0,96 and resultant value between opportunities (O) and threats (T) is positive 1,25 each in the scale range between -4 to +4. Both of these figures plotted into a matrix with axis as internal axis and ordinate as external axis, thus obtain the coordinates of (0,33 : 0,83), the position of the Company is located in quadrant 1 (*Growth*).

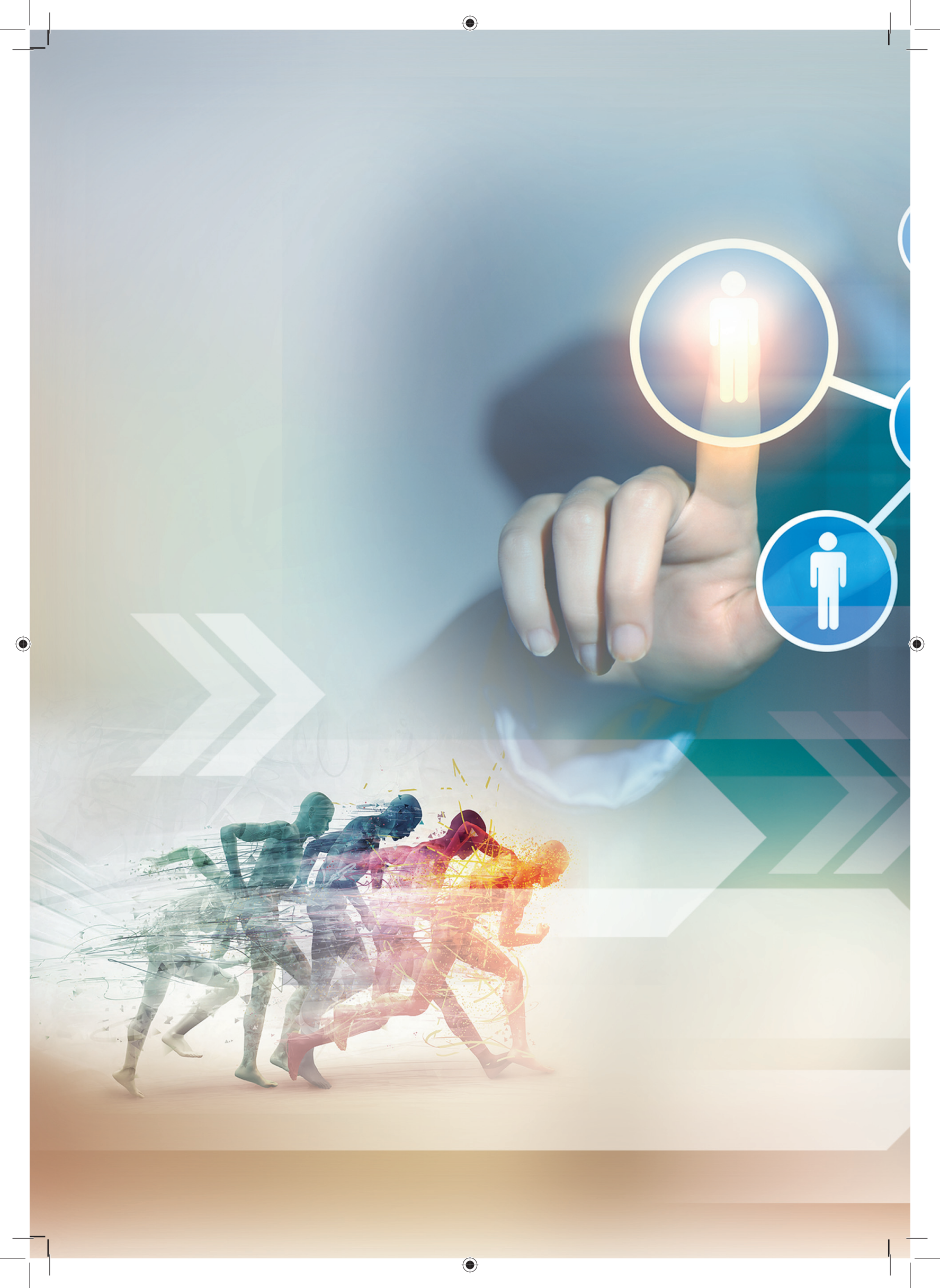
From the explanation above shows that currently the Company has a strong internal capabilities and opportunities exceed threats towards the Company. With regard to the outcome of the mapping of the Company and development direction of the Company that has been established, indicating the Company has in a position to grow (*Growth*). This situation when developed then the Company will move toward better growth by optimizing the power of and take advantage of opportunities that exist.

Based on the Company's current position, as seen in the strategy matrix chart below, shows as a growing Company. Hence NASIONAL RE business prospects ahead remain promising.













bagian-05/chapter-05  
**Tata Kelola Perusahaan**  
Good Corporate Governance

## PENDAHULUAN

### Tujuan Tata Kelola Perusahaan

Upaya peningkatan kualitas pengelolaan perusahaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan sebuah prioritas bagi NASIONAL RE. Hal ini diyakini dapat lebih menjamin kelangsungan usaha Perusahaan untuk jangka panjang. Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di Perusahaan dilaksanakan secara bertahap, yakni tahap persiapan, tahap implementasi dan tahap evaluasi.

Tujuan penerapan GCG di Perusahaan adalah:

1. Mencapai sasaran usaha Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas-asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan.
3. Menjadikan organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan kewenangannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.
4. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat (*Corporate Social Responsibility*).
5. Optimalisasi nilai perusahaan bagi Pemegang Saham maupun Pemangku kepentingan lainnya.
6. Peningkatan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional.

### Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan GCG

Sebagai anak perusahaan dari PT Askrindo (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bisnis asuransi, maka penyusunan tata kelola perusahaan di NASIONAL RE sudah selanjutnya juga mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peraturan nomor PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, serta Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKKG).

## PREFACE

### Objectives of Corporate Governance

Improving the quality of Company's management based on Good Corporate Governance principle has become a priority for NASIONAL RE. We believe, this will ensure the Company's long-term business sustainability. The implementation of Good Corporate Governance in the Company is done gradually covering preparation phase, implementation phase and evaluation phase.

Objectives of GCG Implementation in the Company, among others:

- 1) To achieve the Company's business target through a management based on Good Corporate Governance principle.
- 2) To empower function and independency of each Company's body.
- 3) To encourage the Company's body in making decision and exercising authority inferred by high moral value and compliance with law and regulation.
- 4) To implement Corporate Social Responsibility to the society.
- 5) To optimize corporate values for the Shareholders and other Stakeholders.
- 6) To increase the Company's competitiveness both in national and international level.

### GCG Policy Framework

As a subsidiary of PT Askrindo (Persero), a State-Owned Enterprise (SOE) operated in insurance business, the preparation of corporate governance in NASIONAL RE is also referring to Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 regarding Good Corporate Governance Implementation in State Owned Enterprise (SOE), Regulation No. PER – 09/MBU/2012 as the amendment of Minister of State Owned Enterprise Regulation No. PER – 01/MBU/2011, as stated under Financial Service Authority Regulation No. 2/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance Implementation for Insurance Company and Indonesian Good Corporate Governance Manual published by National Committee of Governance Policy (KNKKG).



### Pernyataan Komitmen

NASIONAL RE juga telah menerbitkan Surat Keputusan Manajemen tentang *Code of Conduct*, Pedoman *Good Corporate Governance*, Piagam Direksi dan Komisaris, Pedoman Transparansi dan *Disclosure*, Piagam Internal Audit, Piagam Komite Audit dan Piagam Sekretaris Perusahaan. Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama ini diterbitkan pada tahun 2005. Hal ini membuktikan kuatnya komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG.

Pedoman *Good Corporate Governance* yang disusun oleh Perusahaan bersifat dinamis dan selalu berkembang sesuai tuntutan pasar dan praktik-praktik terbaik dalam industri asuransi. Untuk penyempurnaannya, Perusahaan senantiasa melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG dan menggunakan hasil penilaian tersebut sebagai dasar untuk pengembangannya di masa depan. Perusahaan juga telah membentuk Tim pemantau GCG yang tugasnya mengevaluasi hasil audit penilaian GCG.

Selanjutnya, NASIONAL RE bermaksud untuk melakukan penyempurnaan atas Panduan GCG Perusahaan sejalan dengan diterbitkannya UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No.39 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, yang kemudian di perbaharui melalui PP No. 81 tahun 2008. Saat penyusunan Panduan ini telah dikeluarkan konsep PMK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk Perusahaan Perasuransian, yang telah diedarkan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaannya.

### Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

NASIONAL RE tidak memiliki peraturan yang mengharuskan pejabatnya menyampaikan laporan harta kekayaan (LHKPN) hingga level 2 di bawah Direksi dan penyampaian Gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi, sebagai bagian dari komitmen Perusahaan dalam mendukung gerakan anti korupsi, terdapat peraturan internal yang mewajibkan karyawan untuk melaporkan hal-hal terkait gratifikasi kepada Direksi.

### Statements of Commitment

NASIONAL RE has also issued Management Decree on Code of Conduct, Good Corporate Governance Manual, Board of Directors and Board of Commissioners Charter, Transparency and Disclosure Manual, Internal Audit Charter, Audit Committee Charter and Corporate Secretary Charter. The Statement was signed by President Commissioner and President Director and issued in 2005. This proven firm commitment of the Company in implementing the GCG principle.

Good Corporate Governance Manual prepared by the Company is dynamic and adaptable according to market demand and best practices in insurance industry. To improve this Manual, the Company continuously performs self-assessment of GCG implementation and addresses the result for the basis of future development. The Company also has established GCG Monitoring Team with a duty to evaluate GCG assessment audit result.

In addition, NASIONAL RE (later stated as the Company) also aims to improve the Company's GCG Manual in line with the issuance of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Company and Government Regulation No. 39 of 2008 as second amendment of Government Regulation No. 73 of 1992 concerning insurance business practice, which was later revised under Government Regulation No. 81 of 2008. During this Manual preparation, PMK concept on Good Corporate Governance for Insurance Company has also been published, to be disseminated and acquired suggestion from several parties to improve this manual.

### Guideline on State Apparatus Assets Reporting

NASIONAL RE does not implement particular regulation mandated the Executives to submit State Apparatus Assets Reporting (LHKPN) to Second Level below the Board of Directors and Gratification Report to Corruption Eradication Commission (KPK). Hence, as part of our commitment to support anti-corruption initiative, the Company has implemented an internal regulation which requires the employees to report gratification-related issues to the Board of Directors.

## Roadmap Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Agar implementasi GCG di Perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan pedoman-pedoman atau aturan tertulis yang memuat tentang kebijakan dan praktek GCG, atau biasa disebut sebagai *soft structure*, serta pengaturan-pengaturan lainnya agar Perusahaan dapat tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan etis. Karena implementasi GCG bukan merupakan hal yang sederhana maka pelaksanaannya harus direncanakan dengan baik dan terukur. Hal ini dicapai dengan menyusun *roadmap* penerapan GCG.

Tujuan penyusunan *roadmap* penerapan GCG di Perusahaan adalah untuk menumbuhkan komitmen manajemen dalam menerapkan GCG secara konsisten dan terukur, serta untuk penyempurnaan *soft structure* GCG. Penyempurnaan *soft structure* ini akan meningkatkan tanggung jawab manajemen dalam menjaga segenap kepentingan *stakeholders*.

Semenjak dibangun dan diterapkannya GCG di lingkungan NASIONAL RE, Direksi telah menetapkan Kerangka Pembangunan dan Penerapan GCG dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2005-2009, periode 2009-2013 dan periode 2013-2017. Secara berkala Perusahaan melakukan penilaian GCG untuk melihat seberapa jauh perkembangannya.

## Corporate Governance Implementation Road Map

That the GCG implementation in the Company can be properly executed, written manuals or guideline are needed which disclose GCG policy and prices, or known as *soft-structure*, as well as other relevant regulations that the Company always complies with prevailing Law as well as sound and ethical corporate principle. GCG Implementation is not a simple aspect to be done that has to have adequate planning and measure. This will be achieved by formulating GCG implementation road map.

Objective of the GCG implementation road map preparation is to foster the management's commitment to implement GCG in consistent and measured manners, as well as to improve GCG soft structure. The soft structure improvement will improve the management's responsibility in maintaining the *stakeholders'* interest.

Ever since the establishment and implementation of GCG in NASIONAL RE circumstances, the Board of Directors has assigned GCG Development and Implementation Framework on the Company's Long-Term Plan for 2005-2009 Period, 2009-2013 and 2013-2017 period. The Company gradually undertakes GCG assessment to oversee the progress of the GCG practice.



Penilaian tahun buku 2012 yang dilakukan oleh konsultan independen untuk versi OJK dilakukan pada tahun 2013 oleh ISEA dengan skor 85 dan untuk tahun 2013 yang dilakukan tahun 2014 untuk versi OJK telah dilakukan self assesment dengan skor 88,21; sedangkan *self assesment* GCG tahun 2014 dengan skor 90,64

Result of GCG Assessment for fiscal year 2012 done by independent consultant for OJK Version was carried out in 2013 by ISEA with score of 85 and in 2013 was carried out in 2014, for OJK version through a self-assessment with score of 88.21; meanwhile, GGC self-assessment for 2014 achieved score of 90.64.

## Konsistensi Pelaksanaan GCG

Penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan merupakan komitmen Perusahaan yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan usaha, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham maupun kepentingan *stakeholders* lainnya, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika bisnis. Itu sebabnya Perusahaan tidak hanya sekedar memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan saja, namun secara bersungguh-sungguh menerapkannya dalam segala kegiatan yang dijalankannya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran.

### a. Prinsip Transparansi

Transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Transparansi diperlukan agar Perusahaan menjalankan bisnis secara objektif dan sehat.

Prinsip transparansi/keterbukaan (*stakeholder*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. Implementasi prinsip transparansi memungkinkan *Stakeholders* dapat melihat bagaimana Perusahaan dikelola, bagaimana proses pengambilan suatu keputusan dan bagaimana pelaksanaan pertanggung-jawaban atas keputusan yang dibuat oleh Perusahaan. Keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban Perusahaan untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan, Reasuradur dan Pelanggan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Implementasi prinsip transparansi yang dilakukan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan mempunyai kebijakan tersendiri untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh Pemangku kepentingan.
- b. Perusahaan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas dan akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai haknya. Informasi yang diungkapkan antara lain Laporan Tahunan, Laporan Keuangan yang

## Consistency of GCG Implementation

Consistent and ongoing GCG implementation becomes the Company's commitment intended to secure the Company's business continuity as well as to maintain balance between the interest of shareholders and other stakeholders, by complying with prevailing Law and business ethics. Therefore, the Company is not only committed to have compliance with Law and Regulation but also drives firm implementation in every activity according to GCG principles which are Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness.

### a. Transparency Principle

Transparency adopts adequate as well as accessible information disclosure and provision for the stakeholders. Transparency is required that the Company will run its business in objective and sound manners.

Transparency (*stakeholders*) principle refers to transparency in the decision making process and transparency in disclosure and provision of relevant information about the Company, which is accessible by the Stakeholders in accordance with prevailing Law and standards, principles and sound business practice. Implementation of transparency principle will enable the Stakeholders to observe how the Company is managed, the decision making process and the implementation of accountability on the decision made by the Company. Information disclosure does not eliminate the Company's obligation to protect confidential information about the Company, Reinsurers and Customers referring to Law and Regulation.

Implementation of transparency principle carried out by the Company is including:

- a. The Company has an autonomous policy to disclose range of important information required by the Stakeholders.
- b. The Company discloses information in timely, adequate, clear and accurate manners as well as comparable and accessible by the stakeholders according to their rights. Information disclosed are namely Annual Report, published Financial Statements and other information.

dipublikasikan dan lain-lain. Asas transparansi yang dianut Perusahaan tidak mengurangi kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai Perusahaan.

#### **b. Prinsip Akuntabilitas**

Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Implementasi prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki uraian tugas, tanggung jawab yang jelas dari organ Perusahaan dan seluruh pegawai selaras dengan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan.
2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh pegawai Perusahaan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya serta memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Perusahaan memiliki struktur, sistem dan SOP yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance*.
4. Perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif.
5. Organ perusahaan dan seluruh pegawai Perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berpegang teguh pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

#### **c. Prinsip Responsibilitas**

Dalam hubungan dengan asas responsibilitas (*responsibility*), Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

Implementasi prinsip responsibilitas yang dilakukan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Organ Perusahaan dan seluruh jajarannya harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan, perundang-undangan, anggaran dasar, serta peraturan perusahaan
2. Perusahaan harus melaksanakan isi perjanjian yang dibuat, terutama pada pemenuhan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian reasuransi.
3. Perusahaan harus bertindak sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

The transparency principle adhered by the Company does not eliminate an obligation to protect corporate confidential information.

#### **b. Accountability Principle**

Accountability refers to clarity of functions inside the organization including the mechanism to deliver the accountable of these functions. The Company shall be able to present accountability report of its performance in transparent and fair manners.

Implementation of accountability principle undertaken by the Company is including:

- 1) The Company has a clear description of duties and responsibilities of Company's bodies as well as employees in line with the Corporate vision, mission and values, business objectives and strategies.
- 2) Members of Board of Commissioners and Board of Directors as well as the employees have competencies according to each role in exercising Good Corporate Governance.
- 3) The Company has established structure, system and SOP to ensure the implementation of check and balance mechanism.
- 4) The Company has an effective internal audit system.
- 5) Company's bodies and employees has to firmly uphold agreed code of conduct and business ethics in carrying out their duties and responsibilities.

#### **c. Responsibility Principle**

Regarding the responsibility principle, the Company has to comply with Law and Regulation as well as deliver a responsibility to the society and environment that will maintain long-term business sustainability and acquire a reputation as good corporate citizen.

Implementation of responsibility principle carried out by the Company is including:

- 1) Company's bodies and all management has to uphold prudent principle and ensure the compliance with Law, Articles of Association and other corporate regulations.
- 2) The Company has to execute provision in the agreements made, mainly to fulfill rights and obligations stated in the reinsurance contract.
- 3) The Company has to conduct as a good corporate citizen.



#### d. Prinsip Independensi

Dalam hubungan dengan asas independensi (*independency*), Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

Implementasi prinsip independensi yang dilakukan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing organ Perusahaan beserta jajarannya harus menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan.
2. Masing-masing organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
3. Seluruh jajaran Perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya.

#### e. Prinsip Kewajaran

Kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan baik internal maupun eksternal yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan Perusahaan yang sehat. Perusahaan menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) akan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi prinsip kewajaran yang dilakukan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan,
- Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan
- Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

#### d. Independency Principle

In relation with independency principle, the Company has to be managed independently that each of the Company's body and management are prohibited to dominate each other nor interfered by any party.

Implementation of independency principle carried out by the Company is including:

- 1) Each of Company's body and management has to prevent domination from any party, not being interfered by certain interest and free from conflict of interest.
- 2) Each of Company's body has to carry out function and duty according to Articles of Association and other prevailing Law.
- 3) All of the Company's management has to carry their functions and duties based on duty and responsibility description.

#### e. Fairness Principle

Fairness refers to equality, balance and fair treatment in fulfilling Stakeholders' rights both internally and externally arising from Agreements, Law as well as ethical values and standards, principle and sound corporate management practice. The Company guarantees that every Stakeholders will receive fair treatment without any discrimination according to prevailing Law and regulation.

Implementation of fairness principle carried out by the Company is including:

- The Company has to provide fair and equal treatment to the stakeholders.
- The Company has to provide an opportunity to all stakeholders to give recommendation and deliver aspiration on behalf of the Company's interest.
- The Company has to provide equal opportunity in employee recruitment, career planning as well as assignment to carry their duty professionally without discriminating ethnicity, religion, race and groups.

## Infrastruktur GCG

Dalam rangka implementasi asas-asas GCG, pada bulan Juni 2005 NASIONAL RE telah menerbitkan Surat Keputusan Manajemen yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama tentang *Code of Conduct*, Pedoman *Good Corporate Governance*, Piagam Direksi dan Komisaris, Pedoman Transparansi dan *Disclosure*, Piagam Internal Audit, Piagam Komite Audit dan Piagam Sekretaris Perusahaan.

1. Surat Keputusan Manajemen PT Reasuransi Nasional Indonesia Nomor 01/KEP/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang *Code Of Conduct*, Pedoman *Good Corporate Governance*, Pedoman Direksi dan Komisaris, Transparansi dan *Disclosure*, Piagam Internal Audit, Piagam Komite Audit, Piagam Sekretaris Perusahaan.
2. Addendum Perubahan Surat Keputusan Manajemen PT Reasuransi Nasional Indonesia Nomor 01/KEP/VI/2005 tanggal 26 Juli 2005 tentang *Code of Conduct*, Pedoman *Good Corporate Governance*, Pedoman Direksi dan Komisaris, Transparansi dan *Disclosure*, Piagam Internal Audit, Piagam Komite Audit dan Piagam Sekretaris Perusahaan.
3. Surat Keputusan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia Nomor 02/KEP/KOM/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005 tentang Piagam Komite Audit,
4. Surat Keputusan Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia Nomor 25/KEP/DIR/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005 tentang Piagam Internal Audit,
5. Surat Keputusan Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia Nomor 26/KEP/DIR/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005 tentang Piagam Sekretaris Perusahaan.

## Hasil Assessment GCG 2014

Hasil *assessment* implementasi GCG di perusahaan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. *Self Assessment GCG* versi OJK tahun 2014 dengan skor: 90,64
2. *Assessment GCG* versi Kementerian BUMN tahun 2014 oleh Konsultan eksternal dengan skor : 83,08

### Hasil Assesment Lainnya:

1. Hasil Assessment Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) tahun 2014 dengan skor total 420,25
2. Audit IT Cobit 4.1 tahun 2014 dengan skor total 2,38 (skala 1-5)
3. Pemeringkatan perusahaan tahun 2014 oleh PEFINDO dengan predikat <sub>id</sub>A

## GCG Infrastructure

Regarding the implementation of GCG principles, NASIONAL RE has issued Management Decree in June 2015 signed by President Commissioner and President Director regarding Code of Conduct, Good Corporate Governance Manual, Board of Directors and Board of Commissioners Charter, Transparency and Disclosure Manual, Internal Audit Charter, Audit Committee Charter and Corporate Secretary Charter.

1. PT Reasuransi Nasional Indonesia Management Decree No. 01/KEP/VI/2005 dated June 1, 2005 regarding Code of Conduct, Good Corporate Governance Manual, Board of Directors and Board of Commissioners Board Manual, Transparency and Disclosure, Internal Audit Charter, Audit Committee Charter, Corporate Secretary Charter.
2. Addendum of PT Reasuransi Nasional Indonesia Management Decree No. 01/KEP/VI/2005 dated July 26, 2005 regarding Code of Conduct, Good Corporate Governance Manual, Board of Directors and Board of Commissioners Board Manual, Transparency and Disclosure, Internal Audit Charter, Audit Committee Charter, Corporate Secretary Charter.
3. PT Reasuransi Nasional Indonesia Commissioner Decree No. 02/KEP/KOM/VII/2005 dated July 26, 2005 on Audit Committee Charter.
4. PT Reasuransi Nasional Indonesia Directors Decree No. 25/KEP/DIR/VII/2005 dated July 26, 2005 on Internal Audit Charter.
5. PT Reasuransi Nasional Indonesia Directors Decree No. 26/KEP/DIR/VII/2005 dated July 26, 2005 on Corporate Secretary Charter.

## Result of GCG Assessment 2014

Result of GCG Implementation assessment in the Company is classified into 2 (two) types, among others:

1. GCG Self Assessment 2014 by Indonesia Financial Services Authority with score of 90.64
2. GCG Assessment 2014 by SOEs Ministry carried out by external consultant with a score: 83.08

### Other Assessment Results:

1. Assessment based on Criteria for Business Performance Excellence 2014 scored 420.25
2. IT Audit Cobit 4.1 in 2014 scored 2.38 (scales: 1-5)
3. Company rating 2014 by PEFINDO, with predicate <sub>id</sub>A

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan Perusahaan meliputi pembahasan: Persetujuan laporan tahunan; Persetujuan proyeksi laporan keuangan; Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP); serta Persetujuan penggunaan Laba Bersih perusahaan.

Pembahasan atas usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seseorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Selain itu terdapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

### Ketentuan

- 1) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua Pemegang Saham dan semua Pemegang Saham menyetujui diadakannya RUPS maka RUPS dapat mengambil keputusan dengan suara bulat.
- 2) Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah;
  - b. Dewan Komisaris.
- 3) Permintaan untuk penyelenggaraan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa diajukan melalui surat tercatat, disertai alasan-alasannya, diantaranya namun tidak terbatas pada:
  - a. Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan berakhir;
  - c. Dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dengan Perusahaan.
- 4) Surat tercatat sebagaimana butir 3 di atas disampaikan oleh Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

## GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS

### General Meetings of Shareholders

General Meetings of Shareholders (GMS) held by the Company includes several discussions on: Annual Report approval, financial report projection approval, Budget Plan (RKAP) approval and approving distribution of the Company's Net Income.

Discussion on recommendations proposed by the Board of Commissioners and/or one or more Shareholders representing 1/10 (one per tenth) shares issued by the Company with legal voting rights under a requirement that records of respective party has to be received by the Board of Directors before Annual General Meetings of Shareholders (AGM) announcement date. In addition, the Company also held Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGM) at any time according to the Company's needs.

### Procedure

1. If in the GMS attended and/or represented by Shareholders and entire Shareholders approves the GMS implementation that GMS is authorized to take legitimate resolution.
2. Implementation of Annual and/or Extraordinary GMS can be done under proposal from:
  - a. One or more Shareholders representing 1/10 (one per tenth) shares issued by the Company with legal voting rights;
  - b. Board of Commissioners.
3. Proposal to implement Annual and/or Extraordinary GMS under registered letter, attached with the reasons, including but not limited on following conditions:
  - a. Board of Directors does not held Annual GMS according to prevailing regulation;
  - b. Tenure of Board of Directors and/or Board of Commissioners will be ended if;
  - c. The Board of Directors is failed or facing conflict of interest with the Company
4. The registered letter as mentioned in point 3 is presented by the Shareholders with a copy to the Board of Commissioners.

- 5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
  - 6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka:
    - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, atau;
    - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.
  - 7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
  - 8) RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi berdasarkan pemanggilan RUPS sesuai butir 5 di atas hanya membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana butir 3 di atas dan mata acara lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
  - 9) RUPS yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pemanggilan RUPS sesuai butir 6b dan butir 7 di atas hanya membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana butir 3 di atas.
  - 10) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang 15 (lima belas) hari sebagaimana butir 5 dan butir 7, maka Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri tempat kedudukan Perusahaan.
  - 11) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
  - 12) Pemanggilan RUPS dilakukan melalui surat tercatat dan/ atau dengan iklan dalam surat kabar.
  - 13) Dalam pemanggilan RUPS, dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibahas dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
  - 14) Perusahaan wajib memberikan salinan bahan/materi sesuai butir 13 kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta.
5. The Board of Directors announced GMS invitation the latest 15 (fifteen) days after the GMS implementation proposal is accepted.
  6. If the Board of Directors did not deliver GMS invitation:
    - a. GMS proposal from the Shareholders is repropoed to the Board of Commissioners, or:
    - b. The Board of Commissioners to announce separate GMS invitation.
  7. The Board of Commissioners has to announce GMS invitation the latest 15 (fifteen) days after the GMS proposal is received.
  8. GMS held by the Board of Directors is based on GMS invitation as stated on point 5 that only discussed several issues related with the reason declared in the point 3 as well as other agenda deemed necessary by the Board of Directors.
  9. GMS held by the Board of Commissioners is based on GMS invitation as stated in point 6b and 7 only discussed on several issues related with reasons declared in point 3.
  10. Should the Board of Directors or Board of Commissioners fail to call for GMS during 15 (fifteen) days period as stated in point 5 and 7, then the Shareholders who request the GMS can make the call by themselves upon permission from the Chairman of the State Court at the Company domicile.
  11. The invitation to GMS should be delivered not later than 14 (fourteen) days prior to the date of the GMS by excluding the date of the summon and the date of the meeting.
  12. GMS invitation is delivered through registered mail and/ or advertisement in newspaper.
  13. The GMS invitation should mention the date, time, location and agenda to be discussed of the meeting attached with an announcement that the agenda that will be discussed in the GMS is available in the Company's office since the GMS invitation to the GMS implementation date.
  14. The Company should provide copy of the agenda/ material according to point 13 to the Shareholders free of charge, if requested



- 15) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan dalam butir 11, 12 dan 13, maka keputusan RUPS tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
- 16) Dalam setiap RUPS, risalah wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) oleh Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 17) Tandatangan sebagaimana butir 16 tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.
- 18) Risalah RUPS memuat hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan (termasuk perbedaan pendapat/*dissenting opinion* jika ada).
- 19) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar menentukan lain.
- 20) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- 21) Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 22) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
- 23) Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) *alternative* dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan 1 (satu) *alternative* dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
15. In the event that the invitation is not in accordance with the provisions in point 11, 12 and 13, the resolution of GMS shall remain valid if the GMS is attended by all shareholders with valid voting rights and the resolution is unanimously agreed.
16. In every GMS, the Minutes of Meetings has to be made and signed by Meeting Chair and at least 1 (one) shareholder appointed from the GMS participant.
17. The signage, as stated in point 16 is not required if the GMS minutes of meetings are made through notarial deeds.
18. The Minutes of Meetings discloses every aspects discussed and decided (including any dissenting opinion).
19. The GMS can be held if at least attended or represented by 51% (fifty one per cent) of the shares with legal voting rights, except stated different under Law and/or Articles of Association.
20. The shareholders, either directly or represented with letter of attorney, are entitled to attend the GMS and use their voting rights according to amount of their shares.
21. Every resolution is agreed under collective consensus principle.
22. If the collective consensus is failed to be achieved, the resolution is considered legitimate if has been approved by more than ½ (one per two/half) of voting submitted, except stated different in Articles of Association.
23. If the recommendation contains more than 2 (two) alternatives and voting result did not come up with 1 (one) alternative supported by more than ½ (one per two/half) of the voting submitted, another voting will be carried on 2 (two) alternatives with most voting that one of the recommendations will be voted with more than ½ (one per two/half) of total voting submitted by the Shareholders and also might take legitimate resolution without implementing physical GMS, by the mechanism that all of Shareholders have approved on the recommendation under written statement and signed the statement. The resolution taken in respective way has equal force with a legitimate resolution taken in the GMS.

## Pokok-Pokok Keputusan RUPS dan RUPSLB tahun 2014

Pokok-pokok keputusan RUPS dan RUPSLB tahun 2014 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan tahun 2013;
2. Penambahan Modal Disetor sebesar Rp250 Miliar;
3. Peningkatan Modal Dasar menjadi sebesar Rp1.8 Triliun;
4. Pengesahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun 2015;
5. Pembentukan Komite Pengarah Audit Internal.

## Tindak Lanjut Atas Rekomendasi RUPS 2013

Perusahaan selama tahun 2014 telah melaksanakan hal-hal yang direkomendasikan Pemegang Saham dalam RUPS 2013, antara lain:

1. Perusahaan menerapkan *prudent underwriting* dalam kegiatan bisnisnya serta meningkatkan selektifitas dalam memilih *cedant/mitra* bisnis.
2. Perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip *security*, *profitability* dan *liquidity* dalam penempatan investasinya.
3. Selama tahun 2014 Perusahaan terus mengupayakan :
  1. Peningkatan implementasi *Good Corporate Governance*
  2. Peningkatan peran Satuan Pengawas Internal
  3. Peningkatan konsep Kriteria Penilaian Kerja Unggul (KPKU)
4. Perusahaan telah melaksanakan kegiatan Bina Lingkungan sebagai kegiatan *Corporate Social Responsibility*.
5. Perusahaan telah menindaklanjuti semua temuan dan saran-saran sebagaimana Laporan Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern yang disampaikan oleh KAP Soeijatna, Mulyana & Rekan.

## Key Resolution of 2014 GMS and EGMS

Below are explained key resolution of GMS and EGMS held in 2014:

- (1) Legalization of Annual Financial Statements 2013;
- (2) Additional paid-in capital at Rp250 billion;
- (3) Additional authorized capital to Rp1,8 trillion.
- (4) Legalization of Corporate Budget Plan 2015.
- (5) Establishment of Internal Audit Steering Committee.

## Follow Up on Recommendation from 2013 GMS

In 2014, the Company has followed up the recommendations provided by the Shareholders in the GMS 2013, among others:

1. The Company adopted prudent underwriting in its business activities and increase selectivity in choosing cedant/business partners.
2. The Company has paid attention to the principles of security, profitability and liquidity in its investment placement.
3. In 2014 the Company continued to:
  1. Improving the implementation of Good Corporate Governance
  2. Improving the role of Internal audit Unit
  3. Improving the concept of Criteria for Business Performance Excellence (KPKU).
4. The Company has performed Community Development activities as part of Corporate Social Responsibility.
5. The Company has followed up all the findings and suggestions stipulated in the Audit Reports on the Compliance on Legislation and Internal Control presented by KAP Soeijatna, Mulyana & Partners.

## DEWAN KOMISARIS

### Acuan Hukum

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mewajibkan semua perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia untuk memiliki Dewan Komisaris. Sesuai UU tersebut, tugas dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas pengelolaan dan kebijakan yang dibuat oleh manajemen perusahaan, serta memberi masukan terkait kedua hal tersebut. Dewan Komisaris NASIONAL RE secara bertanggung jawab melakukan fungsi pengawasan dan fungsi konsultasi sesuai peraturan yang berlaku, untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan garis besar kebijakan perusahaan.

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya Pasal 28 ayat (3), mensyaratkan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### Piagam Dewan Komisaris

NASIONAL RE telah menyusun Piagam Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai panduan kerja bagi Dewan Komisaris, yang disatukan ke dalam *Board Manual* Untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

### Tugas dan Kewajiban

Tugas dan kewajiban Komisaris Perusahaan tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan Akta Notaris Umaran Mansjur, SH Nomor 12 tanggal 8 Agustus 2008. Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Sedangkan kewajiban Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.

## BOARD OF COMMISSIONERS

### Legal Framework

Law No. 40 of 2007 on Limited Company (“UUPT”) mandates all Company established under Indonesian Law to have a Board of Commissioners. Pursuant to the Law, duty of the Board of Commissioners is to supervise the management and policy made by the Company’s management and to provide recommendation on both aspects. Board of Commissioners of NASIONAL RE is in charge to carry monitoring function and consultancy function according to prevailing law, on behalf of the Company’s interest and complies with corporate policy framework.

Law No. 19 of 2003 regarding State Owned Enterprise, particularly stated in Article 28 point (3) required that serving period of Board of Commissioners is 5 (five) years and may be reappointed for another 1 (one) serving period.

### Board of Commissioners Charter

NASIONAL RE has prepared Board of Commissioners charter functioned as working guideline for the Board of Commissioners, attached in the Board Manual for Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board.

### Duty and Responsibility

Duty and Responsibility of the Commissioners are stated on Articles of Association under Notarial Deeds of Notary Umaran Mansjur, SH No. 12 dated August 8, 2008. The Board of Commissioners in in charge to perform monitoring on the management policy, general Company’s management practice both related with the Company or its business commenced by the Board of Directors as well as providing advise to the Board of Directors, including monitoring on Long-Term Plan, Budget Plan, Articles of Association and Shareholders Aspiration as well as other prevailing law on behalf of the Company’s interest and in line with the Company’s vision and mission.

In addition, responsibility of the Board of Commissioners, including:

- (1) Providing advice to the Board of Directors in carrying out managerial duty;

2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RJP dan RKAP) yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RJP dan RKAP) mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan perusahaan.
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
9. Membentuk Komite Audit.
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
11. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
12. Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain.
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

Sebagai perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan, maka Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada RUPS. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, khususnya prinsip akuntabilitas. Selain itu, kinerja Dewan Komisaris harus dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang dituangkan dalam KPI Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan dalam RUPS.

- (2) Observing and reviewing as well as signing Long-Term Plan and Budget Plan prepared by the Board of Directors, According to the Articles of Association.
- (3) Providing advice and recommendation to the GMS regarding Long-Term Plan and Budget Plan concerning reason of the Board of Commissioners in signing Long-Term Plan and Budget Plan.
- (4) Concerning progress of the Company's activity, providing advice and recommendation to the GMS regarding every issue considered necessary on the Company's management.
- (5) Immediately reporting the GMS if any Company's performance declining trend occurs.
- (6) Observing and reviewing periodic and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report.
- (7) Providing an explanation, recommendation and advice to the GMS regarding the Annual Report, if proposed.
- (8) Preparing annual working plan and included in the Company's Budget Plan.
- (9) Establishing Audit Committee.
- (10) Proposing Public Accountant to the GMS.
- (11) Preparing Board of Commissioners Minutes of Meetings and administering the copy.
- (12) Delivering report to the Company regarding his and/or his families shares ownership in this or other companies.
- (13) Providing report to GMS regarding audit duty done during latest fiscal year.
- (14) Undertaking other responsibilities in relation with monitoring and advisory duties, as not violating Law, Articles of Association and/or GMS resolution.

As embodiment of accountability in the Company's management monitoring, the Board of Commissioners has to deliver their accountability in implementing their duties and responsibilities to the GMS. This is also in line with GCG principles, mainly accountability principle. In addition, performance of the Board of Commissioners has to be evaluated based on performance appraisal elements stated in the Board of Commissioners KPI to be later on presented in the GMS.



## Wewenang

Setiap anggota Dewan Komisaris NASIONAL RE, baik secara individu maupun secara kolektif, memiliki kewenangan terkait pelaksanaan tugas dan kewajibannya, yakni:

- a. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen penting perusahaan.
- b. Memeriksa kas perusahaan untuk keperluan verifikasi dan keperluan lain terkait kegiatan pengawasan.
- c. Memeriksa kekayaan atau inventaris perusahaan.
- d. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dimiliki atau dipergunakan oleh Perusahaan.
- e. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi, mengenai segala persoalan menyangkut pengelolaan perusahaan.
- f. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
- g. Meminta penjelasan mengenai segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
- h. Memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- i. Membentuk komite, jika dianggap perlu, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
- j. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban perusahaan, jika dianggap perlu.
- k. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
- m. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
- n. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
- o. Menunjuk dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris.

## Pembagian Tugas

Komisaris Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) orang, salah satunya bertindak sebagai Komisaris Utama merangkap anggota, seorang Komisaris dan satu orang Komisaris Independen. Komisaris memiliki latar belakang dan keahlian yang sesuai untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Direksi dalam pengelolaan Perusahaan. Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara kolejal.

## Authority

Every member of Board of Commissioners in NASIONAL RE, has an authority both individually and collegially regarding the duty and responsibility implementation, among others:

- a. Checking books, letters and other corporate important documents.
- b. Checking the Company's cash for verification and other assignments related with monitoring activity.
- c. Checking the Company's assets or inventory.
- d. Entering yard, building and office owned or occupied by the Company.
- e. Proposing an explanation from the Board of Directors and/or other Executives under the Board of Directors regarding every issues mainly related with the Company's management.
- f. Proposing the Board of Directors and/or other Executives with a concern of Board of Directors to attend Board of Commissioners meeting.
- g. Proposing explanation on every policy and action done or will be implemented by the Board of Directors.
- h. Dismissing member of BOD according to provision stated in Articles of Association.
- i. Establishing committee, if considered necessary, by concerning the Company's capabilities.
- j. Hiring Expert Staff for certain aspects and time period charged as the Company's expenses, if considered necessary.
- k. Performing management activity in certain condition and period according to provision stated in Articles of Association.
- l. Exercising other authorities as long as not violating the Laws, Articles of Association and/or GMS Resolution.
- m. Attending Board of Directors meetings and providing comment on matters discussed.
- n. Executing other supervisory authority, provided that not in the contrary to prevailing rules and the Articles of Association and or Resolution from the GMS.
- o. Appoint and dismiss Secretary of the Board of Commissioners.

## Separation of Duty

The Board of Commissioners consists of 3 (three) members, namely one President Commissioner, one commissioner and one independent commissioner. The commissioners have appropriate background education and experience to carry out their duties and responsibilities to oversee the implementation of BOD duties in managing the Company. The BOC performs their duties collegially.

## Susunan Dewan Komisaris

Pengangkatan Komisaris berlaku sejak tanggal 1 Juni 2012, berdasarkan SK Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia No.73/KEP/DIR/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia.

## Board of Commissioners Composition

Board of Commissioners' appointment is valid since June 1, 2012, referring to PT Asuransi Kredit Indonesia BOD Decree No. 73/KEP/DIR/VI/2012 dated June 1, 2012 regarding Board of Commissioners Appointment and Dismissal in PT Reasuransi Nasional Indonesia. Below the composition of Board of Commissioners in 2014:

No.	Nama/Name	Jabatan Saat Ini/Current Position	Jabatan Sebelumnya/Previous positions	Pendidikan/Education
1.	Rinarno Pramudiyanto	Komisaris Utama/ President Commissionner	Kepala Divisi/Division Head	S-2
2.	Sulaeman	Komisaris/Commissionner	Kepala Divisi/Division Head	S-2
3.	Raymond Buisson	Komisaris Independen/ Commissionner Independent	Direktur Jakarta Insurance Institute/ Director of Jakarta Insurance Institute	S-1

Berikut susunan Dewan Komisaris perusahaan tahun 2014:  
 Komisaris Utama : Rinarno Pramudiyanto, SE, MM, CRGP  
 Komisaris : Sulaeman, SE, MM, AAAIK, AIIS  
 Komisaris Independen : Raymond Buisson, SE, CRGP

Following the Board of Commissioners in 2014:  
 President Commissioner : Rinarno Pramudiyanto, SE, MM, CRGP  
 Commissioner : Sulaeman, SE, MM, AAAIK, AIIS  
 Independent Commissioner : Raymond Buisson, SE, CRGP

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris NASIONAL RE telah sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melebihi jumlah Direksi, yakni sebanyak 3 (tiga) orang, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen.

Number and composition of NASIONAL RE Board of Commissioners have complied with the regulation which prohibited to more than number of Directors, which is 3 (three) members, including 1 (one) Independent Commissioner member.

No	Nama/Name	Jabatan Di Perusahaan/ Position in the Company	Jabatan Yang Dirangkap/The positions concurrently
1.	Rinarno Pramudiyanto	Komisaris Utama/ President Commissionner	Kepala Divisi Manajemen Bisnis PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia/ Division Head Business Management PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia
2.	Sulaeman	Komisaris/Commissionner	Kepala Divisi Akuntansi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia/ Division Head Accounting PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia
3.	Raymond Buisson	Komisaris Independen/ Commissionner Independent	-

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan memenuhi ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas serta prinsip-prinsip GCG.

All of BOC members have integrity, competency and adequate financial reputation and also complies with Limited Company Law and GCG principles.

NASIONAL RE mewajibkan Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik di Perusahaan maupun di perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak mempunyai saham di perusahaan lain.

NASIONAL RE mandates the Board of Commissioners to disclose share ownership either in the Company or other companies domiciled in Indonesia and overseas by means of a report which has to be annually updated. Every member of Board of Commissioners serving in current period does not have shareownership in other companies.

Dewan Komisaris Perusahaan tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain

The Board of Commissioners also does not take decision and/or receive personal interest remuneration and facility

remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Tidak seorang pun anggota Dewan Komisaris NASIONAL RE yang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain yang bertentangan dengan peraturan perundangan. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

### **Pernyataan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris**

Komposisi Dewan Komisaris NASIONAL RE telah mencerminkan keberagaman baik dari sisi kompetensi, edukasi, maupun pengalaman yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris sebaik mungkin.

### **Pernyataan Independensi Komisaris**

Sebagai perwujudan dari upaya menjaga independensi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Perusahaan telah menunjuk seorang Komisaris Independen, yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. Selain itu, adanya Komisaris Independen dapat mendorong terciptanya hubungan kerja yang lebih objektif dan fair, yang mampu menjaga kesetimbangan antara kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Seorang Komisaris Independen harus mampu menghindari benturan kepentingan dan mampu bertindak independen, tidak mempunyai kepentingan lain yang berbenturan dan dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun hubungan terhadap Direksi.

### **Rangkap Jabatan Komisaris**

Selama tahun 2014 Dewan Komisaris Perusahaan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan. Dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang dikeluarkan Regulator, Dewan Komisaris Perusahaan tidak merangkap jabatan eksekutif pada perusahaan lain.

as determined in the GMS.

There is no member of NASIONAL RE Board of Commissioners serving in other position as Commissioner, Director or Executive Officers, which may encourage law violation.

All of Board of Commissioners members are domiciled in Indonesia.

### **Statements of Board of Commissioners Diversity**

Composition of NASIONAL RE Board of Commissioners has reflected unity both from competency, education or experience aspect to support the implementation of Board of Commissioners' function in duty.

### **Independent Commissioner Statement**

As the realization of an effort to maintain independency of Board of Commissioners monitoring function implementation, the Company has appointed an Independent Commissioner, without financial, managerial, shareownership and or family relationship to second degree with other members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders in a commitment which might interfere ability to act independently. In addition, Independent Commissioner is also assumed to establish more objective and fair working environment, has to balance interest of stakeholders and other stakeholders. An Independent Commissioner has to prevent conflict of interest and having ability to act independently, without conflict of interest which may constraint independent and critical duty implementation both in commitment with Board of Commissioners or in the relationship with the Board of Directors.

### **Board of Commissioners Dual Position**

During 2014, the Board of Commissioners has carried out its obligation properly in accordance with the duties and authority given. In the implementation of Good Corporate Governance and compliance with regulations issued by regulators, the Board of Commissioners hold no executive positions at other companies concurrently.

## Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Selama tahun 2014 Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris 2014 dengan RKA Dewan Komisaris tahun 2014 sebagaimana berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI
2. Melaksanakan Rapat Dewan Komisaris
3. Melakukan Pengawasan dan Perkembangan Kegiatan Perusahaan
4. Memberikan nasihat/masukan/pengarahan kepada Direksi
5. Menyampaikan laporan/pendapat/saran kepada Pemegang Saham dan/atau RUPS
6. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan kepada pemegang saham

## Ketentuan Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diadakan paling sedikit setiap bulan sekali. Dewan Komisaris berhak mengundang Direksi untuk hadir dalam rapat tersebut. Rapat Dewan Komisaris dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris. Semua keputusan dalam rapat diupayakan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi, dalam hal tidak tercapai mufakat melalui musyawarah, maka keputusan rapat dapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan Rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Sesuai Panduan Kerja Dewan Komisaris, agenda dan materi rapat harus disampaikan kepada Dewan Komisaris selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat berlangsung. Hal ini agar Dewan Komisaris memiliki kesempatan untuk menelaah informasi atau bila perlu untuk meminta informasi tambahan sebelum rapat dilaksanakan.

## Rapat Dewan Komisaris

### a. Rapat Internal Dewan Komisaris atau dengan Komite Audit

Rapat Internal Dewan Komisaris atau dengan Komite Audit antara lain membahas evaluasi terhadap hasil kinerja Perusahaan, pengembangan usaha dan *review* atas Struktur Organisasi Perusahaan dan berbagai permasalahan yang lain. Selama tahun 2014 Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal Dewan Komisaris atau dengan Komite Audit sebanyak 6 (enam) kali pertemuan dengan rata-rata kehadiran 100%. Rincian kehadiran sebagai berikut:

## Implementation of Board of Commissioners Duty

In 2014, the Company has exercised its duty according to Board of Commissioners Budget Plan for 2014 and 2013 Board of Commissioners Budget Plan, among others:

1. Preparing Budget Plan and KPI
2. Implementing Board of Commissioners Meeting.
3. Monitoring and reviewing the Company's activity.
4. Providing advice, suggestion/recommendation to the Board of Directors.
5. Submitting the report/suggestion/recommendation to the Shareholders and/or GMS.
6. Submitting report on the monitoring duty to the shareholders.

## Board of Commissioners Meeting Procedure

Board of Commissioners is commenced at least every month. The Board of Commissioner might also invite the Board of Directors to attend the meeting. The Board of Commissioners meeting is declared legitimate and illegible to take bounding decision if attended or represented by more than half of Board of Commissioners members. Every resolution is taken under collective consensus principle. Hence, if collective consensus failed to be achieved, the meeting decision will be taken considering the most voting. Every Meeting's decision is mandatory for all of Board of Commissioners members.

According to Board of Commissioners Board Manual, the meeting agenda, meeting agenda and material have to be delivered to the Board of Commissioners at least (three) working days before the meeting. This aimed that the Board of Commissioners to have an opportunity to observe additional information before the meeting is started.

## Board of Commissioners Meeting

### a. Board of Commissioners Internal Meeting with Audit Committee

Board of Commissioners Internal Meeting or with Audit Committee among others discusses the evaluation of the Company's performance target, business development and review on Organization Structure and other issues. In 2014, the Board of Commissioners held 6 (six) Board of Commissioners Internal Meeting or with Audit Committee with 100% attendance level. Detail of the attendance is as follows:



Nama/Name	Jabatan/Position	Jumlah Rapat/Number of Meetings	Kehadiran (%) / Attendance (%):
Rinarno Pramudiyanto	Komisaris Utama/President Commissioner	6	100
Sulaeman	Komisaris/Commissioner	6	100
Raymond Buisson	Komisaris Independen/Independent Commissioner	6	100

#### b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi antara lain membahas hasil kinerja Perusahaan, pengembangan usaha dan berbagai permasalahan yang lain. Selama tahun 2014 Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 13 (tiga belas) kali pertemuan dengan rata-rata tingkat kehadiran 90%. Rincian kehadiran sebagai berikut:

#### b. Board of Commissioners Meeting with Board of Directors

Board of Commissioners and Directors also discuss the Company's performance, business development and other issues. In 2014, The Board of Commissioners and Board of Directors held 13 (thirteen) joint meetings with 90% average attendance level

Detail of the attendance is as follows:

Nama/Name	Jabatan/Position	Jumlah Rapat/Number of Meetings	Jumlah Kehadiran/ Number of attendance:	% Kehadiran/Attendance (%):
Rinarno Pramudiyanto	Komisaris Utama/President Commissioner	13	12	92%
Sulaeman	Komisaris/Commissioner	13	11	84,6%
Raymond Buisson	Komisaris Independen/ Independent Commissioner	13	13	100%
M. Shaifie Zein	Direktur Utama/President Director	13	11	84,6%
Edhie Mulyono	Direktur Operasi/Operation Director	13	13	100%
Rusdianto	Direktur Keuangan & SDM/ inance & HR Director	13	11	84,6%

#### Pandangan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2015

Dewan Komisaris menilai bahwa RKAP Tahun 2015 menunjukkan gambaran yang cukup wajar dan realistis, baik dari asumsi yang ditetapkan maupun sasaran usaha dan rencana kegiatan usaha; dan disesuaikan dengan proyeksi tahun 2014 serta kondisi internal dan eksternal perusahaan.

Dewan Komisaris mendukung RKAP Tahun 2015 tersebut untuk dapat disetujui dan disahkan oleh Pemegang Saham sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan tahun 2015, dengan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan target premi tahun 2015 sebesar Rp3,4 Triliun atau 74,99% dari proyeksi realisasi tahun 2014, Direksi diminta untuk tetap melakukan selektifitas dan *prudent*

#### Recommendation on Corporate Budget Plan 2015 from Board of Commissioners

Board of Commissioners views that Corporate Budget Plan 2015 has fair and realistic condition, both from assumption implemented or aligned with 2014 projection as well as other internal and external condition in the Company.

The Board of Commissioners supports the Corporate Budget Plan 2015 and also might be approved and legalized by the Shareholders as the Company's Activity Implementation Manual 2015, with following objectives:

- (1) Premium target in 2015 to Rp3,4 trillion or 74.99% from the project realized in 2014. The Board of Directors was proposed to selectively and prudently continue prudent

*underwriting* dalam pemilihan bisnis; serta mengarahkan bisnis ke struktur portofolio dengan tingkat risiko yang menguntungkan untuk seluruh *Class of Business* (CoB).

2. Bisnis fakultatif dinilai memberikan kontribusi hasil *underwriting* yang cukup baik, sehingga Direksi diminta untuk terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan portofolio bisnis fakultatif dengan tetap memperhatikan aspek *prudent underwriting* dalam pemilihan bisnis.
3. Dalam upaya mengoptimalkan Hasil *Underwriting*, Direksi diminta untuk meningkatkan pengendalian klaim (*claim ratio*) melalui penerapan manajemen risiko sampai pada level transaksional dan pengendalian internal yang lebih baik.
4. Direksi diminta untuk terus berupaya memperoleh skim retrosesi yang sesuai dengan profil risiko yang dihadapi perusahaan.
5. Dalam pengelolaan investasi, Direksi diminta untuk tetap menempatkan investasi pada portofolio yang tergolong dalam kategori *admitted asset*, likuid dan aman, serta memberikan hasil yang optimal.
6. Memperhatikan target pertumbuhan pendapatan premi tahun 2015 cukup tinggi; Direksi diminta untuk memperhatikan *collection ratio* penagihan piutang premi secara optimal.
7. Beban usaha tahun 2015 dianggarkan tumbuh 27,24%; Direksi diminta untuk tetap mengendalikan realisasi beban usaha melalui disiplin anggaran dan sedapat mungkin untuk setiap pengeluaran dikaitkan dengan pendapatan.
8. Untuk meningkatkan mutu pengelolaan perusahaan, Direksi diminta:
  - Mengkaji ulang, melengkapi dan menyempurnakan seluruh sistem dan pedoman operasional perusahaan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan aspek manajemen risiko.
  - Meningkatkan efektifitas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko yang berbasis *four eyes system*; meningkatkan fungsi dan peran Satuan Pengawas Intern (SPI) guna mendukung manajemen dalam melakukan fungsi pengawasan internal perusahaan, serta terus meningkatkan implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU).

*underwriting in business selection with acceptable risk level for all Class of Business.*

- (2) *Facultative business is assumed to provide positive underwriting result, that the Board of Directors is proposed to continue improve and develop faculty business portfolio by always complying with prudent underwriting aspect in business selection.*
- (3) *To optimize Underwriting Result, the Board of Directors is proposed to improve claim ratio complaint by implementing risk management to transactional level and internal control report which has been considered good.*
- (4) *The Board of Directors is suggested to continue in having a retrocession based on the risks profile occurred according to the Company.*
- (5) *In managing investment, the Board of Directors has to place investment in portfolio classified as admitted, liquid and secure assets, while also several result provides optimum result.*
- (6) *Concerning that premium income growth in 2015 will remained high, the Board of Directors has been applied to concern collection ratio with trade premium receivables ratio optimally.*
- (7) *Operating expense in 2015 (estimated grew by 27.24%; the Board of Directors is proposed to maintain operating expense realization through budget discipline and seeks to bring efficient spending in accordance with revenue.*
- (8) *To improve the Company's quality management, the Board of Directors is proposed to:*
  - *Review, complete and improve entire operational system and manual in the Company by complying with Good Corporate Governance (GCG) and risk management aspect.*
  - *Improve effectiveness in the implementation of Good Corporate Governance (GCG), Internal Control System, Risk management based on four eyes system, improving Internal Audit Unit function and role to support the management in carrying out internal monitoring function as well as continuously improves implementation of Criteria for Business Performance Excellence (KPKU).*

## Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris lainnya

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas-tugas berikut ini:

1. Pengendalian Manajemen Risiko
2. Implementasi GCG

## Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris perusahaan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

## Implementation of other Board of Commissioners Duties

Other than above activities, the Board of Commissioners also exercised below assignment:

- (1) Risk management transfer
- (2) GCG implementation

## Assessment on the Board of Commissioners Performance

Result of the Board of Commissioners performance appraisal in 2014 is done among others:

No.	Aspek/Aspect	Hasil Penilaian/Results Assessment
1.	Perencanaan/Planning Menyusun Rencana Kerja, Anggaran serta KPI Tahun 2014, yang menjadi bagian dari RKAP Tahun 2014/ Prepare Action Plan, Budget and KPI for 2014, as part of Corporate Budget Plan 2014.	5
2.	Pengawasan & Monitoring/Controlling & Monitoring 1) Melakukan Review dan Analisis Laporan Keuangan Bulanan/Conduct Review and Analysis on Monthly Financial Statement 2) Melakukan Review dan Tanggapan RKAP Tahun 2014/Conduct Review and Response on the Corporate Budget Plan 2014. 3) Rapat Internal Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris dengan Direksi /Internal Meeting of the Board of Commissioners and Joint Meeting between BOC and BOD. 4) Memberikan nasehat/saran kepada Direksi yang mencakup 6 bidang, yaitu:/Provide advice/opinion to BOD, that covers the following six sectors, namely: a. Reasuransi Umum/General Reinsurance b. Jiwa/Life c. Syariah/Sharia d. Keuangan & Investasi/Finance & Investment e. SDM & Umum /HR & General Affairs f. Pengendalian Intern/Internal Control	60
3.	Pelaporan/Reporting 1) Menyampaikan laporan/pendapat/saran kepada Pemegang Saham/RUPS, terdiri dari :/Submitting report/opinion /suggestion to Shareholders/GMS, consisted of: a. Tanggapan atas Laporan Tahunan tahun 2013 /Response on Annual Report 2013. b. Tanggapan atas Kinerja Triwulanan tahun 2014 /Response on Quarterly Performance Statement in 2014 c. Laporan khusus atau rekomendasi lainnya kepada Pemegang Saham (jika ada hal penting/harus dilaporkan)/Special Report or other recommendation to shareholders (for matters of urgency/need to be reported) 2) Menyampaikan Laporan tentang pelaksanaan tugas Tahunan 2013 yang menjadi bagian dari Laporan Tahunan 2013/Submitting Annual Report on the implementation of duties in 2013, as part of the Annual Report 2013.	15
4.	Dinamis/Dynamic 1) Pengenalan dan Peningkatan Kompetensi/Induction and Competence Enhancement Program 2) Realisasi KPI Korporasi (Aspek Keuangan, Operasional dan Dinamis)/Realization of Corporate KPI (Financial, Operational and Dynamic Aspect)	15
		95

## Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 yang selanjutnya diajukan dan diputuskan dalam RUPS, dimana untuk realisasinya akan mempertimbangkan prestasi KPI Direksi dan Dewan Komisaris.

## Board of Directors and Board of Commissioners Mechanism and Legalization

The determination of Board of Commissioners's remuneration refers to Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2014 where the recommendation is addressed and approved in the GMS, where the realization has considered Board of Directors and Board of Commissioners KPI achievement.

### Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2014

Remunerasi Dewan Komisaris (termasuk Sekretaris Dewan Komisaris) meliputi gaji dan tunjangan-tunjangan serta tantiem yang telah dibayarkan pada tahun 2014 adalah Rp2.256.107.273 dengan rincian sebagai berikut:

a. Gaji/Salary	Rp1.060.704.000
b. Tunjangan & Tantiem/Allowance and Incentives	Rp1.195.403.273
Total	Rp2.256.107.273

### Board of Commissioners Remuneration 2014

Board of Commissioners remuneration (including Secretary of Board of Commissioners) including salary and allowance and incentives paid in 2014 amounted to Rp2,256,107,273 with detail as follows:

### Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Selama tahun 2014 Dewan Komisaris mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi, seminar atau *workshop*, yang dapat disajikan sebagai berikut:

### Board of Commissioners Competency Development Program

In 2014, the Board of Commissioners has participated in various training, conference, seminar, workshop with detail illustrated below:

No	Nama/Name	Jabatan/Position	Workshop/Training/seminar	Penyelenggara/Organizer	Tempat/Venue
1.	Rinaro Pramudiyanto	Komisaris Utama/ President Commissioner	- 27th Conference Of The East Asian Insurance Congress (EAIC)/27th Conference Of The East Asian Insurance Congress (EAIC)	EAIC Committee	Taipei
2.	Sulaeman	Komisaris/Commissioner	- E-Procurement sebagai upaya pengendalian Intern/E-Procurement as internal Control	Asosiasi Auditor Internal (AAI)/ Association of Internal Auditor (AAI)	Surabaya
			- Membangun Integritas Pengelolaan Perusahaan/ Building the Integrity in Managing Company	Media Pekerja BUMN SOEs Employee Media	Bandung
3.	Raymond Buisson	Komisaris Independen/ Independent Commissioner.	- 20th Indonesia Rendezvous/20th Indonesia Rendezvous	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia/ Indonesian Association of General Insurance	Bali
			- Peran & Tanggungjawab Management GCG/ Role & Responsibility in the Management of GCG	Risk management International (RMI)/Risk management International (RMI)	Batam
			- Peran Strategi Komisaris independen/ Strategic Role of independent Commissioner	Indonesia Senior Executives Association (ISEA)	Jakarta



#### **Bambang Sumarsono**, Sekretaris Dewan Komisaris

Lahir di Rembang, 29 Agustus 1971. Menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1995. Bambang memulai karir sebagai Pelaksana bagian Pertanggungjawaban pada tahun 1996. Sejak Februari 2010 hingga saat ini menjabat Kepala Bagian Investasi pada Divisi Keuangan dan Investasi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia.

*Bambang Sumarsono, Secretary of the Board of Commissioners*  
Bambang Sumarsono, Born in Rembang, August 29, 1971. Graduated his Bachelor degree from the Faculty of Social and Political Sciences in Diponegoro University, Semarang in 1995. Bambang started his career as a Liability Executive in 1996. Since February 2010 to present served as Head of Investment Unit at the Division of Finance and Investment of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia.



## DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan hukum yang berlaku.

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang masing-masing. Akan tetapi dalam melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan, Direksi bertanggungjawab secara kolektif kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja Direksi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

### Acuan Hukum

Selain Anggaran Dasar Perusahaan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi NASIONAL RE senantiasa mengacu pada UU dan peraturan hukum yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu tugas dan tanggung jawab Direksi juga mengacu pada berbagai kebijakan Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas berwenang lainnya yang terkait.

Sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang, Direksi Perusahaan wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan dinyatakan lulus *Fit and Proper Test*, serta memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit atau membuat pailit suatu perusahaan pada saat menjabat sebagai Direksi atau Anggota Dewan Komisaris

## THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is the Company's organ which has a full authorization and responsibility for the management of the Company, for the interest of the Company, in accordance with the intention and objectives of the Company and represent the Company both inside and outside of the court of law in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable law.

Members of The Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS. Each member of the BOD carries out tasks and make decisions in accordance with each role and responsibility. However, in discharging their duties of managing the Company, the Board of Directors collectively accountable to the GMS. Accountability of Directors to the GMS is the embodiment of accountability in the management of the Company, in upholding the GCG principles.

The assessment on the Board of Directors' performance is performed by the Board of Commissioners, either individually or collectively, based on the elements of assessment of BOD. The assessment was conducted at the end of the fiscal year. The results of the assessment of BOD's performance is submitted by BOC in the GMS.

### Legal Reference

Besides the Articles of Association, in discharging their duties and responsibilities, the Board of Directors of NASIONAL RE always refer to the law and regulations, among others:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State Owned Enterprises.
3. The Indonesian Government Regulation No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of State-Owned Enterprises.

In addition, the duties and responsibilities of the Board of Directors also refers to various policies of the Ministry of SOEs, the Financial Services Authority and other regulatory authorities.

As required by law, the Board of Directors shall meet the requirements of integrity, competence and passed the fit and proper test, as well as having good character and morals, never been declared bankrupt or been the directors or commissioners who were responsible for causing a company to go bankrupt within the last 5 (five) years. In addition, the

dalam 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, Direksi juga tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum ditunjuk sebagai Direksi.

Seluruh anggota Direksi NASIONAL RE telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut di atas.

### Piagam Direksi

Aktivitas dan tindakan Direksi dalam mengelola perusahaan diatur dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan hukum dan perundang-undangan. Di luar apa yang tercantum dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan hukum tersebut di atas, maka dilakukan prosedur kerja yang tetap menjunjung prinsip akuntabilitas berdasarkan kesepakatan, persetujuan dan pengaturan antar sesama anggota Direksi. Hal ini dicantumkan dalam Piagam Direksi atau *Board Manual*.

Piagam Direksi disusun untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengambilan keputusan, merampingkan proses birokrasi dalam administrasi dan mendukung peningkatan kinerja Direksi. Piagam ini juga mengatur mekanisme hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris, yang merupakan hubungan kelembagaan, yang artinya senantiasa berlandaskan pada suatu mekanisme yang dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

### Wewenang dan Kewajiban Direksi Secara Kolegial

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS, dalam menjalankan tugasnya, Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan perusahaan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain untuk mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perusahaan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan

Directors have never been found guilty of a criminal act in the financial sector within the last 5 (five) years prior to the appointment as Directors.

All members of the Board of Directors of NASIONAL RE have complied with all the provisions mentioned above.

### Directors' Charter

All activities and actions undertaken by the Board Directors, in managing the company, are stipulated in the Articles of Association, as well as in the laws and regulations. In the case of activities and actions in the management of the Company that are not governed by our Articles of Association or the provisions of the law, procedures are followed that support the principle of accountability through consensus, agreement and/or rules between the members of the BOD.

Board Manual is aimed at expediting the decision making process, reducing bureaucracy in the administration of the Company's management and supporting improvements in performance. This charter also governs the working relationship between the BOD and the BOC, which is an institutional relationship in that it is based on countable management and supervisory mechanisms in accordance with the prevailing provisions.

### Authorities and Duties of the Board of Directors

As set forth in the legislation, Articles of Association and / or resolutions of the GMS, in discharging its duties, the Board of Directors has the authority as follows:

1. Establish the Company's management policies.
2. Organize the delegation of power from the Board of Directors to one or more members of the Board of Directors to decide on behalf of the Board of Directors or to represent the Company in and out of court of justice.
3. Organize the delegation of power from the Board of Directors to one or more of the Company's employee, either individually or collegally to represent the Company in and out of court of justice.
4. Manage employment provision, including salary, pension or retirement benefits and other benefit for employee beyond the obligations required by the law must obtain

terlebih dahulu dari RUPS.

5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan.
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan perusahaan, mengikat perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak-pihak lain dengan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

Sedangkan kewajiban Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
- b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- c. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan.
- d. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
- e. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan perusahaan, serta dokumen keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
- f. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
- g. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan serta laporan mengenai hak-hak perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapus-bukuan piutang.
- h. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
- i. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri

prior approval from the GMS.

5. Appoint and dismiss employee based on the Company's rules and applicable legislation.
6. Appoint and dismiss the corporate secretary.
7. Perform any actions related to the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with the other party and /or other party with the Company, as well as representing the Company on and off the court of justice, with restrictions as stipulated in the legislation, Articles of Association and /or resolution of the GMS .

Liability of the Board of Directors are as follow:

- a. Pursue and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with the intention and purpose.
- b. Prepare Long Term Plans, Corporate Budget Plan and their amendment and submit it to the Board of Commissioners and Shareholders for approval by the GMS, on timely manner.
- c. Provide explanation to the GMS regarding the Company's Long-Term Plan and Work Plan & Budget.
- d. Prepare Shareholder Register, Special Register and Minutes of the GMS, Minutes of the Board of Directors Meeting.
- e. Prepare Annual Report as a form of responsibility of managing the Company, along with the financial statements as referred to in the Law on Corporate Documents.
- f. Prepare Financial Statements based on the applicable Accounting Standards and submit to the Public Accountant to be audited.
- g. Submit the Annual Report, along with the Financial Statement to the GMS for approval and ratification, along with report on the rights of the Company not recorded in the books as a result of write-off of receivables.
- h. Provide explanation to GMS regarding the Annual Report.
- i. Submit the Balance Sheet and Income Statement, which has been approved by the GMS to the Minister of Justice and Human Rights in accordance with the provisions of the legislation.
- j. Report the changes in the composition of Shareholders, the Board of Directors and Board of Commissioners to

- yang membidangi Hukum dan HAM.
- k. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perusahaan.
  - l. Menyimpan di tempat kedudukan perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perusahaan serta dokumen perusahaan lainnya.
  - m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
  - n. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham.
  - o. Menyiapkan susunan organisasi perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
  - p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
  - q. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.
- the Minister of Justice and Human Rights.
- k. Maintain the Register of Shareholders, the Special Register, Minutes of AGM, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners, Minutes of Meeting of the Board of Directors, the Annual Report and financial documents.
  - l. Keep at the domicile of the Company: Shareholders Register, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners, Minutes of Meeting of the Board of Directors, the Annual Report and financial documents of the company and other documents.
  - m. Develop accounting system in accordance with Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially on the management, recording, archiving and monitoring.
  - n. Provide regular reports in the manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and /or the Shareholders.
  - o. Establish the Company's organizational structure, complete with the details and duties.
  - p. Provide an explanation about everything asked or requested the Board of Commissioners and Shareholders.
  - q. Perform other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and the provision determined by the GMS in accordance with the applicable legislation.



## Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direktur

Jumlah anggota Direksi NASIONAL RE berjumlah 3 (tiga) orang, yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan beranggotakan 2 (dua) orang Direktur. Sesuai struktur organisasi perusahaan pembagian tugas di antara anggota Direksi yang ditetapkan oleh RUPS, adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Utama
  1. Mengkoordinasikan penetapan dan pelaksanaan kebijakan kepengurusan perusahaan. Untuk tindakan tertentu, sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
  2. Membawahi secara langsung Divisi Sistem Informasi & Manajemen Risiko (SIMR).
  3. Satuan Pengawasan Internal (SPI) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
  
- b. Direktur Operasi
 

Membawahi secara langsung beberapa unit kerja, yaitu:

  1. Divisi *Underwriting* Fakultatif (UF).
  2. Divisi *Underwriting* Treaty & Retrosesi (UTR).
  3. Divisi Klaim.
  4. Divisi Reasuransi Jiwa.
  5. Divisi Reasuransi Syariah.
  
- c. Direktur Keuangan dan SDM
  1. Menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan.
  2. Membawahi secara langsung Divisi Keuangan & Akuntansi dan Divisi Sumber Daya Manusia & Umum

## Penunjukan Direktur Pengganti

Dalam hal salah satu Direktur berhalangan hadir karena menjalani tugas di dalam ataupun ke luar negeri, maka pengaturannya adalah sebagai berikut:

- a) Apabila Direktur Utama berhalangan hadir; maka Direktur Utama membuat Nota Dinas penunjukan salah satu Direktur pengganti, untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai Penjabat Direktur Utama.
- b) Apabila Direktur bidang berhalangan hadir; maka Direktur dimaksud membuat Nota Dinas pelimpahan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada Direktur Utama ataupun Direktur bidang lainnya.

## Scope and Responsibility of each Director

NASIONAL RE Directors consists of 3 (three) members, led by a President and comprises 2 (two) Directors. In accordance with the company's organizational structure, the division of tasks among the members of the Board of Directors established by the General Meeting of Shareholders, are as follows:

- a. President Director
  1. Coordinate the establishment and implementation of the Company's management policy. For certain actions, pursuant to the Articles of Association, the Board of Directors must obtain approval from the Board of Commissioners.
  2. Directly oversees the Division of Information Systems and Risk Management (SIMR).
  3. Internal Audit Unit (IAU) reports directly to the President Director.
  
- b. Director of Operation
 

Directly oversees a number of unit as follow:

  1. Division of Facultative Underwriting (UF).
  2. Division of Underwriting Treaty & Retrocession (UTR).
  3. Claim Division
  4. Life ReInsurance Division
  5. Sharia Reinsurance Division (Retakaful)
  
- c. Director of Finance and HR
  1. Perform the Corporate Secretary function.
  2. Directly oversees Finance & Accounting Division and the Division of Human Resources & General Affairs

## Alternate Director

In the event that a member of the Board of Directors is absent, then the alternate Director is determined as follow:

- a) In the absence of the President Director, then he/she should make the Office Memorandum on the appointment of alternate director, to perform the duties, powers and responsibilities as Acting President Director.
- b) In the absence of the Sector Director, the said Director should make the Office Memorandum on the delegation of the duties and responsibilities to President Directos of other Sector Directors.

### Kebijakan Suksesi Direksi

Pada prinsipnya, Direksi menyampaikan kandidat untuk dicalonkan sebagai suksesornya, dengan berpedoman pada hasil *assessment* dari konsultan eksternal dan penilaian Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya, Direksi mengajukannya kepada Pemegang Saham untuk menjalani *fit & proper test*. Namun demikian, Pemegang Saham mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan personil yang memenuhi kualifikasi, layak dan kredibel untuk diangkat menjadi Direksi.

### Komposisi Direksi

Saat ini Direksi Perusahaan berjumlah 3 (tiga) orang yang seluruhnya telah lolos *fit and proper test*. Masing-masing anggota Direksi memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

Tabel berikut ini menampilkan susunan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2014:

M. Shaifie Zein, SE, Dipl. Ins., ACII, FIIS, CFP®, CRGP	Direktur Utama/President Director
Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AIIIS, CRGP	Direktur Operasi/Director of Operation
Rusdianto, SE, MM, AAIK, CFP®, CSA®	Direktur Keuangan & SDM/Director of Finance & HR

### Pernyataan Independensi Direksi

Direksi NASIONAL RE diwajibkan untuk senantiasa menjaga independensinya dalam melaksanakan tugas dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun dan wajib bertindak independen demi kepentingan Perusahaan. Direksi NASIONAL RE menandatangani Pakta Integritas dan Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan pada saat pengangkatan Direksi secara resmi.

Untuk itu Perusahaan menyusun ketentuan berikut:

- Selain Direksi, pihak lain manapun tidak diperkenankan untuk melakukan atau campur tangan dalam kepengurusan Perusahaan.
- Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
- Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.
- Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen Direksi dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

### Directors' Succession

In principle, the Board of Directors submit the candidate to be nominated as his successor, based on the assessment from external consultants and assessment from the Board of Commissioners and Board of Directors. Subsequently, the Board of Directors propose to the Shareholders to undergo fit and proper test. However, shareholders reserve full authority to decide personnel that is qualified, worthy and credible to be appointed as Directors.

### Board of Directors Composition

Currently, the Board of Directors consists of 3 (three) persons, all of which has passed the fit and proper test. Each member of the Board of Directors shows sufficient competence and experience to carry out their respective duties.

The following table shows the composition of the Board of Directors of the Company as of December 31, 2014:

### Board of Directors' Independency

The Board of Directors of NASIONAL RE is required to always maintain its independence in performing their task and should not be influenced by pressures from any party and should act independently in the interests of the Company. The Board of Directors NASIONAL RE signed a statement of non-dual functions when officially appointed as the Board of Directors.

To maintain independence, the Company establishes requirements as follows:

- In addition to the Board of Directors, any other party is prohibited from conducting or intervene in the management of the Company.
- Directors should be able to take decisions objectively, without conflict of interest and free of any pressure from any party.
- Directors are prohibited from conducting activities that could interfere with its independence in managing the Company.
- The Board of Directors shall sign the Integrity Pact as a commitment to the Board of Directors in carrying out the activities of the Company that may cause a conflict of interest.

## Rapat Direksi

### Rapat Internal Direksi

Selama tahun 2014 Direksi mengadakan Rapat Direksi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali pertemuan dengan rata-rata tingkat kehadiran 93,3%. Rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama/Name	Jabatan/Position	Jumlah Rapat/ Number of Meeting	Jumlah Kehadiran/ Number of Attendance	% Kehadiran/Attendance (%)
M. Shaifie Zein	Direktur Utama/President Director	25	23	92%
Edhie Mulyono	Direktur Operasi/Director of Operation	25	23	92%
Rusdianto	Direktur Keuangan & SDM/Director of Finance & HR	25	24	96%

### Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris

Dalam Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris antara lain membahas hasil kinerja Perusahaan, pengembangan usaha dan berbagai permasalahan yang lain. Selama tahun 2014 Direksi mengadakan Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris Sebanyak 13 (tiga belas) kali pertemuan dengan rata-rata tingkat kehadiran 91%. Rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama/Name	Jabatan/Position	Jumlah Rapat/ Number of Meeting	Jumlah Kehadiran/ Number of Attendance	% Kehadiran/ Attendance (%)
Rinarno Pramudiyanto	Komisaris Utama/President Commisisoner	13	12	92%
Sulaeman	Komisaris/Commisisoner	13	11	84,6%
Raymond Buisson	Komisaris Independen/Independent Commisisoner	13	13	100%
M. Shaifie Zein	Direktur Utama/President Director	13	11	84,6%
Edhie Mulyono	Direktur Operasi/Director of Operation	13	13	100%
Rusdianto	Direktur Keuangan & SDM/Director of Finance & HR	13	11	84,6%

## Tata Tertib Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan dengan ketentuan dan tata tertib sebagai berikut:

### a. Jadwal Rapat

1. Rapat Direksi diadakan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) kali dalam setahun.
2. Direksi dapat mengundang staf perusahaan untuk hadir dalam Rapat Direksi.

## Meeting of the Board of Directors

### Internal Meeting of the Board of Directors

In 2014, the Board of Directors convened 25 (twenty five) times with average attendance rate of 93.3%. Details of attendance as follows:

### Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others, discusses about the Company's performance, business development and other issues. During 2014 the Board of Directors held join meeting with the Board of Commissioners for 13 (thirteen) times with an average attendance rate of 91%. Details of attendance as follows:

## Rules and Procedures of the Meeting of the Board of Directors

Board of Directors meeting was held with the provisions and rules as follows:

### a. Meeting Schedule

1. The Board of Directors Meeting held at least 24 (twenty four) times a year.
2. The Board of Directors may invite the Company's staff to attend the meeting of the Board of Directors.

3. Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh:
  - i. Seorang atau lebih anggota Direksi; dan/atau
  - ii. Permintaan Direksi; dan/atau
  - iii. Permintaan tertulis dari Komisaris atau Pemegang Saham Mayoritas dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
4. Rapat Direksi dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh dari jumlah Direksi.

**b. Tempat Pelaksanaan Rapat**

Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan/ kegiatan usaha perusahaan, atau di tempat lain.

**c. Undangan Rapat**

1. Undangan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Sekretaris Perusahaan atau Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Perusahaan.
2. Undangan Rapat Direksi disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal undangan dan tanggal rapat.
3. Undangan Rapat Direksi yang menghadirkan pihak lain dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan atau Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum rapat diadakan.
4. Undangan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Undangan Rapat Direksi dapat dilakukan melalui sarana elektronik (misal: SMS, BBM, surat email dan sarana elektronik lainnya) agar pemberitahuan mengenai agenda rapat dapat lebih cepat disampaikan.
6. Seluruh Direksi diharapkan dapat hadir dalam setiap Rapat Direksi. Apabila berhalangan, seorang anggota Direksi dapat memberi kuasa kepada anggota Direksi lainnya, cukup dengan disposisi dan seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili satu orang anggota Direksi lainnya.

**d. Pimpinan Rapat**

1. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan,

3. The Board of Directors may hold meetings outside of regular schedule, if deemed necessary by:
  - i. One or more members of the Board of Directors; and/or
  - ii. Request the Board of Directors; and/or
  - iii. Written request of the Commissioner or the Majority Shareholder by mentioning things that will be discussed.
4. Meeting of the Board of Directors declared valid if attended by more than half of the Board of Directors.

**b. Meeting Venue**

Meeting of the Board of Directors may be held at the domicile of company's business activities, or elsewhere.

**c. Meeting invitation**

1. Invitation to Meeting of the Board of Directors is made in writing by the Corporate Secretary or Acting Corporate Secretary.
2. The Board of Directors Meeting Invitation should be delivered at the latest 3 (three) days before the meeting date, or sooner if needed, excluding the date of the invitation and the meeting date.
3. For Meeting of the Board of Directors which attended by other party, invitation should be delivered by Corporate Secretary or Acting Corporate Secretary within a period of at least 2 (two) working days before the meeting date.
4. Invitation of Meeting of the Board of Directors shall includes the agenda, date, time and place of the meeting.
5. Invitation of the Board of Directors Meeting can be submitted via electronic means (eg, SMS, BBM, email letters and other electronic means) so that the invitation of meeting agenda can be promptly delivered.
6. All members of the Board of Directors are expected to attend each meeting of the Board of Directors. In the event that a member of the Board of Directors unable to attend the meeting, he/she may authorize other member of the Board of Directors, with a disposition and a member of the Board of Directors may only represent one member of the Board of Directors.

**d. Chairman of the Meeting**

1. Meeting of the Board of Directors is chaired by the President Director.
2. In the absence of the President Director, Board of Directors meeting is chaired by a member of the Board appointed by the President Director.
3. In the event President Director does not make the



maka anggota Direksi yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.

4. Dalam hal anggota Direksi yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Direksi yang usianya tertua bertindak sebagai pimpinan rapat.

#### **e. Agenda dan Materi Rapat**

1. Materi rapat Direksi disusun berdasarkan masukan dari masing-masing anggota Direksi dan dapat ditambahkan materi dari hasil Rapat Kepala Divisi yang harus diputuskan dalam Rapat Direksi.
2. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai materi Rapat Direksi meliputi:
  - 1) Materi Rapat Direksi adalah yang bersifat strategis dan memerlukan keputusan.
  - 2) Evaluasi atas keputusan Rapat Direksi sebelumnya.
  - 3) Materi rapat diberikan sebelum tanggal rapat bagi anggota Direksi untuk mempelajarinya.

#### **f. Agenda dan Rapat Susulan**

Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Usulan agenda rapat susulan tersebut harus dilengkapi dengan materi yang memadai.
2. Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat. Untuk itu, anggota Direksi yang tidak hadir harus dihubungi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas agenda rapat susulan tersebut.
3. Apabila anggota Direksi yang tidak hadir dapat dihubungi dalam waktu yang wajar, maka persetujuan agenda rapat susulan tersebut diserahkan pada keputusan rapat.

#### **g. Pengambilan keputusan**

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.
2. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
3. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah mufakat.
4. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Direksi dibuat dengan suara terbanyak.
5. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama

appointment, then the most long-serving member of the Board of Directors to act as chairman of the Board of Directors Meeting.

4. In the event that the most long-serving member of the Board of Directors is more than 1 (one) persons, then the oldest member of the Board of Directors to act as chairman of the meeting.

#### **e. Meeting Agenda and Materials**

1. Meeting materials is prepared based on input from each member of the Board of Directors and can include the material of Meetings of Head of Division, which should be decided in the meeting of the Board of Directors.
2. The Board of Directors Meeting materials can include the following:
  - 1) Materials that are strategic and require decisions.
  - 2) Evaluation on the decision of the previous Board of Directors Meeting.
  - 3) Materials should be provided before the date of the meeting for members of the Board of Directors to learn.

#### **f. Additional Agenda and Supplementary Meeting**

In the event that additional meeting agenda is proposed when the meeting will soon take place, then the following provisions apply:

1. Proposed supplementary agenda of the meeting shall be equipped with adequate material.
2. Supplementary meeting agenda must be approved by all members of the Board of Directors attended the meeting. To that end, members of the Board of Directors who are not attend the meeting should be contacted for approval or rejection of the supplementary meeting agenda.
3. If members of the Board of Directors who are not attend the meeting can not be reached within a reasonable time, then the approval of the subsequent meeting agenda is up to the decision of the meeting.

#### **g. Decision-Making**

1. All decisions of the Board of Directors are taken in a meeting of the Board of Directors.
2. The decision may also be taken outside the meeting of the Board of Directors, as long as all members of the Board of Directors agreed on the manner and matter to be decided.
3. All meeting resolutions are adopted by consensus.
4. If the meeting failed to reach consensus, the Board of Directors meeting decisions are made by majority vote.
5. If the number consenting and dissenting votes is equal,

- banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan suara tertutup.
6. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
  7. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
  8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan disposisi tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
  9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi.
  10. Dalam hal penambahan agenda rapat, Rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan agenda rapat tersebut.

#### **h. Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)**

Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) diatur sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Keputusan Rapat dan anggota Direksi yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut.
2. Perbedaan pendapat bukan berarti memberikan hak kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh anggota Direksi tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat.
3. Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali anggota Direksi yang melakukan *dissenting opinion* dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
4. Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam keputusan dan risalah rapat dapat menjadi bukti bahwa

the Meeting Chair determines the final decision, with regard to the provisions regarding accountability, except when it concerns person, the decision is made in a close voting.

6. in the event that there are more than 2 (two) alternatives of proposal and voting failed to reach a decision with number of vote casted more than 1/2 (half) of total vote casted, then voting should be reconducted over two proposal that jointly gained votes more than 1/2 (half) of total votes casted.
7. Each member of the Board of Directors is entitled to have 1 (one) vote and additional 1 (one) vote for member of the Board of Directors represented.
8. Members of the Board of Directors who are not present confer a power of attorney to be represented at such Meeting by other member of the Board of Directors, with a written disposition given for that purpose
9. A Board of Director Meeting is duly convened and entitled to adopt binding resolutions if more than ½ of the Board of Directors members are present.
10. In terms of additional meeting agenda, the Board of Directors meeting is not entitled to make a decision unless all members of the Board of Directors or his authorized representative, present and approve the addition of the meeting agenda.

#### **h. Dissenting Opinion**

The provision for Dissenting Opinion is as follow:

1. A minute of meeting must state any dissenting opinion/comment made by the Directors, along with reasons of dissenting opinion.
2. Dissenting Opinion does not mean giving the right to the said members of the Board of Directors not to implement the resolution of the meeting. Despite the differences of opinion, all members of the Board of Directors is still obliged to follow and implement the decision of the meeting.
3. The Board of Directors jointly and severally liable for negligent act in discharging their duties for the benefit and interest of the Company, unless the member of the Board of Directors who gave dissenting opinion can prove that he/she has taken action to prevent the continuation of such losses.
4. Dissenting opinion included in the resolution and minutes of meetings may can serve as evidence that the said

anggota Direksi yang bersangkutan telah melakukan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut dengan tidak menyetujui hasil keputusan rapat. Hal ini berarti bahwa anggota Direksi yang bersangkutan dapat terbebas dari tuntutan atas timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil pelaksanaan keputusan rapat.

#### **i. Risalah Rapat**

- Setiap Rapat Direksi harus dibuatkan Risalah atau Notulen Rapat.
- Risalah rapat ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir dan dilengkapi dengan daftar hadir.
- Risalah Asli Rapat Direksi disimpan dan dipelihara oleh Sekretaris Perusahaan atau Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Perusahaan, sedangkan Direksi menyimpan salinannya.
- Risalah rapat Direksi harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rapat.
- Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi:
  1. Acara, tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan;
  2. Daftar hadir;
  3. Permasalahan yang dibahas;
  4. Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas permasalahan yang strategis atau material, termasuk yang mengemukakan pendapat;
  5. Proses pengambilan keputusan;
  6. Keputusan yang ditetapkan; dan
  7. *Dissenting opinion* jika ada.

#### **j. Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat**

1. Atas setiap keputusan yang diambil dalam rapat Direksi maka tindak lanjut pelaksanaannya harus dievaluasi.
2. Evaluasi tindak lanjut keputusan rapat dilakukan secara periodik dan terhadap keputusan rapat yang telah diambil pada waktu sebelumnya wajib dilakukan evaluasi tindak lanjutnya pada kesempatan pelaksanaan rapat berikutnya.
3. Evaluasi tindak lanjut keputusan rapat dilakukan dengan membuat matriks yang memuat hasil keputusan rapat, jangka waktu tindak lanjut, *Person In Charge* (PIC) dan hasil tindak lanjut.

member of the Board of Directors has taken action to prevent such losses, by stating a dissenting opinion towards the resolution of the meeting. This means that the said members of the Board of Directors can be freed from the liabilities resulted from the losses incurred or continued, as a result of the implementation of the resolution of the meeting.

#### **i. Minutes of Meeting**

- Each BOD meeting much has minutes of meeting.
- Minutes of meeting is signed by the Meeting Chair and all members of BOD and is equipped with list of attendance.
- Corporate Secretary, or Acting Corporate Secretary, shall keep the original minutes of meeting, while BOD keep the copy.
- Minutes of meeting should be completed within 2 (two) days after meeting.
- Minutes of meeting should describe the events of the meeting, including:
  1. The event, place, date and time of the meeting;
  2. List of attendance;
  3. The agenda;
  4. The opinion stated during the meeting, especially in addressing strategic or material issues, including who express their opinions;
  5. The process of decision-making;
  6. Decisions adopted; and
  7. Dissenting opinion if any.

#### **j. Evaluation on the Follow-up of Resolution**

1. Each follow-up to the decision of Directors meeting should be evaluated.
2. Evaluation on the follow-up of meeting resolution is conducted periodically and to the resolution taken previously, a follow-up evaluation must be conducted during the next meeting.
3. Evaluation of the follow-up of meeting resolution is made by creating a matrix that contains the resolution of the meeting, the follow-up period, Person In Charge (PIC) and the results of follow-up.

## Program Orientasi dan Program Peningkatan Kompetensi Direksi

### Program Pengenalan

Informasi dasar perusahaan kepada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang baru menjabat, meliputi:

1. Informasi atau pengetahuan internal:
  1. Sejarah perusahaan.
  2. Visi, Misi, Nilai-Nilai perusahaan serta sasaran perusahaan.
  3. Struktur organisasi dan kerangka kerjanya, termasuk infrastruktur yang dimiliki perusahaan.
  4. Piagam Direksi dan Dewan Komisaris.
  5. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
  6. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun berjalan.
  7. Perkembangan kinerja perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir.
  8. Proses bisnis dan jenis produk perusahaan.
  9. Manajemen risiko perusahaan.
  10. Kebijakan perusahaan.
  11. Fungsi audit internal dan eksternal.
  12. Informasi lainnya yang relevan.
2. Informasi atau pengetahuan eksternal berkaitan dengan kegiatan perusahaan:
  1. Pengembangan eksternal yang mencakup politik, ekonomi, sosial, teknologi, dll.
  2. Posisi perusahaan dibandingkan dengan kompetitor, pemasok, mitra usaha dan *stakeholders* lain.
  3. Hubungan dan kewajiban dengan regulator dan lembaga terkait lainnya.
  4. Undang-undang dan peraturan terkait.
  5. Informasi eksternal yang relevan.
3. Salinan dokumen yang disampaikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang baru menjabat adalah:
  1. Piagam Direksi dan Dewan Komisaris.
  2. Anggaran Dasar.
  3. Laporan Tahunan tahun terakhir.
  4. RJP dan kontrak manajemen terakhir.
  5. Jadwal dan agenda rapat.
  6. Risalah rapat.
  7. Struktur organisasi dan uraian kerja.
  8. Laporan audit internal dan eksternal.
  9. Undang-undang dan peraturan lainnya.

## Orientation Program and Competency Enhancement Program for Board of Directors

### Induction Program

Company's Basic information for the new members of the Board of Directors and /or Board of Commissioners, include:

1. Internal Information or knowledge:
  1. The history of the company.
  2. Vision, Mission, Values and the objectives of the Company.
  3. The organizational structure and framework, including the Company's infrastructure.
  4. Charter of the Board of Directors and Board of Commissioners.
  5. The Company's Long-Term Plan (RJPP).
  6. Work Plan and Budget (RKAP) of the current year.
  7. The Company's performance within the last 5 (five) years.
  8. The business process and products.
  9. Risk management.
  10. Corporate policies.
  11. Internal and external audit function.
  12. Other relevant information.
2. External information or knowledge relating to the activities of the Company:
  1. External development that includes political, economic, social, technological, etc.
  2. The position of the Company compared with competitors, suppliers, business partners and other stakeholders.
  3. The relationship and obligations with regulators and other relevant agencies.
  4. Relevant Laws and regulations.
  5. relevant external information.
3. Copies of documents submitted to the new members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners is:
  1. The Charter of the Board of Directors and Board of Commissioners.
  2. Articles of Association.
  3. Last year Annual Report.
  4. RJP and last management contract.
  5. Meeting schedule and agenda.
  6. Minutes of the meeting.
  7. The organizational structure and job descriptions.
  8. The internal and external audit reports.
  9. Other law and regulations.

Selama tahun 2014, Direksi mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi, seminar atau *workshop*, yang dapat disajikan sebagai berikut:

During 2014, the Board of Directors attended various training programs, conferences, seminars or workshops, which can be presented as follows:

Direktur Utama/President Director		Direktur Operasi/Director of Operation		Direktur Keuangan & Sdm/Director of Finance & Hr	
Lokasi/Location	Materi/Material	Lokasi/Location	Materi/Material	Lokasi/Location	Materi/Material
Bali	Certified Risk Governance Professional (CRGP)	Nusa Dua, Bali	20th Indonesia Rendezvous- AAUI	Surabaya	Dinner Party & Insurance Award 2014- APPARINDO
OECD Headquarters, Paris	The Meeting of the OECD Working Party	Surabaya	27th Top Agent Award AAJI	Bandung	Pengelolaan Dana Pensiun di BUMN/Pension Fund Management for SOEs
		Jakarta	Implementasi Manajemen Risiko Bagi Industri/Risk Management Implementation for Industry	Jakarta	Peran Strategi Komisaris Independen - ISEA/Strategic Roles of Independent Commissioner-ISEA
		Jakarta	Seminar AAJI & Falia	Jakarta	Workshop Eksekutif & Komisaris/pengawas BUMN/Workshop on Executives & Commissioner/SOEs Controller
		Bali	Workshop on Certified Risk Governance Professional	Dubai, UEA	9th Annual The World Takaful Conference (WTC)
		Taipei-Taiwan	27th Conference Of The EAIC-AAUI		

### Hubungan Afiliasi dengan Direksi lainnya

Seluruh anggota Direksi beserta keluarganya tidak memiliki saham pada perusahaan yang terafiliasi dengan NASIONAL RE. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lainnya atau dengan anggota Dewan Komisaris, serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda. Dengan demikian, Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, mandiri serta tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, jabatan lain atau golongan dengan kepentingan Perusahaan.

Pada tanggal 3 Januari 2014, secara sendiri-sendiri anggota Direksi menandatangani Pakta Integritas dan pernyataan tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

### Penilaian Kinerja Direksi

Setiap tahun Direksi menandatangani kontrak Manajemen/ *Key Performance Indicator* (KPI) dengan Pemegang Saham yang menyebutkan sasaran-sasaran yang harus dicapai selama setahun. Penilaian atas kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris maupun oleh RUPS, dengan mengacu pada pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI). Untuk tahun 2014 realisasi sasaran strategis/program kerja Direksi telah memperoleh skor 101,8.

### Affiliate relationship with other Directors

All members of the Board of Directors (BOD) and families do not own shares in companies affiliated with NASIONAL RE. All members of the Board of Directors has no family relationship with other member of BOD or of the Board of Commissioners and has no family relationship to the third degree either vertically or horizontally to the side or relationship by marriage. Thus, the Board of Directors may carry out their duties and responsibilities independently and without conflict of interest between the interests of personal, family and relatives, other office or group, with the interests of the Company.

On January 3, 2014, members of the Board of Directors signed the Integrity Pact Implementation and statements do not hold shares in other companies individually.

### BOD Performance Appraisal

Each year, member of the Board of Directors (BOD) signed Management contract/Key Performance Indicators, with Shareholders, which outlined the goals to be achieved during the year. Assessment on the performance of the Board of Directors is made by the Board of Commissioners and by the AGM, with reference to the achievement of key performance indicators (KPI). In 2014, the realization of strategic objectives/work program of BOD scored 101.8.



## Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan Remunerasi Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 dimana selanjutnya diajukan terlebih kepada Pemegang Saham untuk diputuskan dalam RUPS. Untuk realisasi remunerasi Direksi, pencapaian KPI menjadi dasar pertimbangan yang utama, khususnya untuk kenaikan remunerasi.

## Remunerasi Direksi Tahun 2014

Remunerasi Direksi meliputi gaji dan tunjangan-tunjangan serta tantiem yang telah dibayarkan pada tahun 2014 adalah Rp5.436.421 dengan rincian sebagai berikut:

a. Gaji .....	Rp2.533.440.000
b. Tunjangan2 & Tantiem .....	Rp2.902.697.019
Total	<u>Rp5.436.137.019</u>

## Keberagaman Komposisi Direksi

Komposisi Direksi NASIONAL RE per 31 Desember 2014 telah mencerminkan keberagaman dalam hal pengalaman, latar belakang pendidikan dan kompetensi sehingga seluruh anggota Direksi dapat saling mendukung dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka sebaik mungkin.

## Procedures for the Determination of BOD Remuneration

The Determination of BOD Remuneration refers to the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014, submitted to shareholders before being decided in GMS. For the realization of the remuneration of Directors, KPI achievement is the main consideration basis, particularly in the increase in remuneration.

## Remuneration of the Board of Directors in 2014

Remuneration, including salary, allowances and others that was paid in 2014, amounted to Rp5,436,421, with detail as follows:

a. Salary:	Rp2,533,440,000
b. Allowances and others :	<u>Rp2,902,697,019</u>
Total	<u>Rp5,436,137,019</u>

## Diversity of Composition of the Board of Directors

The Composition of the Board of Directors of NASIONAL RE per December 31, 2014 has reflected the diversity in terms of experience, educational background and competency so that all members of the Board of Directors can support each other in performing their duties and obligations as good as possible.

## KOMITE-KOMITE DI BAWAH KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dibantu komite-komite yaitu: Komite Audit, Komite Kebijakan Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

### Komite Audit

Pembentukan Komite Audit memperkuat fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan perusahaan.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) maupun auditor ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan pengawas dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
3. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan PT Reasuransi Nasional Indonesia termasuk laporan keuangan berkala. *Proyeksi/forecast* dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada Pemegang Saham.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

### Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit

Untuk dapat menduduki posisi sebagai anggota Komite Audit maka kandidat harus memenuhi prasyarat berikut ini:

- a. Memiliki pengetahuan memadai mengenai industri asuransi termasuk segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang pelaporan keuangan atau audit.
- c. Mampu berkomunikasi efektif.
- d. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.

## COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In discharging its duties of supervision, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, Risk Policy Committee and the Nomination and Remuneration Committee.

### Audit Committee

The Audit Committee was formed to strengthen the supervisory functions of the Board of Commissioners and increase public confidence in the management of the company.

### Duties and Responsibilities

The Audit Committee has the duties and responsibilities as follow:

1. Assess the audit activities and results, conducted by the Internal Audit Unit (IAU) and the external auditors, in order to prevent the occurrence of supervisory and reporting that do not meet the standards .
2. Provide recommendations for the improvement of the Company's management control system and its implementation.
3. Ensure a satisfactory review procedures upon information issued by PT Reasuransi Nasional Indonesia including periodic financial statements. Projection/forecast and other financial information to be submitted to the Shareholders.
4. Identify issues that require the attention of the Board of Commissioners.
5. Discharge other duties assigned by the Board of Commissioners, to the extend that all are within the scope of duties and obligations of the Board of Commissioners, as stipulated in the Articles of Association and the applicable legislation .

### Educational qualification and employment history of Audit Committee members

To assume the position as a member of the Audit Committee, the candidate must meet the following requirements:

- a. Possessing adequate knowledge on the insurance industry, including all rules and regulations.
- b. Possessing education and employment backgrounds in the sector of financial reporting or auditing.
- c. Able to communicate effectively.
- d. Having a good character, ethics and professional responsibility.

- e. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- f. Memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep risiko dan pengendalian risiko dalam aktivitas usaha serta pengendalian intern perusahaan.
- g. Memiliki pemahaman tentang konsep auditing.
- h. Menjadi anggota organisasi profesi Komite Audit.

### Independensi Komite Audit

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pendapat, rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan ataupun keluarga sampai dengan derajat ke tiga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali, bukan pula merupakan pemegang saham perusahaan, atau menjabat sebagai Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan NASIONAL RE. Anggota Komite Audit tidak memiliki wewenang untuk merancang, memimpin maupun mengendalikan Perusahaan sebelum menjabat dan bukan merupakan mantan pimpinan maupun pegawai Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pembukuan Perusahaan.

- e. Possessing adequate understanding of the principles of Good Corporate Governance (GCG).
- f. Possessing adequate understanding of the risk concept and risk management in business activities as well as internal control.
- g. Possessing an understanding of the concept of auditing.
- h. Listed as member of professional organization of Audit Committee.

### Independence of the Audit Committee

To maintain and enhance the independence in discharging their tasks and in providing advices or recommendation to the Board of Commissioners, all members of the Audit Committee are independent parties without any financial, management and family ties to third degree with member of Board of Directors and Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders or serving as Commissioner, Director or employee of a company that has an affiliation with or business relation with the NASIONAL RE. Members of the Audit Committee do not have the authority to design, lead and control the Company prior to serve as member of Audit Committee and are not former head or employee of public accounting firm that examined the books of the Company.



**Raymond Buisson, SE, CRGP**  
**Komisaris Independen/Independent Commissioner**

Pria, kelahiran Semarang tanggal 1 April 1960. Menempuh pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan, Jurusan Administrasi Keuangan dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah tahun 1982, serta memperoleh gelar Strata 1 (S1) Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Mpu Tantular, Jakarta tahun 2000. Pernah bertugas pada bagian akunting dan keuangan di beberapa Perusahaan. Menjabat sebagai Direktur Jakarta Insurance Institute (2002-Juli 2010), Anggota Komite Audit PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. (Januari 2004-31 Desember 2006), Anggota Komite Audit PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. (Januari 2007-31 Desember 2010). Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Reasuransi Nasional Indonesia (Juni 2012-sekarang).

Male, born in Semarang on April 1, 1960. He earned his education in the Corporate Administration Expert, majoring Financial Administration from Diponegoro University, Semarang, Central Java, in 1982, as well as earned a Bachelor degree in Financial Management from Faculty of Economy of Mpu Tantular, Jakarta in 2000. He joined in many companies in the accounting and financial division. He was Director at Jakarta Insurance institute (2002-July 2010), Member of the Audit Committee at PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. (January 2004-31 December 2006), Member of Audit Committee at PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. (January 2007-31 December 2010). He has been serving as an Independent Commissioner at PT Reasuransi Nasional Indonesia (June 2012- now).

## Susunan Komite Audit

## Composition of Audit Committee

Jabatan/Position	Nama/Name	SK/Decree	Periode/Period
Ketua/Chairman	Raymond Buisson	KEP-02.1/DK/NR/VIII/2014	01 Jul. 2014 – 30 Jun. 2015
Anggota/Member	Herry Setianto	KEP-01/DK/NR/I/2014	24 Jan. 2014 – 23 Jan. 2016
Anggota/Member	Teguh Prastiyo	KEP-07/DK/NR/VIII/2014	1 Sep. 2014 – 30 Okt. 2016

### Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sedikitnya 12 (dua belas) kali dalam setahun sebagaimana diatur dalam *Charter Komite Audit*.

### Audit Committee Meeting

The Audit Committee member meet in a convened meeting at least 12 (twelve) times a year as stipulated in the Charter of the Audit Committee.

### Kegiatan Komite Audit 2014

1. Menyusun rencana dan program kerja Komite Audit untuk 1 (satu) tahun
2. Melakukan pengawasan dan monitoring atas rencana dan program kerja yang telah ditetapkan
3. Menyampaikan laporan realisasi atas rencana dan program kerja Komite Audit, yang meliputi saran tindak lanjut atas adanya permasalahan-permasalahan yang timbul
4. Menyusun program kerja pengembangan usaha atas inovasi

### The activities of the Audit Committee in 2014

1. Develop action plan and program of the Audit Committee for 1 (one) year.
2. To supervise and monitor the action plan and program.
3. Delivering the report on the realization of the action plan and program of the Audit Committee, which includes suggestions to follow up the issues.
4. Develop a work program on the development of innovation

### Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan.

### The Risk Policy Committee

The Risk Policy Committee has the duty and responsibility for assisting the Board of Commissioners in reviewing the risk management developed by the Board of Directors, assessing its effectiveness and risk tolerance that can be taken by the Company.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi, serta menilai efektifitas Manajemen Risiko, termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil perusahaan. Selain itu juga memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi, serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan, serta memantau pelaksanaannya.

### Duties and Responsibilities

Risk Policy Committee has the duty and responsibility to help the Board in assessing the risk management system prepared by the Board of Directors, as well as assessing the effectiveness of risk management, including assessing risk tolerance can be taken. It also monitors the implementation of risk management prepared by the Board of Directors, as well as assessing the risk tolerance that can be taken by the company and to monitor its implementation.

### Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Kebijakan Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari beberapa personil yang minimal sudah pernah mengikuti training/ pelatihan mengenai manajemen risiko. Namun demikian, di perusahaan terdapat juga beberapa anggota yang memiliki sertifikat profesi manajemen risiko, seperti *Certified Risk Governance Professional (CRGP)*.

### Qualifications of Education and Employment History

Member of the Risk Policy Committee consists of personnels who at least have training on risk management. However, there are also some members who have a risk management professional certificates, such as *Certified Risk Governance Professional (CRGP)*.

### Independensi Komite Pemantau Risiko

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pendapat, rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan ataupun keluarga sampai dengan derajat ke tiga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali, bukan pula merupakan pemegang saham perusahaan, atau menjabat sebagai Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan NASIONAL RE.

### Rapat Komite

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur dalam Pedoman Manajemen Risiko.

### Independence of the Risk Policy Committee

To maintain and enhance the independence in discharging their tasks and in providing advices or recommendation to the Board of Commissioners, all members of the Risk Policy Committee are independent parties without any financial, management and family ties to third degree with member of Board of Directors and Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders or serving as Commissioner, Director or employee of a company that has an affiliation with or business relation with the NASIONAL RE.

### Meeting of the Committee

Members of the Risk Policy Committee meet in a convened meeting at least 4 (four) times a year as stipulated in the Risk Management Guidelines.

### Susunan Anggota Komite Kebijakan Risiko

Jabatan/Position	Nama/Name	SK/Decree	Periode/Period
Ketua/Chairman	Raymond Buisson	KEP-03/DK/NR/VIII/2014	Berlaku sejak 7 Agustus 2014/Effective August 7, 2014
Anggota/Member	Sulaeman	KEP-03/DK/NR/VIII/2014	Berlaku sejak 7 Agustus 2014/Effective August 7, 2014
Anggota/Member	Ricardo Pardede	KEP-03/DK/NR/VIII/2014	Berlaku sejak 7 Agustus 2014/Effective August 7, 2014

### Composition of Risk Policy Committee

### Komite Nominasi dan Remunerasi

#### Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para eksekutif lainnya di dalam perusahaan, serta membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota dewan komisaris dan Direksi serta membantu menyusun sistem penggajian, memberikan tunjangan, fasilitas lainnya dan memantau pelaksanaannya.

Komite ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab mencari calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris, yang kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham untuk dapat dipertimbangkan oleh Pemegang Saham.

### The Nomination and Remuneration Committee

#### Duties and Responsibilities

The Nomination and Remuneration Committee has the duty and responsibility of preparing the selection criteria and nomination procedures for members of the Board of Commissioners, Directors and other executives, as well as preparing the system for assessment and provide recommendations on the number of BOC and BOD and assisting the establishment of the payroll system, provision of allowances, other facilities and monitoring the execution.

The Committee also has the duty and responsibility of searching candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors, to be reported to the Board of Commissioners, who will submit it to shareholders for their consideration.



### Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam pemilihan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, NASIONAL RE tidak menyusun kualifikasi khusus untuk pendidikan, namun menjadikan pengalaman kerja kandidat yang pernah menempati pos di bidang SDM sebagai prioritas dalam penentuan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

### Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pendapat, rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan keuangan ataupun keluarga sampai dengan derajat ke tiga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali, bukan pula merupakan pemegang saham perusahaan, atau menjabat sebagai Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan NASIONAL RE.

### Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

### Qualification of Education and Employment History of Member of Nomination and Remuneration Committee

In selecting members of the Nomination and Remuneration Committee, NASIONAL RE do not prepare certain educational qualifications, but rather prioritizing candidates with experience in the sector of human resources.

### Independence of the Nomination and Remuneration Committee

To maintain and enhance the independence in discharging their tasks and in providing advices or recommendation to the Board of Commissioners, all members of the Nomination and Remuneration Committee are independent parties without any financial, management and family ties to third degree with member of Board of Directors and Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders or serving as Commissioner, Director or employee of a company that has an affiliation with or business relation with the NASIONAL RE.

### The Composition of the Nomination and Remuneration Committee

Jabatan/Position	Nama/Name	SK/Decree	Periode/Period
Ketua/Chairman	Sulaeman	KEP-05/DK/NR/VIII/2014	26 Agst. 2014 s/d 25 Agst. 2015
Anggota/Member	Raymond Buisson	KEP-05/DK/NR/VIII/2014	26 Agst. 2014 s/d 25 Agst. 2015

## KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Untuk membantu kelancaran tugasnya, Direksi dibantu oleh sejumlah komite yaitu: Komite Penyelesaian Klaim, Komite Akseptasi *Underwriting* dan Komite Investasi dan Komite Manajemen Risiko. Selain itu, Direksi juga dibantu oleh Satuan Pengawas Intern atau SPI.

### Komite Penyelesaian Klaim

#### Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Penyelesaian Klaim bertugas memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi atas hasil analisa usulan penyelesaian klaim yang disampaikan oleh Divisi Reasuransi Jiwa, Divisi Reasuransi Syariah dan Divisi Klaim dalam rangka penyelesaian klaim.

Melakukan *review* terhadap setiap usulan penyelesaian klaim yang diterima sesuai kewenangan dan ketentuan penyelesaian klaim yang merupakan wewenang Direksi, berdasarkan batasan-batasan transaksi umum dan dengan tetap mengacu pada standar operasi dan prosedur yang ditetapkan.

Komite dalam melaksanakan tugasnya diberikan waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah usulan diterima lengkap.

#### Susunan Anggota

Jabatan/Position	Nama/Name	SK/Decree	Periode/Period
Ketua/Chairman	Aviantono Y.	No. 71/KEP/DIR/XI/2014	14 Nop. 2014 s/d 13 Nop. 2015
Anggota/Member	Noe'man Tohepaly	No. 71/KEP/DIR/XI/2014	14 Nop. 2014 s/d 13 Nop. 2015
Anggota/Member	Andrie Prasetyo	No. 71/KEP/DIR/XI/2014	14 Nop. 2014 s/d 13 Nop. 2015

### Komite Akseptasi *Underwriting*

Komite Akseptasi *Underwriting* bertugas memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi atas hasil analisa usulan akseptasi khusus yang disampaikan oleh Divisi *Underwriting Facultative*, Divisi *Underwriting Treaty* dan Retrosesi, Divisi Reasuransi Jiwa dan Divisi Reasuransi Syariah dalam rangka memutuskan akseptasi yang akan dilakukan.

Selain itu juga bertugas melakukan *review* terhadap setiap

## COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

To help the Board of Directors in discharging their duties, a number of Committee is established, namely: Claims Settlement Committee, Acceptances Underwriting Committee and Investment Committee and Risk Management Committee. In addition, the Board of Directors is also assisted by the Internal Audit Unit or SPI.

### Claims Settlement Committee

#### Duties and Responsibilities

Claims Settlement Committee is responsible for providing input, consideration and recommendation to the Board of Directors regarding the results of the analysis on the proposed settlement of the claims submitted by the Life Reinsurance Division, Sharia Reinsurance Division and Claims Division for the settlement of claims.

Conduct review of any proposed settlement of claims in accordance with the authority and provisions of the settlement of claim, which is the authority of the Board of Directors, based on common transaction limits and with reference to the standards operation procedures.

The Committee shall accomplish the duties in no later than 2 (two) working days after the proposal is received completely.

#### Composition of the Committee

### Underwriting Acceptance Committee

The Underwriting Acceptance Committee is responsible for providing input, consideration and recommendation to the Board of Directors on the results of the analysis on the proposal of specific acceptances submitted by the Facultative Underwriting Division, Division of Treaty Underwriting and Retrocession, Division of Life Reinsurance and Sharia Reinsurance Division in order to decide on the acceptance policy.

The committee is also assigned to review each proposal on

usulan akseptasi yang diterima sesuai kewenangan dan ketentuan akseptasi yang merupakan wewenang Direksi, berdasarkan batasan-batasan transaksi umum dan dengan tetap mengacu pada standar operasi dan prosedur yang ditetapkan.

acceptances in accordance with the authority and provisions of acceptances which are the authority of the Board of Directors, based on the limits of common transaction and with reference to the standards and procedures for specified operation.

Komite dalam melaksanakan tugasnya diberikan waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah usulan diterima lengkap.

The committee shall carry out its duties not later than 2 (two) working days after the proposal is received completely.

### Susunan Anggota

Jabatan/Position	Nama/Name	SK/Decree	Periode/Period
Ketua/Chairman	Sukmo Prayogo	No. 72/KEP/DIR/XI/2014	14 Nop. 2014 s/d 13 Nop. 2015
Anggota/Member	R. Joko Slamet P.	No. 72/KEP/DIR/XI/2014	14 Nop. 2014 s/d 13 Nop. 2015
Anggota/Member	Mulkan Lubis	No. 72/KEP/DIR/XI/2014	14 Nop. 2014 s/d 13 Nop. 2015

### Composition of the Committee

### Komite Investasi

#### Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Investasi bertugas memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi atas hasil analisa usulan penempatan, perpanjangan atau pencairan investasi yang disampaikan oleh Divisi Keuangan dan Akuntansi dalam rangka memutuskan pelaksanaan penempatan, perpanjangan atau pencairan investasi. Melakukan *review* terhadap setiap usulan penempatan, perpanjangan atau pencairan investasi yang merupakan wewenang Direksi, berdasarkan batasan-batasan transaksi umum dan dengan tetap mengacu pada pedoman investasi yang ditetapkan.

### Investment Committee

#### Duties and Responsibilities

The Investment Committee is responsible for providing input, consideration and recommendation to the Board of Directors regarding the results of the analysis on the proposal of placement, extension or withdrawal of investment submitted by the Division of Finance and Accounting in order to decide the implementation of the placement, extension or withdrawal of investment. Conducting review on each of proposal of placement, extension or withdrawal is the authority of the Board of Directors, based on the common transaction limits and with reference to the investment guidelines.

Komite dalam melaksanakan tugasnya diberikan waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah usulan diterima lengkap. Dalam hal Anggota Komite Investasi tidak berada ditempat oleh karena dinas luar, cuti atau berhalangan hadir karena sebab apapun, maka sekurang-kurangnya 2 (dua) rekomendasi Anggota Komite Investasi dapat langsung disampaikan kepada Direksi.

The committee shall carry out its duties not later than 2 (two) working days after the proposal is received completely. In the event that a member of the Investment Committee is not in place due to business trip, on leave or unable to attend for any reason, then at least 2 (two) recommendations of Investment Committee Members can be submitted directly to the Board of Directors.

### Susunan Anggota

Jabatan/Position	Nama/Name	SK/Decree	Periode/Period
Koordinator/Coordinator	Direktur Utama/President Director	No. 41/KEP/DIR/VIII/2014	14 Nop. 2014 s/d 13 Nop. 2015
Anggota/Member	Direktur Keu. & SDM/Director of Finance & HR	No. 41/KEP/DIR/VIII/2014	07 Agst. 2014 s/d 06 Agst. 2015
Anggota/Member	Faried Susanto	No. 41/KEP/DIR/VIII/2014	07 Agst. 2014 s/d 06 Agst. 2015
Anggota/Member	Andrie Prasetyo	No. 41/KEP/DIR/VIII/2014	07 Agst. 2014 s/d 06 Agst. 2015
Anggota/Member	Yuse Nuryuliasari	No. 41/KEP/DIR/VIII/2014	07 Agst. 2014 s/d 06 Agst. 2015

### Composition of the Committee

## Komite Manajemen Risiko

### Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko bertugas memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi dalam menangani risiko-risiko yang mungkin terjadi.

### Susunan Anggota

Jabatan/Position	Nama/Name	SK/Decree	Periode/Period
Koordinator/ Coordinator	Direktur Utama/President Director	No. 04/KEP/DIR/III/2014	01 Jan. 2014 s/d 31 Des. 2015
Anggota/Member	Kepala Divisi SDM & Umum/Head of HR and General Division	No. 04/KEP/DIR/III/2014	01 Jan. 2014 s/d 31 Des. 2015
Anggota/Member	Yuse Nuryuliasari	No. 04/KEP/DIR/III/2014	01 Jan. 2014 s/d 31 Des. 2015
Anggota/Member	R. Arya Sidharta	No. 04/KEP/DIR/III/2014	01 Jan. 2014 s/d 31 Des. 2015
Anggota/Member	Bramantyo Djohanputro	No. 04/KEP/DIR/III/2014	01 Jan. 2014 s/d 31 Des. 2015

## Satuan Pengawas Intern

### Struktur dan Kedudukan SPI

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh seorang kepala setingkat kepala divisi dan strukturnya berada langsung di bawah Direktur Utama. Jumlah pegawai SPI posisi per 31 Desember 2014 ada 9 (Sembilan) orang termasuk Kepala SPI, dengan berbagai latar belakang pendidikan.

Kepala SPI sesuai SK Direksi No. 27/KEP/DIR/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 terhitung per 1 Juli 2012 dijabat oleh Subagio Istiarno, SE, MM, Ak, *Chartered Accountant*. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Piagam SPI (*Internal Audit Charter*) seorang kepala SPI harus memenuhi kualifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki latar belakang pendidikan minimal S-1 diutamakan jurusan akuntansi, memiliki sertifikasi gelar profesi dan/atau berpengalaman di bidang internal audit serta memiliki pengetahuan di bidang perasuransian.
2. Apabila kualifikasi di atas tidak terpenuhi, maka Kepala SPI harus memiliki pengalaman di bidang operasional perusahaan.

Sesuai Piagam SPI disebutkan bahwa tujuan SPI adalah meningkatkan nilai dan memperbaiki kinerja operasional, serta meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam struktur organisasi perusahaan, unit SPI digambarkan sebagai berikut:

## Risk Management Committee

### Duties and Responsibilities

Risk Management Committee is responsible with providing input, consideration and recommendation to the Board of Directors in managing any potential risks.

### Composition of the Committee

## Internal Audit Unit (IAU)

### Structure and Position of IAU

Internal Audit Unit (IAU) is chaired by a head of division, report directly to the President Director. Number of employees of the IAU, as of December 31, 2014 there were 9 (nine) members, including the Head of Internal Audit, with a variety of educational backgrounds.

Commencing July 1, 2012, IAU is chaired by Subagio Istiarno, SE, MM, Ak, Chartered Accountant based on BOD Decree No.27/KEP/DIR/VI/2012, dated June 29, 2012 In accordance with the provisions set forth in the Internal Audit Charter, Head of IAU must meet the qualifications are as follows:

1. Possessing a minimum educational background of Bachelor Degree preferably majoring in accounting, professional degree certified and/or experience in the sector of internal auditing, as well as having knowledge of insurance.
2. If the said requirement is not met, then the Head of Internal Audit should have experience in the areas of company operations.

As stipulated in its Charter, IAU's goal is to increase the value and improve operational performance, as well as render effective risk management and good corporate governance. In the organizational structure of the company, IAU is described as follows:

## Struktur Organisasi Unit SPI



## IAU Organizational Structure

### Wewenang SPI

Untuk memenuhi tugas dan kewajibannya, Kepala dan Staf SPI diberi wewenang penuh untuk:

1. Mengalokasikan sumber daya, menyusun jadwal, memilih obyek pemeriksaan, menetapkan ruang lingkup audit dan mengaplikasikan semua teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit.
2. Memiliki akses tanpa batas terhadap semua fungsi, catatan, harta milik (*asset*) dan pegawai.
3. Memiliki akses langsung untuk kapan saja berkomunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal Kantor Akuntan Publik (KAP)/regulator.
5. Memperoleh data dan penjelasan terkait dengan tugasnya dari semua satuan kerja yang diaudit dan dapat meminta jasa bantuan lainnya dari narasumber profesional.

### Tugas dan Tanggung Jawab

- A. Menyusun dan melaksanakan rencana *audit internal* tahunan (Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)).
- B. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan,
- C. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, manajemen risiko dan kegiatan perusahaan lainnya.
- D. Memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang diaudit pada semua unit (*auditee*).
- E. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut dari temuan-temuan dan perbaikan yang telah disarankan.
- F. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan

### The Authority of IAU

In discharging their duties and obligations, the Head and Staff of IAU are fully authorized to:

1. Allocate resources, scheduling, choose the object of inspection, defining the scope of audit and apply all the techniques deemed necessary to achieve the objectives of the audit.
2. Have unlimited access to all functions, records, property (assets) and employee.
3. It has a direct access to communicate with the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or the Audit Committee, at any time.
4. Coordinate its activities with the activities of the external auditors Public Accounting Firm (KAP)/regulator.
5. Obtain the data and explanations related to their duties from all units to be audited and may request other services from professional sources.

### Duties and Responsibilities

- A. To prepare and to implement annual internal audit plan (Annual Audit Work Program (PKAT)).
- B. To test and evaluate the implementation and internal control and risk management systems in accordance with the Company's policy.
- C. To conduct audit and assess of the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, risk management and other corporate activities.
- D. To Provide suggestions for improvements and objective information about the activities to be audited, on all units (*auditee*).
- E. To make the audit report and submit a follow-up report on the implementation of the findings and improvements that have been suggested.
- F. To monitor, analyze and report on the implementation



tindak lanjut dari temuan-temuan dan perbaikan yang telah disarankan.

- G. Bekerjasama dengan Komite Audit.
- H. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan SPI.
- I. Melakukan audit khusus apabila diperlukan.

Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) – Perihal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2014, laporan kegiatan Satuan Pengawasan Intern s/d Triwulan IV/2014, sebagai berikut:

- 1. Rencana dan Realisasi Kerja Pengawasan s/d Triwulan IV/2014:

of the follow-up of findings and improvements that have been suggested.

- G. Working closely with the Audit Committee.
- H. Develop a program to evaluate the quality of the SPI activities.
- I. Conducting special audit if deemed necessary.

As stipulated in the Corporate Budget Plan (RKAP) – Regarding the Annual Monitoring Work Program (PKPT) 2014, Internal Audit activities up to Quarter IV/2014, as follows:

- 1. Planning and Realization of Supervision until Quarter IV/2014:

No.	Program Kerja/Work Program	Target/Target	Realisasi/Realization
1.	Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai PKPT/ Publishing Audit Report in Comply with PKPT	5 LHP/Audit report	5 LHP/Audit report
	a. Pemeriksaan Operasional Atas Kinerja dan Kepatuhan / Operational Audit on Performance and Compliance:	3 LHP/Audit report	3 LHP/Audit report
	3 Unit Operasional/Operational Unit		
	4 Unit Non Operasional/Non Operational Unit		
	Sub Total (a)	8 LHP/Audit report	8 LHP/Audit report
	b. Monitoring Realisasi Kinerja/Monitoring realization of performance	2 LHP/Audit report	2 LHP/Audit report
	c. Monitoring Mitigasi Risiko/Monitoring Risk mitigation	2 LHP/Audit report	3 LHP/Audit report
	Sub Total (b+c)	4 LHP/Audit report	5 LHP/Audit report
Total (1)		12 LHP/Audit report	13 LHP/Audit report
2.	Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Non PKPT (Riksus)/ Publishing Audit Reports of Non PKPT (Riksus) :	0 LHP/Audit report	0 LHP/Audit Report
	Pemeriksaan Operasional/Operational Audit	0 LHP/Audit report	0 LHP/Audit Report
	- Pemeriksaan Non Operasional/Non-Operational Audit		
<b>Total (2)</b>		0 LHP/Audit report	0 LHP/Audit report
Jumlah Penerbitan Laporan Tahun 2014/Total Number of Report Published in 2014		12 LHP/Audit report	13 LHP/Audit report

- 2. Rencana dan Realisasi Tindak Lanjut s/d Triwulan IV/2014 :

- 2. Planning and Realization of follow-up action until Quarter IV/2014

No.	Temuan/Finding		Sudah/yes		Belum /not yet		
			Ditindaklanjuti/Has Been Followed Up	Ditindaklanjuti Namun Belum optimal/Has Been Followed Up But Not Optimal	Ditindaklanjuti/Has Been Followed Up		
1.	Unit Operasional/Operational Unit	:	15	8 53%	7 47%	0	0%
2.	Unit Non Operasional/Non Operational Unit	:	30	20 67%	10 33%	0	0%
Jumlah/Total		:	45	28 62%	17 38%	0	0%

3. Realisasi Pendidikan s/d Triwulan IV/2014 :

a. Sertifikasi QIA & PIA :

3. Realization of Education s / d Quarter IV / 2014:

a. Certification QIA & PIA:

No.	Program/Program	Nama Pegawai/Name of Employee	Paket/Package
1.	Sertifikasi QIA/QIA Certification	Kanicoro Martin Subarkah Ruslan	Audit Intern Tingkat Dasar I (YPIA)/Internal Audit Basic Level I (YPIA) Audit Intern Tingkat Dasar I (YPIA)/Audit Intern Basic Level I (YPIA)
2.	Sertifikasi PIA/PIA Certification	Yusuf Maulana	Komunikasi dan Psikologi Audit (PPAK)/Communication and Audit Psychology (PPAK)

b. Seminar & Kursus:

b. Seminar & Courses:

No.	Nama Pegawai/ Name of Employee	Uraian/Description
1.	Subagio Istiarno	5. Workshop : "Pengenalan Pasar Modal"/Workshop : "Introduction to Capital Market" 6. Seminar dan Pertemuan FKSPI 2014 : "Penyusunan <i>Audit Carter</i> " /Seminar and Meeting of FKSPI 2014 : "Preparing Audit Charter" 7. <i>Workshop : "Leadership Development – Short Course for Coaching &amp; Counseling Competency"</i> / Workshop : "Leadership Development – Short Course for Coaching & Counseling Competency" 8. Workshop : "Risk Contact {Person (RCP)} – Askrindo/Workshop : "Risk Contact Person (RCP)" – Askrindo
2.	Sri Utomo	9. Workshop : "IT Governance"/Workshop : "IT Governance" 10. Seminar dan Musyawarah Kerja Nasional FKSPI 2014 : "Combined Assurance Dalam Menjamin <i>Corporate Sustainability</i> " /Seminar and National Meeting of Internal Audit Communication Forum (FKSPI) 2014 : "Combined Assurance in Ensuring Corporate Sustainability" 11. Seminar dan Pertemuan FKSPI 2014 : "Penyusunan <i>Audit Carter</i> " /Seminar and Meeting of Internal Audit Communication Forum (FKSPI) 2014 : "Preparing Audit Charter" 12. Workshop : "Menyusun Program kerja Audit Tahunan Berbasis Risiko"/Workshop : "Preparing a Risk-Based Annual Audit Work Program" 13. Modul AAMAI (001) : "Pengantar Prinsip Asuransi"/AAMAI Module (001) : "Introduction to Insurance Principles" 14. Modul AAMAI (002) : "Pengantar Dasar Hukum Asuransi"/AAMAI Module (002) : "Introduction to Insurance Law" 15. Workshop : "Leadership Development – Short Course for Coaching & Counseling Competency"/Workshop : "Leadership Development – Short Course for Coaching & Counseling Competency"
3.	M Safri DKS	16. Seminar Nasional Internal Audit : "Mengembangkan <i>Integrated Assurance</i> untuk <i>Triple Bottom Lines</i> : <i>Profit, People and Planet</i> " /National Seminar on Internal Audit : "Developing Integrated Assurance for <i>Triple Bottom Lines : Profit, People and Planet</i> " 17. <i>Workshop : "Leadership Development – Short Course for Coaching &amp; Counseling Competency"</i> /Workshop : "Leadership Development – Short Course for Coaching & Counseling Competency"
4.	Rubiyanto	18. Workshop : "Business Continuity Management System"/Workshop : "Business Continuity Management System" 19. <i>Workshop : "Leadership Development – Short Course for Coaching &amp; Counseling Competency"</i> /Workshop : "Leadership Development – Short Course for Coaching & Counseling Competency"
5.	Swangsa K	20. <i>Risk Based Audit</i> : "Identifikasi Pemahaman Fungsi & Peranan Internal Audit"/ <i>Risk Based Audit</i> : " <i>Identification of Understanding Functions and Roles of Internal Audit</i> " 21. Workshop : "Fundamentals of Reinsurance – Principles & Practice"/Workshop : "Fundamentals of Reinsurance – Principles & Practice"
6.	Yusuf Maulana	22. Workshop : "Penugasan Auditor Internal dan Pelaporannya "/Workshop : "Assignment for Internal Auditor and Reporting"
7.	Dewi Rosi	23. Seminar Nasional Internal Audit : "Mengembangkan <i>Integrated Assurance</i> untuk <i>Triple Bottom Lines</i> : <i>Profit, People and Planet</i> " /National Seminar on Internal Audit : "Developing Integrated Assurance for <i>Triple Bottom Lines : Profit, People and Planet</i> "
8.	Kaniscoro Martin	24. Workshop : "Business Continuity Management System"/Workshop : "Business Continuity Management System"

c. *In House Training* (Internal SPI) :

No.	Peserta/Participant	Tanggal Pelaksanaan & Materi Training/Date & Training Material
1.	Semua Pegawai SPI/All staff of IAU	Tanggal 22 Mei 2014/May 22, 2014 Kebijakan dan Strategi Internal Auditor (SPI)/Policies and Strategies of Internal Auditor (SPI).
2.	Kabag. & Kasi. SPI/Senior and Junior Auditor/staff of IAU	Tanggal 14 Agustus 2014/August 14, 2014 Penggangan (Budgeting)/Budgeting..
3.	Kabag. & Kasi. SPI/Senior and Junior Auditor/staff of IAU	Tanggal 29 September 2014/September 29, 2014 Merumuskan SOP SPI/Formulating SOP for SPI
4.	Kabag. & Kasi. SPI/Senior and Junior Auditor/staff of IAU	Tanggal 10 Oktober 2014/October 10, 2014 Peningkatan Kualitas Pemeriksaan/Improving Quality Inspection
5.	Semua Pegawai SPI/All staff of IAU	Tanggal 4 Nopember 2014/November 4, 2014 KPI SPI
6.	Semua Pegawai SPI/All staff of IAU	Tanggal 12 November 2014/November 12, 2014 DMS (Document Management System)
7.	Semua Pegawai SPI/All staff of IAU	Tanggal 31 Desember 2014/December 31, 2014 Penyusunan PKPT berdasarkan Risiko/Risk Based Preparation of PKPT

c. *In House Training* (Internal SPI) :

d. Kegiatan Non Rutin :

No.	Nama Pegawai/Name of Employee	Uraian/Description
1.	Subagio Istiarno	Ketua Tim Updating SOP/Team Coordinator for SOP update Wk. Ketua Tim Penyusunan KPI/Vice Coordinator of KPI Preparation Team Ketua Tim Evaluasi GCG/Team Coordinator for GCG Evaluation. Ketua Tim Counterpart KPKU/Team Coordinator of KPKU Counterpart. Ketua Tim Penyusunan Pedoman Audit/Coordinator of Audit Guidelines Preparation Team
2.	Sri Utomo	Ketua Tim Annual Report 2013./Team Coordinator for Annual Report 2013. Sekretaris Tim Penyusunan Pedoman Audit./Team Secretary for Preparation of Audit Guidelines Sekretaris Tim Evaluasi GCG./Team Secretary for GCG Evaluation
3.	M Safri DKS	Anggota Tim Renovasi Lobby Lantai 1, Ruang Kerja Lantai 3 & 4./Member of Renovation Team of the 1st Floor, Work Room of 3rd & 4th floor.
4.	Kanisgoro Martin	Anggota Tim Penyusunan Pedoman Audit/Member of Audit Guidelines Preparation Team.

d. Non Regular Activities:

### Pihak Yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala SPI

Dalam Piagam SPI butir II.2 tentang Organisasi disebutkan bahwa Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

### Review dan Penilaian Sistem Pengendalian Intern

Pada setiap kali akan dimulai suatu audit, auditor wajib mereview dan menilai keadaan sistem pengendalian intern obyek yang diaudit (unit kerja) sebagai dasar:

1. Untuk menentukan luasnya prosedur audit dan dalamnya pengujian-pengujian yang akan dilakukan serta penyusunan prosedur audit.
2. Untuk memberikan saran-saran perbaikan/rekomendasi kepada manajemen.
3. Sistem pengendalian intern seperti telah dijelaskan sebelumnya meliputi *review* atas hal-hal yang menyangkut:

### The Appointment and Dismissal of Head of Internal Audit Unit

As stipulated In the IAU Charter point II.2 regarding the Organization, Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.

### Review and Assessment of Internal Control Systems

At the beginning of every audit, the auditor shall review and assess the state of the internal control system of the audit object (unit) as a basis:

1. To determine the scope of the audit procedures and the depth of the audit to be performed, as well as the preparation of audit procedures.
2. To provide suggestions for improvement/recommendations to management.
3. The system of internal control, as previously described, includes a review of matters relating to:

- Lingkungan Pengendalian
- Penilaian Risiko
- Aktivitas Pengendalian
- Informasi dan Komunikasi
- Pemantauan

- Control Environment
- Risk Assessment
- Control Activity
- Information and Communication
- Monitoring

### Tahap-Tahap Review Dan Penilaian Sistem Pengendalian Intern.

1. Pengumpulan data dan informasi  
Kumpulkan data mengenai sistem pengendalian intern antara lain dengan jalan mempelajari manual yang ada, mempelajari operasi yang sesungguhnya dan mengadakan wawancara (*interview*) dengan pejabat yang berkepentingan.
2. Penelaahan.  
Siapkan catatan tertulis mengenai sistem pengendalian intern melalui media sebagai berikut:
  - 1) Daftar pertanyaan tentang pengendalian intern.
  - 2) Bagan Arus (*Flow-Chart*).

Daftar dilengkapi dengan uraian tertulis (*narrative*).

Untuk auditor yang belum biasa menggunakan bagan arus dapat dijalankan sebaliknya, yaitu membuat gambaran garis besar secara tertulis dan kemudian dilengkapi dengan bagan arus.

### Stages of Review and Assessment of Internal Control Systems.

1. Collecting data and information  
Collecting data on the internal control system, among others, by studying the existing manual, learning the actual operation and conducting interview with the officials concerned.
2. Reviewing.  
Preparing a written record of the internal control system through the media as follows:
  - 1) List the question of internal control.
  - 2) Flow Chart

List equipped with a written description (*narrative*).

The list should be equipped with a written description (*narrative*). For auditors who have not been accustomed to using the flow chart can use the other way around, by preparing a written outline and then fitted with a flow chart.



#### Subagio Istiarno, Ketua SPI

Lahir di Solo, 4 November 1962. Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Jurusan Akuntansi di STIE Swadaya, Jakarta pada tahun 1994. Menyelesaikan pendidikan S2 untuk S2- STIE IPWI, Program Studi Manajemen Keuangan STIE IPWI, Jakarta pada tahun 2000. Beliau juga memperoleh pendidikan profesi yaitu: Akuntan – PPAk Universitas Indonesia (2004) dengan Register Negara No.D- 38.373 tgl 13-7-2004; dan Chartered Accountant IAI Jakarta (2013). Subagio ditunjuk sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern berdasarkan SK Direksi No.10/2012 tanggal 1 Juli 2012.

#### Subagio Istiarno, Head of Internal Audit Unit

Subagio Istiarno, Born in Solo on November 4, 1962. Graduated with a Bachelor degree in Economics majoring in Accounting from STIE Swadaya, Jakarta in 1994. Graduated with a Master degree for S2-STIE IPWI, Financial Management Program of STIE IPWI, Jakarta in 2000. He also obtained a professional education of: Accountant-PPAk University of Indonesia (2004) with State Registers No.D-38.373 dated 13-7-2004; and Chartered Accountant IAI Jakarta (2013). Has been appointed as Head of Internal Audit based on the Board of Directors Decree No.10/2012 dated July 1, 2012.

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pengendalian komunikasi korporat, hubungan kelembagaan, hubungan investor serta kesekretariatan Direksi.

### Dasar Hukum Penunjukan dan Periode Jabatan

Mengacu pada peraturan Bapepam IX.I.4 tentang pembentukan Sekretaris Perusahaan serta Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance (GCG)*. Pada Badan Usaha Milik Negara, pada dasarnya tugas Sekretaris Perusahaan antara lain adalah:

- 1) Mengelola strategi komunikasi untuk membangun citra perusahaan.
- 2) Mewakili perusahaan dalam mengkomunikasikan kegiatan perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- 3) Menginformasikan kinerja perusahaan dan *corporate action* kepada pihak yang membutuhkan dan pemangku kepentingan lainnya.
- 4) Mengelola mekanisme pengungkapan informasi secara internal maupun eksternal sesuai dengan kepentingan perusahaan.
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat direksi, rapat direksi dengan komisaris, rapat kinerja perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham, serta keprotokolan Direksi dan administrasi kesekretariatan Direksi.

Sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 22/KEP/DIR/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 mengenai Penetapan Sekretaris Perusahaan, bahwa Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Direktur Keuangan dan SDM sedangkan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Kepala Divisi SDM & Umum.

Dalam perjalanannya, sesuai Surat Keputusan Direksi No. 56/KEP/DIR/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 mengenai Struktur Organisasi Perusahaan, Perusahaan telah membentuk unit Bagian Sekretariat Perusahaan yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Perusahaan, yang hingga saat ini masih dijabat oleh Direktur Keuangan & SDM berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01-A/KEP/DIR/I/2014 tanggal 03 Januari 2014. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 09/KEP/DIR/III/2014 tentang Mutasi dan Rotasi Pejabat/Pegawai sejak tanggal 17 Maret 2014.

## CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is responsible for formulating the policies, planning and control of corporate communications, institutional relations, investor relations, as well as the secretariat of the Board of Directors.

### Legal Basis for the Appointment and Terms of Office

Referring to Bapepam Rules IX.I.4 about the formation of the Corporate Secretary and the Decree of Minister of SOEs No.: KEP-117/M-MBU/2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices In State-Owned Enterprises, basically Corporate Secretary duties include:

- 1) Managing communication strategy in order to build corporate image.
- 2) Representing the Company in communicating the Company's activities to all stakeholders.
- 3) Providing information on the Company's performance and corporate action for the interest of other parties and stakeholders.
- 4) Managing information disclosure mechanism, internally and externally, in accordance with the interests of the Company.
- 5) Coordinating BOD internal meeting, BOD meeting with BOC, meeting on the Company's performance and the General Meeting of Shareholders, as well as the protocol and secretarial administration of the Board of Directors.

As per Directors' Decree No. 22/KEP/DIR/V/2013 dated May 15, 2013 regarding the Establishment of the Corporate Secretary, the Corporate Secretary responsibility was held by the Director of Finance and HR whereas the execution of the Corporate Secretary function was performed by the HR & General Affairs Division Head.

In the course of time, in accordance with the Directors' Decree No. 56/KEP/DIR/XII/2013 dated December 18, 2013 on the Organizational Structure, the Company has established a Corporate Secretary unit under the coordination of Corporate Secretary, the function of which is still assumed by Director of Finance & HR, by virtue of BOD Decree No. 01-A/KEP/DIR/I/2014 dated January 03, 2014. Furthermore, for daily activities Head of Corporate Secretariat Unit is assigned to become Acting Corporate Secretary based on the BOD Decree No. 09/KEP/DIR/III/2014 on Employee Rotation as per March 17, 2014.





**Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®**  
**Sekretaris Perusahaan/**  
**Corporate Secretary**

Pria, kelahiran Jakarta tanggal 26 Mei 1958. Beliau meraih gelar sarjana (S1) dari Universitas Islam Jakarta tahun 1996 dan gelar (S2) dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA, Jakarta tahun 2001. Karir pertamanya dirintis sebagai Pegawai Pelaksana Bagian Reasuransi Kerugian PT Asuransi Kredit Indonesia tahun (1978-1979), Pelaksana Penagihan (1979-1981) dan sebagai Kepala Seksi Penagihan Reasuransi Kerugian (1982-1994). Bertugas di PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai Kepala Bagian *Underwriting Treaty* (Januari 1995- April 2000), Diangkat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi (Mei 2000-Juli 2004) dan sebagai Kepala Divisi Klaim (Agustus 2004-Agustus 2008). Menjabat sebagai Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia sejak September 2008 sampai sekarang.

Male, born in Jakarta on May 26, 1958. He earned a Bachelor degree from University of Islam Jakarta in 1996 and Master's degree from School of Economic Studies IPWIJA, Jakarta, in 2001. He built his career at ASKRINDO as General Reinsurance Division officer in (1978-1979), the Collection Officer (1979-1981) and Head of Collection Division of General Reinsurance Division (1982-1994). He was appointed as Treaty Underwriting Department Head at PT Reasuransi Nasional Indonesia (January 1995-April 2000), Finance and Accounting Division Head (May 2000-July 2004), and Claim Division Head (August 2004-August 2008). He has been serving as Director of Finance and Human Resources since September 2008, until now.

### Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun 2014

### Implementation of Duties of the Corporate Secretary in 2014

NO.	Tanggal/Date	Kegiatan/Activities
1.	17 Feb. 2014/ February 17, 2014	Undangan RUPS tgl. 21 Februari 2014 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2013/Invitation to GMS on February 21, 2014 on the Ratification of Financial Statements of 2013.
2.	18 Feb. 2014/ February 18, 2014	Menyelesaikan dan mengirimkan kuesioner untuk JAMKRINDO bekerjasama dengan Bagian Treaty/Complete and submit Questionnaire for JAMKRINDO in collaboration with Treaty Department.
3.	27 Feb. 2014/ February 27, 2014	Menyampaikan Laporan <i>Self Assessment</i> GCG Tahun 2013 kepada OJK/Submit Self Assessment report on GCG implementation in 2013 to OJK.
4.	14 Mar. 2014/ March 14, 2014	Menyelesaikan dan mengirimkan kuesioner untuk ASWATA/Complete and submit Questionnaire for ASWATA
5.	17 Mar. 2014/ March 14, 2014	Menyelesaikan penyusunan <i>Job Description</i> Bagian Sekretariat Perusahaan sesuai SK Direksi No. 11/KEP/DIR/III/2014/Complete the preparation of Job Description for Corporate Secretariat based on BOD Decree No. 11/KEP/DIR/III/2014
6.	14 Apr. 2014 April 14, 2014	Menyelesaikan pembuatan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan KIS tentang Cadangan Teknis/Complete the preparation of Work Agreement (SPK) with KIS on Technical Reserves
7.	24 Apr. 2014/ April 24, 2014	Menyelesaikan penyusunan Tata Tertib Rapat Direksi sesuai SK Direksi No. 15/KEP/DIR/IV/2014 /Complete the preparation of rules of BOD meeting based on BOD Decree No. 15/KEP/DIR/IV/2014

NO.	Tanggal/Date	Kegiatan/Activities
8.	23 Mei 2014 May 23, 2014	Menyampaikan Laporan Keuangan (Q1 s/d Q4) Publikasi Tahun 2013 kepada AAUI/Provide Financial Statements (Q1 s/d Q4) Published in 2013 to AAUI
9.	23 Mei 2014/ May 23, 2014	Menyelesaikan perpanjangan Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Complete the extension of Company Domicile Certificate
10.	29 Mei 2014/ May 29, 2014	Menyelesaikan penyusunan Annual Report Tahun 2013/Complete the preparation of the 2013 Annual Report
11.	03 Juni 2014/ June 03, 2014	Menyampaikan Survei Lembaga Keuangan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)/Submit Financial Institution survey conducted by Central Bureau of Statistics (BPS)
12.	04 Juni 2014/ June 04, 2014	Menyelesaikan perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Extension of Company Registration (TDP)
13.	05 Juni 2014/ June 05, 2014	Akta Notaris atas RUPS tgl. 22 Maret 2013 tentang Pengesahan atas Penetapan Dewan Pengawas Syariah/Notarial Deed on GMS on March 22, 2013 on Ratification on Determination of the Sharia Supervisory Board
14.	06 Juni 2014/ June 06, 2014	Melengkapi Kuesioner POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen dan mengirimkannya kepada PT Jasa Layanan Risetindo (lembaga survei yang ditunjuk OJK)/Completing the questionnaire of POJK No. 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection and send it to PT Jasa Layanan Risetindo (survey agency designated by IFSA)
15.	06 Juni 2014/ June 06, 2014	Menyampaikan informasi data untuk <i>Reinsurance Directory Asia 2015</i> kepada <i>Asia Insurance Review</i> via email/Convey information data for the 2015 Asian Reinsurance Directory to Asia Insurance Review via email
16.	13 Juni 2014/ June 03, 2014	Menyelesaikan pengiriman Annual Report kepada seluruh mitra dalam dan luar negeri/Completed delivery of Annual Report, to all domestic and foreign partners
17.	17 Juni 2014/ June 17, 2014	Menyelesaikan Pendaftaran Annual Report Award di Komite Nasional Kebijakan <i>Governance</i> (KNKG)/Completing Registration for Annual Report Award in National Committee on Governance (NCG)
18.	27 Juni 2014/ June 27, 2014	Menyelesaikan penyusunan surat tanggapan Direksi kepada OJK terkait Laporan Pemeriksaan Sementara Unit Syariah/Finalization of the Board of Directors response letter to the FSA related to Sharia Unit Interim Inspection Report
19.		Menyelesaikan pembuatan Notulen Rapat Direksi tanggal:/Completing the Board of Directors Meeting Minutes dated: 06 Januari 2014 - 07 April 2014/ 06 January 2014 - 07 April 2014 30 Januari 2014 - 14 April 2014/ 30 January 2014 - 14 April 2014 03 Februari 2014 - 21 April 2014/ 03 February 2014 - 21 April 2014 10 Februari 2014 - 19 Mei 2014/ 10 February 2014 - 19 Mei 2014 10 Maret 2014 - 26 Mei 2014/ 10 March 2014 - 26 Mei 2014 24 Maret 2014 - 09 Juni 2014/ 24 March 2014 - 09 June 2014 01 April 2014 - 23 Juni 2014/ 01 April 2014 - 23 June 2014
20.	02 Juli 2014/ July 02, 2014	Menyelesaikan komparasi peraturan antara POJK No. 2/POJK.05/2014 dan PMK No.152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian/Completing comparison between IFSA regulation No. 2 / POJK.05 / 2014 and PMK 152 / PMK.010 / 2012 on Good Corporate Governance For Insurance Companies
21.	17 Juli 2014/ July 17, 2014	CSR -- Dana Baksos Ramadhan TPI – Rp5.000.000 /CSR -- Ramadan Social Service Fund with TPI – Rp5,000,000
22.	17 Juli 2014/ July 17, 2014	Pedoman Pemberian & Penerimaan Hadiah, Cenderamata dan Jamuan Bisnis/Hiburan ( <i>Entertainment</i> )/Guidelines for Giving and Receiving Gifts, Souvenirs and Entertainment
23.	21 Juli 2014/ July 21, 2014	Surat Direksi No. 298/DIR/NR/VII/2014 tentang Konfirmasi Perpanjangan Pemingkatan Atas PT Reasuransi Nasional Indonesia Tahun 2014/Letter of the Board of Directors No. 298/DIR/NR/VII/2014 on Confirmation of the Extension of PT PT Reasuransi Nasional Indonesia
24.	22 Juli 2014/ July 22, 2014	Penetapan Tim Counterpart Pemingkat (PEFINDO) PT Reasuransi Nasional Indonesia/Appointing Counterpart Team for Rating Agency (PEFINDO) of PT Reasuransi Nasional Indonesia
25.	04 Ags. 2014/ August 04, 2014	Menyelesaikan penyusunan Pedoman Kebijakan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) NASIONAL RE, yang disahkan dengan SK Direksi No. 39/KEP/DIR/VIII/2014/Finalisation of the Manual of NASIONAL RE Corporate Social Responsibility (CSR) program, approved by the Board of Directors by Decree No. 39/KEP/DIR/VIII/2014
26.	13 Ags. 2014/ August 13, 2014	Menyampaikan jawaban terhadap Rekomendasi OJK sesuai surat No. S-299/NB.223/2014 tanggal 16 Juli 2014 perihal Hasil Pemeriksaan Final PT Reasuransi Nasional Indonesia Unit Syariah (koordinasi dengan KDSU, KDRS, KSPI dan KDKA/Delivering response on the IFSA Recommendation, referring to letter No. S-299/NB.223/2014 dated July 16, 2014 regarding the Final Inspection Result on the Sharia Unit of PT Indonesian NASIONAL REinsurance (coordination with KDSU, KDRS, KSPI and KDKA))
27.	22 Ags. 2014/ August 22, 2014	Perayaan HUT NASIONAL RE ke-20 di Gedung Pegadaian/the 20th anniversary celebration of NASIONAL RE at Gedung Pegadaian
28.	29 Ags. 2014/ August 29, 2014	Undangan RUPSLB tgl. 15 September 2014 tentang Asistensi Internal Audit/Invitation to E-GMS on September 15, 2014 on Internal Audit Assistance

NO.	Tanggal/Date	Kegiatan/Activities
29.	06 Sept. 2014/ September 06, 2014	Penyusunan Analisis SWOT & KPI Bag. Sekretariat Perusahaan (koordinasi dgn. Tim KPI dan Konsultan HR)/Preparation of SWOT analysis and KPI for Corporate Secretariat (in coordination with KPIs team and HR Consultants)
30.	06 Sept. 2014/ September 06, 2014	Penyusunan RKAP Tahun 2015/Preparing Corporate Budget Plan 2015
31.	10 Sept. 2014/ September 10, 2014	Menghadiri FGD OJK tentang Penyelarasan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi SDM & Organisasi Industri Jasa Keuangan/Attending FGD by IFSA on Alignment the Needs of HR & Organizational Competency Enhancement for the Financial Services Industry
32.	12 Sept. 2014/ September 12, 2014	Menyampaikan jawaban terhadap Rekomendasi OJK sesuai surat No. S-299/NB.223/2014 tanggal 16 Juli 2014 berupa:/Delivering response on the IFSA Recommendation Letter No. S-299 / NB.223 / 2014 dated July 16, 2014 in the form of: a. SK Dewan Komisaris No. KEP-05/DK/NR/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi PT Reasuransi Nasional Indonesia/a. BOC Decree No. KEP-05/DK/NR/VIII/2014 dated August 26, 2014 on the Nomination & Remuneration PT Reasuransi Nasional Indonesia b. Uraian Jabatan Kepala Bagian Keuangan & Akuntansi Syariah sesuai SK Direksi No. 48/KEP/DIR/IX/2014 tgl. 01 September 2014/b. Description of the Position of Department Head of Sharia Finance & Accounting according to Directors Decree No. 48/KEP/DIR/IX/2014 date September 01, 2014 c. Pedoman Akuntansi Syariah sesuai SK Direksi No. 47/KEP/DIR/IX/2014 tanggal 01 September 2014/c. Sharia Accounting Guideline according to BOD Decree No. 47/KEP/DIR/IX/2014 dated September 01, 2014
33.	15 Sept. 2014/ September 15, 2014	RUPSLB tentang Asistensi Internal Audit/Extraordinary General Meeting about Internal Audit Assistance
34.	16 Sept. 2014/ September 06, 2014	Undangan RUPSLB tentang Tambahan Modal Setor Askrindo kepada NASIONAL RE sebesar Rp250 Miliar (Tahap I sebesar Rp150 Miliar)/Invitation to EGM on Askrindo's Additional Paid Up Capital to NASIONAL RE of Rp250 Billion (Phase I of Rp150 Billion)
35.	17 Sept. 2014/ September 17, 2014	Pengiriman data untuk Reinsurance Directory of Asia 2015 ke Asia Insurance Review/Delivery of data for Reinsurance Directory of Asia 2015 to Asia Insurance Review
36.	19 Sept. 2014/ September 19, 2014	Pengiriman Dokumen Pemeringkatan atas PT Reasuransi Nasional Indonesia Tahun 2014 melalui surat No. 404/DIR/NR/IX/2014/Delivery of Document on PT Reasuransi Nasional Indonesia Rating 2014 by letter No. 404 / DIR / NR / IX / 2014
37.	23 Sept. 2014/ September 23, 2014	RUPSLB tentang Tambahan Modal Setor Askrindo kepada NASIONAL RE sebesar Rp250 Miliar (Tahap I sebesar Rp150 Miliar)/EGM on Askrindo's Additional Paid up Capital to the NASIONAL RE of Rp250 Billion (Phase I of Rp150 Billion)
38.	30 Sept. 2014/ September 30, 2014	Pertemuan antara Sek-Per Askrindo dengan Sek-Per/wakil anak2 perusahaan Askrindo (Usayasa Utama, Askrindo Syariah, NASIONAL RE)/Meeting between the Corporate Secretary of Askrindo with the Corporate Secretary of Subsidiaries (Usayasa Utama, Askrindo Sharia, NASIONAL RE)
39.		Menyelesaikan pembuatan Notulen Rapat Direksi tanggal:/Completing the Board of Directors Meeting Minutes dated: 06 Januari 2014 - 07 April 2014/ 06 January 2014 - 07 April 2014 30 Januari 2014 - 14 April 2014/ 30 January 2014 - 14 April 2014 03 Pebruari 2014 - 21 April 2014/ 03 February 2014 - 21 April 2014 10 Pebruari 2014 - 19 Mei 2014/ 10 February 2014 - 19 Mei 2014 10 Maret 2014 - 26 Mei 2014/ 10 March 2014 - 26 Mei 2014 24 Maret 2014 - 09 Juni 2014/ 24 March 2014 - 09 June 2014 01 April 2014 - 23 Juni 2014/ 01 April 2014 - 23 June 2014
40.	13 Okt. 2014/Oct 13, 2014	Penyelesaian Akta Notaris atas RUPSLB tentang Tambahan Modal Setor Askrindo kepada NASIONAL RE sebesar Rp250 Miliar (Tahap I sebesar Rp150 Miliar)/Completing Notarial Deed on the EGM on Askrindo's additional paid in capital of Rp250 Billion NASIONAL RE (Phase I of Rp150 Billion)
41.	13 Okt. 2014/Oct 13, 2014	Penyelesaian Akta Notaris atas RUPSLB tentang Asistensi Internal Audit/Finalization of Notarial Deed on the EGM of Internal Audit Assistance
42.	15 Okt. 2014/Oct 15, 2014	Kelengkapan Final Data untuk Pemeringkatan Perusahaan kepada PEFINDO/Completeness of Final Data for corporate rating to PEFINDO
43.	27 Okt. 2014/Oct 27, 2014	Undangan Pra-RUPS tentang RKAP Tahun 2015/Invitation to Pre-AGM on the Corporate Budget Plan 2015
44.	29 Okt. 2014/Oct 29, 2014	Pra-RUPS tentang RKAP Tahun 2015/Attending Pre AGM on Corporate Budget Plan 2015
45.	03 Nov. 2014/Nov 03, 2014	Hasil Pemeringkatan Perusahaan dengan Predikat "A" versi PEFINDO/Company's rating with Predicate "A" by PEFINDO
46.	25 Nov. 2014/Nov 25, 2014	Undangan RUPSLB tgl. 9 Desember 2014 tentang Peningkatan Modal Dasar NASIONAL RE/Invitation to EGM on December 9, 2014 on the NASIONAL RE additional Authorized Capital

NO.	Tanggal/Date	Kegiatan/Activities
47.	09 Des. 2014/Dec 09, 2014	RUPSLB tentang Peningkatan Modal Dasar Perusahaan menjadi Rp1.8 Triliun dan Penambahan Modal Disetor Tahap II sebesar Rp100 Miliar (total menjadi Rp250 Miliar)/EGM on the Company's Authorized Capital Increase to Rp1,8 Trillion and Paid Up Capital Increase Phase II of Rp100 Billion (a total of Rp250 Billion)
48.	09 Des. 2014/Dec 09, 2014	RUPS tentang Pengesahan RKAP Tahun 2015/AGM on the Ratification of Corporate Budget Plan 2015
49.	16 Des. 2014/Dec 16, 2014	Undangan RUPSLB tentang Penetapan Pengalihan Tambahan Modal Disetor Usaha Reasuransi Konvensional menjadi Tambahan Modal Disetor Usaha Reasuransi Syariah sebesar Rp150 Miliar/Invitation to EGM on the determination of transfer of additional capital from Conventional Reinsurance business to Sharia Reinsurance Business , amounted Rp150 Billion
50.	17 Des. 2014/Dec 17, 2014	Penyelesaian Akta Notaris atas RUPSLB tentang Peningkatan Modal Dasar Perusahaan menjadi Rp1.8 Triliun dan Penambahan Modal Disetor Tahap II sebesar Rp100 Miliar (total menjadi Rp250 Miliar)/Finalization of the Notarial Deed on the EGM on the Company's Authorized Capital Increase to Rp1,8 Trillion and Paid Up Capital Increase Phase II of Rp100 Billion (a total of Rp250 Billion)
51.	23 Des. 2014/Dec 23, 2014	RUPSLB tentang Penetapan Pengalihan Tambahan Modal Disetor Usaha Reasuransi Konvensional menjadi Tambahan Modal Disetor Usaha Reasuransi Syariah sebesar Rp150 Miliar /EGM on the Determination of transfer of additional capital from Conventional Reinsurance business to Sharia Reinsurance Business, amounted Rp150 Billion
52.	Des. 2014/Dec 2014	Realisasi Corporate Social Responsibility (CSR) berupa:/Realization of Corporate Social Responsibility (CSR) in the form: - Kendaraan Sampah untuk Kelurahan Cikini/- Garbage Vehicle to Sub District Cikini - Renovasi Masjid di Cikini/- Mosque Renovation in Cikini - Bantuan Untuk Korban Longsor Banjarnegara/- Donation For Victims of landslide at Banjarnegara
		Penyusunan Kalender NASIONAL RE 2015/Preparing the NASIONAL RE Calendar of 2015
53.	Jan. s/d Des. 2014/ Jan. to Dec, 2014	Sponsorship berbagai event untuk para mitra usaha/January to December 2014, Sponsorship of various events for business partners
54.		Menyelesaikan pembuatan Notulen Rapat Direksi tanggal:/Completing the Board of Directors Meeting Minutes dated: 07 Juli 2014 - 03 November 2014/July 07, 2014 - November 03, 2014 04 Agustus 2014 - 10 November 2014/ August 04, 2014 - November 10, 2014 11 Agustus 2014 - 17 November 2014/August 11, 2014 - November 17, 2014 11 Agustus 2014 - 24 November 2014/August 11, 2014 - November 24, 2014 22 September 2014 - 08 Desember 2014/September 22, 2014 - December 08, 2014 06 Oktober 2014 - 22 Desember 2014/October 06, 2014 - December 22, 2014 13 Oktober 2014 - 31 Desember 2014/October 13, 2014 - December 31, 2014 27 Oktober 2014/ - 27 October 2014

## AUDITOR EKSTERNAL

### Penunjukan Auditor Eksternal

Sesuai hasil rapat dengan Pemegang Saham tanggal 6 Mei 2014 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Juli 2014 tentang Pekerjaan Audit Umum Laporan Keuangan PT Reasuransi Nasional Indonesia, Perusahaan telah menunjuk KAP Soejatna, Mulyana & Rekan, untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan NASIONAL RE tahun buku 2014. Penunjukan ini merupakan periode ke-4 (empat) dari KAP Soejatna, Mulyana & Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan NASIONAL RE dan juga penunjukkan yang ke-4 (empat) dari akuntan publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan.

### Kriteria Penunjukan

Penunjukan KAP Soejatna, Mulyana & Rekan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku dan telah melalui tahapan proses seleksi yang

## EXTERNAL AUDITOR

### Appointment of External Auditor

In accordance with the results of the meeting of Shareholders dated May 6, 2014 and by virtue of the Cooperation Agreement dated July 21, 2014 of the General Audit of Financial Statements of PT Reasuransi Nasional Indonesia, the Company has appointed KAP Soejatna, Mulyana & Partners, to conduct an audit of financial statements of NASIONAL RE fiscal year 2014. This is the 4th (fourth) appointment of KAP Soejatna, Mulyana & Partners to conduct an audit on the financial statements of NASIONAL RE and also the 4th (fourth) appointment of public accountants to audit the financial statements of the Company.

### Criteria for Appointment

The appointment of KAP Soejatna, Mulyana & Partners, Independent External Auditors, refers to the applicable legislation and has been through stages of selection process

berdasarkan kriteria berikut:

1. Berpengalaman sebagai auditor lembaga keuangan non-bank.
2. Memahami regulasi lembaga keuangan non-bank di Indonesia, serta peraturan lainnya yang relevan.
3. Memahami produk asuransi/reasuransi.
4. Berpengalaman dan paham mengenai manajemen risiko.

### Imbalan Jasa

KAP Soejatna, Mulyana & Rekan yang ditunjuk oleh Perusahaan telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Perusahaan dengan tepat waktu. KAP juga telah bekerja secara independen dan memenuhi kriteria yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Jumlah imbalan jasa yang diberikan Perusahaan kepada KAP Soejatna, Mulyana & Rekan tersebut adalah sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) sudah termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dan pajak lainnya yang terkait. Tidak terdapat jasa lain yang diberikan selain jasa *financial auditing*.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengertian pengendalian internal berdasarkan COSO (*Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission*) yang dikeluarkan pada tahun 1992 adalah sebagai berikut : sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini :

1. Efektivitas dan efisiensi operasi
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

COSO memandang pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan.

Pengendalian bukanlah sesuatu yang ditambahkan dalam proses manajemen tersebut, akan tetapi merupakan bagian integral dalam proses tersebut.

based on the following criteria:

1. Experienced as auditor of non-bank financial institutions.
2. Understanding the regulation of non-bank financial institutions in Indonesia, as well as other relevant regulations.
3. Understand insurance/reinsurance.
4. Experienced and knowledgeable about risk management.

### Fees

KAP Soejatna, Mulyana & Partners, appointed by the Company, has submitted the audit results and management letter to the Company in a timely manner. KAP has also committed their work independently and meet the criteria agreed beforehand.

Total fee for KAP Soejatna, Mulyana & Partners services rendered to the Company amounted Rp97,000,000,00 (ninety-seven million rupiah) includes VAT at 10% (ten percent) and other related taxes. There are no other services provided in addition to financial auditing services.

## INTERNAL CONTROL SYSTEM

Based on COSO (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission), which was launched in 1992: internal control is process, affected by entity's Board of Directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:

1. Effectiveness and efficiency of operations
2. Reliability of Financial Reporting
3. Compliance with Applicable laws and regulations

COSO views internal control as a series of actions, which covers the entire process within the organization. Internal controls are in the basic management processes, including planning, implementation and monitoring.

Control is not something that is added in the management process, but is indeed an integral part of the process.



Komponen pengendalian intern menurut *COSO* adalah :

1. **Lingkungan pengendalian (*control environment*).**  
Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis dan kompetensi dari orang dan entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab serta mengorganisasikan dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan oleh *board*.
2. **Penaksiran risiko (*risk assessment*).**  
Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas dimana organisasi beroperasi.
3. **Aktivitas pengendalian (*control activities*).**  
Pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan dapat tercapai.
4. **Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*).**  
Sistem yang memungkinkan orang atau entitas, memperoleh dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola dan mengendalikan operasinya.
5. **Pemantauan (*Monitoring*).**  
Sistem pengendalian internal perlu dipantau, proses ini bertujuan untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya

Kelima komponen pengendalian internal di atas memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Larry F Konrath (1999) menggambarkan kelima komponen tersebut bagaikan sebuah bangunan rumah dimana Lingkungan Pengendalian menjadi pondasinya. Penilaian risiko, aktivitas pengendalian dan informasi dan komunikasi menjadi pilar-pilarnya. Sedangkan *Monitoring* menjadi atapnya. Dengan demikian, sebuah pengendalian internal akan berjalan secara efektif jika kelima unsur tersebut terbangun dengan baik dan beroperasi sesuai proporsinya masing-masing.

Menurut *COSO*, semua orang dalam organisasi yaitu Manajemen, Dewan direksi, Komite Audit dan Personil lainnya bertanggung jawab terhadap pengendalian internal, karena semua orang dalam organisasi memiliki peran dalam pengendalian internal, sehingga pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan baik apabila ada salah satu anggota yang tidak menjalankan perannya dalam pengendalian internal.

Internal control components according to *COSO* are:

1. **Control environment.**  
Control environment factors include the integrity, ethical values and competence of the entity's people; management's philosophy and operating style; the way management assigns authority and responsibility and organizes and develops its people; and the attention and direction provided by the board of directors.
2. **Risk assessment.**  
The mechanism of the identification, analysis and management of relevant risks to various activities conducted whereby the Company domiciles.
3. **Control Activities.**  
The policies and procedures set forth by the management to ensure the achievement of the entity's objectives.
4. **Information and Communication.**  
System that allows any person or entity, to obtain and exchange information required for implementing, managing and controlling operations.
5. **Monitoring**  
Internal control systems need to be monitored, this process aims to assess the quality of system performance over time. It is run through the activity of continuous monitoring, separate evaluations, or a combination of both.

The five components of internal control above are closely related to each other. Larry F Konrath (1999) describes those five components as a house, with Environmental Control becomes the foundation. Risk assessment, control activities and information and communication become pillars. While monitoring serves as the roof. Thus, an internal control would be rendered effective if the five elements are well established and operating in accordance proportions respectively.

According to *COSO*, every person in the organization, namely Management, Board of Directors, Audit Committee and other personnel are responsible for internal control, because everyone in the organization has a role in internal control, so that internal control will not work properly should one of its members does not perform his/her role in internal control.

Pihak-pihak luar seringkali memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan, seperti Auditor eksternal, Badan Regulasi dan legislatif, customer, analis keuangan dan media massa. Namun demikian pihak ketiga tersebut tidak bertanggung jawab terhadap pengendalian internal karena mereka bukan bagian dari organisasi maupun bukan bagian dari sistem pengendalian internal.

### Sistem Pengendalian Intern Perusahaan

Pengendalian internal yang dijalankan perusahaan adalah menggunakan metode COSO sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personil lain, yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 (tiga) tujuan yaitu:

1. Efektivitas dan efisiensi operasional
2. Keandalan informasi baik informasi yang bersifat keuangan maupun operasional
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Perusahaan.

Komitmen pentingnya pengendalian internal dapat dilihat pada:

1. Standar Profesional Auditor internal mengenai keharusan menguji sistem pengendalian internal.
2. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Industri Asuransi atau industri lain yang relevan.

Berdasarkan pengertian, tujuan dan komitmen di atas, pengendalian internal dinilai dari 3 (tiga) dimensi, yaitu:

- a. Dimensi I yaitu pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian internal dapat dicapai.
- b. Dimensi II yaitu pengendalian internal dievaluasi dalam dua tingkat yaitu:
  - 1) Tingkat entitas, pengendalian internal berlaku terhadap keseluruhan unit kerja seperti kebijakan, *codes of conduct*.
  - 2) Tingkat aktivitas, pengendalian yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti *Standard Operating Procedure (SOP)*.
- c. Dimensi III, yaitu lima komponen pengendalian intern sebagai batasan dan kerangka kerja dalam mengevaluasi dengan menyediakan kriteria penaksiran yang diklasifikasikan dalam:
  - 1) Lingkungan pengendalian (*control environment*)  
Auditor internal melakukan evaluasi kecukupan dan keefektifan atas tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan

Outsiders may often contribute to the achievement of corporate goals, such as external auditors and legislative and Regulatory Agencies, customers, financial analysts and the media. However, those third parties are not responsible for the internal control because they are not part of the organization, nor part of the internal control system.

### Internal Control System of the Company

The Internal control system adopted by the Company uses COSO method as described above, a process which is conducted by the Board of Commissioners, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance about the achievement of 3 (three) objectives, namely:

1. Effectiveness and efficiency of the operation.
2. Reliability of information, both financial and operational.
3. Compliance with applicable laws and regulations, including Company internal regulations.

Commitment to internal control is evident by:

1. Internal Auditor Professional Standards, regarding the necessity to test the internal control system.
2. Applicable rules and regulations in the insurance industry or other relevant industries.

Based on the meaning, purpose and commitment above, internal control is assessed based on the following 3 (three) dimensions:

- a. Dimension I, internal controls is designed to provide reasonable assurance that the internal control objectives can be achieved.
- b. Dimension II, internal control is evaluated in two levels, namely:
  - 1) The entity level, internal control applies to the whole unit, such as policies, codes of conduct.
  - 2) The activity level, internal control is designed to achieve a particular goal, such as the Standard Operating Procedure (SOP).
- c. Dimension III, the five components of internal control as a guidance and a framework for evaluating by providing assessment criteria classified into:
  - 1) Control Environment  
Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness of the actions, policies and procedures, which reflect the

keseluruhan perilaku manajemen puncak, direksi dan pemilik entitas atas pengendalian dan kepetingannya. Seperti:

- Integritas dan nilai etis;
- Komitmen terhadap kompetensi;
- Filosofi manajemen dan gaya operasi;
- Struktur organisasi;
- Dewan direksi atau komite audit;
- Pendelegasian kewenangan dan tanggungjawab;
- Kebijaksanaan dan praktik sumber daya manusia.

#### 2) Penilaian risiko (*risk assessment*)

Auditor internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dengan mengidentifikasi dan menganalisis tanggapan dan tindakan yang dilakukan manajemen atas risiko-risiko yang relevan terhadap penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal ini penilaian risiko dilihat dari asersi manajemen yang harus dipenuhi, yaitu:

- Keberadaan dan kejadian;
- Kelengkapan;
- Penilaian dan alokasi;
- Hak dan kewajiban;
- Penyajian dan pengungkapan.

#### 3) Aktivitas Pengendalian (*Control Activity*)

Auditor internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan, yakni:

1. Adanya pemisahan tugas;
2. Adanya otorisasi atas transaksi dan aktivitas;
3. Adanya dokumen dan pencatatan yang memadai;
4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan;
5. Pengujian independen atas kinerja.

#### 4) Informasi dan komunikasi (*information and communication*)

Auditor internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas terhadap metode-metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menyusun, mengklasifikasikan, mencatat dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas atas aset-aset terkait.

Aktivitas pengendaliannya dapat berupa :

1. Keberadaan;
2. Kelengkapan;
3. Akurasi;
4. Klasifikasi;
5. Ketetapan waktu;
6. Posting dan pengikhtisaran.

overall behavior of top management, BOD and the owner of the entity, for control and interests. such As:

- Integrity and ethical values;
- Commitment on competence;
- Management philosophy and operating style;
- The structure of the organization;
- The Board of Directors or audit committee;
- Delegation of authority and responsibility;
- The policies and practices of human resources.

#### 2) Risk assessment

Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness by identifying and analyzing the responses and actions taken over the management of risks relevant to the financial statements in accordance with generally accepted accounting principles. In this case, the risk assessment from the management's assertions that must be met, namely:

- The existence and occurrence;
- Completeness;
- Assessment and allocation;
- The rights and obligations;
- Presentation and disclosure.

#### 3) Control Activity

Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness of the policies and procedures established by the management to achieve financial reporting purposes, namely:

1. Separation of duties;
2. Authorization of transactions and activities;
3. Adequate documents and records;
4. Physical control over assets and records;
5. Independent testing for performance.

#### 4) Information and communication

Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness of the methods used to identify, organize, classify, record and report entity transactions and to maintain accountability for related assets.

Control activities may include:

1. Existence;
2. Completeness;
3. Accuracy;
4. Classification;
5. timeliness;
6. Posting and summarizing.

#### 5) Pemantauan (*monitoring*)

Auditor internal mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari penaksiran terus menerus dan periodik yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa efektivitas rancangan dan pelaksanaan struktur pengendalian sedang berjalan sesuai dengan tujuannya atau perlu dimodifikasi.

Ciri-ciri pengendalian internal yang efektif:

- a. Tujuannya jelas;
- b. Dibangun untuk tanggungjawab bersama;
- c. Biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan;
- d. Didokumentasikan;
- e. Dapat diuji dan direview;
- f. Dapat dikelola.

Pada perusahaan reasuransi, lima komponen di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian seperti:
  - a. Memahami lingkungan bisnis reasuransi
  - b. Supervisi dan pemantauan seperti kontrol atas kebijakan penerbitan polis/dokumen, batas (limit) persetujuan klaim.
2. Penilaian risiko berupa:
  - a. Peningkatan solvabilitas sebagai persyaratan dari regulator (pemerintah);
  - b. Belum adanya kebijakan terkait dengan pengawasan dan *update* data polis/peserta;
  - c. Kegagalan untuk memperbaharui data peserta yang mengakibatkan salah penilaian dalam menentukan premi.
3. Aktivitas pengendalian  
Aktivitas pengendalian ini terkait pada siklus yang ada, seperti:
  - a. Siklus pendapatan yaitu cara perusahaan reasuransi dalam memelihara keandalan master data pemegang polis/peserta.
  - b. Siklus biaya yaitu kebijakan mengenai persetujuan pembayaran/pengajuan klaim, audit pengajuan klaim peserta.
4. Informasi dan komunikasi  
Pada tahap ini, Auditor internal memastikan apakah sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan, diinformasikan dan dikomunikasikan ke semua unit kerja.
5. Pemantauan  
Auditor internal melakukan kegiatan pengawasan yang sedang berjalan, evaluasi secara terpisah dan pelaporan atas manajemen risiko.

#### 5) Monitoring

Internal auditors evaluate the adequacy and effectiveness of continuous and periodic assessment carried out by the management to ensure whether the effectiveness of the design and implementation of the control structure is in accordance with the objectives or need to be modified.

The characteristics of an effective internal control:

- a. Clear objectives;
- b. Built for shared responsibility;
- c. The costs is justified to the achieve goal;
- d. documented;
- e. Can be tested and reviewed;
- f. Can be managed.

In the reinsurance industry, the five of the above components can be described as follows:

1. The control environment such as:
  - a. Understanding the reinsurance business environment
  - b. Supervision and monitoring, such control over policy issuance/document, the limit of claim approval.
2. Risk Assessment, such as:
  - a. Increase in solvency as requirements from the regulator (government);
  - b. The absence of policies related to surveillance and policy/participants data update;
  - c. Failure to renew the participant data resulting in incorrect assessments in determining the premium.
3. Control activities  
The control activities are related to the following cycle:
  - a. Revenue cycle, how reinsurers in maintaining the reliability of the data master of policyholder/participant.
  - b. Cost Cycle, the policy regarding approval of payment/submission of claims, claims submission audit.
4. Information and communication  
At this stage, the internal auditor ensures whether the systems and procedures that have been defined, shared and communicated to all work units.
5. Monitoring  
Internal auditors conducting ongoing monitoring, evaluation and reporting separately on risk management.

Ada tiga cara yang dapat digunakan untuk dapat menghasilkan dan melakukan evaluasi pengendalian intern yakni:

1. *Internal Control Questionnaires*

Merupakan cara yang paling sederhana dan praktis. Hal ini dengan memberikan pertanyaan yang bisa digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian intern di suatu unit kerja.

2. *Flowchart*

Flowchart menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit kerja/divisi, misalnya penerbitan polis, penerbitan invoice (faktur), kelayakan penerimaan Principal, sistem dan prosedur akseptasi, utang dan pengeluaran kas, digambarkan arus dokumen mulai dari permintaan akseptasi (*offer*), persetujuan akseptasi (*R/I Slip*) sampai dengan pembayaran premi yang berasal dari *offer* tersebut.

3. *Narrative*

Hal ini dilakukan auditor internal dengan cara menceritakan dalam bentuk memo, sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas, prosedur penerbitan polis.

There are three ways that can be used to prepare and evaluate the internal control:

1. *Internal Control Questionnaires*

It is the most simple and practical. It is performed by asking questions that can be used to understand and evaluate the internal control in a work unit.

2. *Flowchart*

Flowchart depicts the flow of documents in the system and procedures in a work unit/division, for example, policy issuance, invoice issuance, the feasibility of Principal acceptance, system and procedures of acceptance, debt and cash disbursements, described as the flow of documents ranging from acceptance request (*offer*), approval acceptances (*R/I slip*) to the premium payment from the offer.

3. *Narrative*

It is brought about by the internal auditors by describing using memo, accounting systems and procedures applied in the company, such as cash disbursements procedures, policy issuance procedures.

## PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Selama tahun 2014, perusahaan senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan para mitra usaha sehingga seluruh masalah teknis dan non-teknis yang timbul senantiasa dapat diselesaikan tanpa harus menempuh jalur hukum.

### AKSES INFORMASI

- Buletin NASIONAL RE VIEW
- Web Site: PT Reasuransi Nasional Indonesia [www.nasionalre.co.id](http://www.nasionalre.co.id)

## KODE ETIK

### Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code Of Conduct*)

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan bagian dari Pedoman GCG Perusahaan yang disusun berdasarkan pertimbangan bahwa dalam mengelola Perusahaan selain harus mengikuti peraturan perundang-undangan harus pula menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Komitmen untuk menegakkan kode etik di Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat reputasi Perusahaan.

## LEGAL CASES

In 2014, the Company fosters good relationships with all of its business partners so that all technical and non-technical problems arising can always be resolved without going to court.

### INFORMATION ACCESS

- NASIONAL RE VIEW Buletin
- Web Site: PT Reasuransi Nasional Indonesia [www.nasionalre.co.id](http://www.nasionalre.co.id)

## CODE OF CONDUCT

### Code Of Conduct

Code of Conduct is part of the Company's GCG Guidelines drawn up on the consideration that, in managing the organization, not only must the Company comply with the laws and regulations, but also uphold ethical norms and values. The commitment to uphold the code of conduct in the Company is expected to increase and strengthen the reputation of the Company.



## Keberadaan Pedoman Perilaku

*Code of Conduct* adalah panduan berperilaku yang menjabarkan tingkah laku moral dan etika yang diharapkan dari para Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai dan pelaku bisnis lainnya yang berhubungan dengan bisnis Perusahaan. Lebih lanjut, panduan ini memaparkan lebih rinci tentang kebijakan, standar dan prosedur Perusahaan serta bagaimana seharusnya para anggota Perusahaan bertingkah laku sebagai bagian dari tenaga kerja Perusahaan.

## Tujuan *Code of Conduct*

Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Pedoman Etika dan Perilaku atau *Code of Conduct* ini akan terus dikaji secara berkala dan berkelanjutan serta dilakukan penyesuaian dengan perubahan dinamika lingkungan usaha dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Perusahaan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Tujuan penerapan *Code of Conduct* bagi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk karakter individu Perusahaan yang disiplin dan beretika dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing serta dalam berinteraksi dengan sesama individu dalam Perusahaan maupun dengan pemangku kepentingan lainnya.
2. Menciptakan suasana kerja yang kondusif di lingkungan Perusahaan.
3. Sebagai pedoman yang mengatur, mengawasi sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dan jabatan setiap individu dalam Perusahaan.

## Isi *Code of Conduct*

Pedoman Perilaku Perusahaan berisikan mengenai:

1. Etika Bisnis
  - a. Etika terhadap Perusahaan Asuransi
  - b. Etika terhadap Sesama Perusahaan Reasuransi
  - c. Etika terhadap *Broker* Reasuransi
  - d. Etika terhadap *Broker* Retrosesionaler
  - e. Etika terhadap Retrosesionaler
  - f. Etika terhadap Mitra Bisnis
  - g. Etika terhadap Regulator
  - h. Etika terhadap Masyarakat
  - i. Etika terhadap Pegawai
  - j. Etika terhadap Pemegang Saham
2. Etika Kerja
  - a. Kepatuhan terhadap Hukum
  - b. Benturan Kepentingan
  - c. Donasi dan Hadiah

## The Existence of Code of Conduct

The Code of Conduct is a guide that outlines the behavior of moral and ethical behavior expected of the Board of Commissioners, Directors, Employees and other businesses doers related to the Company's business. Furthermore, this guide describes more detailed on policies, standards and procedures of the Company and the members of the Company's, as well as how to behave as part of the Company's workforce.

## The Purpose of Code of Conduct

As a guideline that is dynamic in nature, Code of Conduct will continue to be reviewed on a regular and an ongoing basis and be adjusted to the changing dynamics of the business environment with regard to the applicable Company's values, laws and regulations.

The purpose of the implementation of Code of Conduct for the Company are as follows:

1. Forming the Company's disciplined and ethical individual character in carrying out their duties and responsibilities as well as in interacting with other individuals within the Company and with other stakeholders.
2. Creating a conducive working atmosphere within the Company.
3. As guidelines that regulate, supervise and prevent the abuse of power and position of each individual within the Company.

## Code of Conduct Content

The Company's Code of Conduct consists of:

1. Business Ethics
  - a. Ethics to the Insurance Company
  - b. Ethics to the Fellow Reinsurance Company
  - c. Ethics to the Reinsurance Brokers
  - d. Ethics to the Retrocessionaire Broker
  - e. Ethics to the Retrocessionaire
  - f. Ethics to the Business Partners
  - g. Ethics to the Regulator
  - h. Ethics to the Society
  - i. Ethics to the Employee
  - j. Ethics to the Shareholders
2. Work Ethics
  - a. Compliance with Laws
  - b. Conflict of Interest
  - c. Donations and Gifts

- d. Anti Diskriminasi
  - e. Integritas Laporan Keuangan
  - f. Perlindungan informasi Perusahaan
  - g. Perlindungan Harta Perusahaan
  - h. Kegiatan Sosial dan Politik
  - i. Perilaku sebagai Atasan
  - j. Perilaku sebagai Bawahan
  - k. Perilaku Etis terhadap Sesama Karyawan
3. Penanganan Masalah Etika
    - a. Bagaimana Mengidentifikasi Masalah Etika
    - b. Kemana Harus Melapor
    - c. Perlindungan terhadap Saksi dan Pelapor
  4. Penerapan dan Penegakan Pedoman Perilaku
    - a. Organisasi
    - b. Penerapan Pedoman Perilaku
    - c. Penegakan Pedoman Perilaku
    - d. Sanksi atas Pelanggaran Pedoman Perilaku
    - e. Pernyataan kepatuhan.

- d. Anti Discrimination
  - e. Integrity of Financial Statements
  - f. Protection of Company information
  - g. Protection of Company Property
  - h. Social and Political Activity
  - i. Behavior as Superior
  - j. Behavior as Subordinate
  - k. Ethical Behavior toward Fellow Employees
3. Handling Ethical Issues
    - a. How to Identify Ethical Issues
    - b. Where to Report
    - c. Protection of Witness and Reporter
  4. Implementation and Enforcement of Code of Conduct
    - a. Organization
    - b. Implementation of Code of Conduct
    - c. Enforcement of Code of Conduct
    - d. Sanctions for Violation of Code of Conduct
    - e. Statement of Compliance

## WHISTLE BLOWING SYSTEM

### Dasar Hukum

Pedoman dan prosedur penanganan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di NASIONAL RE ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06/KEP/DIR/II/2014 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

*Whistleblowing System* ini merupakan suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi dalam Perusahaan. Secara internal Perusahaan, pelaporan pelanggaran menjadi cara untuk mendorong Karyawan Perusahaan untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya.

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor dan Perusahaan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem perlindungan Pelapor.

### Mekanisme Whistleblowing

Mekanisme pelaporan pelanggaran disosialisasikan kepada seluruh *Stakeholders* dalam rangka implementasi GCG di NASIONAL RE. Perusahaan wajib menerima pelaporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal. Perusahaan telah menyediakan 2 (dua) alternatif pengelolaan pelaporan,

## WHISTLE BLOWING SYSTEM

### Legal Basis

The guidelines and procedures for handling report of violations (*whistleblowing*) at NASIONAL RE is stipulated by the Decree of the Board of Directors No.06 /KEP/DIR/II/2014 on Guidelines for Reporting Violations System (*Whistleblowing System*).

*Whistleblowing System* is a system that serves as a medium for a witness, to convey information regarding the indication of violations that occurred in the Company. Internally in the Company, reporting violations is the a way to encourage employees to be more willing to act to prevent fraud and corruption by reporting it to parties assigned to handle it.

The Company is committed to protecting the Whistleblower and the Company adheres to all relevant legislation and best practices applicable in the implementation of the Whistleblower protection.

### Whistleblowing Mechanism

The mechanism on violation reporting is disseminated to all stakeholders in order to implement the GCG principles at NASIONAL RE. The Company is required to receive the report of violations from internal as well as from external parties. The Company has provided 2 (two) alternative

yaitu melalui jalur Direksi dan jalur Dewan Komisaris sesuai dengan level pelaku pelanggaran.

Perusahaan telah menetapkan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang terdiri dari Divisi SPI, Bagian SDM dan unit kerja lain yang berada di bawah kewenangan Direksi berdasarkan Keputusan Direksi. Para pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelaporan/penyingkapan berdasarkan kategori Pelapor seperti:

- Direksi, jika Terlapor adalah Insan Perusahaan selain Tim Kepatuhan GCG, Dewan Komisaris dan Direksi.
- Dewan Komisaris, jika Terlapor adalah Direksi.
- Direktur Utama, jika Terlapor adalah Dewan Komisaris, Tim Kepatuhan GCG.

Penyampaian Pelaporan:

- a. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi/Direktur Utama/Dewan Komisaris NASIONAL RE u.p. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke Perusahaan dengan alamat Jl. Cikini Raya No. 99 Jakarta 10330.
- b. Pelaporan pelanggaran secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.
- c. Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi fotokopi dokumen pendukung seperti: dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.

Penerimaan Pelaporan:

- Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh *Stakeholders* dan/atau Perwakilan *Stakeholders* baik secara lisan maupun tertulis.
- Perusahaan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian Pelaporan Pelanggaran pada saat *Stakeholders* dan/atau perwakilan *Stakeholders* mengajukan Pelaporan Pelanggaran.
- Perusahaan wajib memberikan tanda terima, jika pelaporan pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas.
- Apabila pelaporan pelanggaran diajukan oleh perwakilan *Stakeholders*, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu fotokopi buku identitas *Stakeholders* dan perwakilan *Stakeholders* dan Surat kuasa dari *Stakeholders*.

management reporting, namely through the Board of Directors and through the Board of Commissioners, in accordance with level of suspected violators.

The Company established the Violation Report Management Team, consisting of SPI Division, Human Resources Department and other work units under the authority of the Board of Directors, based on the decision of the BOD. The parties that are authorized to follow up reporting/disclosure by the Reporting category are:

- Board of Directors, if the Reported person is employee of the Company, except those serving in GCG Compliance Team, Board of Commissioners and Board of Directors.
- Board of Commissioners, if the Reported is member of the Board of Directors.
- Managing Director, if the Reported is member of BOC and GCG Compliance Team

Report Submission:

- a. Delivering an official letter addressed to the Board of Directors/President Director/Board of Commissioners of the NASIONAL RE to the attention of Violation Report Management Team, by hand delivery or by mail to the Company, Jl. Cikini Raya No. 99 Jakarta 10330.
- b. Reporting violations in writing shall be furnished with a copy of identity and supporting evidence such as documents relating to the transactions carried out and /or reporting the violation to be delivered.
- c. Reporting violations in writing without copy of identity photocopies shall be furnished with supporting documents, such as: documents relating to the transactions carried out and/or reporting the violation to be delivered.

Receiving Report:

- The Company receives reports of violations submitted by stakeholders and/or representative of stakeholders, both orally and in writing.
- The Company provides an explanation of the policies and procedures of resolving Violation Report, the moment *Stakeholders* and/or representatives filing Violation Report.
- The company must provide receipt, if report is submitted in writing and bearing identity.
- If the violations report is filed by representative of stakeholder, in addition to the above documents, it should also submitted other documents, namely copy of identity of *Stakeholders*, representative of *Stakeholders* and the power of attorney from stakeholders.

- Jika perwakilan *Stakeholders* adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan Pelaporan Pelanggaran berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.
- Penerima Pelaporan Pelanggaran adalah Direksi/Direktur Utama/Dewan Komisaris u.p. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran.

Sejak dilakukannya sosialisasi atas mekanisme *whistleblowing* pada Februari 2014, sampai dengan akhir Desember 2014 tidak ada pengaduan pelanggaran sepanjang tahun 2014.

## MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

### Konsep Pengelolaan Risiko Perusahaan

Situasi lingkungan eksternal dan internal Perusahaan yang mengalami perubahan dengan pesat telah menimbulkan risiko yang semakin kompleks bagi kegiatan usaha Perusahaan sehingga meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*) dan penerapan manajemen risiko yang meliputi lingkungan pengendalian, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian internal.

Bagi Perusahaan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola Perusahaan mengenai kemungkinan kerugian Perusahaan di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja Perusahaan, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha Perusahaan serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing Perusahaan.

Bagi regulator, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi Perusahaan yang dapat mempengaruhi permodalan Perusahaan dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan atas Perusahaan.

- If the representatives of stakeholders is an institution or a legal entity, it must be accompanied by document stating that the party applying for Reporting Violations is authorized to represent the organization or legal entity.
- Recipient of Violations Report are Board of Directors/ President Director/Board of Commissioners, to the attention of Reporting Violations team business.

Since the dissemination of whistleblowing mechanism in February 2014, until the end of December 2014 there are no complaints of violations reported throughout 2014.

## ENTERPRISE RISKS MANAGEMENT

### The concept of Enterprise Risk Management

Rapid changes in the Company's external and internal environment poses increasingly complex risks for the Company's operations and hence increases the need for the practice of sound corporate governance (GCG) and the application of risk management which includes the control environment, policies, procedures and risk limits, process of identification, measurement, monitoring, information systems and risk management and internal control systems.

For the Company, the application of risk management increases shareholder value, provides overview to the management about the possible loss of the Company in the future, improves methods and systematic decision-making process based on the availability of information and is used as the basis for a more accurate measurement of the Company's performance and to assess the risks inherent in the instruments or the Company's business, as well as creates a strong risk management infrastructure in order to improve the competitiveness of the Company.

For regulator, the application of risk management will facilitate an assessment of the potential losses faced by the Company that may affect the Company's capital and as one of the basis of assessment in setting strategy and oversight of the Company's focus.

Esensi dan penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perusahaan tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Perusahaan.

Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar dan struktur, ukuran dan kompleksitas usaha perasuransian, maka tidak terdapat sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh perusahaan sehingga setiap perusahaan harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada masing-masing perusahaan. Risiko dalam konteks Perusahaan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif maupun positif terhadap pendapatan dan permodalan Perusahaan. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal Perusahaan harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang masih mungkin timbul dari kegiatan Perusahaan meskipun telah dikendalikan (*residual risks*), termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya.

Setelah dilakukan identifikasi risiko secara akurat, selanjutnya secara berturut-turut Perusahaan perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Pengukuran risiko tersebut dimaksudkan agar Perusahaan mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usahanya sehingga Perusahaan dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha dimaksud.

Sementara itu, dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, Perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, terutama yang bersifat material dan/atau yang berdampak pada permodalan Perusahaan. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif yang akan digunakan oleh pihak pengambilan keputusan dalam Perusahaan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan. Selanjutnya berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Perusahaan melakukan pengendalian risiko antara lain dengan cara penambahan modal, lindung nilai dan teknik mitigasi risiko lainnya.

The essence in the implementation of risk management is the adequacy of procedures and methodologies of risk management so that the Company's operations can still be controlled (*manageable*) within the acceptable boundary/limit and is profitable.

However, given the differences in market conditions and the structure, size and complexity of the insurance business, there is no such a thing as the universal system of risk management for all companies, so that each company has to develop its risk management system in accordance with the functions and organization. Risk is a potential occurrence, both predictable (*anticipated*) or unexpected (*unanticipated*) which can bring positive or negative impact on the Company's earnings and capital. To be able to apply the risk management process in the early stage the Company shall accurately identify the risks by studying the existing risk (*inherent risks*) and potential risk arising from the activities of the Company, despite the fact that the control system is in place (*residual risks*), including risk from related companies and other affiliates.

After accurately identifying the risks, then the Company shall conduct measurement, monitoring and risk control. Risk measurement is intended to enable the Company to calculate the risk exposure inherent in its business activities, to predict the impact on capital that should be maintained in order to support the business activities.

Meanwhile, in order to carry out the monitoring of risk, the Company shall conduct an evaluation on the risk exposure, especially the material risks and /or risks that can impact on the Company's capital. Monitoring results, including evaluation on risk exposure, was reported in a timely, accurate and informative basis to be used by the decision-maker, including the required follow-up. Furthermore, based on the monitoring results, the Company mitigates the risks, among others, by additional capital, hedging and other risk mitigation techniques.



Perusahaan telah memastikan bahwa semua potensi risiko Perusahaan sudah diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi dan dimitigasi dampaknya sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan stratejik yang dilakukan dalam suatu proses yang disebut proses *Enterprise Risk Management (ERM) System*.

Kerangka pengelolaan risiko di Perusahaan mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan Sistem Informasi Manajemen, pengukuran dan pemantauan risiko dan berbagai kebijakan, prosedur, limit transaksi, acuan, serta beberapa perangkat bantu pengelolaan risiko lainnya. Kerangka pengelolaan risiko Perusahaan dalam jangka panjang yang tertuang di dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sedang dilakukannya, yang nantinya akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektifitasnya sesuai standar yang berlaku. Penerapan *ERM System* dilakukan Perusahaan dipicu oleh kesadaran akan kebutuhan pengelolaan Perusahaan secara lebih baik.

### Langkah-langkah Pengelolaan Risiko Perusahaan

Proses manajemen risiko di PT Reasuransi Nasional Indonesia mengadopsi standar ISO 31000:2009 *Risk Management – International Standard*. Di dalam melakukan *assessment*, PT Reasuransi Nasional Indonesia menggunakan metode *Risk and Control Self Assessment (RCSA)* di dalam penilaian risiko dan kontrol perusahaan. Beberapa keunggulan yang menjadi alasan penggunaan metode ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan *risk awareness* di seluruh perusahaan, karena melibatkan seluruh fungsi dan seluruh level.
2. Meningkatkan *risk ownership* bagi mereka yang bertanggungjawab dalam melaksanakan operasional.
3. Mengintegrasikan sudut pandang dari sisi operasional dan top management.
4. Mampu mengeluarkan dan memanfaatkan pengetahuan dan wawasan kolektif.
5. Terstruktur dan terdokumentasi.
6. Merupakan sebuah metode yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengkaji seluruh risiko dan kontrol perusahaan.

Tahapan Penyusunan *ERM System* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko (*risk identification*)
2. Analisis risiko (*risk analysis*) dan evaluasi risiko (*risk evaluation*)
3. Melakukan penanganan risiko (*risk treatment*).
4. Melakukan pemantauan risiko (*risk monitoring*) dan pelaporan risiko (*risk reporting*)

The Company has ensured that the potential risks have been identified, analyzed, evaluated and mitigated, to prevent them from hindering the achievement of its strategic objectives, which was done using Enterprise Risk Management (ERM) system.

The Company's risk management framework includes active supervision from the Board of Commissioners and the Board of Directors, adequate Management Information Systems, risk measurement and monitoring and a variety of policies, procedures, transaction limits, references , as well as several other risk management means . The Company's risk management framework in the long term is stipulated in the Company's Long-Term Plan (RJPP) construction is being carried out, which will be evaluated periodically to ensure its effectiveness in accordance with the applicable standards. The application of ERM system is triggered by the awareness of the need to have better management.

### Risk Management Initiatives

The risk management process at PT Reasuransi Nasional Indonesia adopted the ISO standard 31000:2009 Risk Management-International Standard. PT Reasuransi Nasional Indonesia adopted Risk and Control Self Assessment (RCSA) for assessing risk and control. Some of the advantages of this method are as follows :

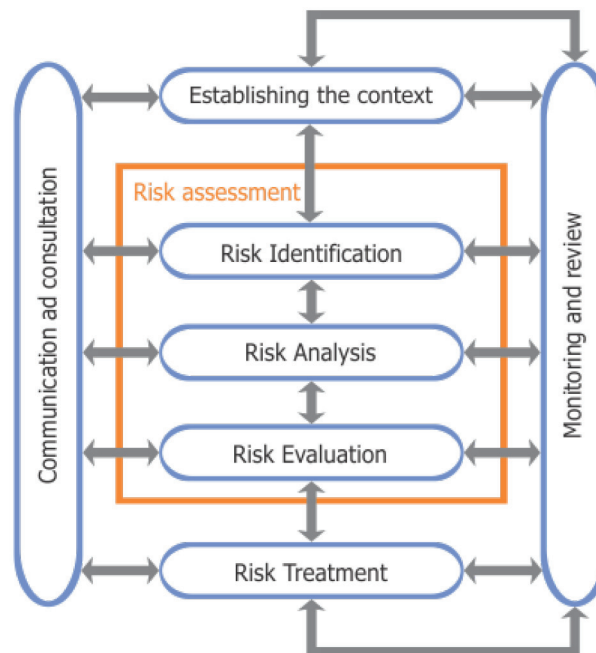
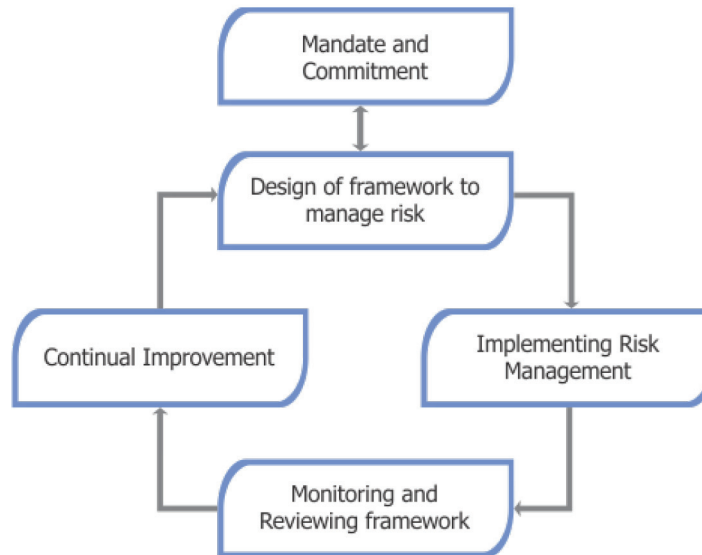
1. Increasing risk awareness throughout the Company, because it involves all functions and all levels.
2. Increasing risk ownership for those who are responsible for carrying out the operations.
3. Integrating viewpoint of the operational side and top management.
4. Capable of extracting and utilizing the collective knowledge and insights.
5. Structured and documented.
6. Representing a comprehensive method to identify and assess risks and controls throughout the company.

The stages of Drafting the ERM System can be described as follows :

1. Risk identification
2. Risk analysis and risk evaluation.
3. Risk treatment.
4. Risk monitoring and risk reporting.

**Framework dan Proses Enterprise Risk Management  
PT Reasuransi Nasional Indonesia Profil Risiko Dan  
Mitigasi Risiko**

**Framework and Process of the Enterprise Risk  
Management of PT Reasuransi Nasional Indonesia**



## Profil Risiko Dan Mitigasi Risiko

### Risiko Underwriting

Risiko *underwriting* adalah risiko kerugian yang timbul karena ketidaksesuaian antara pendapatan *underwriting* dengan beban *underwriting*. Tergolong dalam risiko ini adalah: *underwriting*, penetapan cadangan (*reserve*), klaim dan retrocesi (tidak termasuk risiko *default*).

Eksposur risiko Perusahaan terkait risiko *underwriting* dapat disebabkan oleh penetapan harga (*pricing*) yang tidak optimal dan atau karena meningkatnya frekuensi klaim pada tingkat yang tidak wajar atau karena adanya bencana alam luar biasa besar seperti gempa bumi, tsunami dan atau oleh adanya kejadian luar biasa seperti serangan teroris.

Mitigasi Risiko:

1. Melakukan perencanaan dan pemantauan proses *underwriting* yang cermat;
2. Menerapkan penetapan limit risiko maksimum dan eksposur katastrofik maksimum (secara agregat);
3. Penetapan limit kewenangan *underwriting* per kontrak;
4. Pemilihan dan penilaian risiko dan penetapan harga yang tepat oleh underwriters dengan memperhatikan ketentuan Regulator terkait;
5. Pengembangan pemodelan skenario kerugian (*loss scenario modelling*);
6. *Review* aktuarial internal oleh tim yang independen;
7. Penetapan dan pemantauan program retrocesi secara optimum.

### Risiko Default

Risiko Default adalah risiko kerugian jika pihak lain (*counterparty*) gagal memenuhi kewajibannya atau gagal melaksanakan kewajiban tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan. Pihak lain yang dimaksud adalah mitra retrocesi, *broker*, ceding, mitra kerja investasi dan lain-lain.

Mitigasi Risiko:

1. Proses seleksi dan pemeringkatan ceding dan mitra retrocesi;
2. Pengembangan profil risiko terkini dari ceding dan mitra retrocesi, dengan memahami tingkat sensitivitas mereka terhadap tekanan faktor-faktor luar biasa;
3. Pengendalian atas eksposur *default* dengan analisis kemampuan para *counterparty* untuk membayar (memenuhi kewajiban mereka), baik secara historis maupun di masa yang akan datang berdasarkan perkembangan keuangan

## Risk Profile And Risk Mitigation

### Underwriting Risks

Underwriting risk is the risk of losses arising from mismatch between income and expenses deriving from underwriting. Fallen into this category of risk are: underwriting, determination of reserves, claims and retrocession (not including the risk of default).

The Company's risk exposures related to underwriting risk may result from unoptimal pricing or increased claims frequency at unusual level or due to large natural disasters such as earthquakes, tsunamis and or extraordinary events such as the attack terrorists.

Risk Mitigation:

1. Planning and monitoring prudent underwriting process;
2. Applying the maximum risk limits and maximum catastrophe exposure (in the aggregate);
3. Underwriting authority limits per contract;
4. Selection and risk assessment and appropriate pricing by the underwriters to the provisions of relevant regulators;
5. Loss scenario modeling development;
6. Internal actuarial review by an independent team;
7. Setting and monitoring of retrocession program at its optimum way.

### Default risk

Default risk is the risk of loss if another party (counterparty) fails to meet its obligations or fails to carry out such obligations in accordance predetermined time. Other party here is the retrocession partners, brokers, ceding, investment partners and others.

Risk Mitigation:

1. Selecting and rating the ceding and retrocession partners;
2. Developing current risk profile of the ceding and retrocession partners, by understanding their sensitivities towards pressure from extraordinary factors ;
3. Controlling default exposure by analyzing counterparty ability to pay (their obligations), both historically and in the future, based on historical financial growth and cash

- historis dan proyeksi arus kas dengan berbagai skenario;
4. Setiap triwulanan, Direksi memperoleh hasil analisis kinerja kolektabilitas, profitabilitas dan transaksi dengan mitra kerja dalam bentuk laporan *collection ratio*. Apabila perlu, kerjasama dengan mitra kerja harus ditinjau kembali dan seluruh tindakan perbaikan yang diperlukan harus dilakukan untuk mencegah terganggunya kondisi keuangan Perusahaan.
  5. Satuan kerja bagian penagihan melakukan *review* secara triwulanan guna menetapkan atau memuktahirkan kolektibilitas atau kualitas transaksi yang meliputi klasifikasi eksposur risiko default dan mencatat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari arsip dokumen terkait kinerja ceding dan mitra kerja.
  6. Memiliki sistem informasi yang memungkinkan Direksi untuk mengidentifikasi terjadinya konsentrasi risiko dalam *portofolio ceding* dan transaksi lain berisiko default.
  7. Program penjadwalan kembali pembayaran piutang;

#### Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang muncul karena adanya fluktuasi nilai atau pendapatan dari aset, suku bunga dan valuta asing atau adanya pergerakan variabel pasar dan portofolio yang dimiliki Perusahaan, yang dapat merugikan Perusahaan (*adverse movement*).

Risiko Pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Perusahaan yakni kegiatan investasi dalam bentuk surat berharga termasuk saham/obligasi dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga lainnya.

#### Mitigasi Risiko:

1. Adanya kebijakan investasi yang jelas, termasuk limit dan prosedur pengambilan keputusan investasi;
2. Pemilihan dan pemeringkatan manajer investasi eksternal (MI); Penerapan manajemen portofolio dengan diversifikasi instrument investasi sesuai ketentuan regulasi dan dalam batas-batas *risk-appetite* perusahaan;
3. Pemantauan pergerakan pasar secara *real-time* dan penetapan *limit cut lost* atas aset-aset yang ditangani sendiri maupun yang ditangani manajer investasi eksternal (MI);
4. Satuan kerja terkait mengkaji secara berkala kecenderungan perubahan nilai tukar atau kemungkinan terjadinya tekanan pasar.
5. Melakukan diversifikasi investasi dengan komposisi optimum dalam batas-batas sesuai ketentuan regulasi.

flow projections with various scenarios;

4. Each quarter, the Board of Directors obtain analytical results on collectability, profitability and transactions with partners in the form of *collection ratio* report. If deemed necessary, the cooperation with partners shall be reviewed and all necessary corrective actions should be taken to prevent disruption of the Company's financial condition.
5. Collection Unit conducts review on a quarterly basis in order to establish or update the collectibility or quality of transactions, including the default risk exposure and recorded as an integral part of the archive of documents related to the performance of ceding and partners.
6. Possessing information systems that enables the Board of Directors to identify concentration of risk in the portfolio and other transactions ceding default risk.
7. Rescheduling debt payment program;

#### Market Risk:

Market risk is the risk arising from the fluctuations in the value of assets or income, interest rates and foreign exchange, or the movement of market variables and the Company's portfolio, which could harm the Company (*adverse movement*).

Market Risk is included in the functional activity of the Company in marketable securities including stocks /bonds and investments in money market and other institutions .

#### Risk Mitigation:

1. Applying clear investment policy, including limits and investment decision-making procedures ;
2. Selecting and rating the external investment managers (MI); Applying portfolio management with a diversified investment instruments in accordance with regulations and within the limits of the Company's *risk-appetite*;
3. Monitoring market movements in *real-time* and deciding limits cut lost over assets internally and externally managed.
4. Related work units periodically assess the tendency of exchange rate changes or the possibility of occurrence of market pressures.
5. Diversifying investments with an optimum composition within the limits of appropriate regulatory provisions.

### Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko yang muncul karena ketidakcukupan sumber daya finansial Perusahaan untuk memenuhi kewajiban ketika jatuh tempo, antara lain adalah:

- a. Risiko Likuiditas Pasar.  
Yaitu risiko yang timbul karena Perusahaan sulit untuk menutup posisi tertentu dengan harga pasar sebelumnya karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memungkinkan;
- b. Risiko Likuiditas Pendanaan.  
Yaitu risiko yang timbul karena Perusahaan tidak memperoleh dana untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Risiko Likuiditas dapat melekat pada aktivitas *underwriting*, investasi dan penanaman dana lainnya, serta kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang (jika suatu waktu Perusahaan menerbitkannya).

Mitigasi Risiko:

1. Memiliki kebijakan yang jelas dan tertulis mengenai pengelolaan likuiditas. Kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh satuan kerja terkait atau yang berhubungan dengan pengeluaran/penerimaan kas baik dalam Rupiah maupun dalam valas dan satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia.
2. Memiliki kebijakan likuiditas dan pendanaan yang menetapkan kewenangan kepada satuan kerja yang bertanggung jawab atas investasi untuk menentukan pasar, instrumen serta transaksi dengan mitra kerja yang dapat dipercaya (*eligible counterpart*).
3. Kebijakan likuiditas juga harus mencakup penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas dan harus mencegah ketergantungan Perusahaan terhadap satu atau beberapa instrumen, *counterparty*, atau segmen pasar tertentu.
4. Satuan kerja keuangan memberi perhatian terhadap arus kas yang tidak terduga dan tidak diharapkan.
5. Penerapan *cost-control* secara efektif di Perusahaan;
6. Sistem informasi manajemen risiko likuiditas harus dapat menghasilkan berbagai bentuk informasi dan laporan yang akurat dan tepat mengenai kondisi likuiditas, *maturity profile* dan *projected cash flow* berdasarkan hasil analisis saat ini dan perkiraan yang akan datang.
7. Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan ketat terhadap atas pengelolaan likuiditas karena hal ini sangat penting. Kekurangan likuiditas dapat mengganggu bukan hanya sisi operasional dan finansial Perusahaan namun terutama reputasi Perusahaan.

### Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that arises due to insufficient financial resources to meet the Company's obligations at maturity, among others are.

- a. Market Liquidity Risk.  
The risk arising when the Company finds difficulty in closing a particular position with the previous market price due to the market liquidity conditions that do not allow to;
- b. Funding Liquidity Risk.  
The risk arising when the Company fails to obtain certain amount of funds to meet obligations at maturity. Liquidity risk can be attached to underwriting activities, investment and fund placement and financing activities and the issuance of debt securities (should the company issue it).

Risk Mitigation

1. Having a clear, written policy on the liquidity management. The policy is communicated to all unit linked or associated with the expenditure /cash receipts either in Rupiah or foreign currency and unit that manages human resources.
2. Having a liquidity policy and funding that determines the authority assigned to the work units responsible for the investment to determine the market, instruments and transactions with reliable partners (*eligible counterpart*).
3. Liquidity policy should also include the handling of risks of liquidity concentration and should prevent the Company from being dependent on one or more instruments, counterparty, or a particular market segment.
4. Financial work unit gives attention to unpredictable and unexpected cash flows.
5. Applying cost-effective control in the Company;
6. Information system for liquidity risk management must be able to produce various forms of information and reports which are accurate and precise regarding liquidity, maturity profile and the projected cash flow based on the analysis of current situation and future estimates.
7. The Board of Commissioners and the Board of Directors shall perform strict monitoring on the management of liquidity. Liquidity shortages could disrupt the Company's operational and financial sides, as well as the Company's reputation.



### Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang muncul karena kegagalan dan kelemahan proses internal, orang dan sistem di Perusahaan serta adanya peristiwa-peristiwa eksternal yang gagal diantisipasi oleh Perusahaan, termasuk tindak kriminal oleh pihak eksternal, perubahan regulasi yang tidak terantisipasi dengan baik.

Risiko operasional yang dihadapi oleh NASIONAL RE pada setiap aktivitas fungsional Perusahaan, seperti kegiatan *underwriting*, investasi, operasional dan layanan pembayaran klaim, *trading*, pendanaan, teknologi informasi dan manajemen sumber daya manusia.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan karena rendahnya kemampuan Perusahaan untuk melakukan transaksi yang bernilai tambah. Komponen penting risiko operasional antara lain:

1. Kemampuan kegiatan operasional dipengaruhi oleh adanya kerusakan infra struktur, bencana alam, serta bentuk gangguan teknis lainnya yang dapat menurunkan kemampuan kegiatan operasional Perusahaan;
2. Sumber Daya Manusia, merupakan salah satu komponen yang memberikan kontribusi terbesar atas kegagalan operasional. Risiko yang ditimbulkan antara lain berkaitan dengan *human error*, rendahnya integritas dan profesionalisme, rendahnya kerjasama dan konflik karyawan, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan, serta rendahnya budaya pengendalian.
3. Pelaksanaan Transaksi, Risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi terkait erat dengan risiko penyelesaian transaksi antara lain pembuatan kontrak dan administrasi yang berpotensi menimbulkan perselisihan (*dispute*).
4. Rekonsiliasi data Akunting, Proses rekonsiliasi data transaksi berperan penting dalam upaya melindungi Perusahaan terhadap risiko kerugian yang disebabkan eksposur keuangan yang tidak atau belum dibukukan.

### Mitigasi Risiko:

1. Pelaksanaan *Control Self-Assessment (CSA)* secara teratur oleh para manajer dan karyawan serta tim kerja;
2. Pengembangan kerjasama baik dalam bentuk kemitraan dan atau *outsourcing* dengan pihak lain guna meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam aspek-aspek tertentu yang lemah atau yang bukan merupakan kompetensi utama perusahaan;

### Operational Risk

Operational risk is the risk arising due to failures and weaknesses in internal processes, people and systems in the Company, as well as due to the Company's failure to anticipate external occurrence, including crime committed by external party, unanticipated regulatory changes.

Operational risks were faced by the NASIONAL RE in each functional activity of the Company, such as underwriting activity, investment, operational and claims payment services, trading, finance, information technology and human resource management.

Operational risk could lead to financial losses, directly or indirectly and the potential of losing opportunity to earn profit due to the incapability of the Company to perform value-added transactions. The essential component of operational risk is listed below:

1. Operating activity capability can be affected by infrastructure damage, natural cataclysm and other forms of technical problems which degrade the corporate operating activity capability.
2. Human Resources, one of the components that give the largest contribution to the failure of operations. Risks posed among others are related to human error, lack of integrity and professionalism, lack of cooperation and conflict employees, lack of knowledge and skills, as well as low control culture.
3. Execution of transaction, risks related to the execution of transactions is closely related to settlement risk, among others, contracting and administration with potential disputes.
4. Accounting data reconciliation, process of reconciliation of transaction data plays an important role in efforts to protect the Company against losses caused by the financial exposure that is not or has not been recorded.

### Risk Mitigation

1. Implementing *Control Self-Assessment (CSA)* on a regular basis, by managers and employees and work teams;
2. Building cooperation in the form of partnerships and or outsourced to external parties in order to increase the ability of the Company in certain aspects, which are not the Company's strength nor its a core competencies;

3. Pengasuransian aset-aset Perusahaan dengan biaya yang paling *cost-effective*;
4. Pengembangan matriks kebutuhan dan peningkatan kompetensi karyawan dan manajer, sistem dan proses secara menyeluruh;
5. Penerapan *rating* perusahaan dari lembaga pemeringkat yang diakui;
6. Peninjauan dan pemuktahiran prosedur (SOP) secara teratur;
7. Pencadangan dana talangan untuk kerugian operasional. Dana talangan disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan dan selebihnya dialihkan ke pihak lain dalam bentuk asuransi.

### Risiko Strategik

Risiko Strategik yang dihadapi oleh NASIONAL RE adalah risiko yang terkait dengan ketepatan strategi bisnis dan kebijakan strategik perusahaan disebabkan adanya perubahan lingkungan eksternal Perusahaan baik saat ini maupun saat yang akan datang. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, teknologi dan lingkungan alam (*nature*).

Mitigasi Risiko:

1. Menetapkan rencana strategik (*corporate plan*) secara tertulis berjangka waktu 5 (lima) tahun, mencakup aspek-aspek seperti tujuan usaha, pertumbuhan usaha, pangsa pasar, pendapatan, produk dan aktivitas baru, termasuk alokasi sumber daya untuk melaksanakan kebijakan atau strategi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Rencana strategik ditetapkan oleh Direksi dan mendapat persetujuan Komisaris. Direksi yang membawahi beberapa aktivitas fungsional yang berbeda harus memastikan bahwa tidak terdapat benturan tujuan dan memastikan bahwa para pejabat dan pegawai Perusahaan pada setiap jenjang organisasi telah memahami dan melaksanakan rencana strategik tersebut.
3. Penetapan prosedur dan proses pengendalian keuangan yang bertujuan untuk memantau kemajuan dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dan memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi.
4. Satuan kerja manajemen risiko atau satuan kerja lain yang diberi wewenang dan tanggung jawab mengelola risiko strategik melakukan analisis dan melaporkan laporan aktual dibandingkan dengan target kepada Direksi secara berkala sesuai kebutuhan Perusahaan. Dan apabila terjadi hambatan pencapaian target, Perusahaan melakukan Identifikasi faktor-faktor penyebab

3. Protecting the Company's assets with the most cost-effective insurance;
4. Developing the matrix of needs and improvement of the competence of employees and managers, systems and processes as a whole;
5. Implementing corporate rating from recognized rating agencies;
6. Reviewing and updating the procedures (SOP) on a regular basis;
7. Providing allowances for operational losses in accordance with the ability of the Company and the remainder was transferred to other party in the form of insurance.

### Strategic Risk

Strategic risk faced by the NASIONAL RE is the risk associated with the accuracy of the company's business strategy and strategic policies, in coping with the changes in the external environment both now and in the future. External environment encompasses the political environment, economic environment, social environment, technology and the natural environment (*nature*).

Risk Mitigation

1. Set up a strategic plan (*corporate plan*) in writing for a term of 5 years, covering aspects such as business goals, business growth, market share, revenue, products and activities, including the allocation of resources to implement the policy or strategy to achieve those objectives.
2. The strategic plan is set by the Board of Directors and approved by the Commissioner. The Board of Directors is in charge of several different functional activities to ensure that there is no conflicting goals and ensuring that the Company's officers and employees at every level of the organization understand and implement the strategic plan.
3. Establish procedures and financial control process that aims to monitor progress towards targets and to ensure that the risks taken are still within tolerable limits.
4. Risk management unit or another unit that is given the authority and responsibility to manage strategic risk analysis and reporting of actual compared with the target report to the Board on a regular basis according to the needs of the Company. And if there is resistance target achievement, the Company identifies internal

internal dan eksternal yang menghambat pencapaian tersebut.

5. Apabila terjadi hambatan karena masalah internal, Perusahaan harus melaksanakan penilaian faktor-faktor tersebut, menyusun rencana tindakan dan melakukan koordinasi secara internal mengenai pelaksanaan tindakan korektif atau penyesuaian target. Dalam hal ini, Direksi terlibat dalam proses penilaian kembali dan penyesuaian target tersebut.

### Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya kegiatan operasional Perusahaan yang menimbulkan publikasi negatif atau persepsi negatif di antara para *stakeholders* terhadap Perusahaan. Risiko reputasi dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dan volume usaha atau peningkatan biaya kehumasan.

Mitigasi Risiko:

1. Adanya kebijakan tertulis dan transparan sejalan dengan ketentuan yang berlaku bagi kepentingan pihak *stakeholders* dan publik dengan cara mengungkapkan kinerja keuangan Perusahaan, serta jasa dan produk yang ditawarkan, profesionalisme serta etika usaha Perusahaan;
2. Menjaga hubungan baik dengan media dan melakukan pemantauan berita/publikasi yang bersifat negatif di pasar termasuk arus dan jaringan informasi atau berita tersebut;

### Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Perusahaan gagal mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Perusahaan yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

### Komitmen dan Peran Aktif Komisaris dan Direksi dalam Manajemen Risiko

Direksi NASIONAL RE dengan persetujuan Komisaris menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko di Perusahaan yang tercantum di dalam pedoman Manajemen Risiko.

Peran dan tanggung jawab Komisaris, meliputi:

and external factors that hinder the achievement.

5. In the event that there is resistance due to internal problems, the Company must carry out an assessment of these factors, develop a plan of action and coordinate internally on the implementation of corrective action or adjustment of the target. In this case, the Board of Directors is engaged in a process of re-assessment and adjustment of the target.

### Reputation Risk

Reputation risk is the risk caused by the Company's operational activities that cause negative publicity or negative perception among the stakeholders of the Company. Reputation risk can lead to a decrease in revenue and business volume or an increase in the cost of public relations.

Risk Mitigation

1. The existence of written and transparent policies in line with the applicable regulations for the interests of stakeholders and the public by making the company's financial performance, as well as services and products offered, professionalism and ethics of the Company;
2. Maintaining good relations with the media and news monitoring /negative publicity in the market including current news and information network or such;

### Compliance Risk

Compliance risk is the risk caused by the Company's failure to comply with or implement laws and regulations and other applicable regulations. In practice compliance risk is inherent in the Company's risk related to legislation and other applicable regulations.

### Commitment and Active Role of the Commissioners and Directors in Risk Management

The Board of Directors of NASIONAL RE with the approval of the Board of Commissioners determines clear authority and responsibility at every level of position, related to risk management in the Company, as stipulated in the Risk Management guidelines.

Roles and responsibilities of the Board of Commissioners, include:

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan;
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut di atas, yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulanan;
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskannya sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Peran dan tanggung jawab Direksi, meliputi:

- Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Perusahaan. Penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan;
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Perusahaan secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja manajemen risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan;
- Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat Perusahaan satu tingkat di bawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku;
- Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;
- Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, antara lain dengan program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko;
- Memastikan bahwa satuan kerja manajemen risiko memiliki sumber daya, wibawa, kompetensi dan

1. Approve and evaluate the risk management policies, conducted at least once a year or more in the event of changes in the factors that affecting the Company's business activities significantly;
2. Evaluate the accountability of the Board of Directors in the implementation of risk management policies mentioned above, at least on a quarterly basis;
3. Evaluate and determine the request or suggestion coming from the Board Directors relating to transactions or business activities that go beyond the authority of the Board of Directors to decide and hence require approval from the Board of Commissioners.

Roles and responsibilities of the Board of Directors include:

- Formulate policies and strategies for risk management in writing and include the establishment and approval of a comprehensive overall risk limits, per type of risk and per functional activity ( operations ) of the Company. Formulation of policies and risk management strategies is performed at least once a year or more in the event of a change in the factors affecting the Company's business significantly;
- To Be Responsible for the implementation of risk management policies and risk exposures taken by the Company as a whole, including evaluating and providing direction risk management strategies based on the report submitted by the risk management unit and delivery accountability reports to the Board of Commissioners on a quarterly basis;
- Evaluate and decide on transactions exceeding the authority of officials below the level of the Board of Directors or transactions that require approval in accordance with internal policies and procedures;
- Develop risk management culture at all levels of the organization, among others, include adequate communication to all levels of the organization on the importance of effective internal controls;
- Ensure competency enhancement of human resources related to the implementation of risk management, among others, with education and training programs that are sustainable, especially with regard to risk management systems and processes ;
- Ensure that the risk management unit has the resources, authority, competence and independence sufficient to

independensi yang memadai untuk memantau, mengevaluasi dan memvalidasi penerapan proses manajemen risiko oleh satuan-satuan kerja operasional di dalam Perusahaan yang melakukan dan menyelesaikan transaksi-transaksi usaha;

- Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi sesuai kebutuhan Perusahaan, untuk memastikan:
  - Keakuratan metodologi penilaian risiko;
  - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan
  - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

### Indikator Risiko Kunci (*Key Risk Indicators*)

Indikator risiko kunci adalah suatu peristiwa atau hal tertentu yang memberikan indikasi terjadinya suatu peristiwa risiko. Penggunaan indikator risiko kunci dalam aktivitas pemantauan risiko dapat memberikan peringatan atau informasi lebih dini kepada manajemen entitas bahwa kemungkinan terjadinya suatu peristiwa risiko semakin meningkat. Hal tersebut dapat terwujud karena pemantauan dilakukan untuk fokus terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi indikasi terjadinya suatu peristiwa risiko, bukan terhadap peristiwa risiko itu sendiri. Berdasarkan peringatan atau informasi tersebut entitas dapat melakukan berbagai tindakan mitigasi lebih awal guna mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko maupun dampak yang mungkin ditimbulkan oleh risiko tersebut (jika terjadi).

Di dalam setiap masing-masing *risk description* yang teridentifikasi di dalam pengelolaan manajemen risiko di NASIONAL RE memiliki Indikator risiko kunci yang sesuai dengan masing-masing risiko tersebut. Sehingga indikator risiko kunci tersebut akan berperan sebagai suatu sistem peringatan dini (*early warning system*).

monitor, evaluate and validate the application of risk management processes by operational units within the Company that undertake and complete business transactions;

- Carry out periodic review of the Company's frequency as needed, to ensure :
  - The accuracy of risk assessment methodologies ;
  - Adequacy of risk management information system implementation; and
  - Appropriateness of policies, procedures and risk limits.

### Key Risk indicators

Key risk indicator is a particular event that indicates the occurrence of risk. The use of key risk indicators in risk monitoring activities is to provide an early warning or information to the management about the increasing possibility of a risk event. This can be realized since the monitoring process is focused on events that indicate the occurrence of risk event, not the risk event itself. Based on this warning or information, the entity can perform various mitigation measures in order to reduce the likelihood and impact of risk events posed by the risk (if it happens).

Each identified risk description in the risk management system applied at NASIONAL RE has the key risk indicators corresponding to each of these risks, to serve as an early warning system.





bagian-06/chapter-06

# **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

## Corporate Social Responsibility

## PENDAHULUAN

Tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan, yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang dilaksanakan oleh PT Reasuransi Nasional Indonesia (NASIONAL RE) pada tahun 2014 merupakan yang pertama kali dikelola secara langsung oleh perusahaan karena selama beberapa tahun sebelumnya dana CSR NASIONAL RE di-*pool* di induk perusahaan untuk dikelola secara bersama-sama. Bentuknya adalah berupa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dengan demikian, sebelum tahun 2014 NASIONAL RE tidak pernah mengelola CSR-nya secara langsung, namun melalui induk perusahaan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia.

Tahun 2014 merupakan suatu sejarah tersendiri bagi NASIONAL RE karena untuk pertama kalinya NASIONAL RE berkesempatan untuk mengelola dana CSR-nya secara mandiri untuk melaksanakan komitmen dan kepeduliannya kepada masyarakat dan lingkungan, dimana hal ini juga merupakan bagian dari Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Komitmen ini juga semakin mudah direalisasikan dengan telah dibentuknya Bagian Sekretariat Perusahaan dibawah kendali Sekretaris Perusahaan yang dijabat oleh Direktur Keuangan & SDM. Pedoman CSR telah disusun oleh perusahaan sebagai landasan pelaksanaan CSR atau kepedulian tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan.

Karena tahun 2014 merupakan langkah awal dari kegiatan CSR NASIONAL RE yang dilaksanakan secara langsung, maka sudah tentu belum banyak kegiatan CSR yang dapat direalisasi mengingat unit yang baru ini masih harus melakukan banyak penyesuaian dan perubahan-perubahan. Namun demikian, melalui unit yang kecil ini perusahaan tetap berkomitmen untuk meningkatkan kepeduliannya kepada masyarakat dan lingkungan, sehingga diharapkan juga akan semakin mendekati visi dan misi perusahaan. Dan laporan ini disusun untuk disampaikan kepada Direksi bahwa selama tahun 2014 perusahaan sudah mulai melaksanakan kegiatan CSR-nya secara langsung tanpa melalui induk perusahaan.

Akhir kata, semoga NASIONAL RE semakin maju dan berkembang pesat pada masa mendatang, seiring dengan adanya inisiasi dan ikhtiar berkelanjutan untuk peningkatan kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan.

Jakarta, 31 Desember 2014  
Tim Pelaksana Kegiatan CSR  
PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA

## INTRODUCTION

In 2014, for the first time PT Reasuransi Nasional Indonesia manages its Corporate Social Responsibility (CSR) activities directly by itself. Over the previous years, the allocated funds for CSR activities were managed together by its parent entity, in the form of Partnership Program and Community Development (CSR). Thus, prior to 2014, NASIONAL RE had never managed their CSR directly, yet through the parent company, i.e. PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia.

2014 is a historic year for NASIONAL RE since it is for the first time NASIONAL RE has the opportunity to manage their CSR funds independently, as part of its commitment and concern to its community and environment and also as part of the implementation of Good Corporate Governance. This commitment is also easier to make real following the establishment of the Secretariat Department, under the Corporate Secretary, a position held by the Director of Finance & HR. The Company has also prepared CSR guidelines as the basis for CSR activities or corporate responsibility towards society and environment.

Year 2014 is the first time NASIONAL RE conducted its CSR activities directly and hence there is a number of CSR activities that can not be realized, given that this new unit still has a lot to do in terms of adjustments or changes. However, through this small unit, the Company is committed to increasing its concerns toward social and environment issues and aiming at bringing the Company closer to the realization of its vision and mission. This report is prepared to present to the Board of Directors, that the company has since 2014 realized its CSR directly without the assistance of the parent company.

Finally, we sincerely hope that the NASIONAL RE will grow rapidly in the future, along with the initiatives and sustained efforts to increase awareness of the company to the public and the environment.

Jakarta, December 31, 2014  
CSR Team  
PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA



## PELAKSANAAN PROGRAM CSR

Kegiatan CSR NASIONAL RE yang dilaksanakan selama tahun 2014 masih sedikit karena sebelumnya tidak direncanakan dalam Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014 disamping masih dilakukannya konsolidasi aktifitas internal sejak dibentuknya Bagian Sekretariat Perusahaan. Dengan demikian, besarnya dana yang dapat disalurkan oleh perusahaan juga relatif sedikit, yaitu baru mencapai Rp175.180.000 (seratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Dari sejumlah dana CSR tersebut, baru beberapa kegiatan yang bisa direalisasi oleh perusahaan, diantaranya:

1. Perbaikan Musholla Nururrazaq di Sawangan, Depok - Juli 2014 Bekerjasama dengan salah satu relasi perusahaan yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya selama bertahun-tahun, yaitu PT Tugu Prama Indonesia (TPI), NASIONAL RE mengambil bagian dalam Bakti Sosial Ramadhan 1435 H yang diselenggarakan oleh TPI. Kegiatan ini dilakukan oleh TPI tidak hanya bekerjasama dengan NASIONAL RE, akan tetapi juga dengan beberapa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi lainnya.

Sasaran dari Bakti Sosial ini adalah perbaikan Musholla Nururrazaq yang berada di wilayah Sawangan - Depok. Kegiatan ini mulai dilakukan pada tanggal 23 Juli 2014 dan telah diselesaikan dengan hasil yang baik dengan beberapa perbaikan dan penambahan saluran air untuk wudhu, peremajaan tembok dan lantai keramik, serta perbaikan atap musholla, sehingga memberikan kenyamanan untuk para jemaah yang melakukan ibadah sholat.

Dana CSR NASIONAL RE yang disalurkan untuk Bakti Sosial melalui TPI ini adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

2. Kepedulian NASIONAL RE yang disalurkan melalui Zafira Indonesia Community (ZIC) - November 2014. Kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan juga dinyatakan melalui partisipasi pada komunitas pemilik mobil Chevrolet Zafira, yaitu Zafira Indonesia Community (ZIC) yang menyelenggarakan Jambore Nasional & Bakti Sosial – Napak Tilas 5 Tahun ke Taman Nasional Bali Barat (TNBB).

## THE IMPLEMENTATION OF CSR PROGRAM

The number of CSR activities undertaken during 2014 is still low, because it was not planned in advance and stipulated in the Work Plan and Budget (RKAP) 2014. In addition, Corporate Secretariat still has to consolidate its internal activities and this is quite a time consuming process. Consequently, the amount of funds that can be distributed by the Company are also relatively few, which only reached Rp175,180,000 (one hundred and seventy-five million one hundred and eighty thousand rupiah).

With the given amount of CSR funds then only some of the activities that can be realized by the company, including:

1. Renovation of Nururrazaq Mosque in Sawangan, Depok - July 2014. In cooperation with a company that is experienced in carrying out its social responsibility for many years, namely PT Tugu Pratama Indonesia (TPI), NASIONAL RE took part in Ramadhan 1435H Social Activities organized by TPI. This activity is done by TPI not only in cooperation with the NASIONAL RE, but also with several other insurance and reinsurance companies.

The goal of this Social Service is the renovation of Nururrazaq Musholla in Sawangan - Depok. This activity was commenced on 23 July 2014 and has been completed with good results, with several improvements for channeling ablution water, reworking the walls and floor tiles, as well as roof repairs, giving comfort to the pilgrims who perform their prayers.

NASIONAL RE CSR funds channeled to charity through TPI amounting to Rp5,000,000 (five million rupiah).

2. NASIONAL RE's concern channeled through Zafira Indonesia Community (ZIC) - November 2014. The Company's concern to society and environment is also expressed through participation in the community of Chevrolet Zafira car owners, namely Zafira Indonesian Community (ZIC), which organized National Jamboree & Charity – 5th Anniversary Commemoration in Bali Barat National Park (TNBB).

Adapun kegiatan komunitas ZIC selama Jambore Nasional/ Napak Tilas tersebut meliputi:

- a) Pemberian bantuan perlengkapan kerja kepada petugas Taman Nasional Bali Barat (TNBB) berupa topi, sepatu boot dan senter, yang utamanya digunakan untuk melakukan konservasi burung Jalak Bali yang hampir punah.
- b) Bantuan sepak bola, tumbler dan kaos kaki untuk 5 (lima) SD di sekitar (TNBB), yaitu SDN 1 Sumber Klampok, SDN 2 Sumber Klampok, SDN 4 Pajarakan, SD 5 Gilimanuk dan SDK Maranatha.
- c) *Brand Promotion* atas logo-logo sponsor, salah satunya adalah logo NASIONAL RE yang juga sebagai salah satu sponsor, yang ditempel di sisi kanan-kiri mobil Chevrolet Zafira dari peserta Jambore Nasional/Napak Tilas, sepanjang perjalanan mulai dari Jakarta – Solo – Malang – Denpasar – Surabaya - Kuningan hingga kembali ke Jakarta.

Dana CSR NASIONAL RE yang disalurkan untuk Bakti Sosial melalui komunitas Zafira Indonesia Community (ZIC) ini adalah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

3. Bantuan Untuk Korban Longsor Banjarnegara 12 Desember 2014  
Dalam tragedi kemanusiaan yang terjadi pada hari Jumat, 12 Desember 2014, yaitu longsor di Dusun Jemblung, Banjarnegara, dengan jumlah korban jiwa sekitar 108 (seratus delapan) orang, Perusahaan menyatakan rasa kepedulian dan simpatinya kepada para korban dengan cara menyalurkan bantuan yang dilakukan melalui salah satu institusi resmi nasional, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), karena terbatasnya personil yang mumpuni untuk diterjunkan secara langsung membantu di lokasi longsor.  
Dana CSR NASIONAL RE yang disalurkan untuk Korban Longsor Banjarnegara ini adalah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
4. Pemberian 2 (dua) unit Motor Sampah (*tricycle*)  
Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan yang terdekat, perusahaan telah menghibahkan 2 (dua) unit Motor Sampah (*tricycle*) merk TOSSA kepada Kelurahan Cikini, yang diterima oleh Lurah Cikini untuk membantu peningkatan kebersihan lingkungan. Pada tahun 2014 ini, untuk sementara perusahaan menghibahkan untuk 2 (dua) Rukun Warga dari 5 (lima) Rukun Warga yang

ZIC community's activities during the National Jamboree / Commemoration include:

- a) Providing assistance to the officers working at Bali Barat National Park (TNBB), in the form of hats, boots and flashlights, which is primarily used for endangered bird conservation, the Bali Starling.
- b) Donated soccer ball, tumbler and socks for 5 (five) Elementary School (SD) around TNBB, namely SDN 1 Sumber Klampok, SDN 2 Sumber Klampok, SDN 4 Pajarakan, SD 5 Gilimanuk and SDK Maranatha.
- c) Brand Promotion on sponsor logos, one of which is the logo of the NASIONAL RE as one of the sponsors, which is attached to the left and right side of the Chevrolet Zafira participating the National Jamboree / Anniversary Commemoration, all the way from Jakarta - Solo - Malang - Denpasar - Surabaya - Kuningan and return to Jakarta.

NASIONAL RE CSR funds channeled through Zafira Indonesian Community (ZIC) is Rp10,000,000 (ten million rupiah).

3. Donation For the victims of Banjarnegara landslide December 12, 2014.  
In the human tragedy that occurred on Friday, December 12th, 2014, the landslide in Jemblung, Banjarnegara, which has taken the life of 108 (one hundred and eight), the Company expressed its concern and sympathy to the victims by donating aid through one of the official national institutions, namely National Zakat Agency (BAZNAS), because the Company still has no qualified personnel to be deployed directly the donation in the location of the landslide. The Company's CSR funds disbursed for the landslide victims of Banjarnegara is Rp50,000,000 (fifty million rupiah).
4. Donating 2 (two) units of Garbage Tricycle  
As part of the Company's concern for public health and environment of the nearby neighborhood, the Company donated 2 (two) units of Garbage Tricycle (by TOSSA) to the Sub-District of Cikini and received by the Head of Sub-District Government of Cikini, to help improve the environmental hygiene. For the mean time, in 2014, the Company provided donation for 2 (two) out of 5 (five) Citizen Associations located



terdapat di Kelurahan Cikini - Jakarta Pusat. Selanjutnya, perusahaan merencanakan bahwa pada tahun 2015 akan direalisasi lagi pemberian 3 (tiga) unit Motor Sampah (*tricycle*) untuk rukun warga lainnya.

Dana CSR NASIONAL RE yang disalurkan untuk pembelian 2 (dua) unit Motor Sampah (*tricycle*) merk TOSSA secara *On The Road* (OTR) ini adalah sebesar Rp55.180.000 (lima puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

5. Renovasi Musholla Al-Ikhlas, Cikini – Jakarta Pusat.  
Di lingkungan Cikini – Jakarta Pusat, terdapat suatu Musholla berukuran 3 x 8 meter yang digunakan oleh penduduk sekitar untuk menjalankan ibadah sholat, namun kondisinya sudah sangat tidak layak, baik untuk kenyamanan dalam menjalankan ibadah sholat maupun kapasitasnya. Oleh karena itu, perusahaan melaksanakan renovasi Musholla Al-Ikhlas yang meliputi pekerjaan: pembuatan pondasi cakar ayam untuk 2 (dua) lantai, penggantian lantai dari teraso menjadi keramik, pengecoran dasar lantai 2. Seluruh biaya pekerjaan dan biaya material bangunan ditanggung oleh perusahaan. Dana CSR NASIONAL RE yang disalurkan untuk program Renovasi Musholla Al-Ikhlas, Cikini – Jakarta Pusat ini adalah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

## PENUTUP

Sepanjang tahun 2014, perusahaan telah merealisasi tanggung jawab sosialnya (CSR) kepada masyarakat dan lingkungan walaupun sebelumnya tidak diprogramkan dalam Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014. Namun demikian, sebagai bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, maka perusahaan tetap merealisasikan CSR-nya melalui beberapa cara diantaranya:

1. Pemberian bantuan langsung
2. Melalui lembaga yang berkompeten
3. Melalui komunitas

Selanjutnya, untuk tahun 2015 perusahaan sudah merencanakan kegiatan CSR yang lebih banyak lagi jenisnya untuk direalisasi sehingga apabila seluruh program kegiatan tersebut dapat direalisasi maka akan dapat meningkatkan citra perusahaan, secara khusus di lingkungan industri asuransi dan reasuransi dan secara umum di industri keuangan non bank dan industri secara makro.

Akhir kata, semoga NASIONAL RE semakin maju dan berkembang pesat pada masa mendatang, seiring dengan adanya inisiasi dan ikhtiar berkelanjutan untuk peningkatan kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan.

in the Sub-district of Cikini - Central Jakarta. In the future, the Company planned that by 2015 will be again donated 3(three) units of Garbage Tricycle for other Citizen Associations. NASIONAL RE's CSR funds was disbursed for the purchase of 2 (two) units of TOSSA Garbage Tricycle (On-the-Road /OTR) worth Rp55,18 million (fifty-five million one hundred and eighty thousand rupiah).

5. Al-Ikhlas mosque renovation, Cikini - Central Jakarta  
Located in Cikini, Jakarta, there is a mosque of 3 x 8 meters that are used by local people for their daily prayer, but its condition was not feasible, either for conducting worship prayer and of its capacity. Therefore, the Company carried out the renovation of Al-Ikhlas mosque which includes: constructing foundation for 2 (two) floors, replacing terrazzo floor into ceramics, foundry for the 2nd floor base. The entire cost of the work and the cost of building materials is borne by the company. NASIONAL RE' CSR funds disbursed for the program Al-Ikhlas mosque renovation, Cikini - Central Jakarta amounted to Rp50,000,000 (fifty million rupiah).

## CLOSING

Throughout 2014, the Company has realized its social responsibility (CSR) program for the community and the environment, although initially it was not set forth in the Company's Work Plan & Budget (RKAP) 2014. However, we consider CSR implementation as part of GCG and therefore, we keep perform our GCG program through various means, among other:

1. Providing direct assistance.
2. Through the competent institutions.
3. Through community.

For 2015, the Company has prepared a plan for CSR activities, with more kind of activities, so that, following the completion of all of its CSR program, the Company will be able to improve its image, in particular in the insurance and reinsurance industry environment and in general in the non-bank financial industry and the industry as a macro.

Finally, we hope NASIONAL RE grow rapidly in the future, in line with the initiative and continuous effort, to increase the Company's awareness toward the community and the environment.







bagian-07/chapter-07  
**Laporan Keuangan**  
Financial Report





**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014**

**DIRECTOR'S STATEMENT ON  
THE RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS  
OF PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA (THE COMPANY)  
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/ We the undersigned :

- |                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. N a m a / Name                    | : | <b>M. Shaifie Zein, SE, Dipl. Ins, ACII, FIIS, CFP®</b>                                       |
| Alamat Kantor / Office Adress        | : | Cikini Raya No. 99, Jakarta Pusat   |
| Alamat Domisili / Residential Adress | : | Jl. Lembah Pinang I Blok I/12 No. 14<br>Kav. DKI Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur    |
| Nomor telepon / Telephone number     | : | 021-3140009, 3179373  |
| Jabatan/ Title                       | : | Direktur Utama / President Director   |
| 2. N a m a / Name                    | : | <b>Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AIIS</b>  |
| Alamat Kantor / Office Adress        | : | Cikini Raya No. 99, Jakarta Pusat   |
| Alamat Domisili / Residential Adress | : | Jl. Pangadegan Utara No. 4 RT 12 RW 006<br>Pangadegan, Pancoran, Jakarta Selatan              |
| Nomor telepon / Telephone number     | : | 021-3140009, 3179373  |
| Jabatan/ Title                       | : | Direktur Operasi / Director Of Operations   |
| 3. N a m a / Name                    | : | <b>Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®</b>  |
| Alamat Kantor / Office Adress        | : | Cikini Raya No. 99, Jakarta Pusat   |
| Alamat Domisili / Residential Adress | : | Jl. Lembah Pinang I Blok I/14 No. 21-22<br>Kav. DKI Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur |
| Nomor telepon / Telephone number     | : | 021-3140009, 3179373  |
| Jabatan/ Title                       | : | Direktur Keuangan dan SDM /<br>Director Of Finance And Human Resources                        |

dengan ini menyatakan bahwa :

hereby state that :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 ;   | 1. We are responsible for the preparation and the presentation of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2014 ;  |
| 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia ;   | 2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia ;  |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar ;<br>b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material ; | 3. a. The information contained in the company's financial statements in complete and correct ;<br>b. The company's financial statements do not contain incorrect material information or facts and do not omit material information or fact ; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern PT Reasuransi Nasional Indonesia.  | 4. We are responsible for internal control system of PT Reasuransi Nasional Indonesia.   |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is issued to the best our knowledge and biliefe.

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
Direksi/Board of Directors  
12 Januari / January 12, 2015

  
M. Shaifie Zein      Edhie Mulyono      Rusdianto







# Soejatna, Mulyana & Rekan

Registered Public Accountants

License No. KEP-644/KM.17/1998,25 Agustus 1998

**Nomor: 001//SMR/LAI-NASRE/2015**

**Number: 001//SMR/LAI-NASRE/2015**

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris  
dan Direksi  
PT Reasuransi Nasional Indonesia**

**The Shareholders, Boards of Commissioners and  
Directors  
PT Reasuransi Nasional Indonesia**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Reasuransi Nasional Indonesia, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya

*We have audited the accompanying financial statements of PT Reasuransi Nasional Indonesia, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2014, and the statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

***Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan***

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

***Management's responsibility for the financial statements***

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for the internal control as the management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

***Tanggung jawab auditor***

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

***Auditors' responsibility***

*Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and the State Financial Audit Standards prescribed by the Badan Pemeriksa Keuangan (the Audit Board of the Republic of Indonesia). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.*





## Soejatna, Mulyana & Rekan

Registered Public Accountants

License No. KEP-644/KM.17/1998,25 Agustus 1998

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah kepada manajemen dengan surat kami nomor: 001//SMR/LAK-NASRE/2015 tanggal 14 Januari 2015.

*An audit involves performing procedures to obtain evidence about the amounts and disclosures in financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

### Opinion

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Reasuransi Nasional Indonesia as of December 31, 2014, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

*The compliance to the applicable laws and regulations and the internal controls are presented in a separate report number 001//SMR/LAK-NASRE/2015 dated 14 January 2015.*



Drs. Sukarna Rusdjana, Ak., CA, CPA.

Izin Akuntan Publik No. AP.0492 / Public Accountant License No. AP.0492

Jakarta, 14 Januari 2015 / 14 January 2015

### NOTICE TO READERS

*The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows in accordance with financial accounting standards and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practises to review such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.*

Rukan Taman Meruya, Blok M/78, Jakarta Barat 11620 Indonesia

Phone : (62-21) 5868275, 5868276, 5865365 Fax. : (62-21) 5865365, E-mail : soejatna@bit.net.id

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)  
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013  
(Dalam Rupiah)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)  
AS OF 31 DECEMBER 2014 AND 2013  
(In Rupiah)

	Catatan / Note	2014	2013	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	3.	2,460,031,933	3,749,156,911	Cash and cash equivalents
Piutang Usaha				Trade Receivables
Piutang Reasuransi	4.	494,032,395,900	193,700,452,516	Reinsurance receivables
Piutang Retrosesi	5.	34,591,739,372	6,873,434,468	Retrocession receivables
Jumlah Piutang Usaha		528,624,135,272	200,573,886,984	Total Trade Receivables
Piutang Ujroh	6.	8,895,604,636	10,330,689,238	Ujroh receivables
Aset Retrosesi				Retrocession Assets
Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan -				Un-earned premium
Bagian Retrosesi	7.	81,327,573,012	26,516,561,808	Retrocession Share
Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	8.	589,528,484,255	279,687,537,638	Estimated claim - retrocession Share
Jumlah Aset Retrosesi		670,856,057,267	306,204,099,446	Total Retrocession Assets
Biaya dibayar dimuka	9.	82,971,000	24,230,210	Prepaid expenses
Piutang hasil Investasi	10.	5,616,204,594	4,515,632,009	Investment income receivable
Piutang Lain-lain	11.	3,046,811,585	4,180,436,765	Other Receivables
Instrumen Investasi :				: Investment Instrument
Dana Jaminan	12.	47,000,000,000	47,000,000,000	Guarantee funds
Deposito Biasa	13.	1,145,671,475,791	631,911,585,445	Deposits
Surat Berharga :				: Securities
Saham Yang Diperdagangkan	14.	43,856,462,214	43,749,544,400	Stocks for Trading
Saham Tersedia Untuk Dijual		-	-	Stocks Available for Sale
Obligasi Yang diperdagangkan	15.	359,871,673,254	374,885,583,509	Bonds for Trading
Obligasi Tersedia Untuk Dijual				Bonds Available for Sale
Reksadana	16.	52,424,428,148	37,449,454,177	Mutual Funds
(Cadangan Penyisihan Obligasi)				(Reserve Allowance Bonds)
Jumlah Surat Berharga		456,152,563,616	456,084,582,086	Total Investment
Penyertaan Saham	17.	1,423,700,000	1,423,700,000	Investment in Share
Jumlah Instrumen Investasi		1,650,247,739,407	1,136,419,867,531	Total Investment Instrument
Aset Tetap				Fixed Assets
Nilai Perolehan	18.	61,432,407,453	56,127,723,092	Cost
Akumulasi Penyusutan		(10,394,051,771)	(8,050,035,472)	Accumulated depreciation
Nilai Buku Aset Tetap		51,038,355,681	48,077,687,620	Net book value
Aset Pajak Tangguhan	19.	8,437,393,123	7,109,291,632	Deferred tax asset
Aset Lain-lain	20.	28,164,139,612	28,378,557,284	Other assets
Cadangan Penyisihan Aset Lain		(27,000,000,000)	(27,000,000,000)	Allowance for other assets
Aset Lain-lain		1,164,139,612	1,378,557,284	Other assets
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2,930,469,444,110</b>	<b>1,722,563,535,630</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.  
/ See the accompanying notes to financial statements, which form an integral part of these financial statements.

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)  
 PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013  
 (Dalam Rupiah)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)  
 AS OF 31 DECEMBER 2014 AND 2013  
 (In Rupiah)

	Catatan / Note	2014	2013	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang Klaim Reasuransi	21.	49,091,973,567	25,943,144,089	Reinsurance claim payables
Utang Premi Retrosesi	22.	28,658,729,156	7,300,756,456	Retrocession premium payable
Estimasi Klaim Retensi Sendiri	23.	1,114,816,724,377	746,753,047,036	Estimated Own Claim Retention
Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	24.	915,415,412,784	507,710,223,676	Un-Earned Premium
Kontribusi Diterima Dimuka	26.	-	990,576,385	Contribution received in advance
Beban Yang Masih Harus Dibayar	27.	18,372,387,572	13,163,996,992	Accrued expenses
Utang Pajak	28.	8,042,015,629	11,020,412,361	Taxes payable
Utang Zakat	29.	575,224,089	447,438,374	Zakat Payable
Liabilitas Imbalan Paska Kerja	30.	4,140,306,782	2,662,884,782	Post Service Benefit Liability
Kewajiban Pajak Tangguhan		21,134,504	-	Deferred tax liability
Utang Lain-Lain	31	2,323,944,389	2,805,330,808	Other payables
Jumlah Liabilitas		2,141,457,852,848	1,318,797,810,959	Total Liabilities
Dana Tabarru (Peserta)	32	21,485,294,416	17,325,340,106	Tabarru (Participant)
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham	33	463,000,000,000	213,000,000,000	Authorized Capital
Selisih Penilaian- Saham Yang Tersedia Untuk Dijual		-	-	Difference Assesment of securities available for sale
Saldo laba :				Retained Earnings:
Cadangan Umum		167,641,311,422	95,064,550,262	General reserve
Cadangan Tujuan		5,799,073,141	5,799,073,141	Allocated reserve
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		131,085,912,282	72,576,761,160	Current year profit
Jumlah Saldo Laba		304,526,296,845	173,440,384,564	Total Retained earning
JUMLAH EKUITAS		767,526,296,845	386,440,384,564	TOTAL EQUITY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2,930,469,444,110	1,722,563,535,630	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan  
 / See the accompanying notes to financial statements, which form an integral part of these financial statements.



**PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**31 DESEMBER 2014 DAN 2013**  
(Dalam Rupiah)

**PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA**  
**STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME**  
**FOR THE YEARS ENDED IN**  
**31 DECEMBER 2014 AND 2013**  
(In Rupiah)

	Note	2014	2013	
PENDAPATAN PREMI				PREMIUM REVENUES
Premi Bruto	34	2,095,931,414,310	1,296,536,113,161	Gross Premium
Premi Retrosesi		(242,487,422,569)	(83,085,023,024)	Retrocession Premium
Pembentukan PYBMP Tahun Berjalan		(799,151,507,411)	(418,583,602,820)	Current Year Un-earned Premium
Pencairan PYBMP Tahun Lalu		418,583,602,820	251,394,695,401	Last Year Un-earned Premium
Penurunan (kenaikan) PYBMP		(380,567,904,591)	(167,188,907,417)	Decrease (Increase) Un-Earned Premium
JUMLAH PENDAPATAN PREMI	34	1,472,876,087,151	1,046,262,182,720	TOTAL PREMIUM REVENUES
BEBAN UNDERWRITING				UNDERWRITING EXPENSES
Beban Klaim				Claim expenses
Klaim Bruto	35	867,381,453,321	521,713,056,067	Gross Claim
Klaim Retrosesi		(104,614,304,051)	(38,041,841,270)	Retrocession Claim
Pembentukan EKRS		471,563,155,078	434,187,317,728	Current Year Estimated Own Claim Retention
Pencairan EKRS		(434,187,317,728)	(291,680,248,109)	Last Year Estimated Own Claim Retention
Kenaikan EKRS		37,375,837,350	142,507,069,620	Increase estimated own claim retention
Jumlah Beban Klaim	35	800,142,986,620	626,178,284,417	Total claim expenses
Beban Komisi Netto	36	544,442,967,625	359,335,137,419	Net Commission Expense
Beban Underwriting Lain Netto	37	3,720,566,976	1,718,151,407	Underwriting other expenses - Net
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING		1,348,306,521,221	987,231,573,243	TOTAL UNDERWRITING EXPENSES
HASIL UNDERWRITING		124,569,565,930	59,030,609,477	UNDERWRITING INCOME
PENDAPATAN UJRAH	38	21,644,007,857	23,929,265,140	UJRAH INCOME
ALOKASI SURPLUS DANA TABARRU	39	1,170,512,044	2,355,249,242	ALLOCATION OF TABARRU FUND SURPLUS
HASIL INVESTASI	40	88,021,757,609	54,474,755,056	INVESTMENT INCOME
BEBAN USAHA	41	(89,760,425,384)	(71,307,482,683)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA		145,645,418,056	68,482,396,232	OPERATING PROFIT
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	42	4,129,786,256	12,783,266,373	OTHER INCOME (EXPENSES)
LABA SEBELUM PAJAK		149,775,204,311	81,265,662,606	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Penghasilan telah dikenakan Pajak Final	28.	(91,301,793,951)	(59,093,277,813)	Permanent and Temporary Differens
Beda Tetap dan Beda Temporer	28.	19,210,729,351	39,397,908,653	Income subject to final tax
PENGHASILAN KENA PAJAK		77,684,139,711	61,570,293,446	TAXABLE INCOME
ESTIMASI PAJAK PENGHASILAN DAN ZAKAT :				ESTIMATED INCOME TAX AND ZAKAT:
Pajak Kini	28.	(19,421,034,928)	(15,392,573,361)	Current tax
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan	31.	1,306,966,987	7,151,110,290	Deferred tax income (expense)
Zakat	29.	(575,224,089)	(447,438,374)	Zakat
JUMLAH ESTIMASI PAJAK PENGHASILAN DAN ZAKAT		(18,689,292,029)	(8,688,901,445)	TOTAL ESTIMATED INCOME TAX AND ZAKAT
LABA SETELAH PAJAK DAN ZAKAT		131,085,912,282	72,576,761,160	PROFIT AFTER TAX AND ZAKAT
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
LABA KOMPREHENSIF		131,085,912,282	72,576,761,160	COMPREHENSIVE PROFIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan  
/ See the accompanying notes to financial statements, which form an integral part of these financial statements.

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
 31 DESEMBER 2014 ADAN 2013  
 (Dalam Rupiah)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY  
 FOR THE YEARS ENDED  
 31 DECEMBER 2014 AND 2013  
 (in Rupiah)

	Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Subscribed and Paid-in Capital		Saldo Laba / Retained earnings			Jumlah / Total
	Ditetapkan / Allocated to	Cadangan Umum / General Reserve	Cadangan Tujuan / Allocated Reserve	Laba Tahun Berjalan / Current Year Profit	Pendapatan Komprehensif Lain / Other comprehensive income	
Saldo per 31 Desember 2012	138,000,000,000	49,459,040,259	5,799,073,141	53,846,733,166	-	247,104,846,566
Tambahan Modal Disetor	75,000,000,000	-	-	-	-	75,000,000,000
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan				(460,661,717)		(460,661,717)
Kenaikan/(penurunan) saham yang tersedia untuk dijual belum direalisasi				(7,780,561,447)		(7,780,561,447)
Laba Bersih tahun berjalan				72,576,761,160		72,576,761,160
Pembentukan Dana Cadangan		45,605,510,003		(45,605,510,003)		
Saldo per 31 Desember 2013	213,000,000,000	95,064,550,262	5,799,073,141	72,576,761,160	-	386,440,384,564
Tambahan Modal Disetor	250,000,000,000	-	-	-	-	250,000,000,000
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan				-		
Kenaikan/(penurunan) saham yang tersedia untuk dijual belum direalisasi				-		
Laba Bersih tahun berjalan				131,085,912,282		131,085,912,282
Pembentukan Dana Cadangan		72,576,761,160		(72,576,761,160)		
Saldo per 31 Desember 2014	463,000,000,000	167,641,311,422	5,799,073,141	131,085,912,282	-	767,526,296,845

Balance as at 31 December 2012  
 Additional paid-in capital  
 Partnership and Community Development Program<sup>II</sup>  
 Unrealized Increase (decrease) in market price securities available for sale  
 Current year net profit  
 Allocation for reserve fund  
 Balance as at 31 December 2013 (Restate)  
 Additional paid-in capital  
 Partnership and Community Development Program<sup>II</sup>  
 Unrealized Increase (decrease) in market price securities available for sale  
 Current year net profit  
 Allocation for reserve fund  
 Balance as at 31 Desember 2014

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan / See the accompanying notes to financial statements, which form an integral part of these financial statements.

**PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**31 DESEMBER 2014 DAN 2013**  
*(Dalam Rupiah)*

**PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**31 DECEMBER 2014 AND 2013**  
*(In Rupiah)*

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari premi reasuransi	1,595,772,559,885	1,102,138,969,648	Cash flow from Premium Reinsurance
Penerimaan kas dari klaim retrosesi	81,513,402,525	33,574,479,290	Cash flow from retrocession claim
Penerimaan kas dari ujhroh	22,925,647,593	19,507,319,476	Cash Flow from Ujhroh
Penerimaan kas dari hasil investasi	93,832,752,051	53,964,625,153	Cash flow from investment income
Penerimaan kas dari pendapatan lain	7,403,873,574	3,065,163,174	Cash flow from other income
Penerimaan kas dari alokasi dan tabarru	-	-	Receipt from tabarru allocation fund
Pengeluaran kas untuk beban klaim	(971,655,373,380)	(502,907,245,554)	Payments for claim expense
Pengeluaran kas untuk beban komisi	(447,734,747,018)	(359,335,137,419)	Payment from commissions expense
Pengeluaran kas untuk beban underwriting lainnya	(3,720,566,976)	(1,718,151,407)	Payments for underwriting expenses
Pengeluaran kas untuk biaya usaha	(6,103,575,257)	(5,555,590,505)	Payments for Operasional Expense
Pengeluaran kas untuk biaya karyawan	(66,266,024,210)	(55,130,009,475)	Payments for employee expense
Pengeluaran kas untuk pajak	(10,315,695,581)	(871,591,202)	Payments for tax expense
Pengeluaran kas untuk lain-lain	(87,350,395,990)	-	Miscellaneous payments
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>208,301,857,214</u>	<u>286,732,831,178</u>	Net cash received from operating activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Pengeluaran kas untuk investasi	(455,348,355,922)	(280,476,455,415)	Cash outflows for investment
Pengeluaran kas untuk aset tetap	(4,242,626,269)	(5,215,067,905)	Cash outflows for Ffix assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(459,590,982,192)</u>	<u>(285,691,523,320)</u>	Net cash used for investing activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FUNDING ACTIVITIES</b>
Penambahan Modal Disetor	<u>250,000,000,000</u>	-	Additional paid-in capital
Kas bersih dari aktivitas pendanaan	<u>250,000,000,000</u>	-	Net cash received from funding activities
<b>(KENAIKAN) PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(1,289,124,977)</b>	<b>1,041,307,858</b>	<b>(INCREASE) DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT</b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL</b>	<b>3,749,156,911</b>	<b>2,707,849,053</b>	<b>BEGINNING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENT</b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR</b>	<b><u>2,460,031,933</u></b>	<b><u>3,749,156,911</u></b>	<b>ENDING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENT</b>
<b>Terdiri dari :</b>			<b>: Comprising of</b>
Kas	156,816,416	98,901,725	Cash on hand
Bank	2,303,215,518	3,650,255,186	Cash in banks
Jumlah	<u>2,460,031,933</u>	<u>3,749,156,911</u>	Total

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan / See the accompanying notes to financial statements, which form an integral part of these financial statements.

## 1 Informasi Umum

### a. Pendirian Perusahaan

PT Reasuransi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut perusahaan didirikan berdasarkan akta No. 129 tanggal 22 Agustus 1994 di hadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Akta diatas diubah dengan akta No. 53 tanggal 15 September 1994 di hadapan Achmad Abid, SH, Notaris Pengganti di Jakarta dan akta No. 15 tanggal 7 Oktober 1994 di hadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-15.266.HT.01.01 Th.94 tanggal 11 Oktober 1994 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1994 No. 103 Tambahan No. 10862.

Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 62 tanggal 21 April 1998 di hadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta, yang menyebutkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan pengesahan kembali susunan Direksi dan Komisaris Perusahaan. Kemudian diubah dalam akta No. 37 tanggal 16 Juni 2000 dibuat di hadapan Nyonya Vita Buena, SH, Notaris pengganti Sutjipto SH, di Jakarta. Laporan perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-00902. HT.01.04.TH.2002 tanggal 18 Januari 2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 74 tanggal 13 September 2002 Tambahan No. 727.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 10 Agustus 2005 di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris Pengganti Sutjipto SH, di Jakarta, yang menyebutkan menambah bidang usaha Perseroan yaitu Reasuransi Syariah, dan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 65.000.000.000 (enam puluh lima milyar rupiah) menjadi Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) yang diambil seluruhnya oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-24079 HT.01.04.TH.2005 tanggal 31 Agustus 2005. Perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, mengalami penambahan sesuai dengan akta No. 108 tanggal 22 Februari 2007 dari Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) menjadi Rp 85.000.000.000 (delapan puluh lima milyar rupiah) yang disetor seluruhnya oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-4562 tanggal 9 April 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 81 tanggal 9 Oktober 2007, Tambahan No. 1148/2007.

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dengan akta No. 12 tanggal 8 Agustus 2008 di hadapan Umaran Mansjur, SH, Notaris di Jakarta, yang menyatakan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan, sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-68917.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara RI No. 85 tanggal 21 Oktober 2008 dan Tambahan No. 20697/2008.

## 1 General Information

### a. Establishment and General Information

*PT Reasuransi Nasional Indonesia ("the Company") was established on the basis of the deed No. 129 dated 22 August 1994, of the notary Sutjipto SH, in Jakarta. The deed was not approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia. The deed was then amended with the deed No. 53 dated 15 September 1994, made before the notary Achmad Abid, SH, a substitute notary in Jakarta and the deed No. 15 dated 7 October 1994, made before the notary Sutjipto SH, in Jakarta. The deed has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with his letter No. C2-15.266.HT.01.01 Th.94 dated 11 October 1994 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated 27 December 1994 No. 103 and Supplement thereto No. 10862.*

*The Company's articles of association have been amended with the decision of meeting No. 62 dated 21 April 1998, made before the notary Sutjipto SH, in Jakarta, which approved the change in the Company's articles of association to conform to the Law No. 1 of 1995 on limited liability companies and approved the reappointment of previous members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. Further amendment was with the deed No. 37 dated 16 June 2000 made before the notary Mrs. Vita Buena, SH, acting as a substitute to notary Sutjipto SH, in Jakarta. The amendment of the Company's articles of association were received and registered by the Director General of General Legal Administration – the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. C-00902. HT.01.04.TH.2002 dated 18 January 2002 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 74 dated 13 September 2002 and Supplement thereto No. 727.*

*Based on the decision of meeting No. 42 dated 10 August 2005, made before the notary Aulia Taufani, SH, acting in substitute to notary Sutjipto SH, in Jakarta, the Company's line of business is extended by adding Syariah reinsurance business unit, and the Company's issued and paid-in capital was increased from Rp 65,000,000,000 (sixty five billion rupiah) to Rp 75,000,000,000 (seventy five billion rupiah) which was fully paid in by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). The increase was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with his letter No. C-24079 HT.01.04.TH.2005 dated 31 August 2005. The Company's issued and paid-in capital, was further increased in accordance with the deed No. 108 dated 22 February 2007 from Rp 75,000,000,000 (seventy five billion rupiah) to Rp 85,000,000,000 (eight five billion rupiah) which was subscribed and fully paid by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). The notary deed No.108 was registered in the database of Sisminbakum of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. W7-HT.01.04-4562 dated 9 April 2007, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated 9 October 2007; Supplement thereto No. 1148/2007.*

*Based on the amendment of the Company's articles of association, the deed No. 12 dated 8 August 2008, made before the notary Umaran Mansjur, SH, in Jakarta, which approved the change in the Company's authorized capital to conform to the Law No. 40 of 2007 on limited liability companies. The approval was granted by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with his letter No. AHU-68917.AH.01.02 of 2008 dated 24 September 2008 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 85 dated 21 October 2008 and Supplement thereto No. 20697/2008.*



Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia tentang pengalihan dana cadangan umum PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 29 November 2010 diputuskan untuk mengalihkan sebagian dana cadangan umum pada ekuitas usaha konvensional PT Reasuransi Nasional Indonesia maksimal sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) menjadi ekuitas usaha syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia mulai berlaku sejak 30 November 2010. Sampai dengan 31 Desember 2010 pengalihan dana cadangan tersebut terealisasi sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah). Dengan adanya pengalihan tersebut, modal disetor Perusahaan telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham terdiri dari 103.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setara Rp 103.000.000.000 (seratus tiga milyar rupiah).

Dalam rangka penambahan modal disetor, berdasarkan Notulen Rapat RUPSLB PT Reasuransi Nasional tanggal 26 Juli 2011, Nomor 15/RR/DIR, perusahaan telah menerima aset berupa 1 (satu) buah gedung yang terletak di Jln. Cikini Raya No. 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta, dari Induk Perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), yang dicatat sebagai modal disetor sebesar Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah). Pencatatan aset tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Amin-Nirwan-Alfiantori & Rekan, dengan laporannya nomor: 417.1.6.3.11.05.11 perihal Penilaian Aset PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dengan hasil penilaian berdasarkan nilai pasar (market value) pada tanggal 20 Mei 2011, sebesar Rp35.078.800.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Dengan demikian jumlah modal disetor per 31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp138.000.000.000 (seratus tiga puluh delapan milyar rupiah). Akta Notaris mengenai penambahan modal disetor tersebut tertanggal 29 Juli 2011 dengan nomor Akte 9.

Berdasarkan Surat Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Nomor : S-208/MBU/2013 tanggal 4 (empat) April 2013 (dua ribu tiga belas) perihal Konversi Pinjaman Subordinasi PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia, memutuskan pinjaman subordinasi sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah) dialihkan menjadi penyertaan modal PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) pada PT Reasuransi Nasional Indonesia. Dengan demikian modal disetor PT Reasuransi nasional Indonesia per 31 Desember 2013 menjadi sebesar Rp 213.000.000.000 (dua ratus tiga belas milyar rupiah).

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 23 September 2014 tentang penambahan modal disetor sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sepakat menambah modal disetor kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga per 31 Desember 2014 modal disetor PT Reasuransi Nasional Indonesia menjadi sebesar Rp 463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga milyar rupiah).

Maksud dan tujuan dari Perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya penyelenggaraan usaha reasuransi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, dengan memberikan jasa dalam pertanggung jawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi baik berdasarkan prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

*Based on extraordinary general meeting of shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia on 29 November 2010 on transfer of general reserve fund of PT Reasuransi Nasional Indonesia it was decided to reallocate some of the general reserve fund, the equity of the conventional business of PT Reasuransi Nasional Indonesia, to equity of syariah business unit of PT Reasuransi Nasional Indonesia at a maximum amount of Rp 20,000,000,000 (twenty billion rupiah) effective 30 November 2010. By December 2010 the realized transfer of reserve funds was Rp 18,000,000,000 (eighteen billion rupiah). With the transfer of the paid up capital of the Company has been issued and fully paid by shareholders consisting of 103,000 shares with a nominal value of Rp 1,000,000, - (one million rupiah) or equivalent to Rp 103,000,000,000 (one hundred and three billion rupiah).*

*For addition in the paid-in capital, based on minute of extra ordinary general meeting of shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia dated 26 July 2011 No 15/RR/DIR the Company has received a transfer of a unit of asset in terms of an office building located at Jln. Cikini Raya No. 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Central Jakarta, Jakarta Province, from the parent company PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), valued at Rp 35,000,000,000 (thirty five billion rupiah). The valuation is made by the public appraisal company Amin-Nirwan-Alfiantori & Rekan, with their report number 417.1.6.3.11.05.11, based on current market value on 20 May 2011 of Rp 35,078,800,000 (thirty five billion seventy eight million eight hundred thousand rupiah) . It resulted at 31 December 2011 the amount of paid-in capital of Rp 138,000,000,000 (one hundred and thirty eight billion rupiah). The notary deed of the paid-up capital increase was dated July 29, 2011 with the deed number 9.*

*Based on the letter of the Minister of State Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Number: S-208/MBU/2013 date four (4) April 2013 (two thousand and thirteen) about PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Convertible Subordinated Loan on PT Reasuransi Nasional Indonesia, decided subordinated loans amounting Rp75,000,000,000 (seventyfive billion dollars) was converted into equity of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) on PT Reasuransi Nasional Indonesia. Thus the paid-up capital of PT Indonesian National Reinsurance per December 31, 2013 to Rp 213,000,000,000 (two hundred and thirteen billion rupiah).*

*Based on the General Meeting of Shareholders' Extraordinary Company dated 23 September 2014 regarding additional paid-in capital of Rp 250,000,000,000 (two hundred and fifty billion rupiah), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) agreed to increase the paid up capital of PT Reasuransi Nasional Indonesia amounting Rp 250,000,000,000 (two hundred and fifty billion rupiah) so by December 31, 2014 paid-up capital of PT Reasuransi Nasional Indonesia become Rp 463,000,000,000 (four hundred sixty three billion rupiah).*

*The goals and objectives of the Company are to participate in implementing the government policies and in supporting the government's programs in economy and national development in general, and running high quality and competitive reinsurance business in particular, to generate profit and to increase the Company's value by applying limited liability company principles, and by providing services in reinsurance to cover risks faced by insurance companies, either on the basis of conventional principles or syariah principles.*

*To achieve the above goals and objectives, the Company conducts the following businesses:*



- i Menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang untuk risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian/umum dan/atau Perusahaan asuransi jiwa.
- ii Menerima reasuransi dalam bidang asuransi kerugian/umum dan atau asuransi jiwa baik secara langsung maupun melalui perantara (broker) reasuransi.
- iii Melakukan retrosesi atau reasuransi sub i di atas kepada perusahaan asuransi dan atau reasuransi secara langsung ataupun melalui perantara (broker) reasuransi.  
Menyelenggarakan sebagian usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk unit syariah.

**b. Misi, Visi, Tujuan dan Lapangan Usaha**

**i. Misi Perusahaan**

Pernyataan misi perusahaan yang merupakan tujuan jangka panjang perusahaan yang menjadi landasan usaha perusahaan, dirumuskan seperti dibawah ini :

- 1) Memberikan pelayanan dan solusi reasuransi umum dan reasuransi jiwa, baik untuk produk konvensional maupun syariah;
- 2) Memberikan pelayanan pada pasar Nasional, Regional, maupun Internasional;
- 3) Memberikan manfaat kepada mitra kerja dalam meningkatkan kinerja perusahaan asuransi dan kapasitas asuransi nasional serta manfaat kepada stakeholder lainnya.

**ii. Visi Perusahaan**

Pernyataan misi tersebut yang menunjukkan peran yang akan diambil oleh perusahaan sejalan dengan cita-cita yang ingin dicapai di masa mendatang atau *visi* perusahaan, yaitu :

“Menjadi perusahaan reasuransi yang terpercaya, tangguh, dan terus tumbuh”.

**iii. Tujuan dan Lapangan Usaha**

Sebagaimana dinyatakan dalam Akte Pendirian tujuan dan lapangan usaha dari perseroan adalah

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah dibidang ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya, khususnya dibidang reasuransi dalam arti seluas-luasnya;
- 2) Untuk mencapai tujuan tersebut di atas Perseroan menyelenggarakan segala macam usaha reasuransi;
- 3) Perseroan dapat pula menjalankan usaha yang sama dengan bidang usaha Perseroan tersebut pada butir 1) dan 2) diatas, secara bersama-sama dengan perusahaan atau badan lain sepanjang usaha tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang dan ketentuan berlaku dalam Anggaran Dasar

**c. Struktur Organisasi**

Susunan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal 31 Desember 2014 sebagai berikut:

	Tahun 2014
<b>Komisaris</b>	
Komisaris Utama	Rinarno Pramudiyanto, SE, MM, CRGP
Komisaris	Sulaeman, SE, MM, AAAIK, AIIS
Komisaris Independen	Raymond Buisson, SE

- i reinsurance business against risks faced by general insurance companies and/or life insurance companies;*
- ii reinsurance of loss/general insurance and/or life insurance, either directly or through reinsurance brokers; and*
- iii retrocession or reinsurance of point a. above to insurance and / or reinsurance companies, directly or through reinsurance brokers*  
*To conduct part of the reinsurance business under syariah principles a syariah unit is established.*

**b. Mission, Vision, Objectives and Line of Business**

**i. The Company's Mission**

*The mission statement of the Company which is the Company's long-term goals that underlie the company's business, defined as below:*

- 1) Providing services and solutions on general reinsurance and life insurance, both in conventional and syariah basis;*
- 2) Providing services in the National, Regional, and International markets;*
- 3) Provide benefits to partners in improving the performance of insurance companies and the capacity of national insurance and to other stakeholders.*

**ii. Company's Vision**

*The mission statement that shows the role to be taken by the Company in line with the goals to be achieved in the future or the vision of the Company, i.e.:*

*“To become a reliable insurance company, resilient, and continues growing”*

**iii. Objectives and Line of Business**

*As stated in the Articles of Incorporation, the goals and line of business of the Company are:*

- 1) To conduct and support government policies and programs in the field of economic and national development in general, especially in the field of reinsurance in the broadest sense;*
- 2) To achieve the objectives the Company organizes all kinds of reinsurance business;*
- 3) The Company may also carry out the same ventures with the business of the Company in points a and b above, together with other companies or other entities as long as these ventures do not violate the laws and regulations in force as well as conditions and provisions in the Articles of Association.*

**c. The Company's Management**

*Members of the Board of Commissioners and Directors for the years ended 31 December 2014 are as follows:*

	Year 2014	
		<b>Commissioners</b>
	Rinarno Pramudiyanto, SE, MM, CRGP	President
	Sulaeman, SE, MM, AAAIK, AIIS	Commissioner
	Raymond Buisson, SE	Independent

Tahun 2014

Direksi

Direktur Utama	M.Shaifie Zein, SE, ACII, FIIS, CFP®
Direktur	Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AIIS
Direktur	Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®

Pengangkatan Komisaris berlaku sejak tanggal 1 Juni 2012 berdasarkan SK Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia No. 73/KEP/DIR/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Penetapan Direksi M.Shaifie Zein, SE, ACII, FIIS, CFP® dan Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AIIS berlaku sejak tanggal 12 November 2010 sesuai dengan SK Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia No. 124/KEP/DIR/XI/2010 tanggal 12 November 2010 tentang Penetapan Direktur Utama dan Direktur Operasi PT Reasuransi Nasional Indonesia setelah adanya Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No KEP-395/BL/2010 tgl 25 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Atas nama M.Shaifie Zein, SE, ACII, FIIS, CFP dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-396/BL/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AIIS. Atas SK tersebut di atas telah diaktakan pada 4 Februari 2011 Nomor 1.

Pengangkatan Direktur Keuangan Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA® sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Reasuransi Nasional Indonesia No 4 tanggal 23 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Umaran Mansjur, notaris di Jakarta. Akta pengangkatan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-08306 tanggal 07 April 2010.

Unit Syariah

Sesuai surat dari Dewan Syariah Nasional (DSN) No. U-158/DSN-MUI/VIII/2005 tanggal 27 Agustus 2005 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah, maka susunan Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

Ketua	Ir. H. Muhammad Syakir Sula, AAJ, FISS
Anggota	Drs. H. Safaruddin Rozali, MM
Anggota	Dra. Hj. Siti Ma'rifah, SH, MM

Struktur organisasi PT Reasuransi Nasional Indonesia tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- i. Divisi Underwriting Treaty dan Retrosesi yang membawahi 2 bagian:
  - Bagian Retrosesi
  - Bagian Treaty
- ii. Divisi Underwriting Fakultatif yang membawahi 3 Bagian
  - Bagian Facultative Fire dan Engineering
  - Bagian Facultative Non-Fire
  - Bagian Marine & Casualty
- iii. Divisi Reasuransi Jiwa yang membawahi :
  - Risk Consult B.D
  - Actuary
  - Underwriter
  - Teknik Administrasi

Year 2014

Board of Directors

M.Shaifie Zein, SE, ACII, FIIS, CFP®	President Director
Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AIIS	Director
Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA®	Director

Appointment of members of the Board of Commissioners is effective 1 June 2012 based on the directors of PT Asuransi Kredit Indonesia decree No. 73/KEP/DIR/VI/2012 dated 1 June 2012 on dismissal and appointment of the Board of Commissioners of PT Reasuransi Nasional Indonesia.

The appointment of members of the Board of Directors (Mr. M.Shaifie Zein, SE, ACII, FIIS, CFP® and Mr. Edhi Mulyono, SP, AAIK, AIIS) is effective 12 November 2010, based on the directors of PT Asuransi Kredit Indonesia decree No. 124/KEP/DIR/XI/2010 dated 12 November 2010 on appointment of president director and director of operation of PT Reasuransi Nasional Indonesia following the decree of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-395/BL/2010 dated 25 August 2010 on confirmation of result of fit and proper assessment of M.Shaifie Zein, SE, ACII, FIIS, CFP® and the decree of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No KEP-396/BL/2010 dated 25 August 2010 on confirmation of result of fit and proper assessments of Edhi Mulyono, SP, MM, AAIK, AIIS. A notary deed No 1 for the decrees were made on 4 February 2011.

The appointment of Mr. Rusdianto, SE, MM, AAIK, FIIS, CFP®, CSA® is based on the statement of extraordinary shareholders' general meeting of PT Reasuransi Nasional Indonesia No. 4 dated 23 March 2010, made before the notary Umaran Mansjur, in Jakarta. The certificate of appointment has been accepted and registered in the database of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-08306 dated 7 April 2010.

Syariah Unit

In conformity with the letter of Dewan Syariah Nasional (National Syariah Board) No. U-158/DSN-MUI/VIII/2005 dated 27 August 2005 on Recommendation of Syariah Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah), the members of Syariah Supervisory Board of PT Reasuransi Nasional Indonesia are as follows:

Chairman	Ir. H. Muhammad Syakir Sula, AAJ, FISS
Members	Drs. H. Safaruddin Rozali, MM
Members	Dra. Hj. Siti Ma'rifah, SH, MM

Organizational structure PT Reasuransi Nasional Indonesia 2014 are as follows:

- i. Underwriting Treaty and Retrocession Division, which supervises 2 Unit :
  - Retrocession
  - Treaty
- ii. Facultative underwriting Division, which supervises 2 units
  - Facultative Fire and Engineering
  - Facultative Non-Fire
  - Marine & Casualty
- iii. Life Division, which supervises :
  - Risk Consult B.D
  - Actuary
  - Underwriter
  - Technical Administration

- iv Divisi Klaim yang membawahi 2 bagian
  - Bagian Facultative Fire dan Engineering
  - Bagian Facultative Non-Fire
- v Divisi Reasuransi Syariah yang membawahi 3 bagian
  - Bagian Underwriting dan Klaim Umum
  - Bagian Underwriting dan Klaim Jiwa
  - Bagian Keuangan dan Akuntansi
- vi Divisi Keuangan dan Akuntansi yang membawahi 3 bagian
  - Bagian Keuangan
  - Bagian Akuntansi
  - Bagian Penagihan
- vii Divisi SDM dan Umum yang membawahi 2 bagian
  - Bagian Sumber Daya manusia
  - Bagian Umum
- viii Divisi Sistem Informasi dan Manajemen Resiko membawahi 2 bagian
  - Bagian Teknologi Informasi
  - Bagian Perencanaan dan Pengembangan dan Manajemen Resiko
- xi Aktuaris Perusahaan
- x Satuan Pengawas Intern membawahi staf-staf setingkat kepala Bagian/Seksi
- ix Sekretaris Perusahaan setingkat Kepala Bagian yang membawahi staf-staf setingkat Seksi

- iv. Claim Division, which supervises 2 units
  - Facultative Fire and Engineering
  - Facultative Non-Fire
- v. Syariah Reinsurane Division, which supervises 3 units
  - General Underwriting and Claim
  - Life Underwriting dan Claim
  - Finance and Accounting
- vi. Finance and Accounting Division, which supervises 3 units
  - Finance
  - Accounting
  - Collection
- vii. Human Resources and General Affairs Division, which supervises 2 units
  - Human Resources
  - General Affairs
- viii. Information Technology Division, which supervises 2 units
  - Information Technology
  - Planning and Development and Risk Management
- xi Actuary
- ix. Internal Control Unit charge level staffers head Division/Supervisor
- x. Head of the Corporate Secretary level who oversees the staff-level Supervisor

Jumlah karyawan tetap tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 5 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Composition and number of the Company's permanent employees as of 31 December 2014 and 2013, are as follows

	2014	2013	In terms of position/job title
i. Menurut jabatan			
Kepala Divisi	10	9	Heads of Divisions
Kepala Bagian	22	20	Heads of Units
Kepala Seksi	50	43	Heads of Sections
Pelaksana	44	50	Officers
Pegawai Dasar	16	15	Junior duty officers
Jumlah	142	137	Total
ii. Menurut jenjang pendidikan			In terms of educational background
Strata 2	15	16	Strata 2
Strata 1	103	94	Strata 1
Sarjana Muda / D3	7	8	Diploma degree / D3
Sekolah Lanjutan Atas	13	15	Senior High School
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	3	3	Junior High School
Sekolah Dasar	1	1	Elementary School
Jumlah	142	137	Total
iii. Menurut jenjang pendidikan / Keahlian			In terms of professional background
AAIK - Ahli Asuransi Indonesia Kerugian	5	3	AAIK - Indonesian General Insurance Expert
AAIJ - Ahli Asuransi Indonesia Jiwa	1	1	AAIJ - Indonesian Life Insurance Expert
AAAIK - Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian	9	11	AAAIK - Adjutant Indonesian General Insurance Expert
AAAIJ - Ajun Ahli Asuransi Indonesia Jiwa	11	10	AAAIJ - Adjutant Indonesian Life Insurance Expert
FSAI - Fellow Society of Actuary Indonesia	1	1	FSAI - Fellow Society of Actuary Indonesia
ANZIF - Australian New Zealand Institute of Insurance and Finance	1	1	ANZIF - Australian New Zealand Institute of Insurance and Finance
ACII - Associate of the Chartered Institute	4	3	ACII - Associate of the Chartered Institute
AMII - Associate Malaysian Insurance Institute	8	8	AMII - Associate Malaysian Insurance Institute
FIIS - Fellow Islamic Insurance Society	2	2	FIIS - Fellow Islamic Insurance Society
AIIS - Associate of Islamic Insurance Society	8	8	AIIS - Associate of Islamic Insurance Society
IPGDI - The Associated Parliamentary Group for Design and Innovation	2	2	IPGDI - The Associated Parliamentary Group for Design and Innovation
	52	50	

**c. Tentang Pemegang Saham (Entitas Induk)**

**i. Pendirian Perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)**

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), selanjutnya disebut dengan "Perusahaan" didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 1 tahun 1971 tanggal 11 Januari 1971 dengan akta Nomor 2 tanggal 6 April 1971 oleh Prabowo Achmad Kadijono, SH, Notaris Pengganti di Jakarta. Akta pendirian Perusahaan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyesuaian, diantaranya melalui Akta Nomor 18 tanggal 19 Mei 1998 oleh Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta. Akta perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan NO.C2-7.504.HT.01.01.TH.98 tertanggal 25 Juni 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Nopember 1998 nomor 92, Tambahan Nomor 6370.

Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 30 Nopember 2005 oleh Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan peningkatan modal disetor Perusahaan dari Rp 320.000.000.000 (tiga ratus dua puluh milyar rupiah) menjadi Rp 400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah), yang berasal dari kapasitas konversi cadangan umum Perusahaan, dengan komposisi pemegang saham yaitu Negara Republik Indonesia sebesar Rp180.000.000.000 (180.000 saham) dan Bank Indonesia sebesar Rp220.000.000.000 (220.000 saham). Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C-34240 HT.01.04.TH.2005 tertanggal 22 Desember 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 mei 2006 nomor 40, tambahan Nomor 508.

Selanjutnya berdasarkan Akta No.63 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar rapat Perusahaan tertanggal 24 April 2008, dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham telah mengambil keputusan antara lain : Perubahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) menjadi Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus milyar rupiah); menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan/portopel) sejumlah 850.000 saham (Rp850.000.000.000) diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia; menyetujui penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 sebagaimana diatur dalam PP No. 65 tahun 2007. Dengan penambahan tersebut, maka modal ditempatkan yang semula Rp 400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah) menjadi Rp1.250.000.000.000 satu triliun dua ratus lima puluh milyar). Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-25451.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 14 mei 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2009 nomor 96, Tambahan Nomor 27910.

Perubahan selanjutnya terhadap Anggaran Dasar Perseroan adalah sesuai dengan Akta No.102 tanggal 15 Agustus 2008 oleh Imas fatimah, SH Notarsi di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-72573.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 13 Oktober 2008 tentang perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroaan : penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 dan perkembangan kebutuhan pengelolaan Perusahaan; dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2009 Nomor 96, Tambahan Nomor 27911

**c. About the Parent Company**

**i. Establishment of the Company**

*PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), hereinafter referred to as "the Company", was incorporated on the basis of the Government Regulation No. 1 of 1971 dated 11 January 1971, under the notary deed No. 2 dated 6 April 1971 of the notary Prabowo Achmad Kadijono, SH. The Company's Articles of Association have been amended in a number of times, the latest of which was with the notary deed No. 18 dated 19 May 1998 of the notary Imas Fatimah. The Articles of Association was approved by the Minister of Justice with his letter No.C2-7.504.HT.01.04.TH.98 dated 25 June 1998 and were published in the State Gazette No. 92 dated 16 November 1998, and Supplement there to No. 6370*

*With the notary deed No. 29 dated 30 November 2005 of the notary Imas Fatimah, SH, an increase in paid-in capital was made from the initially Rp 320.000.000.000 (three hundred and twenty billion rupiah) to become Rp 400.000.000.000 (four hundred bil, originating from conversion of the Company's general reserve, with the share holding: the Government of the Republic of Indonesia: Rp180.000.000.000 (180.000 shares) and Bank Indonesia: Rp220.000.000.000 (220.000 shares). The deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights with his letter No. C-34240 HT. 01.04.TH.2005 dated 22 December 2005, and was published in the State Gazette No. 40 dated 19 May 2006, and the Supplement thereto No. 508*

*Subsequently, with the deed No. 63, on the shareholders' decision dated 24 April 2008, taken in general meeting of the shareholders, made before the notary Imas Fatimah, SH, the shareholders have agreed to: increase the Company's authorized capital from initially Rp 500.000.000.000 (five hundred billion rupiah) to Rp 2.500.000.000.000 (two trillion and five hundred million rupiah); subscribed 850.000 shares (equivalent Rp850.000.000.000) by the Government of the Republic of Indonesia; the additional investment by he Government of the Republic of Indonesia comes from the 2007 state budget, as specified in the Government Regulation No. 65 of 2007. With the additional investment, the subscribed and paid-in capital increased from initially Rp 400.000.000.000 (four hundred million rupiah) to become Rp1.250.000.000.000 (one trillion and two hundred fifty million rupiah). The deed was approved by the Minister of Justice and Human Rights with his letter No. AHU-25451.AH.01.02.of 2008 dated 14 May 2008, and was published in the State Gazette No. 96 dated 1 December 2009, and the Supplement thereto No. 27910.*

*Further amendment to the Company's Articles of Association was with the deed No. 102 dated 15 Augusts 2008 of the notary Imas Fatimah, SH, which was approved by the Minister of Justice and Human Rights with his letter No. AHU-72573.AH.01.02. of 2008 dated 13 October 2008, on changes in the Company's goals and objectives as well as in its activities to be in line with the Law No. 19 of 2003, Law No.40 of 2007, the Government Regulation No.45 of 2005 and requirements in the Company's management. The amendment was published in the State Gazette No. 96 dated 1 December 2009, and the Supplement thereto No. 27911*



Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 telah ditetapkan kembali penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2009, sehingga terjadi perubahan besarnya modal yang semula Rp 1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh milyar rupiah) menjadi Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus milyar rupiah), yang dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH, M, Kn No. 17 tanggal 22 April 2010. Perusahaan berdomisili di Jakarta, dan berkantor pusat di jalan Angkasa, Blok B-9, Kav. No.8 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta, dengan kantor cabang di Kemayoran, Cikini, Surabaya, Medan, Makassar, Denpasar, Bandung, Semarang, Balikpapan, Palembang, Lampung, Nanggroe Aceh Darussalam, Pekanbaru, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Padang, dan Samarinda. Perusahaan juga memiliki Kantor Unit Pelayanan yang berlokasi di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Batam, Bekasi, Tangerang, Jember, Madiun, Malang, Madura, Pangkal Pinang, Surakarta, Tangerang, Tegal, Bengkulu, Bogor, jogjakarta, Purwokerto, Jambi, Mataram, Cirebon, Serang-Banten, Kediri, Gorontalo, Ambon, Ternate, Sorong, Kendari, Palu, Sukabumi, Pati, Magelang, Tasikmalaya dan Kisaran.

**ii. Maksud, Tujuan dan Kegiatan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)**

Pada awalnya maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan ini adalah untuk membantu kelancaran dan pengamanan perkreditan bank-bank terutama di bidang-bidang usaha menengah dan kecil dan menutup perjanjian pertanggungan (asuransi) terhadap risiko atas kredit lainnya diluar perbankan. Selanjutnya dengan adanya perkembangan dunia usaha, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan juga mengalami penyesuaian sebagaimana yang dinyatakan dalam akta pendiriannya yaitu, melakukan usaha di bidang asuransi dengan menjalankan usaha asuransi kerugian, termasuk dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- 1) Menerima pertanggungan atas risiko tidak diterimanya pelunasan kredit dan/atau pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dari debitur terutama Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang diberikan oleh Bank atau lembaga pembiayaan melaksanakan penutupan pertanggungan atas risiko tidak diterimanya pelunasan kredit dari debitur yang diberikan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya.
- 2) Menerima pertanggungan langsung dari segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya yang berasal dari dalam maupun luar negeri, secara sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi lainnya, baik untuk ditahan sendiri maupun mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan.
- 3) Menerima pertanggungan tidak langsung dari perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi di dalam maupun luar negeri atas segala jenis asuransi kerugian dan sejenisnya, baik untuk ditahan sendiri maupun mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan.
- 4) Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

With the Government Regulation No. 64 of 2009 dated 31 October 2009, an additional investment of Rp 250.000.000.000 (two hundred and fifty million rupiah) was made by the Government of the Republic of Indonesia, originating from the year 2009 State Budget. With the additional investment, the subscribed and paid-in capital increased from initially Rp 1.250.000.000.000 (one trillion two hundred and fifty billion rupiah) to become Rp1.500.000.000.000 (one trillion and five hundred billion rupiah). The change in the subscribed and paid-in capital was documented in the notary deed No 17 dated 22 April 2010 of the notary Imas Fatimah, SH., M.Kn.

The Company domiciles in Jakarta, with the head office located at Jalan Angkasa, Blok B-9, Kav. No.8 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta, and with branch offices at Kemayoran, Cikini, Medan, Makassar, Surabaya, Denpasar, Bandung, Semarang, Balikpapan, Palembang, Lampung, Nanggroe Aceh Darussalam, Pekanbaru, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Padang, Samarinda, Jayapura and Jogjakarta. The Company also have Service Unit Offices located at Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Batam, Bekasi, Tangerang, Jember, Madiun, Malang, Madura, Pangkal Pinang, Surakarta, Tangerang, Tegal, Bengkulu, Bogor, Purwokerto, Jambi, Mataram, Cirebon, Serang-Banten, Kediri, Gorontalo, Ambon, Ternate, Sorong, Kendari, Palu, Sukabumi, Pati, Magelang, Tasikmalaya and Kisaran.

**ii. The Company's Goals, Objectives and Lines of Business**

Initially, the Company's goals and objectives are to assist direction and safe flows of loan fund from banks to medium and small scale industries, and to provide risk of loans insurance of other non-bank financial institutions. Further, with development in business activities, the Company's goals and objectives are changed accordingly, as specified in the Articles of Association, i.e. ventures into insurance businesses, including those under syariah principles, optimizing the Company's resources, to provide high quality services and competitive advantage to derive profit and to add value to the Company, under good corporate principles.

To achieve the goals and objectives, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) engages in the following business activities:

- 1) Provide coverage against risks of non-repayment of loans and / or financing, including financing based on Sharia principles, of debtors, especially loans to Micro Small Medium Enterprises and Cooperatives (MSME) provided by the Bank or financial institution, provides insurance coverage for risks of non repayment of the credit given by banks or other financial institutions
- 2) Provides direct insurance of any kind of loss insurance, and the like from inside and domestic and overseas entities, either by itself or together with other insurance companies, either for retained by itself or reinsured them to other insurance companies after considering the ability of the Company
- 3) Provides indirect insurance from domestic and overseas insurance / reinsurance companies for any type of insurance, either retained by itself or reinsured them to other insurance companies after considering the ability of the Company
- 4) Perform other activities commonly conducted by insurance companies paying due regard to the legal and regulatory provisions.



iii. Entitas Anak

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) mempunyai 3 (tiga) anak perusahaan yaitu:

1) PT Reasuransi Nasional Indonesia

Pada saat pendirian perusahaan, bidang usaha yang dijalankan termasuk reasuransi yaitu menutup pertanggungan ulang atas risiko-risiko asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Namun, dengan adanya ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Perusahaan harus memisahkan antara usaha asuransi dan reasuransi. Untuk itu, pada tanggal 22 Agustus 1994, berdasarkan Akta No.129 dan 130 dengan Notaris Sutjipto, SH. Perusahaan mendirikan Entitas Anak dengan kepemilikan saham sebesar 99,99%, yaitu PT Reasuransi Nasional Indonesia yang bergerak dalam usaha reasuransi, yang sekaligus juga untuk meningkatkan kapasitas pertanggungan nasional.

Maksud dan tujuan dari mendirikan Entitas Anak adalah untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya penyelenggaraan usaha reasuransi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, dengan memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi baik berdasarkan prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, PT Reasuransi Nasional Indonesia melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang untuk risiko yang dihadapi Perusahaan Asuransi Kerugian/Umum dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
- b) Menerima reasuransi dalam bidang asuransi kerugian/umum dan/atau asuransi jiwa baik secara langsung maupun melalui perantara (broker) reasuransi.
- c) Melakukan retrosesi atau reasuransi sub a. Diatas kepada perusahaan asuransi dan atau reasuransi secara langsung maupun melalui perantara (broker) reasuransi.
- d) Menyelenggarakan sebagian usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk unit syariah.

Pada bulan Desember 2006, Perusahaan telah meningkatkan penyertaan saham ke Entitas Anak menjadi sebesar Rp 84.999.000.000 (delapan puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar rupiah) dari sebelumnya sebesar Rp 74.999.000.000 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar rupiah). Peningkatan setoran modal tersebut telah diaktakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Reasuransi Nasional Indonesia No.108 tanggal 22 Februari 2007 dengan Notaris Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia tentang pengalihan dana cadangan umum PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 29 November 2010 diputuskan untuk mengalihkan sebagian dana cadangan umum pada ekuitas usaha konvensional PT Reasuransi Nasional Indonesia maksimal sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) menjadi ekuitas usaha syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia mulai berlaku sejak 30 November 2010. Sampai dengan 31 Desember 2013 pengalihan dana cadangan tersebut terealisasi sebesar Rp 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah).

iii. Subsidiary Company

PT Asuransi Kredit Indonesia has 3 (three) subsidiaries, namely:

1) PT Reasuransi Nasional Indonesia

*At the time of its incorporation, the Company's lines of business include reinsurance and life insurance. With the adoption of Law No. 2 of 1992 on line of business of insurance companies, the Company was required to separate insurance business from reinsurance one. It was, therefore, on 22 Augusts 1994, based on the deeds No.129 and 130 of the notary Sutjipto, SH, the Company established a 99,99% interest subsidiary, PT Reasuransi Nasional Indonesia, which engages in reinsurance business, which at the same time is intended to increase the national capacity in insurance business activities.*

*The establishment of the Subsidiary is intended to support and participate in the Government's policies and programs relating to national economy and development in general, and in providing high quality and competitive insurance businesses in particular, and to gain profit in order to add value to the Company, under good corporate principles, by providing services in risks reinsurance to other insurance companies, either under conventional or syariah principles.*

*To achieve the goals and objectives, PT Reasuransi Nasional Indonesia engages in the following business activities:*

- a) *reinsurance of risks faced by general insurance companies and/or life insurance companies;*
- b) *b. reinsurance of loss/general insurance and/or life insurance, either directly or through reinsurance brokers;*
- c) *retrocession or reinsurance of point a. above to insurance companies and / or reinsurance, directly or through reinsurance brokers; and*
- d) *d. provide partial reinsurance services under syariah principles by establishing a syariah unit.*

*In December 2006, the Company has increased its investment in the Subsidiary from initially Rp74.999.000.000 (seventy four billion and nine hundred and ninety nine billion rupiah) to Rp84.999.000.000 (eighty four billion and nine hundred and ninety nine billion rupiah). The increase in investment is made by the decision of a meeting to amend the Subsidiary's Articles of Association with the deed No.108 dated 22 February 2007 of the notary Sutjipto, SH.*

*Based on extraordinary general meeting of shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia on 29 November 2010 on transfer of general reserve fund of PT Reasuransi Nasional Indonesia it was decided to reallocate some of the general reserve fund, the equity of the conventional business of PT Reasuransi Nasional Indonesia, to equity of syariah business unit of PT Reasuransi Nasional Indonesia at a maximum amount of Rp 20.000.000.000 (twenty billion rupiah) effective 30 November 2010. By 31 December 2012 the re-allocation of an amount of Rp 18.000.000.000 (eighteen billion rupiah) was realized.*

Dalam rangka penambahan modal disetor, berdasarkan Notulen Rapat RUPSLB PT Reasuransi Nasional tanggal 26 Juli 2011, Nomor 15/RR/DIR, perusahaan telah menerima aset berupa 1 (satu) buah gedung yang terletak di Jln. Cikini Raya No. 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta, dari Induk Perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), yang dicatat sebagai modal disetor sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah).

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Nomor: S-208/MBU/2014 tanggal 4 April 2014 perihal Konversi Pinjaman Subordinasi PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Reasuransi Nasional Indonesia memutuskan untuk mengalihkan pinjaman Subordinasi PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) menjadi Modal Disetor atas nama PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia sebanyak 75.000 lembar saham senilai @ Rp1.000.000, sehingga keseluruhan saham PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia menjadi sebanyak 212.999 lembar saham senilai @ Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 23 September 2014 tentang penambahan disetor sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) menambah modal disetor kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga per 31 Desember 2014 modal disetor PT Reasuransi Nasional Indonesia menjadi sebesar Rp 463.000.000.000 (empat ratus lima puluh milyar rupiah).

## **2) PT Jaminan Pembiayaan Asuransi Kredit Indonesia Syariah**

Dalam rangka memanfaatkan peluang pasar penjaminan syariah yang masih terbuka, pada penghujung tahun 2013 perusahaan telah mendirikan Entitas Anak yakni PT Penjaminan Pembiayaan PT Asuransi Kredit Indonesia Syariah, dengan modal setor sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) Perusahaan ini telah memperoleh izin dari Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 28 Desember 2013 dan telah beroperasi sejak Mei 2014.

Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan ini adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya khususnya penyelenggaraan usaha di bidang Penjaminan Pembiayaan dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a) Melakukan penjaminan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b) Melakukan usaha-usaha lain yang masih memiliki keterkaitan dengan usaha kafalah (penjaminan) sesuai edngan ketentuan yang berlaku.

*For addition in the paid-in capital, based on minute of extra ordinary general meeting of shareholders of PT Reasuransi Nasional Indonesia dated 26 July 2011 No 15/RR/DIR the Subsidiary has received a transfer of a unit of asset in terms of an office building located at Jln. Cikini Raya No. 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Central Jakarta, Jakarta Province, from the parent company: PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), valued at Rp 35.000.000.000 (thirty five billion rupiah). The amount is recognized as paid-in capital.*

*Based on the letter of the Minister of State Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Number: S-208/MBU/2013 dated 4 April 2013 concerning PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Convertible Subordinated Loan to PT Reasuransi Nasional Indonesia, it was decided to divert the Subordinated Loans to Paid-in Capital on behalf of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia in PT Reasuransi Nasional Indonesia of Rp75.000.000.000 (seventy five billion rupiah), equals to 75,000 shares of par value of Rp1.000.000 each, so that the entire stock of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia become 212 999 shares of par value of Rp1.000.000 (one million rupiah) each.*

*Based on the decision made in Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Reasuransi Indonesia on 23 September 2014, on additional paid-in capital, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) has added Rp250.000.000.000 (two hundred and fifty billion rupiah) in paid-in capital in PT Reasuransi Nasional Indonesia, resulting in the paid-in capital of PT Reasuransi Nasional Indonesia of Rp 463.000.000.000 (four hundred and sixty three billion rupiah).*

## **2) PT Jaminan Pembiayaan Asuransi Kredit Indonesia Syariah**

*In order to take advantage of market opportunities that are still open for sharia insurance, at the end of 2013, the Company has established a subsidiary named PT Penjaminan Pembiayaan Asuransi Kredit Indonesia Syariah, with a paid up capital of 100 billion rupiahs. The company has obtained a license from the National Sharia Board and Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on December 28, 2012 and has been operating since May 2013.*

*The goals and objectives are to contribute to the establishment of the Company and to implement and support the government's policies and programs in the fields of economics and national development in general, especially in the field of financing insurance business under Islamic principles as well as optimizing the utilization of company resources to produce high-quality services and strong competitiveness to increase the value of the Company by applying the principles of good corporate governance.*

*To achieve the goals and objectives, the Subsidiary engages in the following business activities:*

- a) *provides financing insurance under syaria principles;*
- b) *undertake other businesses that still has business relationship with kafalah (guarantee) in accordance with prevailing legal and regulatory requirements.*

**3) PT. Usayasa Utama**

Tujuan Pemegang Saham membentuk PT Usayasa Utama adalah untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan usaha, baik produk eksisting maupun produk-produk baru yang akan dikembangkan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) serta menambah jejaring bisnisnya. Dengan demikian, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dapat lebih fokus dalam menggali produk-produk baru, menyempurnakan produk eksisting, meningkatkan pelayanan pelanggan dan mengembangkan prinsip pengenalan nasabah (*Know Your Customer*).

PT Usayasa Utama didirikan pada tanggal 7 Oktober 1997 dengan Akta Pendirian Perusahaan dibuat di hadapan Notaris Ny. Sulami Mustafa, S.H. yaitu Akta No. 5 tahun 1997. Perusahaan ini didirikan oleh Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA) sebagai pemegang saham mayoritas dan Koperasi Karyawan Askrindo (KKA) sebagai pemegang saham minoritas.

Pada awal tahun 2014, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) mengambil alih sebagian tersebut sebesar saham 95% dan telah di sahkan berdasarkan Akta Notaris Hadijah, SH No. 28 tanggal 30 Januari 2014. Pengambilalihan ini dilatar-belakangi oleh kepentingan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) memasarkan produk-produknya yang diageni oleh PT Usayasa Utama.

Sesuai risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) tanggal 23 Desember 2014, modal dasar Perseroan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang terbagi dalam 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham.

Dari modal saham tersebut telah disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan komposisi sebagai berikut :

No	Nama Pemegang Saham <i>Name of Shareholder</i>	Jumlah Saham <i>Number of Shares</i>	Nominal <i>Par</i>	Jumlah Rupiah <i>In Rupiah Amount</i>	% (Presentase) Saham <i>percentage shareholding</i>
1	PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Persero.	2,375	1,000,000	2,375,000,000	95,00%
2	PT Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA)	125	1,000,000	125,000,000	5,00%
Jumlah modal disetor / <i>The amount of paid-in capital</i>				2,500,000,000	100,00%

Dengan menjadi pemegang saham pengendali, maka PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dapat memanfaatkan keberadaan PT Usayasa Utama secara optimal dalam mendukung fungsi pemasaran produk PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Selain itu, PT Usayasa Utama dapat menjadi "jembatan" dan instrument bagi Askrindo untuk memasuki industri penunjang bisnis asuransi yang diperkirakan mampu memberikan yield yang relatif tinggi.

**iv. Permodalan**

**Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)**

Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah telah merealisasikan penambahan PMN sebesar Rp850.000.000.000 (delapan ratus lima puluh milyar rupiah) tanggal 28 Desember 2007 sesuai dengan akta No. 63 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Perusahaan tertanggal 24 April 2008, dihadapan notaris Imas Fatimah, SH, dan Surat dari Meneg BUMN No. S-137/MBU/2010 tanggal 3 Maret 2010 ditetapkan penambahan penyertaan modal negara RI sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), sehingga keseluruhan PMN RI menjadi sebesar Rp1.100.000.000.000 (satu triliun seratus milyar rupiah).

**3) PT. Usayasa Utama**

The objective of the Shareholders in establishing PT Usayasa Main is to increase growth in revenue, both from existing products and or new products that will be developed by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) and increase business networking. Thus, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) will be more focused in exploring new products, enhance existing products, improve customer service and develop the principle of customer recognition (*Know Your Customer*).

PT Usayasa Utama was established on October 7, 1997 with the notary deed No. 5 in 1997 of the notary Sulami Mustafa, SH. The company was founded by Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA) as the majority shareholder and Askrindo Employees Cooperative (KKA) as minority shareholders.

In early 2014, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) took over the majority stake of 95% and has been legalized by the deed number 28 dated January 30, 2014 of the notary Hadijah, SH. This acquisition was triggered by the interest of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) for marketing its products for which PT Usayasa Utama acts as one of the agents.

Correspond minutes of the General Meeting of the Extraordinary Shareholders (EGM) on December 23, 2014, the Company's authorized capital was Rp 10.000.000.000, - (ten billion rupiah) divided into 10,000 (ten thousand) shares with a par value of Rp 1,000,000, - (one million rupiah) per share.

Of the share capital has been paid by 25% (twenty five percent) or 2.500 (two thousand five hundred) shares with an aggregate nominal value of Rp 2.500.000.000, - (two billion five hundred million rupiah) with the following composition:

By becoming the controlling shareholder, then Askrindo can exploit the presence of PT Usayasa Main optimally in support of marketing functions of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) products. In addition, PT Usayasa Utama can act as bridging unit and instrument for the needs of business partners, for PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) to enter the insurance business support industry which is predicted to provide a relatively high yield business

**iv. Capital**

**Addition in the Government Investment.**

The President's Instruction (Inpres) No. 6 of 2007 is a policy to expedite development in real sector and empowerment of small scale and medium industries to boost growth in the national economy. In relation to the policy, on 28 December 2007 the Government added its investment by Rp850.000.000.000 (eight hundred and fifty billion rupiah), with the deed No. 63 dated 24 April 2008, of the notary Imas Fatimah, SH. The deed was made following the decision of the shareholders which was made outside their general meeting. Further, with the letter No. S-137/MBU/2010 dated 3 March 2010, the Minister of SOEs has decided to add another Rp250.000.000.000 (two hundred and fifty billion rupiah) to its investment originating, resulting in a total of Rp1.100.000.000.000 (one trillion and one hundred billion rupiah) of the additional Government's investment.



Penambahan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan perusahaan dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan Akta No. 102 tanggal 15 Agustus 2008 oleh Imas Fatimah, SH., notaris di Jakarta, modal disetor Perusahaan telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham menjadi 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2009 telah ditetapkan kembali penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2009, sehingga terjadi perubahan struktur permodalan yang semula Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh milyar rupiah) menjadi Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus milyar rupiah), sesuai akta notaris Imas Fatimah, SH., MKn notaris di Jakarta No. 17 tanggal 22 April 2010.

Berdasarkan PP 81 tahun 2010 Pemerintah menambah PMN RI sebesar Rp 900.000.000.000 (sembilan ratus milyar rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp2.400.000.000.000 (dua triliun empat ratus milyar rupiah). Selanjutnya pada tahun 2011 sesuai PP No. 60 tahun 2011 tanggal 29 Des 2011 Pemerintah menambah PMN sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus milyar rupiah) dan pada tahun 2013 berdasarkan surat dari Menteri Negara BUMN No. S-390/MBU/2013 tanggal 25 Juli 2013, Pemerintah memberikan kembali tambahan PMN sebesar Rp 831.000.000.000 (delapan ratus tiga puluh satu milyar rupiah), sehingga total PMN sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp3.631.000.000.000 (tiga triliun enam ratus tiga puluh milyar rupiah) sehingga berdasarkan Perubahan anggaran dasar Perusahaan, modal menjadi 3.631.000 lembar dengan nilai Rp3.631.000.000.000 (tiga triliun enam ratus tiga puluh milyar rupiah).

#### **v. Struktur Organisasi**

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Bank Indonesia Nomor: KEP-23/MBU/2006 dan Nomor: 8/16/KEP.GBI/2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota komisaris PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-202/MBU/2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Salinan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-27/MBU/2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang Pengangkatan Komisaris Independen, serta Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Nomor: SK-161/MBU/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris.

#### **Tahun 2014 / Year 2014**

##### **Dewan Komisaris PT Askrido (Persero)**

Komisaris Utama	Suradji
Komisaris	Deddy S. Priatna
Komisaris	Kondar Sinaga
Komisaris Independen	Siti Agnes Ratnawati

*The additional investment is intended to increase the Company's business capacity and to strengthen its capital structure for insuring loans provided to the community's businesses and for improving micro business activities, and in turn to increase growth in the national economy.*

*Based on the deed No. 102 dated 15 Augusts 2008 of the notary Imas Fatimah, SH, the subscribed and paid-in capital of the Company is 1.250.000 shares of par value of Rp1.000.000 (one million rupiah) each, and based on the Government Regulation No. 64 of 2009 additional investment was made by the Government in the amount of Rp250.000.000.000 (two hundred and fifty billion rupiah), originating from the year 2009 state budget. It resulted in increase of the Company's paid-in capital from initially Rp1.250.000.000.000 (one trillion two hundred and fifty billion rupiah) to become Rp1.500.000.000.000 (one trillion and five hundred billion rupiah), which is documented in the notary deed No. 17 dated 22 April 2010 of the notary Imas Fatimah, SH., MKn.*

Based on the Government Regulation No.81 of 2010, the Government has again added another investment in the amount of Rp 900.000.000.000 (nine hundred billion rupiah), resulting in the total paid in capital of Rp 2.400.000.000.000 (two trillion and four hundred billion rupiah). In 2011, with the Government Regulation No.60 of 2011 dated 29 December 2011 the Government puts another investment in the amount of Rp 800.000.000.000 (eight hundred billion rupiah). Subsequently with the Minister of SOE's letter No. S-390/MBU/2012 dated 25 July 2012, the government again added its investment of Rp. 831.000.000.000 (eight hundred and thirty one billion rupiah) , to come to a total of Rp. 3.631.000.000.000 (three trillion six hundred and thirty one billion rupiah).

#### **v. Organizational Structure**

*The Board of Commissioners as at December 31, 2014 and 2013 under the Joint Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the Governor of Bank Indonesia No. KEP-23 / MBU / 2006 and No. 8/16 / KEP.GBI / 2006 dated February 15, 2006 on dismissal and appointment of members of the commissioners of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) and the Decree of the Minister of State Enterprises No. KEP-202 / MBU / 2011 dated August 22, 2011 on Termination and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), and the copy of the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. KEP-27 / MBU / 2013 dated January 17, 2013 on the Appointment of the Independent Commissioner and the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) number: SK-161 / MBU / 2014 dated February 27, 2014 on the Appointment of Members of the Board of Commissioners*

#### **Tahun 2013 / Year 2013**

Suradji	<b>Commissioners</b> President
Deddy S. Priatna	Commissioner
Kondar Sinaga	Commissioner
Siti Agnes Ratnawati	Independent Commissioner

**Tahun 2014 / Year 2014**

**Direksi**

Direktur Utama	Antonius Chandra S.N.
Direktur Teknik & Operasional	Singgih Hardjanto
Direktur Keuangan, Investasi & TI	T. Wdya Kuntarto
Direktur SDM & Umum	Sabdon

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) adalah perusahaan asuransi nasional yang sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Kuasa Pemegang Saham. Jumlah modal sebanyak 4.511.000 telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 4.511.000.000.000,- (empat triliun lima ratus sebelas milyar rupiah) dengan nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Saham PT Reasuransi Nasional Indonesia yang dimiliki PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) adalah 99% terdiri dari 462.999 lembar saham @Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) senilai Rp 462.999.000.000 (empat ratus enam puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)

**d. Pernyataan atas Kepatuhan Terhadap SAK**

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

**2 Kebijakan Akuntansi PT Reasuransi Nasional Indonesia**

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting diterapkan oleh Perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia adalah sebagai berikut:

**a. Penyajian Laporan Keuangan**

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) dengan pembulatan dalam rupiah penuh dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, Perusahaan mendefinisikan setara kas adalah kas dan bank, tanpa adanya pembatasan-pembatasan penggunaan atau tujuan tertentu.

Dengan berlakunya PSAK 1 (Revisi 2009) per Januari 2011, tentang Penyajian Laporan Keuangan, dan PSAK 28 (revisi 2011) yang berlaku efektif per 1 Januari 2012, tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian, Perusahaan telah melakukan penyesuaian-penyesuaian atas penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK tersebut di atas. Semula disusun berdasarkan PSAK 28 (Revisi 2004) tentang Akuntansi Asuransi Kerugian.

**b. Aset dan Liabilitas Keuangan**

Pada tahun 2011, DSAK IAI menerbitkan PSAK 50 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Penyajian"; PSAK 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Ketiga pernyataan ini menggantikan PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan pengungkapan"; PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Ketiga pernyataan tersebut berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

**Tahun 2013 / Year 2013**

**Board of Directors**

Antonius Chandra S.N.	President Director
Singgih Hardjanto	Director
T. Wdya Kuntarto	Director
Sabdon	Director

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) was a national insurance company whose shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia, through the Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) as Authorized Shareholders. Total capital as much as 4.511.000 have been issued and fully paid Rp 4.511.000.000.000 (four trillion five hundred and eleven billion rupiah) with a par value of Rp 1,000,000, - (one million rupiah)

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) is the Parent Company of PT Reasuransi Nasional Indonesia, Procentage of interest in 99,99% or equivalent : 462.999 unit @ Rp 1.000.000 (one million rupiah) in total Rp 462.999.000.000,-(four hundred sixty two billion nine hundred and ninty nine million rupiah).

**c. Statement of Compliance with SAK**

The Financial Statements have been prepared and presented in accordance with the accounting standards in Indonesia.

**2 Summary of Significant Accounting Policies**

Summary of significant accounting policies adopted by the Company for the preparation of the financial statements in conformity with Indonesian accounting principles:

**a. Basis of the Financial Statements**

The financial statements have been prepared on accrual basis. The reporting currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), and the financial statements are prepared on the historical cost basis, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The statements of cash flows are prepared using direct method with the following classifications: operating, investing and financing activities. For cash flows reporting purposes, the Company defines cash equivalents include cash in banks, unrestricted in use and and not designated for certain purpose.

With the pronouncement of PSAK 1 (Revised 2009) in January 2011, on Presentation of Financial Statements, the Company has made necessary adjustments in the presentation of financial statements to conform to the PSAK. Previously the financial statements were prepared on the basis of PSAK 28 (Revisi 2004) on Accounting for Loss Insurance.

**b. Financial Assets and Liabilities**

In 2011, the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) issued PSAK 50 (Revised 2011), "Financial Instruments: Presentation and Disclosure" and PSAK 55 (Revisi 2011) "Financial Instruments: Recognition and Measurement", and PSAK 60 Financial Instruments: Disclosure. The above statements replace PSAK 50 (Revisi 2006) "Accounting for Investment in Certain Securities" and PSAK 55 "Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities". Those statements are effective for financial statements covering periods beginning on or after 1 January 2012.



Dalam rangka penerapan PSAK 50 (Revisi 2011) dan PSAK 55 (Revisi 2011), serta PSAK 60 (Revisi 2011), perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari investasi, kas dan setara kas, piutang reasuransi, piutang retrosesi, piutang hasil investasi, piutang lain-lain dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang reasuransi, estimasi klaim retensi sendiri, premi yang belum merupakan pendapatan, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar dan cadangan pesangon karyawan.

### c. Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam beberapa kategori. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan dan upaya, perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya. Perusahaan menggunakan akuntansi tanggal perdagangan ketika mencatat transaksi aset keuangan.

#### i. Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan adalah saham dan obligasi yang diperdagangkan serta reksadana.

#### ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya. Dalam hal pinjaman yang diberikan dan piutang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan piutang dan pinjaman yang diberikan tersebut. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur pinjaman yang diberikan dan piutang, pada nilai wajarnya, tanpa harus dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul saat penjualan, atau pelepasan lain, kecuali untuk pinjaman yang diberikan dan piutang, seperti berikut:

- 1) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan oleh entitas untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, dan pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal oleh entitas ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- 2) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- 3) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang dan diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual; diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi piutang reasuransi, piutang retrosesi, piutang hasil investasi, piutang lain-lain dan aset lain-lain.

*In the application of PSAK 50 (Revisi 2011), PSAK 55 (Revised 2011), and PSAK 60 (Revised 2011), the Company has to classify the financial instruments into financial assets and financial liabilities.*

*The Company's financial assets include investments, cash and cash equivalents, reinsurance receivables, retrocession receivables, investment income receivables, other receivables and other assets*

*The Company's financial liabilities include reinsurance payables, reserve for claims, unearned premiums, other payables, accrued expenses, and allowance for severance payments.*

### c. Financial Assets

*The Company classifies its financial assets into several categories. This classification depends on the designation of the financial assets. Management determines the classification of financial assets at its initial recognition. The Company uses trade-date-accounting in recording financial assets transactions*

#### i. Financial Assets Measured at Fair Value through Profit or Loss

*Financial assets measured at fair value through profit and loss are financial assets that are designated for trading. Financial assets classified as trading if acquired primarily for the purpose of sale or repurchased in the near future and there is evidence of current short-term profit taking. Derivatives are classified as assets for trading unless designated and effective as hedging instruments.*

*The Company's financial assets which are classified as financial assets for trading include shares, bonds for trading and mutual funds.*

#### ii. Loans and receivables

*Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determined payment and do not have price quotation in active market. At initial recognition, loans and receivables are recognized at fair value. When loan and receivable are not measured at fair value through profit and loss, the fair value is added with all directly attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition, the entity measures the loan and receivable at fair value, not deducted with transaction costs at sale or other means of disposal, except for the following loans and receivable:*

- 1) *loans and receivables designated for sale in the near future, classified as for trade, and loans and receivables which at initial recognition classified as financial assets measured at fair value through profit and loss;*
- 2) *loans and receivables which at initial recognition are designated as available for sale, or*
- 3) *loans and receivables for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration; they are classified as available-for-sale. They are measured at cost and amortized using effective interest rate.*

*The Company's financial assets which are classified as loans and receivables include cash and cash equivalents, reinsurance receivables, retrocession receivables, investment income receivables, other receivables and other assets.*

**iii. Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo**

Aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- 1) Investasi pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
- 2) Investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual.
- 3) Investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Sampai saat ini perusahaan belum memiliki aset keuangan yang memenuhi syarat kategori dimiliki hingga jatuh tempo.

**iv. Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual**

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba dan rugi yang sebelumnya diakui di ekuitas, diakui pada laporan laba rugi. Namun pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif, diakui pada laporan laba rugi.

Aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual meliputi obligasi, reksadana dan penyertaan saham.

Pada saat ini perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang memenuhi kategori aset tersedia untuk dijual

**d. Liabilitas Keuangan**

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam beberapa kategori

**i Liabilitas Keuangan Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi.**

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Tidak ada liabilitas keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan.

**iii. Held-to-Maturity Financial Assets**

Financial assets classified as held to maturity are non-derivative financial assets with fixed or determined payments and have defined maturities, and management has the positive intention and ability to hold the financial assets to maturity, unless:

- 1) Investment at initial recognition designated as financial assets measured at fair value through profit and loss.
- 2) Investment classified by the entity as available for sale.
- 3) Investments which have the definition of loans and receivables.

At initial recognition, financial assets held to maturity are recognized at their fair values plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using effective interest rate. Currently the Company has no financial assets which meet the criteria as held to maturity.

**iv. Financial Assets Available for Sale**

Investments classified as available for sale are non-derivative financial assets designated as held for a specified period which will be sold for liquidity purposes or to expect changes in interest rates, foreign exchange or those financial assets which are not classified as loans or receivables, investments which are classified as held to maturity or financial assets measured at fair value through profit or loss.

When there is impairment in value of financial assets classified as available for sale, the accumulated gains and losses previously recognized in equity are recognized in statement of income. However, interest income which is calculated using the effective interest rate method is recognized in statement of income.

The Company's financial assets classified as available for sale include bonds, mutual funds and investment in stocks.

Currently the Company has no financial assets which meet the criteria as available for sale.

**d. Financial Liabilities**

The Company classifies its financial liabilities into several categories

**i Financial Liabilities Measured at Fair Value Through Profit and Loss.**

The fair values of financial liabilities measured at fair value through profit loss are financial liabilities that are designated for trading.

Financial liabilities are classified as trading if acquired primarily for purpose of sale or repurchase in the near future and there is evidence of current short-term profit taking. Derivatives are classified as liabilities for trading unless specified and effective as hedging instruments. Currently the Company has no financial liabilities which are classified as financial liabilities for trading.

ii **Liabilitas Keuangan Yang Diukur Dengan Biaya Perolehan Diamortisasi**

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain, utang reasuransi, estimasi klaim retensi sendiri, premi yang belum merupakan pendapatan, utang lain - lain, biaya yang masih harus dibayar dan cadangan pesangon karyawan.

e. **Nilai Wajar Instrumen Keuangan.**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal neraca. Nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan adalah harga penawaran (bid price). Sedangkan untuk aset yang akan diperoleh atau liabilitas yang dimiliki adalah harga permintaan (offer price).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu.

f. **Penggunaan Estimasi**

Penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen telah menggunakan pertimbangan dan estimasi terbaiknya atas jumlah tertentu. Pertimbangan dan estimasi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah berdasarkan evaluasi manajemen atas fakta dan keadaan yang relevan pada tanggal laporan keuangan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi, dan perbedaan antara estimasi dan realisasi dibebankan atau dikreditkan pada operasi tahun berjalan.

Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini.

i. **Estimasi Klaim Retensi Sendiri (EKRS).**

Perusahaan membuat estimasi atas risiko klaim yang harus dibayar di masa yang akan datang berdasarkan pertimbangan kondisi saat ini dan yang akan datang. Estimasi klaim retensi sendiri adalah estimasi klaim yang menjadi tanggungan perusahaan, sebelumnya dihitung berdasarkan Surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK/06/2003 tanggal 30 September 2003. Mulai tahun 2013 dihitung berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam LK Nomor PER-09/BL/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yaitu sebagai berikut:

- 1) Cadangan teknis dalam bentuk cadangan klaim paling sedikit dihitung sebesar penjumlahan:
  - a) nilai estimasi klaim yang masih dalam proses penyelesaian;
  - b) nilai estimasi klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (Incurred But Not Reported).

ii **Financial Liabilities Measured at Amortized Cost**

Financial liabilities which are not classified as financial liabilities measured at fair value through profit and loss are classified and measured at amortized cost.

Financial liabilities measured at amortized cost include reinsurance payables, reserve for claims, unearned premiums, other payables, accrued expenses, and allowance for severance payments

e. **Estimated Fair Value**

The fair value of financial instruments held for trading in active market is based on the prevailing market value at the balance sheet date. The fair value used by the Company for the assets owned or obligations to be issued is the bid price. While for assets to be acquired or liability held is the offered price.

The fair value of financial instruments not traded in the market is determined using certain valuation techniques.

f. **Use of Estimates**

The preparation of financial statements, in conformity with Indonesian accounting principles requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of its contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Actual results may differ from those estimates

In preparing the financial statements, the Management has made their best judgments and estimates over certain amounts. Judgments and estimates used in these financial statements are based on the Management's evaluation of relevant facts and circumstances at the date of the financial statements. Actual results could differ from these estimates, and the difference between the estimated and realization is charged or credited to current operations.

Information on the major assumptions which is made concerning the future and major source of other estimated uncertainty at the end of the reporting period, that have significant risks resulting in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period are described below.

i. **Estimated Own Retention Claims (EKRS).**

The Company makes an estimate of the risk of claims to be paid in the future based on consideration of current conditions and future. Estimated own retention claims are estimated to be borne by the company claims, previously calculated based on the decision of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 424/KMK/06/2003 September 30, 2003. Starting in 2013 calculated by the Chairman of Bapepam Regulation No. PER-09/BL/2012 dated December 27, 2012 on Guidelines for the Establishment of the Technical Reserves of Insurance and Reinsurance Company is as follows:

- 1) Technical reserves in the form of least claims reserve is calculated by the sum of:
  - a) the estimated value of the claims that are still in the process of completion,
  - b) the estimated value of claims incurred but not reported (IBNR).



- 2) Nilai klaim untuk produk asuransi dan atau produk reasuransi yang masih dalam proses penyelesaian paling sedikit dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, biaya penyelesaian hukum dan biaya-biaya lain yang terkait dengan penyelesaian klaim.
- 3) Nilai klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported*) dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga (*triangle method*), berikut biaya jasa penilai kerugian reasuransi.
- 4) Dalam hal cadangan klaim dalam proses belum bisa diestimasi, jumlah yang dicadangkan adalah prosentase rata-rata klaim yang dibayar terhadap uang pertanggungan untuk lini usaha yang sama pada tahun buku terakhir dikalikan dengan uang pertanggungan dari klaim tersebut.

- ii. Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (PYBMP).  
Premi yang belum merupakan pendapatan atau cadangan premi reasuransi adalah pendapatan premi yang ditangguhkan. Untuk reasuransi umum dan jiwa, dihitung dari jumlah pendapatan premi neto (premi bruto dikurangi premi retrosesi dan komisi) dikalikan 40% mengacu pada ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK/06/2003 tanggal 30 September 2003. Untuk reasuransi syariah menggunakan prorata harian berdasarkan PMK No. 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011.

Mulai tahun 2013 dalam perhitungan cadangan premi yang belum merupakan pendapatan, berlaku Peraturan Ketua Bapepam Nomor: PER-09/BL/2012, tanggal 27 Desember 2012, tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berlaku per 1 Januari 2013. Hal hal yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain:

- a. Untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada saat ulang tahun polis, Perusahaan harus menghitung CAPYBMP dan CARYBD.
- b. Cadangan yang dibentuk untuk produk tersebut adalah jumlah cadangan yang lebih besar antara hasil perhitungan CAPYBMP dan CARYBD

Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (CAPYBMP)

- a. CAPYBMP dihitung berdasarkan proporsi premi bruto secara harian untuk masa asuransi yang belum dijalani.
- b. Premi bruto sebagaimana dimaksud di atas adalah premi bruto setelah dikurangi komisi langsung.
- c. Komisi langsung yang diperhitungkan dalam pembentukan CAPYBMP adalah komisi aktual yang dibayarkan perusahaan
- d. Komisi langsung yang diperhitungkan dalam pembentukan CAPYBMP paling tinggi sebesar 20% dari premi bruto.

Cadangan Atas Risiko Yang Belum Dijalani (CARYBD)

- a. CARYBD dihitung untuk tiap lini usaha atau produk yang memiliki karakteristik risiko yang sejenis termasuk risiko bencana (*catastrophic risk*) berdasarkan rata-rata rasio klaim selama 3 (tiga) tahun terakhir dikalikan dengan CAPYBMP.

- 2) *Value of claims for insurance or reinsurance products which are still in the process of completion is estimated at least on the basis of central estimate or best estimate for claims that have occurred and have been reported but are still in the process of completion, together with insurance loss appraisal costs, legal settlement costs and other costs associated with the settlement of claims.*
- 3) *Value of claims incurred but not reported is estimated as the central or best estimate for claims incurred but not reported claims using the ratio method or one of the triangle methods, together with costs of assessor loss reinsurance assessor.*
- 4) *In the case of claims reserves in the process can not be estimated, the amount reserved is the average percentage of claims paid to the sum insured for the same line of business in the last financial year multiplied by the sum of the claim.*

- ii. *Unearned premiums*

*Unearned premiums or reserve for reinsurance premiums represent deferred premium revenues. For general and life reinsurances, they are calculated on the basis of total net premium revenues (gross premiums deducted by retrocession premium and commission) multiplied by 40% in accordance with the stipulations in the decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 424/KMK.06/2003 dated 30 September 2003. For syariah reinsurance, daily prorated according to 11/PMK.010/2011 PMK dated January 12, 2011 is used.*

*Starting in 2013 in the calculation of unearned premium reserves, the regulations of Bapepam Number: PER-09/BL/2012, dated December 27, 2012, on Guidelines for Technical Allowance for Insurance and Reinsurance Companies effective as of January 1, 2013, is applicable. Matters governed by these regulations are as the followings:*

- a. *For products with a maturity of up to one (1) year or of more than 1 (one) year terms which their policy conditions and terms are renewable at the next year of the policy, the Company shall calculate CARYBD and CAPYBMP.*
- b. *Reserves are established for these products is the greatest amount of reserves between the calculation results of CARYBD and CAPYBMP*

*The reserves of Unearned Premiums (CAPYBMP)*

- a. *CAPYBMP is calculated on the basis of the proportion of gross premiums on a daily basis for the uncovered period of insurance.*
- b. *Gross premium referred to above is a gross premium net of direct commissions.*
- c. *Direct commission taken into account in the formation of CAPYBMP is the actual commission paid by the Company*
- d. *Direct commission taken into account in the formation of CAPYBMP is 20% maximum of gross premium.*

*Reserve for Uncovered Risk Period (CARYBD)*

- a. *CARYBD is calculated for each line of business or products that have similar risk characteristics including disaster risk (catastrophic risk) based on the average claims ratio for three years multiplied by CAPYBMP*

- b. Rasio klaim dihitung berdasarkan dari klaim dibayar selama periode 1 (satu) tahun dibagi pendapatan premi selama periode 1 (satu) tahun untuk tahun yang sama.
- c. Rata-rata rasio klaim merupakan hasil penjumlahan rasio klaim selama 3 (tiga) tahun dibagi 3 (tiga).
- d. Pendapatan premi adalah pendapatan premi selama 1 (satu) tahun terakhir ditambah penurunan CAPYBMP atau dikurangi kenaikan CAPYBMP selama 1 (satu) tahun terakhir.
- e. Nilai CAPYBMP untuk tiap polis tidak boleh kurang dari nol.
- f. Dalam hal keseluruhan CAPYBMP atau CARYBD yang dibentuk lebih kecil dari nilai pengembalian premi yang dijanjikan, perusahaan harus menambah nilai cadangan yang dilaporkan menjadi paling sedikit sebesar nilai keseluruhan pengembalian premi yang dijanjikan.

iii. Aset Retrosesi

- a. Dalam hal perusahaan melakukan pertanggungan ulang atas risiko yang ditanggung, nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang yang dibentuk Perusahaan dihitung secara konsisten dengan pembentukan cadangan teknis sebagaimana yang diatur.
- b. Nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang yang dibentuk Perusahaan disajikan sebagai aset yang merupakan bagian dari tagihan retrosesi dan termasuk dalam aset yang diperkenankan dalam perhitungan tingkat kesehatan keuangan.

iv. Tes Kecukupan Liabilitas

Perusahaan menilai setiap akhir periode pelaporan apakah liabilitas reasuransi yang diakui telah mencukupi dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan berdasarkan kontrak reasuransi. Jika penilaian tersebut menunjukkan bahwa nilai tercatat liabilitas reasuransi (dikurangi dengan biaya akuisisi tanggungan terkait aset takberwujud terkait) tidak mencukupi dibandingkan dengan estimasi arus kas masa depan maka seluruh kekurangan tersebut diakui dalam

Untuk melaksanakan tes kecukupan liabilitas (Liability Adequacy Test) tersebut pada akhir periode perusahaan menunjuk Aktuaris Independen untuk melaksanakan perhitungan cadangan teknis

Perubahan kebijakan akuntansi atas perhitungan cadangan teknis tersebut di atas perusahaan tidak melakukan penyajian kembali secara retrospektif, dengan pertimbangan kepraktisan sebagaimana diatur dalam PSAK 25 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Kesalahan paragraf 05.

v. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan membuat penyisihan piutang ragu-ragu setiap akhir tahun buku berdasarkan analisa atas ketertagihan piutang dan pinjaman yang diberikan. Penyisihan dibentuk terhadap pinjaman yang diberikan dan piutang apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa saldo tersebut tidak akan tertagih. Identifikasi pinjaman yang diberikan dan piutang tidak tertagih memerlukan pertimbangan dan estimasi. Apabila ekspektasi berbeda dari estimasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak terhadap nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang serta biaya piutang tak tertagih pada periode mana perubahan estimasi tersebut terjadi. Pertimbangan dan estimasi tersebut menjadi dasar dalam menghitung penyisihan penurunan nilai piutang dari kemungkinan tidak tertagihnya dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- b. *Claims ratio is calculated based on claims paid during the period of one year divided by premium income over a period of one year for the same year.*
- c. *Average claim ratio is the sum of the claim ratio for 3 (three) years divided by 3 (three).*
- d. *Premium income is the premium income for one year plus decrease or minus increase in CAPYBMP within the last one year.*
- e. *CSAPYBMP value for each policy should not be less than zero.*
- f. *In case of overall CAPYBMP or CARYBD established is less than the value of the promised return of premium, the Company has to add the value of the reserves reported to be at least the same amount as the overall value of the promised return of premium.*

iii. Retrocession Assets

- a. *In the case the Company reschedules the risks covered, the estimated value of the claim recovery for the insured portion established by the Company is calculated consistent with the formation of technical reserves as stipulated.*
- b. *Estimated value of the claim recovery value of the reinsured portion established by the Company is presented as an asset as a part of the retrocession receivable and included in the assets allowed in the calculation of the level of financial health.*

iv. Liability Adequacy Test

*The Company assesses in each reporting date whether the recognized reinsurance liability is sufficient by using current estimates of future cash flows under the reinsurance contracts. If that assessment shows that the carrying amount of the reinsurance liabilities (net of deferred acquisition costs related to intangible assets associated) is insufficient compared to the estimated future cash flows then the entire deficiency is recognized in profit or loss.*

*To carry out the liability adequacy test at the end of the period, the Company appointed an Independent Actuary to calculate the technical reserves.*

*For change in accounting policy for the calculation of technical reserves, the Company do not restate the item retrospectively for practical considerations as set out in PSAK 25 on Changes in Accounting Policies, Changes in Estimates and Errors paragraph 05.*

v. Allowance for Doubtful Accounts

*The Company makes allowance for doubtful accounts at each of financial year end based on an analysis of the collectability of receivables and loans. Allowance established for loans and receivables whenever events or changes in circumstances indicate that the balances will not be collectible. Identification of loans and receivables uncollected requires judgment and estimates. When the expectation is different from the initial estimate, then this difference will impact the carrying value of loans and receivables and uncollectible accounts expense in the period where the change in estimate occurs. Judgments and estimates are the basis for calculating the allowance for impairment of receivables may not tertagihnya using the effective interest method.*



- vi. Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap  
Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perusahaan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan diatas.  
Perubahan masa manfaat aset tetap dan properti investasi dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat

- vii. Penurunan Nilai Aset  
Pengujian atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.  
Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

#### d. Investasi dan Hasil Investasi

##### Deposito

Investasi dalam deposito disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan nilai nominal

##### Obligasi

Investasi dalam surat berharga obligasi korporat dan obligasi pemerintah disajikan berdasarkan nilai pasar dengan kategori surat berharga yang tersedia untuk dijual. Selisih antara nilai pasar dan harga perolehan yang belum direalisasikan akibat kenaikan (penurunan) harga pasar disajikan sebagai komponen ekuitas.

##### Saham, Obligasi Yang Diperdagangkan

Investasi dalam saham atau obligasi yang diperdagangkan disajikan sebesar nilai wajar. Laba atau rugi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya dilaporkan dalam laporan laba rugi periode

##### Reksadana

Investasi dalam unit penyertaan reksadana penawaran umum dan reksadana penyertaan terbatas (RDPT) disajikan sebesar nilai wajar, yang merupakan nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal laporan. Selisih laba rugi yang timbul dari perbedaan biaya perolehan dengan nilai wajarnya dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam LK, Nomor : KEP-367/BL/2012, tanggal 9 Juli 2012, tentang Nilai Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksadana, yang berlaku sejak 1 Januari 2013, antara lain ditetapkan:

- Ketentuan mengenai Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam portofolio Reksa Dana diatur dalam Peraturan Nomor: IV.C.2, sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan ini.
- Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dalam portofolio Reksadana sesuai dengan peraturan Nomor: IV.C.2 lampiran Keputusan ini sejak tanggal 1 Januari 2013.

#### vi. Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The useful life of each asset in the Company is determined based on the expected utility of the asset. These estimates are determined based on internal technical evaluation and experience of the Company for similar assets. The useful life of each asset is reviewed periodically and adjusted if forecasts differ from previous estimates due to wear and tear, technical and commercial obsolescence, legal or other limitations on the use of the asset. However there is a possibility that the results of future operations can be significantly affected by changes in the amount and period of record of costs resulting from changes in above mentioned factors.

Changes in useful lives of fixed assets and investment properties can affect the amount of depreciation expense recognized and the carrying value of fixed assets.

#### vii. Impairment of Assets

Testing for impairment is done when there is indication of impairment. Determination of asset value in use requires the estimation of the expected cash flows to be generated from the use of the asset (cash-generating unit) and the sale of assets and the appropriate discount rate to determine the present value.

Although the assumptions used in estimating the value in use of assets are reflected in the financial statements are deemed appropriate and reasonable, but significant changes in the above assumptions will have a material effect on the determination of the amount that can be recovered and consequently an impairment loss will have an impact on results of operations.

#### d. Investments and Investment Income

##### Deposits

Investment in deposits is presented in the financial statements at its fair value.

##### Bonds

Investments in marketable securities such as corporate bonds and government bonds are presented at market price and classified as marketable securities available for sale. Unrealized gain or loss due to increase or decrease in market value is presented in equity.

##### Stocks or Bonds for trading.

Investment in shares or bonds for trading are presented at fair value. Unrealized gain or loss due to increase or decrease in fair value, are recognized in the current statement of income

##### Mutual Funds

Investments in public offering mutual funds and limited investments mutual funds (RDPT) are presented at fair value, which represent value of net assets of the mutual funds at the reporting date. The resulting gains or losses due to difference of acquisition cost and fair value, are reported in the current statement of income.

In reference to the decree of the Head of Bapepam/LK No.: KEP-367/BL/2012, dated 9 July 2012 on fair value of securities in mutual fund portfolio, effective 1 January 2013, which reads:

- The basis for fair market value of securities in mutual fund portfolio is the provision No.: IV.C.2, attached hereto.
- The investment manager of the mutual fund is required to estimate market fair value of securities in the mutual fund portfolio as specified in the provision No.: IV.C.2 attached hereto effective 1 January 2013.

Perusahaan telah menerapkan ketentuan tersebut di atas untuk pengukuran nilai wajar portofolio reksadana sejak 31 Desember 2012.

**Penyertaan Saham**

Investasi dalam bentuk penyertaan saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya).

**Hasil Investasi**

Hasil investasi dari bunga deposito dan obligasi diakui atas dasar proporsi waktu dan tingkat bunga yang berlaku. Penghasilan dividen diakui pada saat surat pemberitahuan pembagian dividen diterima. Keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing yang berkaitan dengan investasi dicatat sebagai bagian dari hasil investasi.

**e. Piutang / Utang Reasuransi dan Retrosesi**

Piutang reasuransi adalah saldo piutang premi kepada ceding company/broker yang telah dikompensasi dengan komisi dan komisi keuntungan reasuransi, setelah dikurangi dengan jumlah penyisihan penurunan nilai piutang yang tidak tertagih sampai dengan tahun buku berakhir. Piutang untuk reasuransi umum dibentuk cadangan penyisihannya dengan metode amortisasi dengan mempertimbangkan tingkat kolektibilitasnya, atau ceding company telah tidak beroperasi lagi.

Utang reasuransi adalah utang klaim yaitu jumlah kerugian pasti yang telah disetujui secara teknis tetapi belum dibayar sampai dengan tahun buku berakhir.

Piutang retrosesi umum/jiwa adalah saldo tagihan klaim retrosesi kepada retrosesioneer yang sampai dengan tahun buku berakhir belum diterima.

Piutang retrosesi umum/jiwa dibentuk cadangan penyisihannya setelah umur piutang mencapai 5 (lima) tahun atau retrosesioneer (reinsurers) telah bangkrut/likuidasi

Utang retrosesi adalah saldo utang premi retrosesi kepada retrosesioneer yang telah dikompensasi dengan komisi retrosesi dan komisi keuntungan sampai dengan tahun buku berakhir.

**f. Aset Tetap**

Perusahaan menggunakan model biaya (cost) untuk menentukan nilai aset tetap, sehingga aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight line method), sesuai dengan taksiran masa manfaat yang penetapannya berdasarkan tarif sebagai berikut:

	Masa Manfaat Useful Life (year)	Persentase Percentage	
Bangunan Kantor	20	5.00%	Office building
Renovasi Ruang Kantor	5	20.00%	Office renovation
Kendaraan	5	20.00%	Motor vehicles
Peralatan Komputer	5	20.00%	Computer hardware
Peralatan Non Komputer	5	20.00%	Non-computer equipment
Perabot Kantor	5	20.00%	Office furniture & fixtures

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi, dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan.

*For measuring the fair value of mutual funds since 31 December 2012, the Company has adopted those provisions*

**Investments in Stocks**

*Investments in stock of ownership interest of less than 20% that do not have readily determinable fair values and are intended for long term investments are recognized at acquisition cost (cost method).*

**Investment Income**

*Investment income from deposit and bond interests is recognized based on proportionate time and prevailing interest rate. Dividend income is recognized at the time the dividends are declared. The resulting gains or losses in foreign currency related to the investment are recognized as part of investment income*

**e. Reinsurance and Retrocession Receivables/Payables**

*Reinsurance receivables are balance of premium receivables from ceding companies/brokers, deducted with reinsurance commissions and profit commissions, net of allowance for doubtful accounts at the balance sheet date. Allowance for doubtful receivables for general reinsurance is provided taken into account their rates of collectability, or the ceding company is out of operation.*

*Reinsurance payables represent total fixed losses, which have been approved technically, but have not been paid at the balance sheet date.*

*General or life retrocession receivables represent the balance of retrocession claims receivables from retrocessioners, yet to be received at the balance sheet date.*

*Allowance for doubtful account of general and life retrocession receivables is provided after receivable maturity has reached five (5) years or retrocessioners (reinsurers) are out of operations due to bankruptcy or liquidation.*

*Retrocession payables represent retrocession premium payables to retrocessioners compensated with retrocession commissions and profit commissions at the balance sheet date.*

**f. Fixed Assets**

*The Company uses cost model to determine fixed asset value, therefore fixed assets are recognized at acquisition cost net of accumulated depreciation. Depreciation of fixed assets is calculated using straight-line method, over their useful lives at the following rates:*

*Cost of maintenance and repairs are recognized as expense as incurred. Expenditures which extend the useful life of the asset or result in increased future economic benefits such as increased in capacity and improvement in the quality, are capitalized and depreciated in accordance with the respective depreciation rate.*

Apabila aset tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi.

Perusahaan juga menetapkan pengeluaran lebih dari Rp 2.500.000 dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dikapitalisasi.

**g. Pendapatan dan Beban Underwriting**

Pendapatan premi reasuransi *treaty* dan *facultative* dicatat berdasarkan bordero premi/nota premi/*Statement of Account* reasuransi *treaty* dan slip premi reasuransi *facultative* yang disetujui, sedangkan beban premi retrocesi *treaty* dan *facultative* dicatat berdasarkan *technical statement of account retrocesi treaty* dan slip premi retrocesi *facultative*.

Pendapatan komisi retrocesi dan beban komisi reasuransi dicatat bersamaan dengan pencatatan premi yang bersangkutan.

Klaim reasuransi *treaty* dan *facultative* dicatat berdasarkan bordero klaim/nota klaim/*Definite Loss Advice (DLA)*, *Statement of Account* reasuransi *treaty* dan *DLA* reasuransi *facultative* yang disetujui, sedangkan pendapatan klaim retrocesi *treaty* dan *facultative* dicatat berdasarkan *Definite Loss Advice/Statement of Account retrocesi treaty* dan *DLA retrocesi facultative*.

**h. Taksiran Pajak Penghasilan**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Sesuai dengan PSAK No. 46 (Revisi 2011) tentang "Pajak Penghasilan" ditetapkan:

- i. Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode;
- ii. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode;
- iii. Laba kena Pajak atau laba fiscal (rugi pajak atau rugi fiscal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan);
- iv. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya:
  - 1) Perbedaan temporer dapat dikurangkan;
  - 2) Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
  - 3) Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal
- v. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba-rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari:

*When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in income statement.*

*The Company also determines that expenditure of more than Rp 2,500,000 with useful life of more than one (1) year is capitalized.*

**g. Underwriting revenues and expenses**

*Treaty and facultative reinsurance premium revenues are recorded at portfolio of premium/premium note/statement of account of treaty reinsurance and facultative reinsurance premium notes which have been approved, while treaty and facultative retrocession premium expenses are recorded in accordance with the statement of account of treaty retrocession and facultative retrocession premium notes.*

*Retrocession commission revenues and reinsurance commission expenses are recognized at the time the related premiums are recorded.*

*Treaty and facultative treaty reinsurance claims are recognized in accordance with bordereaux of claims/claim notes/Definite Loss Advice (DLA), Statement of Account of treaty reinsurance and DLA facultative reinsurance which have been approved, while treaty and facultative retrocession claim revenues are recorded in accordance with Definite Loss Advice/Statement of Account of treaty retrocession and DLA facultative retrocession.*

**h. Estimated Income Tax**

*Current tax expense is determined based on the taxable income for the related year computed using prevailing tax rates. The PSAK No.46 (Revised 2011) on "Accounting for Income Taxes" specifies:*

- i Tax expense (tax income) is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax.*
- ii Current tax is the amount of income taxes payable (recoverable) in respect of the taxable profit (tax loss) for a period*
- iii Taxable profit (tax loss) is the profit (loss) for a period, determined in accordance with the rules established by the taxation authorities, upon which income taxes are payable (recoverable).*
- iv Deferred tax assets are the amounts of income taxes recoverable in future periods arising from:*
  - 1) deductible temporary differences*
  - 2) the carryforward of unused tax losses; and*
  - 3) the carryforward of unused tax credits, when the tax law permits.*
- v Deferred tax liabilities are the amounts of income taxes payable in future periods in respect of taxable temporary differences*

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.*

*Deferred tax is measured at the tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the balance sheet date. Deferred tax is charged or credited in the statement of income, except when it relates to items charged or credited directly to equity. Current and deferred tax shall be recognised as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from:*



- i. Suatu transaksi atau kejadian yang diakui, pada periode yang sama atau berbeda, di luar laba rugi baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas; atau
- ii. Suatu kombinasi bisnis.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui di luar laba rugi jika pajak terkait dasar pos yang ada pada periode sama atau berbeda, diakui diluar laba rugi. Oleh karena itu, pada periode yang sama atau berbeda, pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan pos yang diakui:

- i Dalam pendapatan komprehensif lain, diakui dalam pendapatan komprehensif lain.
- ii Langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

Beban (penghasilan) Pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan tersendiri dalam laporan laba rugi komprehensif. Saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dapat dilakukan jika mempunyai hak yang dapat dipaksakan secara hukum. Dan bermaksud menyelesaikan dengan dasar neto.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan. Entitas mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Berdasarkan ketentuan paragraf 100 PSAK 46 revisi 2010 tentang pajak penghasilan dinyatakan bahwa: sesuai dengan peraturan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak dan semua beban terkait dengan penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut perusahaan menyajikan penghasilan yang telah dikenakan pajak final dalam laporan laba rugi sebagai unsur pengurang laba sebelum pajak.

**i. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing**

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah sebagai mata uang fungsional. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dan dijabarkan dalam mata uang rupiah sebagai mata uang penyajian dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi (kurs spot). Pada tanggal neraca, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut (kurs penutup). Keuntungan atau kerugian yang timbul dibukukan atau diakui dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Jenis Mata Uang	2014 Rp	2013 Rp	2012 Rp	Currency
1 Dollar Amerika Serikat/ United States Dollar 1	12,440.00	12,189.00	9,670.00	United States Dollar 1
1 Poundsterling Inggris/ Poundsterling 1	19,370.34	20,096.63	15,578.86	Poundsterling 1
1 Euro/ Euro 1	15,133.27	16,821.44	12,809.86	Euro 1
1 Yen Jepang/ Japanese Yen 1	104.25	116.17	111.97	Japanese Yen 1
1 Dollar Singapura/ Singapore Dollar 1	9,422.11	9,627.99	7,907.12	Singapore Dollar 1
1 Dollar Hongkong/ Hongkong Dollar 1	1,603.68	1,571.92	1,247.48	Hongkong Dollar 1
1 Ringgit Malaysia/ Malaysian Ringgit 1	3,561.93	3,707.69	3,159.63	Malaysian Ringgit 1

**j. Transaksi Dengan Pihak Yang Berelasi**

Yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai "entitas pelapor").

- i a transaction or event which is recognised, in the same or a different period, outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity, or
- ii a business combination

Current tax and deferred tax shall be recognised outside profit or loss if the tax relates to items that are recognised, in the same or a different period, outside profit or loss. Therefore, in the same or a different period, current tax and deferred tax that relates to items that are recognised:

- i in other comprehensive income, shall be recognised in other comprehensive income;
- ii directly in equity, shall be recognised directly in equity.

The tax expense (income) related to profit or loss from ordinary activities shall be specifically presented in the statement of comprehensive income. Offsetting deferred tax assets and deferred tax can be done if the entity has a legally enforceable right to set off. And to settle them on net basis.

The carrying amount of deferred tax asset is assess at end of reporting period. The carrying amount shall be written down when the taxable profit is not sufficient for compensating part or the entire deferred tax asset. The write-down of the tax asset is reversed when taxable profit is sufficient for compensation.

Under the provisions of paragraph 46 of PSAK 100, revised in 2010, on income tax, it is stated that: in accordance with the tax laws, the income already subjected to final tax is no longer reported as taxable income and all expenses relating to income already subjected to final tax are not deductible. In connection with the provisions the Company presented income already subjected to final tax on the income statement as deduction component of income before tax.

**i. Foreign Currencies Transactions and Balances**

The Company's accounting is maintained in Indonesian Rupiah (Rp) as the functional denomination. Transactions involving foreign currencies during the year are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made (spot rate). At balance sheet date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are converted into Rupiah to reflect the rates of exchanges prevailing at that date (the closing rate). The resulting gains or losses are recognized in the statement of income of the current year.

**j. Transactions With Related Parties**

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (in this Standard referred to as the 'reporting entity').



- (a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
- 1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - 2) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - 3) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- 1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
  - 2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - 3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - 4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - 5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
  - 6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
  - 7) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). PSAK 7 revisi 2010 par 9.

**k. Pensiun dan Penyisihan Imbalan Pasca Kerja**

Perusahaan mempunyai program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan yang memenuhi kriteria yang ditentukan Perusahaan. Iuran dana pensiun 100% ditanggung oleh Perusahaan melalui DPLK Manulife dengan Manulife Program Pensiun (MPP). Perusahaan mengakui penyisihan untuk imbalan pasca kerja karyawan sesuai dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan kompensasi penggantian dengan menghitung secara aktuarial berdasarkan metode projected unit credit, setelah memperhitungkan nilai wajar aset pendanaan ke dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) PT Manulife. Selain itu, Perusahaan memberikan manfaat tambahan kepada karyawan berupa tunjangan hari tua melalui PT Asuransi Jiwasraya dengan perhitungan pada saat pensiun 60 x gaji dasar pegawai dengan premi ditanggung Perusahaan sebesar 70%.

Berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2010) tentang "Imbalan Kerja" yang berlaku efektif per 1 Januari 2012, perusahaan menerapkan pendekatan "koridor" dalam mengakui porsi keuntungan dan kerugian aktuarialnya sebagai penghasilan atau beban; yaitu jika akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhri periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara kedua jumlah berikut:

- i 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut (sebelum dikurangi aset program); dan
- ii 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut.  
Kelebihannya dibagi dengan rata-rata sisa masa kerja ekspektasian dari para pekerja dalam program tersebut. Hasil pembagiannya ditetapkan sebagai keuntungan atau kerugian aktuarial yang menjadi beban/keuntungan tahun berjalan.

- i. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
  - 1) has control or joint control over the reporting entity;
  - 2) has significant influence over the reporting entity; or
  - 3) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- 2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
  - 1) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
  - 2) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
  - 3) Both entities are joint ventures of the same third party.
  - 4) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
  - 5) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
  - 6) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
  - 7) A person identified in (1) (a.) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

**k. Pension and Allowance for Post Employment Benefit**

The Company provides defined benefit pension program for all of its employees, who meet the criteria determined by the Company. Pension fund contribution at 100% is paid by the Company through DPLK Manulife with Pension Program Manulife (MPP). The Company recognizes allowance for post employment benefit in accordance with the Labor Law No. 13/2003, which stipulated severance payments, post service benefits and other compensation by calculating on actuary basis using projected unit credit method, after calculating fair value of assets funded to financial institution of pension fund (DPLK) PT Manulife. The Company also provides additional benefit to its employees such as old age allowance through PT Asuransi Jiwasraya, calculated at pension period of 60 x basic employees' salary. The Company pays 70% of the premium.

Based on the PSAK 24 (Revised 2010) on employee benefit, which effective on 1 January 2012, the Company has adopted the "corridor" approach to recognise a portion of its actuarial gains and losses as income or expense, that is when if the net cumulative unrecognised actuarial gains and losses at the end of the previous reporting period exceeded the greater of:

- i 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date (before deducted with plan assets); and
- ii 10% of the fair value of plan assets at that date.  
The excess is divided by the average expected remaining service period of the employees participated in the program. The allotment is determined as actuarial gain or loss and recognized as profit and loss.

**I. Kebijakan Akuntansi Syariah**

**i. Waad surplus, Dana tabarru, dan Dana tabungan**

Bagi hasil dana peserta adalah distribusi dana peserta kepada pengelola baik hasil investasi maupun dari hasil pengelolaan (surplus underwriting), sesuai akad yang digunakan. Dasar pengaturan bagi hasil dana peserta adalah distribusi dana peserta pada asuransi syariah mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- PSAK Nomor 108, tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21, 50 dan 51.

**1) Pengakuan dan Pengukuran**

- a) Bagi hasil dana peserta diakui pada saat akhir periode laporan.
- b) Bagi hasil dana peserta diukur berdasarkan total hasil investasi dan hasil pengelolaan (surplus underwriting) dana tabarru dengan nisbah yang ditetapkan oleh pengelola.

**2) Penyajian**

Bagi hasil investasi dana peserta disajikan dalam laporan pendapatan dan beban dana peserta dengan judul bagi hasil ke Perusahaan. Di dalam neraca, bagi hasil dana peserta disajikan dalam item utang dengan judul utang bagi hasil.

**3) Pengungkapan**

Hal yang diungkapkan terkait dengan bagi hasil dana peserta adalah pembagian dari hasil investasi dana tabarru dan hasil pengelolaan dana tabarru, begitu juga dengan metode akad investasi yang digunakan.

Dasar perhitungan:

$$\text{Waad} = \frac{\text{Tabarru per cedant}}{\text{Total Dana Tabarru}} \times (\text{Surplus underwriting} \times \% \text{ Waad}) + \frac{\text{Hasil Investasi Tabarru}}{\text{Cedant} \times \% \text{ Waad}}$$

*(Total Tabarru Fund)*

**ii. Zakat**

Zakat menurut istilah syara adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga dan hukumnya Berdasarkan hasil rapat Dewan Pengawas Syariah PT Reasuransi Nasional Indonesia tanggal 8 Desember 2006 dan tanggal 22 Desember 2006 Dewan Pengawas Syariah memutuskan bahwa untuk menghitung zakat Perusahaan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Keuntungan Sebelum Pajak} \times 2,5\%$$

**I. Syariah Accounting Policies**

**i. Waad surplus tabarru funds and saving funds**

Profit sharing of participants' funds represents participants' fund distribution to the manager either investment income from tabarru fund or management income (surplus underwriting), in accordance with agreements used. The basis for arrangement of profit sharing of participants' funds is the following regulations:

- PSAK 108, on accounting for Syariah Insurance Transactions
- Official religious advices (Fatwa) of Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21, 50 and 51.

**1) Recognition and Measurement**

- a) Profit sharing of participants' funds are recognized at the end of the reporting period.
- b) Profit sharing of participants' funds are measured based on total investment income and management income (surplus underwriting) of tabarru funds with nisbah determined by the management of sharia.

**2) Presentation**

Profit sharing of participants' fund investments is presented in the statement of revenues and expenses of participants' funds under title of profit sharing to the Company. In the balance sheet, profit sharing of participants' funds is presented as payable account under title of profit sharing payable.

**3) Disclosure**

Matters disclosed in relation to profit sharing of participants' funds are distribution of investment income from tabarru funds and management income from tabarru funds, as well as investment agreement (akad) method used.

:Basis of calculation

**ii. Zakat**

Zakat according to syara (the Moslem law) means expending an amount of certain possession given to people, who are entitled to accept under terms determined by syara. Zakat represents one of the third Moslem pillars of faith, which is compulsory.

Based on the decision of the meetings of Syariah Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah) of PT Reasuransi Nasional Indonesia on 8 December 2006 and 22 December 2006, it was decided that for calculating Zakat, the Company may use the following formula:

$$\text{Profit Before Tax} \times 2.5\%$$

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
 31 DESEMBER 2014 DAN 2013  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEARS ENDED  
 DECEMBER 31, 2014 AND 2013  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31-Des-14	31-Des-13	
<b>3 Kas dan Setara Kas</b>	<b>2,460,031,933</b>	<b>3,749,156,911</b>	<b>3. Cash and Cash Equivalents</b>
Akun ini terdiri dari :			<i>This account consists of :</i>
<b>Kas</b>			<b>Cash on Hand:</b>
Kas Konvensional	146,813,032	82,923,891	<i>Conventional</i>
Kas Syariah	10,003,384	15,977,833	<i>Syariah</i>
<b>Jumlah Kas</b>	<b>156,816,416</b>	<b>98,901,724</b>	<b>Total Cash</b>
Bank			<i>In Banks</i>
Bank Konvensional			<i>Conventional (in Rupiah)</i>
Pihak Relasi			<i>With Related Parties</i>
PT Bank Mandiri Tbk Cab. W. Metropolitan	539,571,650	766,034,626	<i>PT Bank Mandiri Tbk Cab. W. Metropolitan</i>
PT Bank Mandiri Tbk Cab. Cikini	468,340,197	220,664,508	<i>PT Bank Mandiri Tbk Cab. Cikini</i>
PT Bank BPD Bengkulu	19,990,464	-	
	<b>1,027,902,311</b>	<b>986,699,134</b>	
Bank Konvensional (dalam Valuta Asing)			<i>Conventional (in Foreign Currency)</i>
Pihak Berelasi			<i>With Related Parties</i>
PT Bank Mandiri Tbk Cab. W. Metropolitan (2014): USD 9,166.05; (2013): USD 176,702.19	113,403,662	2,153,822,994	<i>PT Bank Mandiri Tbk Cab. W. Metropolitan (2014): USD 9,166.05; (2013): USD 176,702.19</i>
PT Bank Mandiri Tbk Cab. Cikini (2014): USD 50,448.58	627,580,335	-	
<b>Jumlah Konvensional</b>	<b>1,768,886,308</b>	<b>3,140,522,128</b>	<b>Total conventional</b>
Bank Syariah (dalam Rupiah)	1,915,699,340	-	<i>Syariah Banks (in Rupiah)</i>
Pihak Berelasi			<i>With Related Parties</i>
PT Bank Mandiri Syariah Tabarru Cab. Thamrin	127,022,592	101,040,066	<i>PT Bank Mandiri Syariah Tabarru Cab. Thamrin</i>
PT Bank Mandiri Syariah Ujroh Cab. Thamrin	174,230,406	164,930,812	<i>PT Bank Mandiri Syariah Ujroh Cab. Thamrin</i>
<b>Jumlah</b>	<b>301,252,998</b>	<b>265,970,878</b>	<b>Total</b>
Bank Syariah (dalam Valuta Asing)			<i>Syariah Banks (in Foreign Currency)</i>
Pihak Berelasi			<i>With Related Parties</i>
PT Bank Mandiri Syariah Tabarru Cab. Thamrin (2014): USD 10,016.56 ; (2013): USD 9.998.77	124,606,130	121,874,983	<i>PT Bank Mandiri Syariah Tabarru Cab. Thamrin (2014): USD 10,016.56 ; (2013): USD 9,998.77;</i>
PT Bank Mandiri Syariah Ujroh Cab. Thamrin (2014): USD 8,719.45 Cab. Thamrin (2013): USD 9,999.77;	108,470,082	121,887,197	<i>PT Bank Mandiri Syariah Ujroh Cab. Thamrin (2014): USD 10,016.56 ; (2013): USD 39.037,26;</i>
	<b>233,076,212</b>	<b>243,762,180</b>	
<b>Jumlah Bank Syariah</b>	<b>534,329,210</b>	<b>509,733,058</b>	<b>Total in Syariah Banks</b>
<b>Jumlah Bank</b>	<b>2,303,215,518</b>	<b>3,650,255,186</b>	<b>Total in Syariah and Conventional Banks</b>
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>2,460,031,933</b>	<b>3,749,156,911</b>	<b>Total Cash and Cash Equivalents</b>

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
 31 DESEMBER 2014 DAN 2013  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEARS ENDED  
 DECEMBER 31, 2014 AND 2013  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31-Des-14	31-Des-13	
<b>4 Piutang Reasuransi</b>	<b>494,032,395,900</b>	<b>193,700,452,516</b>	<b>4. Reinsurance Receivables</b>
Piutang Reasuransi Konvensional			Conventional
Piutang Reasuransi Umum			Piutang Reasuransi Umum
Saldo Awal	85,694,703,129	22,873,101,821	Beginning balance
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	1,361,649,109,638	829,355,965,450	Receivable of the current year
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	1,447,343,812,767	852,229,067,271	Total
Penyelesaian Tahun Berjalan	1,054,866,826,167	763,090,093,886	Collection in current year
	392,476,986,600	89,138,973,384	Remaining balance
Cadangan Penyisihan Piutang	410,239,941	410,239,944	Allowance for bad debts
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	2,737,574,216	3,034,030,311	Allowance for impairment
Saldo per 31 Desember	389,329,172,443	85,694,703,129	Balance as at 31 December
Piutang Reasuransi Jiwa			Life Reinsurance Receivable
Saldo Awal	56,896,486,826	12,119,688,775	Beginning balance
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	188,353,048,573	168,228,972,473	Receivable of the current year
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	245,249,535,399	180,348,661,248	Total
Penyelesaian Tahun Berjalan	208,206,791,217	123,452,174,422	Collection in current year
	37,042,744,182	56,896,486,826	
Cadangan penyisihan piutang	-	-	Allowance for bad debts
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	Allowance for impairment
Saldo per 31 Desember	37,042,744,182	56,896,486,826	<b>Balance as at 31 December</b>
Jumlah Piutang Reasuransi Konvensional	426,371,916,625	142,591,189,955	<b>Balance of conventional reinsurance receivable</b>
Piutang Reasuransi Syariah			<b>Syariah reinsurance receivable</b>
Piutang Reasuransi Umum			<b>General reinsurance receivable</b>
Saldo Awal	17,556,496,729	19,269,542,329	Beginning balance
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	58,591,693,472	59,479,642,438	Receivable of the current year
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	76,148,190,201	78,749,184,767	Total
Penyelesaian Tahun Berjalan	54,704,123,142	61,192,688,038	Collection in current year
	21,444,067,059	17,556,496,729	
Cadangan Penyisihan Piutang	(661,334,081)	(365,626,300)	Allowance for bad debts
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	Allowance for impairment
Saldo per 31 Desember	20,782,732,978	17,190,870,429	<b>Balance as at 31 December</b>
Piutang Reasuransi Jiwa			<b>Life reinsurance receivable</b>
Saldo Awal	34,644,925,123	14,524,544,037	Beginning balance
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	71,241,161,547	80,320,119,926	Receivable of the current year
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	105,886,086,670	94,844,663,963	Total
Penyelesaian Tahun Berjalan	58,362,177,314	60,199,738,841	Collection in current year
	47,523,909,356	34,644,925,123	
Cadangan Penyisihan Piutang	(646,163,059)	(726,532,990)	Allowance for bad debts
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	Allowance for impairment
Saldo per 31 Desember	46,877,746,297	33,918,392,133	Balance as at 31 December
Jumlah Piutang Reasuransi Syariah	67,660,479,275	51,109,262,562	Balance of syariah reinsurance receivable
Jumlah Piutang Reasuransi	494,032,395,900	193,700,452,516	Total reinsurance receivable
	31-Des-14	31-Des-13	
Piutang Reasuransi berdasarkan hubungan transaksi:			Reinsurance Receivable Based on transaction with
Pihak hubungan istimewa - PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	161,903,742,033	21,632,627,806	Affiliation - PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
Pihak ketiga	332,128,653,867	172,067,824,710	Third parties
Jumlah Piutang Reasuransi	494,032,395,900	193,700,452,516	Total Reinsurance Receivable



PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
 31 DESEMBER 2014 DAN 2013  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEARS ENDED  
 DECEMBER 31, 2014 AND 2013  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31-Des-14	31-Des-13	
<b>5 Piutang Retrosesi</b>	<b>34,591,739,372</b>	<b>6,873,434,468</b>	<b>5. Retrocession Receivables</b>
Piutang Retrosesi Umum - Konvensional			<i>General Retrocession Receivable-Conventional</i>
Saldo Awal	6,289,046,384	3,065,193,597	<i>Beginning balance</i>
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	104,614,304,738	41,961,346,332	<i>Receivable of the current year</i>
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	110,903,351,122	45,026,539,929	<i>Total</i>
Penyelesaian Tahun Berjalan	35,354,242,984	7,219,722,185	<i>Collection in current year</i>
Cadangan Penyisihan Piutang	(930,675,801)	(930,675,801)	<i>Allowance for bad debts</i>
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(415,851,785)	-	<i>Allowance for impairment</i>
Saldo per 31 Desember	34,007,715,398	6,289,046,384	<b>Balance as at 31 December</b>
Piutang Retrosesi Jiwa - Konvensional			<b>Life Retrocession Receivable</b>
Saldo Awal	-	-	<i>Beginning balance</i>
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	-	-	<i>Receivable of the current year</i>
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	-	-	<i>Total</i>
Penyelesaian Tahun Berjalan	-	-	<i>Collection in current year</i>
Cadangan Penyisihan Piutang	-	-	<i>Allowance for bad debts</i>
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	<i>Allowance for impairment</i>
Saldo per 31 Desember	-	-	<b>Balance as at 31 December</b>
Jumlah Piutang Retrosesi Konvensional	34,007,715,398	6,289,046,384	<i>Balance Conventional Retrocession Receivable</i>
Piutang Retrosesi Umum - Syariah			<b>Syariah Retrocession Receivable</b>
Saldo Awal	596,705,929	274,575,017	<i>Beginning balance</i>
Piutang yang Timbul di Tahun Berjalan	4,992,564,699	5,253,499,523	<i>Receivable of the current year</i>
Jumlah Piutang yang Harus Ditagih	5,589,270,628	5,528,074,540	<i>Total</i>
Penyelesaian Tahun Berjalan	4,997,020,048	4,931,368,611	<i>Collection in current year</i>
Jumlah saldo piutang retrosesi umum - Syariah	592,250,580	596,705,929	<i>Allowance for bad debts</i>
Cadangan Penyisihan Piutang	(8,226,606)	(12,317,844)	<i>Allowance for impairment</i>
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	<b>Balance as at 31 December</b>
Saldo per 31 Desember	584,023,974	584,388,085	<b>Syari'a Life Retrocession Receivable</b>
Piutang Retrosesi Jiwa-Syariah	-	-	<b>Balance of Syari'a Retrocession Receivable</b>
Jumlah Piutang Retrosesi Jiwa + Umum - Syariah	584,023,974	584,388,085	<b>Total Retrocession Receivable</b>
Jumlah Piutang Retrosesi	34,591,739,372	6,873,434,468	
Piutang Retrosesi berdasarkan hubungan transaksi: Phak hubungan istimewa - PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	1,019,226,865	-	<i>Retrocession Receivable Based on transaction with Affiliation with - PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)</i>
Pihak ketiga	33,572,512,507	6,873,434,468	<i>Third Parties</i>
Jumlah Piutang Retrosesi	34,591,739,372	6,873,434,468	<i>Total Retrocession Receivable</i>
<b>6 Piutang Ujroh</b>	<b>8,895,604,636</b>	<b>10,330,689,238</b>	<b>6. Ujroh Receivable</b>

	31-Des-14	31-Des-13	
<b>7 Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan Bagian Retrosesi</b>	<b>81,327,573,012</b>	<b>26,516,561,808</b>	<b>7. Un-earned Premium Retrocession Share</b>

Kelas Bisnis	31-Dec-14	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	31-Dec-13	Classification of Business
Harta Benda	56,018,202,789	40,062,310,711	15,955,892,078	Goods and chattel
Kendaraan Bermotor	-	-	-	Motor vehicles
Pengangkutan	371,029,808	(37,276,006)	408,305,814	Transportation
Rangka Kapal	2,518,775,345	1,610,018,090	908,757,255	Ship hull
Rangka Pesawat	-	-	-	Fuselage
Satelit	-	-	-	Satellite
Energi	7,869,532,029	6,938,615,649	930,916,380	Energy
Rekayasa	5,782,365,686	2,677,699,657	3,104,666,029	Engineering
Tanggung Gugat	456,451,026	203,278,874	253,172,152	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	1,305,257,523	872,062,506	433,195,017	Personal injury and health
Kredit dan Surety Bond	2,601,790,944	558,179,710	2,043,611,234	Credit and surety bond
Aneka	4,008,239,270	1,973,389,985	2,034,849,285	Miscellaneous
Reasuransi Jiwa	395,928,592	(47,267,972)	443,196,564	Life reinsurance
Jumlah PYBMP Bagian Retrosesi	<u>81,327,573,012</u>	<u>54,811,011,204</u>	<u>26,516,561,808</u>	Total Estimated Own Claim Retention

Kelas Bisnis	31-Dec-13	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	31-Dec-12	Classification Of Business
Harta Benda	15,955,892,078	(982,534,306)	16,938,426,384	Goods and chattel
Kendaraan Bermotor	-	-	-	Motor vehicles
Pengangkutan	408,305,814	(344,738,888)	753,044,702	Transportation
Rangka Kapal	908,757,255	(35,352,770)	944,110,025	Ship hull
Rangka Pesawat	-	(589,348,309)	589,348,309	Fuselage
Satelit	-	-	-	Satellite
Energi	930,916,380	572,658,317	358,258,063	Energy
Rekayasa	3,104,666,029	470,825,773	2,633,840,256	Engineering
Tanggung Gugat	253,172,152	(54,104,257)	307,276,409	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	433,195,017	(448,574,138)	881,769,155	Personal injury and health
Kredit dan Surety Bond	2,043,611,234	1,096,940,288	946,670,946	Credit and surety bond
Aneka	2,034,849,285	132,555,051	1,902,294,234	Miscellaneous
Reasuransi Jiwa	443,196,564	387,316,088	55,880,476	Life reinsurance
Jumlah PYBMP Bagian Retrosesi	<u>26,516,561,808</u>	<u>205,642,848</u>	<u>26,310,918,959</u>	Total Estimated Own Claim Retention

8 Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	31-Dec-14		31-Dec-12		8. Estimated Claim Retrocession Share
	31-Dec-14	Kenaikan (penurunan) Increase (Decrease)	31-Dec-13	Classification Of Business	
Harta Benda	531,691,784,270	327,927,095,767	203,764,688,503	Goods and chattel	
Kendaraan Bermotor	-	-	-	Motor vehicles	
Pengangkutan	553,132,789	(4,376,388,655)	4,929,521,444	Transportation	
Rangka Kapal	29,906,495,987	10,292,938,174	19,613,557,813	Ship hull	
Rangka Pesawat	-	-	-	Fuselage	
Satelit	-	-	-	Satellite	
Energi	-	(80,972,374)	80,972,374	Energy	
Rekayasa	25,104,319,496	(1,953,234,071)	27,057,553,566	Engineering	
Tanggung Gugat	57,150	(1,450,601,991)	1,450,659,141	Liability	
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	701,264	(40,931,257)	41,632,521	Personal injury and health	
Kredit dan Surety Bond	1,875,924,803	924,803	1,875,000,000	Credit and surety bond	
Aneka	252,193,964	(20,500,957,142)	20,753,151,106	Miscellaneous	
Reasuransi Jiwa	143,874,533	23,073,363	120,801,170	Life reinsurance	
Jumlah Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	<u>589,528,484,255</u>	<u>309,840,946,617</u>	<u>279,687,537,638</u>	Total estimated claim retrocession component	

Kelas Bisnis	31-Dec-13		31-Dec-12		Classification Of Business
	31-Dec-13	Kenaikan (penurunan) Increase (Decrease)	31-Dec-12		
Harta Benda	203,764,688,503	134,836,103,063	68,928,585,440	Goods and chattel	
Kendaraan Bermotor	-	-	-	Motor vehicles	
Pengangkutan	4,929,521,444	822,181,077	4,107,340,366	Transportation	
Rangka Kapal	19,613,557,813	14,835,042,477	4,778,515,336	Ship hull	
Rangka Pesawat	-	-	-	Fuselage	
Satelit	-	-	-	Satellite	
Energi	80,972,374	80,972,374	-	Energy	
Rekayasa	27,057,553,566	26,611,000,316	446,553,250	Engineering	
Tanggung Gugat	1,450,659,141	1,450,659,141	-	Liability	
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	41,632,521	41,632,521	-	Personal injury and health	
Kredit dan Surety Bond	1,875,000,000	(9,822,047,944)	11,697,047,944	Credit and surety bond	
Aneka	20,753,151,106	2,643,261,837	18,109,889,269	Miscellaneous	
Reasuransi Jiwa	120,801,170	15,113,168	105,688,002	Life reinsurance	
Jumlah Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	<u>279,687,537,638</u>	<u>171,513,918,029</u>	<u>108,173,619,608</u>	Total estimated own claim retention	

Aset retrosesi adalah nilai hak kontraktual neto retrosesioner dalam perjanjian retrosesi. Jumlah tersebut menggambarkan bagian dari premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi klaim retensi sendiri yang menjadi hak kontraktual neto retrosesioner (lihat catatan 23 dan 24).

Retrocession asset is the net value of contractual right of reinsurer in a retrocession agreement. The amount represents a component of un-earned premium and estimated own claim retention which become the net value of contractual right of retrocessioner (See notes 23 and 24)

9 Biaya Dibayar Dimuka	31-Dec-14	31-Dec-13	9. Prepaid Expenses
	<u>82,971,000</u>	<u>24,230,210</u>	
10 Piutang Hasil Investasi	31-Dec-14	31-Dec-13	10. Investment Income Receivable
Terdiri dari :			
Bunga Obligasi	3,337,374,202	3,156,786,547	Bond interest
Bunga Deposito	2,254,501,624	1,223,931,474	Deposit interest
Bunga Deposito On Call	24,328,767	134,913,988	On call deposit interest
Jumlah Piutang Hasil Investasi	<u>5,616,204,594</u>	<u>4,515,632,009</u>	Total

Untuk piutang hasil investasi perusahaan tidak melakukan penyisihan atas kemungkinan tidak tertagihnya dan penurunan nilai piutang tersebut, mengingat piutang ini merupakan tagihan ke Bank pengelola obligasi dan deposito yang terjamin pembayarannya melalui transfer ke rekening entitas.

No allowance for bad debts and impairment is made for investment receivables since they are receivables from banks which manage securities and deposits and their payments are secured.

	31-Dec-14	31-Dec-13	
<b>11 Piutang Lain-lain</b>	<b>3,046,811,585</b>	<b>4,180,436,765</b>	<b>11. Other Receivables</b>
Piutang Pegawai	3,046,811,585	4,180,436,765	Loans to employees
Jumlah Piutang Lain-lain	<u>3,046,811,585</u>	<u>4,180,436,765</u>	<b>Total other receivables</b>
Piutang pegawai diberikan kepada pegawai untuk keperluan perumahan dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun dan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 19/KEP/DIR/VII/2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Pemberian Pinjaman Perumahan bagi pegawai PT Reasuransi Nasional Indonesia.			<i>Loans to employees are provided for housing facilities, given to those employees of minimum service period of one (1) year with credit maturity period of ten (10) years in accordance with the decree of the Company's director No. 19/KEP/DIR/VII/2002 dated 8 July 2002 regarding Housing Facility Loan for Employees of PT Reasuransi Nasional.</i>
Untuk piutang pegawai tidak dilakukan penyisihan atas kemungkinan tidak tertagihnya dan penurunan nilai piutang tersebut, mengingat piutang ini merupakan tagihan yang dijamin pembayarannya melalui pemotongan gaji pegawai.			<i>No allowance for uncollectible and impairment is made for receivable from employees, since the receivables are secured through deduction from the employees' salaries.</i>
<b>12 Dana Jaminan</b>	<b>47,000,000,000</b>	<b>47,000,000,000</b>	<b>12. Guarantee Funds</b>
Dana Jaminan Konvensional:			<b>Conventional</b>
PT Bank Jabar Cab. DKI	4,000,000,000	4,000,000,000	PT Bank Jabar Cab DKI
PT Bank BTN Cab. Ciputat	10,000,000,000	10,000,000,000	PT Bank BTN Cab Ciputat
PT Bank BNI Cab. Kemang Pratama	2,000,000,000	2,000,000,000	PT Bank BNI Cab Kemang Pratama
PT Bank BNI Cab. Boulevard Hijau	5,000,000,000	5,000,000,000	PT Bank BNI Cab Boulevard Hijau
PT Bank BTN Cab. Kembangan	-	5,000,000,000	PT Bank BTN Cab Kembangan
PT Bank Mandiri Cab. Cikini	5,000,000,000	-	PT Bank Mandiri Cabang Cikini
PT Bank BTN Cab. Kuningan	10,000,000,000	10,000,000,000	PT Bank BTN Cabang Kuningan
	<u>36,000,000,000</u>	<u>36,000,000,000</u>	
Dana Jaminan Syariah:			<b>Syari'a</b>
PT Bank Jabar Syariah Cab. Bekasi	4,000,000,000	4,000,000,000	PT Bank Jabar Syariah Cab Bekasi
PT Bank Mandiri Syariah Cab. Cikini	4,000,000,000	4,000,000,000	PT Bank Mandiri Syariah Cab Cikini
PT BRI Syariah Cab. Rawamangun	3,000,000,000	3,000,000,000	PT BRI Syariah Cab Rawamangun
	<u>11,000,000,000</u>	<u>11,000,000,000</u>	
Jumlah Dana Jaminan	<u>47,000,000,000</u>	<u>47,000,000,000</u>	<b>Total</b>

Tahun 2008, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 diubah menjadi sebagai berikut: perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus memiliki dana jaminan sekurang-kurangnya sebesar jumlah yang lebih besar antara 20% dari modal sendiri yang dipersyaratkan dan hasil penjumlahan 1% dari premi neto dengan 0,25% dari premi reasuransi. Dana jaminan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 47.000.000.000, sudah memenuhi ketentuan di atas.

*In 2008, in accordance with the regulation of the Minister of Finance No. 158/PMK.010/2008 on second amendment of the decree of the Finance Minister No. 424/KMK.06/2003 on financial healthiness of insurance companies and reinsurance companies, a number of provisions in the decree of the Minister of Finance No. 424/KMK.06/2003 was amended by the followings: Insurance and reinsurance companies should have guarantee funds of at least equal to larger than 20% of their required paid-in capital, and the result of 1% of net premiums earned plus 0.25% from reinsurance premium. The guarantee funds as of 31 December 2013 and 2012 of Rp 47.000.000.000, have exceeded the above requirement.*



**PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2014 DAN 2013**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2014 AND 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31-Des-2014	31-Des-2013	
<b>13 Deposito Biasa</b>	<b>1,145,671,475,791</b>	<b>631,911,585,445</b>	<b>13. Deposits</b>
Terdiri dari :			<i>Time deposits (in Rupiah)</i>
Deposito Berjangka Rupiah			<i>With related parties</i>
Pihak Berelasi (Bank Pemerintah):			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cab. Wisma Metropolitan	6,000,000,000	5,000,000,000	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cab. Wisma Metropolitan</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cab Rawamangun	-	7,000,000,000	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cab Rawamangun</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cab Cikini	26,600,000,000	8,700,000,000	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cab Cikini</i>
PT Bank Syariah Mandiri Cab Thamrin	4,069,383,398	9,136,371,355	<i>PT Bank Syariah Mandiri Cab Thamrin</i>
PT Bank Tabungan Negara Syariah Cab Harmoni	21,750,000,000	6,750,000,000	<i>PT Bank Tabungan Negara Syariah Cab Harmoni</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Boulevard Hijau	9,000,000,000	4,000,000,000	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Boulevard Hijau</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Kota Wisata	1,000,000,000	-	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Kemang Pratama</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Tangerang	13,500,000,000	4,500,000,000	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab Tangerang</i>
PT Bank Syariah Mandiri Cab Cikini	24,500,000,000	4,500,000,000	<i>PT Bank Syariah Mandiri Cab Cikini</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cab Abdul Muis	19,800,000,000	9,300,000,000	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cab Abdul Muis</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Bekasi	1,000,000,000	1,000,000,000	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Bekasi</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Tangerang	1,500,000,000	1,500,000,000	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Tangerang</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Cianjur	1,000,000,000	1,000,000,000	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Cianjur</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Jatinegara	30,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Jatinegara</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Gubeng Surabaya	2,000,000,000	2,000,000,000	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab. Gubeng Surabaya</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Cirebon	19,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Cirebon</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Suniarja Bandung	1,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Suniarja Bandung</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Citarum Bandung	1,500,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab Citarum Bandung</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Jelambar	49,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Jelambar</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Karawang	10,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Karawang</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Banda Aceh	5,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Banda Aceh</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Blankejeren	1,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Blankejeren</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kota Cane	1,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kota Cane</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kuala Simpang	2,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kuala Simpang</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Subusalam	1,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Subusalam</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Lhoksumawe	2,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Lhoksumawe</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sigli	1,500,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sigli</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Takengon	2,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Takengon</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Langsa	1,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Langsa</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Singkil	1,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Singkil</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sabang	1,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sabang</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Idi Rayeruk	1,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Idi Rayeruk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Bireueun	2,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Bireueun</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Blangpidie	1,500,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Blangpidie</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Lhoksukon	1,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Lhoksukon</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Meulaboh	1,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Meulaboh</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sukoharjo	3,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sukoharjo</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Banjarnegara	2,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Banjarnegara</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Wonogiri	4,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Wonogiri</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Majenang	4,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Majenang</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sudirman	2,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Sudirman</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Wonosobo	5,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Wonosobo</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Bantul	1,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Bantul</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Magelang	15,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Magelang</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Gombong	2,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Gombong</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Purwokerto	6,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Purwokerto</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Wates	1,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Wates</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Cilacap	2,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Cilacap</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Purbalingga	2,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Purbalingga</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Slamet Riyadi	4,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Slamet Riyadi</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Boyolali	2,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Boyolali</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Cik Ditiro	10,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Cik Ditiro</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Katamso	10,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Katamso</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kebumen	4,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kebumen</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Purworejo	1,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Purworejo</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Bitung	2,000,000,000	-	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Bitung</i>

**PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2014 DAN 2013**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2014 AND 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Tondano	2,000,000,000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Tondano
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Manado	5,000,000,000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Manado
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kotamubago	2,000,000,000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Kotamubago
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Tahuna	2,000,000,000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Tahuna
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Pinaesaan	2,000,000,000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cab Pinaesaan
Jumlah Deposito Pada Pihak Berelasi	362,219,383,398	64,386,371,355	
Pihak Tidak Berelasi:			<i>With un-related parties</i>
PT Bank Sulawesi Selatan	-	10,000,000,000	PT Bank Sulawesi Selatan
PT Bank Sumatera Utara (SUMUT)	85,000,000,000	105,000,000,000	PT Bank Sumatera Utara (SUMUT)
PT Bank Maluku	45,000,000,000	27,000,000,000	PT Bank Maluku
PT Bank Lampung	15,000,000,000	32,000,000,000	PT Bank Lampung
PT Bank Sulawesi Utara	125,000,000,000	47,000,000,000	PT Bank Sulawesi Utara
PT Bank Sulawesi Utara Cab Kota Mubago	5,000,000,000	-	PT Bank Sulawesi Utara Cab Kota Mubago
PT Bank Sumatera Selatan Babel	3,000,000,000	5,000,000,000	PT Bank Sumatera Selatan Babel
PT Bank Bukopin	5,000,000,000	-	PT Bank Bukopin
PT Bank Bukopin Syariah Cab Salemba	18,750,000,000	17,250,000,000	PT Bank Bukopin Syariah Cab Salemba
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Artaloka	29,250,000,000	28,000,000,000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Artaloka
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Matraman	-	1,000,000,000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab Matraman
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Kemayoran	-	2,000,000,000	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cab. Kemayoran
PT Bank Mega Syariah Cab. Kuningan	-	1,000,000,000	PT Bank Mega Syariah Cab. Kuningan
PT Bank Panin Syariah	5,000,000,000	2,000,000,000	PT Bank Panin Syariah
PT Bank BTPN Syariah	4,000,000,000	1,500,000,000	PT Bank BTPN Syariah
PT Bank Jabar Banten Cab Depok	30,000,000,000	-	PT Bank Jabar Banten Cab Depok
PT Bank Jabar Banten Cab Banjar	2,000,000,000	-	PT Bank Jabar Banten Cab Banjar
PT Bank Jabar Banten Cab Buah Batu	2,000,000,000	-	PT Bank Jabar Banten Cab Buah Batu
PT Bank Jabar Banten Cab Soreang	2,000,000,000	-	PT Bank Jabar Banten Cab Soreang
PT Bank Jabar Banten Syariah Bekasi	45,000,000,000	11,250,000,000	PT Bank Jabar Banten Syariah Bekasi
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Serang	2,500,000,000	2,500,000,000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Serang
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Cirebon	1,000,000,000	1,000,000,000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Cirebon
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Subang	500,000,000	500,000,000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Subang
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Pelajar Pejuang, Bandung	1,000,000,000	1,000,000,000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Pelajar Pejuang, Bandung
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Kramat Jati	2,000,000,000	2,000,000,000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Kramat Jati
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Bogor	-	2,000,000,000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Bogor
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Depok	1,000,000,000	1,000,000,000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Depok
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Sukajadi, Bandung	500,000,000	500,000,000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Sukajadi, Bandung
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Braga, Bandung	2,000,000,000	2,000,000,000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Braga, Bandung
PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Sumber	500,000,000	500,000,000	PT Bank Jabar Banten Syariah Cab. Sumber
PT Bank Sumatera Barat (Nagari)	104,000,000,000	105,000,000,000	PT Bank Sumatera Barat (Nagari)
PT Bank Jambi	100,000,000,000	100,000,000,000	PT Bank Jambi
PT Bank Jambi Cab. Singkut	1,000,000,000	-	PT Bank Jambi Cab. Singkut
PT Bank Jambi Cab. Muara Mubago	2,000,000,000	-	PT Bank Jambi Cab. Muara Mubago
PT Bank Jambi Cab. Utama	1,000,000,000	-	PT Bank Jambi Cab. Utama
PT Bank Jambi Cab. Muara Bulin	1,500,000,000	-	PT Bank Jambi Cab. Muara Bulin
PT Bank Jambi Cab. Tebo	1,000,000,000	-	PT Bank Jambi Cab. Tebo
PT Bank Jambi Cab. Sutomo	1,500,000,000	-	PT Bank Jambi Cab. Sutomo
PT Bank Jambi Cab. Sungai Bengkal	1,000,000,000	-	PT Bank Jambi Cab. Sungai Bengkal
PT Bank Jambi Cab. Rimbo Bujang	1,000,000,000	-	PT Bank Jambi Cab. Rimbo Bujang
PT Bank Jambi Cab. Sabak	1,500,000,000	-	PT Bank Jambi Cab. Sabak
PT Bank Jambi Cab. Sarolangun	1,000,000,000	-	PT Bank Jambi Cab. Sarolangun
PT Bank Jambi Cab. Syariah	2,000,000,000	-	PT Bank Jambi Cab. Syariah
PT Bank Jambi Cab. Sungai Rengas	1,000,000,000	-	PT Bank Jambi Cab. Sungai Rengas
PT Bank Jambi Cab. Kuala Tungkal	1,500,000,000	-	PT Bank Jambi Cab. Kuala Tungkal
PT Bank Jambi Cab. Bangko	1,500,000,000	-	PT Bank Jambi Cab. Bangko
PT Bank Jambi Cab. Sungai Penuh	1,500,000,000	-	PT Bank Jambi Cab. Sungai Penuh
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab. Cirebon	-	2,000,000,000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab. Cirebon
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab. Suniarja Bandung	-	1,000,000,000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab. Suniarja Bandung
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab. Citarum Bandung	-	1,500,000,000	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk Cab. Citarum Bandung
PT Bank Kaltim	10,000,000,000	-	PT Bank Kaltim
PT Bank Bengkulu Cab. Panorama	1,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Panorama
PT Bank Bengkulu Cab. Karang Tinggi	1,500,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Karang Tinggi
PT Bank Bengkulu Cab. Bintuhan	3,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Bintuhan

**PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2014 DAN 2013**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2014 AND 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

PT Bank Bengkulu Cab. Utama	5,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Utama
PT Bank Bengkulu Cab. Mega Mall	1,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Mega Mall
PT Bank Bengkulu Cab. Kayu Kunit	1,500,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Kayu Kunit
PT Bank Bengkulu Cab. Taj Kemuning	1,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Taj Kemuning
PT Bank Bengkulu Cab. Tes	1,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Tes
PT Bank Bengkulu Cab. Sukaraja	1,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Sukaraja
PT Bank Bengkulu Cab. Kepahing	4,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Kepahing
PT Bank Bengkulu Cab. Curuk	3,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Curuk
PT Bank Bengkulu Cab. Arga Makmur	4,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Arga Makmur
PT Bank Bengkulu Cab. Pasar Minggu	1,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Pasar Minggu
PT Bank Bengkulu	5,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu
PT Bank Bengkulu Cab. Tais	1,500,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Tais
PT Bank Bengkulu Cab. Pagar Dewa	2,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Pagar Dewa
PT Bank Bengkulu Cab. Muamara Aman	3,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Muamara Aman
PT Bank Bengkulu Cab. Bukit Kaba	1,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Bukit Kaba
PT Bank Bengkulu Cab. Manna	5,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Manna
PT Bank Bengkulu Cab. Lubuk Pinang	1,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Lubuk Pinang
PT Bank Bengkulu Cab. Penarik	1,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Penarik
PT Bank Bengkulu Cab. Pasar Tengah	1,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Pasar Tengah
PT Bank Bengkulu Cab. Pino Raya	1,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Pino Raya
PT Bank Bengkulu Cab. Muko Muko	3,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Muko Muko
PT Bank Bengkulu Cab. Ipuh	1,000,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Ipuh
PT Bank Bengkulu Cab. Sudmana	1,500,000,000	-	PT Bank Bengkulu Cab. Sudmana
Jumlah Deposito Pada Pihak Tidak Berelasi	721,000,000,000	512,500,000,000	
Total Deposito Rupiah	1,083,219,383,398	576,886,371,355	
<b>Deposito Berjangka (dalam mata uang asing)</b>			<b>Time Deposits (in Foreign Exchange)</b>
<b>Pihak Berelasi</b>			<b>With Related Parties</b>
PT Bank Mandiri Tbk Cab. Cikini	-	1,523,625,000	PT Bank Mandiri Tbk Cab. Cikini
(2014): USD 0; (2013): USD 125,000;			(2013): USD 125,000; (2012): USD 0;
PT Bank Syariah Mandiri Cab Thamrin	2,644,092,393	5,898,764,090	PT Bank Syariah Mandiri Cab Thamrin
(2014): USD 212,548.00; (2013): USD 483,941.59;			(2013): USD 483,941.59; (2014): USD 1,400,000.00;
PT Bank Syariah Mandiri Cab W Metropolitan	17,416,000,000	-	
(2014): USD 1,400,000.00;			
PT Bank Bukopin	7,464,000,000	-	
(2014): USD 600,000.00;			
<b>Pihak Ketiga</b>			<b>With Un-related Parties</b>
PT Bank Muamalat Indonesia Cab. Arthaloka	14,928,000,000	35,652,825,000	PT Bank Muamalat Indonesia Cab Arthaloka
(2014): USD1.200.000; (2013): USD2.925.000;			(2013) : USD 2.925.000; (2012): USD 875.000;
Jumlah Deposito Dalam Valuta Asing	42,452,092,393	43,075,214,090	
	1,125,671,475,791	619,961,585,445	
<b>Deposito On Call:</b>			<b>Deposit on Call</b>
<b>Pihak Berelasi :</b>			<b>With Related Parties</b>
PT Bank Mandiri Tbk Cab. W. Metropolitan	-	1,750,000,000	PT Bank Mandiri Tbk Cab. W. Metropolitan
PT Bank Mandiri Tbk Cab Cikini	-	1,200,000,000	PT Bank Mandiri Tbk Cab Cikini
PT Bank Rakyat Indonesia Cab. Rawamangun	-	2,000,000,000	PT Bank Rakyat Indonesia Cab. Rawamangun
PT Bank Tabungan Negara Cab. Kembangan	-	3,000,000,000	PT Bank Tabungan Negara Cab. Kembangan
	-	7,950,000,000	
<b>Pihak Tidak Berelasi :</b>			<b>With Un-related Parties</b>
PT Bank Bukopin Tbk Cab MT. Haryono	20,000,000,000	4,000,000,000	PT Bank Bukopin Tbk Cab MT. Haryono
Jumlah Deposito	1,145,671,475,791	631,911,585,445	Total Deposits

14 Saham Yang Diperdagangkan		31-Dec-14	31-Dec-13	14. Stocks Held for Trading	
		43,856,462,215	43,749,544,400		
31-Dec-14					
Emiten:	Jumlah Saham/Number of Securities	Nilai Perolehan/Cost	Keuntungan (Kerugian) /Gain (Loss)	Nilai Wajar/Fair Value at 31/12/2014	Emitent:
Sugih Energy	5,400,000	2,246,400,000	59,400,000	2,305,800,000	Sugih Energy
Bank Tabungan Negara Tbk	450,000	436,500,000	105,750,000	542,250,000	Bank Tabungan Negara Tbk
Bukit Asam Tbk	18,500	292,300,000	(61,050,000)	231,250,000	Bukit Asam Tbk
Ratu Prabu Energy Tbk	4,272,739	2,392,733,840	(1,961,187,201)	431,546,639	Ratu Prabu Energy Tbk
Semen Batu Raja Tbk	23,000	12,880,000	(4,117,000)	8,763,000	Semen Batu Raja Tbk
Darma Henwa Tbk	8,415,500	639,578,000	(218,803,000)	420,775,000	Darma Henwa Tbk
Intiagri Resources Tbk	17,927,500	19,182,425,000	16,644,637,576	35,827,062,576	Intiagri Resources Tbk
Trub Alam Tbk	151,467	7,573,351	-	7,573,351	Trub Alam Tbk
Trub Alam Tbk	243	12,150	-	12,150	Trub Alam Tbk
Bank Central Asia Tbk	48	547,200	82,800	630,000	Bank Central Asia Tbk
Bakrie & Brother	6,964	348,200	-	348,200	Bakrie & Brother
Island Concepts	3,510,000	1,516,320,000	56,160,000	1,572,480,000	Island Concepts
Kertas Basuki R	100,978	5,048,900	-	5,048,900	Kertas Basuki R
Multipolar	33	23,925	3,630	27,555	Multipolar
Steady Safe	641,733	62,889,834	-	62,889,834	Steady Safe
Sigma Gold Inti Perkasa	5,000,077	2,240,035,112	199,964,888	2,440,000,000	Sigma Gold Inti Perkasa
Bank CIMB Niaga	6	6,000	(990)	5,010	Bank CIMB Niaga
Jumlah	45,918,788	29,035,621,512	14,820,840,703	43,856,462,215	<b>Total</b>
31-Dec-13					
Emiten:	Jumlah Saham/Number of Securities	Nilai Perolehan/Cost	Keuntungan (Kerugian) / Gain (Loss)	Nilai Wajar/Fair Value at 31/12/2013	Emitent:
Astra International Tbk	115,000	819,835,000	(37,835,000)	782,000,000	Astra International Tbk
Bank Rakyat Indonesia Tbk	50,000	435,000,000	(72,500,000)	362,500,000	Bank Rakyat Indonesia Tbk
Bumi Resources Tbk	100,000	367,500,000	(337,106,750)	30,393,250	Bumi Resources Tbk
Bank Tabungan Negara bk	450,000	624,600,000	(233,100,000)	391,500,000	Bank Tabungan Negara bk
Perum Gas Negara	142,500	830,205,000	(192,517,500)	637,687,500	Perum Gas Negara
Bukit Asam Tbk	18,500	292,300,000	(103,600,000)	188,700,000	Bukit Asam Tbk
Ratu Prabu Energy Tbk	2,916,500	1,633,240,000	(1,105,353,500)	527,886,500	Ratu Prabu Energy Tbk
Timah Tbk	600,000	2,376,500,000	(1,416,500,000)	960,000,000	Timah Tbk
Semen Batu Raja Tbk	23,000	12,880,000	(5,290,000)	7,590,000	Semen Batu Raja Tbk
Darma Henwa Tbk	8,415,500	639,578,000	(218,803,000)	420,775,000	Darma Henwa Tbk
Intiagri Resources Tbk	17,927,500	19,182,425,000	20,258,075,000	39,440,500,000	Intiagri Resources Tbk
Trub Alam Tbk	243	12,150	-	12,150	Trub Alam Tbk
Jumlah	30,758,743	27,214,075,150	16,535,469,250	43,749,544,400	<b>Total</b>

Berkaitan dengan saham-saham Darma Henwa Tbk, Intiagri Resources Tbk, dan Trub Alam Tbk, (lihat tabel di bawah), yang berasal dari sisa saham jaminan milik PT Falcon Asia Resources Manajemen yang dikuasai perusahaan, pada saat ini sedang dalam proses pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus No 541/DIR/NR/XI/2014 tertanggal 28 Nopember 2014, PT Reasuransi Nasional Indonesia telah menunjuk Kurniawan & Partner sebagai Kuasa Hukum perusahaan dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi terhadap PT Falcon Asia Resources Management. Surat gugatan telah dibuat tanggal 5 Januari 2015 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah daftar nomor 08/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL tanggal 7 Januari 2015.

With respect of the shares of Darma Henwa Tbk, Intiagri Resources Tbk, and TRUB Nature Tbk, (see table below), which come from the remaining guarantee shares owned by PT Falcon Asia Resources Management, they are currently in the process of filing a lawsuit in South Jakarta District Court. In the settlement of a lawsuit by a special power of attorney No. 541 / DIR / NR / XI / 2014 dated November 28, 2014, PT Indonesian National Reinsurance has appointed Kurniawan & Partners as an Attorney of the Company in the legal case against PT Falcon Asia Resources Management. The lawsuit has been made on January 5, 2015 and was registered in the South Jakarta District Court under the register number 08 / Pdt.G / 2015 / PN.Jkt.Sel dated January 7, 2015.

Nama Saham	Jumlah Lembar Number of Stock	Harga Pasar per Lembar Market value each	Jumlah Harga Pasar (Rp) Total Market Value (Rp)	Stock
a. DEWA	8,415,500	50	420,775,000	DEWA a.
b. IIKP	17,927,500	1,998	35,827,062,576	IIKP b.
c. TRUB	243	50	12,150	TRUB c.
Total Harga Pasar Saham 31 Des 2014	26,343,000	1,490	36,247,849,726	Total value of stocks 31 Dec 2014



PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
 31 DESEMBER 2014 DAN 2013  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEARS ENDED  
 DECEMBER 31, 2014 AND 2013  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		31-Dec-14		31-Dec-13			
15 Obligasi Yang Diperdagangkan		359,871,673,254		374,885,583,509		15. Bonds for Held for Trading	
31-Dec-14							
Emiten	Maturity	Rating	Nilai Perolehan/Cost	Un-realized Gain (Loss)	Nilai Wajar/Fair Value at 31/12/2014	Emitent	
Indosat	27-Jun-22	AA	2,000,000,000	(280,000,000)	1,720,000,000	Indosat	
Adhi Karya	3-Jul-19	A	11,000,000,000	(1,722,194,000)	9,277,806,000	Adhi Karya	
Adira Dinamika M. Finance	27-Sep-15	AA	5,000,000,000	(59,000,000)	4,941,000,000	Adira Dinamika M. Finance	
Astra Sedaya Finance	21-Feb-12	AA	15,000,000,000	(447,000,000)	14,553,000,000	Astra Sedaya Finance	
Pegadaian	11-Oct-21	AA	45,877,500,000	(2,323,285,000)	43,554,215,000	Pegadaian	
Bank Exim	20-Dec-16	AAA	15,267,500,000	110,320,000	15,377,820,000	Bank Exim	
Bank Tabungan Negara	5-Jun-22	AA	45,444,500,000	(6,832,500,000)	38,612,000,000	Bank Tabungan Negara	
Bank Bukopin	3-Jun-19	A	19,445,000,000	(2,155,000,000)	17,290,000,000	Bank Bukopin	
FR0062	15-Apr-42	-	45,012,500,000	(10,362,500,000)	34,650,000,000	FR0062	
FR0064	15-May-28	-	9,890,000,000	(1,390,000,000)	8,500,000,000	FR0064	
FR0065	15-May-33	-	48,539,500,000	(4,027,500,000)	44,512,000,000	FR0065	
Bank Nagari	26-Jun-19	A	5,000,000,000	(170,205,000)	4,829,795,000	Bank Nagari	
Bank Permata	19-Dec-19	AA	5,000,000,000	(98,500,000)	4,901,500,000	Bank Permata	
BCA Finance	12-Jun-17	AA	2,000,000,000	(94,000,000)	1,906,000,000	BCA Finance	
Bumi Serpong Damai	5-Jun-18	AA	5,000,000,000	(327,810,000)	4,672,190,000	Bumi Serpong Damai	
PLN	24-Oct-42	BBB	57,251,368,000	(6,618,764,200)	50,632,603,800	PLN	
Hutama Karya	28-Jun-20	A	2,000,000,000	-	2,000,000,000	Hutama Karya	
Garuda Indonesia	29-Jun-20	A	5,000,000,000	(285,000,000)	4,715,000,000	Garuda Indonesia	
Sarana Multi Griya Financial	21-Mar-20	AA	3,000,000,000	(311,838,000)	2,688,162,000	Sarana Multi Griya Financial	
INDON 43	15-May-43	-	15,693,682,000	(609,200,546)	15,084,481,454	INDON 43	
PBS004	15-Feb-37	-	25,727,000,000	(7,165,600,000)	18,561,400,000	PBS004	
Sukuk	28-Mar-23	A	21,347,000,000	(4,454,300,000)	16,892,700,000	Sukuk	
			409,495,550,000	(49,623,876,746)	359,871,673,254		
31-Dec-13							
Emiten	Maturity	Rating	Nilai Perolehan/Cost	Un-realized Gain (Loss)	Nilai Wajar/Fair Value at 31/12/2013	Emitent	
Indosat	27-Jun-22	AA	2,000,000,000	(360,000,000)	1,640,000,000	Indosat	
Adhi Karya	3-Jul-19	A	11,120,000,000	(858,100,000)	10,261,900,000	Adhi Karya	
Adira Dinamika M. Finance	27-Sep-15	AA	5,000,000,000	(129,000,000)	4,871,000,000	Adira Dinamika M. Finance	
Astra Sedaya Finance	21-Feb-12	AA	15,397,000,000	(667,000,000)	14,730,000,000	Astra Sedaya Finance	
Pegadaian	11-Oct-21	AA	45,877,500,000	(4,216,500,000)	41,661,000,000	Pegadaian	
Bank Exim	20-Dec-16	AAA	15,267,500,000	277,000,000	15,544,500,000	Bank Exim	
Bank Tabungan Negara	5-Jun-22	AA	45,444,500,000	(842,500,000)	44,602,000,000	Bank Tabungan Negara	
Bank Bukopin	3-Jun-19	A	19,445,000,000	(916,200,000)	18,528,800,000	Bank Bukopin	
FR0062	15-Apr-42	-	45,012,500,000	(12,500,000,000)	32,512,500,000	FR0062	
FR0064	15-May-28	-	9,890,000,000	(265,000,000)	9,625,000,000	FR0064	
FR0065	15-May-33	-	48,539,500,000	4,500,500,000	53,040,000,000	FR0065	
Bank Nagari	26-Jun-19	A	5,000,000,000	(290,710,000)	4,709,290,000	Bank Nagari	
Bank Permata	19-Dec-19	AA	5,000,000,000	(295,500,000)	4,704,500,000	Bank Permata	
BCA Finance	12-Jun-17	AA	2,000,000,000	(154,000,000)	1,846,000,000	BCA Finance	
Bumi Serpong Damai	5-Jun-18	AA	5,000,000,000	(429,500,000)	4,570,500,000	Bumi Serpong Damai	
PLN	24-Oct-42	BBB	56,096,215,800	(11,319,924,300)	44,776,291,500	PLN	
Hutama Karya	28-Jun-20	A	2,000,000,000	-	2,000,000,000	Hutama Karya	
Garuda Indonesia	29-Jun-20	A	5,000,000,000	(334,150,000)	4,665,850,000	Garuda Indonesia	
Sarana Multi Griya Financial	21-Mar-20	AA	3,000,000,000	-	3,000,000,000	Sarana Multi Griya Financial	
INDON 43	15-May-43	-	15,377,032,950	(2,701,680,695)	12,675,352,009	INDON 43	
PBS004	15-Feb-37	-	25,727,000,000	(1,749,800,000)	23,977,200,000	PBS004	
Sukuk	28-Mar-23	A	21,065,000,000	(121,100,000)	20,943,900,000	Sukuk	
			408,258,748,750	(33,373,164,995)	374,885,583,509		

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
 31 DESEMBER 2014 DAN 2013  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEARS ENDED  
 DECEMBER 31, 2014 AND 2013  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31-Dec-14	31-Dec-13	
<b>16 Reksadana</b>	<b>52,424,428,148</b>	<b>37,449,454,177</b>	<b>16. Mutual funds</b>
<b>Reksadana Konvensional</b>			<b>Conventional Mutual Fund</b>
PT Danareksa	5,091,936,110	4,622,846,275	PT Danareksa
Mandiri Manajer Investasi	3,941,187,059	3,631,538,350	Mandiri
Mega Capital	4,505,608,550	4,137,495,829	Mega Capital
PT AIM Trust (RDPT)	-	3,467,508,834	PT AIM Trust (RDPT)
Trimegah	1,337,990,000	3,279,444,248	Trimegah
PT Batavia Prosperindo Asset Manajemen	2,202,294,427	1,733,933,754	PT Batavia Prosperindo Asset Manajemen
AAA Aset Manajemen	2,370,717,810	1,916,740,996	AAA Aset Manajemen
Sucorinvest Asset Manajemen	2,018,137,467	1,597,745,990	Sucorinvest Asset Manajemen
Mega Aset Manajemen	-	5,655,304,534	Mega Aset Manajemen
GMT Aset Manajemen	1,961,528,101	1,668,040,802	GMT Aset Manajemen
Henan Puthirai	2,104,684,062	-	Henan Puthirai
Millenium Danatama Indonesia	16,234,923,638	-	Millenium Danatama Indonesia
PNM Investment Management	1,957,574,934	1,584,907,633	PNM Investment Management
Jumlah Reksadana	43,726,582,158	33,295,507,246	<b>Total Investment in Mutual Fund</b>
<b>Reksadana Syariah</b>			<b>Syaria' mutual funds</b>
PNM Ekuitas Syariah	1,002,136,055	836,190,329	PNM Ekuitas Syariah
PNM Amanah Syariah	2,027,730,565	2,009,467,543	PNM Amanah Syariah
Mandiri Manajemen Investasi	4,662,376,964	3,854,106,794	Mandiri Manajemen Investasi
Mega Investama Capital	1,005,602,406	921,691,099	Mega Investama Capital
	8,697,845,990	7,621,455,765	
Total Reksadana Konvensional dan Syariah	52,424,428,148	40,916,963,011	<b>Total Mutual Fund - Conventional and Syariah</b>
Penyisihan Investasi RDPT	-	3,467,508,834	Allowance for RDPT Investment
Jumlah Reksadana	52,424,428,148	37,449,454,177	Total Mutual Funds

	31-Dec-14	31-Dec-13	
<b>17 Penyertaan Saham</b>	<b>1,423,700,000</b>	<b>1,423,700,000</b>	<b>17. Stock Investment</b>
PT Asuransi Maipark Indonesia	723,700,000	723,700,000	PT Asuransi Maipark Indonesia
Dana Konsorsium Asuransi Khusus	700,000,000	700,000,000	Special insurance consortium fund
<b>Jumlah Penyertaan Saham</b>	<b>1,423,700,000</b>	<b>1,423,700,000</b>	<b>Total stock investment</b>

Penyertaan saham kepada PT Asuransi Maipark Indonesia dilakukan sehubungan dengan Surat Edaran (SE) Departemen Keuangan - Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. SE-604/LK/2003 tanggal 11 November 2003, kepada semua perusahaan asuransi umum dan reasuransi untuk menjadi pemegang saham PT Asuransi Maipark Indonesia minimal sebesar 0,5% dari total nilai investasi per tanggal 31 Desember 2002.

Investments in shares of PT Asuransi Maipark Indonesia was made in conformity with the circular of the Ministry of Finance – Directorate General of Financial Institution No. SE-604/LK/2003 dated 11 November 2003 that all general insurance and reinsurance companies be shareholders of PT Asuransi Maipark Indonesia at minimum 0.5% of total investment value as of 31 December 2002.

Dana Konsorsium Asuransi Risiko Khusus merupakan pembayaran dana klaim kepada Konsorsium Asuransi Risiko Khusus dalam rangka partisipasi perusahaan-perusahaan asuransi umum dan reasuransi untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat kecil dalam bentuk penutupan asuransi pasar-pasar tradisional.

Special Insurance Risk Consortium Funds represents payments of claim funds to Special Insurance Risk Consortium in relation to participation of general insurance and reinsurance companies to assist small societies by giving them services in form of insurance coverage for traditional markets.

Pengukuran atas penyertaan saham tersebut di atas adalah dengan metode biaya (cost method).

Cost method is use for measuring the stock investment.

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
 31 DESEMBER 2014 DAN 2013  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEARS ENDED  
 DECEMBER 31, 2014 AND 2013  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		31-Dec-14		31-Dec-13			
18 Aset Tetap		51,038,355,681		48,077,687,620		18. Fixed Assets	
<b>31-Dec-14</b>							
Aset	Saldo Awal (Beginning Balance)	Penambahan (Addition)	Pengurangan (Deduction)	Penurunan Nilai (Impairment)	Saldo Akhir (Ending Balance)	Assets	
<b>Biaya Perolehan:</b>						<b>Cost</b>	
Tanah	31,262,092,800	-	-	-	31,262,092,800	Lands	
Bangunan	12,500,052,480	3,402,064,097	-	-	15,902,116,577	Buildings	
Renovasi	41,261,788	-	-	-	41,261,788	Renovation	
Kendaraan	3,760,853,333	31,500,000	-	-	3,792,353,333	Vehicles	
Komputer	5,217,308,706	1,531,692,362	-	-	6,749,001,068	Computers	
Peralatan Kantor	22,748,070	-	-	-	22,748,070	Office equipment	
Perabot Kantor	1,477,812,856	211,591,700	-	-	1,689,404,556	Office furniture and fixture	
Software	1,845,593,058	127,836,203	-	-	1,973,429,261	Software	
Jumlah	56,127,723,091	5,304,684,361	-	-	61,432,407,453	<b>Total</b>	
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>	
Bangunan	1,157,121,359	632,861,484	-	-	1,789,982,843	Buildings	
Renovasi	25,444,770	8,252,358	-	-	33,697,127	Renovation	
Kendaraan	2,174,551,810	610,220,000	-	-	2,784,771,810	Vehicles	
Komputer	2,866,637,424	765,142,221	-	-	3,631,779,645	Computers	
Peralatan Kantor	22,748,070	-	-	-	22,748,070	Office equipment	
Perabot Kantor	1,048,747,551	134,455,377	-	-	1,183,202,928	Office furniture and fixture	
Software	754,784,487	193,084,860	-	-	947,869,347	Software	
Jml Ak Penyusutan	8,050,035,471	2,344,016,300	-	-	10,394,051,771		
<b>Nilai Buku</b>	<b>48,077,687,620</b>				<b>51,038,355,681</b>	<b>Net Book Value</b>	
<b>31-Dec-13</b>							
Aset	Saldo Awal (Beginning Balance)	Penambahan (Addition)	Pengurangan (Deduction)	Penurunan Nilai (Impairment)	Saldo Akhir (Ending Balance)	Assets	
<b>Biaya Perolehan:</b>						<b>Cost</b>	
Tanah	31,262,092,800	-	-	-	31,262,092,800	Lands	
Bangunan	9,514,631,800	2,985,420,680	-	-	12,500,052,480	Buildings	
Renovasi	41,261,788	-	-	-	41,261,788	Renovation	
Kendaraan	3,675,053,333	816,600,000	730,800,010	-	3,760,853,333	Vehicles	
Komputer	4,676,237,182	1,171,988,725	630,917,201	-	5,217,308,706	Computers	
Peralatan Kantor	22,748,070	-	-	-	22,748,070	Office equipment	
Perabot Kantor	1,439,909,928	130,308,500	92,405,572	-	1,477,812,856	Office furniture and fixture	
Software	1,734,843,058	110,750,000	-	-	1,845,593,058	Software	
Jumlah	52,366,777,959	5,215,067,905	1,454,122,782	-	56,127,723,092	<b>Total</b>	
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>	
Bangunan	646,102,151	511,019,208	-	-	1,157,121,359	Buildings	
Renovasi	17,192,412	8,252,358	-	-	25,444,770	Renovation	
Kendaraan	2,289,936,373	615,415,435	730,799,998	-	2,174,551,810	Vehicles	
Komputer	2,804,919,797	672,944,922	611,227,295	-	2,866,637,424	Computers	
Peralatan Kantor	22,748,070	-	-	-	22,748,070	Office equipment	
Perabot Kantor	1,039,889,905	101,263,211	92,405,565	-	1,048,747,551	Office furniture and fixture	
Software	595,433,615	159,350,872	-	-	754,784,487	Software	
Jml Ak Penyusutan	7,416,222,323	2,068,246,006	1,434,432,858	-	8,050,035,472		
<b>Nilai Buku</b>	<b>44,950,555,636</b>				<b>48,077,687,620</b>	<b>Net Book Value</b>	

Biaya penyusutan aset tetap per 31 Desember 2014, dan 2013 masing-masing sebesar Rp 2.344.016.300,- dan Rp 2.068.246.006,- dibukukan di beban usaha.

Seluruh aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 41.078.500.000,00 dan Rp 12.322.990.806, untuk tahun 2014 dan 2013. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka penambahan modal disetor, berdasarkan notulen rapat RUPSLB tentang Peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor Usaha Konvensional Nomor 15/RR/DIR tanggal 26 Juli 2011, Perusahaan telah menerima aset berupa 1 (satu) buah gedung yang terletak di Jln. Cikini Raya No. 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta, dari PT PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), yang dicatat sebagai modal disetor sebesar Rp 35.000.000.000. Pencatatan tersebut berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Amin-Nirwan-Alfiantori & Rekan, dengan laporannya nomor: 417.1.6.3.11.05.11 perihal Penilaian Aset Perusahaan dengan hasil penilaian berdasarkan nilai pasar (*market value*) sebesar Rp 35.078.800.000.

Depreciation expenses of fixed assets for the year ended 31 December 2013, and 2012 are Rp2.068.246.006 and Rp 1.904.106.542, respectively and charged as operating expenses (see note 29).

All fixed assets are covered with insurance against fire, theft and other risks with total coverage of Rp 41.078.500.000 and Rp 12.322.990.806 for the years 2014 and 2013. Management believes that the total coverage is adequate to cover possible loss on assets insured.

For increase in paid-in capital, base on minutes of Extraordinary Meeting of Shareholders No 15/RR/DIR dated July 26, 2011, on increase in authorized and paid-in capital of conventional business, The Company has received a transfer of a unit of asset in terms of an office building located at Jln. Cikini Raya No. 99 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng, Central Jakarta, Jakarta Province, from the parent company PT PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), valued at Rp 35.000.000.000. The valuation is made by the public appraisal company Amin-Nirwan-Alfiantori & Rekan with the report number 417.1.6.3.11.05.11, based on current market value on 20 May 2011 of Rp 35.078.800.000

	31-Dec-14	31-Dec-13	
<b>19 Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>8,437,393,123</b>	<b>7,109,291,632</b>	<b>19. Deferred Tax Asset</b>

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan per 31 Desember 2014 dan 2013 serta pendapatan (beban) pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut:

The breakdown of deferred tax assets (liabilities) as of 31 December 2014 and 2013 and deferred tax benefits (expenses) for the years ended 31 December 2014 and 2013:

	31-Dec-14	(Beban )/Manfaat Pajak Tangguhan/Deferred Tax Expense (benefit)	31-Dec-13	
Cadangan IBNR	6,791,379,783	229,115,935	6,562,263,848	Allowance for IBNR claims
Imbalan Pasca Kerja	2,104,788,963	369,355,499	1,735,433,464	Post employment benefit
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	1,387,128,802	797,349,834	589,778,968	Receivable impairment
Penyusutan	(122,830,369)	(67,719,779)	(55,110,590)	Depreciation
	<u>10,160,467,179</u>	<u>1,328,101,489</u>	<u>8,832,365,690</u>	
Penurunan Nilai Aset Pajak	(1,723,074,056)		(1,723,074,056)	Decrease in value of
Saldo Akhir Aset Pajak Tangguhan	<u>8,437,393,123</u>		<u>7,109,291,632</u>	Deferred Tax Asset

Pada bulan September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

In September 2008, Law No. 7 of 1983 on "Income Tax" was revised for the fourth time with the Law No. 36 of 2008. The revised Law stipulates changes in corporate tax rate from a progressive rate to a single rate of 28% for fiscal year 2009 and 25% for fiscal year 2010 and thereafter

	31-Dec-14	31-Dec-13	
<b>20 Aset Lain-lain</b>	<b>1,164,139,612</b>	<b>1,378,557,284</b>	<b>20. Other Assets</b>
Terdiri dari :			
Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)	27,000,000,000	27,000,000,000	Fund Management Contracts
(Cadangan Penyisihan KPD)	(27,000,000,000)	(27,000,000,000)	Allowance for Doubtful KPD
Corp. Member Rancamaya	165,000,000	165,000,000	Corp. Member Rancamaya
Corp. Member Bogor Raya	120,000,000	120,000,000	Corp. Member Bogor Raya
Corp. Member Gunung Geulis	110,000,000	110,000,000	Corp. Member Gunung Geulis
Corp. Member Emeraldalda	60,000,000	60,000,000	Corp. Member Emeraldalda
Lain-lain	709,139,612	923,557,284	Miscellaneous
Jumlah Aset Lain-lain	<u>1,164,139,612</u>	<u>1,378,557,284</u>	<b>Total</b>



**PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2014 DAN 2013**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2014 AND 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Perusahaan menggunakan Manajer Investasi untuk mengelola dana melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dalam bentuk saham, obligasi, kas bank dan lain-lain.

Saldo Investasi dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) per 31 Desember 2014, yang telah direklasifikasi ke Aset lain-lain (non admitted asset) adalah sebesar Rp 27.000.000.000,-, disebabkan karena Kontrak Pengelolaan Dana telah jatuh tempo tetapi perusahaan kesulitan mencairkan dana.

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas sampai dengan tahun 2014 perusahaan telah melakukan amortisasi seluruh nilai kontrak pengelolaan dana sebesar 100% atau Rp 27.000.000.000,-

Rincian kontrak pengelolaan dana adalah sebagai berikut :

	31-Dec-14
Rincian Kontrak Pengelolaan Dana:	
PT Synergy Asset Management (SYAM)	12,000,000,000
PT Euro Capital Peregrine Securities (PT EPS)	15,000,000,000
	<u>27,000,000,000</u>

Perkembangan terakhir tahun 2014 penagihan dana investasi Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) adalah sebagai berikut:

PT Synergy Asset Management telah menegaskan bahwa sudah ada calon pembeli atas aset-aset miliknya, dan apabila sudah terealisasi maka hasil penjualannya akan segera dibayarkan kepada seluruh investor secara proporsional, termasuk kepada Perusahaan. Sampai akhir tahun 2014 tetap belum dapat dicairkan/dialihkan menjadi aset investasi.

PT Eurocapital Peregrine Securities merupakan tanggungjawab Saudara Djody Haryanto, seperti halnya PT Falcon Asset Resources Management (FARM) dan akan diselesaikan oleh yang bersangkutan secara bersamaan dengan tagihan dana investasi Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) kepada PT Falcon Asset Resources Management (FARM) termasuk juga 10 (sepuluh) jaminan tanah/sertifikat di atas.

Sampai dengan akhir tahun 2014 tetap belum dapat dicairkan/dialihkan menjadi aset investasi.

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas sampai dengan tahun 2014 perusahaan telah melakukan amortisasi seluruh nilai Kontrak Pengelolaan Dana sebesar 100% atau Rp 27.000.000.000.

The Company uses an Investment Manager to manage the funds through Funds Management Contracts in the form of stocks, bonds, cash and banks and others.

Balance of Investment in Fund Management Contracts as at December 31, 2014, which has been reclassified to other assets (non admitted assets) is Rp 27.000.000.000, -, because the Fund Management Contracts have expired but the Company finds it difficult to withdraw funds.

Taking into account the above conditions until 2013, the Company has to amortize the entire value of the fund management contracts at 100% or Rp 27 billion, -

Fund management contract details are as follows:

	31-Dec-13	
	12,000,000,000	<i>Breakdown of Fund Management Contracts:</i>
	15,000,000,000	<i>PT Synergy Asset Management (SYAM)</i>
	<u>27,000,000,000</u>	<i>PT Euro Capital Peregrine Securities (PT EPS)</i>

*The latest information on investment fund billing of Fund Management Contract (KPD) is as follow:*

*PT Synergy Asset Management has confirmed that there are existing potential buyers for its assets, and when it has been realized the sales proceeds will be paid proportionately to all investors, including to the Company. Until the end of 2014 the investment no payment has been made.*

*PT Eurocapital Peregrine Securities is the responsibility of Djody Haryanto as well as PT Falcon Asset Resources Management (FARM) and will be settled by the relevant person together with collection on investment funds under the Funds Management Contract (KPD) from PT Falcon Asset Resources Management (FARM), including 10 (ten) land sites as guarantee.*

*By end of 2014 no settlement has been made.*

*Considering the situations, by 2014 the Company amortized the entire amount, Rp 27.000.000.000, of the KPD.*

	31-Dec-14
<b>21 Utang Klaim Reasuransi</b>	<b>49,091,973,566</b>
Utang Klaim Reasuransi Konvensional	
Utang Klaim Reasuransi Umum	
Saldo Awal	17,714,163,765
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	725,853,664,225
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	743,567,827,990
Penyelesaian Tahun Berjalan	707,306,190,516
	<u>36,261,637,474</u>
Penyisihan Penurunan Nilai	-
Saldo per 31 Desember	<u>36,261,637,474</u>

	31-Dec-13	
	25,943,144,089	<b>21. Reinsurance Claim Payables</b>
		<b>Conventional Reinsurance Claim Payable</b>
		<b>General Reinsurance Claim Payable</b>
		<i>Beginning balance</i>
		<i>Payable arising in the current year</i>
		<i>Total payable</i>
		<i>Settlement in current year</i>
	<u>17,714,163,765</u>	<i>Impairment</i>
	<u>17,714,163,765</u>	<b>Balance as at 31 Desember</b>

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
 31 DESEMBER 2014 DAN 2013  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEARS ENDED  
 DECEMBER 31, 2014 AND 2013  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31-Dec-14	31-Dec-13	
Utang Klaim Reasuransi Jiwa			<b>Life Reinsurance Claim Payable</b>
Saldo Awal	3,498,325,474	8,441,698,925	Beginning balance
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	141,527,789,096	148,532,832,878	Payable arising in the current year
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	145,026,114,570	156,974,531,803	Total payable
Penyelesaian Tahun Berjalan	135,421,932,434	153,476,206,329	Settlement in current year
	9,604,182,136	3,498,325,474	
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-	Impairment
Saldo per 31 Desember	9,604,182,136	3,498,325,474	<b>Balance as at 31 Desember</b>
Jumlah Utang Klaim Reasuransi Konvensional	45,865,819,610	21,212,489,239	<b>Total conventional reinsurance payable</b>
Utang Klaim Reasuransi Syariah			<b>Syariah Reinsurance</b>
Utang Klaim Reasuransi Umum			<b>General Reinsurance</b>
Saldo Awal	3,559,588,721	6,679,790,567	Beginning balance
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	28,013,746,005	11,095,444,686	Payable arising in the current year
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	31,573,334,726	17,775,235,253	Total payable
Penyelesaian Tahun Berjalan	29,352,457,022	14,215,646,532	Settlement in current year
	2,220,877,704	3,559,588,721	
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-	Impairment
Saldo per 31 Desember	2,220,877,704	3,559,588,721	Balance as at 31 Desember
Utang Klaim Reasuransi Jiwa			<b>Life Reinsurance</b>
Saldo Awal	1,171,066,129	1,538,925,746	Beginning balance
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	96,482,883,463	71,568,374,066	Payable arising in the current year
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	97,653,949,592	73,107,299,812	Total payable
Penyelesaian Tahun Berjalan	96,648,673,339	71,936,233,683	Settlement in current year
	1,005,276,253	1,171,066,129	
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-	Impairment
Saldo per 31 Desember	1,005,276,253	1,171,066,129	Balance as at 31 Desember
Jumlah Utang Klaim Reasuransi Syariah	3,226,153,957	4,730,654,850	<b>Total syariah reinsurance</b>
Jumlah Utang Klaim Reasuransi	49,091,973,566	25,943,144,089	<b>Total Reinsurance Claim Payable</b>
Hutang Klaim Reasuransi umum - konvensional	36,261,637,474	17,714,163,765	<b>General Reinsurance Claim Payable-Conventional</b>
Hutang Klaim Reasuransi jiwa - konvensional	9,604,182,136	3,498,325,474	<b>Life Reinsurance Claim Payable-Conventional</b>
Hutang Klaim Reasuransi umum - syariah	2,220,877,704	3,559,588,721	General Reinsurance Claim Payable-Syari'a
Hutang Klaim Reasuransi jiwa - syariah	1,005,276,253	1,171,066,129	Life Reinsurance Claim Payable-Syari'a
Jumlah hutang klaim reasuransi	49,091,973,566	25,943,144,089	Total Reinsurance Claim Payable

Jumlah hutang tersebut di atas menunjukkan nilai wajar hutang reasuransi setelah dikurangi cadangan Penurunan nilai.

The total debt shows the fair value of debt net of allowance for impairment

Hutang klaim reasuransi berdasarkan hubungan transaksi:  
 Pihak hubungan istimewa PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)  
 Pihak ketiga  
 Jumlah hutang klaim reasuransi

Reinsurance Claim Payable Based on transaction with  
 Affiliation with PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)  
 Third party  
 Total reinsurance claim payable

Hutang reasuransi per 31 Desember 2014 seluruhnya merupakan utang kepada pihak ketiga.

All of reinsurance claim payable at Desember, 31, 2014 were to third parties

	31-Dec-14	31-Dec-13	
<b>22 Utang Premi Retrosesi</b>	<b>28,658,729,156</b>	<b>7,300,756,456</b>	<b>22. Retrocession Premium Payable</b>
Utang Premi Retrosesi Umum - <b>Konvensional</b>			<i>General Retrocession Payable Balance-Conventional</i>
Saldo Awal	5,371,041,078	1,018,089,501	<i>Beginning balance</i>
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	242,926,414,761	81,959,094,001	<i>Payable arising in the current year</i>
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	248,297,455,839	82,977,183,502	<i>Total payable</i>
Penyelesaian Tahun Berjalan	220,791,928,072	77,606,142,424	<i>Settlement in current year</i>
Saldo Utang Premi Retrosesi	27,505,527,767	5,371,041,078	<i>General Retrocession Payable Balance</i>
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-	
Saldo per 31 Desember	27,505,527,767	5,371,041,078	<b>Balance as at 31 Desember</b>
Utang Premi Retrosesi Jiwa - Konvensional			<b>Premium Life Retrocession Payable-Conventional</b>
Saldo Awal	812,844,168	1,031,687,483	<i>Beginning balance</i>
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	(438,992,192)	1,125,929,023	<i>Payable arising in the current year</i>
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	373,851,976	2,157,616,506	<i>Total payable</i>
Penyelesaian Tahun Berjalan	318,696,655	1,344,772,338	<i>Settlement in current year</i>
	55,155,321	812,844,168	
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-	<i>Allowance for impairment</i>
Saldo per 31 Desember	55,155,321	812,844,168	<b>Balance as at 31 Desember</b>
Jumlah Utang Premi Retrosesi - Konvensional	27,560,683,088	6,183,885,246	<b>Total Conventional Retrocession Payable</b>
<b>Retrosesi Syariah</b>			<b>Syariah retrocession</b>
Utang Premi Retrosesi Umum			<i>General Premium Retrocession Payable</i>
Saldo Awal	1,043,502,021	1,188,323,757	<i>Beginning balance</i>
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	13,728,859,826	11,432,017,658	<i>Payable arising in the current year</i>
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	14,772,361,847	12,620,341,415	<i>Total payable</i>
Penyelesaian Tahun Berjalan	13,859,826,294	11,576,839,394	<i>Settlement in current year</i>
Saldo sebelum penurunan nilai	912,535,553	1,043,502,021	<i>Balance Before Impairment</i>
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-	<i>Allowance for impairment</i>
Saldo per 31 Desember	912,535,553	1,043,502,021	<i>Balance as at 31 Desember</i>
Utang Premi Retrosesi Jiwa - Syariah			<i>Premium Life Retrocession Payable-Syari'a</i>
Saldo Awal	73,369,189	85,813,620	<i>Beginning balance</i>
Utang yang Timbul di Tahun Berjalan	113,772,054	1,158,213,296	<i>Payable arising in the current year</i>
Jumlah Utang yang Harus Dibayar	187,141,244	1,244,026,916	<i>Total payable</i>
Penyelesaian Tahun Berjalan	1,630,728	1,170,657,727	<i>Settlement in current year</i>
	185,510,515	73,369,189	
Penyisihan Penurunan Nilai	-	-	<i>Allowance for impairment</i>
Saldo per 31 Desember	185,510,515	73,369,189	<i>Balance as at 31 Desember</i>
Jumlah Utang Premi Retrosesi - Syariah	1,098,046,068	1,116,871,210	<i>Total syariah retrocession payable</i>
Jumlah Utang Premi Retrosesi - Konven & Syariah	28,658,729,156	7,300,756,456	<i>Total retrocesion premium payable</i>
	31-Dec-14	31-Dec-13	
Hutang premi retrosesi berdasarkan jenis:			<i>Premium Retrocession payable based on:</i>
Hutang premi retrosesi umum - konvensional	27,505,527,767	5,371,041,078	<i>General Premium Retrocession payable-Conventional</i>
Hutang prem retrosesi jiwa - konvensional	55,155,321	812,844,168	<i>Life Premium Retrocession Payable-Conventional</i>
Hutang premi retrosesi umum - syariah	912,535,553	1,043,502,021	<i>General Premium Retrocession Payable-Syari'a</i>
Hutang premi retrosesi jiwa - syariah	185,510,515	73,369,189	<i>Lide Premium Retrocession Payable-Syari'a</i>
Jumlah hutang premi retrosesi	28,658,729,156	7,300,756,456	

23 Estimasi Klaim Retensi Sendiri	31-Dec-14		31-Dec-13		23. Estimated Own Claim Retention
	Saldo	Kenaikan (Penurunan)	Saldo	Classification of Business	
Kelas Bisnis	Balance as at 31-Dec-14	Increase (Decrease)	Balance as at 31-Dec-13		
Harta Benda	700,275,884,320	292,352,456,084	407,923,428,236	Goods and chattel	
Kendaraan Bermotor	17,066,429,334	581,566,254	16,484,863,080	Motor vehicles	
Pengangkutan	48,925,166,585	10,690,352,377	38,234,814,208	Transportation	
Rangka Kapal	114,246,185,075	28,197,071,538	86,049,113,537	Ship hull	
Rangka Pesawat	2,199,697,775	375,203,733	1,824,494,042	Fuselage	
Satelit	-	-	-	Satellite	
Energi	6,605,933,700	(890,232,968)	7,496,166,668	Energy	
Rekayasa	77,631,319,505	11,665,597,691	65,965,721,814	Engineering	
Tanggung Gugat	5,450,202,279	(10,404,185,825)	15,854,388,104	Liability	
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	1,904,958,810	67,259,916	1,837,698,894	Personal injury and health	
Kredit dan Surety Bond	52,569,279,519	21,821,818,673	30,747,460,846	Credit and surety bond	
Aneka	35,075,982,770	(7,673,149,176)	42,749,131,946	Miscellaneous	
Reasuransi Jiwa	52,865,684,705	21,279,919,045	31,585,765,661	Life reinsurance	
Jumlah	<u>1,114,816,724,377</u>	<u>368,063,677,341</u>	<u>746,753,047,036</u>	<b>Total</b>	

Kelas Bisnis	31-Dec-13		31-Dec-12		Classification of Business
	Saldo	Kenaikan (Penurunan)	Saldo		
	Balance as at 31-Dec-13	Increase (Decrease)	Balance as at 31-Dec-12		
Harta Benda	407,923,428,236	193,541,005,258	214,382,422,978	Goods and chattel	
Kendaraan Bermotor	16,484,863,080	7,958,975,489	8,525,887,590	Motor vehicles	
Pengangkutan	38,234,814,208	8,224,170,524	30,010,643,684	Transportation	
Rangka Kapal	86,049,113,537	33,962,152,947	52,086,960,590	Ship hull	
Rangka Pesawat	1,824,494,042	-	-	Fuselage	
Satelit	-	-	-	Satellite	
Energi	7,496,166,668	5,148,050,128	991,224,871	Energy	
Rekayasa	65,965,721,814	45,587,118,930	20,378,602,884	Engineering	
Tanggung Gugat	15,854,388,104	13,616,206,113	2,238,181,991	Liability	
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	1,837,698,894	1,518,437,838	319,261,056	Personal injury and health	
Kredit dan Surety Bond	30,747,460,846	(1,123,639,293)	31,839,243,152	Credit and surety bond	
Aneka	42,749,131,946	2,659,960,451	40,089,171,496	Miscellaneous	
Reasuransi Jiwa	31,585,765,661	16,026,207,936	15,559,557,725	Life reinsurance	
Jumlah	<u>746,753,047,036</u>	<u>327,118,646,320</u>	<u>416,421,158,018</u>	<b>Total</b>	

24 Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	31-Dec-14		31-Dec-13		24. Un-Earned Premium
	Saldo/Balance as at	Kenaikan (Penurunan)	Saldo/Balance as at	Classification of Business	
Kelas Bisnis	31-Dec-2014	Increase (Decrease)	31-Dec-2013		
Harta Benda	240,754,683,965	126,657,367,387	114,097,316,578	Goods and chattel	
Kendaraan Bermotor	32,096,455,988	11,145,590,510	20,950,865,478	Motor vehicles	
Pengangkutan	15,080,889,225	1,706,913,743	13,373,975,482	Transportation	
Rangka Kapal	44,067,072,561	17,392,403,667	26,674,668,893	Ship hull	
Rangka Pesawat	1,387,786,399	1,177,150,223	210,636,176	Fuselage	
Satelit	-	-	-	Satellite	
Energi	21,832,286,291	16,234,776,716	5,597,509,575	Energy	
Rekayasa	35,082,951,737	10,976,657,980	24,106,293,757	Engineering	
Tanggung Gugat	3,953,756,816	2,193,114,043	1,760,642,773	Liability	
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	21,355,130,531	17,388,219,320	3,966,911,211	Personal injury and health	
Kredit dan Surety Bond	222,280,010,566	175,510,986,261	46,769,024,305	Credit and surety bond	
Aneka	71,641,796,506	16,296,320,963	55,345,475,543	Miscellaneous	
Reasuransi Jiwa	205,882,592,198	11,025,688,292	194,856,903,906	Life reinsurance	
Jumlah Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	<u>915,415,412,784</u>	<u>407,705,189,107</u>	<u>507,710,223,677</u>	<b>Total Un-earned Premium</b>	



Kelas Bisnis	Saldo/Balance as at 31-Dec-13	Kenaikan/Penurunan Increase/decrease	Saldo/Balance as at 31-Dec-12	Classification of Business
Harta Benda	114,097,316,578	19,684,700,199	94,412,616,379	Goods and chattel
Kendaraan Bermotor	20,950,865,478	1,118,351,049	19,832,514,429	Motor vehicles
Pengangkutan	13,373,975,482	(1,621,081,671)	14,995,057,152	Transportation
Rangka Kapal	26,674,668,893	6,629,578,959	20,045,089,935	Ship hull
Rangka Pesawat	210,636,176	(1,145,454,053)	1,356,090,228	Fuselage
Energi	-	(97,660,274)	97,660,274	Satellite
Satelit	5,597,509,575	(378,487,929)	5,975,997,504	Energy
Rekayasa	24,106,293,757	8,766,896,439	15,339,397,318	Engineering
Tanggung Gugat	1,760,642,773	(8,287,149,413)	10,047,792,186	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	3,966,911,211	(1,630,159,737)	5,597,070,948	Personal injury and health
Kredit dan Surety Bond	46,769,024,305	32,231,181,833	14,537,842,472	Credit and surety bond
Aneka	55,345,475,543	25,652,643,016	29,692,832,527	Miscellaneous
Reasuransi Jiwa	194,856,903,906	95,155,909,667	99,700,994,238	Life reinsurance
Jumlah Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	507,710,223,677	176,079,268,085	331,630,955,591	Total un-earned premium

## 25 Test Kecukupan Liabilitas (LAT) Reasuransi Konvensional

Berikut adalah hasil perhitungan LAT yang dilakukan oleh KIS Aktuaria untuk reasuransi konvensional, dengan laporan Nomor : 2811/KIS/LA/01/2015 tanggal 15 Januari 2015, secara keseluruhan total cadangan yang tersedia dibandingkan dengan total nilai kini arus kas masa depan adalah sebagai berikut:

## 25. Liability Adequacy Test

Here are the results of calculations of LAT as performed by KIS Actuary for conventional reinsurance, with their report number: 2811/KIS/LA/01/2015 dated 15 January 2015 the overall total reserves available compared to the total present value of future cash flows is as follows:

No	Uraian / Description	Cadangan Neto / Net Reserve	Nilai Kini Arus Kas Masa Depan Berdasarkan Kontrak Asuransi / Present Value of Future Cash Flows Based on Insurance Contract	Tes Kecukupan Liabilitas / Liability Adequate Test (LAT)	Description	No
<b>A</b>	<b>Konvensional</b>				<b>Conventional</b>	<b>A</b>
1	Cadangan Atas PYBMP	751,654,243,856	625,432,149,339	126,222,094,517	Reserve for Unearned Premium	1
2	Cadangan Premi	47,497,263,555	8,515,758,161	38,981,505,394	Reserve for Premium	2
3	Cadangan Klaim	471,563,155,077	560,501,780,273	(88,938,625,196)	Reserve for Claim	3
	Jumlah Konvensional	1,270,714,662,488	1,194,449,687,773	76,264,974,715	Total	
<b>B</b>	<b>Syariah</b>				<b>Syariah</b>	<b>B</b>
1	Cadangan Atas PYBMP	21,677,412,415	19,101,669,792	2,575,742,623	Reserve for Unearned Premium	1
2	Cadangan Premi	13,258,919,943	3,593,639,133	9,665,280,810	Reserve for Premium	2
3	Cadangan Klaim	53,725,085,044	36,446,560,794	17,278,524,250	Reserve for Claim	3
	Jumlah Syariah	88,661,417,402	59,141,869,719	29,519,547,683	Total	
	Total	1,359,376,079,890	1,253,591,557,492	105,784,522,398	Total	

Data dari tabel tersebut dia atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan total cadangan teknis untuk reasuransi konvensional dan syariah yang tersedia lebih besar dari nilai kini arus kas masa depan berdasarkan kontrak asuransinya, sehingga cadangan yang ada telah mencukupi.

The data in the above table showed that overall total technical reserves for conventional and syariah reinsurance available is greater than the present value of future cash flows under the contract of insurance, so that there has been sufficient reserves.

	31-Dec-14	31-Dec-13	
<b>26 Kontribusi Diterima Dimuka</b>	-	<b>990,576,385</b>	<b>26. Contribution Received in Advance</b>
<b>27 Beban Yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>18,372,387,572</b>	<b>13,163,996,992</b>	<b>27. Accrued Expenses</b>
Beban Umum	18,372,387,572	13,163,996,992	General Expenses

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
 31 DESEMBER 2014 DAN 2013  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEARS ENDED  
 DECEMBER 31, 2014 AND 2013  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Biaya yang masih harus dibayar merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan karyawan, SDM dan umum, seperti: merit prestasi, jasa produksi karyawan dan beban SDM dan umum lainnya.

Accrued expenses relates to employees, human resources and general administrative, such as: merit system, employees' production bonus and other human resources expenses as well as other general expenses.

	31-Dec-14	31-Dec-13	
<b>28 Utang Pajak</b>	<b>(8,042,015,629)</b>	<b>11,020,412,361</b>	<b>28. Taxes Payable</b>
Terdiri dari :			
PPh Pasal 21	-	-	Income tax article 21
PPh Pasal 23	-	-	Income tax article 23
PPh Pasal 25 *)	(8,042,015,629)	11,020,412,361	Income tax article 25
Jumlah Utang Pajak	<u>(8,042,015,629)</u>	<u>11,020,412,361</u>	<b>Total</b>
<b>*) Perhitungan Pajak Penghasilan:</b>			<b>Income tax</b>
Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba (rugi) dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut:			<i>Reconciliation between profit (loss) before income tax based on statement of income and fiscal profit (loss):</i>
	2014	2013	
1) Laba Sebelum Pajak Penghasilan:	149,775,204,311	81,265,662,606	Profit before income tax:
Koreksi Pajak:			Tax Correction
2) Penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final:			Income after tax
a. Hasil Investasi	(90,288,427,596)	(59,404,022,140)	Investment income a
b. Zakat	(575,224,089)		Banking fee b
c. Jasa Giro	(438,142,266)	(310,744,327)	Income subject to final tax
Penghasilan kena pajak final	<u>(91,301,793,951)</u>	<u>(59,093,277,813)</u>	Permanent differences:
3) Beda Tetap:			Investment Income
Pendapatan Investasi			Income tax article 21
Pajak Penghasilan 21	7,172,710,518	5,190,795,777	Entertainments and representation
Jamuan dan Representasi	1,415,770,590	1,557,364,788	Employees medical expenses
Biaya Perawatan/Pengobatan Pegawai	1,494,391,438	2,008,028,695	Membership fee
Iuran Keanggotaan	634,760,079	732,454,037	Company vehicle expenses
Biaya Kendaraan Dinas	721,260,709	709,761,537	Hand phones and fax (30%)
Biaya Telepon Gengam dan Fax (30%)	137,413,128	118,476,803	Anniversary and relation expenses
Beban HUT dan Silaturahmi	175,637,971	32,241,781	Sports, recreations and mental fostering
Biaya Olah Raga, Rekreasi dan Bantal	137,922,303	71,160,106	Drinking expenses for employees
Jamuan Makan dan Minum Pegawai	316,175,513	39,530,800	<b>Total permanent differences</b>
Jumlah Beda Tetap	<u>13,839,095,187</u>	<u>10,459,814,324</u>	Temporary differences:
4) Beda Temporer:			Allowance for IBNR claims
Cadangan Klaim IBNR	916,463,739	23,926,150,216	Post employment benefit
Imbalan Pasca Kerja	1,477,422,000	4,463,657,931	Depreciation
Penyusutan	(317,761,949)	(472,956,788)	Allowance for receivables impairment
Cadangan Penurunan Nilai Piutang	3,295,510,374	1,021,242,789	<b>Total temporary differences</b>
a) Jumlah Beda Temporer	5,371,634,164	28,938,094,328	<b>Total permanent + temporary differences</b>
b) Jumlah Beda Tetap + Beda Temporer	19,210,729,351	39,397,908,652	<b>Taxable income</b>
Laba Kena Pajak (1+2+4b)	<b>77,684,139,711</b>	<b>61,570,293,446</b>	Current tax (25% x Rp 17.488.644.411)
Pajak Kini (25% x Laba kena pajak)	19,421,034,928	15,392,573,362	Tax credit:
Kredit Pajak:			Income tax article 25
PPh Pasal 25	11,379,019,299	4,372,161,000	Corporate income tax over/(under) payment
PPh Badan Lebih (Kurang Bayar)	<u>(8,042,015,629)</u>	<u>(11,020,412,361)</u>	

	31-Dec-14	31-Dec-13	
<b>29 Utang Zakat</b>	<b>575,224,089</b>	<b>447,438,374</b>	<b>29. Zakat Payable</b>
Merupakan utang zakat yang belum diselesaikan dengan saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 575.224.089,- dan Rp 447.438.374,-			<i>Represent zakat payable as of 31 December 2014 and 2013 amounting to Rp 575.224.089, dan Rp 447.438.374, respectively.</i>

	31-Dec-14	31-Dec-13	
<b>30 Liabilitas Imbalan Pasca Kerja</b>	<b>4,140,306,782</b>	<b>2,662,884,782</b>	<b>30. Post Service Benefit Liability</b>
Berdasarkan laporan aktuarial PT RAS Actuaris tanggal 19 Desember 2015 dan tanggal 19 Desember 2014, beban, Aset dan liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Desember 2014 sebesar 4,140,306,782 dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 2.662.884.782, masing-masing dengan rincian sebagai berikut:			<i>Based on the actuarial report of PT RAS Actuaris dated December 19, 2015 and dated December 19, 2014, expenses, assets and liabilities of post-retirement benefits by December 31, 2014 amounted to Rp4,140,306,782, - and as of December 31, 2013 amounted to Rp 2.662.884.782, respectively each with the following details</i>
<b>Liabilitas:</b>			<b>Liability</b>
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	37,214,223,168	31,382,153,316	<i>Present value of benefit obligation</i>
Nilai Wajar Aset Program	(14,238,139,725)	(13,805,494,928)	<i>Fair value of plan assets</i>
Status Pendanaan	22,976,083,443	17,576,658,388	<b>Funding status</b>
Liabilitas Masa Lalu Yang Masih Akan Diakui di Tahun-Tahun Mendatang	-	-	<i>Past service liabilities to be recognized in future years</i>
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Yang Belum Diakui	(18,835,776,661)	(14,913,773,606)	<i>Unrecognized actuarial gain (loss)</i>
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Akhir	<u>4,140,306,782</u>	<u>2,662,884,782</u>	<b>Net Liability at the End of Years</b>
<b>Beban:</b>			<b>Cost:</b>
Beban Jasa Kini	2,402,242,807	1,998,029,597	<i>Current service expenses</i>
Beban Bunga	2,343,452,834	1,151,641,620	<i>Interest expenses</i>
Hasil yang Diharapkan dari Aset Program	(1,095,723,791)	(1,139,152,994)	<i>Expected income from program assets</i>
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial yang Diakui	1,421,675,104	241,521,417	<i>Recognized actuarial gain (loss)</i>
Beban Jasa Lalu yang Vested	-	265,813,407	<i>Vested past service expenses</i>
Amortisasi Beban Jasa Lalu yang Belum Vested	-	-	<i>Amortization of unvested past service expenses</i>
	<u>5,071,646,954</u>	<u>2,517,853,047</u>	
Rekonsiliasi Beban dan Liabilitas Imbalan Pasca Kerja:			<i>Reconciliation between cost and liability of post employment benefit:</i>
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Awal	2,662,884,782	3,291,868,247	<i>Net liability at beginning of years</i>
Koreksi Saldo Aset Program			<i>Adjustment in the balance of plan assets</i>
Adjustment Saldo Awal Aset Program			<i>Adjustment in the beginning balance of plan assets</i>
Iuran Bersih yang Dibayarkan ke Aset Program	(3,403,922,733)	(2,868,669,372)	<i>Net contribution paid to Plan Asset</i>
Pembayaran Manfaat (Imbalan)	(190,302,221)	(278,167,139)	<i>Benefit paid</i>
Beban Imbalan Kerja Tahun Berjalan	5,071,646,954	2,517,853,047	<i>Current Service Cost</i>
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja akhir	<u>4,140,306,782</u>	<u>2,662,884,782</u>	<i>Net liability at end of years</i>
Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan biaya manfaat karyawan oleh aktuaris independen, sebagai berikut:			<i>The followings are major assumptions used in determining post employment benefit expenses by the independent actuary:</i>
Tingkat Diskonto	8,5% per annum	8,5% per annum	<i>Discount rate</i>
Kenaikan Gaji Rata-rata per Tahun	10%	10%	<i>Average salary increase per annum</i>
Usia Pensiun Normal	56 tahun	56 tahun	<i>Normal pension age</i>
Tingkat Mortalita	TMI III/2011	TMI III/2011	<i>Mortality rate</i>
Tingkat Cacat/Disability	5% TMI III/2011	5% TMI III/2011	<i>Disability rate</i>
Tingkat Pengunduran Diri	5%	5%	<i>Resignation rate</i>
Proporsi Pengambilan Pensiun Dini	0%	0%	<i>Proportion of early retirement</i>
Proporsi Pengambilan Pensiun Normal	100%	100%	<i>Portion of normal retirement</i>
Metode Aktuarial	Project unit credit	Project unit credit	<i>Actuary method</i>
Perusahaan menyerahkan pengelolaan aset pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti ke dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dan Perusahaan memberikan manfaat tambahan kepada karyawan berupa tunjangan hari tua melalui PT Asuransi Jiwasraya dengan perhitungan pada saat pensiun sebesar 60 x gaji dasar pegawai dengan premi ditanggung Perusahaan sebesar 70%.			<i>The Company has entrusted PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia with the management of its defined benefit pension plan, and the Company provides additional benefit in terms of old age benefit through PT Asuransi Jiwasraya, in which an employee is entitled to get payment equals to 60X of his basic salary upon his retirement; 70% of the insurance premium is payable by the Company.</i>

	31-Dec-14
<b>31 Utang Lain-lain</b>	<b>2,323,944,389</b>
Merupakan beban yang masih harus dibayar pada divisi syariah yang belum diselesaikan per 31 Desember 2014. Terdiri dari :	
- Beban pegawai yang masih harus dibayar	2,145,648,240
- Dana PKBL	178,296,149
	<u>2,323,944,389</u>

	31-Dec-13	
<b>31. Other Payables</b>	<b>2,805,330,808</b>	
Represents provision accrued on the unpaid sharia division of December 31, 2014, consisting of:		
- Personnel expenses accrued	2,805,330,808	
- fund debt PKBL	-	
	<u>2,805,330,808</u>	

	31-Dec-14
<b>32 Dana Tabarru (Peserta)</b>	<b>21,485,294,416</b>
Merupakan alokasi surplus dana tabarru untuk cadangan dengan rincian sebagai berikut:	
Saldo Awal	17,325,340,107
Alokasi Surplus Dana Tabarru	-
Dana Tabarru Tahun Berjalan	4,159,954,309
Jumlah Dana Tabarru (Peserta)	<u>21,485,294,416</u>

	31-Dec-13	
<b>32. Tabarru Fund (Participant)</b>	<b>17,325,340,107</b>	
The amount is allocation for tabarru fund surplus in the following breakdown:		
Beginning balance	10,833,529,505	
Tabarru fund surplus	(3,053,461,726)	
Current year tabarru fund	9,545,272,328	
<b>Total participant fund</b>	<u>17,325,340,107</u>	

### 33 Modal

Modal telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 463.000 (empat ratus enam puluh tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp463.000.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga milyar rupiah) oleh para pemegang saham, dengan rincian setoran saham sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp85.000.000.000,- (delapan puluh milyar Rupiah) merupakan setoran saham lama sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 8 Agustus 2008 nomor 12, yang dibuat dihadapan Umaran Mansjur, notaris di Jakarta Timur.
- b. Sebesar Rp 53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) terdiri dari:
  - 1) Sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) bersumber dari pengalihan cadangan umum Perseroan usaha konvensional menjadi modal setor usaha Syariah sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 29 November 2010 ; dan
  - 2) Sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) berupa inbreng melalui pengalihan hak atas asset milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia berupa tanah sesuai sertifikat hak guna bangunan Nomor 867/Cikini.
- c. Sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar Rupiah) merupakan pengalihan pinjaman Subordinasi menjadi setoran modal dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) kepada Perseroan, sebagaimana keputusan RUPS PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) tanggal 30 April 2013.
- d. Sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar Rupiah) tambahan modal disetor dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), telah disetor ke Perusahaan masing-masing tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dan tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp 100.000.000.000,-

### 33. Capital

Capital has been subscribed and paid amount 463,000 (four hundred and sixty three thousand) shares with a nominal value totaling Rp463.000.000.000,00 (four hundred and sixty-three billion Rupiah) by the shareholders, with details of deposit shares as follows:

- i. Amounting to Rp85.000.000.000 (eighty billion rupiahs) is old stock payment as evident from the deed number 12 dated 8 August 2008, which is made before Umaran Mansjur, notary in East Jakarta
- ii. Amounting to Rp 53,000,000,000 (fifty-three billion rupiahs) consisting of:
  - 1) Rp18.000.000.000 (eighteen billion rupiahs) originating from the transfer of the Company's general reserves of conventional business into Syariah unit paid up capital as stipulated in the General Meeting of Shareholders dated 29 November 2010, and
  - 2) Amounting to Rp35.000.000.000 (thirty five billion rupiahs) in the form the transfer of rights over the assets of the Company (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia in form of land use rights certificates number 867/Cikini.
- iii. Amounting to Rp75.000.000.000 (seventy five billion rupiahs) represents the transfer of the Subordinated loans into capital injection of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) to the Company, as evident from the company balance sheet as at 30 April 2013.

Amounting to Rp 250.000.000.000 (two hundred and fifty billion Rupiah) additional paid-in capital of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), the Company has been deposited into each of September 24, 2014 at Rp 150.000.000.000, -(one hundred and fifty billion rupiah) and dated December 17, 2014 amounted to IDR 100.000.000.000, -



(seratus milyar rupiah)

(one hundred billion rupiah)

Dengan adanya perubahan Modal Dasar tersebut, modal disetor Perusahaan telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham terdiri dari 463.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

The change in the authorized capital resulted in the amount of paid-in capital of 463.000 shares of par value of Rp 1.000.000 (one million rupiah) each in the following breakdown:

**2014**

Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Modal Disetor	Persentase Kepemilikan (%)	Shareholders
	Number of Shares	Paid-in Capital	Percentage of Interest	
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	462,999	462,999,000,000	99.99	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	1	1,000,000	0.01	Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo
Jumlah	463,000	463,000,000,000	100.00	Total

**2013**

Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Modal Disetor	Persentase Kepemilikan (%)	Shareholders
	Number of Shares	Paid-in Capital	Percentage of Interest	
PT Asuransi Kredit Indonesia (persero)	212,999	212,999,000,000	99.99	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	1	1,000,000	0.01	Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo
Jumlah	213,000	213,000,000,000	100.00	Total

	31-Dec-14	31-Dec-13	
<b>34 Pendapatan Premi</b>	<b>2,095,931,414,310</b>	<b>1,296,536,113,161</b>	<b>34. Premium Revenues</b>
Rincian pendapatan premi reasuransi adalah sebagai berikut:			In the following breakdown

31-Dec-14					
Kelas Bisnis	Premi Bruto (Gross Premium)	Premi Retrosesi (Retrocession Premium)	Penurunan(Kenaikan) PYBMP/Decrease (Increase) in Un-Earned	Jumlah Pendapatan Premi (Total Premium Revenues)	Classification of Business
Konvensional Reasuransi Umum					Conventional General Reinsurance
Harta Benda	854,206,164,382	(180,922,158,415)	(86,339,701,784)	586,944,304,182	Goods and chattel
Kendaraan Bermotor	91,177,887,639	-	(11,418,064,308)	79,759,823,331	Motor vehicles
Pengangkutan	77,216,331,198	(2,596,044,320)	(1,405,014,681)	73,215,272,197	Transportation
Rangka Kapal	126,919,067,003	(4,758,536,609)	(16,440,716,028)	105,719,814,365	Ship hull
Rangka Pesawat	1,176,157,739	(214,301,025)	(1,177,150,223)	(215,293,509)	Fuselage
Satelit	-	-	-	-	Satellite
Energi	44,346,919,292	(17,566,537,604)	(9,296,161,067)	17,484,220,620	Energy
Rekayasa	80,926,119,262	(9,839,069,603)	(8,300,169,790)	62,786,879,869	Engineering
Tanggung Gugat	27,328,201,833	(930,248,967)	(1,985,047,046)	24,412,905,820	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	38,348,752,435	(3,318,933,728)	(16,901,253,734)	18,128,564,973	Personal injury and health
Kredit dan Surety Bond	314,037,562,321	(4,455,504,806)	(174,952,806,551)	134,629,250,964	Credit and surety bond
Aneka	187,511,010,952	(18,325,079,683)	(12,443,901,583)	156,742,029,686	Miscellaneous
	<u>1,843,194,174,056</u>	<u>(242,926,414,761)</u>	<u>(340,659,986,795)</u>	<u>1,259,607,772,500</u>	
Reasuransi Jiwa	252,737,240,255	438,992,192	(39,907,917,796)	213,268,314,651	Life reinsurance
Jumlah	<u>2,095,931,414,310</u>	<u>(242,487,422,569)</u>	<u>(380,567,904,591)</u>	<u>1,472,876,087,151</u>	<b>Total</b>

31-Dec-13					
Kelas Bisnis	Premi Bruto (Gross Premium)	Premi Retrosesi (Retrocession Premium)	Penurunan (Kenaikan) PYBMP /Decrease (Increase) in Un-Earned	Jumlah Pendapatan Premi (Total Premium Revenues)	Classification of Business
Konvensional Reasuransi Umum					Conventional General Reinsurance
Harta Benda	437,706,578,120	(49,492,496,100)	(19,825,108,659)	368,388,973,361	Goods and chattel
Kendaraan Bermotor	58,102,238,069	-	(954,105,279)	57,148,132,789	Motor vehicles
Pengangkutan	73,362,677,530	(2,292,255,249)	1,276,274,771	72,346,697,052	Transportation
Rangka Kapal	99,832,929,273	(3,073,595,709)	(6,115,143,307)	90,644,190,256	Ship hull
Rangka Pesawat	1,283,497,406	-	556,105,744	1,839,603,150	Fuselage
Satelit	-	-	97,660,274	97,660,274	Satellite
Energi	18,192,298,577	(3,834,288,257)	951,146,246	15,309,156,567	Energy
Rekayasa	77,602,782,700	(7,966,792,090)	(8,211,504,119)	61,424,486,490	Engineering
Tanggung Gugat	13,557,372,807	(1,354,977,598)	8,222,639,854	20,425,035,064	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	18,104,206,730	(2,380,988,332)	1,875,359,229	17,598,577,627	Personal injury and health
Kredit dan Surety Bond	106,972,541,689	(3,501,274,401)	(31,134,241,545)	72,337,025,743	Credit and surety bond
Aneka	174,330,421,675	(8,062,426,264)	(25,338,831,031)	140,929,164,379	Miscellaneous
	<u>1,079,047,544,574</u>	<u>(81,959,094,001)</u>	<u>(78,599,747,822)</u>	<u>918,488,702,752</u>	
Reasuransi Jiwa	217,488,568,587	(1,125,929,023)	(88,589,159,597)	127,773,479,967	Life reinsurance
Jumlah	<u>1,296,536,113,161</u>	<u>(83,085,023,024)</u>	<u>(167,188,907,417)</u>	<u>1,046,262,182,720</u>	<b>Total</b>

35 Beban Klaim	31-Dec-14		31-Dec-13		35. Claim Expenses
	800,142,986,620		626,178,284,417		
2014					
Kelas Bisnis	Klaim Bruto (Gross Claim)	Klaim Retrosesi (Retrocession Claim)	(Penurunan) Kenaikan EKRS ((Decrease) Increase in EKRS)	Jumlah Beban Klaim (Total Claim Expenses)	Classification of Business
Klaim Reasuransi Konvensional					Conventional Reinsurance Claim
Reasuransi Umum					General Reinsurance
Harta Benda	356,658,389,976	(70,433,607,386)	(38,479,920,013)	247,744,862,577	Goods and chattel
Kendaraan Bermotor	47,494,542,474	-	1,082,257,840	48,576,800,315	Motor vehicles
Pengangkutan	25,396,623,246	(119,439,176)	13,452,306,836	38,729,490,906	Transportation
Rangka Kapal	48,876,927,503	(5,004,730,356)	17,891,614,851	61,763,811,997	Ship hull
Rangka Pesawat	69,277,977	-	375,203,733	444,481,710	Fuselage
Satelit	-	-	(32,553,425)	(32,553,425)	Satellite
Energi	20,503,907,453	(4,424,103,457)	547,631,076	16,627,435,072	Energy
Rekayasa	55,103,630,959	(3,121,438,034)	12,406,395,829	64,388,588,754	Engineering
Tanggung Gugat	12,262,823,026	-	(8,953,583,834)	3,309,239,192	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	5,701,444,381	-	(563,278,668)	5,138,165,713	Personal injury and health
Kredit dan Surety Bond	43,235,673,108	-	21,852,750,857	65,088,423,965	Credit and surety bond
Aneka	110,550,424,122	(21,510,985,641)	11,403,571,141	100,443,009,622	Miscellaneous
	<u>725,853,664,225</u>	<u>(104,614,304,051)</u>	<u>30,982,396,224</u>	<u>652,221,756,398</u>	
Reasuransi Jiwa	141,527,789,096	-	6,393,441,126	147,921,230,222	Life reinsurance
Jumlah	<u>867,381,453,321</u>	<u>(104,614,304,051)</u>	<u>37,375,837,350</u>	<u>800,142,986,620</u>	Total

2013

35 Beban Klaim	31-Dec-14		31-Dec-13		35. Claim Expenses
	800,142,986,620		626,178,284,417		
2013					
Kelas Bisnis	Klaim Bruto (Gross Claim)	Klaim Retrosesi (Retrocession Claim)	(Penurunan) Kenaikan EKRS ((Decrease) Increase in EKRS)	Jumlah Beban Klaim (Total Claim Expenses)	Classification of Business
Klaim Reasuransi Konvensional					Conventional Reinsurance Claim
Reasuransi Umum					General Reinsurance
Harta Benda	183,778,244,260	(29,477,279,910)	58,303,562,065	212,604,526,415	Goods and chattel
Kendaraan Bermotor	28,163,617,219	-	5,823,528,632	33,987,145,852	Motor vehicles
Pengangkutan	19,489,587,586	(49,380,000)	7,920,641,253	27,360,848,839	Transportation
Rangka Kapal	26,580,716,368	-	18,833,502,726	45,414,219,094	Ship hull
Rangka Pesawat	55,559,406	-	1,824,494,042	1,880,053,448	Fuselage
Satelit	-	-	-	-	Satellite
Energi	754,001,525	-	6,456,522,847	7,210,524,372	Energy
Rekayasa	18,011,041,018	(1,229,046,210)	19,808,207,277	36,590,202,084	Engineering
Tanggung Gugat	3,618,685,142	-	12,165,546,972	15,784,232,114	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	1,238,043,496	-	1,202,959,934	2,441,003,431	Personal injury and health
Kredit dan Surety Bond	22,976,037,608	-	8,926,468,483	31,902,506,091	Credit and surety bond
Aneka	68,514,689,561	(7,286,135,150)	(4,399,291,040)	56,829,263,372	Miscellaneous
	<u>373,180,223,189</u>	<u>(38,041,841,270)</u>	<u>136,866,143,192</u>	<u>472,004,525,111</u>	
Reasuransi Jiwa	148,532,832,878	-	5,640,926,428	154,173,759,306	Life reinsurance
Jumlah	<u>521,713,056,067</u>	<u>(38,041,841,270)</u>	<u>142,507,069,620</u>	<u>626,178,284,417</u>	Total

	31-Dec-14	31-Dec-13	
<b>36 Beban Komisi Netto</b>	<b>544,442,967,625</b>	<b>359,335,137,419</b>	<b>36. Net Commission Expense</b>
<b>2014</b>			
Kelas Bisnis	Beban Komisi (Commission Expense)	Pendapatan Komisi (Commission Income)	Beban komisi Bersih (Commission Expense)
			Classification of Business
Komisi Reasuransi Dibayar Konvensional			Paid reinsurance commission Conventional
Reasuransi Umum			General Reinsurance
Harta Benda	229,899,754,287	625,542,001	Goods and chattel
Kendaraan Bermotor	30,887,974,561	-	Motor vehicles
Pengangkutan	20,575,394,600	(2,195)	Transportation
Rangka Kapal	32,275,535,595	-	Ship hull
Rangka Pesawat	328,761,902	-	Fuselage
Energi	8,042,042,370	679,704,526	Energy
Rekayasa	23,426,240,568	139,785,230	Engineering
Tanggung Gugat	4,704,301,307	-	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	16,554,441,820	-	Personal injury and health
Kredit dan Surety Bond	59,054,420,687	-	Credit and surety bond
Aneka	55,795,866,347	-	Miscellaneous
	<b>481,544,734,043</b>	<b>1,445,029,562</b>	
Reasuransi Jiwa	64,384,191,603	40,928,459	Life reinsurance
Jumlah	<b>545,928,925,645</b>	<b>1,485,958,021</b>	<b>Total</b>

	<b>2013</b>			
Kelas Bisnis	Beban Komisi (Commission Expense)	Pendapatan Komisi (Commission Income)	Beban komisi Bersih (Commission Expense)	Classification of Business
Komisi Reasuransi Dibayar Konvensional				Paid reinsurance commission Conventional
Reasuransi Umum				General Reinsurance
Harta Benda	116,193,162,190	288,347,694	115,904,814,497	Goods and chattel
Kendaraan Bermotor	15,909,474,949	-	15,909,474,949	Motor vehicles
Pengangkutan	21,273,090,550	-	21,273,090,550	Transportation
Rangka Kapal	25,649,210,238	-	25,649,210,238	Ship hull
Rangka Pesawat	280,154,128	-	280,154,128	Fuselage
Satelit	2,375,459,022	253,388,723	2,122,070,300	Satellite
Energi	22,176,124,117	228,234,938	21,947,889,179	Energy
Rekayasa	3,724,343,455	-	3,724,343,455	Engineering
Tanggung Gugat	8,496,319,686	-	8,496,319,686	Liability
Kecelakaan Diri dan Kesehatan	38,560,788,000	-	38,560,788,000	Personal injury and health
Kredit dan Surety Bond	51,864,011,617	-	51,864,011,617	Credit and surety bond
Aneka	306,502,137,951	769,971,354	305,732,166,597	Miscellaneous
Reasuransi Jiwa	53,825,538,595	222,567,770	53,602,970,825	Life reinsurance
Jumlah	<b>360,327,676,546</b>	<b>992,539,124</b>	<b>359,335,137,419</b>	<b>Total</b>

<b>37 Beban Underwriting Lain Netto</b>	<b>3,720,566,976</b>	<b>1,718,151,407</b>	<b>37. Underwriting other expenses - Net</b>
---	----------------------	----------------------	--

<b>38 Pendapatan Ujrah</b>	<b>21,644,007,857</b>	<b>23,929,265,140</b>	<b>38. Ujrah Income</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

<b>39 Alokasi Surplus Dana Tabarru</b>	<b>1,170,512,044</b>	<b>2,355,249,242</b>	<b>39. Allocation of Tabarru Fund Surplus</b>
--	----------------------	----------------------	---

<b>40 Hasil Investasi</b>	<b>88,021,757,609</b>	<b>54,474,755,056</b>	<b>40. Investment Income</b>
---------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------



PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
 31 DESEMBER 2014 DAN 2013  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEARS ENDED  
 DECEMBER 31, 2014 AND 2013  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Terdiri dari:			
Bunga Deposito	65,656,768,058	31,229,859,293	Deposits interest
Obligasi	9,914,739,322	(9,863,142,148)	Bonds
Saham	878,316,341	20,975,597,550	Stocks
Reksadana	9,751,240,806	(3,887,736,370)	Mutual funds
Penyertaan	126,519,304	161,757,027	Capital investment
Selisih Kurs	1,694,173,777	15,251,507,969	Exchange rate difference
Capital Gain	-	4,074,420,569	Capital Gain
Jumlah Hasil Investasi Bruto	88,021,757,609	57,942,263,890	Gross Investment Income
Cadangan Penyisihan RDPT	-	(3,467,508,834)	Allowance of RDPT investment losses
Jumlah Hasil Investasi Neto	88,021,757,609	54,474,755,056	<b>Total</b>

Cadangan Penyisihan RDPT adalah kerugian administratif atas penurunan nilai pada saat redemption RDPT.

Allowance of RDPT investment losses is the administrative losses on impairment during redemption RDPT.

	31-Dec-14	31-Dec-13	
<b>41 Beban Usaha</b>	<b>89,760,425,384</b>	<b>71,307,482,683</b>	<b>41. Operating Expenses</b>
Terdiri dari:			
Beban Umum	76,165,900,414	57,781,154,412	General expenses
Beban Administrasi	7,652,780,963	8,640,513,227	Administrative expenses
Beban Pemasaran	5,941,744,007	4,885,815,044	Marketing expenses
Jumlah Beban Usaha	89,760,425,384	71,307,482,683	<b>Total</b>

	31-Dec-14	31-Dec-13	
<b>42 Penghasilan (Beban) Lain-lain</b>	<b>4,129,786,256</b>	<b>12,783,266,374</b>	<b>42. Other income (expenses)</b>
Hasil Lain-lain terdiri dari :			<b>Other income:</b>
Laba Beda Kurs Non Investasi	3,829,060,750	16,354,686,474	Gain on exchange rate of non investment
Jasa Giro	438,142,266	925,812,174	Banking fee
Bunga Piutang Pegawai	105,640,835	726,072,101	Interest on loans to employees
Laba pelepasan aset tetap	10,100,000	1,150,275,245	Net sales fix asset
Lain-lain	1,477,837,719	(180,598,455)	Miscellaneous
Jumlah Hasil Lain-lain	5,860,781,570	18,976,247,540	<b>Total</b>
Beban Lain-lain:			<b>Other expenses:</b>
Rugi Beda Kurs Non Investasi	-	-	Loss on exchange rate of non investment
Selisih Kurs Penerimaan/Pembayaran Reasuransi/Retrosesi	(316,558,864)	2,835,548,415	Exchange rate differences on receipt/payment of reinsurance/retrocession
Biaya Bank	321,470,369	391,459,698	Banking expenses
Beban Lainnya	1,726,083,808	29,682,685	Miscellaneous
Beban Bunga Subordinasi	-	312,500,000	Interest on subordination
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	-	2,623,790,367	Impairment of receivables
Jumlah Beban Lain-lain	1,730,995,314	6,192,981,165	<b>Total</b>
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain	4,129,786,256	12,783,266,374	<b>Total other income (expenses)</b>

	31-Dec-14	31-Dec-13	
<b>43 Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa</b>			<b>43. Transactions with Related Parties</b>
<b>Pemegang Saham:</b>			<b>Shareholders:</b>
<b>PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)</b>			<i>PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)</i>
Premi Reasuransi	175,011,740,476	21,632,627,806	Reinsurance premiums
Premi Retrosesi	622,771,723	-	Retrocession premiums
Klaim Reasuransi	11,133,125,427	-	Reinsurance claims
Beban Sewa Kantor	-	-	Office rental expenses
<b>Pejabat Kunci:</b>			<b>Key personnel:</b>
<b>Komisaris dan Direksi</b>	-	-	<b>Commissioners and directors</b>
Gaji/Honorarium	-	-	Salaries/remuneration
Tunjangan-Tunjangan	-	-	Allowance
Tantiem	-	-	Bonus

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
 31 DESEMBER 2014 DAN 2013  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA  
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS  
 FOR THE YEARS ENDED  
 DECEMBER 31, 2014 AND 2013  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31-Dec-14	31-Dec-13	
<b>44 Aset dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing</b>			<b>44. Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies</b>
<b>Aset</b>			<b>Assets</b>
Deposito (2014) USD 2,644,998.54; (2013) USD 2,644,998.54	42,452,094,756	42,484,464,648	Deposito (2014) USD 2,644,998.54; (2013) USD 2,644,998.54
Kas dan Bank (2014) : USD 68,284.09; (2013) : USD 196.701.73	974,065,560	2,397,585,198	Kas dan Bank (2014) : USD 68,284.09; (2013) : USD 196.701.73
Reksadana (2014) : USD 316,815.68; (2013) : USD 487,758.02	3,941,187,059	5,945,282,506	Reksadana (2014) : USD 316,815.68; (2013) : USD 487,758.02
Obligasi (2014) USD 5,282,723.90; (2013) USD 4,713,400.39	65,717,085,316	57,451,637,354	Obligasi (2014) USD 5,282,723.90; (2013) USD 4,713,400.39
	<u>113,084,432,691</u>	<u>108,278,969,706</u>	
<b>Piutang Reasuransi</b>			<b>Reinsurance Receivable</b>
USD (2014) : 2,368,396.42; (2013) : 44,346,530.48;	29,462,851,465	50,176,933,131	USD (2014) : 2,368,396.42; (2013) : 44,346,530.48;
EUR (2014) : USD 30,106.20; (2013) : USD 38,383.93	455,605,253	645,654,619	EUR (2014) : USD 30,106.20; (2013) : USD 38,383.93
JPY (2014) : 1,960,334.25; (2013) : 3,135,072.00	204,364,846	364,201,314	JPY (2014) : 1,960,334.25; (2013) : 3,135,072.00
SGD (2014) : 23,260.44; (2013) : 79,583.88	219,162,424	656,339,362	SGD (2014) : 23,260.44; (2013) : 79,583.88
GBP (2014) : 2,311.08; (2013) : 0.00	44,766,405	-	GBP (2014) : 2,311.08; (2013) : 0.00
KRW (2014) : 14,312,950.00; (2013) : 646,250.00	172,757,307	7,515,888	KRW (2014) : 14,312,950.00; (2013) : 646,250.00
SAR (2014) : 956.26; (2013) : 956.26	3,169,216	3,107,855	SAR (2014) : 956.26; (2013) : 956.26
MYR (2014) : 24,632.00; (2013) : 30,227.31	87,737,460	112,073,495	MYR (2014) : 24,632.00; (2013) : 30,227.31
	<u>30,650,414,376</u>	<u>51,965,825,664</u>	
<b>Piutang Retrosesi</b>			<b>Retrocession Receivable</b>
USD (2014) : 2,034,989.99; (2013) : 370,943.16	25,315,275,476	4,521,426,177	USD (2013) : 370,943.16
	<u>25,315,275,476</u>	<u>4,521,426,177</u>	
<b>Liabilitas</b>			<b>Liabilities</b>
<b>Utang Reasuransi</b>			<b>Reinsurance Liabilities</b>
USD (2014) : 695,732.30; (2013) : 588,668.29	8,654,909,812	7,175,277,787	USD (2014) : 695,732.30; (2013) : 588,668.29
SGD (2014) : 29,881.57; (2013) : 947.98	281,547,440	11,554,928	SGD (2014) : 29,881.57; (2013) : 947.98
JPY (2012) : (2014) : 621,153.00; (2013) : 0.00	64,755,200	-	JPY (2012) : (2014) : 621,153.00; (2013) : 0.00
EUR (2014) : 557.05; (2013) : 0.00	8,429,988	-	EUR (2014) : 557.05; (2013) : 0.00
	<u>9,009,642,440</u>	<u>7,186,832,715</u>	
<b>Utang Retrosesi</b>			<b>Retrocession Liabilities</b>
USD (2014) : 1,020,730.52; (2013) : 197,018.00	12,697,887,669	2,401,448,258	USD (2014) : 1,020,730.52; (2013) : 197,018.00
	<u>12,697,887,669</u>	<u>2,401,448,258</u>	
<b>Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan</b>			<b>Un-earned Premium</b>
USD (2014) : 1,489,635.25; (2013) : 1,550,439.51	18,531,062,510	18,898,307,187	USD (2014) : 1,489,635.25; (2013) : 1,550,439.51
JPY (2014) : 391,796.09; (2013) : 1,925,957.75	40,844,742	223,738,512	JPY (2014) : 391,796.09; (2013) : 1,925,957.75
SGD (2014) : 27,680.89; (2013) : 85,008.44	260,812,390	818,460,410	SGD (2014) : 27,680.89; (2013) : 85,008.44
GBP (2014) : 0.00; (2013) : 1,845.95	-	37,097,374	GBP (2014) : 0.00; (2013) : 1,845.95
EUR (2014) : 2,929.22; (2013) : 63,852.42	44,328,677	1,074,089,652	EUR (2014) : 2,929.22; (2013) : 63,852.42
AUD (2014) : 0.00; (2013) : 5,284.14	-	57,468,484	AUD (2014) : 0.00; (2013) : 5,284.14
MYR (2014) : 263.81; (2013) : 42,947.30	939,673	159,235,275	MYR (2014) : 263.81; (2013) : 42,947.30
THB (2014) : 0.00; (2013) : 54,305.04	-	40,287,823	THB (2014) : 0.00; (2013) : 54,305.04
SAR (2014) : 8.830.17; (2013) : 0.00	29,272,720	-	SAR (2014) : 8.830.17; (2013) : 0.00
	<u>18,907,260,712</u>	<u>21,308,684,717</u>	
<b>Estimasi Klaim Retensi Sendiri</b>			<b>Estimated own claim retention</b>
USD (2014) : 10,468,991.61; (2013) : 11,215,161.00;	130,234,255,628	136,701,597,429	USD (2014) : 10,468,991.61; (2013) : 11,215,161.00;
EUR (2014) : 171,603.37; (2013) : 62,927.66	2,596,920,131	1,058,533,857	EUR (2014) : 171,603.37; (2013) : 62,927.66
JPY (2014) : 18,906,722.21 (2013) : 6,919,132.50	1,971,025,790	803,795,623	JPY (2014) : 18,906,722.21 (2013) : 6,919,132.50
SGD; (2014) : 212,002.19 (2013) : 173,631.57	1,997,507,954	1,671,723,020	SGD; (2014) : 212,002.19 (2013) : 173,631.57
GBP (2014) : 47,629.38; (2013) : 220,293.75	922,597,285	4,427,161,985	GBP (2014) : 47,629.38; (2013) : 220,293.75
PHP (2014) : 0.00; (2013) : 695,037.00	-	190,808,595	PHP (2014) : 0.00; (2013) : 695,037.00
AUD (2014) : 450,000.00; (2013) : 77,956.04	5,431,500	847,822,561	AUD (2014) : 450,000.00; (2013) : 77,956.04
MYR (2014) : 468.55; (2013) : 544,225.60	1,733,061	2,017,819,815	MYR (2014) : 468.55; (2013) : 544,225.60
	<u>137,729,471,349</u>	<u>147,719,262,885</u>	
<b>Selisih Aset atas Liabilitas</b>	<u>(9,294,139,627)</u>	<u>(13,850,007,028)</u>	<b>Difference of assets and liabilities</b>

45 Informasi Segmen	2014			45.Segment information
	Konvensional (Conventional)	Syariah (Syariah)	Jumlah (Total)	
Investasi				Investment
Dana Jaminan	36,000,000,000	11,000,000,000	47,000,000,000	Guarantee fund
Deposito Berjangka	863,810,000,000	261,861,475,791	1,125,671,475,791	Time deposits
Deposit On Call	20,000,000,000	-	20,000,000,000	Deposit on Call
Obligasi	342,565,573,254	17,306,100,000	359,871,673,254	Bonds
Reksadana	43,726,582,158	8,697,845,989	52,424,428,147	Mutual funds
Saham yang Diperdagangkan	43,856,462,214	-	43,856,462,214	Stocks for trading
Penyertaan Saham	1,423,700,000	-	1,423,700,000	Capital investment
Piutang Reasuransi	426,371,916,625	67,660,479,275	494,032,395,900	Reinsurance receivables
Piutang Retrosesi	34,007,715,398	584,023,974	34,591,739,372	Retrocession receivables
PYBMP Bagian Retrosesi	81,327,573,012	-	81,327,573,012	Retrocession un-earned premium
Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	589,528,484,255	-	589,528,484,255	Retrocession estimated claim
Utang Klaim Reasuransi	45,865,819,610	3,226,153,957	49,091,973,567	Reinsurance claim payable
Utang Premi Retrosesi	27,560,683,087	1,098,046,069	28,658,729,156	Retrocession premium payable
Aset Tetap	50,854,509,430	183,846,251	51,038,355,681	Fixed assets
Pendapatan Premi	1,472,876,087,150	-	1,472,876,087,150	Premium income
Beban Underwriting	1,348,306,521,221	-	1,348,306,521,221	Underwriting expenses
Beban Komisi	544,442,967,625	-	544,442,967,625	Commission expenses
Pendapatan Ujroh	-	21,644,007,857	21,644,007,857	Ujroh income
Alokasi Surplus Dana Tabarru	-	1,170,512,044	1,170,512,044	Tabarru fund surplus allocation
Hasil Usaha	113,201,356,840	17,884,555,441	131,085,912,281	Operating income
	2013			
	Konvensional (Conventional)	Syariah (Syariah)	Jumlah (Total)	
Investasi				Investments
Dana Jaminan	36,000,000,000	11,000,000,000	47,000,000,000	Guarantee fund
Deposito Berjangka	518,646,125,000	113,265,460,445	631,911,585,445	Time deposits
Deposit On Call	-	-	-	Deposit on Call
Obligasi	354,524,483,509	20,361,100,000	374,885,583,509	Bonds
Reksadana	29,827,998,412	7,621,455,765	37,449,454,177	Mutual funds
Saham yang Diperdagangkan	43,749,544,400	-	43,749,544,400	Stocks for trading
Penyertaan Saham	1,423,700,000	-	1,423,700,000	Capital investment
Piutang Reasuransi	142,591,189,955	51,109,262,561	193,700,452,516	Reinsurance receivables
Piutang Retrosesi	6,289,046,384	584,388,084	6,873,434,468	Retrocession receivables
PYBMP Bagian Retrosesi	26,516,561,808	-	26,516,561,808	Retrocession un-earned premium
Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	279,687,537,638	-	279,687,537,638	Retrocession estimated claim
Utang Klaim Reasuransi	21,212,489,241	4,730,654,849	25,943,144,089	Reinsurance claim payable
Utang Premi Retrosesi	6,183,885,247	1,116,871,210	7,300,756,456	Retrocession premium payable
Aset Tetap	47,828,182,323	249,505,298	48,077,687,620	Fixed assets
Pendapatan Premi	1,046,262,182,720	-	1,046,262,182,720	Premium income
Beban Underwriting	987,231,573,243	-	987,231,573,243	Underwriting expenses
Beban Komisi	359,335,137,419	-	359,335,137,419	Commission expenses
Pendapatan Ujroh	23,929,265,140	-	23,929,265,140	Ujroh income
Alokasi Surplus Dana Tabarru	2,355,249,242	-	2,355,249,242	Tabarru fund surplus allocation
Hasil Usaha	55,126,664,565	17,450,096,595	72,576,761,160	Operating income

#### 46 Perkembangan Terakhir Peraturan Perasuransian

##### a. Modal Perusahaan Reasuransi

Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian dimana dalam pasal 6B ayat 2 disebutkan Perusahaan Reasuransi harus memiliki modal sendiri dengan tahapan sebagai berikut:

- i. Paling sedikit sebesar Rp 100.000.000.000 pada 31 Desember 2010
- ii. Paling sedikit sebesar Rp 150.000.000.000 pada 31 Desember 2012
- iii. Paling sedikit sebesar Rp 200.000.000.000 pada 31 Desember 2014

Sedangkan untuk perusahaan reasuransi yang memiliki unit kerja syariah diatur sebagai berikut:

- i. Paling sedikit sebesar Rp 12.500.000.000 pada 31 Desember 2008
- ii. Paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000 pada 31 Desember 2009
- iii. Paling sedikit sebesar Rp 50.000.000.000 pada 31 Desember 2010

Perusahaan sampai dengan posisi per 31 Desember 2014 baik untuk reasuransi konvensional maupun reasuransi syariah telah memenuhi ketentuan permodalan tersebut.

Sampai dengan tahun 2014 telah terealisasi pula pengalihan aset berupa tanah dan gedung senilai Rp. 35 milyar. Dan pengalihan pinjaman subordinasi sebesar Rp. 75 milyar dalam rangka pemenuhan modal kerja / ekuitas perusahaan.

##### b. Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011

Pada tahun 2011 telah keluar Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah pasal 41 disebutkan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 huruf a secara terpisah dari laporan keuangan tahunan untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi yang tidak berdasarkan prinsip syariah.

##### c. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : PER-09/BL/2011 tanggal 1 Desember 2011.

Pada tahun 2011 telah dikeluarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nomor: PER-09/BL/2011 tanggal 1 Desember 2011, tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Keputusan ini mencabut PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Beberapa keputusan dari peraturan tersebut sebagai berikut:

- i. Batas Tingkat solvabilitas minimum bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008, ditetapkan berdasarkan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
- ii. Perhitungan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dilakukan berdasarkan

#### 46. New Regulation Pronouncement in Insurance

##### a. Reinsurance Companies Capital

With the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 81 of 2008, the third amendment of the Government Regulation No. 73 of 1992 on operations of insurance companies where the article 6B paragraph 2 stipulates that reinsurance companies are required to have the following total equities:

- i. At least Rp 100.000.000.000 by 31 Desember 2010
- ii. At least Rp 150.000.000.000 by 31 Desember 2012
- iii. At least Rp 200.000.000.000 by 31 Desember 2014

Whereas for reinsurance companies with syariah units the following requirement applies:

- i. At least Rp 12.500.000.000 by 31 Desember 2008
- ii. At least Rp 25.000.000.000 by 31 Desember 2009
- iii. At least Rp 50.000.000.000 by 31 Desember 2010

By 31 December 2014 the Company has complied with the capital requirement for both conventional and syariah reinsurance.

Also by 2014 the transfer of assets in terms of land and office buildings valued at Rp. 35 billion was realized. And transfer of subordinated loans amounting to Rp. 75 billion in order to meet working capital or equity compliance.

##### b. Regulation of Minister of Finance No. 11/PMK.010/2011 dated 12 January 2011

In 2011 the Regulation of the Minister of Finance No. 11/PMK.010/2011 dated 12 January 2011 on financial health of insurance and reinsurance businesses with syariah principles was adopted, where the Article 40 paragraph 1 requires that insurance and reinsurance companies which maintain part of their businesses on the basis of syariah principles to prepare annual financial statements; whereas the Article 41 of the said regulation requires that the financial statements of syariah and non-syariah shall be prepared separately.

##### c. The Regulation of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number: PER-09/BL/2011 dated December 1, 2011.

In 2011 the Regulation of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board, No. PER-09/BL/2011 dated 1 December 2011 on Guidelines for Calculation of Minimum Solvency Limit Levels for Insurance and Reinsurance Companies was adopted. This regulation superseded PER-02/BL/2009 on Guidelines for Calculation of Minimum Solvency Level Limits for Insurance and Reinsurance Companies. Parts of the stipulation in the regulations read:

- i. The minimum limit level of solvency for insurance and reinsurance companies as referred to in Article 3 of the Decree of the Minister of Finance No. 424/KMK.06/2003 on Healthiness of Financial Insurance and Reinsurance Companies, as has been amended several times, the latest of which was by the Regulation of the Minister of Finance number 158/PMK.010 / 2008, shall be determined on the basis of risk of loss which may arise as a result of deviation in management assets and liabilities.
- ii. Calculation of risk of loss that may arise as a result of deviation in management of assets and liabilities referred to in Article 1 shall be conducted under guidelines for calculation of minimum limit of solvency



pedoman perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

- iii. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini tidak berlaku untuk laporan perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah maupun unit usaha syariah dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang tidak berdasarkan prinsip syariah.
  - iv. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini berlaku untuk laporan perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi periode Triwulan I yang berakhir 31 Maret 2012 dan seterusnya.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012, tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, yang berlaku sejak 1 Januari 2013.

Hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan di atas antara lain:

- i. Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus per seratus) dari modal minimum berbasis risiko.
  - ii. Liabilitas yang diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas wajib meliputi semua Liabilitas Perusahaan, termasuk cadangan teknis.
  - iii. Target Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus) dari modal minimum berbasis risiko.
  - iv. Kecukupan Investasi, Perusahaan wajib memiliki aset dalam bentuk investasi yang telah memenuhi ketentuan mengenai jenis, penilaian, dan pembatasan Aset Yang Diperkenankan ditambah Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk kas dan bank, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri dan Liabilitas lain kepada tertanggung.
- e. Keputusan Ketua Bapepam LK, Nomor : KEP-367/BL/2012, tanggal 9 Juli 2012, tentang Nilai Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksadana, yang berlaku sejak 1 Januari 2013.

Hal-hal yang diatur dalam keputusan tersebut antara lain:

- i. Ketentuan mengenai Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana diatur dalam Peraturan Nomor: IV.C.2, sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan ini.
  - ii. Manajer Investasi yang mengelola Reksadana wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksadana sesuai dengan peraturan Nomor: IV.C.2 lampiran Keputusan ini sejak tanggal 1 Januari 2013.
- f. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-09/BL/2012 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Hal-hal yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain:
- i. Bagian ke empat pasal 7 sampai dengan 9 mengatur tata cara perhitungan Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (CAPYBMP) dan Cadangan Atas Risiko Yang Belum Dijalani (CARYBD).
  - ii. Bagian ke enam pasal 11 mengatur tata cara perhitungan Cadangan klaim.
  - iii. Bagian ke tujuh pasal 12 mengatur tata cara perhitungan aset reasuransi.

level as referred to in the Appendix which is an integral part of the Regulations of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board.

- iii. The regulation of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board does not apply to report on calculation of solvency of insurance and reinsurance companies which run their entire business on principles of syariah and their syariah units as well as for those insurance and reinsurance companies which do not run their business on syariah principles.
  - iv. Regulation of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board is applicable for calculation of the solvency reports of insurance and reinsurance companies for the period ended March 31, 2012 and thereafter.
- d. The regulation of the Minister of Finance of the Republik f Indonesia No.: 53/PMK.010/2012 dated 3 April 2012, on Financial Healthiness of Insurance and Reinsurance Companies, effective 1 Januari 2013.

Matters regulated include:

- i. At any time those companies are to maintain solvability rate of 100% of their risk based minimum capital.
  - ii. Liabilities taken into account in calculating the solvability rate are the entire liabilities of the company inclusive of technical reserve.
  - iii. The targeted solvability rate referred to in point 2) shall at least 120% of risk based minimum capital.
  - iv. Adequacy of investment. Companies are required to have investments in permitted assets in terms of type, method added with permitted assets in terms of cash on hand and in banks, of at least equal to their technical reserves plus their own retention claims and other liabilities to their insured parties.
- e. The decree of Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number: KEP-367/BL/2012, tanggal 9 Juli 2012 on fair value of securities in mutual fund portfolio, which effective 1 January 2013.

Matters regulated include:

- i. Fair value of securities in mutual fund portfolio as is stipulated under paragraph IV C.2
  - ii. Investment managers who manage mutual funds must calculate the fair market value of the securities in the portfolio of Mutual Funds in accordance with the regulations Number: IV.C.2 since January 1, 2013.
- f. Regulation of the Chairman of Bapepam-LK No. PER-09/BL/2012 on Guidelines for Technical Allowance for Insurance Companies and Reinsurance Companies.
- Matters set out in these regulations include
- i. Part four chapters 7 through 9 set up procedures for calculation for the Unearned Premiums (CAPYBMP) and Reserves for Uncovered Period Risks (CARYBD).
  - ii. Part six of Article 11 govern the calculation of claims reserves
  - iii. Part seven of Article 12 govern the calculation of reinsurance assets.

#### 47 Manajemen Risiko Keuangan

Sehubungan dengan risiko keuangan, program manajemen risiko keuangan Perusahaan terfokus pada ketidakpastian pasar keuangan dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Risiko Pasar  
 Risiko pasar adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar meliputi tiga jenis, yaitu: risiko mata uang, risiko suku bunga, dan risiko harga lain.
- i. Risiko Mata Uang  
 Risiko mata uang timbul dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan kurs valuta asing. Perubahan nilai tukar memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perusahaan. Aset dan liabilitas Perusahaan dalam mata uang asing paling banyak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan sebagian besar pendapatan Perusahaan adalah dalam mata uang Rupiah.
- ii. Risiko Suku Bunga atas Nilai Wajar  
 Risiko suku bunga timbul dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Perusahaan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan. Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, perusahaan melakukan analisa pada pergerakan marjin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Tabel dibawah ini menggambarkan detail jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

Suku Bunga Tetap

Per 31 Desember 2014

	Kurang dari 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Tidak Dikenakan Bunga	Jumlah	
	<i>Less than One Year</i>	<i>More Than One Year</i>	<i>No Interest Charged</i>	<i>Total</i>	
<b>Aset</b>					<b>Assets</b>
Investasi					<i>Investments</i>
Deposito	1,145,671,475,791	-	-	1,145,671,475,791	<i>Deposits</i>
Surat Berharga:	-	-	-	-	<i>Securities</i>
Obligasi	-	359,871,673,254	-	359,871,673,254	<i>Bonds</i>
Reksadana	-	-	52,424,428,148	52,424,428,148	<i>Mutual funds</i>
Saham Diperdagangkan	-	-	43,856,424,638	43,856,424,638	<i>Stocks for trading</i>
Penyertaan Saham	-	-	1,423,700,000	1,423,700,000	<i>Share investment</i>
Kas dan Setara Kas	2,460,031,933	-	-	2,460,031,933	<i>Cash and cash equivalent</i>
Piutang Reasuransi	-	-	494,032,395,900	494,032,395,900	<i>Reinsurance receivable</i>
Piutang Retrosesi	-	-	34,591,739,372	34,591,739,372	<i>Retrosession receivable</i>
PYBMP Bagian Retrosesi	-	-	81,327,573,012	81,327,573,012	<i>Retrosession un-earned premium</i>
Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	-	-	589,528,484,255	589,528,484,255	<i>Estimated retrosession claim payable</i>
Piutang Hasil Investasi	-	-	5,616,204,594	5,616,204,594	<i>Investment income receivable</i>
Piutang Lain-lain	-	-	3,046,811,585	3,046,811,585	<i>Other receivables</i>
Aset Lain-lain	-	-	1,164,139,612	1,164,139,612	<i>Other assets</i>
Jumlah Aset Keuangan	1,148,131,507,724	359,871,673,254	1,307,011,901,116	2,815,015,082,094	<i>Total financial assets</i>

#### 47 Financial Risk Management

In relation to financial risk, the Company's financial risk management program focuses on the uncertainty of financial markets and minimize potential losses that affect the financial performance of the Company, including the following:

- a. Market risk  
 Market risks are risks related to fair value of financial assets or future cash flows of financial instruments which tend to fluctuate. The market risks include monetary risk, interest risk, and risk of commodities prices.
- i. Currency Risk  
 The monetary risk arises when future cash flows fluctuate due to fluctuation in financial instrument resulting from fluctuation in rates of foreign currencies. Assets and liabilities denominated in foreign currencies are mostly in U.S. dollars and most of the revenues of the Company are denominated in rupiah.
- ii. Interest Rate Risk on Fair Value  
 The interest risk arises when future cash flows fluctuate due to fluctuation in financial instrument resulting from fluctuation in interest rates. The Company supervises the impact of interest rate movements to minimize the negative impact on the Company. To measure the market risk of interest rate movements, the Company conducted an analysis on the movement of interest rates margins and on the maturity profile of assets and liabilities based on the schedule of interest rate changes.

The table below shows details on maturity of financial assets and financial liabilities influenced by interest rates.

<b>Liabilitas</b>				<b>Liabilities</b>			
Utang Klaim Reasuransi	-	-	49,091,973,567	49,091,973,567			Reinsurance claim payable
Utang Premi Retrosesi	-	-	28,658,729,156	28,658,729,156			Retrocession premium payable
Estimasi Klaim Retensi Sendiri	-	-	1,114,816,724,377	1,114,816,724,377			Estimated own claim retention
Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	-	-	915,415,412,784	915,415,412,784			Un-earned premium
Utang Lain-lain	-	-	2,323,944,389	2,323,944,389			Other payables
Beban Yang Masih Harus Dibayar	18,372,387,572	-	-	18,372,387,572			Accrued expenses
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	-	-	4,140,306,782	4,140,306,782			Post service benefit liability
Jumlah Liabilitas Keuangan	18,372,387,572	-	2,114,447,091,055	2,132,819,478,627			Total financial liabilities
Selisih Bersih	1,129,759,120,152	359,871,673,254	(807,435,189,939)	682,195,603,467			Net balance

iii. Risiko Harga Lain

Risiko harga lain timbul dimana nilai wajar atau arus kas masa depan instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain risiko yang timbul dari risiko suku bunga atau risiko mata uang), apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor spesifik pada instrumen keuangan individual atau penerbitnya, atau faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen keuangan serupa yang diperdagangkan di pasar (misal dampak penurunan indeks bursa saham, harga komoditas, atau variable risiko lain tertentu). Perusahaan tidak memiliki secara signifikan jenis aset keuangan yang dipengaruhi oleh faktor spesifik sebagaimana dimaksudkan di atas.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana suatu pihak atas instrumen keuangan akan menyebabkan kerugian keuangan terhadap pihak lain diakibatkan kegagalannya dalam memenuhi suatu kewajiban. Perusahaan memiliki kebijakan kredit untuk menetapkan batas kredit nasabah dan memantau saldonya secara berkelanjutan. Kualitas kredit dinilai setelah mempertimbangkan posisi keuangan dan pengalaman masa lalu nasabah. Perusahaan akan membentuk suatu penyisihan yang merupakan estimasi kerugian yang terjadi dalam akun piutang reasuransi, piutang retrosesi dan piutang lain-lain. Penyisihan digunakan untuk mencatat kerugian atas penurunan nilai suatu akun piutang, kecuali jika perusahaan merasa yakin bahwa tidak ada pemulihan yang mungkin terjadi terhadap tagihan tersebut. Pada saat itu, aset keuangan dianggap tidak tertagih dan akumulasi penyisihannya dihapuskan atas nilai tercatat dari aset keuangan.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit dan konsentrasi risiko yang dimiliki Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014. Eksposur maksimum dicatat berdasarkan nilai tercatat bersih yang dilaporkan di neraca.

iii. Other Price Risk

Other price risk arises when the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than the risk arising from interest rate risk or currency risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument or its issuer, or factors affecting all similar financial instruments traded in the market (eg the impact of decline in the stock market index, commodity price, or certain other risk variables). The Company does not have significant types of financial assets that are affected by specific factors, as referred to above.

b. Credit Risk

Credit risks are risks which may arise one party involved in financial instrument may cause financial loss to other party due to failure in meeting his responsibility. The Company has a credit policy to set customers credit limits and monitor sustainable balance. Credit quality is assessed after considering the financial position and past experience of customers. The Company will establish an allowance which represents the estimated losses that occur in reinsurance receivables and other receivables accounts. Allowance is used to record impairment losses on an account except, when the Company feels confident that no recovery may occur on those collectibles. At that time, the financial asset is considered uncollectible and the provision expenses are written off on the carrying value of financial assets.

The table below illustrates the maximum exposure to credit risk and concentration risk of the Company on 31 December 2014. Maximum exposure is recorded at the net carrying value reported in the balance sheet.

	Konsentrasi Resiko Kredit Concentration of Credit Risks			
	Korporasi <i>Corporate</i>	Lain-Lain <i>Other</i>	Eksposur <i>Maximum Exposure</i>	
Aset				Assets
Investasi				Investments
Deposito	1,145,671,475,791	-	1,145,671,475,791	Deposits
Surat berharga				Securities
Obligasi	359,871,673,254	-	359,871,673,254	Bonds
Reksadana	52,424,428,148	-	52,424,428,148	Mutual funds
Saham Yang Diperdagangkan	43,856,462,214	-	43,856,462,214	Stocks for trading
Penyertaan saham	1,423,700,000	-	1,423,700,000	Share investment
Kas dan setara kas	2,460,031,933	-	2,460,031,933	Cash and cash equivalent
Piutang reasuransi	494,032,395,900	-	494,032,395,900	Reinsurance receivable
Piutang retrosesi	34,591,739,372	-	34,591,739,372	Retrocession receivable
PYBMP Bagian Retrosesi	81,327,573,012	-	81,327,573,012	Retrocession un-earned premium
Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	589,528,484,255	-	589,528,484,255	Estimated retrocession claim payable
Piutang hasil investasi	5,616,204,594	-	5,616,204,594	Investment income receivable
Piutang lain-lain	3,046,811,585	-	3,046,811,585	Other receivables
Aset lain-lain	1,164,139,612	-	1,164,139,612	Other assets
Jumlah aset keuangan	2,815,015,119,670	-	1,610,021,636,930	Total financial assets

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika entitas menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangannya yang diselesaikan dengan penyerahan kas atau aset keuangan lainnya. Risiko likuiditas timbul jika Perusahaan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

d. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar, atau liabilitas dapat diselesaikan dengan dasar transaksi yang wajar. Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

c. Liquidity Risk

Liquidity risk arises when the Company is experiencing difficulty in securing sources of funding. Liquidity risk management means maintaining adequate cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and continuous supervision of the date of maturity of assets and financial liabilities.

d. Fair Value of Financial Assets and Liabilities

Fair value is an amount in which the asset could be exchanged, or liability can be solved on an arm's-length transactions. The table below illustrates the carrying value and fair value of financial assets and liabilities:



Diukur Pada	(Rp 000,000)						Measured at
	Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ( <i>Fair value through profit and loss</i> )	Pinjaman Diberikan dan Piutang ( <i>Loan and Receivable</i> )	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo ( <i>Held to Maturity</i> )	Tersedia Untuk Dijual ( <i>Available for Sale</i> )	Jumlah Perolehan Diamortisasi ( <i>Total Cost Amortized</i> )	Jumlah Nilai Tercatat ( <i>Carrying Amount</i> )	Nilai Wajar ( <i>Fair Value</i> )
<b>Aset</b>							<b>Assets</b>
Investasi							<i>Investments</i>
Deposito	-	-	1,145,671	-	-	1,145,671	<i>Deposits</i>
Surat Berharga :							<i>Securities</i>
Obligasi	-	-	-	359,872	-	359,872	<i>Bonds</i>
Reksadana	-	-	-	52,424	-	52,424	<i>Mutual funds</i>
Saham Yang Diperdagangkan	43,856	-	-	-	-	43,856	<i>Stocks for trading</i>
Penyertaan Saham	-	-	-	1,424	-	1,424	<i>Share investment</i>
Kas dan Setara Kas	-	2,460	-	-	-	2,460	<i>Cash and cash equivalent</i>
Piutang Reasuransi	-	494,032	-	-	-	494,032	<i>Reinsurance receivable</i>
Piutang Retrosesi	-	34,592	-	-	-	34,592	<i>Retrocession receivable</i>
PYBMP Bagian Retrosesi	-	-	-	81,328	-	81,328	<i>Retrocession un-earned premium</i>
Estimasi Klaim Bagian Retrosesi	-	-	-	589,528	-	589,528	<i>Estimated retrocession claim payable</i>
Piutang Hasil Investasi	-	5,616	-	-	-	5,616	<i>Investment income receivable</i>
Piutang Lain-lain	-	3,047	-	-	-	3,047	<i>Other receivables</i>
Aset Lain-lain	-	1,164	-	-	-	1,164	<i>Other assets</i>
Jumlah Aset Keuangan	43,856	540,911	1,145,671	1,084,576	-	2,815,014	<i>Total financial assets</i>
<b>Liabilitas</b>							<b>Liabilities</b>
Utang Klaim Reasuransi	-	-	-	49,092	-	49,092	<i>Utang Klaim Reasuransi</i>
Utang Premi Retrosesi	-	-	-	28,659	-	28,659	<i>Utang Premi Retrosesi</i>
Estimasi Klaim Retensi Sendiri	-	-	-	1,114,817	-	1,114,817	<i>Estimasi Klaim Retensi Sendiri</i>
Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	-	-	-	915,415	-	915,415	<i>Premi Yang Belum Merupakan</i>
Utang Lain-lain	-	-	-	2,324	-	2,324	<i>Utang Lain-lain</i>
Beban Yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	18,372	-	18,372	<i>Accrued Expenses</i>
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	-	-	-	4,140	-	4,140	<i>Post-Employment Benefits Liability</i>
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	-	-	-	2,132,819	-	2,132,819	<b>Total Financial Liabilities</b>
<b>Selisih Bersih</b>	43,856	540,911	1,145,671	(1,048,243)	-	682,195	<b>Net difference</b>

Nilai wajar atas investasi pada surat berharga per 31 Desember 2014 didasarkan kepada harga pasar pada tanggal tersebut.

The fair value of investments in marketable securities as of 31 December 2014 is based on the market price on that date.

**e. Risiko Suku Bunga atas Arus Kas**

Perusahaan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga pasar atas arus kas yang akan diterima di masa depan untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan.

Akun yang dipengaruhi oleh perubahan suku bunga pasar adalah deposito berjangka pada bank dan liabilitas diestimasi kesejahteraan karyawan.

**e. Interest Rate Risk on Cash Flows**

The Company supervises the impact of movements in market interest rates on cash flows to be received in the future to minimize the negative impact on the Company.

Accounts that are affected by changes in market interest rates are time deposits in banks and the estimated liability for employee welfare.

#### 48 PSAK yang Berlaku Efektif Tanggal 1 Januari 2015

Dalam tahun 2013 Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI telah menerbitkan PSAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2015 terdiri dari:

- 1) PSAK 1 (2013): Penyajian Laporan Keuangan  
PSAK 1 (2013) ini menggantikan PSAK 1 (2009) : Penyajian Laporan Keuangan.  
Standar yang baru ini merevisi mengenai komponen laporan keuangan, judul laporan laba rugi, penyajian dan pengungkapan informasi komparatif (komparatif minimum dan komparatif tambahan) serta penyajian penghasilan komprehensif lain (OCI).
- 2) PSAK 4 (Revisi 2013) "Laporan Keuangan Tersendiri"  
Standar yang baru ini merevisi sejumlah persyaratan pengungkapan yang telah ada dan menambahkan beberapa pengungkapan baru, antara lain:
  - a) Ruang lingkup hanya mencakup laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan.
  - b) Terdapat pengaturan mengenai penyusunan laporan keuangan tersendiri untuk entitas yang berhenti menjadi entitas investasi.
- 3) PSAK 15 (Revisi 2013) "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"  
PSAK 15 (Revisi 2013) ini menggantikan PSAK 15 (2009) : Investasi pada Entitas Asosiasi.
- 4) PSAK 24 (2013) "Imbalan Kerja"  
PSAK 24 (2013) ini menggantikan PSAK 24 (2010) : Imbalan Kerja  
Beberapa revisi penting pada standar ini adalah antara lain :
  - a) Penyajian dan pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial diakui secara langsung melalui OCI.
  - b) Pengakuan perubahan liabilitas (aset) imbalan pasti neto
    - (1) Membatasi pengakuan dalam laba rugi hanya bagi biaya jasa dan beban (penghasilan) bunga neto
    - (2) Pengukuran kembali yang terdiri atas:
      - (a) Keuntungan dan kerugian aktuarial;
      - (b) Imbal hasil aset program; dan
      - (c) Perubahan dalam dampak batas atas (*ceiling*) aset
    - (3) Diakui dalam OCI, dan tidak diizinkan untuk melakukan recycle ke laba rugi
    - (4) Dapat ditransfer ke saldo laba pada setiap periode
  - c) Pengakuan biaya jasa lalu.  
Biaya jasa lalu, baik yang sudah maupun belum vested akan diakui ketika amandemen atau kurtailmen terjadi (atau ketika terkait dengan restrukturisasi yang lebih luas, mana yang lebih dahulu)
  - d) Klarifikasi atas beberapa asumsi aktuarial  
Klarifikasi atas beberapa asumsi aktuarial antara lain mengenai biaya administrasi, definis penyelesaian, pajak dan perkiraan tingkat mortalitas.
  - e) Item-item pengungkapan
    - (1) Mempertimbangkan kritik atas pengungkapan IAS 19
    - (2) PSAK 24 (2013) memberikan prinsip pengungkapan imbalan pasti.
    - (3) Prinsip digunakan dalam mempertimbangkan informasi yang perlu untuk diungkapkan oleh entitas (mempertimbangkan juga materialitas).

#### 48. PSAK Effective 1 Januari 2015

In the years 2013 the Indonesian Accounting Standard Board - Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI has adopted the following PSAKs has becomes effective by January 1, 2015 :

- 1) PSAK 1 (2013): Presentation of Financial Statement  
This PSAK supersedes PSAK 1 (2009): Presentation of Financial Statement  
  
*This new standard revises the financial statements of the component, heading of the income statement, presentation and disclosure of comparative information (comparative minimum and comparative supplementary) as well as the presentation of other comprehensive income (OCI).*
- 2) PSAK 4 "Separate Financial Statements"  
*This new standard describes a number of existing disclosure requirements and adds some new disclosures, among others:*
  - a) *The scope includes separate financial statements for additional information.*
  - b) *There are regulations concerning the preparation of separate financial statements for the entity that is no longer the investment entity.*
- 3) PSAK 15 "Investments in Associates and Joint Ventures "  
*This PSAK supersedes PSAK 15 (2009): Investments in Associates*
- 4) PSAK 24 (2013) "Employee Benefits"  
*This PSAK 24 (2013) supersedes PSAK 24 (2010) : Employee Benefits  
Some important revisions to this standard are, among others:*
  - a) *Presentation and recognition of actuarial gains and losses are recognized through OCI.*
  - b) *Recognition of changes in liabilities (assets) for net defined benefit*
    - (1) *Restrict the recognition in profit or loss only for the cost of services and expenses (income) net interest*
    - (2) *Measurement which consists of:*
      - (a) *Actuarial gains and losses;*
      - (b) *The yield on plan assets; and*
      - (c) *Changes in the impact of the upper limit (ceiling) of assets*
    - (3) *Recognized in OCI, and not allowed to do recycle to income statements*
    - (4) *Can be transferred to retained earnings at each reporting period.*
  - c) *Recognition of past service costs.*  
*Past service costs, either already or not yet vested will be recognized when the amendment or curtailment occurs (or when associated with a broader restructuring, whichever comes first)*
  - d) *Clarification of some actuarial assumptions*  
*Clarification on some of the actuarial assumptions, among others on administrative costs, the definition of settlement, tax and estimated mortality rate.*
  - e) *Items disclosure which consists of:*
    - (1) *Consider the criticism for the disclosure IAS 19*
    - (2) *IAS 24 (2013) provide disclosure of for defined benefit principle.*
    - (3) *The principle used in considering the information that needs to be disclosed by the entity (considered also materiality).*

- |  |   |
|--|---|
| <p>(4) Pengungkapan tambahan</p> <p>(a) Deskripsi naratif dari risiko yang dianggap signifikan.</p> <p>(b) Keuntungan dan kerugian aktuarial dari perubahan asumsi demografis, terpisah dari yang timbul dari asumsi keuangan.</p> <p>(c) Nilai wajar aset program dibagi dalam kelompok aset berdasarkan sifat dan risiko, dan apakah memiliki nilai pasar kuotasian (PSAK 68)</p> <p>(d) Asumsi aktuarial yang signifikan yang digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan pasti</p> <p>(e) Analisis sensitivitas atas bagaimana perubahan yang memungkinkan dari asumsi aktuarial yang signifikan akan berdampak kepada kewajiban imbalan pasti</p> <p>f) Imbalan terminasi (pesangon)</p> <p>(1) Menegaskan bahwa pesangon dibedakan dengan imbalan lain yang terkait dengan pemberian jasa, seperti imbalan pasca kerja dan imbalan yang bergantung (conditional) pada pemberian jasa di masa depan</p> <p>(2) Pesangon diakui antara yang lebih awal dari ketika tawaran telah mengikat (tidak dapat ditarik); atau ketika biaya restrukturisasi yang terkait diakui sesuai PSAK 57.</p> <p>g) Imbalan kerja jangka pendek<br/>         Imbalan kerja (selain dari pesangon) yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan dimana pekerja memberikan jasa terkait.</p> <p>5) PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian"</p> <p>6) PSAK 66 "Pengaturan Bersama"<br/>         PSAK 66: Pengaturan Bersama menggantikan:</p> <p>a) PSAK 12 (2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama</p> <p>b) ISAK 12: Pengendalian Bersama Entitas-Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer</p> <p>7) PSAK 67 "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"<br/>         PSAK 67 memberikan ketentuan transisi atas persyaratan pengungkapan untuk entitas anak, pengaturan bersama, entitas asosiasi dan entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasi.</p> <p>8) PSAK 46 (2014) "Pajak Penghasilan"<br/>         PSAK 46 (2014) ini menggantikan PSAK 46 (2010) : Pajak Penghasilan Standar yang baru ini merevisi sejumlah aturan yang telah ada dan menambahkan aturan baru, antara lain:</p> <p>a) Mengatur aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi.</p> <p>b) Mengatur aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar</p> <p>9) PSAK 48 (2014) "Penurunan Nilai Aset"<br/>         PSAK 48 (2014) ini menggantikan PSAK 48 (2009) : Penurunan Nilai Aset</p> <p>10) ISAK 27 (2014) "Peralihan Aset dari Pelanggan"</p> <p>11) ISAK 29 (2014) "Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka"<br/>         ISAK 29 (2014) menggantikan PSAK 33 : Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum</p> | <p>(4) Additional disclosures:</p> <p>(a) Narrative description of the risks were considered significant.</p> <p>(b) Gains and losses from changes in demographic assumptions, separately of which comes from the financial assumptions.</p> <p>(c) <i>The fair value of plan assets are divided into groups according to the nature and risk assets, and whether it has a quoted market value (PSAK 68)</i></p> <p>(d) <i>Significant actuarial assumptions used in determining the defined benefit obligation</i></p> <p>(e) The sensitivity analysis on how the changes are enabling of the significant actuarial assumptions will affect the defined benefit obligation</p> <p>f) Rewards termination (severance payment)</p> <p>(1) Confirms that the severance pay distinguished with other benefits related with the provision of services, such as post-employment benefits and rewards that depend (conditional) on remuneration in the future.</p> <p>(2) Severance payment is recognized among the earlier of when the offers was binding (irrevocably); or when the related restructuring costs are recognized in accordance with PSAK 57.</p> <p>g) Short-term employee benefits<br/>         Employee benefits (other than severance pay) are expected to be settled wholly before twelve months after the end of the annual reporting period in which the employee provides related services.</p> <p>5) PSAK 65 "Consolidated Financial Statements"</p> <p>6) PSAK 66 "Joint Arrangements"<br/>         This PSAK supersedes:</p> <p>a) PSAK 12 (2009): Interest in Joint Venture</p> <p>b) ISAK 12: Jointly Controlled Entities - Non Monetary Contributions by Venturer</p> <p>7) PSAK 67 "Disclosure of Interest in Other Entities"<br/>         PSAK 67 provides the transitional provisions of the disclosure requirements for subsidiaries, joint arrangements, associates and unconsolidated structured entities.</p> <p>8) PSAK 46 (2014) "Income Tax"<br/>         This PSAK 46 (2014) supersedes PSAK 46 (2010) : Income Tax<br/>         This new standard revises a number of existing rules and add new rules, among others:</p> <p>a) Regulate deferred tax assets and liabilities from assets that are not depreciated as measured using the revaluation model.</p> <p>b) Regulate deferred tax assets and liabilities from investment property measured using the fair value mode</p> <p>9) PSAK 48 (2014) "Impairment of Assets"<br/>         This PSAK supersedes PSAK 48 (2009) : Impairment of Assets</p> <p>10) ISAK 27 (2014) "Transfers of Assets from Customers"</p> <p>11) ISAK 29 (2014) "Stripping Cost in Production Phase of a Surface Mine"<br/>         This PSAK supersedes PSAK 33 (2014)</p> |
|--|---|

Entitas sedang melakukan penelaahan PSAK-PSAK tersebut di atas dalam rangka penerapannya sepanjang relevan dengan praktek-praktek yang dilaksanakan di perusahaan yang bergerak dibidang usaha asuransi dan reasuransi .

**49 Tanggung Jawab Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan, sesuai dengan paragraph 15 PSAK 1 (Revisi 2009) Penyajian Laporan Keuangan.

*The Management is assessing the impact of those standards on the financial statements, in view of adopting them so far they are relevant to practices in insurance and reinsurance companies.*

**49 Responsibility for Financial Statements**

*The Management is responsible for the preparation and the content of the financial statements, in compliance with paragraph 15 of the Indonesian Financial Accounting Standard 1 (Revision 2009) Presentation of Financial Statements.*



